PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

[Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 28) tanggal penetapan 18 November 2025 tanggal pengundangan 18 November 2025]

buku I

www.bappeda.jatengprov.go.id

COPYRIGHT 2025

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR **28 TAHUN 2025**
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan merupakan merupakan salah satu pendukung agar Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan baik, efisien dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan umum dan Pembangunan berkelanjutan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka konsistensi antara perencanaan Pembangunan dengan penggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, perlu menyusun rencaa kerja pemerintah daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026; dan
b. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD 2025 - 2029 dan RPJPD Tahun 2025 – 2045.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 bertujuan sebagai :

a. pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2026;
b. pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, Prioritas dan Plafon anggaran sementara, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa tengah tahun anggaran 2026; dan
c. acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota tahun 2026.

Pasal 4

Dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 terdiri atas:

a. narasi RKPD Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
b. data dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;dan
c. rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi jawa tengah tahun anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 November 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal **18 November 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2025 NOMOR 28**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Kepala Biro Hukum
197007291996031001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar xiii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-6
1.4. Maksud dan Tujuan I-7
1.5. Sistematika I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2 Kondisi Demografi II-9
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-15
2.2.1 Kondisi Ketahanan Pangan II-19
2.3 Kondisi Perekonomian Daerah II-22
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-22
2.3.2 PDRB Per Kapita II-30
2.3.3 Inflasi II-34
2.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson II-35
2.3.5 Indeks Daya Saing Daerah II-37
2.3.6 Investasi II-39
2.3.7 Pertanian II-44
2.3.8 Koperasi, usaha kecil, dan menengah II-53
2.3.9 Perdagangan II-57
2.3.10 Perindustrian II-60
2.3.11 Pariwisata II-61
2.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-62
2.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman II-74
2.3.14 Perhubungan II-79
2.3.15 Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa II-91
2.4 Kondisi Sumber Daya Manusia II-93
2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-93
2.4.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) II-94
2.4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) II-95
2.4.4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) II-97
2.4.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) II-99
2.4.6 Indeks Pembangunan Kebudayaan II-100
2.4.7 Pendidikan II-101
2.4.8 Kesehatan II-105
2.4.9 Kesejahteraan Sosial II-116
2.4.10 Tenaga kerja II-121
2.4.11 Perlindungan Perempuan dan Anak II-128
2.4.12 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana II-132
2.4.13 Kepemudaan dan olahraga II-134
2.4.14 Perpustakaan II-137

2.4.14 Transmigrasi II-139
2.5 Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan II-140
2.5.1 Daya Dukung dan Daya Tampung II-140
2.5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) II-143
2.5.3 Perubahan Iklim II-144
2.5.4 Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup II-147
2.5.5 Rehabilitasi Lahan Kritis dan Ekosistem Pesisir II-150
2.5.6 Konservasi dan Perlindungan Hutan II-152
2.5.7 Pemanfaatan hutan dan Kapasitas Pengelolaan Hutan II-153
2.5.8 Pertambangan II-155
2.5.9 Penataan Ruang II-159
2.5.10 Energi dan Sumber Daya Mineral II-169
2.5.10 Penanggulangan Bencana II-182
2.6 Kondisi Tata Kelola Pemerintahan II-206
2.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi II-206
2.6.2 Pelayanan Publik II-207
2.6.3 Demokrasi II-209
2.6.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik II-210
2.6.5 Penelitian dan Pengembangan II-216
2.6.6 Kebudayaan II-219
2.6.7 Kearsipan II-221
2.6.8 Akuntabilitas Kinerja II-222
2.6.9 Manajemen ASN II-223
2.6.10 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-226
2.6.11 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-229
2.6.12 Perencanaan II-234
2.6.13 Keuangan II-235
2.6.14 Pengawasan II-236
2.6.15 Pertanahan II-238
2.7 Kondusivitas Daerah II-242
2.8 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Realisasi RPD Sampai Dengan Tahun 2024 ..... II-244
2.9 Permasalahan Pembangunan II-245
2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-245
2.9.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-255
2.9.3 Isu Strategis Daerah II-266
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ... III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Dinamika Perekonomian Global III-1
3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional III-3
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah III-4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-6
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-7
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-12
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-16
3.2.4 Sumber Pendanaan Lainnya III-19

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026 ..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-2
4.2.1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-2
4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... IV-4
4.2.3 Prioritas Pembanguna Nasional dalam RKP Tahun 2026 ..... IV-10
4.2.4 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional Tahun 2026 ..... IV-11
4.3 Program Prioritas Gubernur Dan Wakil Gubernur..... IV-26
4.3.1 Program Prioritas IV-26
4.3.2 Program Intervensi IV-29
4.3.3 Program Aksi..... IV-33
4.3.4 Program Taktis..... IV-42
4.4 Inovasi Pembangunan Daerah.....IV-270
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1
5.1 Kondisi Kabupaten/Kota..... V-1
5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia V-1
5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi V-2
5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) V-4
5.1.4 Persentase Penduduk Miskin V-5
5.1.5 Persandingan Capaian Indikator Makro V-7
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota. V-9
5.3 Kebijakan Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan..... V-10
5.3.1 Arahan Per Wilayah Pengembangan V-11
5.4 Target Indikator Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Capaian Provinsi..... V-30
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-1
6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026..... VI-1
6.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah..... VI-2
6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar VI-2
6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar VI-8
6.2.3 Urusan Pilihan..... VI-18
6.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... VI-25
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VII-1
7.1 Indikator Kinerja Utama..... VII-1
7.2 Indikator Kinerja Daerah VII-2
7.3 Indikator Kinerja Program VII-12
BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah II-3
Tabel 2.2 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019 ..... II-4
Tabel 2.3 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah, 2020-2024 ..... II-9
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2024 ..... II-9
Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk per Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-10
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2020-2024 dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024 ..... II-11
Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..... II-13
Tabel 2.8 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-14
Tabel 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... II-15
Tabel 2.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... II-19
Tabel 2.11 Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak Provinsi Jawa Tengah (2017-2024) II-20
Tabel 2.12 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024 ..... II-21
Tabel 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%) II-26
Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa (Juta Rp) II-31
Tabel 2.15 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta Rupiah) II-32
Tabel 2.16 Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2020 – 2024 ..... II-39
Tabel 2.17 Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-40
Tabel 2.18 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah II-50
Tabel 2.19 Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... II-53
Tabel 2.20 Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 ..... II-54
Tabel 2.21 Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... II-54
Tabel 2.22 Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2019-2024 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah II-55
Tabel 2.23 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... II-57
Tabel 2.24 Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta US$) II-57

Tabel 2.25 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta US$) II-58
Tabel 2.26 Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta US$) II-58
Tabel 2.27 Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024..... II-59
Tabel 2.28 Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024..... II-59
Tabel 2.29 Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 Triwulan III II-60
Tabel 2.30 Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024..... II-60
Tabel 2.31 Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024..... II-61
Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024..... II-61
Tabel 2.33 Kondisi Permukaan Jalan Sesuai Kewenangan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024..... II-62
Tabel 2.34 Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024..... II-63
Tabel 2.35 Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024..... II-63
Tabel 2.36 Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2024 ..... II-65
Tabel 2.37 Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... II-66
Tabel 2.38 Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-66
Tabel 2.39 Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024..... II-67
Tabel 2.40 Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah II-69
Tabel 2.41 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2017 – 2024..... II-70
Tabel 2.42 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2024..... II-71
Tabel 2.43 Jumlah embung di Jawa Tengah berdasarkan sumber pendanaanya..... II-71
Tabel 2.44 Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023..... II-72
Tabel 2.45 Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis..... II-72
Tabel 2.46 Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023..... II-73
Tabel 2.47 Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024..... II-76
Tabel 2.48 Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024..... II-76

Tabel 2.49 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 ..... II-78
Tabel 2.50 Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 melalui APBD Provinsi II-78
Tabel 2.51 Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025..... II-79
Tabel 2.52 Capaian Kualitas Pelayanan Transportasi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024..... II-79
Tabel 2.53 Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024..... II-80
Tabel 2.54 Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2020-2024..... II-81
Tabel 2.55 Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2020 – 2024..... II-81
Tabel 2.56 Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2024 ..... II-82
Tabel 2.57 Perkembangan Pelayanan ASDP Tahun 2020 – 2024 ..... II-83
Tabel 2.58 Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara Tahun 2020 – 2024..... II-84
Tabel 2.59 Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024..... II-84
Tabel 2.60 Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024..... II-85
Tabel 2.61 Perlengkapan Jalan Terpasang Tahun 2020 – 2024 ..... II-85
Tabel 2.62 Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan Ruas Jalan Provinsi 2023-2024..... II-86
Tabel 2.63 Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 - 2024..... II-86
Tabel 2.64 Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah Tahun 2022-2024..... II-86
Tabel 2.65 Perlintasan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2024..... II-87
Tabel 2.66 Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2024..... II-87
Tabel 2.67 Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan Tahun 2024..... II-88
Tabel 2.68 Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Tahun 2020 – 2024..... II-89
Tabel 2.69 Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Tahun 2021 – 2024..... II-89
Tabel 2.70 Rekapitualasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2018-2024 ..... II-90
Tabel 2.71 Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 - 2024..... II-90
Tabel 2.72 Penumpang Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2019-2024..... II-91
Tabel 2.73 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Tahun 2024..... II-97
Tabel 2.74 Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender 2020-2024..... II-99
Tabel 2.75 Perkembangan Komponen IPG 2019-2024 Provinsi Jawa Tengah II-101

Tabel 2.76 Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender 2018-2022 ..... II-101
Tabel 2.77 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018 – 2023 ..... II-102
Tabel 2.78 Capaian Partisipasi Pendidikan Menengah di Jawa Tengah (Persen) II-103
Tabel 2.79 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-103
Tabel 2.80 Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024 ..... II-104
Tabel 2.81 Persentase Pendidik yang Tersertifikasi Pada Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%) II-104
Tabel 2.82 Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%) II-109
Tabel 2.83 Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2021-2023 ..... II-111
Tabel 2.84 Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-112
Tabel 2.85 Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... II-113
Tabel 2.86 Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024 ..... II-114
Tabel 2.87 Cakupan Kepesertaan UHC Tahun 2024 ..... II-114
Tabel 2.88 Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-116
Tabel 2.89 Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-117
Tabel 2.90 Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-117
Tabel 2.91 Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan 2023-2024 ..... II-118
Tabel 2.92 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... II-123
Tabel 2.93 Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... II-124
Tabel 2.94 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%) II-125
Tabel 2.95 Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... II-125
Tabel 2.96 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... II-126
Tabel 2.97 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... II-126
Tabel 2.98 Jumlah Not in Employment, Education or Training (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... II-127
Tabel 2.99 Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019 - 2024 ..... II-127

Tabel 2.100 Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... II-129
Tabel 2.101 Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-129
Tabel 2.102 Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2020-2024 ..... II-130
Tabel 2.103 Data Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-131
Tabel 2.104 Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 ..... II-132
Tabel 2.105 Perkembangan Tribina 2020-2024 ..... II-133
Tabel 2.106 Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 2024 ..... II-135
Tabel 2.107 Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional II-136
Tabel 2.108 Capaian Indeks Pembangunan Olahraga Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-137
Tabel 2.109 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024 (Orang) II-137
Tabel 2.110 Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-138
Tabel 2.111 Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... II-140
Tabel 2.112 Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-147
Tabel 2.113 Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..... II-149
Tabel 2.114 Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024 ..... II-149
Tabel 2.115 Penanganan Lahan Kritis (Penanaman/ Vegetatif) di Jawa Tengah II-150
Tabel 2.116 Penanganan Lahan Kritis (Sipil Teknis/ Bangunan KTA) di Jawa Tengah II-151
Tabel 2.117 Perkembangan Kelembagaan Desa Peduli DAS Lestari di Jawa Tengah II-151
Tabel 2.118 Rehabilitasi Mangrove Di Jawa Tengah II-151
Tabel 2.119 Kerusakan Kawasan Hutan di Jawa Tengah II-152
Tabel 2.120 Produksi Kayu di Jawa Tengah II-153
Tabel 2.121 Penggunaan Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Jawa Tengah II-153
Tabel 2.122 Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah II-154
Tabel 2.123 Perkembangan Nilai Transaksi Ekonomi KTH di Jawa Tengah II-154
Tabel 2.124 Perkembangan Nilai Ekonomi KUPS di Jawa Tengah II-155
Tabel 2.125 Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..... II-157
Tabel 2.126 Perkembangan *Good Mining Practice* (GMP) di Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024 ..... II-158

Tabel 2.127 Update Status RTRW Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Tengah Per 3 November 2025 ..... II-159
Tabel 2.128 Progress Legislasi RDTR Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Per 3 November 2025 terdapat 64 RDTR yang sudah (3)Perda/(61)Perkada II-163
Tabel 2.129 Rata – Rata Luasan RTH Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023 ..... II-167
Tabel 2.130 Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang Tahun 2024 ..... II-168
Tabel 2.131 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..... II-173
Tabel 2.132 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..... II-174
Tabel 2.133 Indeks Ketersediaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... II-178
Tabel 2.134 Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-201
Tabel 2.135 Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020– 2024 ..... II-202
Tabel 2.136 Jumlah Korban Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 ..... II-202
Tabel 2.137 Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 ..... II-203
Tabel 2.138 Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-203
Tabel 2.139 Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2024 ..... II-204
Tabel 2.140 Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... II-205
Tabel 2.141 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2020 - 2024 ..... II-205
Tabel 2.142 Data Bantuan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 ..... II-205
Tabel 2.143 Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-208
Tabel 2.144 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik II-213
Tabel 2.145 Program/ Indikator Kinerja Tingkat Capaian Kinerja 2020-2024 ..... II-214
Tabel 2.146 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi II-215
Tabel 2.147 Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/ Implementasi Penelitian Tahun 2019-2024 ..... II-217
Tabel 2.148 Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant Tahun 2019-2023 ..... II-218
Tabel 2.149 Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-219
Tabel 2.150 Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-219
Tabel 2.151 Data Objeak Pemajuan Kebudayaan (OPK) Jawa Tengah II-220

Tabel 2.152 Lembaga/SDM Kesenian Berdasarkan Wilayah Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-220
Tabel 2.153 Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-221
Tabel 2.154 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2023 ..... II-222
Tabel 2.155 Jumlah Pengunjung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-222
Tabel 2.156 Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... II-223
Tabel 2.157 Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... II-224
Tabel 2.158 Jumlah ASN Berdasarkan Usia Tahun 2024 ..... II-224
Tabel 2.159 Jumlah Fasilitasi Tugas Belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..... II-225
Tabel 2.160 Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019-2024 ..... II-225
Tabel 2.161 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-230
Tabel 2.162 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023 ..... II-235
Tabel 2.163 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..... II-236
Tabel 2.164 Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-238
Tabel 2.165 Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 ..... II-239
Tabel 2.166 Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-239
Tabel 2.167 Pelatihan Yang Telah Dilakukan dalam Rangka Mendukung Akses Reforma Agraria II-241
Tabel 2.168 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..... II-243
Tabel 2.169 Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPKD Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPD Tahun 2024 - 2026 ..... II-244
Tabel 3.1 Kinerja dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global (%) III-1
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 ..... III-5
Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024 ..... III-8
Tabel 3.1 Kinerja dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global (%) III-1
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 ..... III-5
Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024 ..... III-8
Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024 (%) III-9

Tabel 3.5 Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... III-10
Tabel 3.6 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... III-10
Tabel 3.7 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024 ..... III-12
Tabel 3.8 Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... III-13
Tabel 3.9 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... III-16
Tabel 3.10 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024 ..... III-17
Tabel 3.11 Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... III-17
Tabel 3.12 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... III-17
Tabel 3.13 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... III-18
Tabel 3.14 Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-19
Tabel 3.15 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... III-20
Tabel 3.16 Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... III-21
Tabel 3.17 Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Triwulan II Tahun 2025 ..... III-23
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 ..... IV-1
Tabel 4.2 Telaah Terhadap Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... IV-3
Tabel 4.3 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Daerah Tahun 2026 ..... IV-11
Tabel 4.4 Keselarasan Kebijakan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... IV-12
Tabel 4.5 Dukungan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2026 ..... IV-14
Tabel 4.6 Penjabaran Program Prioritas IV-27
Tabel 4.7 Penjabaran Program Intervensi IV-30
Tabel 4.8 Penjabaran Program Aksi IV-35
Tabel 4.9 Penjabaran Program Taktis IV-43
Tabel 4.10 Penjabaran Prioritas Daerah Tahun 2026 ..... IV-51
Tabel 4.11 Penjabaran Program Strategis Nasional (ProSN) IV-269
Tabel 5.1 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024 ..... V-1
Tabel 5.2 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024 ..... V-3
Tabel 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024 ..... V-4
Tabel 5.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2024 ..... V-5

Tabel 5.5 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah V-12
Tabel 5.6 Target Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026 ..... V-30
Tabel 6.1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... VI-29
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... VII-1
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... VII-2
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... VII-12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen I-6
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah II-1
Gambar 2.2 Peta Evaluasi Curah Hujan Bulan Desember 2024 Jawa Tengah..... II-3
Gambar 2.3 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024..... II-16
Gambar 2.4 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2024 ..... II-17
Gambar 2.5 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024..... II-18
Gambar 2.6 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun (2020-2024)..... II-19
Gambar 2.7 Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tahun (2020-2024)..... II-20
Gambar 2.8 Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-21
Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2024 (c-to-c) II-23
Gambar 2.10 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Se-Pulau Jawa Tahun 2024 (c-to-c, %)..... II-23
Gambar 2.11 Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (c-to-c, %) II-24
Gambar 2.12 Kontribusi dan Pertumbuhan Perekonomian Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (%)..... II-25
Gambar 2.13 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 (persen) II-28
Gambar 2.14 Peranan/Kontribusi Kabupaten/KotaTerhadap Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (persen) II-29
Gambar 2.15 Peranan/Kontribusi Kabupaten/KotaTerhadap Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (persen) II-30
Gambar 2.16 PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2022-2024 ..... II-31
Gambar 2.17 Rata-Rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 (Juta Rupiah)..... II-34
Gambar 2.18 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2024 (%) II-35
Gambar 2.19 Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024..... II-35
Gambar 2.20 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-36
Gambar 2.21 Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022..... II-37
Gambar 2.22 Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Komponen Pembentuk Tahun 2022 dan 2023..... II-37
Gambar 2.23 Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Pilar Tahun 2023 ..... II-38

Gambar 2.24 Capaian Skor IDSD Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-38
Gambar 2.25 Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Asal Negara II-41
Gambar 2.26 Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Sektor II-41
Gambar 2.27 Jumlah Izin yang Diterbitkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 ..... II-42
Gambar 2.28 Nilai PMTB dan Kontribusi PMTB Terhadap PDRB Jawa Tengah (ADHB) Tahun 2019 – 2024 (%) II-43
Gambar 2.29 Nilai ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 ..... II-44
Gambar 2.30 Perkembangan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di Jawa Tengah Tahun 2021-2025 ..... II-45
Gambar 2.31 Perkembangan Produksi Bawang Merah dan Cabai Besar Tahun 2021-2025 ..... II-46
Gambar 2.32 Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2021-2025 ..... II-46
Gambar 2.33 Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur Tahun (2020-2024) II-47
Gambar 2.34 Perkembangan Populasi Sapi Potong, Kambing, dan Ayam Tahun (2020-2024) II-48
Gambar 2.35 Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-49
Gambar 2.36 Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-51
Gambar 2.37 Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-52
Gambar 2.38 Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-52
Gambar 2.39 Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2024 (%) II-69
Gambar 2.40 Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m3) Tahun 2019 – 2024 ..... II-71
Gambar 2.41 Penanganan RTLH Provinsi Jawa Tengah status Desember 2024 ..... II-77
Gambar 2.42 Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah II-80
Gambar 2.43 Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah II-82
Gambar 2.44 Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah II-84
Gambar 2.45 Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023 dan 2024 ..... II-92
Gambar 2.46 IPM Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-94
Gambar 2.47 Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024 ..... II-95
Gambar 2.48 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-96
Gambar 2.49 Perkembangan IKG Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-98
Gambar 2.50 Perkembangan IDG Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-99

Gambar 2.51 Perkembangan Komponen IDG Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-100
Gambar 2.52 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024 ..... II-105
Gambar 2.53 Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2020-2024 ..... II-106
Gambar 2.54 Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2020-2024 ..... II-107
Gambar 2.55 Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2020-2024 ..... II-107
Gambar 2.56 Tren Kasus Balita Gizi Buruk (BB/TB) Tahun 2020 -2024 ..... II-108
Gambar 2.57 Angka Prevalensi Stunting Berdasarkan SKI Tahun 2023 ..... II-110
Gambar 2.58 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2024 (Februari-Agustus) (%) II-119
Gambar 2.59 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-119
Gambar 2.60 Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-120
Gambar 2.61 Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2024 ..... II-120
Gambar 2.62 TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%) II-121
Gambar 2.63 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 (%) II-121
Gambar 2.64 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018-2024(Juta Rupiah) II-122
Gambar 2.65 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah) II-123
Gambar 2.66 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024 (%) II-124
Gambar 2.67 Nilai IPLM Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... II-139
Gambar 2.68 Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah II-141
Gambar 2.69 Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah II-142
Gambar 2.70 Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah II-142
Gambar 2.71 Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah II-143
Gambar 2.72 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 ..... II-144
Gambar 2.73 Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-145
Gambar 2.74 Tren Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2023 ..... II-146
Gambar 2.75 Kontribusi Sektor Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (%) II-146
Gambar 2.76 Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah II-156
Gambar 2.77 Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY II-170
Gambar 2.78 Sebaran Pembangkit Operasi 150-500 KV di Jawa Tengah dan DIY II-170
Gambar 2.79 Sebaran Pembangkit Operasi 20 KV di Jawa Tengah dan DIY II-171
Gambar 2.80 Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2024 (GWh) II-172

Gambar 2.81 Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2024 Tahunan (Unit) II-173
Gambar 2.82 Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2024 ..... II-175
Gambar 2.83 Potensi Teknis EBT Jawa Tengah II-176
Gambar 2.84 Peta Infrastruktur dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Region III II-177
Gambar 2.85 Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Semarang-Demak II-179
Gambar 2.86 Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Pekalongan-Pemalang II-180
Gambar 2.87 Land subsidence rate in the North Coast of Central Java Indonesia based on Sentinel-1 SAR data in 2016–2021 ..... II-181
Gambar 2.88 Pembangunan Infrastruktur Konservasi Air Tanah II-182
Gambar 2.89 Peta Bahaya Banjir Provinsi Jawa Tengah II-183
Gambar 2.90 Peta Bahaya Banjir Bandang Provinsi Jawa Tengah II-184
Gambar 2.91 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Jawa Tengah II-185
Gambar 2.92 Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Jawa Tengah II-186
Gambar 2.93 Peta Bahaya Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah II-187
Gambar 2.94 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah II-188
Gambar 2.95 Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jawa Tengah II-189
Gambar 2.96 Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jawa Tengah II-190
Gambar 2.97 Peta Bahaya Tsunami Provinsi Jawa Tengah II-191
Gambar 2.98 Peta Bahaya Epidemi Provinsi Jawa Tengah II-192
Gambar 2.99 Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Provinsi Jawa Tengah II-193
Gambar2.100 Peta Bahaya Covid-19 Provinsi Jawa Tengah II-194
Gambar2.101 Peta Bahaya Likuifaksi Provinsi Jawa Tengah II-195
Gambar2.102 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Dieng II-196
Gambar2.103 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Lawu II-196
Gambar2.104 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merapi II-197
Gambar2.105 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merbabu II-198
Gambar2.106 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Slamet II-198
Gambar2.107 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sumbing II-199
Gambar2.108 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sindoro II-200
Gambar2.109 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Ungaran II-200
Gambar2.110 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah II-203
Gambar2.111 Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-206
Gambar2.112 Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-208
Gambar2.113 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-209
Gambar2.114 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-211
Gambar2.115 Penghargaan tertinggi Nasional SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia II-212

Gambar2.116 Presentase Penduduk yang Terfasilitasi Pengurusan Dokumen KTP-el (%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-226
Gambar2.117 Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (%) II-227
Gambar2.118 Presentase Jumlah Data Kependudukan yang Terintegrasi dalam Sistem IKD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-228
Gambar2.119 Klasifikasi Tingkat Kemandirian Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Persen) II-230
Gambar2.120 Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023 dan 2024 ..... II-231
Gambar2.121 Presentase Desa yang Memiliki Pasar Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-232
Gambar2.122 Jumlah Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) Di Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-233
Gambar2.123 Sebaran Jumlah Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-233
Gambar2.124 Sebaran Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-234
Gambar2.125 Indeks Integritas Nasional Jawa Tengah dibandingkan Nasional Tahun 2021-2023 ..... II-237
Gambar2.126 Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 ..... II-243
Gambar 4.1 Kegiatan Dokter Spesialis Keliling IV-270
Gambar 5.1 Infografis tentang Sebaran Kondisi Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang disandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah V-7
Gambar 5.2 Infografis tentang Sebaran Kondisi Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah V-8
Gambar 5.3 Infografis Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah V-9
Gambar 5.4 Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah V-10
Gambar 5.5 Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Tengah V-11

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Tahun 2024 menandai terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini ditegaskan dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025, yang mengakomodir visi, misi serta program Kepala Daerah terpilih. Sehingga perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 merupakan implementasi tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029.

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun juga dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029. Dengan demikian, RKPD Tahun 2026 mendukung pencapaian Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih serta Program Prioritas Nasional.

Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2026 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-peraturan turunannya. Selain itu beberapa permendagri yang juga dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 yaitu Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 juga memperhatikan proyeksi target dalam RKPD Tahun 2025. Dalam RKPD Tahun 2026 juga memuat hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025, disamping rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berpedoman pada kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 diarahkan dalam rangka "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional", upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi antara lain: (1) peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan; (2) penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan; (3) pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (4) penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal; (5) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan; (6)penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; (7) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF); (8) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk "Penguatan Landasan Pembangunan Daerah", dengan prioritas daerah meliputi: (1) Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah; (2) Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif Dan Berbasis Lingkungan; dan (3) Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter. Selanjutnya, RKPD Tahun 2026 disusun dengan menyinergikan program strategis Jawa Tengah dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antarwilayah, lintas sektor, dan *pentahelix* pelaku pembangunan. Pengembangan pola kerja sama antarwilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah Jawa Tengah.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottom-up*),

serta berorientasi tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Selain itu penyusunan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result,* berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen RKPD Tahun 2026 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 meliputi: 1) Persiapan yaitu penyampaian surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan, serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2026; 2) Konsultasi publik sekaligus pembukaan masa musrenbang; 3) Forum perangkat daerah; 4) Musrenbang wilayah (musrenbangwil) dan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah (rakortekrenbangda); 5) Musrenbang provinsi; 6) Fasilitasi RKPD Tahun 2026 oleh Kemendagri; 7) Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan DPRD dalam bentuk dialog interaktif eksekutif dan legislatif; dan 8) Penetapan RKPD Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 12; Tambahan Lembaran Daerah 153);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361).

1.3. Hubungan Antar dokumen

Dokumen RKPD menjadi bagian dari proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban dalam manajemen pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunannya, RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan berpedoman dengan RKP Tahun 2026. Dimana kemudian RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). RKPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS pada tahapan penganggaran. Selanjutnya pada saat pertanggungjawaban, dokumen RKPD akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPJ), sehingga RKPD sebagai dokumen tahunan memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran hingga pertanggungjawaban.

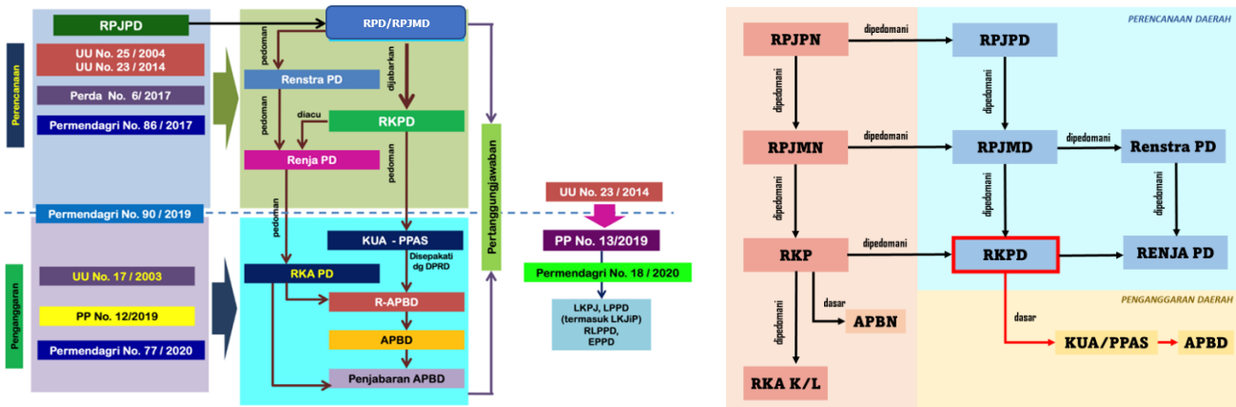

Sumber: diolah

Gambar 1.1.
Hubungan Antardokumen

Penyusunan dokumen RKPD memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*sustainable development goals* (SDGs), rancangan *road map* reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan *stunting*, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026; dan
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025–2045.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah yang tertuang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026;

2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026; dan
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5. Sistematika

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

1. **Buku I,** dokumen RKPD Tahun 2026 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2024 dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2024; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi perekonomian daerah; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dalam RPJMD, telaah pokok pikiran, keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta inovasi pembangunan daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi sebagai panduan penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

2. **Buku II**, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, terdiri dari:
   1) Capaian Indikator Kinerja Utama;
   2) Capaian Indikator Kinerja Daerah;
   3) Capaian Indikator Kinerja Program.
3. **Buku III**, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km^2 atau sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan, serta meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

b. Letak Geografis dan Kondisi Topografi

Secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur, sehingga secara ekonomi posisi sangat strategis karena berada di antara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta – Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

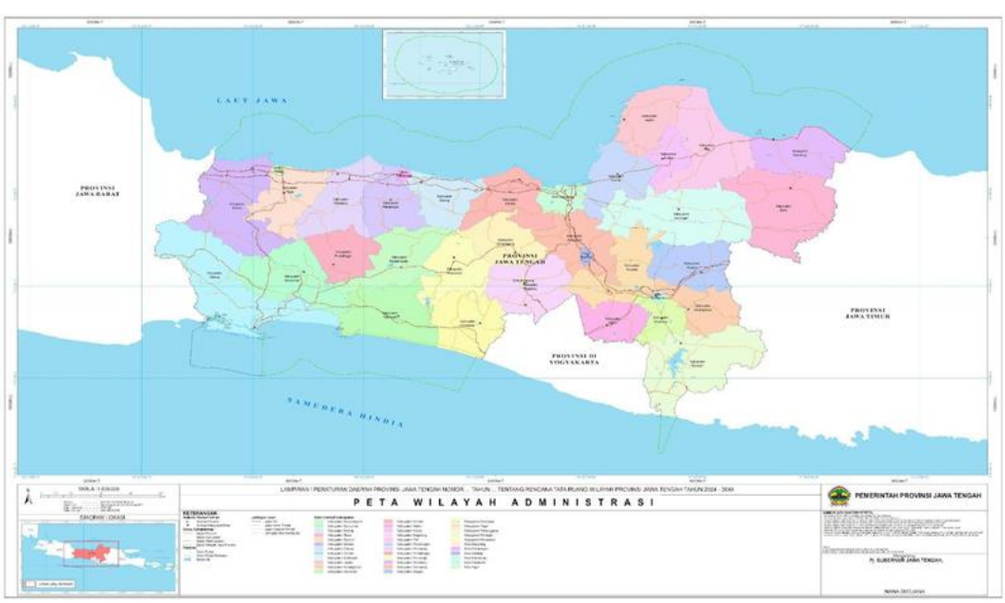

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah. 2023

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah meliputi *organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol, aluvial*, serta *gromosol* yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Potensi sumber daya mineral yang tersebar meliputi 32 jenis mineral non logam (*Phospat, Asbes, Talk, Mika, Leusite, Oker, Granit, Dasit, Diorit*, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, *Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonite*, Batuapung, *Trass, Diatome, Marmer*, Batu gamping, *Dolomit, Basal, Andesit*, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, *Kalsit, Zeolit*, Sirtu, Batu Sabak, *Toseki*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangaan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

d. Kondisi Hidrologi

Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas untuk dipulihkan yaitu DAS Serayu, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Progo (Jateng, DIY), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Citanduy (Jabar, Jateng), DAS Bodri, DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Garang, DAS Serang, DAS Babakan, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Comal, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Luk Ulo, dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Tengah terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Sungai (WS) yang kewenangan pengelolaannya terbagi pada kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Sungai yang pengelolaannya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah Wilayah Sungai Pemali Comal (panjang sungai 930,44 km dan luas DAS 4.425,36 km^2) dan Wilayah Sungai Bodri Kuto (panjang sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 km^2). Sedangkan 6 (enam) WS lainnya merupakan WS kewenangan Pusat dan 2 (dua) WS kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 2.1.
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah

Kewenangan	Wilayah Sungai	Luas DAS (km²)
Pusat	Cimanuk Cisanggarung	6.888,35
	Jratun Seluna	9.576,01
	Bengawan Solo	19.778,00
	Progo Opak Serang	3.238,89
	Serayu Bogowonto	7.344,61
	Citanduy	4.450,44
Provinsi	Pemali Comal	4.425,36
	Bodri Kuto	1.647,40
Kabupaten/Kota	Wiso Gelis	654,27

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015

e. Kondisi Klimatologi

Suhu udara rata-rata tahun 2023 berkisar antara 26,7°C sampai dengan 30,4°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 67,0 persen sampai dengan 87,0 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Geofisika Banjarnegara yaitu sebesar 2.799 mm3 dan hari hujan terbanyak juga tercatat di Stasiun Geofisika Banjarnegara sebanyak 161 hari.

Berdasarkan hasil evaluasi curah hujan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Klas I Jawa Tengah pada bulan Desember 2024, curah hujan di Jawa Tengah umumnya berkisar antara 301–500 mm bahkan hingga >500 mm. Kecuali sebagian wilayah timur laut Kab. Brebes, Kota Tegal; sebagian wilayah timur laut Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kab. Kendal, Kota Semarang, Kab. Grobogan, Kab. Pati, Kab. Blora dan wilayah barat dan timur Kab. Rembang Curah Hujan 101-300 mm.

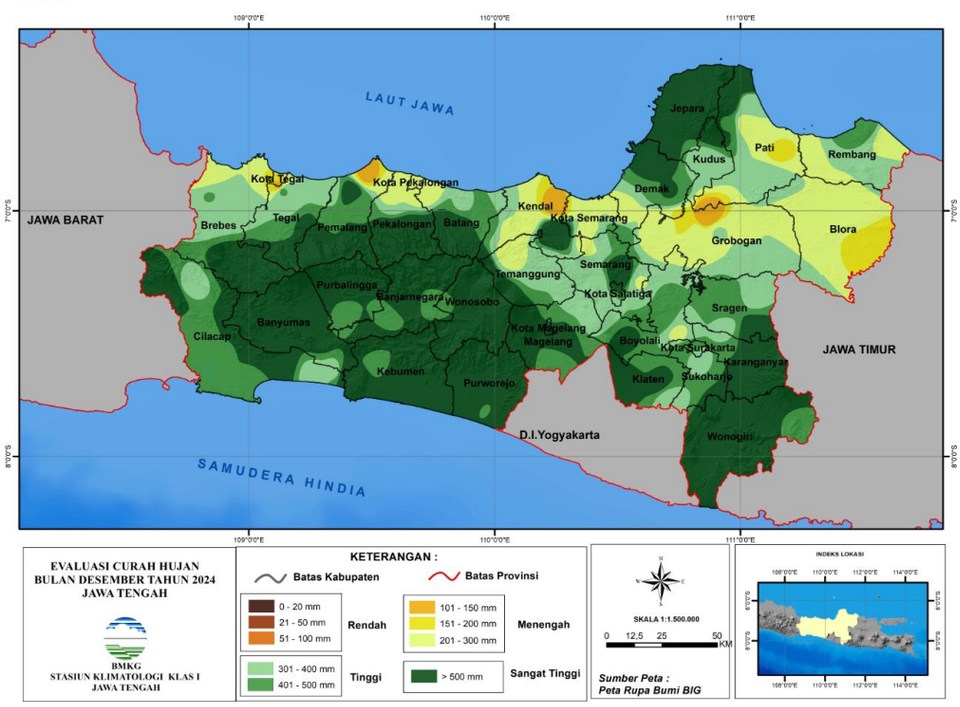

Sumber: Peta Rupa Bumi BIG, 2024

Gambar 2.2.
Peta Evaluasi Curah Hujan Bulan Desember 2024
Jawa Tengah

f. Penggunaan Lahan

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.438.683,70 hektar. Penggunaan lahan paling besar adalah sawah dengan luas 1.181.758,99 hektar (34,39%), dan luas penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah Kebun dengan luas 638.419,21 hektar (18,58%) dan Permukiman seluas 558.687,35 hektar (16,26%). Luas lahan sawah provinsi di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2016, karena pada tahun tersebut luas lahan sawah sebesar 991.524 hektar (30,47). Penambahan luas lahan sawah merupakan salah satu komitmen Jawa Tengah dalam menjaga ketahanan pangan. Penggunaan lahan di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Cagar Alam	2.770,02	0,08
2	Danau	16.731,58	0,49
3	Hutan Lindung	86.866,17	2,53
4	Hutan Produksi Terbatas	181.439,19	5,28
5	Hutan Produksi Tetap	366.459,45	10,66
6	Industri	10.547,83	0,31
7	Kebun	638.419,21	18,58
8	Lahan Terbuka	5.179,25	0,15
9	Mangrove	2.894,14	0,08
10	Pasir Darat	178,62	0,01
11	Permukiman	558.687,35	16,26
12	Sawah	1.181.758,99	34,39
13	Semak	30.941,91	0,90
14	Suaka Margasatwa	102,48	0,00
15	Sungai	23.718,78	0,69
16	Taman Hutan Raya	2.318	0,01
17	Taman Nasional	11.888,17	0,35
18	Taman Nasional Laut	183,65	0,01
19	Taman Wisata Alam	216,39	0,01
20	Tambak	56.925,79	1,66
21	Tegalan	260.456,73	7,58
	TOTAL	3.438.683,70	**100,00**

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022

g. Potensi Pengembangan Wilayah

Setiap wilayah di Jawa Tengah memiliki potensi dan karakter yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, beberapa wilayah harus tetap dilindungi dan dipertahankan dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alamnya.

Dalam upaya pengembangan potensi wilayah di Jawa tengah, sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044, telah terbagi 10 (sepuluh) wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP) WP Bregasmalang, WP Petanglong, WP Kedungsepur, WP Jekuti, WP Banglor, WP Subosukawonosraten, WP Gelangmanggung, WP Wonobanjar, WP Keburejo, dan WP Cibalingmas.

Potensi wilayah secara umum tertuang dalam Arahan penataan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 yang terbagi sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dibawah ini:

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pergaraman, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, permukiman, pembuangan hasil pengerukan di laut, serta transportasi.

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 550.351 hektar yang tersebar di 29 kabupaten dan Kota Semarang.

b) Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat seluas 578.861 hektar berada di 29 kabupaten dan Kota Semarang

c) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian seluas ± 1.325.499 hektar yang diarahkan dikembangkan di 29 Kabupaten dan 4 Kota (kecuali Kota Surakarta dan Kota Magelang) di Jawa Tengah. Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas paling sedikit 1.025.255 hektar.

d) Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan seluas ± 1.434.663 hektar, terbagi menjadi

1) perikanan budi daya di darat berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
2) perikanan budi daya di laut berada di Kabupaten Jepara.
3) perikanan tangkap di laut berada di pesisir utara dan pesisir selatan Jawa Tengah.

e) Kawasan Penggaraman

Kawasan Penggaraman dengan luas ± 9.460 hektar yang berada di Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Demak.

f) Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan luas ± 15.843 hektar yang terbagi menjadi:

1) wilayah pertambangan di darat yang meliputi pengelolaan wilayah pertambangan di Kendeng Selatan; Kendeng Muria; Semarang-Demak; Ungaran- Telomoyo; Solo dan sekitarnya; Merapi; Serayu Selatan; Serayu Tengah; Slamet Selatan; Slamet Utara; Serayu Utara; dan Sewu Lawu.
2) kawasan panas bumi yang meliputi Wilayah Kerja Panas Bumi di wilayah Dataran Tinggi Dieng; wilayah Candi Umbul Telomoyo; Wilayah Gunung Ungaran; Wilayah Gunung Lawu; Wilayah Baturraden; dan Wilayah Guci.

g) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas ± 53.530 hektar berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Semarang.

h) Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata dengan luas ± 2.329 hektar meliputi:

1) Kawasan strategis pariwisata Nasional (KSPN) yaitu pada KSPN Borobudur dan sekitarnya; KSPN Dieng dan sekitarnya; KSPN Merapi–Merbabu dan sekitarnya; KSPN Karimunjawa dan sekitarnya; KSPN Sangiran dan sekitarnya; dan KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya
2) Kawasan Pariwisata Provinsi yang tersebar pada Destinasi Pariwisata Baturraden dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Borobudur–Dieng dan sekitarnya: Destinasi Pariwisata Tegal–Pekalongan dan sekitarnya; dan Destinasi Pariwisata Rembang–Blora dan sekitarnya.

i) Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luas ± 744.587 hektar.

j) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut

Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut dengan luas ± 5.575 hektar berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, dan perairan pesisir sekitar Kota Semarang.

k) Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi dengan luas ± 68.575 hektar berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kota Semarang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes.

l) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas ± 4.231 hektar berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten

Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung terdiri atas Badan air; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan konservasi; kawasan pencadangan konservasi di laut; kawasan Cagar Budaya; dan kawasan ekosistem mangrove.

a) Badan Air

Badan air dengan luas ± 25.840 hektar berupa badan air sungai, danau, embung, dan waduk berada di seluruh Kabupaten/Kota.

b) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan luas ± 83.803 hektar berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo.

c) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat dengan luas ± 16.020 hektar berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo.

d) Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi darat dan laut pesisir dengan luas ± 139.059 hektar tersebar pada:

1) Kabupaten Cilacap meliputi Cagar Alam Nusakambangan Barat, Cagar Alam Nusakambangan Timur, dan Taman Wisata Alam Gunung Selok;
2) Kabupaten Banjarnegara meliputi Cagar Alam Telogo Dringo, Cagar Alam Telogo Sumurup, dan Cagar Alam Pringombo I dan II;
3) Kabupaten Wonosobo berupa Cagar Alam Pantodomas dan Taman Wisata Alam Telogo Warno/Pengilon;
4) Kabupaten Wonogiri berupa Cagar Alam Donoloyo dan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/ Ngargoyoso;
5) Kabupaten Sragen berupa Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan;
6) Kabupaten Blora meliputi Cagar Alam Bekutuk dan Cagar Alam Cabak I/II;

7) Kabupaten Rembang berupa Cagar Alam Gunung Butak, Cagar Alam Sumber Semen, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jahe;
8) Kabupaten Jepara meliputi Cagar Alam Keling I, Cagar Alam Keling II/III, Cagar Alam Kembang, Cagar Alam Gunung Celering, Taman Nasional Karimunjawa, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Panjang;
9) Kabupaten Demak berupa Kawasan Konservasi di Perairan di wilayah Betahwalang;
10) Kabupaten Semarang meliputi Cagar Alam Gebugan, Cagar Alam Sepakung, dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
11) Kabupaten Kendal berupa Cagar Alam Pager Wunung Darupono;
12) Kabupaten Batang meliputi Cagar Alam Peson Subah I, Cagar Alam Peson Subah II, Cagar Alam Kecubung Ulolanang, dan Kawasan Konservasi Ujungnegoro;
13) Kabupaten Pemalang meliputi Cagar Alam Bantarbolang, Cagar Alam Curug Bengkawah, dan Cagar Alam Moga;
14) Kabupaten Tegal berupa Cagar Alam Sub Vak 18 C/19 B, Taman Wisata Alam Guci, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jeruk;
15) Kabupaten Brebes berupa Cagar Alam Telogo Ranjeng;
16) Kabupaten Magelang berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
17) Kabupaten Boyolali berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
18) Kabupaten Klaten berupa Taman Nasional Gunung Merapi; dan
19) Kabupaten Karanganyar berupa Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/Ngargoyoso dan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu.

e) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Kawasan pencadangan konservasi di laut dengan luas ± 13.291 hektar berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap.

f) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya dengan luas ± 133 hektar berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

g) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove dengan luas ± 12.684 hektar berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kabupaten

Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang.

2.2.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak 37.892.283 jiwa, naik sebesar 1,37 juta jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada Tahun 2020 yaitu sebesar 36.516.035. Dengan laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2024 (Juni) yaitu 0,99% per tahun. Jumlah Penduduk dan Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah serta Rasio Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan per tahun (%)	Rasio jenis kelamin
2020	36.516.035	1,17	101,15
2021	36.742.501	0,83	101,11
2022	37.032.410	0,81	101,07
2023	37.540.962	1,01	101,03
2024	37.892.283	0,99	101,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), 2021-2024: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2024 (Pertengahan tahun/Juni)

Dari sisi komposisi, sejak tahun 2020 hingga 2024 penduduk Jawa Tengah masih didominasi penduduk laki laki yang ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin dikisaran 101. Tahun 2024 jumlah laki laki sebesar 19,03 juta jiwa sedangkan perempuan sebesar 18,85 juta jiwa. Jika dilihat dari umur, penduduk Jawa Tengah didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 26,2 juta jiwa sedangkan usia non produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) sebesar 11,66 juta jiwa. Hal ini menjadikan Jawa Tengah memiliki angka rasio ketergantungan dibawah 50 atau sebesar 44,50% yang menandakan Jawa Tengah masih berada pada kondisi bonus demografi.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2024

Kelompok Umur 0-75	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
0-4	1.440.081	1.380.947	2.821.028	104,28
5-9	1.378.561	1.315.609	2.694.170	104,79
10-14	1.395.870	1.328.217	2.724.087	105,09
15-19	1.439.699	1.353.655	2.793.354	106,36
20-24	1.460.294	1.378.228	2.838.522	105,95
25-29	1.488.880	1.407.702	2.896.582	105,77

30-34	1.474.221	1.407.917	2.882.138	104,71
35-39	1.448.588	1.402.027	2.850.615	103,32
40-44	1.394.537	1.374.008	2.768.545	101,49
45-49	1.328.158	1.341.449	2.669.607	99,01
50-54	1.211.728	1.245.766	2.457.494	97,27
55-59	1.079.549	1.133.546	2.213.095	95,24
60-64	897.410	954.994	1.852.404	93,97
65-69	699.640	749.890	1.449.530	93,30
70-74	476.014	528.313	1.004.327	90,10
75+	424.512	552.273	976.785	76,87
Total	19.037.742	18.854.541	37.892.283	100,97

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Sementara itu, mendasarkan pada kondisi sebaran luas wilayah dan jumlah penduduk kab/kota di Jawa Tengah terlihat bahwa terdapat permasalahan serius di Jawa Tengah terkait persebaran penduduk yang tidak merata. Jika melihat tabel di bawah, nampak bahwa Kota Surakarta mengalami kepadatan penduduk yang cukup besar yaitu 11.302 penduduk per Km2 disusul Kota tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Semarang. Sementara kepadatan penduduk yang relatif rendah Blora, Wonogiri, Rembang, Purworejo dan Grobogan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kepadatan penduduk berfokus pada daerah- daerah perkotaan yang notabene sebagai pusat pertumbuhan. Tentu ini menjadi tantangan bagi Jawa Tengah ke depan untuk bagaimana menciptakan persebaran penduduk yang merata dengan dukungan pembangunan/pusat pertumbuhan yang merata pula.

Tabel 2.5.
Kepadatan Penduduk per Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024

Kabupaten dan Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (jiwa per) Tahun 2024
Kabupaten Cilacap	2.027.379	2.323,93	872
Kabupaten Banyumas	1.847.097	1.391,15	1.328
Kabupaten Purbalingga	1.037.637	805,76	1.288
Kabupaten Banjarnegara	1.057.562	1.144,90	924
Kabupaten Kebumen	1.414.754	1.334,10	1.060
Kabupaten Purworejo	795.033	1.081,96	735
Kabupaten Wonosobo	920.506	1.011,62	910
Kabupaten Magelang	1.341.447	1.129,98	1.187
Kabupaten Boyolali	1.099.850	1.096,59	1.003
Kabupaten Klaten	1.292.800	701,50	1.843
Kabupaten Sukoharjo	941.650	493,53	1.908
Kabupaten Wonogiri	1.054.145	1.905,74	553
Kabupaten Karanganyar	961.909	803,05	1.198
Kabupaten Sragen	1.004.761	994,57	1.010
Kabupaten Grobogan	1.506.374	2.023,85	744
Kabupaten Blora	907.993	1.957,29	464
Kabupaten Rembang	665.237	1.037,54	641

Kabupaten dan Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (jiwa per) Tahun 2024
Kabupaten Pati	1.370.821	1.572,90	872
Kabupaten Kudus	883.322	447,44	1.974
Kabupaten Jepara	1.232.880	1.020,25	1.208
Kabupaten Demak	1.252.970	977,77	1.281
Kabupaten Semarang	1.089.767	1.019,27	1.069
Kabupaten Temanggung	814.879	864,83	942
Kabupaten Kendal	1.064.812	1.008,12	1.056
Kabupaten Batang	838.187	857,27	978
Kabupaten Pekalongan	1.019.006	892,91	1.141
Kabupaten Pemalang	1.541.685	1.137,41	1.355
Kabupaten Tegal	1.674.803	983,90	1.702
Kabupaten Brebes	2.065.501	1.742,81	1.185
Kota Magelang	122.431	18,56	6.596
Kota Surakarta	528.044	46,72	11.302
Kota Salatiga	201.270	54,98	3.661
Kota Semarang	1.708.833	370,00	4.618
Kota Pekalongan	321.095	46,20	6.950
Kota Tegal	285.843	39,08	7.314
Provinsi Jawa Tengah	37.892.283	34.337,48	1.104

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pada Tahun 2024, terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Tahun 2024, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Tegal yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Kebumen dengan laju pertumbuhan sebesar 1,27 persen, diikuti Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Pemalang sebesar 1,25 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kota Magelang sebesar 0,24 persen dan terendah kedua adalah Kota Surakarta sebesar 0,26 persen.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2020-2024 dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk Thn 2024
Cilacap	1.944.857	1.963.824	1.988.622	2.007.82	2.027.380	1,03
Banyumas	1.776.918	1.789.630	1.806.013	1.828.573	1.847.100	1,06
Purbalingga	998.561	1.007.794	1.019.840	1.027.333	1.037.640	1,05
Banjarnegara	1.017.767	1.026.866	1.038.718	1.047.226	1.057.560	1,04
Kebumen	1.350.438	1.361.913	1.376.825	1.397.55	1.414.750	1,27
Purworejo	769.880	773.588	778.257	788.26	795.030	0,89

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk Thn 2024
Wonosobo	879.124	886.613	896.346	909.66	920.510	1,25
Magelang	1.299.859	1.305.512	1.312.573	1.330.65	1.341.450	0,85
Boyolali	1.062.713	1.070.247	1.079.952	1.090.12	1.099.850	0.94
Klaten	1.260.506	1.267.272	1.275.850	1.284.386	1.292.800	0,7
Sukoharjo	907.587	911.603	916.627	932.680	941.650	1,01
Wonogiri	1.043.177	1.049.292	1.057.087	1.051.08	1.054.150	0,31
Karanganyar	931.963	938.808	947.642	955.116	961.910	0,75
Sragen	976.951	983.641	992.243	997.48	1.004.760	0,77
Grobogan	1.453.526	1.460.873	1.470.150	1.492.89	1.506.370	0,96
Blora	884.333	886.147	888.224	901.621	907.990	0,75
Rembang	645.333	647.766	650.770	660.166	665.240	0,83
Pati	1.324.188	1.330.983	1.339.572	1.359.364	1.370.820	0,89
Kudus	849.184	852.443	856.472	874.632	883.320	1,06
Jepara	1.184.947	1.188.510	1.192.811	1.221.086	1.232.880	1,02
Demak	1.203.956	1.212.377	1.223.217	1.240.510	1.252.970	1,07
Semarang	1.053.094	1.059.844	1.068.492	1.080.648	1.089.770	0,9
Temanggung	790.174	794.403	799.764	808.446	814.880	0,84
Kendal	1.018.505	1.025.020	1.033.367	1.052.826	1.064.810	1,2
Batang	801.718	807.005	813.791	828.883	838.190	1,1
Pekalongan	968.821	976.504	986.455	1.007.384	1.019.010	1,21
Pemalang	1.471.489	1.484.209	1.500.754	1.523.622	1.541.690	1,25
Tegal	1.596.996	1.608.611	1.623.595	1.654.836	1.674.800	1,28
Brebes	1.978.759	1.992.685	2.010.617	2.043.077	2.065.500	1,16
Kota Magelang	121.526	121.610	121.675	122.150	122.430	0,24
Kota Surakarta	522.364	522.728	523.008	526.870	528.040	0,26
Kota Salatiga	192.322	193.525	195.065	198.920	201.270	1,24
Kota Semarang	1.653.524	1.656.564	1.659.975	1.694.743	1.708.830	0,89
Kota Pekalongan	307.150	308.310	309.742	317.524	321.100	1,19
Kota Tegal	273.825	275.781	278.299	282.781	285.840	1,15
Jawa Tengah	36.516.035	36.742.501	37.032.410	37.540.962	37.892.283	0,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), 2021–2024: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa

tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Tabel 2.7.
Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah
Tahun 2019-2024

Tahun	Jawa Tengah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) eks- karesidenan					
		Banyumas	Kedu	Surakarta	Pekalongan	Pati	Semarang
2019	1.053	1.018	929	1.099	1.203	860	1.209
2020	1.113	1.112	994	1.174	1.320	863	1.214
2021	1.120	1.122	1.000	1.180	1.329	866	1.221
2022	1.078	1.134	1.008	1.189	1.342	870	1.228
2023	1.093	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2024	1.104	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023).

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Karesidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Karesidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km^2 diikuti eks-Karesidenan Semarang 1.228 jiwa/km^2, sedangkan eks-Karesidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km^2. Eks-Karesidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km^2 yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km^2 yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km^2. Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km^2.

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2020-2024, angka beban ketergantungan di Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 angka beban ketergantungan Jawa Tengah sebesar 44,50 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 44 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Berdasarkan komposisi usia penduduk, meningkatnya angka beban ketergantungan lebih dipengaruhi oleh meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun proporsinya. Pada tahun 2020 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 7,72 dan terus meningkat menjadi 9,05 persen pada tahun 2024. Di sisi lain, proporsi penduduk usia 0-14 tahun semakin menurun dari tahun ke tahun tetapi dari sisi jumlah mengalami fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2020 proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 22,43 persen dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 21,74 persen. Sedangkan dari sisi jumlah penduduk usia 0-14 tahun pada tahun 2020 sebesar 8.190.778 jiwa terus menurun pada tahun 2021 hingga tahun 2022 sebesar 8.123.792 jiwa, kemudian pada tahun 2023 hingga 2024 terus meningkat menjadi sebesar 8.239.285 jiwa.

Sementara proporsi penduduk usia produktif sendiri cenderung menurun tipis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, proporsinya penduduk usia 15-64 tahun mencapai 69,85 persen, terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 69,20 persen, tetapi dari sisi jumlah justru terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2020 sebesar 25.506.691 jiwa terus meningkat hingga tahun 2024 sebesar 26.222.356 jiwa.

Tabel 2.8.
Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun	Angka Beban Ketergantungan (%)
2020	8.190.778	25.506.691	2.818.566	43,16
2021	8.148.545	25.619.556	2.924.400	43,42
2022	8.123.792	25.768.441	3.140.177	43,71
2023	8.223.922	26.048.918	3.268.122	44,11
2024	8.239.285	26.222.356	3.430.642	44,50

Sumber: BPS Jawa Tengah 2024 (Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, terakhir diperbarui 5 September 2024)

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif disebut sebagai bonus demografi. Kondisi ini juga merupakan dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik. Bonus demografi yang terjadi di Jawa Tengah sepertinya mulai berakhir. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan 0,35 poin dari tahun sebelumnya.

Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dengan mendorong peningkatan kualitas penduduk usia produktif yang saat ini proporsinya masih sangat besar. Jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik, maka akan mampu menanggung beban ketergantungan yang kemungkinan akan semakin besar di masa mendatang.

2.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah digambarkan dengan kondisi kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada periode September 2024 sebesar 9,58 persen (3.396,34 ribu orang) menurun sebesar 0,89 persen dibanding periode Maret 2024 sebesar 10,47 persen. Jika dibandingkan dengan periode Maret tahun 2023 menurun sebesar 1,19 persen (395,16 ribu orang) dari 10,77 persen (3.791,50 ribu orang).

Berdasarkan daerah tempat tinggal selama setahun terakhir yaitu tahun 2023–2024, persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 1,42 persen (257,25 ribu orang) dari 11,87 persen (1.969,84 ribu orang) menjadi 10,45 persen (1.712,59 ribu orang). Sementara di perkotaan persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 0,95 persen (137,91 ribu orang) dari 9,78 persen (1.821,66 ribu orang) menjadi 8,83 persen (1.683,75 ribu orang).

Tabel 2.9.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Penduduk Miskin					
	(ribu orang)			(%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	1.890,49	2.229,44	4.119,93	10,57	13,20	11,84
2021	1.847,09	2.086,92	3.934,01	10,16	12,44	11,25
2022	1.852,17	2.006,06	3.858,23	10,02	12,05	10,98

Tahun	Penduduk Miskin					
	(ribu orang)			(%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2023	1.821,66	1.969,84	3.791,50	9,78	11,87	10,77
2024	1.683,75	1.712,59	3.396,34	8,83	10,45	9,58

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 (Rilis Periode September)
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional

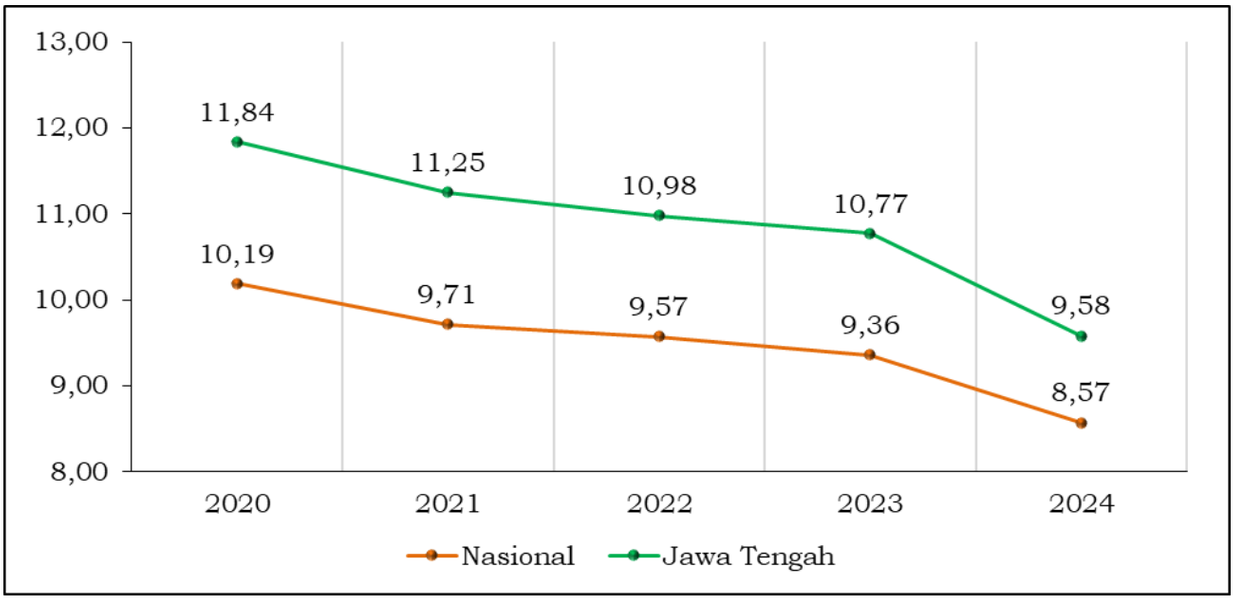

Sumber: BPS, Rilis Periode September 2024.
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret

Gambar 2.3.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota mendasarkan data per Maret tahun 2024 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Rembang, Sragen, Klaten, Banyumas, Demak, Grobogan, Blora, Purworejo, Magelang, Wonogiri dan Cilacap;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 4 kabupaten meliputi Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Kendal dan Pati;

3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang, Temanggung, Kota Surakarta, Kota Tegal, Sukoharjo, Kudus, Semarang, Tegal, Kota Pekalongan, Jepara, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

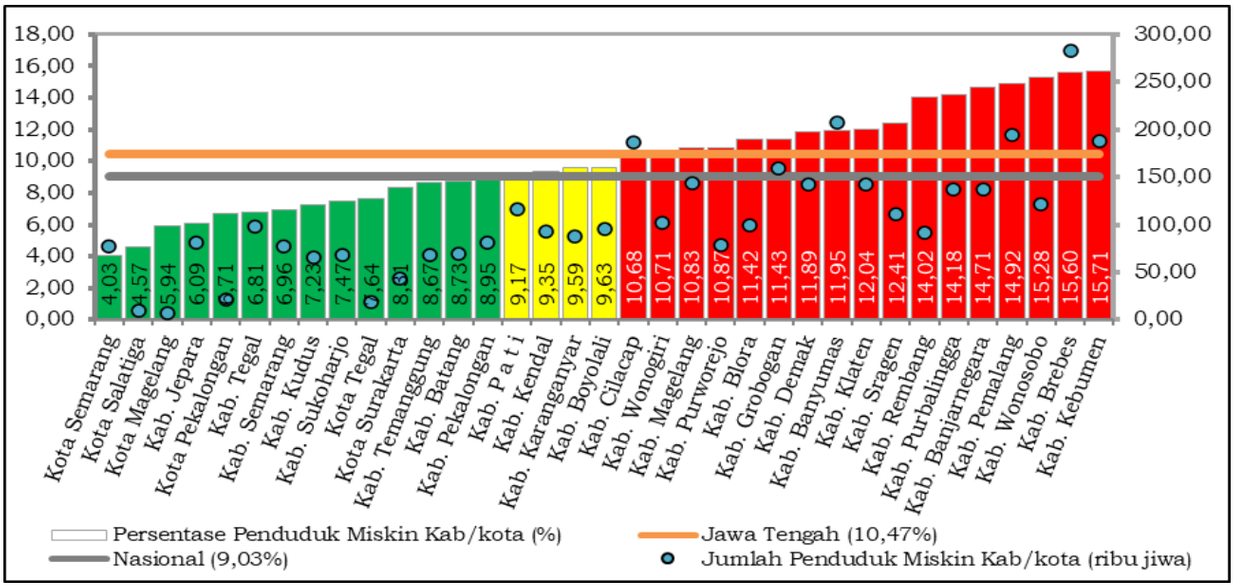

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.4.
Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2024

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2024 sebesar Rp 521.093 per kapita per bulan, meningkat 9,11 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 477.580 per kapita per bulan.

Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan tahun 2024 sebesar Rp 532.913 per kapita per bulan atau naik 9,76 persen dari kondisi tahun 2023 yang sebesar Rp 485.511 per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di perdesaan tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 8,38 persen menjadi sebesar Rp 508.298 per kapita per bulan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp 469.003 per kapita per bulan.

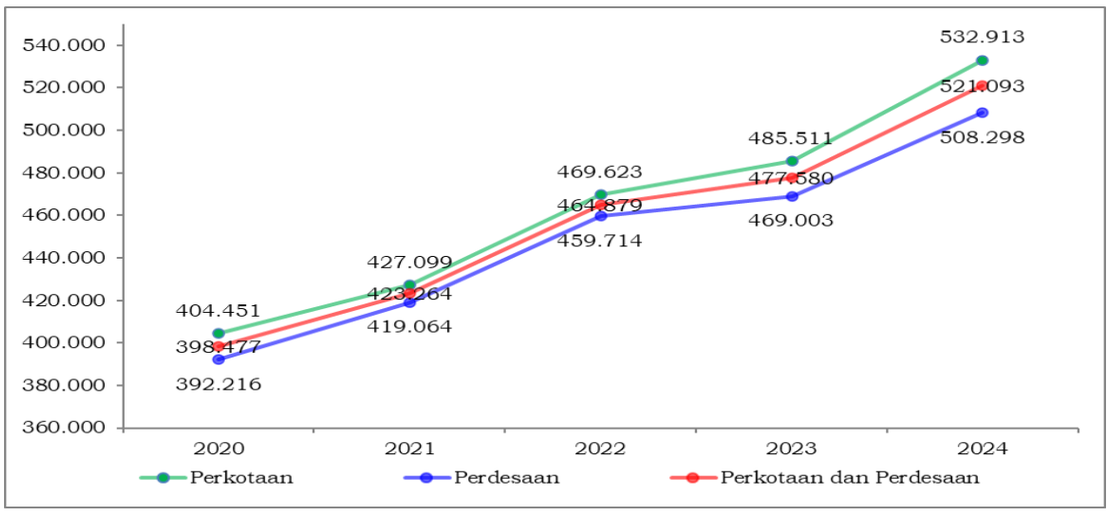

Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2024, diolah.
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Gambar 2.5.
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 mengalami peningkatan dari 1,835 pada tahun 2020 menjadi 1,938 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 1,753 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 1,749 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, P1 kembali turun dibandingkan tahun 2023 dari sebesar 1,749 menjadi 1,601.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal di perkotaan dan perdesaan, nilai P1 tahun 2024 di perdesaan sebesar 1,723 masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan sebesar 1,497. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Selain dilihat dari P1, gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 meningkat dari 0,431 pada tahun 2020 menjadi 0,459 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 0,422 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,415 pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2024 turun lagi dari tahun sebelumnya yaitu dari 0,415 menjadi 0,365.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal di perkotaan dan perdesaan, nilai P2 pada tahun 2024 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Tahun 2024, nilai P2 untuk daerah perkotaan sebesar 0,347 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,365. Angka ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan lebih lebar dibandingkan perkotaan.

Tabel 2.10.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	1,746	2,147	1,938	0,419	0,502	0,459
2021	1,640	1,879	1,753	0,407	0,439	0,422
2022	1,673	1,835	1,749	0,410	0,420	0,415
2023	1,497	1,723	1,601	0,347	0,386	0,365
2024	1,611	2,073	1,835	0,385	0,479	0,431

Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2024, diolah.
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

2.2.1. Kondisi Ketahanan Pangan

Kondisi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah diukur dengan indikator *PoU* (*Prevalence of Undernourishment)* dan IKP (Indeks Ketahanan Pangan). *Prevalence of Undernourishment*/Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu. Kondisi *PoU* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 menunjukkan trend fluktuatif dan mengalami penurunan cukup signifikan pada Tahun 2024 dengan capaian sebesar 8,63

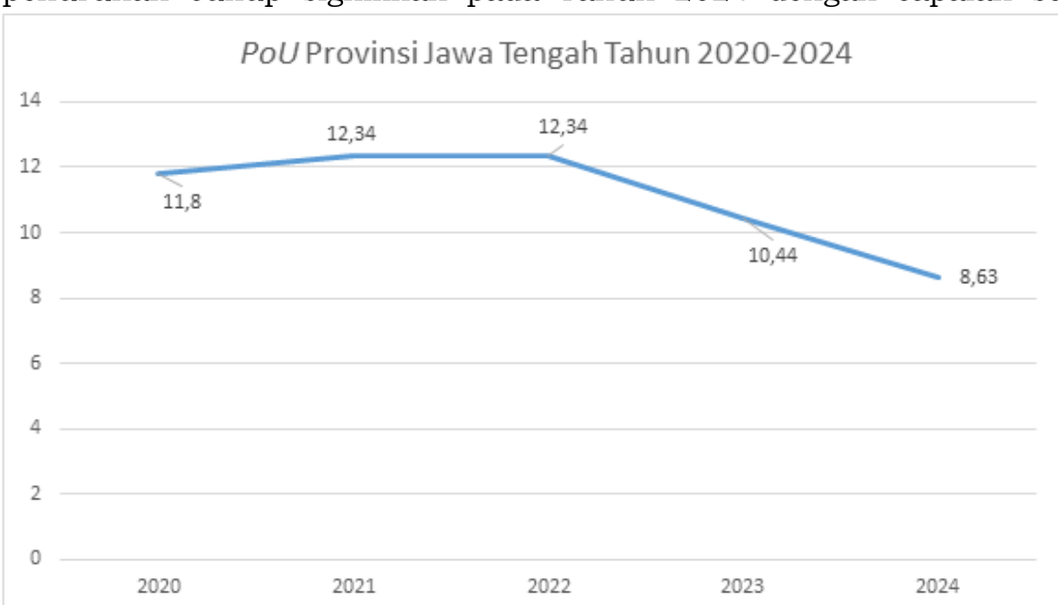

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

Gambar 2.6.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun (2020-2024)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan nilai komposit dari tiga pilar yaitu: (1) Ketersediaan; (2) Keterjangkauan; dan (3) Pemanfaatan. Kurun waktu 2020-2024 IKP Provinsi Jawa Tengah menunjukkan trend meningkat dengan angka Tahun 2024 sebesar 85,34.

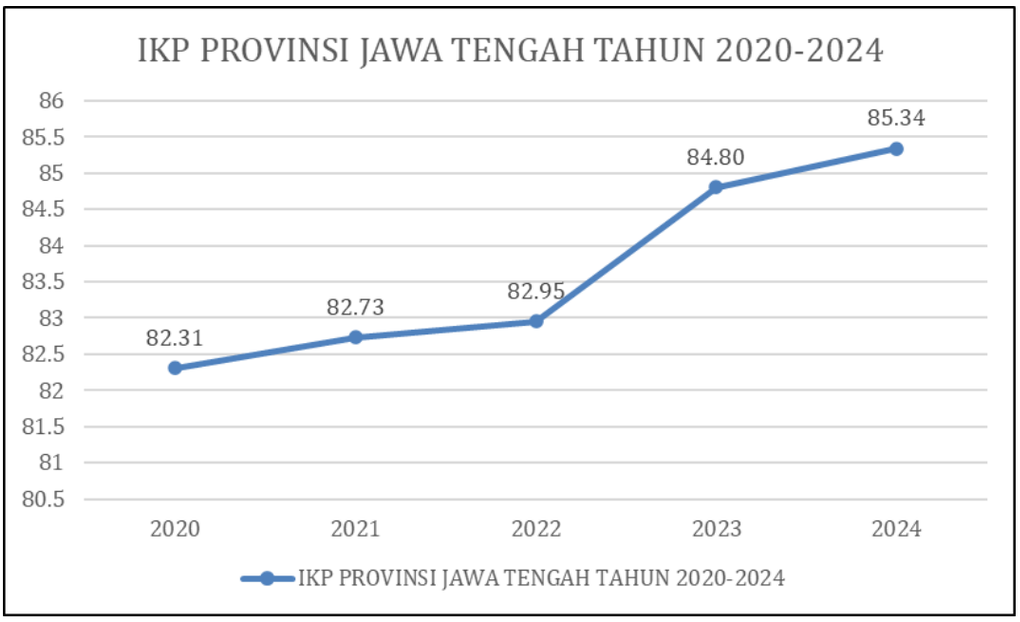

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024.

Gambar 2.7.
Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah
Tahun (2020-2024)

Aspek ketersediaan pangan digambarkan melalui angka ketersediaan energi, protein dan lemak, yaitu ketersediaan zat gizi per kapita yang terkandung dalam makanan yang siap dikonsumsi setiap penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah mencapai angka ketersediaan energi sebesar 3,805 kkal/hari dengan ketersediaan protein 96,87 gram/hari dan lemak sebesar 56,32 gram/hari.

Tabel 2.11.
Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak
Provinsi Jawa Tengah (2017-2024)

Tahun Penyusunan	ATAP	Energi (kkal/hari)			Protein (gram/hari)			Lemak (gram/hari)		
		Total	Nab	Hew	Total	Nab	Hew	Total	Nab	Hew
2017	2016	4,055	3,925	130	109.03	97.84	11.19	62	55.24	6.76
2018	2017	4,027	3,886	141	114.46	98.77	15.69	60.88	52.92	7.96
2019	2018	3,730	3,605	125	87.83	75.45	12.38	76.24	68.38	7.86
2020	2019	3,732	3,604	128	87.97	74.69	13.27	40.41	32.75	7.65
2021	2020	3,736	3,607	129	98.17	84.51	13.66	56.38	48.74	7.63
2022	2021	3,797	3,680	118	95.98	83.82	11.75	57.99	50.82	7.17
2023	2022	4,021	3,904	117	90,23	78,35	11,88	73,71	66,52	7,19
2024	2023	3,805	3,565	239	96,87	76,09	20,78	56,32	39,94	16,39

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kondisi ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan melalui peta *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA).* Peta FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan disusun berdasarkan aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan. Berdasarkan hasil analisa FSVA Tahun 2024 diperoleh informasi bahwa daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 sebanyak 24 kecamatan (4,17%) sedangkan daerah tahan pangan prioritas 4-6

sebanyak 552 kecamatan (95,83%). Terjadi penurunan daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 sebanyak 13 kecamatan (35,13%) jika dibandingkan analisa FSVA Tahun 2023 yaitu sebanyak 37 kecamatan.

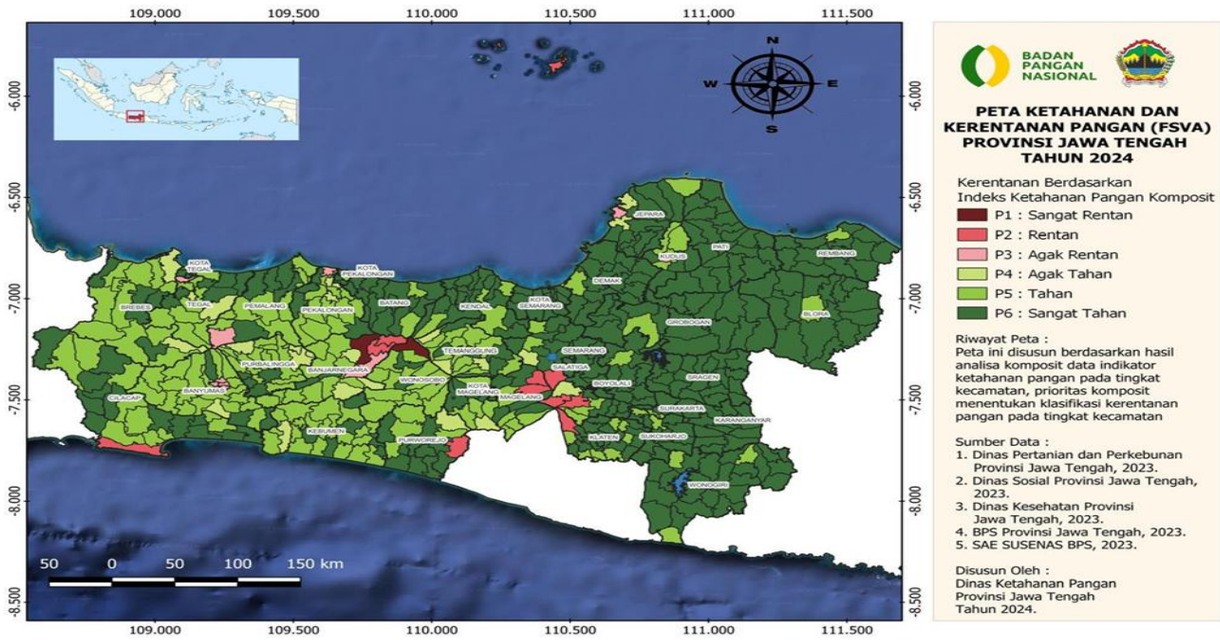

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.8.

Peta *Food Security And Vulnerability Atlas* (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pemanfaatan pangan individu dapat dilihat dari keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam kurun waktu Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Tengah masih harus mengupayakan peningkatan konsumsi pangan hewani yang masih dibawah standar, meskipun pada Tahun 2024 Skor PPH mencapai 93,99. Disisi lain masih banyak terjadi pemborosan pangan yang perlu segera ditangani.

Tabel 2.12.

Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024

	Kelompok Pangan	Standar	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Umbi-umbian	2,5	1,1	0,9	0,9	1,1	1,2	2,5
	Pangan Hewani	24,0	20,0	20,4	21,0	22,9	22,5	18,84
	Minyak & lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Buah/biji berminyak	1,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,15
	Kacang-kacangan	10,0	6,4	6,1	6,3	8,0	8,2	10,00
	Gula	2,5	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	2,5
	Sayur & buah	30,0	29,5	27,1	26,0	30,0	30,0	30,0
	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		**100,0**	**89,6**	**87,1**	**86,7**	**94,4**	**94,2**	**93,99**
Skor PPH Nasional		**100,0**	**90,8**	**87.9**	**87.2**	**92,9**	**94,1**	**93,5**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2025.

2.3. Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian daerah Jawa Tengah dapat digambarkan dari beberapa indikator kinerja antara lain pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, rasio Gini, indeks Williamson, dan indeks daya saing daerah (IDSD). Kinerja perekonomian daerah Jawa Tengah didukung dengan kinerja sektor-sektor unggulan daerah yaitu pertanian, koperasi dan UKM, perdagangan, industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu juga, perekonomian daerah Jawa Tengah didukung oleh iklim investasi yang baik, kondisi infrastruktur yang mantap dan transportasi yang menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pembangunan perekonomian berbasis desa. Gambaran keseluruhan kondisi perekonomian daerah sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Kinerja ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga ditengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92% (c-to-c), namun lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,03% (c-to-c).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; c-to-c), Banten (4,79%; c-to-c) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%; c-to-c) dan DKI Jakarta sebesar (4,90%; c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 3,05 persen (c-to-c), ekspor tumbuh 4,25 persen (c-to-c), investasi tumbuh 1,88 persen (c-to-c), ditopang oleh proses pengerjaan Proyek Strategis Nasional dan proyek swasta di Jawa Tengah yang masih berlangsung.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kenaikan sektor industri pengolahan serta konstruksi. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 1,15 persen (c-to-c) sejalan dengan peningkatan impor bahan baku industri. Impor bahan baku meningkat sebesar 4,22 persen (yoy), terutama bersumber dari impor bahan baku alas kaki akibat kenaikan demand di AS dan Eropa. Sementara itu, peningkatan kinerja di sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 0,83 persen (c-to-c).

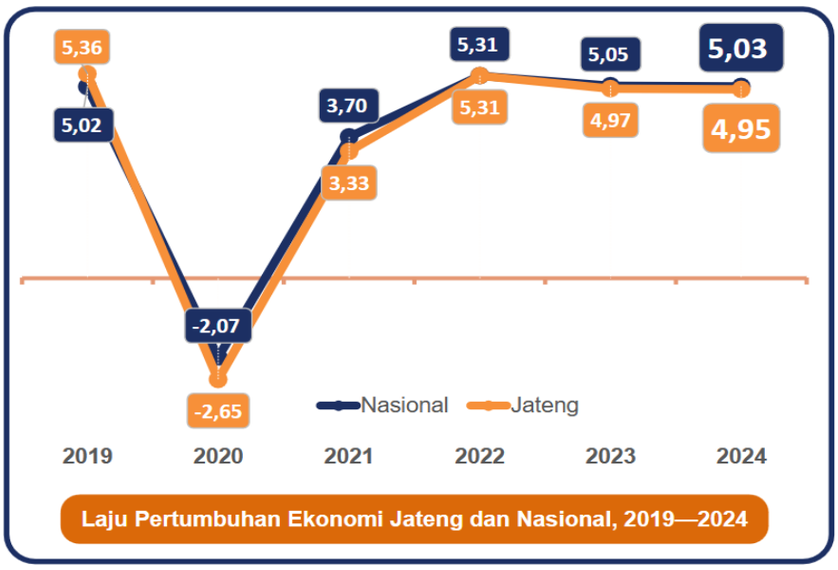

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.9.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2024 (c-to-c)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; c-to-c), Banten (4,79%; c-to-c) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%; c-to-c) dan DKI Jakarta sebesar (4,90%; c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

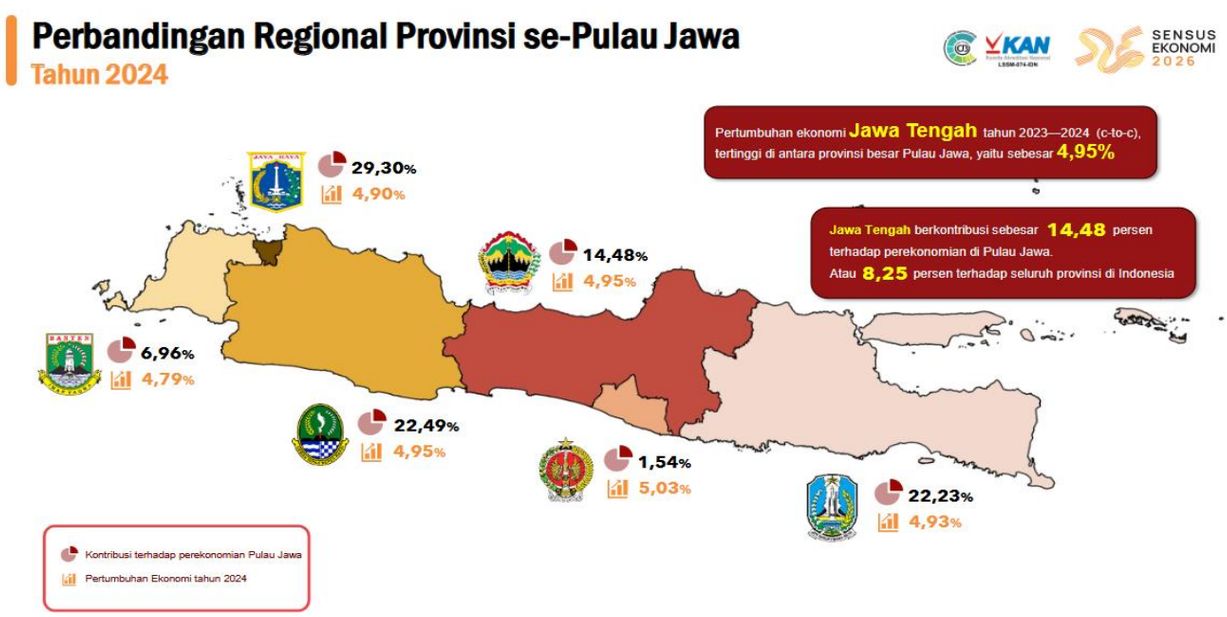

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.10.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Se-Pulau Jawa Tahun 2024 (c-to-c, %)

Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu

diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 didominasi oleh tiga (3) lapangan usaha yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 33,84 persen, Lapangan Usaha Perdagangan berkontribusi sebesar 13,49 persen, sementara Lapangan Usaha Pertanian berkontribusi sebesar 13,03 persen.

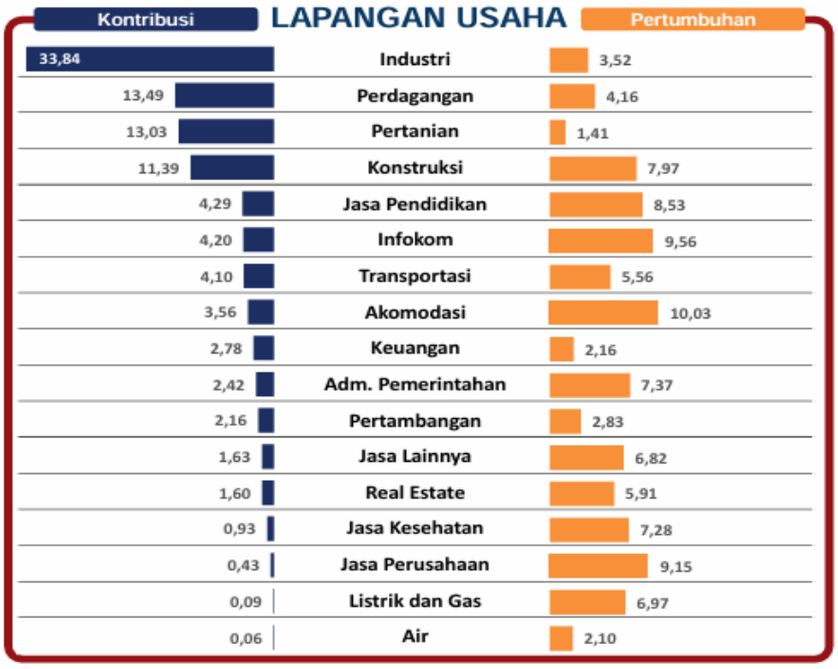

Sumber: BPS Jateng, 2025.

Gambar 2.11.

Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (c-to-c, %)

Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 adalah Akomodasi Makan dan Minum yang tumbuh sebesar 10,03 persen, kemudian disusul oleh Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 9,56 persen, dan kemudian Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 9,15 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Tengah seperti Industri Pengolahan hanya sebesar 3,52 persen, Perdagangan tumbuh sebesar 4,16 persen, sementara itu Pertanian tumbuh 1,41 persen.

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran semua komponen pengeluaran juga mengalami pertumbuhan yang positif. Tahun 2024 struktur ekonomi didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang berkontribusi sebesar 61,29 persen, selanjutnya Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) memiliki kontribusi sebesar 39,22 persen, sementara itu Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto memiliki kontribusi sebesar 30,53 persen.

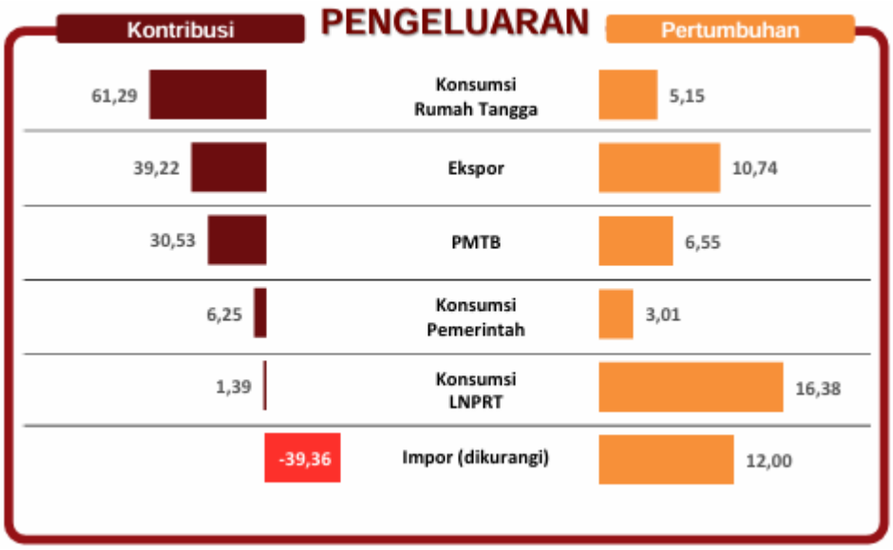

Sumber: BPS Jateng, 2025.

Gambar 2.12.

Kontribusi dan Pertumbuhan Perekonomian Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (%)

Pada Tahun 2024 pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga *Non-Profit* yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 16,38 persen seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas partai politik pada pemilu 2024. Kemudian Komponen Pengeluaran Impor tumbuh sebesar 12 persen, disusul oleh Komponen Pengeluaran Ekspor yang tumbuh sebesar 10,74 persen. Sementara Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi 61,29 persen tumbuh sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga antara lain didorong oleh momentum liburan natal dan tahun baru.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 tahun 2020 juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh positif dibandingkan tahun 2020, kecuali Kabupaten Kudus yang mengalami kontraksi sebesar -1,54 persen yang diakibatkan karena industri tembakau di Kudus masih mengalami pertumbuhan negatif. Namun demikian, pada tahun 2022, semua kabupaten/kota telah tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,33 persen, diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 6,25 persen, dan Kabupaten Grobogan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen. Sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 2,23 persen, Kabupaten Blora 2,68 persen, dan Kabupaten Wonosobo 5,02 persen. Tahun 2023 di tengah perlambatan ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang (5,79 persen) mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan terendah adalah Kabupaten Kudus (2,19 persen). Hanya ada 4 Kabupaten / Kota yang tumbuh positif dari capaian Tahun 2022 yaitu Kabupaten Pekalongan (tumbuh 0,03), Kota Semarang (tumbuh 0,06), Kabupaten Cilacap (tumbuh 0,19) dan Kabupaten Blora (tumbuh 0,44). Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Brebes sebesar 1,87 persen dan Kabupaten Grobogan sebesar 1,00 persen.

Tabel 2.13.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024 (%)

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Cilacap	2.27	-10.28	2.15	5.13	5.34	2.65
2	Kabupaten Banyumas	6.32	-1.65	4.00	5.86	5.40	5.29
3	Kabupaten Purbalingga	5.64	-1.18	3.19	5.41	4.51	4.55
4	Kabupaten Banjarnegara	5.6	-1.32	3.26	5.29	4.98	5.11
5	Kabupaten Kebumen	5.52	-1.45	3.71	5.79	5.66	5.30
6	Kabupaten Purworejo	5.44	-1.61	3.31	5.36	5.07	4.79
7	Kabupaten Wonosobo	5.57	-1.64	3.68	5.02	4.30	4.57
8	Kabupaten Magelang	5.3	-1.67	3.48	5.46	5.04	5.06
9	Kabupaten Boyolali	5.96	-1.20	4.63	6.33	5.63	4.64
10	Kabupaten Klaten	5.48	-1.17	3.82	5.90	5.70	5.11
11	Kabupaten Sukoharjo	5.92	-1.70	3.82	5.61	5.06	4.97
12	Kabupaten Wonogiri	5.14	-1.41	3.35	5.63	4.98	4.93
13	Kabupaten Karanganyar	5.76	-1.87	3.57	5.87	5.53	5.54
14	Kabupaten Sragen	5.9	-1.81	3.75	5.76	5.23	5.39
15	Kabupaten Grobogan	5.37	-1.57	3.78	5.98	4.98	5.41
16	Kabupaten Blora	4.05	-4.56	3.68	2.68	3.10	3.06
17	Kabupaten Rembang	5.2	-1.49	3.85	5.55	5.20	5.08
18	Kabupaten Pati	5.81	-1.16	3.38	5.56	5.02	5.13
19	Kabupaten Kudus	3.09	-3.11	-1.54	2.23	2.19	2.78
20	Kabupaten Jepara	6.02	-1.92	4.63	5.95	5.17	4.22
21	Kabupaten Demak	5.36	-0.23	2.62	5.25	5.01	5.06
22	Kabupaten Semarang	5.39	-2.67	3.63	5.31	4.74	4.73
23	Kabupaten Temanggung	5.05	-2.13	3.34	5.2	5.00	5.04
24	Kabupaten Kendal	5.71	-1.51	3.89	5.69	5.56	5.42
25	Kabupaten Batang	5.39	-1.29	4.88	5.97	5.53	6.03
26	Kabupaten Pekalongan	5.35	-1.89	3.54	5.11	5.14	5.02
27	Kabupaten Pemalang	5.8	-0.61	4.28	5.08	4.14	5.11
28	Kabupaten Tegal	5.56	-1.48	3.71	5.14	4.93	5.07
29	Kabupaten Brebes	5.76	-0.47	2.57	5.61	3.74	5.02
30	Kota Magelang	5.41	-2.45	3.20	5.77	5.45	5.56
31	Kota Surakarta	5.78	-1.76	4.01	6.25	5.57	5.61
32	Kota Salatiga	5.90	-1.68	3.35	5.53	5.34	5.37
33	Kota Semarang	6.81	-1.85	5.16	5.73	5.79	5.62
34	Kota Pekalongan	5.50	-1.87	3.59	5.76	5.44	5.34
35	Kota Tegal	5.77	-2.29	3.12	5.16	5.01	5.22
	Jawa Tengah	**5.36**	**-2.65**	**3.33**	**5.31**	**4.97**	**4.95**
	Nasional	**5.02**	**-2.07**	**3.70**	**5.31**	**5.05**	**5.03**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pada tahun 2022, hampir semua kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan diatas 5 persen kecuali Kabupaten Kudus dan Kabupaten Blora masing-masing 2,21 persen dan 2,66 persen. Pada tahun 2023, perekonomian kabupaten/kota di Jawa Tengah tumbuh kisaran 2 sampai 5 persen dimana Kabupaten Kudus tumbuh paling rendah sebesar 2,19 persen sedangkan

Kota Semarang tumbuh paling tinggi dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,79 persen. Selanjutnya pada tahun 2024, perekonomian kabupaten/kota di Jawa Tengah tumbuh kisaran 2 sampai 6 persen dimana Kabupaten Cilacap tumbuh paling rendah sebesar 2,65 persen sedangkan Kota Batang tumbuh paling tinggi dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Tengah tumbuh sebesar 6,03 persen hal tersebut didukung oleh adanya Kawasan Industri Terpadu Batang yang diresmikan pada tahun 2024.

Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 tertinggi dialami Kabupaten Batang yaitu sebesar 4,23 persen dan terendah dialami Kabupaten Kudus yaitu sebesar 0,51 persen. Secara rata-rata 5 tahun terakhir pertumbuhan Kabupaten Kudus mengalami pertumbuhan paling kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan kisaran pertumbuhan per tahun antara -3,11 sampai 2,78 persen. Rendahnya rata2 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus selama 2020-2024 disebabkan karena tahun 2020 dan 2021 mengalami kontraksi ekonomi secara berturut-turut, dan setelah pandemi covid-19 berakhir, Kabupaten Kudus hanya mampu tumbuh kisaran 2 persen. Pada Gambar 2.10 dibawah ini menunjukkan bahwa terdapat 31 Kabupaten Kota yang mengalami rata-rata pertumbuhan di atas pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Semarang, Blora, Cilacap dan Kudus mengalami rata-rata pertumbuhan di bawah Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2024.

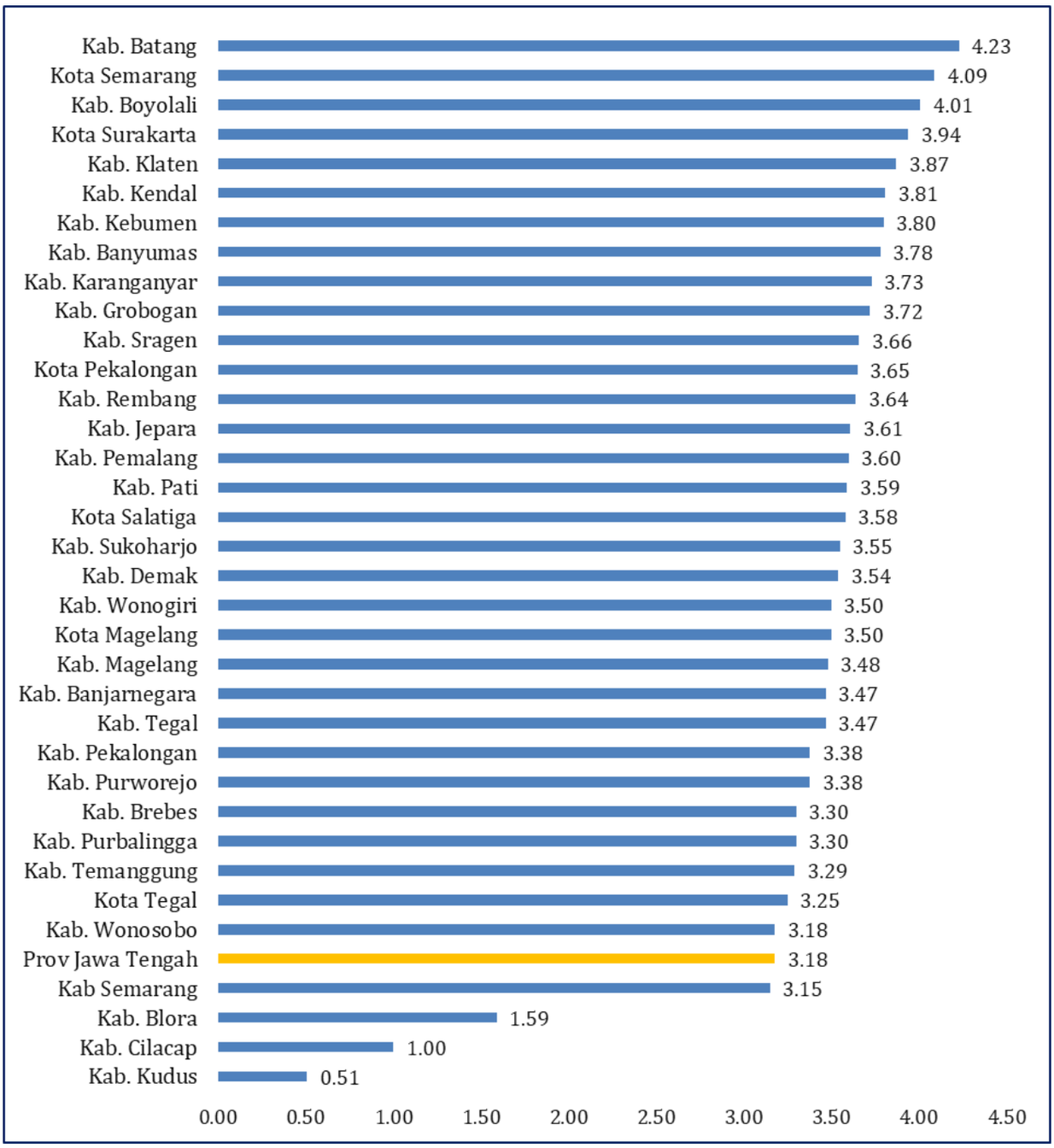

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.13.
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 (persen)

Perekonomian Jawa Tengah tentunya ditopang aktivitas ekonomi dari 35 Kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Tahun 2020 Kota Semarang, memberikan peran terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah yaitu sebesar 14,02 persen, diikuti Kabupaten Kudus dan Kabupaten Cilacap masing-masing memberikan kontribusi 8,14 persen dan 7,76 persen. Di sisi lain, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Magelang menyumbang aktivitas ekonomi paling kecil di Jawa Tengah. Hal yang sama terjadi pada tahun 2024 bahwa perekonomian Jawa Tengah masih di dominasi oleh Kota Semarang, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus. Sementara itu, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Magelang masih memberikan kontribusi terkecil terhadap ekonomi Jawa Tengah.

Perlu kita cermati bahwa antara tahun 2020 dan 2024 terdapat 19 Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan peranan. Kemudian terdapat 5 kabupaten/kota yang peranannya tetap yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan. Di sisi lain terdapat 11 kabupaten mengalami penurunan peranan. Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus meskipun memberikan peranan besar namun selama periode 5 tahun terakhir mengalami penurunan peranan. Hal ini disebabkan rata-rata pertumbuhan kedua kabupaten ini jauh lebih rendah dibanding kabupaten/kota yang lain sehingga berdampak pada penurunan peranan terhadap ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Kota Tegal dan Kota Salatiga meskipun perannya relatif kecil terhadap ekonomi Jawa Tengah namun selama 5 tahun terakhir peranannya mengalami peningkatan.

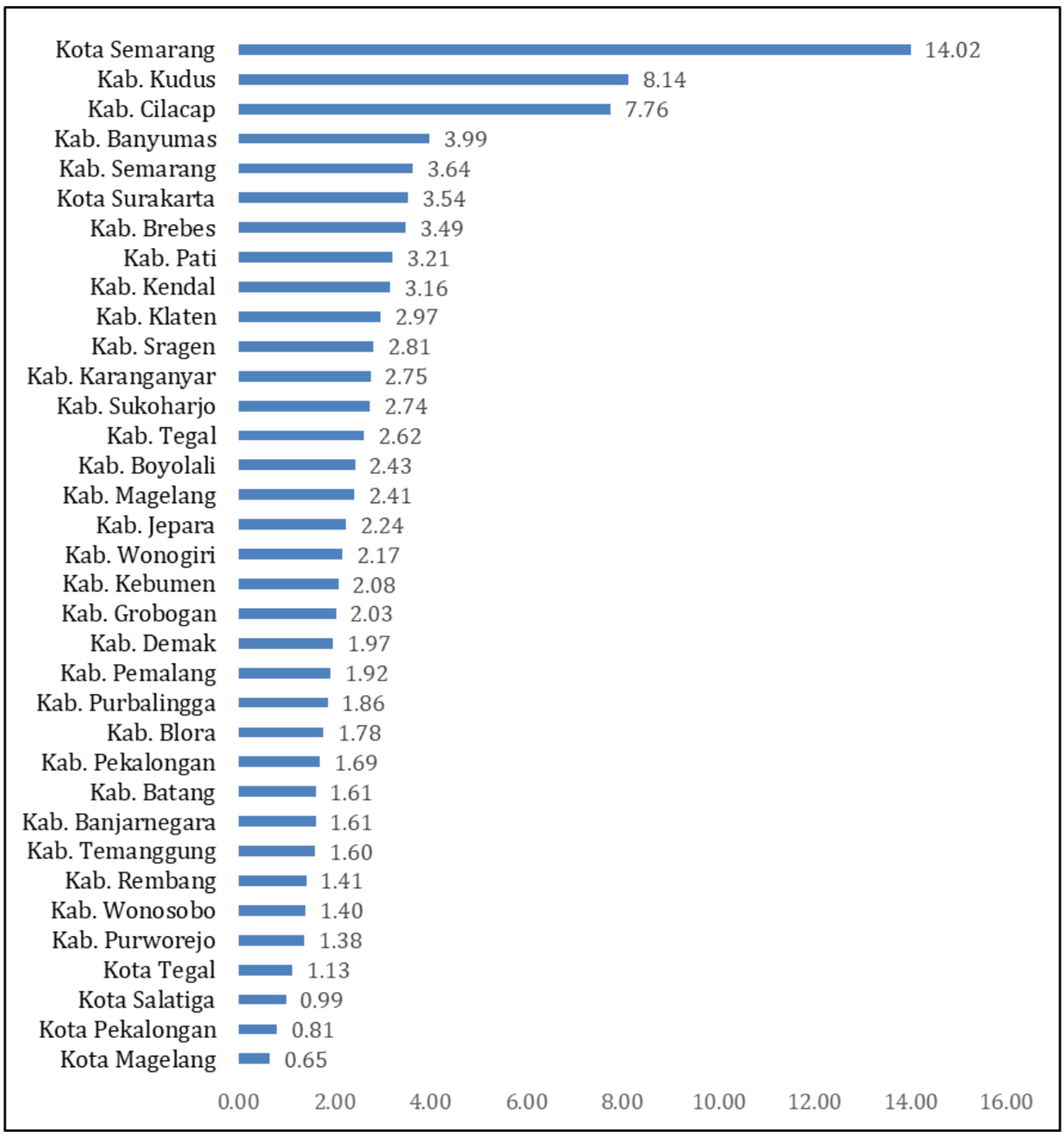

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.14.
Peranan/Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (persen)

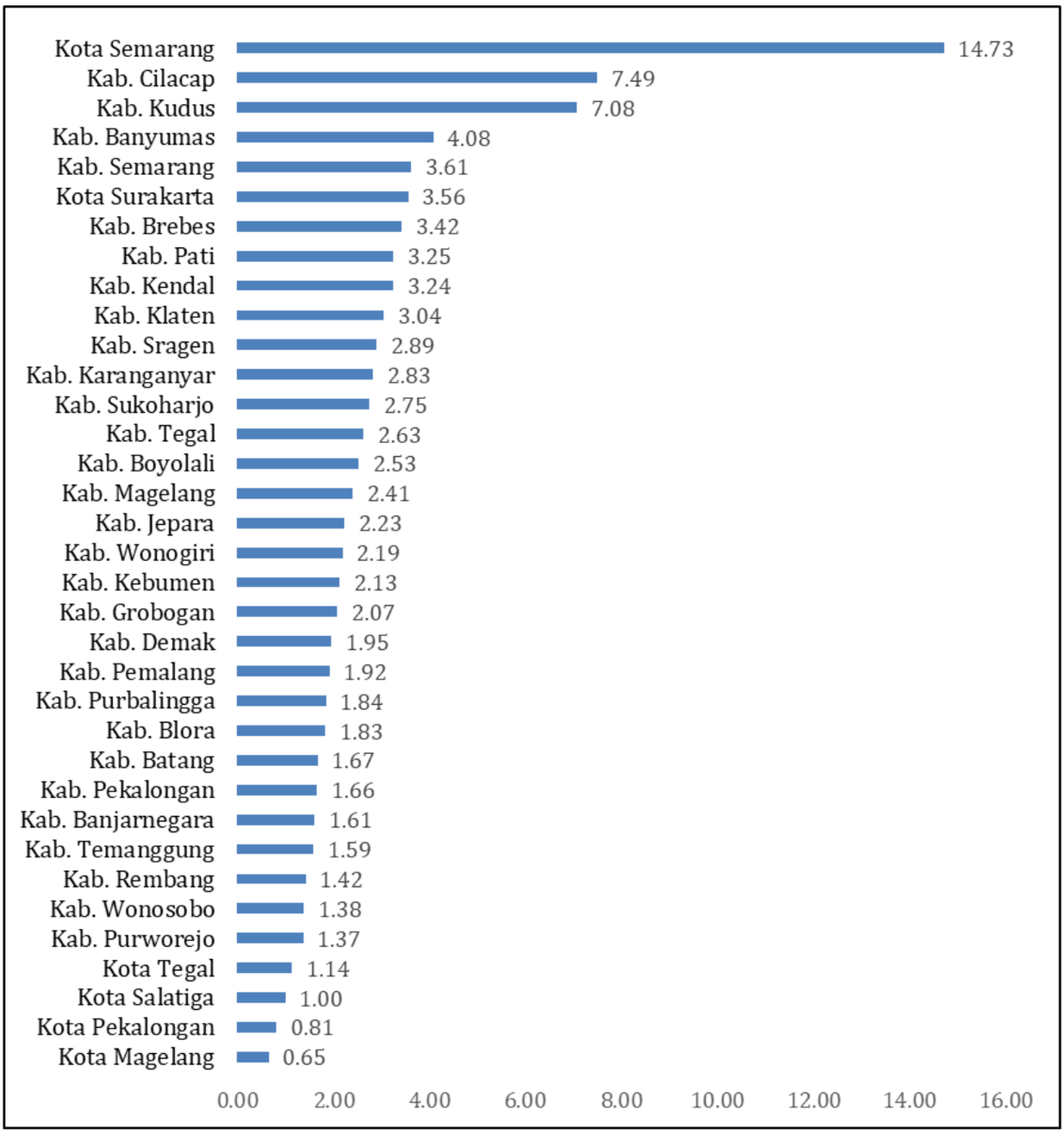

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.15.
Peranan/Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (persen)

2.3.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2022-2024, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2024 PDRB Per Kapita Jawa Tengah sebesar 47,97 Juta Rupiah mengalami pertumbuhan sebesar 6,21 persen dibanding dengan tahun 2023 yang sebesar 45,17 Juta Rupiah. Jika dibandingkan dengan Nasional, PDRB Per kapita Jawa Tengah masih di bawahnya, namun selalu menunjukkan tren yang membaik atau naik.

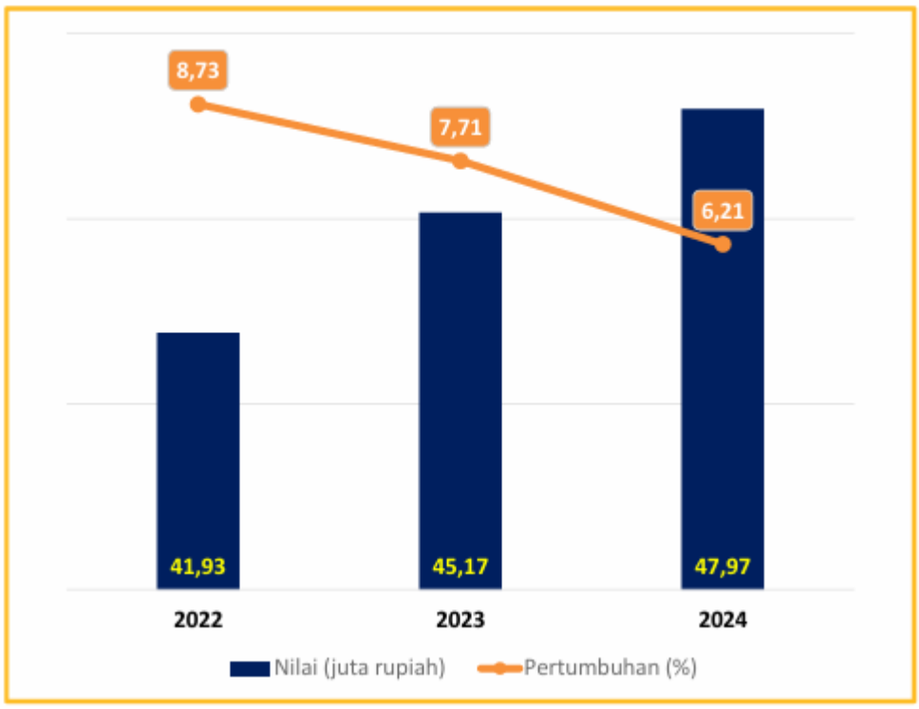

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.16
PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2022-2024

Jika dibandingkan dengan provinsi se-Pulau Jawa, PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2024 berada di urutan terakhir atau ke enam. Sedangkan PDRB per kapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 344,35 juta, diikuti Provinsi Jawa Timur (Rp 75,77 juta) dan Provinsi Banten (Rp 70,28 juta).

Tabel 2.14.
PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa (Juta Rp)

Provinsi	PDRB Perkapita 2024 (Juta Rupiah)
DKI Jakarta	344,35
Jawa Timur	75,77
Banten	70,28
Jawa Barat	56,08
DIY	51,47
Jawa Tengah	47,97

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Sebaran PDRB per kapita per kabupaten/kota se- Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.15.
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Cilacap	66.39	53.92	55.74	60.88	65.95	67.08
2	Kabupaten Banyumas	32.02	30.28	31.79	34.71	37.6	40.15
3	Kabupaten Purbalingga	26.81	25.2	26.23	28.35	30.39	32.15
4	Kabupaten Banjarnegara	23.51	21.38	22.26	24.11	25.96	27.64
5	Kabupaten Kebumen	23.44	20.8	21.69	23.63	25.59	27.29
6	Kabupaten Purworejo	26.1	24.26	25.31	27.33	29.42	31.19
7	Kabupaten Wonosobo	23.91	21.49	22.38	24.02	25.65	27.19
8	Kabupaten Magelang	25.3	25.01	26.12	28.37	30.57	32.60
9	Kabupaten Boyolali	33.33	30.83	32.61	35.91	39.2	41.69
10	Kabupaten Klaten	34.01	31.74	33.37	36.52	39.92	42.74
11	Kabupaten Sukoharjo	41.63	40.7	42.65	46.32	49.88	53.08
12	Kabupaten Wonogiri	30.42	28.01	29.28	32.15	35.15	37.72
13	Kabupaten Karanganyar	41.94	39.82	41.62	45.45	49.42	53.36
14	Kabupaten Sragen	42.7	38.83	40.81	44.69	48.69	52.19
15	Kabupaten Grobogan	19.89	18.79	19.67	21.51	23.28	24.90
16	Kabupaten Blora	30.16	27.16	30.32	34.59	35.22	36.60
17	Kabupaten Rembang	29.82	29.39	30.91	33.76	36.55	38.77
18	Kabupaten Pati	34.34	32.74	34.12	37.19	40.29	43.05
19	Kabupaten Kudus	127.52	129.14	126.95	132.34	138.7	145.60
20	Kabupaten Jepara	24.14	25.49	26.78	28.96	31.14	32.90
21	Kabupaten Demak	22.62	22.1	22.77	24.64	26.62	28.30
22	Kabupaten Semarang	47.3	46.67	48.79	52.87	56.71	60.18
23	Kabupaten Temanggung	28.17	27.33	28.46	30.84	33.29	35.49
24	Kabupaten Kendal	44.03	41.9	43.94	47.73	51.63	55.26
25	Kabupaten Batang	28.22	27.02	28.57	31.06	33.64	36.26
26	Kabupaten Pekalongan	25.59	23.6	24.44	26.08	27.91	29.66
27	Kabupaten Pemalang	19.65	17.6	18.46	19.88	21.24	22.63
28	Kabupaten Tegal	24.57	22.15	23.14	24.95	26.85	28.49
29	Kabupaten Brebes	25.65	23.83	24.52	26.59	28.19	30.04
30	Kota Magelang	72.45	71.7	75.49	82.66	89.91	96.56
31	Kota Surakarta	92.83	91.17	96.11	106.26	114.8	122.53
32	Kota Salatiga	68.89	69.14	72.17	78.26	84.32	89.83
33	Kota Semarang	105.93	114.19	123.04	135.33	146.87	156.57
34	Kota Pekalongan	35.59	35.36	36.95	40.12	43.29	45.99
35	Kota Tegal	61.47	55.72	57.95	63.22	67.76	72.28
	Provinsi Jawa Tengah	39.39	36.96	38.57	41.95	45.20	47,97
	Nasional	59.30	57.30	62.20	71.00	75.00	78.60

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Terdapat 12 kabupaten/kota dengan PDRB per kapita di atas capaian Jawa Tengah (lebih dari Rp.47,97 juta). Adapun sebanyak tiga kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita di atas Rp100 juta yaitu Kota Semarang (Rp. 156,57 Juta), Kabupaten Kudus (Rp. 145,60 Juta), dan Kota Surakarta (Rp. 122,53 Juta). Sedangkan 23 Kabupaten/Kota lainnya memiliki PDRB Perkapita di bawah PDRB per kapita Jawa Tengah (kurang dari Rp.47,97 juta).

Jika dilihat PDRB Perkapita selama kurun waktu Tahun 2020-2024 terdapat 12 Kabupaten/kota yang memiliki rata-rata PDRB perkapita lebih tinggi

dibandingkan rata-rata PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah dan terdapat 23 kabupaten/kota yang rata-rata PDRB perkapitanya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki rata-rata PDRB perkapita tertinggi yaitu 135,20 juta rupiah diikuti Kabupaten Kudus nilainya 134,56 juta rupiah dan Kota Surakarta 106,20 juta rupiah.

Besarnya nilai PDRB perkapita tidak hanya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang dihasilkan, akan tetapi juga dipengaruhi jumlah penduduk wilayah tersebut. Kota Magelang adalah kota yang memiliki peranan PDRB terendah se Jawa Tengah dari tahun 2020-2024, hal ini terlihat dari peranan yg paling kecil terhadap ekonomi Jawa Tengah. Namun Kota Magelang memiliki PDRB perkapita relatif tinggi (urutan ke-4) dibanding kabupaten/kota di Jawa Tengah. Demikian juga Kota Salatiga dan Kota Tegal. Hal ini karena jumlah penduduk di ketiga kota ini relatif sedikit dibanding kabupaten/kota lain. Sementara itu, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pemalang menghasilkan nilai PDRB yang relatif besar dibanding Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Tegal namun rata-rata PDRB perkapita 2020-2024 kedua kabupaten tersebut adalah yang terendah di Jawa Tengah.

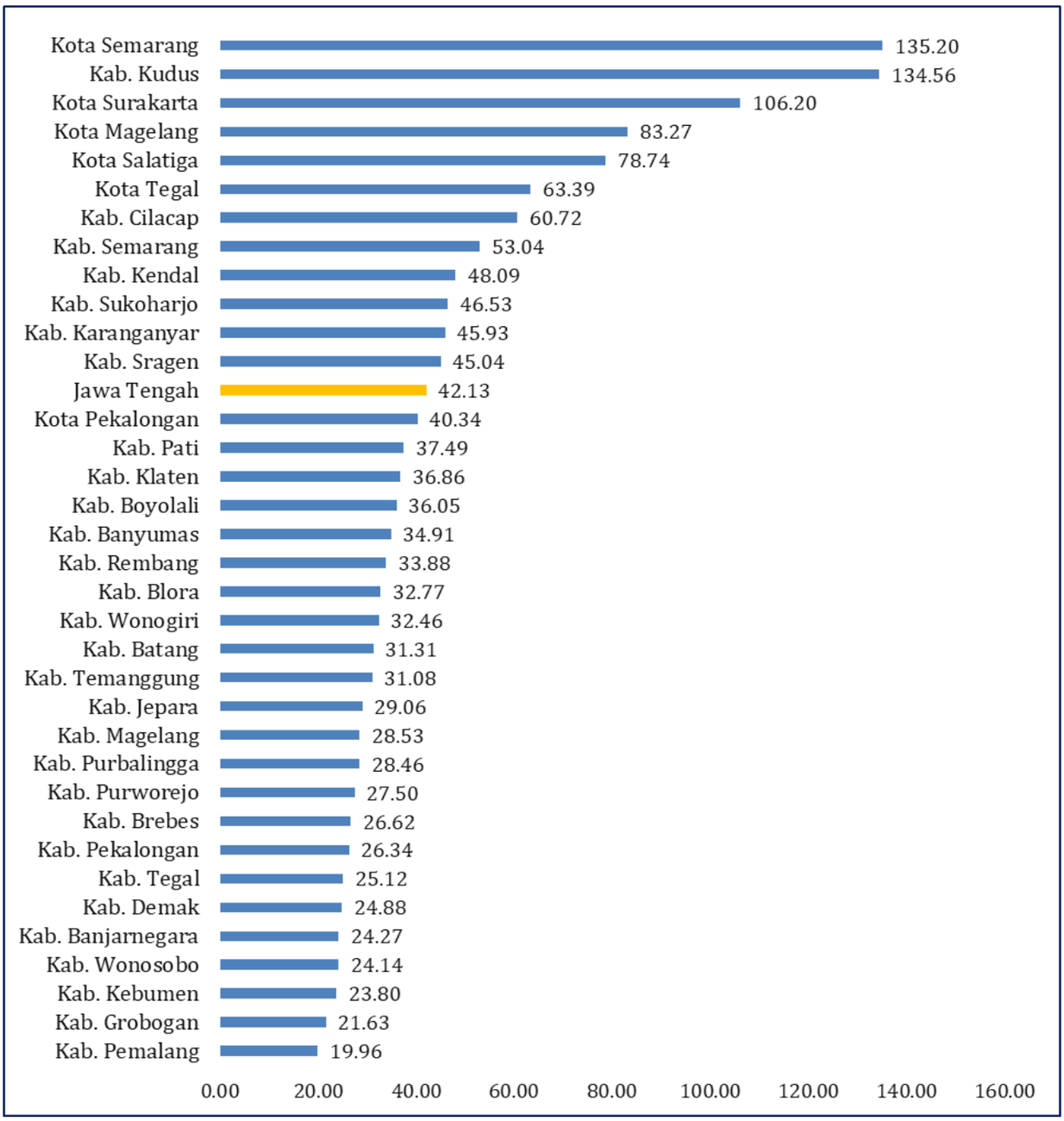

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.17.
Rata-Rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 (Juta Rupiah)

2.3.3. Inflasi

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen, bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan laju inflasi di Jawa Tengah menjadi sebesar 5,63 persen. Pada tahun 2024 terjadi penurunan laju inflasi menjadi sebesar 1,67 persen, meskipun tingkat inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding tingkat inflasi Nasional. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya semua indeks kelompok pengeluaran terutama komponen makanan dan minuman. Penyebab utama inflasi bulan Desember 2024 adalah emas perhiasan, beras, minyak goreng, kopi bubuk,

Sigaret Kretek Mesin (SKM), bahan bakar rumah tangga, nasi dengan lauk, mobil, bawang putih, dan lain sebagainya. Sedangkan penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga cabai merah, cabai rawit, bensin, telepon seluler, dan cabai hijau.

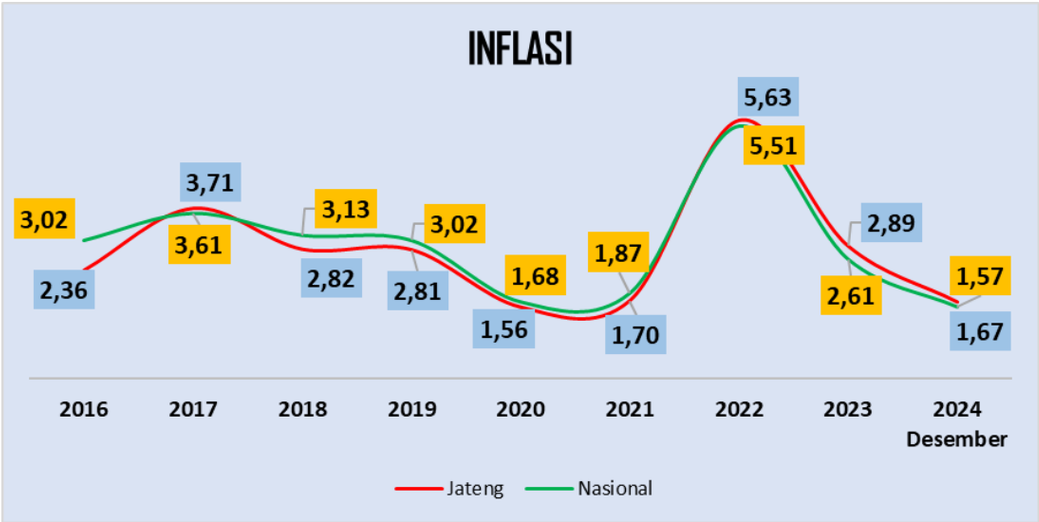

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.18.
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – 2024 (%)

2.3.4. Rasio Gini dan Indeks Williamson

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, semakin tinggi nilai menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi. Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah yang digambarkan dari angka *gini ratio* pada periode 2013-2023 terlihat berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2013 yaitu sebesar 0,390. Pada Maret 2023 Gini Ratio mengalami sedikit kenaikan dibandingkan September 2022, yaitu dari 0,366 menjadi 0,369, atau naik sebesar 0,003 poin.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di perkotaan pada September 2024 sebesar 0,392 mengalami penurunan sebesar 0,007 point dibandingkan rasio gini pada Maret 2023 yang sebesar 0,399. Sementara itu di daerah perdesaan rasio gini pada September 2024 sebesar 0,317 mengalami penurunan sebesar 0,001 point dibandingkan rasio gini Maret 2023 yang sebesar 0,318. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan.

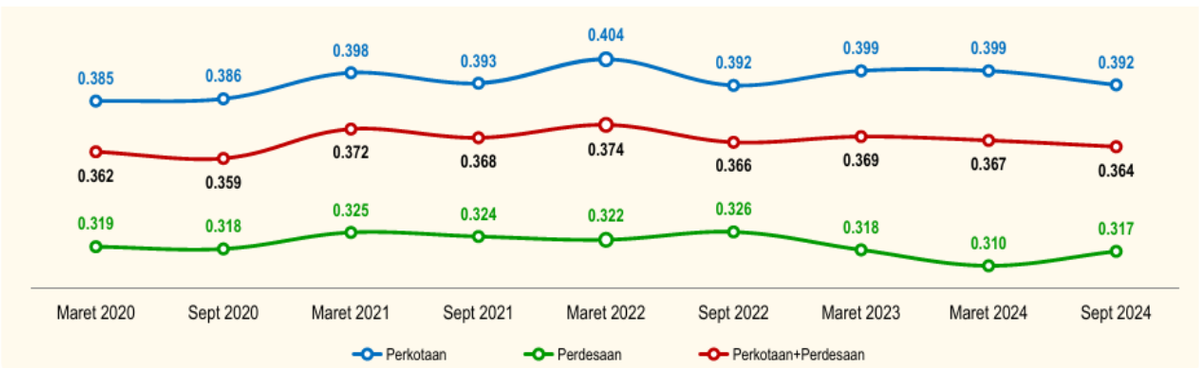

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.19.
Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Indeks Williamson merupakan suatu instrument dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah lain yang lebih tinggi. Apabila nilai Indeks Williamson mendekati angka 0 maka pembangunan suatu wilayah dianggap sangat merata, sedangkan apabila nilai indeks semakin jauh dari 0, maka terdapat ketimpangan pembangunan di suatu wilayah. Pada tahun 2024 Indeks Williamson Jawa Tengah sebesar 0,6472 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 0,6499.

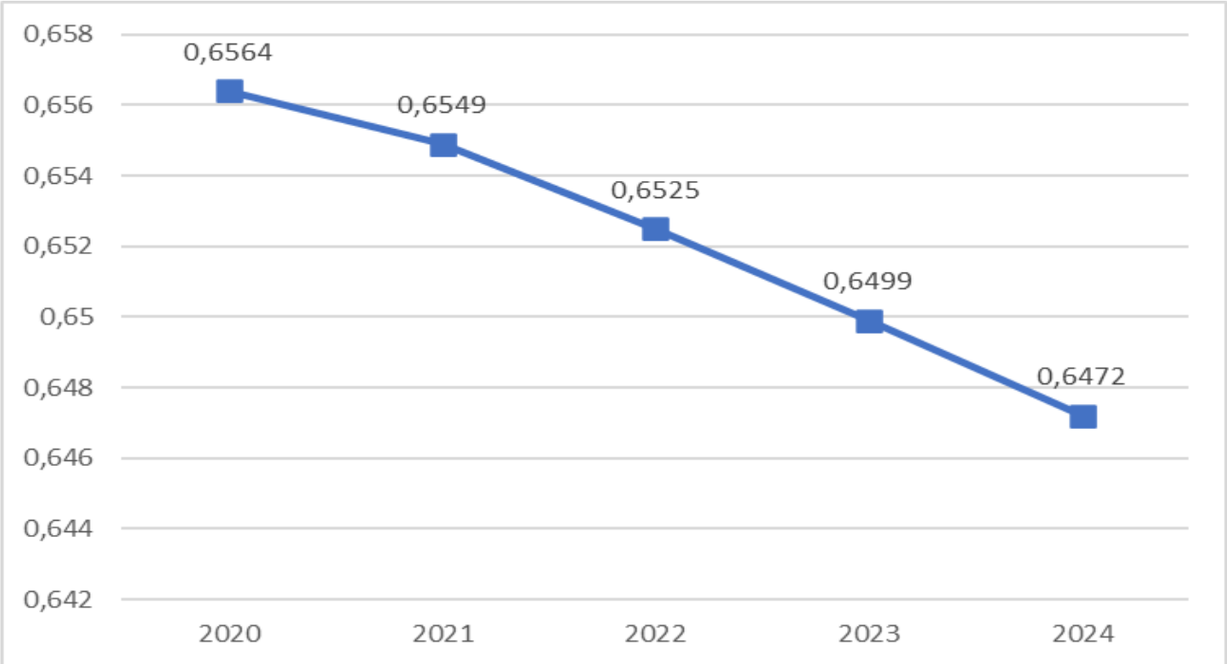

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.20.
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Jika melihat Indeks Williamson berdasarkan wilayah pengembangan, pada tahun 2022 wilayah pengembangan Wanarakuti lebih tinggi dibandingkan wilayah pengembangan yang lainnya yaitu sebesar 0,667. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah yang cukup besar. Wilayah pengembangan yang kategori ketimpangannya sedang adalah wilayah Purwomanggung. Sementara itu Banglor memiliki Indeks Williamson yang paling rendah yang menandakan bahwa wilayah tersebut pembangunannya merata, dimana karakteristik daerahnya hampir mirip yaitu pertanian dan pariwisata.

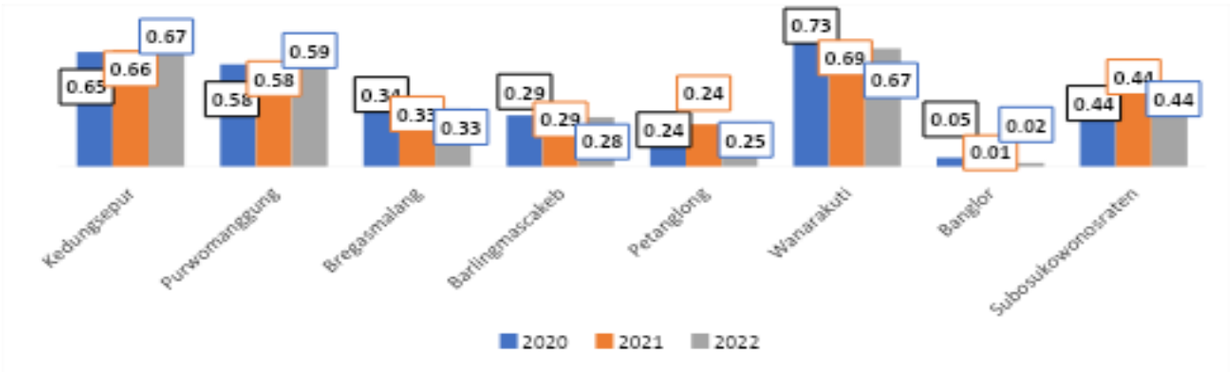

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.21.
Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

2.3.5. Indeks Daya Saing Daerah

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada empat komponen pembentuk, yaitu ekosistem inovasi, pasar sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung. Terdapat 12 pilar dan 64 indikator yang merepresentasikan ke-4 komponen pembentuk tersebut. Berdasarkan nilai IDSD yang dikeluarkan oleh BRIN, capaian IDSD Jawa Tengah pada tahun 2024 tumbuh lebih rendah sebesar 0,29 persen. Skor IDSD Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 3,84.

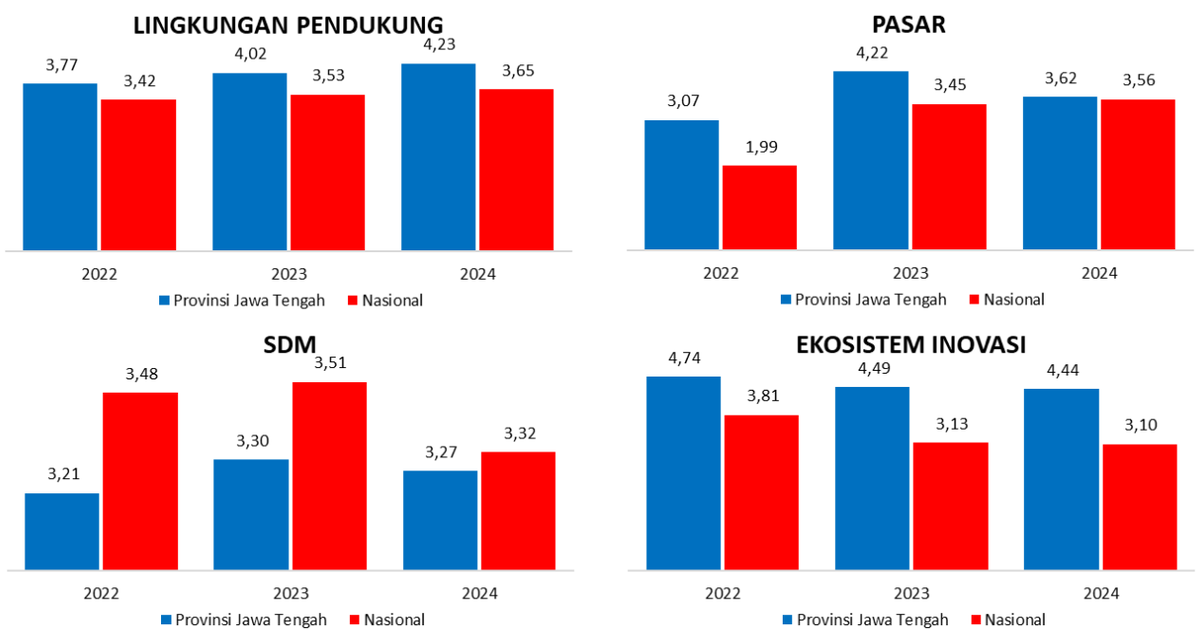

Sumber : BRIN, 2025.

Gambar 2.22.
Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Komponen Pembentuk Tahun 2022 - 2024

Dari keempat komponen pembentuk IDSD Jawa Tengah, hanya komponen lingkungan pendukung yang mengalami peningkatan. Penurunan cukup tajam pada komponen pasar disebabkan karena penurunan capaian pilar 9/sistem keuangan akibat penyesuaian pada beberapa indikator pembentuk. Sementara berdasarkan capaian ke-12 pilar IDSD, Jawa Tengah mampu tumbuh lebih baik

dibandingkan Nasional pada pilar 1 (4,90 persen), pilar 3 (2,37 persen), pilar 4 (17,08 persen), pilar 5 (0,24 persen) dan pilar 6 (10,23 persen).

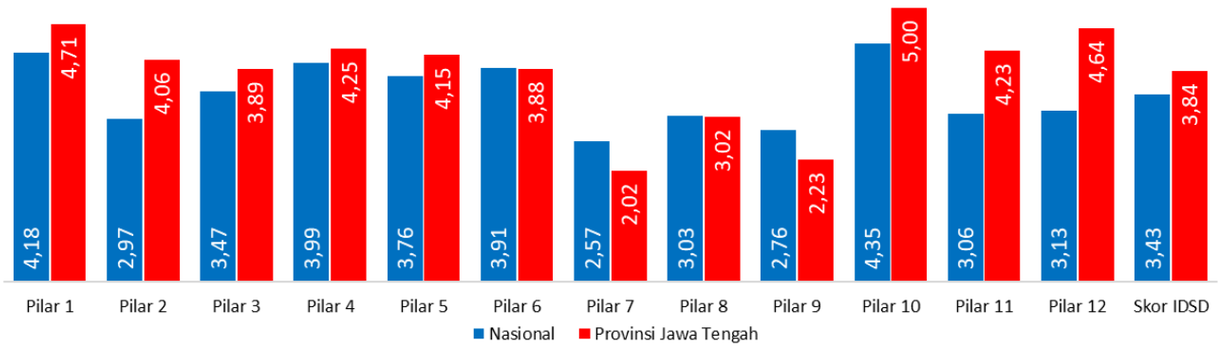

Sumber: BRIN, 2025

Gambar 2.23.
Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Pilar Tahun 2024

Capaian skor IDSD pada 35 Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa masih cukup banyak Kabupaten/Kota yang memiliki skor IDSD di bawah angka provinsi. Meski memiliki capaian IDSD yang lebih rendah dari provinsi, namun pertumbuhannya mampu lebih tinggi dari angka pertumbuhan provinsi.

Wilayah yang memiliki skor IDSD lebih tinggi dibandingkan provinsi antara lain, Kabupaten Sukoharjo (4,11), Kabupaten Banyumas (4,01), Kabupaten Semarang (3,87), Kabupaten Purworejo (3,85) dan Kabupaten Klaten (3,84), termasuk 6 wilayah Kota di Jawa Tengah. Sementara itu, lima wilayah dengan pertumbuhan terendah pada tahun yang sama antara lain, Kabupaten Grobogan (6,63 persen), Kabupaten Brebes (7,06 persen), Kabupaten Pekalongan (7,44 persen), Kota Pekalongan (7,50) dan Kota Surakarta (7,60 persen)

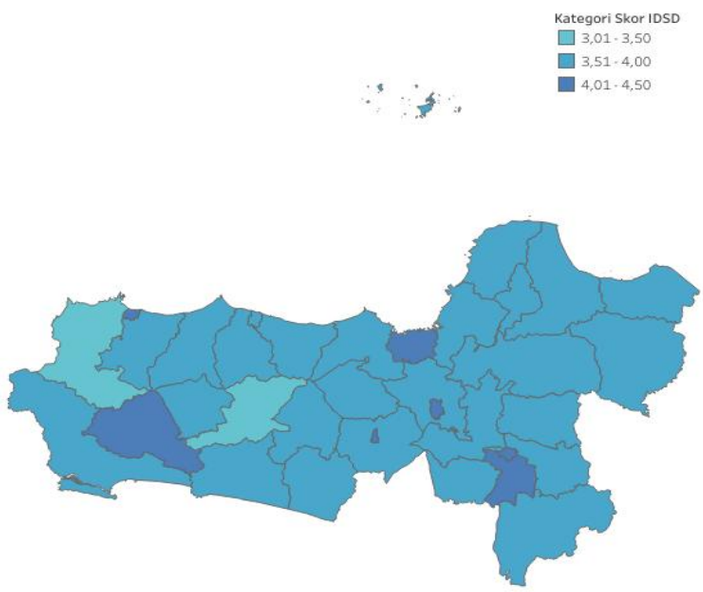

Sumber : BRIN, 2025

Gambar 2.24.
Capaian Skor IDSD Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024

2.3.6. Investasi

Sebagai salah satu komponen pengungkit pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah memerlukan investasi yang tinggi dan berkualitas. Mengacu pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), karakteristik realisasi investasi Jawa Tengah Tahun 2024 didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Asing (PMA) yang mencapai 35,37 triliun rupiah dari total realisasi investasi sebesar 88,44 triliun rupiah. Realisasi investasi tersebut mengalami kenaikan 14,83 persen dibanding tahun 2023 yang sebesar 77,02 triliun rupiah. Perkembangan realisasi nilai investasi secara detail sebagaimana pada Tabel 2.14. Dari sisi jumlah proyek, jumlah proyek PMDN di tahun 2024 jauh lebih besar dibanding PMA yakni 54.526 proyek PMDN berbanding 11.289 proyek PMA. Seluruh proyek tahun 2024 tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 409.338 orang yang terbagi pada tenaga kerja di PMA sebanyak 250.957 orang dan serapan tenaga kerja di PMDN sebanyak 158.381 orang.

Tabel 2.16.

Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan LKPM Tahun 2020 – 2024

Tahun	Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun)				
	PMA	PMDN		Jumlah	Pertumbuhan (%)
		LKPM	Non-LKPM		
2020	19,63	30,61	5,83	56,70	-5,80
2021	21,4	31,31	7,08	59,79	6,56
2022	33,9	24,99	9,52	68,41	4,40
2023	23,14	32,98	20,90	77,02	12,59
2024	35,37	33,30	19,77	88,44	14,83

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Kinerja realisasi investasi di Jawa Tengah tersebut didukung dengan keberadaan kawasan industri yang ada, terutama penambahan tenant di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Sebagaimana Tabel 2.2, dua kawasan industri terbesar di Jawa Tengah tersebut berkontribusi besar terhadap realisasi investasi di Jawa Tengah. Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri yang ada di Jawa Tengah terus diupayakan melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur pendukung, energi, air baku dan peningkatan pengelolaan Kawasan Industri yang lebih berkualitas. Selain itu usulan KITB menjadi Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan akan semakin meningkatkan minat pelaku usaha untuk merealisasikan investasi di Jawa Tengah. Potensi peningkatan investasi dari Kawasan Industri masih terbuka mengingat masih tersedianya lahan serta semakin meningkatnya dukungan infrastruktur yang tersedia.

Tabel 2.17.

Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Nama Kawasan Industri	Pengelola	Total Luas	Lahan Digunakan	Lahan Tersedia	Jumlah Tenant
1.	Kawasan Industri Kendal (Kawasan Ekonomi Khusus)	PT. Kawasan Industri Kendal	1.000 Ha	933 Ha	43 Ha	117
2.	Grand Batang City	PT. Kawasan Industri Terpadu Batang	3100 Ha	339 Ha	150 Ha (Fase 2)	28
3.	Batang Industrial Park	PT. Perkebunan dan Industri Segajung	287 Ha	99 Ha	4.2 Ha (3 kavling)	14
4.	Jatengland Industrial Park Sayung	PT. Jawa Tengah Lahan Andalan	300 Ha	172.29 Ha	100 Ha	21
5.	Aviarna Industrial Estate	PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara	462 Ha (Tahap I 64 Ha)	62.2 Ha	399.8 Ha	4
6.	Kawasan Industri Wijayakusuma	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	266 Ha	115 Ha	52,8 Ha	138
7.	BSB Industrial Park	PT. Karyadeka Alam Lestari	112 Ha	72,56 Ha	2,6 Ha (area yang ditawarkan) tidak dalam satu hamparan	52
8.	Kawasan Industri Cilacap	PT. Cilacap Segara Artha	82 Ha	-	-	-
9.	Kawasan Industri Candi	PT. Indo Permata Usahatama	350 Ha	350 Ha	-	n/a
10.	Kawasan Industri Candi	PT. Dibya Jaya Makmur	300 Ha	±300 Ha	Beberapa ribu m^2 tidak dalam satu hamparan	n/a

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan realisasi investasi melalui berbagai program dan kegiatan antara lain peningkatan promosi investasi, pelayanan perizinan, serta pengembangan iklim investasi. Dari promosi investasi dihasilkan kepeminatan melalui kegiatan *business forum* dan *business meeting*. Penyelenggaraan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) Tahun 2024 bekerja sama dengan Bank Indonesia setidaknya menghasilkan 12 Letter of Intent (LoI) dengan total rencana investasi sebesar Rp 8,83 triliun. Di luar CJIBF, terdapat 20 LoI dari berbagai negara dan berbagai sektor sehingga total terdapat 32 LoI di Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana pada Gambar. Taiwan merupakan negara dengan kepeminatan terbanyak diikuti oleh Jepang, Singapura, Tiongkok, dan Thailand. Dari 32 kepeminatan tersebut, sektor manufaktur merupakan kepeminatan terbanyak dengan 16 kepeminatan disusul infrastruktur sebanyak 9 kepeminatan dan industri sebanyak 4 kepeminatan.

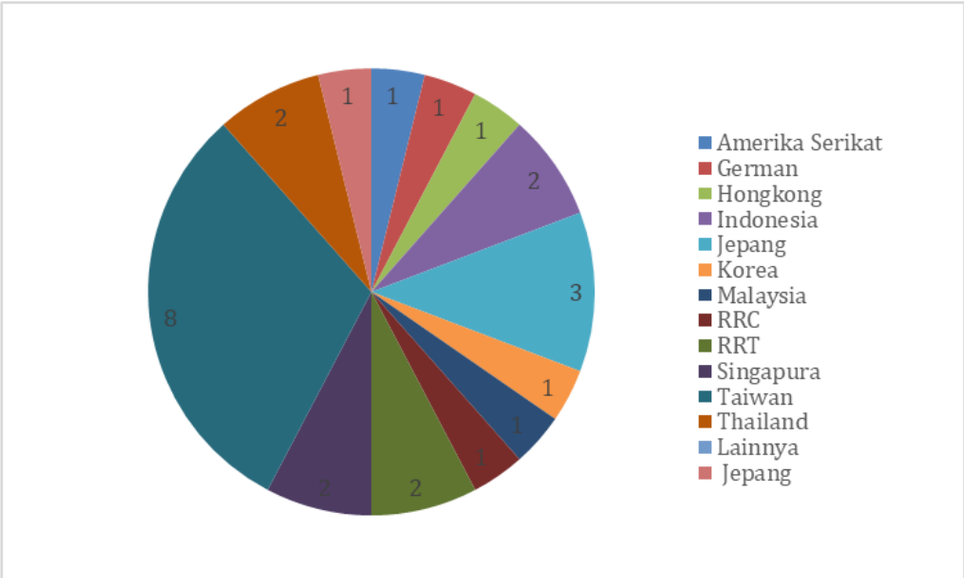

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.25.
Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Asal Negara

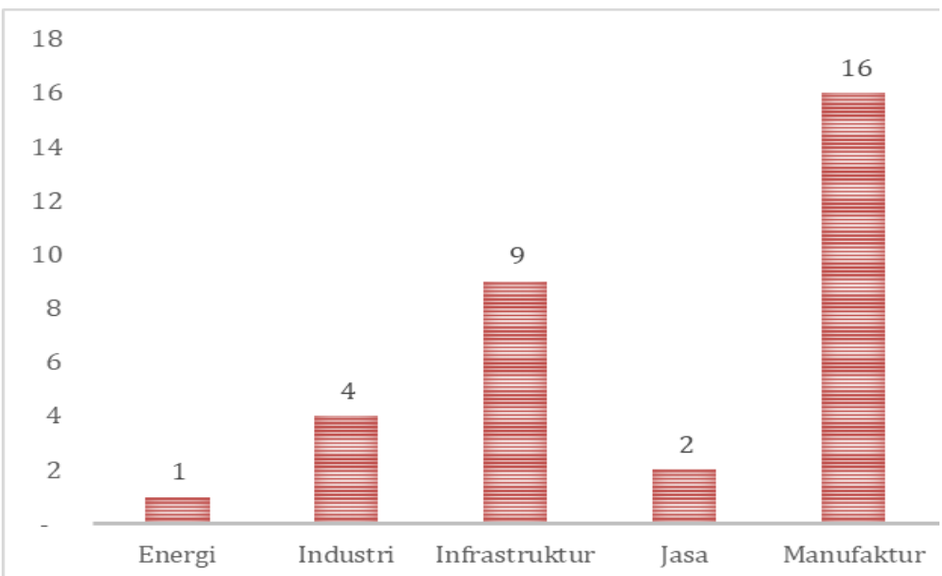

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.26.
Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Sektor

Selain promosi investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong peningkatan pelayanan perizinan. Data DPMPTSP menunjukkan tren peningkatan jumlah izin yang diterbitkan dari sebanyak 5.626 izin pada Tahun 2020 menjadi 50.556 pada Tahun 2024 (data hingga bulan Oktober). Berbagai program dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan antara lain melalui terobosan Layanan Konsultasi dan Pendampingan Terpadu Secara Elektronik (Lakon-e Pandu), Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (Pena Si Johan), JEBOL IKAN (jemput bola perizinan kapal ikan kewenangan Provinsi, serta layanan perizinan secara online menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng) yang telah dilengkapi dengan fitur digital signature, maupun digitalisasi promosi melalui aplikasi Central Java Investment Platform (CJIP).

Selain itu, dalam rangka mempermudah dan memperluas layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memfasilitasi pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan telah beroperasi 35 MPP di 35 Kabupaten/Kota.

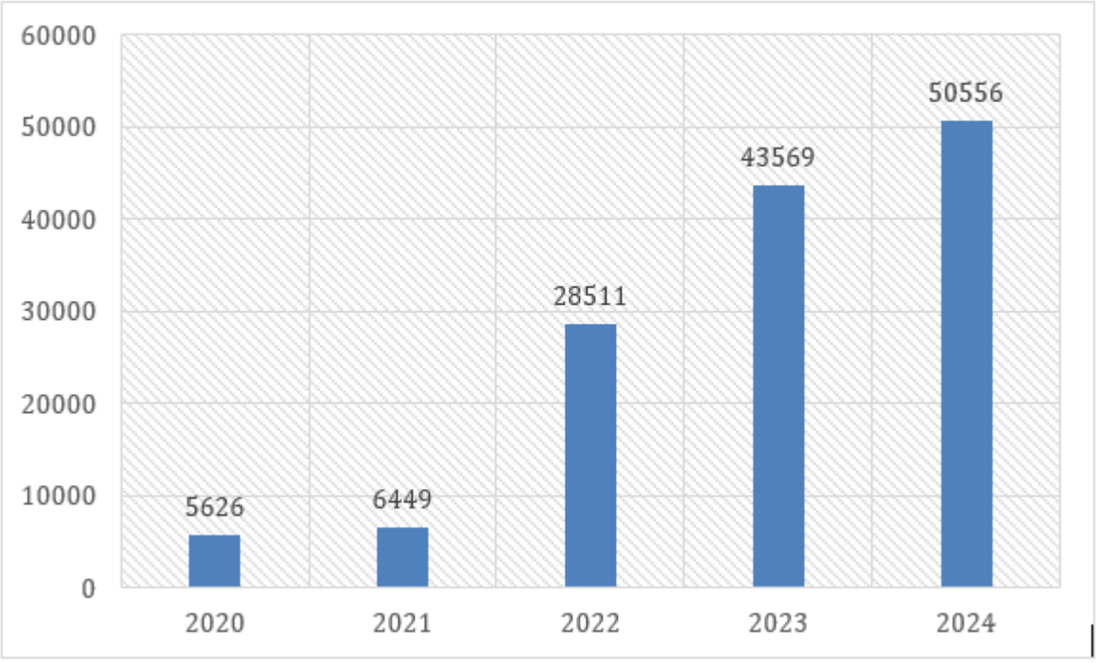

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.27.
Jumlah Izin yang Diterbitkan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2024

Upaya mendorong peningkatan investasi Jawa Tengah juga dilakukan melalui berbagai regulasi. Pemerintah Provinsi Jateng telah menerbitkan Perda No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Pergub No 36 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan fiskal maupun non fiskal bagi investor. Terkait penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal, telah diterbitkan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Sejauh apa peran investasi pada perekonomian Jawa Tengah tercermin dari kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang kapital seperti bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya. Gambar 2.24 menunjukkan bahwa nilai PMTB pada periode 2019-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2019 nilai PMTB Jawa Tengah mencapai Rp 448,35 Triliun meningkat menjadi Rp 555,01 Triliun pada Tahun 2024. Nilai PMTB ini didominasi oleh PMTB bangunan dengan rata-rata mencapai 85%. Namun demikian dari sisi kontribusi PMTB terhadap PDRB (ADHB), terjadi tren penurunan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2024. Tahun 2019 kontribusi PMTB terhadap PDRB sebesar 32,93% sedangkan pada tahun 2024 kontribusi PMTB menjadi 30,53%.

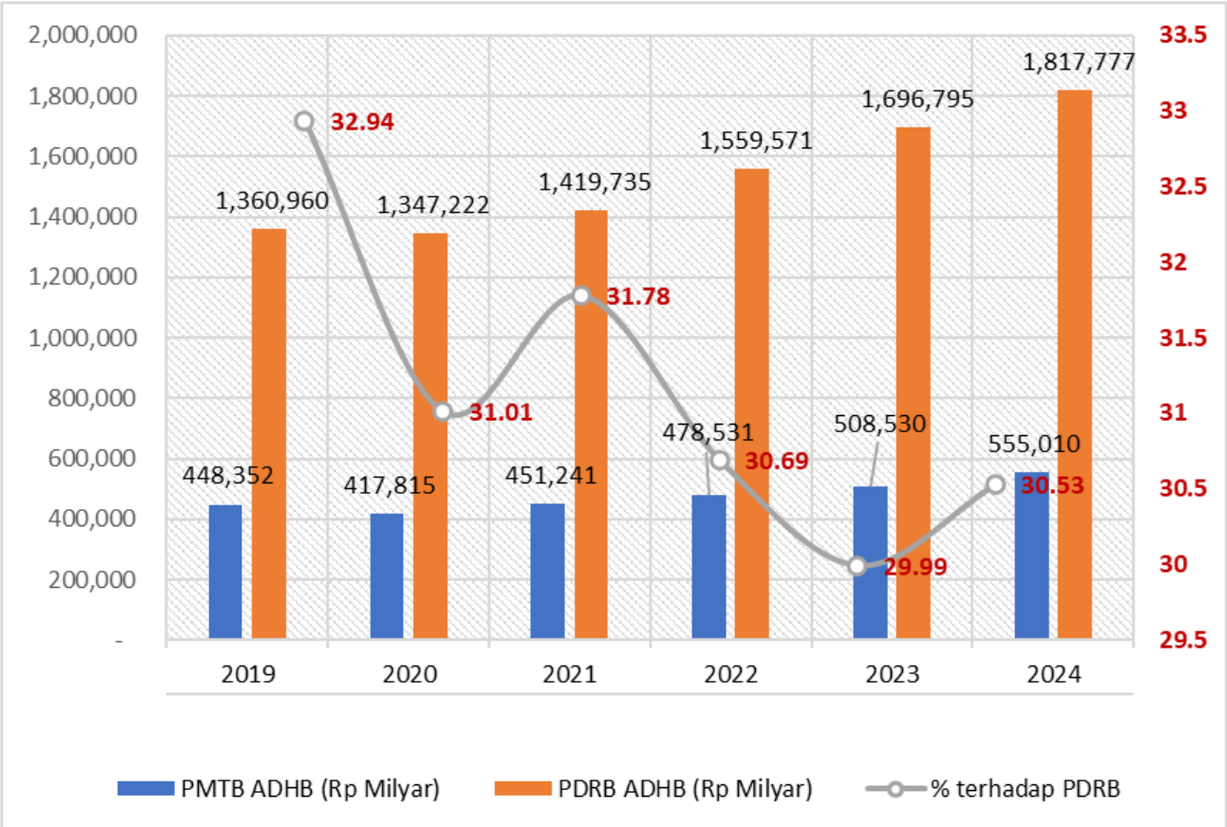

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.28.
Nilai PMTB dan Kontribusi PMTB Terhadap PDRB Jawa Tengah (ADHB)
Tahun 2019 – 2024 (%)

Efisiensi investasi di suatu daerah menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha yang dicerminkan dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Nilai ICOR menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi dapat terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah, apakah bersifat capital intensive atau labour intensive. Angka ICOR Jawa Tengah hingga 2023 masih relatif tinggi sebesar 6,05 (Gambar 2.5). Tingginya nilai ICOR ini menunjukkan penggunaan kapital yang belum efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

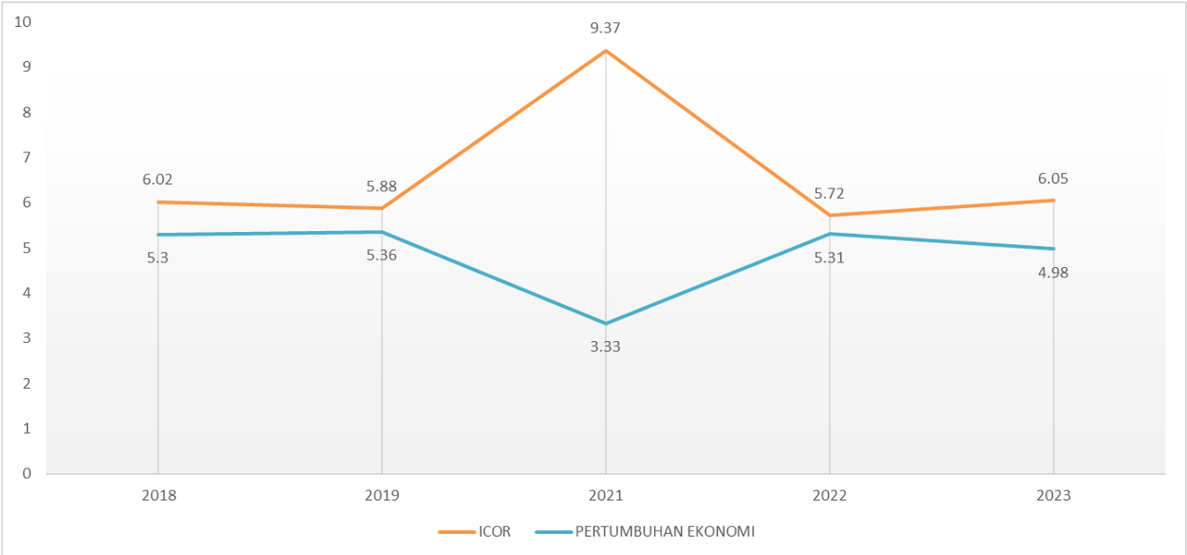

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.29.
Nilai ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

2.3.7. Pertanian

a. Produksi Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan sebagai basis penumpu pangan di Jawa Tengah dan penyokong tercapainya swasembada pangan nasional. Hal tersebut didukung dengan Jawa Tengah salah satu sentra padi di Pulau Jawa. Potensi pertanian Jawa Tengah didukung melalui sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pada kurun waktu 2021-2025, jumlah produksi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan relatif fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani di Jawa Tengah, selain hal tersebut, kualitas SDM petani juga masih membutuhkan intervensi untuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah produksi di sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi salah satu faktor pembangunan pada Pembangunan Ekonomi Hijau.

Pada periode tahun 2021-2024 komoditas padi mengalami trend yang menurun. Hal tersebut dikarenakan perubahan standar pengukuran produksi pada komoditas padi menggunakan kerangka sampling area (KSA). Pada tahun 2024 terjadi penurunan produksi komoditas padi dikarenakan adanya penurunan luas panen padi sebanyak 91,07 hektare atau 5,54 persen dibandingkan luas panen padi di tahun 2023 yang sebesar 1,64 juta hektare. Bencana banjir di bulan Januari-Februari Tahun 2024 di beberapa wilayah sentra produksi dan kekeringan menyebabkan keterbatasan air sehingga terjadi gagal panen dan penurunan luas panen.

Produksi pada komoditas jagung juga masih fluktuatif dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 karena adanya kenaikan luas panen sebanyak 0,07 hektare atau 17,59 persen dibandingkan luas panen pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada komoditas kedelai, produksinya menurun dikarenakan luas tanam kedelai yang semakin menurun, petani kedelai masih bergantung pada bantuan benih, dan minat petani untuk menanam kedelai berkurang dibandingkan komoditas lain karena belum adanya jaminan harga. Faktor lain

termasuk kerentanan terhadap hama penyakit, kurangnya dukungan dari industri benih unggul dan kemitraan, serta tantangan budidaya yang dianggap lebih berisiko dibandingkan komoditas lain.

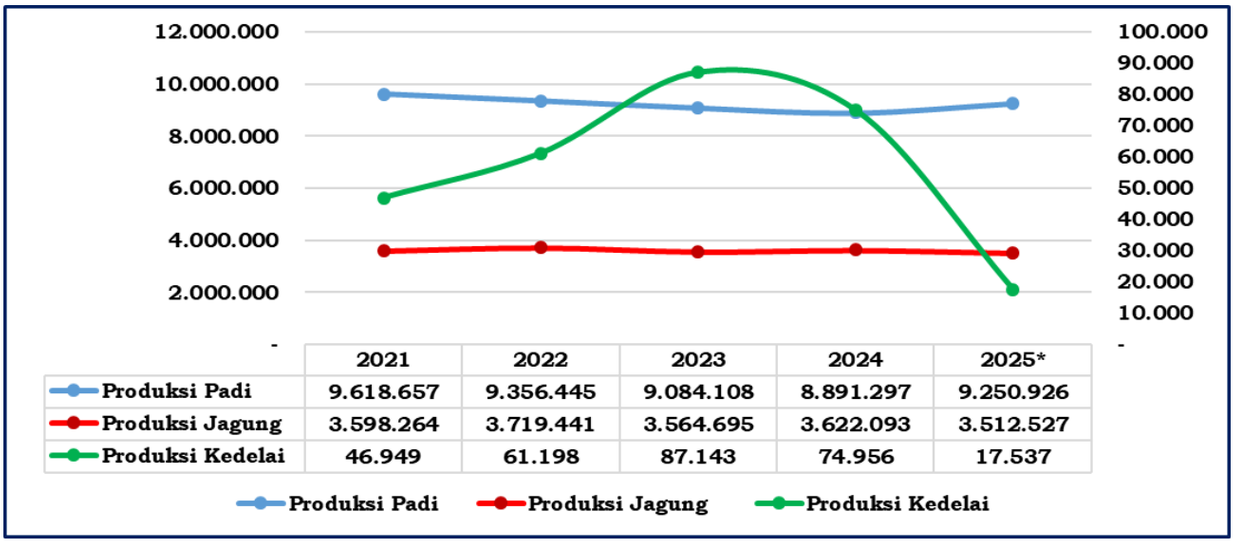

	2021	2022	2023	2024	2025*
Produksi Padi	9.618.657	9.356.445	9.084.108	8.891.297	9.250.926
Produksi Jagung	3.598.264	3.719.441	3.564.695	3.622.093	3.512.527
Produksi Kedelai	46.949	61.198	87.143	74.956	17.537

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2025.

Gambar 2.30.
Perkembangan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Untuk sub sektor hortikultura, komoditas utama di Jawa Tengah terdiri dari bawang merah dan cabai besar. Produksi bawang merah dan cabai besar pada kurun waktu Tahun 2020 - 2024 mengalami fluktuasi, dengan produksi tertinggi cabai besar pada Tahun 2023 sebesar 249.208 Ton. Terjadi penurunan produksi Cabai yang diakibatkan bencana banjir pada bulan januari-februari tahun 2024 di beberapa wilayah sentra produksi dan kekeringan yang menyebabkan mundurnya jadwal tanam akibat keterbatasan air. Pada komoditas bawang merah dan cabai besar masih diperlukan intervensi pada penyimpanan hasil panen dan fasilitasi distribusi untuk menjaga stabilitas stok dan harga mengingat komoditas ini menjadi pemicu inflasi meskipun Jawa Tengah termasuk kedalam provinsi produsen bawang merah dan cabai nasional.

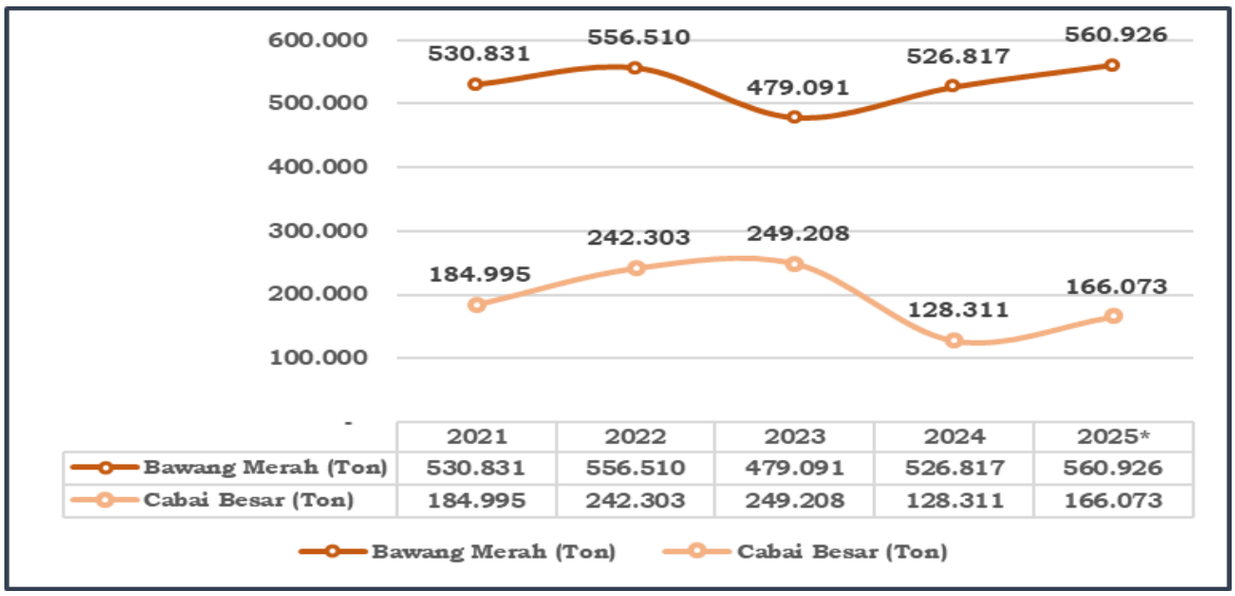

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Gambar 2.31.
Perkembangan Produksi Bawang Merah dan Cabai Besar
Tahun 2021-2025

Sementara itu, komoditas strategis tanaman perkebunan di Jawa Tengah terdiri dari tebu, kopi, dan kelapa. Produksi komoditas tebu mengalami peningkatan produksi dari tahun 20200 hingga 2024, upaya peningkatan produktivitas pada komoditas tebu antara lain melalui bongkar roton dan penggunaan bibit unggul. Demikian juga dengan produksi kopi dan kelapa juga mengalami fluktuasi dengan produksi kopi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 26.744 ton pada tahun 2023 dan produksi kelapa sebanyak 174.041 juta ton pada tahun 2020. Pada tahun 2024, produksi kopi mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Dalam menunjang peningkatan produksi komoditas pertanian, diperlukan optimalisasi pengelolaan lahan aset kebun untuk budidaya perbenihan yang berkualitas dan penerapan teknologi perbenihan pada komoditas strategis.

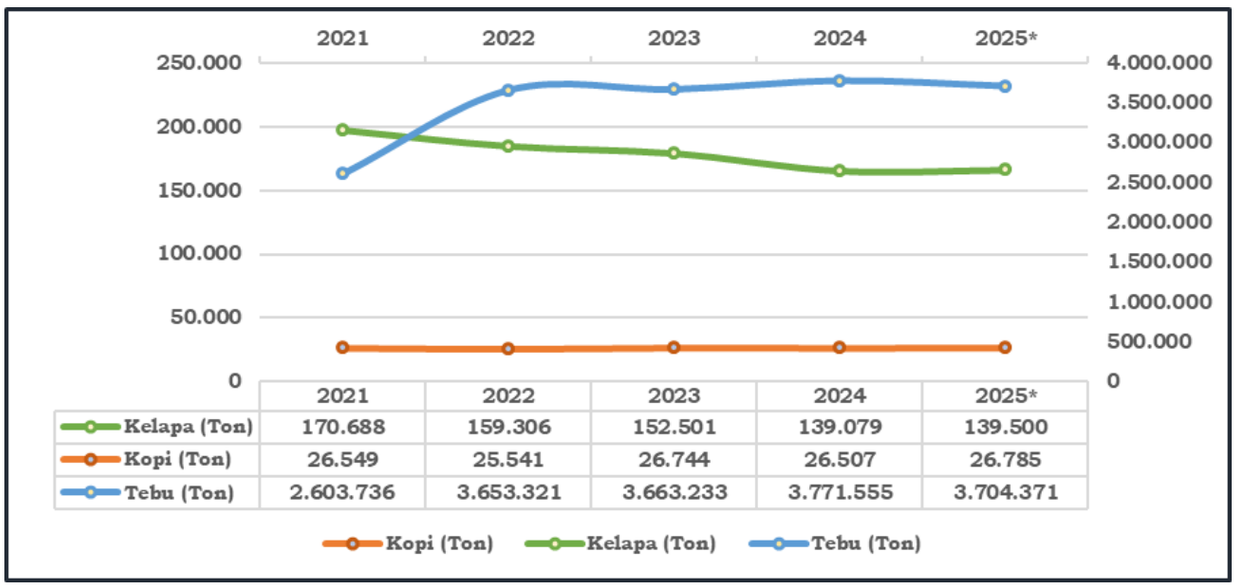

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Gambar 2.32.
Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2021-2025

b. Produksi Peternakan

Produksi hasil peternakan pada daging, dan telur di Jawa Tengah dari tahun 2020-2024 relatif mengalami peningkatan, sedangkan produksi susu relatif mengalami penurunan. Produksi daging tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 930.177.944 Kg, produksi susu tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 105.613.011 Kg dan produksi telur mencapai titik tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 902.097.949 Kg. Tantangan dalam peningkatan produksi susu adalah adanya penurunan populasi sapi perah dan penurunan kualitas genetik sapi perah di Jawa Tengah. Banyak peternak sapi perah beralih ke usaha lain dianggap lebih menguntungkan. Faktor ketersediaan hijauan pakan dan masih ditemukan peredaran pakan konsentrat belum sesuai SNI yang mengakibatkan produksi tidak optimal. Selanjutnya tantangan peningkatan produksi telur yaitu antara lain harga pakan yang tinggi, ketersediaan pakan asal jagung yang belum berlanjut sementara ketergantungan terhadap jagung sangat tinggi produktivitas. Produksi daging, telur dan susu dapat dilihat pada gambar berikut.

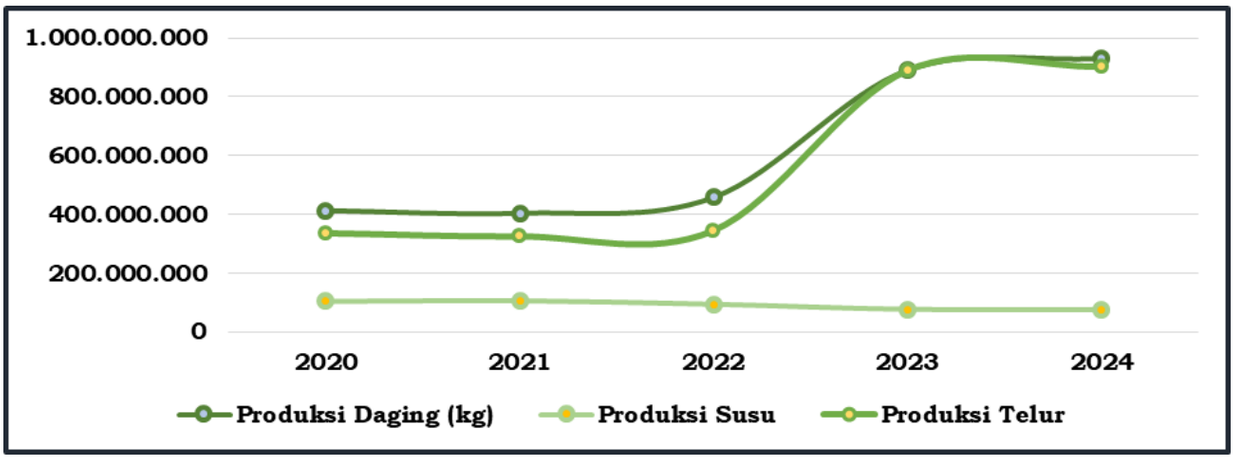

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2024

Gambar 2.33.
Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur
Tahun (2020-2024)

Pada kurun waktu Tahun 2020-2024, jumlah populasi sapi potong dan kambing cenderung mengalami penurunan sedangkan untuk ayam cenderung naik khususnya pada tahun 2022. Salah satu penyebab penurunan populasi ternak disebabkan oleh penyakit hewan menular strategis (PHMS).

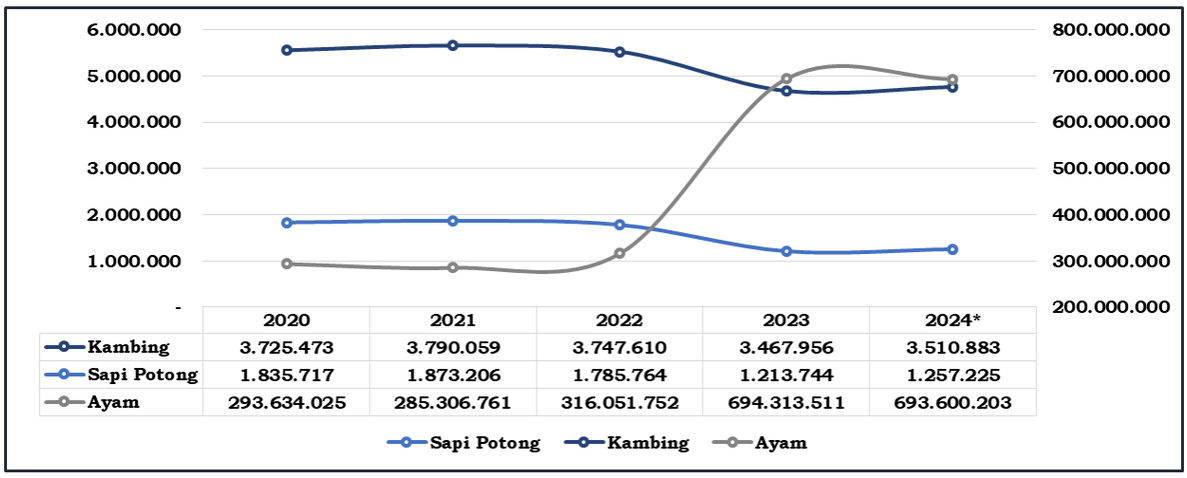

	2020	2021	2022	2023	2024*
Kambing	3.725.473	3.790.059	3.747.610	3.467.956	3.510.883
Sapi Potong	1.835.717	1.873.206	1.785.764	1.213.744	1.257.225
Ayam	293.634.025	285.306.761	316.051.752	694.313.511	693.600.203

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2024

Gambar 2.34.
Perkembangan Populasi Sapi Potong, Kambing, dan Ayam
Tahun (2020-2024)

c. Produksi Perikanan dan Kelautan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah, selain itu juga diarahkan untuk menginisiasi Pembangunan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau. Pembangunan Ekonomi Biru ditopang oleh tiga pilar antara lain pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada pilar ekonomi didukung oleh perikanan tangkap, perikanan budidaya, manufaktur berbasis kelautan, dan pariwisata berbasis kelautan; pilar lingkungan didukung oleh kualitas sumber daya, konservasi laut, dan energi terbarukan; serta pilar sosial didukung oleh ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan yang berkurang. Sedangkan pada Pembangunan Ekonomi Hijau, aspek perikanan budidaya menjadi salah satu faktor pembangunnya.

Di sisi lain, terkait aspek ketahanan pangan, sektor kelautan dan perikanan ditopang oleh perikanan tangkap dan budidaya; pengelolaan kawasan pesisir termasuk di dalamnya pergaraman; pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pada perikanan tangkap tren produksi perikanan tangkap fluktuatif dari tahun 2020-2024, hal ini disebabkan karena: (1) Implementasi kebijakan Perikanan Ikan Terukur (PIT) yang ditunda sampai 31 Desember 2025 sehingga nelayan dapat mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan asal; (2) Adanya petugas enumerator dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas mendata jumlah ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo dan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak; dan (3) Cuaca atau iklim pada tahun 2024 relatif aman terkendali sehingga nelayan (kapal besar) dapat melaut untuk menangkap ikan. Perkembangan produksi perikanan tangkap ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.35.
Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan tangkap, Provinsi Jawa Tengah memiliki 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Secara umum Pelabuhan Perikanan di Jawa Tengah telah memiliki kriteria yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kapasitas dermaga maupun kolam pelabuhan dan *breakwater* (penahan gelombang) mengingat semakin meningkatnya jumlah kapal.

Tabel 2.18.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah

KRITERIA TEKNIS :		**PPP Tegalsari**	**PPP Karimunjawa**	**PPP Tasikagung**	**PPP Bajomulyo**	**PPP Morodemak**	**PPP Tawang**	**PPP Klidanglor**	**PPP Wonokerto**	**PPP Asemdoyong**	**PPP Larangan**	**PPP Lohgending**
Fasilitas	*Standar*											
Tambat labuh Kapal	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT
Panjang Dermaga	≥ 100 m	694 m	160 m	2400 m	693 m	400 m	450 m	300 m	450 m	215 m	130 m	414 m
Kedalaman Kolam	Min >2 m	sesuai	Sesuai	Sesuai	sesuai	sesuai	Sesuai	Sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	Sesuai
Daya tampung	30 Unit Kapal/Total 300 GT	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal
Lahan	5 Ha	16.3 Ha	16,4 Ha	9,659 Ha	6,36 Ha	3,9 Ha	0,7 Ha	50 Ha	0,8 Ha	2,2 Ha	5,1 Ha	18,7 Ha
PENUNJANG :												
Hasil Perikanan	rata-rata 5 Ton/Hari	169 Ton	5,2 Ton	19,2 Ton	87 Ton	13 Ton	1,5 Ton	51 Ton	0,5 Ton	29 Ton	2,8 Ton	0,9 Ton
Terdapat Industri Pengolahan Ikan	Perusahaan / UPI mikro	27	5	220	10	127	Ada	62	Ada	95	Ada	Ada
Industri Penunjang Lainnya	perusahaan	478	1	2	19	4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
KETERANGAN :												
Jumlah Kapal		335	358	359	318	46	759	153	421	253	138	83
< 10 GT		1	351	0	0	0	700	0	332	227	109	83
10-30 GT		54	7	155	34	46	59	114	89	26	29	0

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Sehubungan dengan risiko kecelakaan yang dihadapi nelayan saat melaut cukup tinggi, maka perlu diberikan perlindungan kepada nelayan dalam bentuk asuransi nelayan. Asuransi nelayan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi individu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, nelayan buruh, wanita nelayan dan ABK kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).

Sektor produksi perikanan budidaya relatif mengalami peningkatan karena didukung dengan peningkatan luas lahan budidaya dan adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan. Perkembangan produksi perikanan budidaya ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

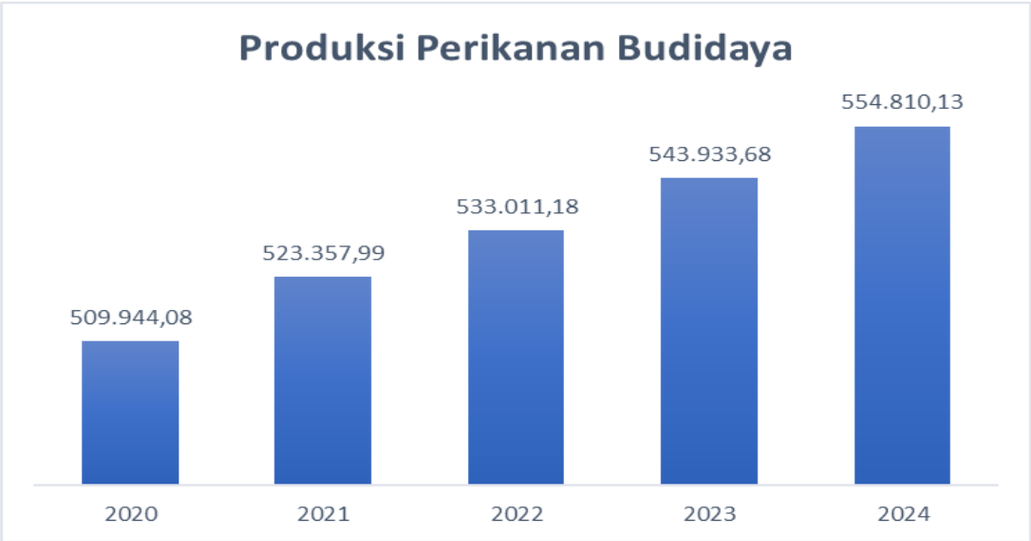

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.36.
Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan budidaya, Provinsi Jawa Tengah memiliki sepuluh loka perikanan budidaya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Budidaya Air Tawar dan Payau Nomor B.22151/DJPB/X/2021, bahwa pemerintah provinsi berperan sebagai penyedia induk unggul dan benih bermutu di lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Dalam lima tahun terakhir, produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan. Namun terdapat beberapa tantangan dalam mengelola perikanan budidaya antara lain kondisi prasarana dan sarana yang belum memadai, serta penurunan kualitas dan kuantitas induk nila, lele, dan gurame. Penurunan kualitas induk tersebut menyebabkan calon induk yang dihasilkan menurun performa dan jumlahnya. Penurunan performa terjadi pada induk kelas GGPS (*Great Grand Parent Stock*), kelas GPS (*Grand Parent Stock*) maupun benih kelas sebar.

Selain itu, pada aspek kelestarian sumber daya ikan perlu dilakukan upaya pelestarian ikan jenis endemik lokal Jawa Tengah, misalnya jenis ikan beong, wader, nilem, tawes, derbang, gabus, dan dewa. Upaya pelestarian ini memberi manfaat untuk aspek konservasi maupun aspek ekonomi. Dalam aspek konservasi berfungsi untuk mempertahankan dari kepunahan plasma nutfah serta mempertahankan keanekaragaman jenis ikan lokal di perairan umum. Sedangkan secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan nelayan perairan umum daratan

karena ikan endemik memiliki rasa yang khas, unik serta bermanfaat bagi kesehatan sehingga harganya mahal. Namun masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu belum adanya prasarana dan sarana secara khusus untuk mengembangkan ikan endemik.

Sedangkan pada pergaraman, secara umum produksi garam cenderung fluktuatif mengalami peningkatan di tahun 2023 namun menurun kembali di tahun 2024. Perkembangan produksi garam ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

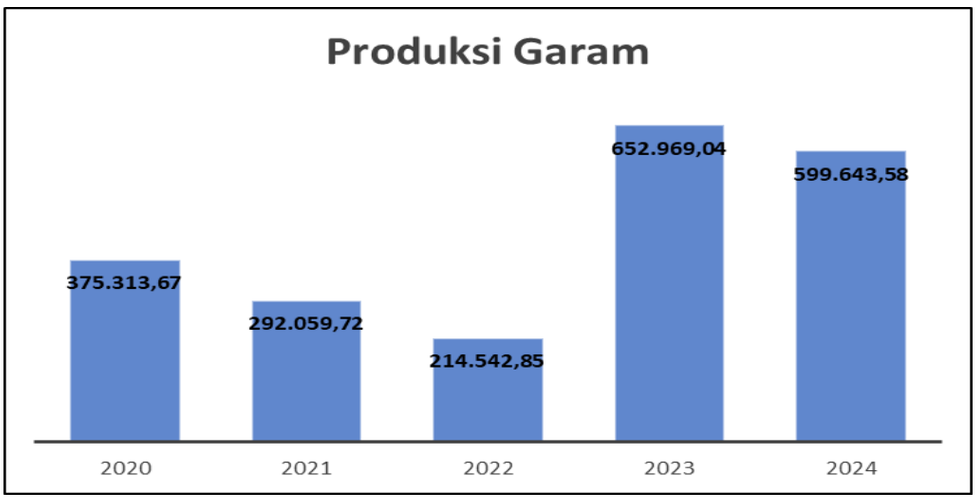

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.37.
Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Di sisi lain, tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah pada periode 2020 – 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih berada di bawah angka nasional. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

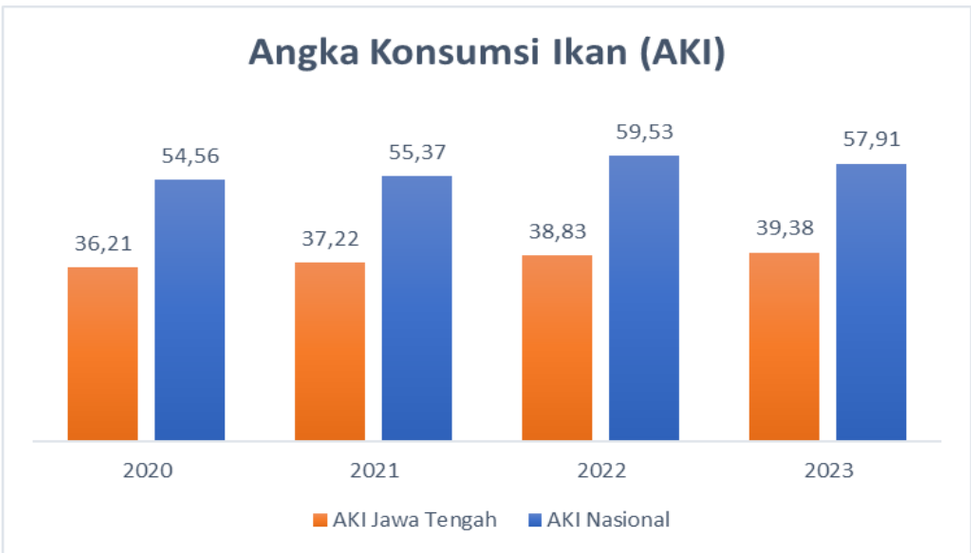

Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.38.
Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Angka konsumsi ikan Jawa Tengah masih dibawah nasional disebabkan beberapa hal yaitu antara lain masih terdapat pemahaman yang salah di masyarakat bahwa ikan dapat memberikan dampak buruk berupa gatal, bau amis,

dan alergi; harga produk ikan relatif lebih tinggi dibandingkan sumber protein lainnya; serta ragam pengolahan ikan yang belum bervariasi. Sedangkan pada aspek pengolahan masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil dengan segala keterbatasan terutama pada aspek pemenuhan standar kelayakan produksi.

2.3.8. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Jumlah koperasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 jumlah koperasi sebanyak 19.447 unit dan pada tahun 2024 sebanyak 21.624 unit, hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan kemudahan dalam membentuk koperasi melalui disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meskipun jumlah koperasi mengalami kenaikan tetapi tingkat keaktifan cenderung menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2020 persentase koperasi aktif sebesar 67,35% dan pada tahun 2024 persentase koperasi aktif sebesar 45,71%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian Jawa Tengah dan kinerja koperasi. Secara lengkap data koperasi se-Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19.
Persentase Koperasi Aktif Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Koperasi	19.447	20.777	21.018	21.276	21.624
2.	Jumlah Koperasi aktif	13.090	10.770	10.327	10.621	9.886
3.	Prosentase Kopereasi Aktif (%)	67,35	48,16	49,13	48,22	45,71

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2024

Hasil pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi dapat dilihat dari capaian indikator persentase koperasi sehat. Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 sebesar 23,44 persen sedangkan pada tahun 2024 sebesar 35,40 persen, hal ini didukung adanya kolaborasi antar bidang dalam pembinaan koperasi melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan sehingga koperasi mampu meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi dalam kelembagaan dan usahanya. Untuk Perkembangan tingkat Kesehatan koperasi di Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.20
Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Se-Jawa Tengah (KSP/USP)	12.774	12.903	13.166	13.218	12.876
2.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Provinsi (KSP/USP) yang dinilai kesehatannya	128	222	375	390	274
3.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (unit)	30	29	89	106	97
4.	Prosentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (%)	23,44	13,06	23,73	27,18	35,40

Sumber: Dinkop UKM Prov. Jateng, 2024.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara sinergi bersama dengan segenap pihak senantiasa melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan. Jumlah UMKM yang telah dibina menunjukkan peningkatan dari sebanyak 167.391 unit pada tahun 2020 menjadi 193.200 unit pada tahun 2024. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM juga meningkat dari sebesar 1.298.007 orang pada tahun 2020 menjadi sebanyak 1.367.433 orang pada tahun 2024. Aset UMKM juga meningkat dari sebesar 38,353 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 39,506 miliar rupiah pada tahun 2024. Demikian juga omset mengalami peningkatan dari sebesar 67,087 miliar pada tahun 2020 menjadi 69,774 miliar pada tahun 2024. Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21.
Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UMKM Binaan	UMKM	167,391	173,431	180,579	187.746	193.200
	- Produksi/Non Pertanian	UMKM	57,527	60,449	65,063	70.519	75.565
	- Pertanian	UMKM	27,653	28,284	28,400	28.483	28.555
	- Perdagangan	UMKM	62,083	63,965	65,979	67.098	67.256
	- Jasa	UMKM	20,128	20,733	21,137	21.646	21.824
2	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	1,298,007	1,311,015	1,330,343	1.352.136	1.367.433
3	Asset	Rp. Milyar	38,353	38,521	38,898	39.221	39.506
4	Omzet	Rp. Milyar	67,087	68,242	68,581	69.381	69.774

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2024.

Dukungan kredit perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank menjadi hal yang cukup penting dalam rangka pengembangan UMKM. Penyaluran kredit bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari tahun 2020-2024 per kabupaten/kota yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22.

Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2019-2024 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Penyaluran Kur per wilayah	Tahun											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)
1	KAB. CILACAP	41,355	960,285,860,282	49,966	1,394,346,710,619	67,017	2,129,737,861,185	71,016	2,624,919,833,453	52.614	1.840.190.849.426	56.275	2.176.554.998.479
2	KAB. BANYUMAS	55,115	1,282,747,263,690	62,067	1,722,310,316,244	81,032	2,592,038,105,781	84,593	3,076,948,656,311	60.395	2.111.050.542.451	53.699	2.006.136.712.509
3	KAB. PURBALINGGA	25,654	602,714,584,855	27,689	803,732,756,908	40,839	1,299,152,047,779	40,276	1,442,972,839,914	32.626	1.058.008.932.917	31.673	1.126.294.944.936
4	KAB. BANJARNEGARA	29,766	632,705,263,546	36,186	899,705,181,588	42,432	1,251,222,195,514	44,733	1,521,610,585,804	29.647	1.003.269.757.964	33.845	1.266.746.284.449
5	KAB. KEBUMEN	25,513	573,708,207,067	34,149	952,579,273,357	42,936	1,388,686,443,433	41,576	1,645,011,183,407	32.372	1.233.727.118.960	32.993	1.328.623.172.069
6	KAB. PURWOREJO	21,332	408,576,873,790	28,451	698,850,237,182	35,719	1,027,427,376,945	36,796	1,332,611,684,888	24.644	959.659.862.318	25.431	1.050.975.866.811
7	KAB. WONOSOBO	23,057	515,131,370,783	29,502	786,462,223,780	32,089	1,087,479,988,575	34,258	1,335,876,474,453	24.735	963.015.421.204	25.826	1.060.812.027.276
8	KAB. MAGELANG	32,030	732,548,594,861	40,950	1,097,838,191,734	46,039	1,460,713,188,234	49,489	1,867,082,199,837	33.043	1.272.358.457.628	35.678	1.420.970.721.587
9	KAB. BOYOLALI	31,959	828,780,579,519	37,366	1,112,557,697,460	45,996	1,606,818,765,940	49,694	2,077,453,794,156	32.841	1.480.605.654.608	34.456	1.589.131.804.968
10	KAB. KLATEN	37,544	982,285,115,877	51,196	1,444,646,931,716	61,939	2,121,148,190,896	63,467	2,681,277,315,450	38.966	1.830.230.807.851	39.400	1.717.336.765.089
11	KAB. SUKOHARJO	25,087	706,836,957,302	34,744	1,081,776,881,390	42,854	1,582,353,275,797	41,976	1,920,002,945,800	29.850	1.464.647.494.075	30.205	1.509.879.776.765
12	KAB. WONOGIRI	25,496	685,671,001,093	35,877	1,087,998,374,407	46,919	1,590,755,342,861	49,380	2,044,594,999,547	26.632	1.187.220.565.189	30.638	1.317.800.477.108
13	KAB. KARANGANYAR	27,911	722,856,807,398	35,901	1,088,590,422,286	43,330	1,569,531,753,495	44,436	2,053,690,544,527	28.001	1.442.136.910.636	34.262	1.774.156.628.605
14	KAB. SRAGEN	34,534	899,981,114,268	40,635	1,300,547,042,229	52,677	2,013,289,872,710	54,400	2,541,688,588,633	33.726	1.672.257.577.725	36.412	1.884.137.795.221
15	KAB. GROBOGAN	49,175	979,056,006,113	67,026	1,542,288,553,779	82,266	2,405,075,535,917	89,416	3,173,851,980,803	54.037	2.088.427.262.757	60.687	2.550.340.446.916
16	KAB. BLORA	57,549	1,210,374,601,719	73,654	1,699,912,069,917	75,130	2,104,246,917,986	76,514	2,611,075,351,064	41.764	1.592.526.050.133	44.895	1.866.536.759.518
17	KAB. REMBANG	25,223	544,814,780,697	28,769	699,336,336,217	32,345	1,010,725,024,881	36,240	1,369,369,188,553	27.307	1.015.201.535.982	29.269	1.189.514.476.245
18	KAB. PATI	66,826	1,486,154,011,274	79,555	2,249,691,305,260	80,544	2,797,359,822,366	83,493	3,631,451,274,447	60.426	2.562.022.051.348	64.454	2.943.916.562.267
19	KAB. KUDUS	23,425	589,874,956,352	26,887	780,606,313,383	29,209	1,061,448,572,509	32,328	1,436,607,198,786	24.712	1.060.003.420.780	26.153	1.232.991.782.451
20	KAB. JEPARA	35,160	740,258,155,922	36,752	954,019,977,024	46,850	1,474,838,409,206	50,478	1,976,896,899,818	44.487	1.601.310.865.169	44.884	1.775.401.178.345
21	KAB. DEMAK	32,212	769,213,338,424	36,477	1,020,473,479,231	42,974	1,527,633,391,898	48,849	2,037,771,456,030	33.056	1.483.481.605.841	33.236	1.564.267.574.419

No	Penyaluran Kur per wilayah	Tahun											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)
22	KAB. SEMARANG	30,419	765,945,740,676	41,340	1,098,366,277,769	44,383	1,651,074,085,410	46,723	2,095,318,514,959	35.194	1.578.501.891.832	38.600	1.760.403.004.350
23	KAB. TEMANGGUNG	23,732	522,430,931,880	32,682	812,940,656,417	37,125	1,149,057,568,683	40,697	1,449,775,849,161	30.305	1.143.186.858.793	34.026	1.274.053.034.598
24	KAB. KENDAL	27,899	652,804,255,069	39,596	999,378,230,464	42,382	1,403,642,495,261	44,397	1,722,038,355,016	27.483	1.174.300.275.683	30.529	1.350.043.946.362
25	KAB. BATANG	21,407	443,649,337,912	24,481	661,257,570,763	32,120	1,066,373,925,602	37,065	1,353,706,515,946	22.069	867.802.657.859	27.971	1.123.930.321.588
26	KAB. PEKALONGAN	18,725	378,276,899,231	24,150	629,124,933,039	31,580	981,476,531,591	35,577	1,222,824,400,202	23.116	784.239.646.945	26.415	963.447.959.436
27	KAB. PEMALANG	36,203	739,922,402,326	48,814	1,164,357,376,954	62,162	1,773,175,921,199	65,552	2,157,929,858,009	50.393	1.560.358.775.470	51.534	1.743.797.669.782
28	KAB. TEGAL	47,475	1,021,705,034,995	56,474	1,432,849,120,987	73,900	2,057,898,435,824	77,384	2,450,206,822,298	45.317	1.442.753.480.818	40.304	1.509.602.156.513
29	KAB. BREBES	75,573	1,417,876,938,238	86,856	1,956,644,782,697	93,977	2,558,951,345,370	102,660	3,080,273,062,920	66.398	1.898.270.289.270	64.224	2.116.342.110.100
30	KOTA MAGELANG	3,417	79,949,600,586	4,993	130,892,399,071	4,793	159,603,112,815	4,827	216,101,106,000	3.129	136.664.736.790	3.095	142.417.831.698
31	KOTA SURAKARTA	13,086	391,251,167,491	19,305	593,619,780,111	30,071	1,047,482,051,404	27,952	1,290,010,839,228	18.082	857.645.792.443	15.266	773.410.157.103
32	KOTA SALATIGA	4,771	128,492,192,604	5,926	179,309,053,998	5,676	220,769,639,245	6,110	320,100,400,000	4.213	228.617.475.000	5.125	276.689.049.791
33	KOTA SEMARANG	21,371	695,195,395,549	31,861	1,070,732,933,645	37,328	1,702,978,989,436	42.230	2,430,847,721,262	27.294	1.756.872.111.550	28.495	1.715.623.025.186
34	KOTA PEKALONGAN	6,464	150,943,612,600	7,247	224,298,605,237	10,143	323,354,337,497	11,052	386,682,529,242	8.870	272.832.250.604	7.538	286.935.040.629
35	KOTA TEGAL	7,676	229,764,739,800	7,889	262,776,282,173	9,515	360,062,578,224	10,930	464,287,866,282	5.847	218.073.616.271	6.306	282.556.332.469

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2024.

2.3.9. Perdagangan

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2016 hingga tahun 2024 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan tiga besar sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan, dan pertanian. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan tahun 2024 sebesar 1.817.776,96 Miliar rupiah, dan memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,49 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2019-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23.
Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai total PDRB (Miliar Rp)	1.360.960,13	1.347.222,49	1.419.735,15	1.559.140,36	1.695.621,57	1.817.776,96
2	Nilai Sektor Perdagangan (Miliar Rp)	187.064,45	181.860,78	195.399,04	212.208,01	230.730,97	245.177,13
3	Kontribusi (%)	13,75	13,5	13,76	13,61	13,61	13,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Total ekspor Jawa Tengah selama tahun 2019-2024 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang menurun karena pengaruh dari pandemi Covid-19 dan pada tahun 2023 dikarenakan terjadi perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan utama ekspor. Nilai ekspor tahun 2022 tercatat sebesar US$11.777,91 juta, menurun menjadi sebesar US$10.229,18 juta pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar US$11.181,64 juta. Ekspor Jawa Tengah terdiri dari ekspor migas dan nonmigas dengan proporsi lebih besar pada ekspor nonmigas, yang selama kurun waktu tahun 2018-2020 trennya sejalan dengan tren nilai ekspor total di Jawa Tengah. Nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat sebesar US$8.11.210,92 juta, menurun menjadi sebesar US$9.868,62 juta pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar US$10.763,68 juta.

Tabel 2.24.
Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta US$)

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor	**8.516,70**	**8.088,30**	**10.733,44**	**11.777,91**	**10.229,18**	**11.181,64**
- Migas	303,86	384,06	438,99	566,99	360,56	417,96
- Non Migas	8.212,84	7.704,24	10.294,45	11.210,92	9.868,62	10.763,68

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025.

Sementara itu, total nilai impor Jawa Tengah selama tahun 2019-2024 cukup fluktuatif, di mana pada tahun 2020 trennya menurun, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021-2022, menurun kembali pada tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024.Nilai impor Jawa Tengah tahun 2019-2024 tercatat sebesar US$12.567,62 juta menurun menjadi US$8.719,80 juta tahun 2020, kemudian meningkat menjadi US$11.781,79 juta pada tahun 2021 dan US$15.013,61 juta pada tahun 2022, menurun kembali pada tahun 2023 menjadi US$14.497,42 juta dan meningkat pada tahun 2024 menjadi US$14.544,51 juta.

Untuk impor nonmigas Jawa Tengah yang pada tahun 2024 mencatatkan nilai sebesar US$7.842,32 juta, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar US$7.461,36 juta.Perkembangan nilai impor Jawa Tengah baik migas dan nonmigas dapat dilihat di tabel sebagai berikut.

Tabel 2.25.
Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024 (Juta US$)

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Impor	**12.567,62**	**8.719,80**	**11.781,79**	**15.013,61**	**14.497,42**	**14.544,51**
- Migas	3.906,03	2.154,76	4.440,52	7.435,63	7.036,06	6.702,19
- Non Migas	8.661,59	6.565,04	7.341,27	7.577,98	7.461,36	7.842,32

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Neraca perdagangan Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami defisit, di mana selama tahun 2019-2024 mengalami penurunan defisit. Pada tahun 2022, neraca perdagangan Jawa Tengah mengalami defisit sebesar US$3.235,70 juta, meningkat pada tahun 2023 menjadi US$4.268,24 juta, kemudian menurun menjadi US$3.362,87 juta pada tahun 2024. Defisit dalam neraca perdagangan Jawa Tengah pada tahun 2024 dipicu oleh defisit sektor migas sebesar US$6.284,23 juta. Sementara di sisi lain, sektor nonmigas pada tahun 2024 mencatatkan surplus pada neraca perdagangan Jawa Tengah sebesar US$32.921,36 juta. Perkembangan neraca perdagangan Jawa Tengah tahun 2019- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26.
Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024 (Juta US$)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor	**8.516,70**	**8.088,30**	**10.733,44**	**11.777,91**	**10.229,18**	**11.181,64**
- Migas	303,86	384,06	438,99	566,99	360,56	417,96
- Non Migas	8.212,84	7.704,24	10.294,45	11.210,92	9.868,62	10.763,68
Impor	**12.567,62**	**8.719,80**	**11.781,79**	**15.013,61**	**14.497,42**	**14.544,51**
- Migas	3.906,03	2.154,76	4.440,56	7.435,63	7.036,06	6.702,19
- Non Migas	8.661,59	6.565,04	7.341,23	7.577,98	7.461,36	7.842,32
Surplus/Defisit	**(4.050,92)**	**(631,5)**	**(1.048,35)**	**(3.235,70)**	**(4.268,24)**	**(3.362,87)**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Guna mendukung peningkatan ekspor nonmigas Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi penerbitan sertifikasi mutu barang. Untuk penerbitan sertifikasi mutu barang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami capaian yang fluktuatif.

Tabel 2.27.
Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Jenis Usaha Perdagangan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit)	2.437	1.767	1.925	2.019	n/a	n/a
2	Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis)	5 jenis barang	7 jenis barang	6 jenis barang	7 jenis barang	7 jenis barang	3 jenis barang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam rangka pelaksanaan konsumen cerdas, yang diharapkan konsumen dapat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu dan kualitas maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan konsumen. Namun demikian apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Jumlah LPKSM sampai dengan tahun 2024 sebanyak 32 unit yaitu di 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.28.
Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota)	8	4	1	0	n/a	1
2	Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota)	18 di 9 Kab/Kota	18 di 9 Kab/Kota	3 di 3 kab kota	5 di 4 Kab/Kota	n/a	32 di 18 Kab/Kota
3	Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/kota (%)	111 kasus (100%)	27 kasus (100%)	6 kasus (100%)	0 kasus (-)	n/a	15 Kasus (100%)
4	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis)	3.512	2.741	1.228	305	n/a	191

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Lebih lanjut dalam rangka lebih memperkuat daya tahan industri dan perdagangan di dalam negeri telah diinisiasi pula upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; serta memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Adapun sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat; peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN); peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; serta peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

2.3.10. Perindustrian

Kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2024 Triwulan III sebesar 152,913 juta rupiah, dan memberikan kontribusi sebesar 33,29 persen terhadap total PDRB yang sebesar 0,459 miliar rupiah. Nilai dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2019 – 2024 Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024 TW III
1	Nilai total PDRB (Juta Rp)	1.362.457.380,57	1.347.922.689,03	1.420.799.908,38	1.157.316.832,47	1.696.795.419,3	459.406.000
2	Nilai Sektor Industri (Juta Rp)	468.992.159,77	464.609.134,06	487.445.099,28	392.749.654,42	577.429.037,01	152.913.000
3	Kontribusi (%)	34,41	34,47	34,31	33,94	34,03	33,29

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Capaian pertumbuhan industri besar di Jawa Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. IKM di tahun 2019 sebanyak 327.110 unit usaha meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 240.491 unit usaha.

Tabel 2.30.
Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024

No	Jenis Industri	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Besar	1.584	1.591	2.417	2.982	n/a	2.680*
2	Kecil dan Menengah	327.110	327.200	912.421	204.608	n/a	240.491*

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari sejumlah industri yang berkembang di Jawa Tengah, beberapa jenis industri menjadi industri unggulan daerah dan dijadikan sebagai kompetensi inti industri meliputi industri mebel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif, dan kerajinan. Pola pengembangan industri tersebut diarahkan melalui pendekatan pembentukan klaster industri potensial untuk meningkatkan jejaring dan rantai nilai industri unggulan daerah yang melibatkan industri utama, industri pendukung dan usaha terkait. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk kelembagaan klaster industri sebanyak 20 klaster terdiri dari 6 klaster logam mesin dan tekstil, 7 klaster komponen otomotif, elektronika, aneka, serta 7 klaster agro, kimia dan hasil hutan.

Tabel 2.31.
Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024

No	Jenis industri	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	jumlah klaster logam, mesin, tekstil	6	6	6	6	6	6
2	jumlah klaster komponen otomotif, elektronika dan aneka	7	7	7	7	7	7
3	Jumlah klaster agro, kimia dan hasil hutan	6	6	6	7	7	7
	Jumlah klaster industri	**19**	**19**	**19**	**20**	**20**	**20**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

2.3.11. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Dalam pelaksanaannya capaian indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.32.
Capaian Indikator Kinerja Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	2,99	3,03	3,29	3,40	3,56 %
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	-7,98	5,92	16,99	11,24	10,03%
3	Rata-rata jumlah pengeluaran belanja wisatawan Nusantara	NA	NA	4.184.389	4.364.318	5.682.188
4	Rata-rata Jumlah Pengeluaran belanja Wisatawan Mancanegara	NA	NA	$ 670	$ 627,85	$ 713,75
5	Rata-rata lama tinggal Wisnus	1,31	1,3	1,36	1,35	1,33
6	Rata-rata lama tinggal Wisman	1,94	2,4	2,49	2,15	1,99
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	78.290	1.793	144.691	464.719	498.272
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	22.629.085	21.332.409	46.565.437	56.485.087	59.314.385

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
7	Daya Tarik Wisata (DTW)	982	1130 (DTW Alam 418, DTW Budaya 175, DTW Buatan 365)	1235 (DTW Alam 607, DTW Budaya 172, DTW Buatan 456)	1393(DTW Alam 693, DTW budaya 232, DTW buatan 468)	1607 (DTW Alam 750, DTW Budaya 267 dan DTW Buatan 590)
8	Jumlah Desa Wisata	Na	717	818	776	885 Desa Wisata
9	PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	na	1,89	1,93	2,07	na
10	Pelaku Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	200 orang	150 orang	160 orang	330 0rang	295 orang
11	Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Na	160 orang	210 orang	410 orang	480 orang

Sumber: Dinporapar Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 3,40% (2023) menjadi 3,53% (2024), Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata sebesar 10,47 % merupakan tertinggi dibanding 17 sektor lapangangan usaha lainnya. Jumlah kunjungan wisatawan juga mengalami kenaikan sebanyak 56.946.806 (2023) menjadi 59.812.658 (2024) yang terdiri dari wisatawan nusantara 59.314.385 orang dan Wisatawan Mancanegara 498.272. Adapun kontribusi PDRB sektor ekonomi kreatif sebesar 2,07 % di tahun 2023.

2.3.12. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. . Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di Jawa Tengah sebesar 31.902,80 km yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan provinsi sebesar 7,65 persen;
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 87,40 persen;
3. Kewenangan Nasional sebesar 4,96 persen.

Sedangkan jalan tol yang sudah fungsional sepanjang 393,01 km dalam kondisi baik. Kondisi jalan kewenangan provinsi tahun 2024 yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 1311,12 km atau 53,73 persen. Kondisi jalan sesuai kewenangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33.
Kondisi Permukaan Jalan Sesuai Kewenangan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Kewenangan	Kondisi Ruas Jalan								Total Panjang Jalan (Km)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
Nasional	653,39	41,33	873,96	55,28	53,60	3,39	0,00	0,00	1.580,95
Provinsi	2024	1.584,63	64,94	647,33	26,52	131,92	5,42	76,24	3,12
Kabupaten/ Kota	15.192,77	54,49	7.007,02	25,13	2.839,23	10,18	2.842,71	10,20	27.881,73
Jumlah Jateng	17.430,79	54,64	8.528,30	26,73	3.024,75	9,49	2.918,95	9,15	31.902,80
Jalan Tol	393,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,01

Sumber: BBPJN Jawa Tengah-DIY, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Perkembangan kondisi jalan kewenangan provinsi dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kondisi permukaan jalan baik sejak tahun 2019 dengan total panjang Jalan Provinsi 2.404,74 km (sesuai SK Gubernur No. 620/2 tahun 2016 tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah) mengalami penurunan hingga tahun 2021. Berdasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah, total panjang Jalan Provinsi mengalami perubahan menjadi 2.440,12 km karena adanya upgrade ruas-ruas Jalan Kabupaten yang strategis dan disesuaikan dengan fungsi jalan. Penanganan jalan-jalan Kabupaten yang berubah status menjadi Jalan Provinsi baru dimulai pada tahun 2024. Kemantapan jalan pada tahun 2024 sebesar 91,46% (64,94% baik dan 26,52% sedang). Meskipun kondisi mantap meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 90,88%, namun kondisi jalan baik menurun sebesar 4,56%. Jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, kondisi ini dapat menurun sehingga menjadi rusak.

Kondisi permukaan Jalan Provinsi mantap tahun 2024 dengan total panjang jalan sesuai update adalah 91,46% dengan rincian seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34.
Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Tahun	Kondisi								Panjang Jalan Provinsi (Km)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
2020	1.869,69	77,75	312,13	12,98	222,93	9,27	0,000	0,00	2.404,74
2021	1.871,61	77,83	313,45	13,03	219,682	9,14	0,000	0,00	2.404,74
2022	2.010,27	83,60	213,89	8,89	68,33	2,84	112,25	4,67	2.404,74
2020	1.869,69	77,75	312,13	12,98	222,93	9,27	0,000	0,00	2.404,74
2023	1.716,04	70,33	487,79	19,99	124,32	5,09	111,97	4,59	2.440,12
2024	1.584,63	64,94	647,33	26,52	131,92	5,42	76,24	3,12	2.440,12

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Adapun persebaran kondisi jalan kewenangan kabupaten/kota untuk tiap-tiap daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35.
Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2024								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
1	Banjarnegara	489,630	55,27	182,180	20,57	123,850	13,98	90,140	10,18	885,80

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2024								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
2	Banyumas	734,102	55,81	258,650	19,66	187,005	14,28	135,590	10,31	1.315,347
3	Batang	367,72	68,04	93,33	17,27	35,56	6,58	43,85	8,11	540,45
4	Blora	394,96	43,11	176,150	19,23	56,250	6,14	288,740	31,518	916,10
5	Boyolali	471,219	69,91	89,543	13,29	59,054	8,76	54,184	8,04	674,00
6	Brebes	440,251	36,38	318,632	26,33	170,740	14,11	280,571	23,18	1.210,19
7	Cilacap	750,286	58,28	238,763	18,55	93,774	7,28	204,552	15,89	1.287,38
8	Demak	390,23	42,90	359,95	39,57	86,10	9,47	73,31	8,06	909,58
9	Grobogan	579,046	61,44	231,441	24,56	22,396	2,38	109,506	11,62	942,39
10	Jepara	429,18	50,25	323,93	37,93	69,21	8,10	31,71	3,71	854,03
11	Karanganyar	357,43	41,02	366,20	42,03	82,15	9,43	65,55	7,52	871,33
12	Kebumen	411,81	40,49	335,54	32,99	166,83	16,40	102,97	10,12	1.017,15
13	Kendal	413,27	52,80	242,32	30,96	70,54	9,01	56,59	7,23	782,71
14	Klaten	346,42	48,06	259,15	35,95	105,82	14,68	9,46	1,31	720,85
15	Kudus	199,27	34,33	334,35	57,60	31,42	5,41	15,39	2,65	580,42
16	Magelang	651,19	63,80	235,85	23,11	95,52	9,36	38,10	3,73	1.020,66
17	Pati	908,85	72,34	120,45	9,59	96,24	7,66	130,74	10,41	1.256,29
18	Pekalongan	313,275	44,89	233,091	33,40	60,573	8,68	90,957	13,03	697,896
19	Pemalang	500,66	65,38	74,04	9,67	75,93	9,92	115,09	15,03	765,72
20	Purbalingga	370,46	38,89	280,94	29,49	207,91	21,83	93,29	9,79	952,60
21	Purworejo	119,94	15,83	359,58	47,45	164,28	21,68	113,99	15,04	757,79
22	Rembang	277,42	46,69	145,48	24,48	36,28	6,11	135,02	22,72	594,20
23	Semarang	420,07	57,26	224,96	30,66	57,70	7,87	30,89	4,21	733,62
24	Sragen	813,21	79,71	59,13	5,80	71,57	7,01	76,34	7,48	1.020,25
25	Sukoharjo	509,36	83,84	96,62	15,90	1,22	0,20	0,37	0,06	607,57
26	Tegal	408,44	47,80	149,42	17,49	208,38	24,39	88,30	10,33	854,54
27	Temanggung	481,800	74,07	96,603	14,85	47,454	7,30	24,619	3,78	650,48
28	Wonogiri	1.284,00	82,23	108,724	6,96	118,786	7,61	49,900	3,20	1.561,41
29	Wonosobo	318,326	33,22	313,449	32,71	98,823	10,31	227,716	23,76	958,31
30	Kota Magelang	71,54	57,36	30,37	24,35	21,09	16,90	1,73	1,39	124,73
31	Kota Pekalongan	92,51	61,56	34,47	22,94	12,55	8,35	10,74	7,15	150,27
32	Kota Salatiga	226,31	67,06	84,07	24,91	22,77	6,75	4,32	1,28	337,47
33	Kota Semarang	422,677	50,325	360,727	42,95	29,427	3,50	27,070	3,22	839,90
34	Kota Surakarta	108,46	46,60	96,19	41,33	26,78	11,51	1,30	0,56	232,73

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2024								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
35	Kota Tegal	119,459	46,379	92,733	36,00	25,253	9,80	20,126	7,81	257,57
	JUMLAH	**15.192,77**	**54,49**	**7.007,02**	**25,13**	**2.839,23**	**10,18**	**2.842,71**	**10,20**	**27.881,73**

Sumber: DPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan 10 tahun terhitung sejak diundangkan jalan provinsi harus sesuai dengan standar. Standar jalan provinsi dilihat dari aspek dimensi jalan (lebar perkerasan jalan minimal 7 m), aspek konstruksi perkerasan jalan (muatan sumbu terberat sebesar 8 ton) dan aspek ketersediaan bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan (saluran drainase dan dinding penahan tanah serta bahu jalan).

Sampai dengan tahun 2024, panjang Jalan Provinsi yang telah sesuai dengan standar (dari sisi lebar jalan ≥7 m dan konstruksi sesuai MST 8 ton) sepanjang 1.311,12 km atau 53,73%. Sedangkan jalan provinsi yang telah sesuai dengan standar dengan kondisi permukaan mantap adalah sepanjang 1.236,46 km atau mencapai 50,67 persen dari total panjang Jalan Provinsi. Penyesuaian standar jalan provinsi perlu dilakukan secara bertahap utamanya untuk penuntasan jalan yang mempunyai nilai strategis dengan tetap menjaga kondisi permukaan seluruh Jalan Provinsi.

Tabel 2.36.
Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2024

No.	Lebar Perkerasan Jalan	Panjang (km)	Persentase (%)	Kondisi							
				Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
				(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%
1	≥7 m	1311,12	53,73	953,47	39,07	282,99	11,60	52,84	2,17	21,83	0,89
2	<7 m	1129,00	46,27	631,11	25,86	364,39	14,92	79,08	3,25	54,42	2,23
Total		**2440,12**	**100,00**	**1584,58**	**64,94**	**647,38**	**26,52**	**131,92**	**5,42**	**76,24**	**3,12**

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

a. Air Minum dan Sanitasi

Cakupan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2024 sebesar 52,48 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 48,78 persen, sedangkan cakupan akses air minum aman pada tahun 2024 sebesar 40,86 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 38,75 persen. Kemudian terkait cakupan akses air limbah domestik aman pada tahun 2024 sebesar 9,72 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 9,91 persen, dikarenakan tidak sebandingnya pembangunan sarana prasarana pendukung akses air limbah domestik aman dengan laju peningkatan jumlah penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses air limbah domestik aman, belum optimalnya operasionalisasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terbangun di kabupaten/kota, dan belum siapnya kabupaten/kota

menerapkan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) sebagai upaya percepatan akses sanitasi aman.

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh air minum aman di Jawa Tengah telah dibangun SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2025 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas, Keburejo, ~~dan~~ Petanglong, dan SPAM Regional Wosusokas. Sedangkan SPAM Regional dalam proses penyiapan *readiness criteria* (RC) pembangunan antara lain SPAM Regional Dadimuria, Maslancip, Randugunting, dan SPAM Regional Jragung. Kemudian dalam rangka percepatan pencapaian akses menyeluruh air limbah domestik aman, sedang dalam proses pembangunan IPLT Regional Purbalingga-Banjarnegara.

Tabel 2.37.
Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**Akses Air Minum**					
	Aman	32,24	34,06	36,93	38,75	40,86
	Jaringan Perpipaan	43,74	44,37	48,82	48,78	52,48
2	**Akses Air Limbah Domestik**					
	Aman	10,69	10,75	9,94	9,91	9,72

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

Capaian akses air minum dan sanitasi Provinsi Jawa Tengah merupakan akumulasi capaian seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Maka dalam rangka mewujudkan pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, dilakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelola layanan air minum dan air limbah domestik di kabupaten/kota. Hingga tahun 2024, capaian dan kondisi pengelolaan sarana prasarana akses air minum dan air limbah domestik di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38.
Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Capaian Akses Air Minum (%)		Kondisi SPAM Perkotaan (PDAM) Sumber: Buku BPPW 2024		
		Aman	Perpipaan	Kapasitas Produksi (Lps)	*Idle Capacity* (Lps)	Status *Full Cost Recovery* (FCR)
1	Cilacap	23,28	31,99	1.225,00	305,00	FCR
2	Banyumas	32,38	32,89	916,05	814,32	FCR
3	Purbalingga	48,40	49,65	603,16	195,84	FCR
4	Banjarnegara	27,16	28,77	105,62	17,78	FCR
5	Kebumen	18,46	30,95	310,67	129,33	FCR
6	Purworejo	32,00	32,00	274,76	8,77	FCR
7	Wonosobo	50,88	90,54	750,27	395,02	FCR
8	Magelang	36,54	55,23	880,99	216,51	FCR

No.	Kab/Kota	Capaian Akses Air Minum (%)		Kondisi SPAM Perkotaan (PDAM) Sumber: Buku BPPW 2024		
		Aman	Perpipaan	Kapasitas Produksi (Lps)	*Idle Capacity* (Lps)	Status *Full Cost Recovery* (FCR)
9	Boyolali	39,31	56,21	397,50	296,50	FCR
10	Klaten	35,58	35,58	555,90	18,00	FCR
11	Sukoharjo	14,90	28,87	371,09	109,91	FCR
12	Wonogiri	27,62	43,37	325,49	242,27	FCR
13	Karanganyar	30,99	77,10	659,00	12,00	FCR
14	Sragen	20,55	44,46	893,62	151,27	FCR
15	Grobogan	25,99	26,86	291,00	17,00	FCR
16	Blora	19,51	52,31	254,00	30,00	FCR
17	Rembang	27,56	35,61	241,19	53,75	FCR
18	Pati	40,76	68,64	397,16	77,54	Non FCR
19	Kudus	24,40	37,50	492,00	250,70	FCR
20	Jepara	20,95	32,38	622,00	195,50	Non FCR
21	Demak	41,47	81,42	510,00	114,00	FCR
22	Semarang	40,62	42,90	543,62	28,68	FCR
23	Temanggung	19,16	79,68	456,99	152,01	FCR
24	Kendal	80,07	56,46	731,87	125,50	FCR
25	Batang	40,40	47,00	571,85	42,15	FCR
26	Pekalongan	58,00	58,00	295,00	61,00	FCR
27	Pemalang	41,26	44,95	457,84	125,16	FCR
28	Tegal	35,94	36,33	400,24	12,64	FCR
29	Brebes	21,30	21,69	678,56	124,30	FCR
30	Kota Magelang	88,21	91,35	630,51	11,73	FCR
31	Kota Surakarta	60,08	60,70	774,71	191,29	Non FCR
32	Kota Salatiga	93,69	93,69	351,79	186,25	FCR
33	Kota Semarang	65,46	82,35	3.446,29	1213,00	FCR
34	Kota Pekalongan	86,89	86,89	328,00	135,00	FCR
35	Kota Tegal	60,22	62,37	335,57	56,81	FCR
	Jawa Tengah	40,86	52,48	21.079,31	6.116,53	32 FCR dari 35

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024; dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah DJCK Kementerian PU, 2024

Tabel 2.39.
Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik			
		Layak	Aman	Nama IPLT	Kapasitas Renc. (m3/hr)	Status Operasi	Truck Tinja (unit)
1	Cilacap	92,68	2,51	IPLT Tritih Lor	22	Operasi	3
2	Banyumas	93,45	2,46	IPLT Gunung Tugel	22	Operasi	2
3	Purbalingga	95,37	0,00	-	-	-	-
4	Banjarnegara	85,12	0,00	-	-	-	-

No.	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik			
		Layak	Aman	Nama IPLT	Kapasitas Renc. (m3/hr)	Status Operasi	Truck Tinja (unit)
5	Kebumen	87,96	3,67	IPLT Kaligending	10	Operasi	3
				IPLT Semali	30	Operasi	
6	Purworejo	95,36	4,06	IPLT Gunung Tumpeng	10	Operasi tidak layak	1
7	Wonosobo	70,71	2,14	IPLT Wonorejo	10	Operasi tidak layak	1
8	Magelang	92,28	1,51	-	-	-	-
9	Boyolali	98,33	29,24	IPLT Winong	10	Operasi	1
10	Klaten	100,00	1,60	IPLT Jomboran	15	Operasi	2
11	Sukoharjo	95,95	2,31	IPLT Mojorejo	22	Operasi	2
12	Wonogiri	99,86	0,79	IPLT Ngadirojo	10	Operasi	2
13	Karanganyar	99,89	3,34	IPLT Mojogedang	10	Operasi	3
14	Sragen	88,39	3,25	IPLT Tanggan	12	Operasi	3
15	Grobogan	77,76	22,24	IPLT Ngembak	15	Operasi	3
16	Blora	90,13	5,55	IPLT Temurejo	8	Operasi tidak layak	1
17	Rembang	96,67	1,06	IPLT Landoh	10	Tidak Operasi	1
18	Pati	100,00	16,94	IPLT Sukoharjo	15	Operasi	3
19	Kudus	98,52	3,53	IPLT Tanjungrejo	12	Operasi	1
20	Jepara	78,92	3,60	IPLT Bandengan	15	Operasi	3
21	Demak	83,33	5,78	IPLT Kalikondang	10	Operasi	1
22	Semarang	97,47	0,72	-	-	-	-
23	Temanggung	95,38	2,97	IPLT Sanggrahan	8	Operasi	2
24	Kendal	91,91	0,81	-	-	-	-
25	Batang	83,22	5,56	IPLT Randu Kuning	22	Operasi	2
26	Pekalongan	95,92	62,00	IPLT Kab. Pekalongan	10	Operasi	2
27	Pemalang	97,12	53,20	IPLT Pegongsoran	12	Operasi	3
28	Tegal	92,55	1,77	IPLT Kedungjati	25	Operasi	2
29	Brebes	88,62	1,50	-	-	-	-
30	Kota Magelang	98,81	11,52	IPLT Dumpoh	20	Operasi	4
31	Kota Surakarta	97,03	61,04	IPLT Putri Cempo	45	Operasi	12
32	Kota Salatiga	96,64	13,37	IPLT Ngronggo	15	Operasi	3
33	Kota Semarang	92,47	2,99	IPLT Tambak Lorok	70	Operasi	1
34	Kota Pekalongan	99,08	2,91	IPLT Degayu	10	Operasi	1

No.	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik			
		Layak	Aman	Nama IPLT	Kapasitas Renc. (m3/hr)	Status Operasi	Truck Tinja (unit)
35	Kota Tegal	87,82	4,27	IPLT Muarareja	15	Operasi	2
	Jawa Tengah	92,42	9,72	-	-	-	-

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024.

b. Infrastruktur Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS) yang pengelolaannya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah WS Pemali Comal (panjang 946,35 km/luas DAS 4.898,54 km2) dan WS Bodri Kuto (panjang 377,32 km/luas DAS 1.282,85 km2).

Kondisi baik sungai kewenangan provinsi pada tahun 2024 tercatat 52,37 persen (728,35 km dari 1.390,78 km), sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 52,36 persen. Hal ini merupakan hasil kegiatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai dan konservasi DAS.

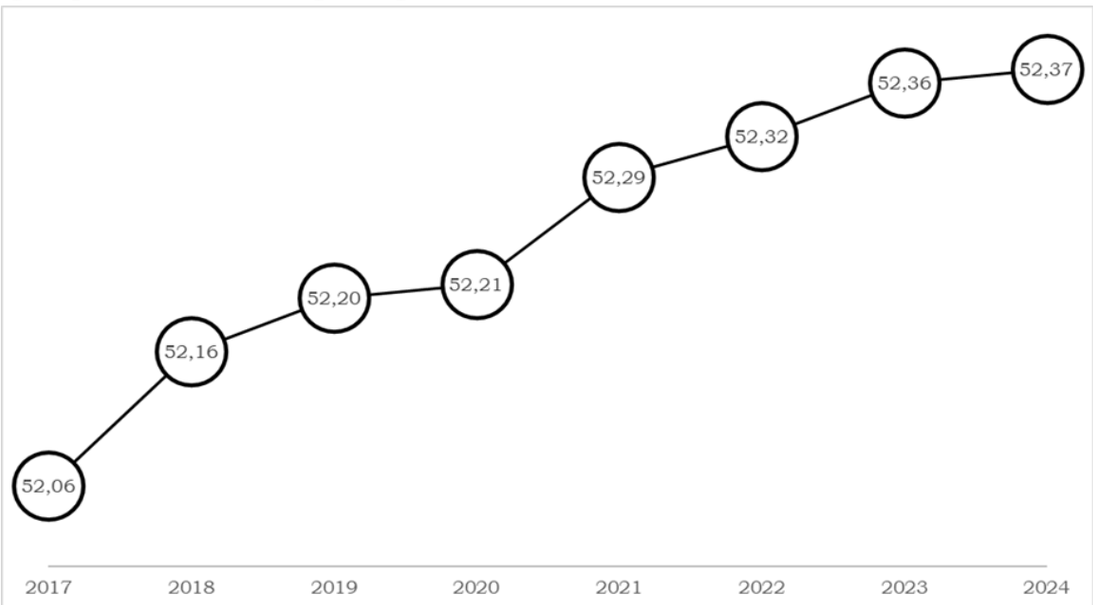

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.39.
Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2024 (%)

Kebutuhan air irigasi rata-rata per tahun sebesar 19.636.378.014 m^3/tahun dengan asumsi memperhitungkan/mendasarkan pada rencana kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga). Dukungan terhadap ketahanan pangan ditempuh dengan pengelolaan irigasi serta pembangunan penampungan air seperti waduk dan embung.

Tabel 2.40.
Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kewenangan Daerah Irigasi	Luas Area (ha)	% Dari Total Luas	Jumlah Daerah Irigasi
1.	Pusat	347.674	36,45%	37
2.	Provinsi	86.865	9,11%	108

No.	Kewenangan Daerah Irigasi	Luas Area (ha)	% Dari Total Luas	Jumlah Daerah Irigasi
3.	Kab/Kota	519.265	54,44%	11.401
Total Jawa Tengah		953.804	100,00%	11.546

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tahun 2015.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Namun demikian, dalam kurun waktu tahun 2017-2024 masih terdapat jaringan irigasi dalam kondisi rusak sedang hingga rusak ringan yang jumlahnya cukup besar sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi. Pengelolaan irigasi diukur dengan indikator IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) guna menunjukkan efektivitas fungsi irigasi yang dikelola.

Pengukuran IKSI mempertimbangkan aspek meliputi: kondisi prasarana fisik, tingkat produktivitas tanam, kondisi sarana penunjang, organisasi personalia/pengelola, serta dokumentasi. Kategori IKSI terbagi dalam kriteria sangat baik, baik, kurang, dan jelek. Lebih rinci terkait kriteria:

a. Sangat Baik : nilai IKSI > 80% dan nilai tingkat kerusakan < 10%;
b. Baik : nilai IKSI > 70% dan nilai tingkat kerusakan 10% - 20%;
c. Kurang : nilai IKSI > 55% dan nilai tingkat kerusakan 20% - 40%;
d. Jelek : nilai IKSI < 55% dan nilai tingkat kerusakan > 40%.

Pada tahun 2017 IKSI jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada angka 74,55 (kriteria Baik), namun pada akhir tahun 2024 menurun pada angka 69,11 (kriteria Kurang). Hal ini menunjukkan perlu ditingkatkannya penanganan Operasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala yang bersifat perbaikan, serta Rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membantu rehabilitasi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan bidang Sarana Prasarana.

Tabel 2.41.
Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi
Tahun 2017 – 2024

Tahun	IKSI Kewenangan Provinsi	Kriteria
2017	74,55	Baik
2018	73,81	Baik
2019	73,95	Baik
2020	74,32	Baik
2021	75,95	Baik
2022	68,27	Kurang
2023	68,87	Kurang
2024	69,11	Kurang

Sumber:DinasPUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan dari tahun 2017 dari 58,5 persen menjadi 62,5 persen di tahun 2024.

Tabel 2.42.
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2024

Uraian	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kebutuhan Air Baku (juta m^3/tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	745,02	750,25	755,35	760,33	760,33	770,08	774,99	774,99
Ketersediaan Air Baku (juta m^3/tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	435,84	456,83	466,78	466,78	467,62	477,45	484,4	484,4
Ketersediaan Air Baku (%)	58,5	60,89	61,8	61,39	61,50	62	62,5	62,5

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2024

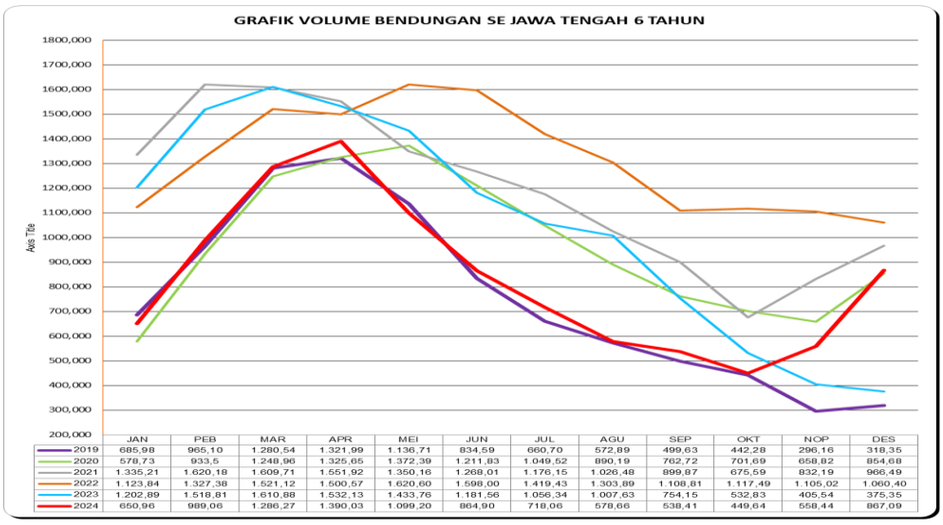

	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOP	DES
2019	685,98	965,10	1.280,54	1.321,99	1.136,71	834,59	660,70	572,89	499,63	442,28	296,16	318,35
2020	578,73	933,5	1.248,96	1.325,65	1.372,39	1.211,83	1.049,52	890,19	762,72	701,69	658,82	854,68
2021	1.335,21	1.620,18	1.609,71	1.551,92	1.350,16	1.268,01	1.176,15	1.026,48	899,87	675,59	832,19	966,49
2022	1.123,84	1.327,38	1.521,12	1.500,57	1.620,60	1.598,00	1.419,43	1.303,89	1.108,81	1.117,49	1.105,02	1.060,40
2023	1.202,89	1.518,81	1.610,88	1.532,13	1.433,76	1.181,56	1.056,34	1.007,63	754,15	532,83	405,54	375,35
2024	650,96	989,06	1.286,27	1.390,03	1.099,20	864,90	718,06	578,66	538,41	449,64	558,44	867,09

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023 update terbaru s/d 2024.

Gambar 2.40.
Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m^3)
Tahun 2019 – 2024

Ketersediaan air waduk dari tahun 2019 hingga tahun 2024 memiliki pola yang hampir sama yaitu volume tertinggi berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan April dan volume terendah pada bulan Oktober sampai dengan bulan November, hal ini terkait dengan fungsi waduk yang menampung air pada musim hujan dan menyuplai kebutuhan air pada musim kemarau. Dari data ketersediaan air baku sebesar 62,5% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih perlu melakukan upaya agar pada saat ketersediaan air waduk mengalami penurunan kebutuhan air tetap bisa terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, untuk mencukupi kebutuhan air melalui pembangunan prasarana penampungan air berupa waduk, embung, serta long storage

Tabel 2.43.
Jumlah Embung di Jawa Tengah Berdasarkan Sumber Pendanaan

No	Instansi/Lembaga	Sumber Pendanaan	Embung (Lokasi)	Long Storage (Lokasi)	Jumlah (Lokasi)
1.	Pemerintah Pusat (BBWS)	APBN	142	3	145
2.	Pemerintah Pusat (BNPB)	APBN	2	-	2
3.	Dinas PUSDATARU	APBD	76	17	93

No	Instansi/Lembaga	Sumber Pendanaan	Embung (Lokasi)	Long Storage (Lokasi)	Jumlah (Lokasi)
4.	Distanbun	APBD	4	-	4
		APBN	512	-	512
5.	DLHK	DAK	390	-	390
6.	Pemkab (Bankeu)	APBD	13	-	13
7.	CSR/TJSLP	Hibah	3	-	3
TOTAL			1.142	20	1.162

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023.

c. Jasa Konstruksi

Sertifikasi Hasil Uji pada tahun 2024 mencapai 1.100 SHU mengalami penurunan kondisi jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 1.395 SHU. Sedangkan pelaku jasa konstruksi yang difasilitasi di tahun 2024 sejumlah 1.920 orang bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2023 sejumlah 1.140 orang.

Tabel 2.43.
Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sertifikasi Hasil Uji (SHU)	1.080	750	1.138	2.312	2.702	1.395	1.100
2	Informasi Jasa Kontruksi pelaksanaan event/ pameran}	4	4	0	1	4	4	4
3	Pelaku Jasa Kontruksi (orang) sosialisasi, bintek terkait jakon (peraturan jasa konstruksi, HSD, HSPK, dsb),	2.038	2.798	3.288	1.000	1.260	1.140	1.920

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2025

d. Bangunan Gedung Milik Daerah

Hingga tahun 2022, Bangunan Gedung Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1.030 komplek, Pendataan teknis Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah sudah dilakukan terhadap sejumlah 189 komplek, Bantuan Teknis untuk pengelolaan Bangunan Gedung Milik Daerah telah diberikan kepada 147 komplek bangunan Gedung.

Tabel 2.44.
Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis

Lokasi Pendataan Teknis BGMD	TA	JUMLAH
BGMD Kab, Rembang + Kab, Blora	2019	51
BGMD Kota + Kab Pekalongan	2020	36
BGMD Kab, Pemalang	2021	27
BGMD Kab, Brebes	2022	32
BGMD Kota + Kab Tegal	2023	43
BGMD Kab. Wonogiri	2024	35
BGMD Kab. Sukoharjo	2024	32

Lokasi Pendataan Teknis BGMD	TA	JUMLAH
BGMD Kab. Sragen	2024	29
BGMD Kab. Karanganyar	2024	28
TOTAL		313

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dari jumlah tersebut sejak tahun 2019 telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung dan telah terdata untuk 12 wilayah kabupaten/kota, dengan hasil penilaian sebagai berikut.

Tabel 2.45.
Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah BGMD		Telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung					
		Komplek	Unit	Kondisi Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Kondisi Khusus	Reno vasi
1	DKI Jakarta	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Banjarnegara	24	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Banyumas	45	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Batang	19	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Blora	23	353	27	313	13	0	0	0
6	Kab. Boyolali	36	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Brebes	32	405	0	365	26	9	0	5
8	Kab. Cilacap	37	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Demak	21	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Grobogan	20	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Jepara	29	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Karanganyar	26	439	0	438	1	0	0	0
13	Kab. Kebumen	32	-	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Kendal	29	-	-	-	-	-	-	-
15	Kab. Klaten	34	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Magelang	14	-	-	-	-	-	-	-
17	Kota Pekalongan	16	166	0	156	8	2	0	0
18	Kota Salatiga	15	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Semarang	110	-	-	-	-	-	-	-
20	Kota Surakarta	37	-	-	-	-	-	-	-
21	Kota Tegal	15	118	21	95	2	0	0	0

No	Lokasi	Jumlah BGMD		Telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung					
		Komplek	Unit	Kondisi Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Kondisi Khusus	Reno vasi
22	Kab. Kudus	18	-	-	-	-	-	-	-
23	Kab. Magelang	21	-	-	-	-	-	-	-
24	Kab. Pati	27	-	-	-	-	-	-	-
25	Kab. Pekalongan	20	325	0	319	1	5	0	0
26	Kab. Pemalang	27	361	1	349	7	4	1	0
27	Kab. Purbalingga	25	-	-	-	-	-	-	-
28	Kab. Purworejo	34	-	-	-	-	-	-	-
29	Kab. Rembang	28	407	26	378	3	0	0	0
30	Kab. Semarang	42	-	-	-	-	-	-	-
31	Kab. Sragen	31	574	0	569	5	0	0	0
32	Kab. Sukoharjo	29	498	5	484	7	2	0	0
33	Kab. Tegal	28	369	43	308	10	5	3	0
34	Kab. Temanggung	24	-	-	-	-	-	-	-
35	Kab. Wonogiri	37	441	0	437	4	0	0	0
36	Kab. Wonosobo	24	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.030**	**4456**	**123**	**4211**	**87**	**27**	**4**	**5**

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.3.13. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

a. Perkembangan Jumlah dan Kebutuhan Rumah

BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) secara rutin menghitung persentase rumah tangga menurut status rumah layak huni. Pada tahun 2024 persentase rumah tangga yang mendiami rumah layak huni di Jawa Tengah mencapai 71,76 persen, dengan kata lain, rumah tangga yang masih menempati rumah tidak layak huni sebesar 28,24 persen. Berdasarkan data tersebut, dilakukan pengolahan data untuk mengetahui jumlah rumah dan rumah layak huni pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.46.
Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Asumsi Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni
Cilacap	513.520	311.707
Banyumas	470.293	315.096

Kabupaten/Kota	Asumsi Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni
Purbalingga	245.080	155.160
Banjarnegara	257.973	110.335
Kebumen	352.253	261.125
Purworejo	205.724	148.471
Wonosobo	236.404	123.379
Magelang	334.358	231.743
Boyolali	288.766	209.384
Klaten	332.341	313.663
Sukoharjo	228.853	210.911
Wonogiri	283.814	252.821
Karanganyar	237.647	223.531
Sragen	272.612	220.925
Grobogan	415.184	235.824
Blora	239.865	129.239
Rembang	171.901	130.627
Pati	377.336	312.736
Kudus	203.860	186.736
Jepara	297.327	165.106
Demak	317.290	254.848
Semarang	286.180	214.692
Temanggung	205.533	125.087
Kendal	266.192	183.965
Batang	197.163	110.155
Pekalongan	216.881	166.109
Pemalang	338.856	229.846
Tegal	344.258	271.379
Brebes	492.063	368.309
Kota Magelang	25.321	19.819
Kota Surakarta	100.073	73.204
Kota Salatiga	49.146	41.804
Kota Semarang	362.708	244.502
Kota Pekalongan	56.040	45.981
Kota Tegal	51.856	44.539
Prov. Jawa Tengah	9.261.697	6.646.194

Sumber: BPS, diolah, 2024

Masih tingginya angka kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 324.803 unit pada akhir tahun 2024 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan backlog kepemilikan melalui Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat. Program Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tengah baru dimulai tahun 2020. Berikut ini adalah capaian pembangunan baru rumah di Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai sumber pembiayaan dari tahun 2019-2024.

Tabel 2.47.
Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Tahun	Sumber Pembiayaan					Jumlah
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	Asosiasi Perumahan	CSR & Swadaya	
2019	1.279	-	-	11.483	-	12.762
2020	25	205	-	30.193	-	30.423
2021	220	186	–	30.595	5.799	36.800
2022	2.201	326	143	24.709	224	27.603
2023	221	900	151	57.364	3.842	62.478
2024	629	581	107	52.986	818	55.121
Total	4.575	2.198	401	207.330	10.683	225.187

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2024.

a. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Perkembangan penanganan RTLH melalui berbagai sumber pendanaan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48.
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024

Tahun	Sumber Pembiayaan				Verivali lapangan	JUMLAH TOTAL SESUAI LKPJ
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	CSR & Swadaya		
2019	36.725	23.208	26.651	15.986	–	102.570
2020	48.809	10.298	12.855	3.268	-	75.230
2021	32.623	11.293	11.370	1.593	397.572	454.451
2022	35.771	11.487	12.714	2.659	231.279 (Cat. Data	293.910
2023	26.542	16.592	12.229	2.610	372.771	430.744
2024	8.995	17.535	10.135	4.530	-	51.195
Total	**199.465**	**90.413**	**85.954**	**30.646**	**1.001.622**	**1.408.100**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2024.

Intervensi stimulan Peningkatan kualitas RTLH dari berbagai sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, *Corporate Social Responsibility* (CSR), BAZNAS dan lain-lain sampai dengan tahun 2024 pada data PBDT Tahun 2015 adalah sebanyak 1.079.377 unit. Sisa RTLH berdasarkan PBDT sebanyak 502.647 unit. Selain data PBDT setiap tahun terdapat penambahan RTLH melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai dengan tahun 2024 sebanyak 52.274 unit dan melalui DTPFMOTM 2018 sampai dengan DTKS 2023 sebanyak 998.916 unit. Angka tersebut telah diintervensi dari berbagai sumber anggaran sebanyak 531.724 unit, sehingga sisa RTLH dari DTKS tersebut sebanyak 519.466 unit. Jadi total sisa RTLH yang belum tertangani (PBDT dan DTKS) sebanyak 1.022.113 unit. Sehingga total RTLH yang terintervensi dari berbagai sumber anggaran sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1.800.531 unit.

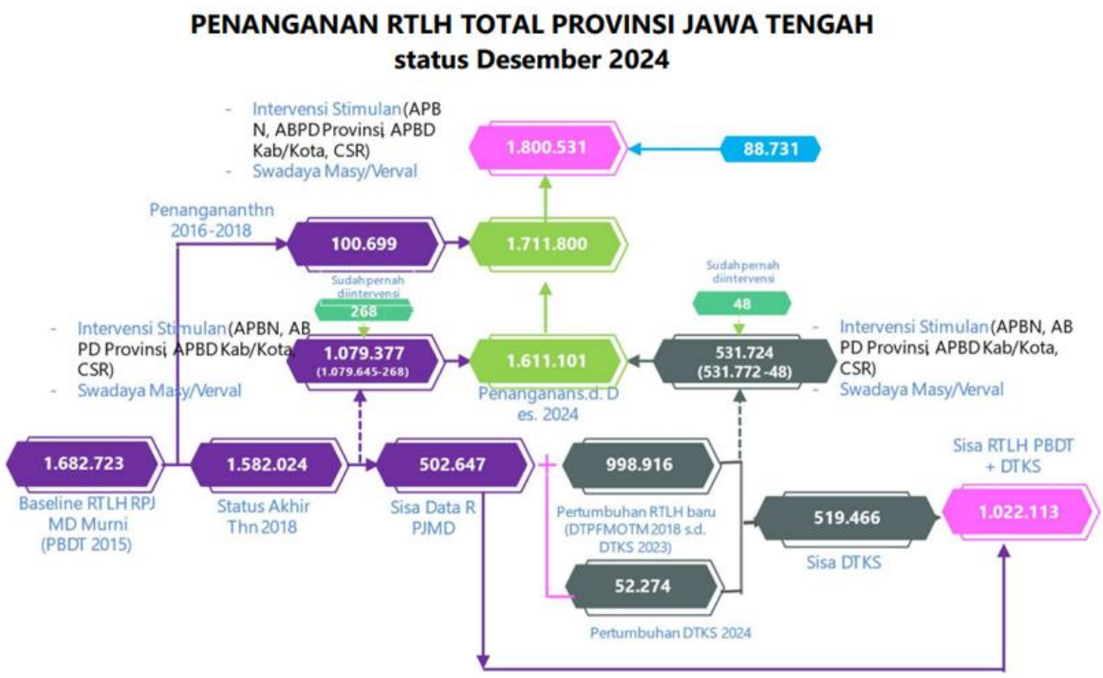

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.41.
Penanganan RTLH Provinsi Jawa Tengah status Desember 2024

Penanganan RTLH dilakukan dengan dua cara yaitu bantuan stimulan material dan usulan atas kondisi rumah berdasar data yang masuk. Penanganan RTLH pada tahun 2024 dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan sebanyak 51.195 Unit dengan rincian dari sumber anggaran APBN sebanyak 18.995 Unit, sumber anggaran APBD Prov sebanyak 17.535 Unit, sumber anggaran APBD kabupaten/ kota sebanyak 10.135 Unit, sumber anggaran CSR sebanyak 2.517 Unit dan sumber anggaran Swadaya Masyarakat sebanyak 2.013 Unit.

b. Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan intervensi terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana Provinsi. Melalui bantuan sosial pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah terdampak bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan. Adapun rekap penanganan rumah korban bencana pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49.
Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2024 melalui APBD Provinsi

No	JENIS PENANGANAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**PK Bencana**	150	105	118	51	345	175
2	**PB Bencana**	0	11	23	19	122	35
	Jumlah	**150**	**116**	**141**	**70**	**467**	**210**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2023.

c. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil review ulang SK Kumuh Kabupaten/Kota pada tahun 2024 s.d. Triwulan I Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RPJMN 2025-2029 luasan kawasan kumuh sebesar 5.203,43 Ha dengan rincian sebagai berikut,

Tabel 2.50.
Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh
Provinsi Jawa Tengah TW. I Tahun 2025

NO	NAMA KAB/KOTA	SISA LUASAN KUMUH 2024			Total
		<10 Ha	10-15 Ha	>15 Ha	
1	Kab. Cilacap	0,00	0,00	43,76	43,76
2	Kab. Banyumas	16,87	8,34	26,37	51,58
3	Kab. Purbalingga	56,70	45,31	163,33	265,34
4	Kab. Banjarnegara	77,99	83,70	270,55	432,24
5	Kab. Kebumen	99,20	52,14	0,00	151,34
6	Kab. Purworejo	4,27	5,60	0,00	9,87
7	Kab. Wonosobo	54,54	96,85	444,69	596,08
8	Kab. Magelang	113,40	74,66	53,26	241,32
9	Kab. Boyolali	0,00	0,00	31,72	31,72
10	Kab. Klaten	18,86	10,14	39,18	68,180
11	Kab. Sukoharjo	443,64	51,63	113,07	608,35
12	Kab. Wonogiri	0,00	16,73	31,73	48,46
13	Kab. Karanganyar	57,91	10,25	12,84	81,00
14	Kab. Sragen	6,75	0,00	6,28	13,03
15	Kab. Grobogan	30,63	0,00	68,06	98,69
16	Kab. Blora	35,78	12,16	276,48	324,42
17	Kab. Rembang	36,19	54,04	91,53	181,75
18	Kab. Pati	0,80	19,99	4,15	24,94
19	Kab. Kudus	6,50	0,00	23,96	30,46
20	Kab. Jepara	41,60	0,00	20,75	62,35
21	Kab. Demak	0,00	40,46	68,42	108,83
22	Kab. Semarang	40,91	10,17	130,30	181,37
23	Kab. Temanggung	3,67	20,81	66,06	90,54
24	Kab. Kendal	52,73	10,32	33,10	96,15
25	Kab. Batang	5,53	10,75	48,54	64,82
26	Kab. Pekalongan	19,28	21,79	172,30	213,38
27	Kab. Pemalang	0,00	10,81	186,35	197,16
28	Kab. Tegal	32,16	36,82	105,20	174,19
29	Kab. Brebes	258,12	69,18	82,21	409,51
30	Kota Magelang	5,63	4,96	0,00	10,59
31	Kota Surakarta	28,73	0,00	28,67	57,40
32	Kota Salatiga	25,89	0,00	0,00	25,89

NO	NAMA KAB/KOTA	SISA LUASAN KUMUH 2024			Total
		<10 Ha	10-15 Ha	>15 Ha	
33	Kota Semarang	12,36	15,13	17,09	44,58
34	Kota Pekalongan	23,21	12,66	90,45	126,32
35	Kota Tegal	0,00	0,00	37,80	37,80
	TOTAL	**1.609,84**	**805,40**	**2.788,19**	**5.203,43**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.3.14. Perhubungan

Kualitas pelayanan transportasi di Jawa Tengah sejak Tahun 2022 diukur dari Indeks Pelayanan Transportasi yang memperhitungkan aspek **konektivitas** jaringan transportasi (Rasio Konektivitas Provinsi), tingkat **keselamatan** transportasi (Rasio Kecelakaan per 1 Juta Keberangkatan) dan kualitas pelayanan **angkutan umum** (*On Time Performance*). Adapun perkembangan capaian peningkatan kualitas pelayanan transportasi di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.51.
Capaian Kualitas Pelayanan Transportasi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian Provinsi		
			2022	2023	2024
	INDEKS PELAYANAN TRANSPORTASI		**5,767**	**5.997**	**6,050**
1.	**Rasio Konektivitas Provinsi**	Angka	**0,299**	**0,373**	**0,400**
a.	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Angka	0,283	0,340	0,360
b.	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	Angka	0,389	0,501	0,510
c.	Rasio Konektivitas Trans. Laut dan ASDP	Angka	0,230	0,310	0,330
2.	**Rasio Kecelakaan Bus AKDP (1 Juta Keberangkatan)**	**Angka**	**16,906**	**16,698**	**16,090**
3.	***On Time Performance* (OTP) Layanan Transportasi**	%	**82,21**	**84,19**	**84,60**
a.	OTP Angkutan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng)	%	86,60	88,20	89,79
b.	OTP Kereta Api Masa Lebaran dan Nataru	%	90,00	90,39	91,01
c.	OTP Pesawat Masa Lebaran dan Nataru	%	70,00	74,00	73,01
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	**Angka**	**79,75**	**80,13**	**82,50**
1.	Pelayanan Terminal Penumpang Tipe B	Angka	77,67	79,17	81,16
2.	Pelayanan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng)	Angka	81,75	80,75	82,50
3.	Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) dan Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Angka	82,79	82,56	82,54

Catatan : Indeks Pelayanan Transportasi ada sebagai indikator pada RPD Prov. Jateng 2024-2026
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

1. Konektivitas Jaringan Transportasi

Konektivitas jaringan transportasi terdiri dari : Angkutan Darat (terminal, trayek angkutan umum, halte Trans Jateng); Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP); Angkutan Laut; Angkutan Udara, Perkeretaapian dan Angkutan Aglomerasi Kawasan Perkotaan.

a) Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Jawa Tengah pada Tahun 2024 masih didominasi oleh Tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.52.
Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

No	Jumlah Terminal dan Kewenangannya	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terminal tipe A (Pusat)	19	19	19	19	19
2.	Terminal tipe B (Provinsi)	24	24	24	24	23
3.	Terminal tipe C (Kabupaten/Kota)	178	178	178	178	178
Total Terminal di Jawa Tengah		**221**	**221**	**221**	**221**	**220**

Sumber: Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Bappeda Kab./Kota, 2025.

Persebaran terminal tipe A dan tipe B, jika dibandingkan dengan kebutuhan mendasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2024 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 7 (tujuh) kabupaten/kota dan tipe B di 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Penurunan jumlah Terminal Tipe B di 2023 sejumlah 24 menjadi 23 di Tahun 2024 karena 2 terminal di Kabupaten Purworejo (Nampurejo dan Suryonegaran) yang sudah tidak efektif digantikan dengan Terminal Kutoarjo. Upaya pemenuhan jumlah dan persebaran Terminal Tipe B di Jawa Tengah berupa Pembangunan Terminal Kutoarjo di Kabupaten Purworejo yang dimulai sejak tahun 2020. Terminal Kutoarjo selain sebagai simpul transportasi juga direncanakan sebagai simpul perekonomian dengan *branding* Keburejo *Hangout Point*, dimana terdapat sentra UMKM, kuliner khas unggulan serta diselenggarakan event secara periodik dan terjadwal. Kelebihan Terminal Kutoarjo selain letaknya sangat strategis dipinggir jalan nasional juga terintegrasi dengan Stasiun Kutoarjo serta menjadi ujung layanan Trans Jateng koridor Kutoarjo - Borobudur dan terdapat layanan Kereta Api Komuter Prameks Jurusan Kutoarjo - Yogyakarta.

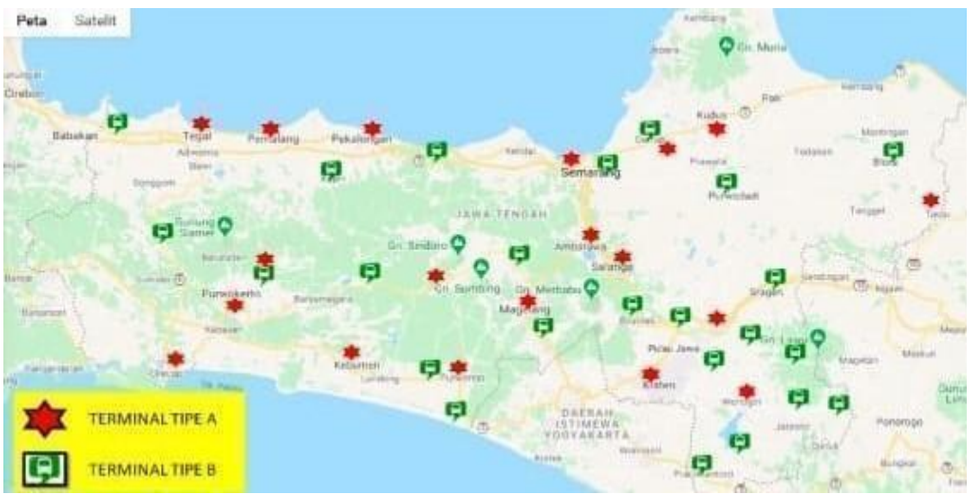

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.42.
Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah

Jumlah kendaraan masuk ke terminal tipe B. pada Tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena lesunya usaha angkutan umum.

Tabel 2.53.
Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B Tahun 2020 - 2024

No.	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bis Besar	202.640	149.252	271.242	264.998	209.242
2.	Bis Sedang	71.036	57.057	77.349	76.828	58.655
3.	Bis Kecil	64.756	34.883	58.901	56.000	41.1255
4.	Mobil Penumpang Umum	39.846	21.365	45.254	48.280	40.082
5.	Total	378.278	262.557	452.746	446.106	349.104

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

b) Trayek Angkutan Umum

Jumlah armada angkutan umum mengalami penurunan dari dari tahun ke tahun, selain merupakan lanjutan dampak dari pandemi Covid-19 juga masyarakat lebih berminat menggunakan moda angkutan pribadi.

Tabel 2.54.

Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek)	902	902	902	902	902
2.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek)	272	272	272	272	272
3.	Angkutan wisata (kendaraan)	4.666	3.093	2.754	2.754	3.994
4.	Jumlah bus (unit)	12.737	12.737	10.825	6.881	10.626
5.	Mobil Penumpang Umum (unit)	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

c) Halte Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Untuk mendukung konektivitas jaringan transportasi aglomerasi perkotaan diperlukan peningkatan cakupan wilayah yang terlayani koridor Trans Jateng untuk memudahkan penumpang naik dan turun. Pemenuhan kebutuhan halte Trans Jateng dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi masih belum optimal, masih ada 36,70% yang belum terbangun.

Tabel 2.55.

Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2024

Koridor Trans Jateng	Inventarisasi Halte			
	Kebutuhan	Terbangun		Belum Terbangun *
		Aset Pemprov	Aset Kab/Kota/Swasta	
Kota Semarang – Bawen	94	40	55	2
Purwokerto – Purbalingga	62	55	6	0
Kota Semarang – Weleri	53	40	13	0
Kab. Magelang – Kutoarjo	49	34	0	11
Surakarta – Sumberlawang	85	25	5	63
Kota Semarang – Grobogan	69	23	0	49
Surakarta – Wonogiri	122	15	47	69
Total	**534**	**232**	**121**	**196**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Catatan : * Halte yang belum terbangun di beberapa tempat sudah dilengkapi rambu bus stop/MMT.

d) Perhubungan Laut

Terdapat 14 Pelabuhan yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal), 8 Pelabuhan Pengumpan Regional (Batang, Kendal, Jepara, Legon Bajak, Karimunjawa, Juwana, Tasik Agung dan Sluke), dan 3 Pelabuhan Lokal (Brebes, Pekalongan dan Pemalang). Pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun, sampai dengan akhir tahun 2024 proses penlimpahan aset belum diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan.

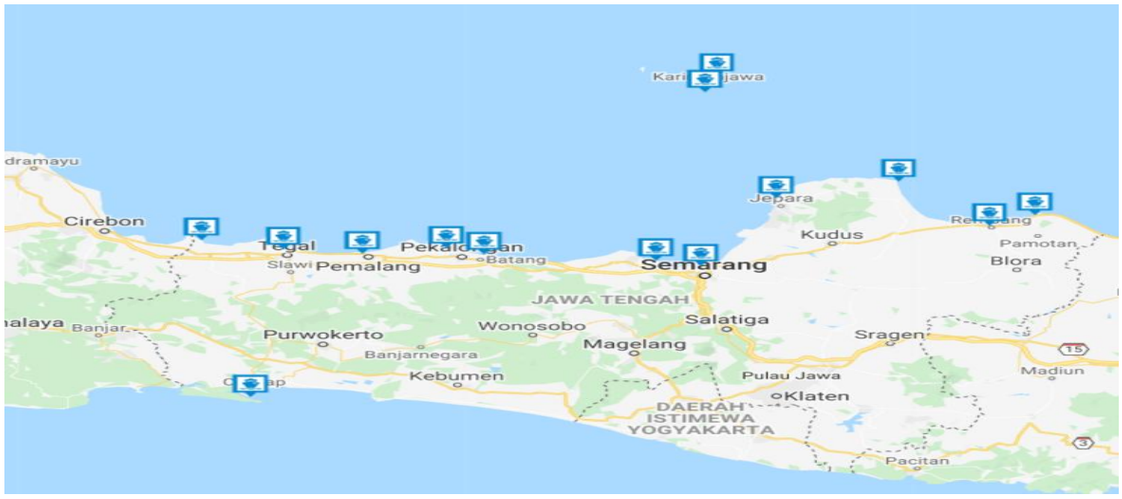

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.43.
Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah

Kondisi pelabuhan pengumpan regional di Jawa Tengah secara umum, laju sedimentasi pada kolam labuh dan alur pelayaran sangat tinggi yang memerlukan upaya penanganan berupa normalisasi secara berkala dengan periode 3 – 4 tahun sekali. Akibat sedimentasi tinggi kolam dermaga penyeberangan Pelabuhan Kendal mengalami pendangkalan, yang mengakibatkan KM Kali Bodri yang melayani penyeberangan Kendal - Kumai sering kandas sehingga sejak akhir 2024 tidak lagi melayani lintas penyeberangan dimaksud.

e) Aktivitas Penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Jawa Tengah melayani lintas Jepara – Karimunjawa dan Semarang – Karimunjawa. KMC Kartini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jepara yang usianya sudah tua (16 tahun) sehingga kinerjanya sudah tidak optimal. Saat ini terdapat beberapa kapal yang melayani penyeberangan ke Karimunjawa. Mendasarkan pertimbangan dimaksud, KMC Kartini dalam proses penghapusan aset. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang berminat untuk menerima aset kapal dimaksud. Adapun kinerja dari pelayanan ASDP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.56.
Perkembangan Pelayanan ASDP Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai	30.924	29.890	43.755	50.943	62.402
2.	Penumpang KMC. Bahari Ekspress 1 (Jepara – Karimunjawa) (orang)	27.162	45.410	107.447	153.348	168.571

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

f) Perhubungan Udara

Terdapat 3 bandara komersial operasional yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Boyolali dan JB. Soedirman Purbalingga, serta 3 bandara perintis operasional yaitu Bandara Dewadaru Karimunjawa Jepara, Tunggul Wulung Cilacap dan Ngloram Blora.

Mendasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2024 tanggal 2 April 2024, status Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Sumarmo diturunkan dari Bandara Internasional menjadi Bandara Domestik. Perkembangannya sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 147 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024, Bandara A. Yani ditetapkan sebagai Bandara domestik yang dapat melayani penerbangan keluar negeri yang menunjang industri perdagangan (kargo). Hasil upaya pendorongan pengembalian status internasional, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 26 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025 Bandara Ahmad Yani Semarang kembali ditetapkan sebagai Bandara Internasional. Untuk Bandara Adi Sumarmo mendasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 146 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 ditetapkan sebagai Bandara domestik yang dapat melayani penerbangan keluar negeri untuk kepentingan Kegiatan Umroh.

Perkembangan selanjutnya, mendasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Penetapan Bandara Udara Internasional ditetapkan 36 bandar udara internasional, 2 diantaranya berada di Jawa Tengah yaitu Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Kota Semarang dan Adi Soemarmo Kabuoaten Boyolali.

Jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.57.
Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bandara	6	6	6	6	6
2	Bandara Ahmad Yani					
	Penumpang domestik (orang)	1.342.341	884.970	1.618.109	2.100.836	2.281.301
	Penumpang internas. (orang)	35.728	9	77	4.867	145
	Barang domestik (kg)	9.157.070	6.763.331	6.222.664	9.797.900	15.351.204
	Barang internasional (kg)	239.699	1.212.031	3.578.079	4.341.238	3.481.791
3	Bandara Adi Soemarmo					
	Penumpang domestik (orang)	516.780	427.536	839.773	1.164.953	1.025.149
	Penumpang internas. (orang)	17.198	15	33.739	84.698	94.861
	Barang domestik (kg)	1.596.685	1.856.723	1.760.287	3.066.899	6.957.110
	Barang internasional (kg)	-	15.158	0	2.180	1.867.049

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

g) Perkeretaapian

Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah Tahun 2024, sepanjang 1.680,26 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional (55,32%) dan 750,757 km jalur rel non aktif/belum operasional (44,68%). Posisi Jawa Tengah yang sangat strategis karena berada diantara 2 kota besar (Jakarta dan Surabaya), jalur rel di Jawa Tengah sangat padat, sehingga pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara dan Lintas Selatan diperlukan lanjutan sampai dengan tuntas semua dengan rel ganda. Dari 929,50 km/sp rel aktif terdiri dari 292,44 km/sp jalur tunggal dan 637,06 km/sp jalur ganda.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.44.
Peta Jaringan *Loop* Rel Kereta Api di Jawa Tengah

Tabel 2.58.
Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penumpang (orang)	8.318.591	4.982.954	6.434.642	21.498.258	24.640.416
2.	Barang terangkut (ton)	1.902.245	2.661.209	2.053.983	2.107.754	2.111.418
3.	Stasiun Kereta (buah)	106	115	115	116	116
4.	Perlintasan KA (unit)	1.369	1369	1369	1369	1.369

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2. Keselamatan Transportasi

Untuk meningkatkan keselamatan dilakukan upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi diantaranya: Pemasangan fasilitas keselamatan jalan, Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); Pelaksanaan *ramp check*; Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan; Penanganan perlintasan sebidang; dan Pemenuhan fasilitas penyeberangan sungai.

a) Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Korban kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2020-2024, rata-rata korban jiwa setiap tahunnya sebesar ±4.020 jiwa sehingga rata-rata setiap hari terdapat 11 orang yang meninggal dunia di jalan atau hampir dalam 2 jam, 1 nyawa hilang di jalan.

Tabel 2.59.
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Jumlah				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Laka	Kejadian	21.396	22.521	30.730	31,425	31.444
2.	Korban MD	Jiwa	3.508	3.750	4.409	4,302	4.130
3.	Tingkat Fatalitas/ 100.000 penduduk	Angka	9,61	10,21	11,91	11,62	10,89
4.	Korban Luka Berat	Orang	48	77	77	60	63
5.	Korban Luka Ringan	Orang	24.495	25.847	35.869	36,915	37.275
6.	Kerugian Materiil	Rp. 000,-	14.746.525	16.836.435	24.819.905	44.763.625	37.369.660

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, 2025.

b) Perlengkapan Jalan (Fasilitas Keselamatan) di Ruas Jalan Provinsi

Tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan jalan ruas jalan provinsi masih sangat rendah, namun selalu meningkat setiap tahun, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.60.
Perlengkapan Jalan Terpasang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, RPPJ, Marka, *Guard-rail*, LPJU, APILL, WL, Deliniator, Cermin Tikung, dan ATCS) terpasang (%)	16,93	25,06	30,03	38,66	63,00
2.	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (%)	4,55	9,09	17,88	45,45	45,45
3.	Pemasangan Rambu Jalan (Buah)	-	478	245	385	100
4.	Pemasangan RPPJ (Buah)	-	46	-	29	8
5.	Pemasangan APILL (Unit)	-	2	-	2	-
6.	Pemasangan *Guardrail* (*Beam*)	30	176	31	116	-
7.	Pemasangan Marka Jalan (m^1)	-	52.444	73.976	108.450	16.044
8.	Pemasangan LPJU (Buah)	150	174	355	721	46

Catatan : Pada 2023 terdapat mengacu pada definisi operasional indikator mendasarkan RPD 2024-2026 dimana tidak memperhitungkan deliniator dan ATCS, serta terdapat perubahan panjang jalan provinsi.
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

c) Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)

Pada Tahun 2024 di ruas jalan provinsi masih terdapat 70 titik ruas jalan yang termasuk kategori Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang belum tertangani. Untuk DRK yang sudah di rehabilitasi tetap diperlukan upaya monitoring dan evaluasi dampak penanganan DRK terhadap peningkatan keselamatan di titik DRK dimaksud.

Tabel 2.61.
Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan Ruas Jalan Provinsi 2023 - 2024

No.	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP)	2023		2024	
		DRK (Lokasi)	%	DRK (Lokasi)	%
1.	BPSPP Wilayah I Kelas A (Wilayah Semarang)	18	20,93	17	24,29
2.	BPSPP Wilayah II Kelas B (Wilayah Pati)	16	18,60	13	18,50
3.	BPSPP Wilayah III Kelas A (Wilayah Surakarta)	9	10,47	7	10,00
4.	BPSPP Wilayah IV Kelas A (Wilayah Magelang)	14	16,28	11	15,71
5.	BPSPP Wilayah V Kelas B (Wilayah Banyumas)	4	4,65	2	2,86
6.	BPSPP Wilayah VI Kelas A (Wilayah Pekalongan)	25	29,07	20	28,57
Jumlah		**86**	**100,00**	**70**	**100,00**

Catatan : Jumlah DRK per BPSPP sesuai Pergub 27/2023 tentang RAKLLAJ Prov. 2023-2028
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

d) Kendaraan Laik Jalan

Untuk meningkatkan keselamatan transportasi diperlukan peningkatan jumlah kendaraan yang laik jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan pembinaan. Semakin banyak Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji sebagai salah satu indikator penting terwujudnya keselamatan di jalan.

Tabel 2.62.
Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 - 2024

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	KBWU yang Diuji	446.658	344.850	324.379
2.	KBWU Lulus Uji	436.863	333.487	313.927
3.	KBWU Tidak Lulus Uji	9.561	7.817	8.480
	Jumlah	**446.658**	**344.850**	**324.379**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

e) *Ramp Check* di Terminal Tipe B Jawa Tengah

Ramp check bertujuan untuk meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan. Sesuai dengan kewenangannya pelaksanaan *ramp check* dilakukan pada 23 Terminal Tipe B dengan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.63.
Pelaksanaan *Ramp Check* di Terminal Tipe B Tahun 2022 - 2024

Tahun	Jumlah Kendaraan			Jenis Pelanggaran		
	Diperiksa	Tidak Melanggar	Melanggar	Administrasi	Operasional	Teknis
2022	37.564	28.559	9.005	8.353	0	2.000
2023	21.920	16.971	4.949	4.567	0	382
2024	39.112	29.589	9.523	8.281	881	361

Catatan : Pada 2020 - 2021 pelaksanaan rampcheck di Terminal Tipe B tidak ada (refocusing)
Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Tengah, 2025

f) Perlintasan Jalur Kereta Api dengan Jalan

Terdapat 1.369 titik perlintasan rel kereta api dengan jalan, sebagian besar di jalan kabupaten/kota, sebagian kecil berupa perlintasan tidak sebidang dan masih banyak yang belum dilengkapi dengan palang pintu. Perlintasan sebidang di perkotaan berpotensi berkontribusi menyebabkan kemacetan dan yang belum dilengkapi dengan palang pintu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu-lintas.

Tabel 2.64.
Perlintasan Rel Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Status Jalan	Jumlah Perlintasan Dengan Rel KA		Perlintasan Tidak Sebidang				Perlintasan Sebidang			
				Fly Over		*Underpass*		Berpalang Pintu & Dijaga		Tidak Ada Palang Pintu	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1.	Nasional	39	2.78	10	41.67	6	7.06	22	5.93	1	0.11
2.	Provinsi	27	1.83	1	4.17	1	0.00	24	6.47	1	0.11
3.	Kab/Kota	1.303	95.39	13	54.17	78	92.94	325	87.60	887	99.78
Jumlah		**1.369**	**100**	**24**	**100**	**85**	**100**	**371**	**100**	**889**	**100**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

g) Fasilitas Penyeberangan Sungai

Untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperlukan peningkatan kondisi dan kinerja angkutan penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi (kewenangan pemerintah provinsi).

Tabel 2.65.
Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Sisi Dermaga	Fasilitas Penyeberangan	
			Dermaga	Lampu Penerangan
1.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Lutungmati (Kabupaten Batang)	Permanen (2023)	Ada (2019)
		Desa Tegalsari (Kabupaten Kendal)	Permanen (2023)	Ada (2018)
2.	Sungai Kalkutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Yosorejo (Kabupaten Batang)	Non Permanen	Ada (2021)
		Desa Jatipurwo (Kabupaten Kendal)	Permanen (2023)	Ada (2021)
3.	Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal	Desa Tegalwangi (Kabupaten Brebes)	Non Permanen	Ada (2022)
		Desa Bojong (Kabupaten Tegal)	Non Permanen	Ada (2022)
4.	Sungai Kaligangsa Kab. Brebes – Kota Tegal	Ds Randusangawetan (Kabupaten Brebes)	Non Permanen	Ada (2019)
		Desa Kajongan (Kota Tegal)	Non Permanen	Ada (2023)
5.	Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo	Desa Sangkrah (Kota Surakarta)	Non Permanen	Belum Ada
		Desa Gading (KabupatemSukoharjo)	Non Permanen	Belum Ada

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

3. Pelayanan Angkutan Umum

Upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi OTP, diantaranya: peningkatan kualitas layanan angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dan fasilitasi penyediaan angkutan umum saat *peak season* (lebaran, natal dan tahun baru).

a) Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan di Jawa Tengah dilayani oleh Trans Jateng, kondisi Tahun 2024 telah terdapat pelayanan di 7 (tujuh) koridor. Dari 10 Wilayah Pengembangan (WP) baru dilakukan kajian perencanaan di 5 WP dengan total jumlah kebutuhan sejumlah 18 koridor. Pada Tahun 2024 - 2025 tidak terdapat penambahan koridor, peningkatan pelayanan di Tahun 2024 berupa penambahan jumlah bus, 2 bus di koridor Semarang - Kendal dan 1 bus di koridor Surakarta - Wonogiri dan Tahun 2025 berupa penambahan rotasi dan jam pelayanan pada koridor Semarang - Grobogan dan Surakarta - Wonogiri serta dilakukan kajian Pra FS pada WP Jekuti.

Tabel 2.66.
Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan Tahun 2024

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek
1	KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, Grobogan)	1. Semarang – Bawen (Op. 7 Juli 2017)
		2. Semarang – Kendal (Op. 28 Oktober 2019)
		3. Semarang – Demak
		4. Semarang – Grobogan (Op.13 Oktober 2021)
2	SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)	5. Boyolali – Surakarta
		6. Surakarta – Sragen (Op. 3 September 2020)
		7. Surakarta – Karanganyar
		8. Surakarta – Wonogiri (Op. 8 Agustus 2023)
		9. Sukoharjo – Klaten
3	BARLINGMASCAKEB	10. Purwokerto – Purbalingga (Op. 13 Agus. 2018)

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek
	(Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap & Kebumen)	11. Purwokerto – Wangon
4	PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung	12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur)
		13. Terminal Secang – Terminal Parakan
		14. St. Kutoarjo – Borobudur (Op. 1 Sep. 2020)
5	PETANGLONG (Kota Pekalongan, Batang, Kabupaten Pekalongan)	15. Pekalongan - Wiradesa - Kajen
		16. Pekalongan - Kedungwuni - Kajen
		17. Pekalongan - Batang - Banyuputih - Limpung
		18. Weleri - Banyuputih

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan yang dilayani Trans Jateng memiliki kontribusi riil terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mendukung peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (target 2030 = 32 persen). Pengguna transportasi umum diharapkan selalu meningkat seiring dengan peningkatan penumpang Trans Jateng.

Tabel 2.67.

Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Tahun 2020 – 2024

No	Wilayah Pengembangan/ Koridor TransJateng	Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kedungsepur					
1.	T. Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017)	1.054.091	1.136.921	1.686.921	1.954.632	2.024.614
2.	T. Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019). Diperpanjang ke Weleri (Agus. 2022)	592.411	682.477	1.235.294	1.479.581	1.583.926
3.	T. Penggaron – T. Godong – T. Gubug (Okt.2021)	-	133.380	774.188	925.977	1.117.710
	Barlingmascakeb					
4.	Purwokerto – Purba lingga (Agus. 2018)	613.804	673.120	1.261.351	1.344.065	1.435.938
	Subosukowonosraten					
5.	Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020)	55.442	327.786	676.153	810.218	883.874
6.	Tirtonadi – Wonogiri (Agustus 2023)	-	-	-	471.794	1.345.894
	Purwomanggung					
7.	Kutoarjo – Borobudur (September 2020)	106.124	485.848	872.555	1.047.738	1.107.786
	Total 7 Koridor	**2.421.872**	**3.439.532**	**6.506.462**	**8.034.005**	**9.499.742**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pada tahun 2021 mulai dilakukan survey perhitungan jumlah perpindahan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) untuk mengetahui kontribusi Trans Jateng dalam meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum perkotaan. Hal ini untuk meningkatkan dukungan dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada indikator pengguna moda transportasi umum di perkotaan. Hasil survey Kepuasan Masyarakat terkait perpindahan moda sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.68.
Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Tahun 2021 – 2024

No.	Koridor	Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng (%)			
		2021	2022	2023	2024
1.	Semarang-Bawen	43,79	46,06	44,66	44,44
2.	Purwokerto-Purbalingga	59,05	52,81	50,14	50,86
3.	Semarang-Kendal	36,94	41,21	50,29	49,72
4.	Kutoarjo-Borobudur	43,22	47,84	44,57	56,47
5.	Solo-Sangiran Via Sumberlawang	49,28	48,16	55,03	58,23
6.	Semarang-Gubug Via Godong	-	56,15	56,80	53,89
7.	Solo – Sukoharjo – Wonogiri	-	-	-	52,84
Persentase Total Perpindahan Kendaraan Pribadi ke Trans Jateng		**46,39**	**48,16**	**50,12**	**52,22**

Catatan : Survey Moda Shifting Trans Jateng mulai dilakukan pada Tahun 2021
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Proporsi biaya operasional penumpang terlayani menunjukkan tingkat efektifitas anggaran, semakin kecil proporsi semakin tinggi efektifitas anggaran yang dikeluarkan. Kinerja Trans Jateng pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari efektivitas anggaran (proporsi biaya operasional per penumpang) sebesar Rp11.904,- lebih efisien dibanding Tahun 2019 (sebelum pandemi) sebesar Rp13.354.- Hal yang sama untuk proporsional antara pendapatan dan biaya operasional Tahun 2024 sebesar 28,40 persen sudah lebih tinggi dibandingkan Tahun 2019 (sebelum pandemi) sebesar 25,42 persen.

Tabel 2.69.
Rekapitualasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2018-2024

Tahun	Total Operasional (Rp. 000,-)	Total Pendapatan (Rp. 000,-)	Proporsi Pendapatan & Operasional (%)	Jumlah Penumpang Terlayani (orang)	Proporsi Biaya Operasional Per Penumpang (Rp/penumpang)
1	*2*	*3*	*4=(3:2)x100 %*	*5*	*6 = 3 : 5*
2018	28.000.000	6.621.215	23,647	2.238.590	12.508,-
2019	45.904.608	11.668.972	25,420	3.437.459	13.354,-
2020	64.111.322	8.722.194	13,605	2.419.549	26.497,-
2021	90.982.851	12.549.852	13,794	3.439.532	26.452,-
2022	93.761.160	22.405.562	23,685	6.506.462	14.410,-
2023	105.942.854	27.454.138	25,583	8.034.005	13.187,-
2024	113.081.887	32.472.937	28.404	9.499.742	11.904,-
Total	**541.784.682**	**89.421.933**	**22,332**	**35.575.339**	**15.229**

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Manfaat layanan Trans Jateng yang langsung dirasakan masyarakat adalah berkurangnya biaya transportasi, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan lain dalam mendukung peningkatan kesejahteraan. Bagi pemerintah terdapat penghematan anggaran yang dikeluarkan terkait bahan bakar yang bersubsidi. Penghematan konsumsi bahan bakar selain bermanfaat untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup juga untuk memenuhi prioritas pembangunan lain.

Beralihnya masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum *(mode shifting)* dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan menghemat biaya peningkatan kapasitas infrastruktur jalan. Mulai 2022 mulai diukur manfaat layanan Trans Jateng yang dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dikeluarkan sebagaimana tabel berikut. Beberapa manfaat lain yang belum diperhitungkan dalam tabel berikut diantaranya: penurunan emisi, penurunan kemacetan, penurunan kecelakaan lalu lintas, pergerakan perekonomian.

Tabel 2.70.
Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	Tahun (Rp. 000,-)		
		2022	2023	2024
1.	Total Biaya Operasional Trans Jateng			
	a. Biaya Operasional Kendaraan (BOK)	72.935.587	82.982.804	92.031.251
	b. Biaya Tenaga Kerja (Gaji Crew)	19.166.873	21.127.030	22.657.423
	c. Biaya Prasarana (Shelter, dll)	1.658.700	1.833.500	871.560
	d. Total Biaya (1a+1b+1c)	93.761.160	105.942.854	115.560.234
2.	Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng			
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22.405.562	27.454.138	32.472.937
	b. Estimasi Penghematan Biaya Perjalanan Masyarakat	36.763.473	45.880.510	50.177.948
	c. Estimasi Penghematan Subsidi BBM	12.825.370	14.861.343	22.890.512
	d. Total Nilai Manfaat (2a+2b+2c)	71.994.406	88.195.991	105.541.397
3.	Proporsi Anggaran & Manfaat (2d:1d)x100%	76,78%	83,2%	91,33%

Catatan : Survey dan perhitungan manfaat layanan Trans Jateng mulai dilaksanakan pada tahun 2022
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Beberapa nilai manfaat layanan angkutan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) yang belum dikapitasikan diantaranya: penurunan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas, peningkatan kualitas udara, peningkatan keselamatan lalu lintas dan pengendalian inflasi.

b) Angkutan Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Saat lebaran, natal dan tahun baru merupakan penyelenggaraan angkutan pada masa lalu lintas tinggi (*peak season*) yang melibatkan beberapa *stakeholder* untuk menciptakan kelancaran lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Setelah pandemi terdapat lonjakan pada tahun sebelumnya dikarenakan tidak diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Tabel 2.71.
Penumpang Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2019-2024

No	Jumlah Penumpang	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Lebaran**	**16.329.328**	**NA**	**7.851.683**	**24.343.824**	**30.474.683**	**24.343.824**
a.	Angkutan Umum	8.179.814	NA	5.295.715	15.477.634	17.895.047	15.477.634
b.	Pribadi	8.149.514	NA	2.555.968	8.866.190	12.579.636	8.866.190
2.	**Nataru**	**11.482.975**	**NA**	**15.653.528**	**16.978.216**	**17.072.434**	**16.978.216**
a.	Angkutan Umum	3.660.441	NA	11.446.488	9.986.033	11.803.434	9.986.033
b.	Pribadi	7.822.534	NA	4.207.039	6.992.183	5.269.000	6.992.183
Total		**27.812.303**	**NA**	**23.505.211**	**41.322.039**	**47.547.137**	**41.322.039**

Catatan : Pada Tahun 2020 merupakan puncak dari pandemi Covid-19, terdapat pembatasan kegiatan
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

2.3.15. Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa

Pengembangan ekonomi masyarakan desa di Jawa Tengah secara umum dapat dilihat melalui dukungan peran lembaga ekonomi desa dan ketersediaan saran dan prasarana perekonomian desa. Perekonomian desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong kemandirian desa. Ekonomi desa melibatkan berbagai pihak, baik Masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah, pihak ketiga (swasta), maupun lembaga ekonomi yang dibentuk oleh desa. Lembaga ekonomi desa yang berperan penting dalam Upaya peningkatan pendapatan desa melalui optimalisasi potensi lokal desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, sampai dengan Tahun 2024, masih terdapat beberapa desa belum memiliki BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa. Berikut merupakan data terkait desa di Jawa Tengah

Tabel 2.72.
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten	Desa	Jumlah Desa Sudah Membentuk BUM Desa		Jumlah Desa Belum Membentuk BUM Desa	
			Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
1	Banjarnegara	266	262	98,50	4	1,50
2	Banyumas	301	300	99,67	1	0,33
3	Batang	239	228	95,40	11	4,60
4	Blora	271	270	99,63	1	0,37
5	Boyolali	261	222	85,06	39	14,94
6	Brebes	292	292	100,00	0	0,00
7	Cilacap	269	269	100,00	0	0,00
8	Demak	243	214	88,07	29	11,93
9	Grobogan	273	273	100,00	0	0,00
10	Jepara	184	184	100,00	0	0,00
11	Karanganyar	162	160	98,77	2	1,23
12	Kebumen	449	449	100,00	0	0,00
13	Kendal	266	260	97,74	6	2,26
14	Klaten	391	391	100,00	0	0,00
15	Kudus	123	112	91,06	11	8,94
16	Magelang	367	356	97,00	11	3,00
17	Pati	401	401	100,00	0	0,00
18	Pekalongan	272	253	93,01	19	6,99
19	Pemalang	212	211	99,53	1	0,47
20	Purbalingga	224	224	100,00	0	0,00
21	Purworejo	469	468	99,79	1	0,21
22	Rembang	287	263	91,64	24	8,36
23	Semarang	208	202	97,12	6	2,88
24	Sragen	196	196	100,00	0	0,00

No	Kabupaten	Desa	Jumlah Desa Sudah Membentuk BUM Desa		Jumlah Desa Belum Membentuk BUM Desa	
			Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
25	Sukoharjo	150	147	98,00	3	2,00
26	Tegal	281	268	95,37	13	4,63
27	Temanggung	266	258	96,99	8	3,01
28	Wonogiri	251	251	100,00	0	0,00
29	Wonosobo	236	211	89,41	25	10,59
	JUMLAH	**7810**	**7595**	**97,25**	**215**	**2,75**

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2024

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat 2,75 persen atau 215 Desa di Jawa Tengah yang belum membentuk BUMDes. Desa-desa tersebut perlu didorong agar dapat membentuk BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian desa. Sementara itu, apabila dilihat dari klasifikasi perkembangannya, BUMDes dapat dikategorikan dalam kelas perintis, pemula, berkembang, dan maju. Klasifikasi BUMDes saat ini mengacu pada Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Berikut merupakan grafik klasifikasi perkembangan BUMdes Jawa Tengah Tahun 2023 dan Tahun 2024.

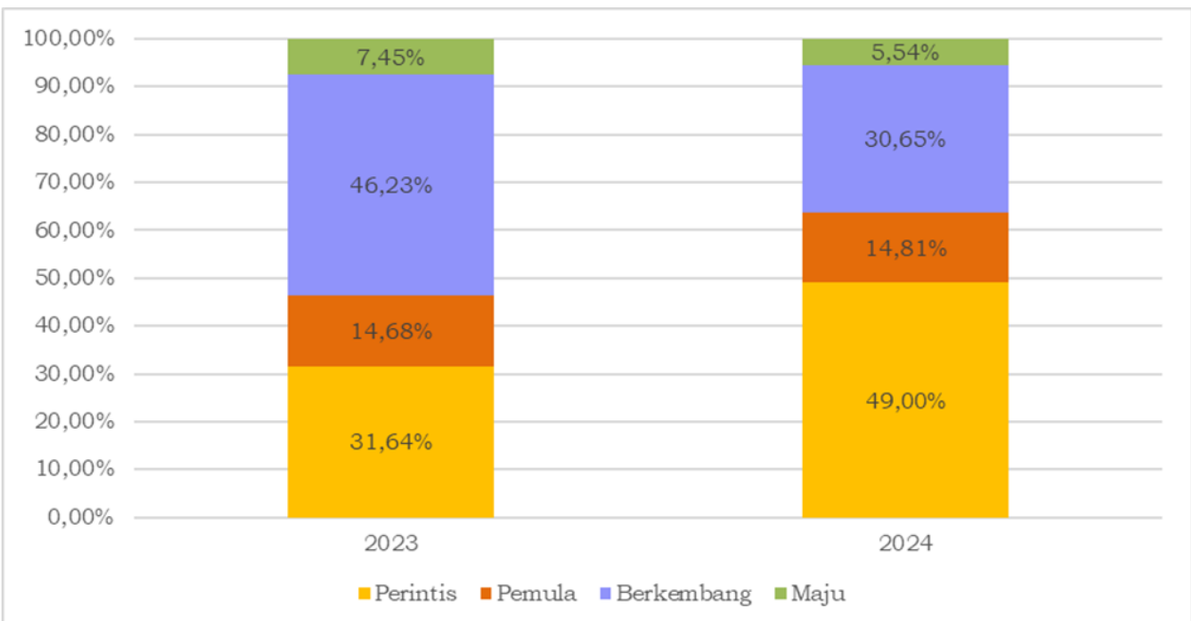

Gambar 2.45.
Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan grafik tersebut, sebagian besar BUMDes di Jawa Tengah masih ada di klasifikasi perintis dan berkembang. Sementara itu, BUMDes dengan klasifikasi maju masih sedikit, hanya 5,54%. Perlu komitmen dan upaya bersama yang kuat dari berbagai pihak, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar

kedepannya BUMDes di Jawa Tengah dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya, terutama dalam mendukung perekonomian desa. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala perkembangan BUMDes di Jawa Tengah diantaranya adalah keterbatasan akses permodalan, kapasitas SDM yang kurang memadai, manajemen/pengelolaan yang belum optimal, minimnya kerjasama, kurangnya sarana prasarana pendukung, belum optimalnya inovasi dalam diverisikasi produk, dan belum adanya dukungan kebijakan/regulasi yang mendukung.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan perdesaan, yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayananan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk 149 kawasan perdesaan. 149 kawasan perdesaan tersebut dikembangkan melalui potensi tematik masing-masing kawasan yang berbeda-beda. Tema pengembangannya diantaranya adalah pertanian, wisata, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri kecil.

2.4. Kondisi Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Gambaran kinerja hasil pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga), dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing didukung kinerja berbagai sektor antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Gambaran keseluruhan kondisi sumber daya manusia sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

2.4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak. Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai dimensi kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata *geometric*, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020

hingga 2024, namun masih berada di bawah capaian nasional, demikian pula dengan laju pertumbuhannya.

Capaian tiga komponen IPM yaitu RLS penduduk Usia 25 tahun ke atas, HLS dan Pengeluaran per kapita disesuaikan berada di bawah nasional, namun tidak demikian halnya dengan komponen UHH yang berada di atas nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional.

RLS penduduk Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas dan usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2024, namun laju pertumbuhan mulai menurun dari tahun 2022. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat RLS menunjukkan gambaran rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh penduduk di Jawa Tengah. Upaya intervensi melalui pendidikan non formal dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan RLS di Jawa Tengah.

Berbeda dengan RLS, pertumbuhan HLS Jawa Tengah menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 namun kembali melambat di tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penyediaan layanan pendidikan perlu menjadi perhatian sehingga diharapkan Program Wajar 13 Tahun dapat tercapai.

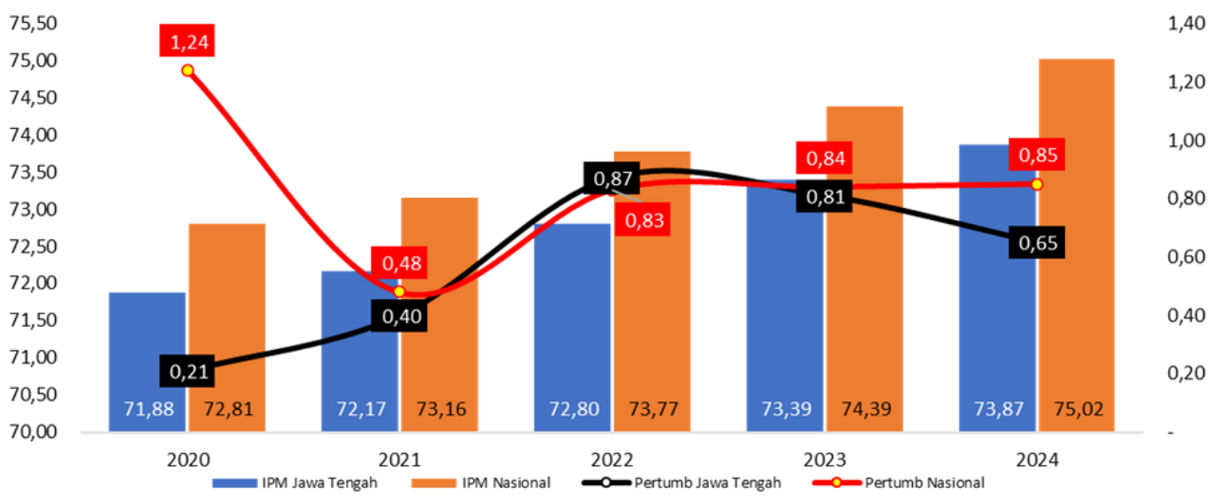

Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.46.
IPM Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024

2.4.2. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa. Keluarga juga menjadi lingkungan pertama dan utama untuk pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral, cinta kasih, agama, moral, budaya dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat, sehingga terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa. Terkait dengan pembangunan keluarga telah dirilis indeks Pembangunan Keluarga oleh BKKBN yang merupakan indeks untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan. Capaian Ibangga Jawa Tengah periode 2021 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang meningkat yaitu dari 56,1 menjadi 63,9 dan masuk pada kategori berkembang. Angka Ibangga Jawa Tengah juga lebih baik dari nasional yang secara trend juga

mengalami perkembangan meningkat yaitu dari 54,01 di tahun 2021 menjadi 62,4 di tahun 2024.

Sumber: BKKBN, 2025

Gambar 2.47.
Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024

2.4.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Ketimpangan gender diukur dari indeks komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPG Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2020-2024 berada di atas nasional dan menunjukkan tren kecenderungan yang terus meningkat. Namun demikian, trend peningkatan Jawa Tengah mulai melambat dan sebaliknya pada angka nasional mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga mulai mengejar angka Jawa Tengah. Perlu untuk diperkuat kembali untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih berkualitas.

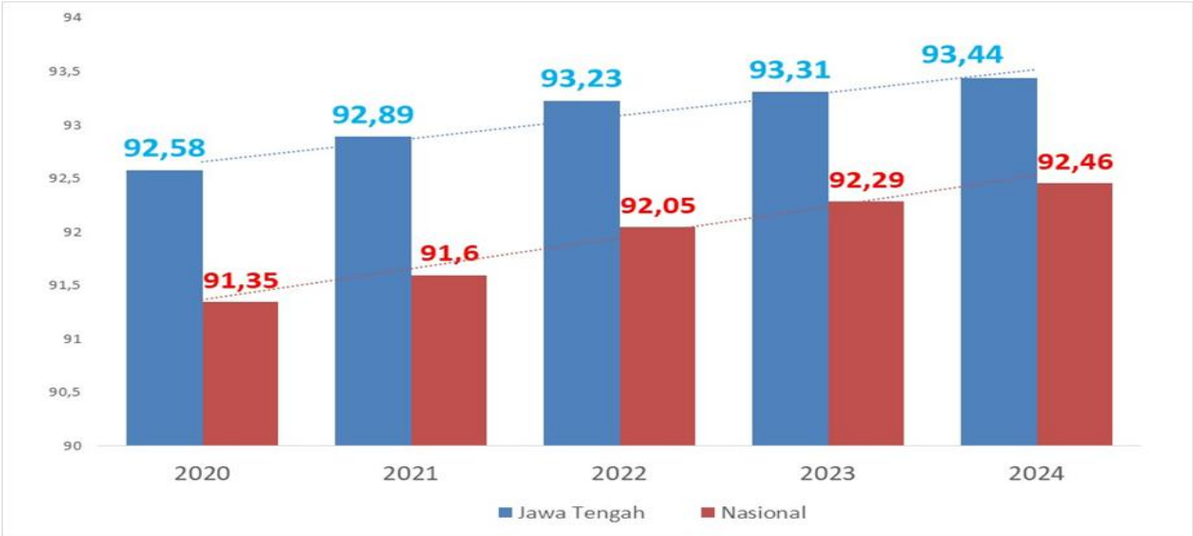

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.48.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan komponen pembentuk IPG, diketahui bahwa komponen Usia Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu tertinggal dibandingkan laki-laki. Atas kondisi tersebut maka aspek pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran di sektor pendidikan bagi perempuan menjadi kunci agar tercipta kesetaraan gender. Sementara itu bagi laki-laki, pola/gaya hidup yang kurang sehat perlu untuk direduksi agar laki-laki memiliki harapan hidup yang lebih berimbang dibanding perempuan.

Pada tahun 2024 UHH perempuan di Jawa Tengah telah mencapai 77,68 tahun, sementara laki-laki mencapai 73,13 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti yang mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Sementara seiring dengan adanya gap UHH antara laki-laki dan perempuan maka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami hal yang sama, tercatat tahun 2024, HLS perempuan sebesar 13,04 tahun sedangkan laki-laki sebesar 12,77 tahun. Dari angka HLS tersebut tentu memberikan harapan di masa mendatang bahwa perempuan memiliki potensi untuk bersaing dengan laki-laki bidang pendidikan. Harapan itu kian terlihat jika melihat kondisi tren perkembangan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dimana perkembangan untuk rata-rata lama sekolah kelompok perempuan periode 2020-2024 lebih baik dibanding laki-laki, meskipun secara angka pertahunnya masih unggul laki-laki. Tercatat bahwa RLS perempuan meningkat sebesar 0,39 poin dari tahun 2020 (7,24) ke tahun 2024 (7,63) sedangkan laki-laki sebesar 0,27 poin yaitu dari 8,16 pada tahun 2020 menjadi 8,43 pada tahun 2024. Jika pola ini terus konsisten tentu tidak menutup kemungkinan RLS perempuan bisa menyalip laki-laki di masa depan.

Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 10,892 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar 16,690 juta rupiah per kapita per tahun. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar

tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Selain itu juga karena perempuan lebih banyak berada pada sektor usaha informal atau nonformal yang terkadang tidak tercatat resmi.

Tabel 2.73.
Perkembangan Komponen IPG 2020-2024 Provinsi Jawa Tengah

Komponen IPG	2020	2021	2022	2023	2024
RLS Laki-Laki	8,16	8,17	8,31	8,42	8,43
RLS Perempuan	7,24	7,34	7,55	7,62	7,63
HLS Laki-Laki	12,70	12,71	12,72	12,76	12,77
HLS Perempuan	12,79	12,93	12,99	13,03	13,04
AHH laki-Laki	72,51	72,61	72,71	72,95	73,13
AHH Perempuan	76,3	76,42	76,53	76,62	77,68
PENGELUARAN PER KAPITA laki-Laki	15,031	15,253	15,606	16,102	16.690
PENGELUARAN PER KAPITA Perempuan	9,274	9,805	10,098	10,513	10.892

Sumber: BPS, 2025.

2.4.4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kondisi kesetaraan gender di jawa Tengah yang ditunjukkan dengan Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan perkembangan yang makin membaik. Tercatat Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2024 sebesar 0,308 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2020 yang sebesar 0,370 dan IKG Jawa Tengah lebih baik dibanding nasional yaitu di angka 0,421 di tahun 2024 yang juga mengalami penurunan dibanding tahun 2020 (0,472). Tren penurunan ini memberikan arti bahwa ketimpangan gender yang terjadi di Jawa Tengah semakin mengecil atau kesetaraan gender yang semakin membaik, namun upaya mereduksi ketimpangan masih perlu terus dilakukan guna meningkatkan kesetaraan gender yang lebih baik lagi dimasa mendatang. Dilihat dari indikator pembentuk dimensi IKG terdapat beberapa indikator yang mengalami perkembangan membaik namun ada juga yang mengalami perkembangan memburuk.

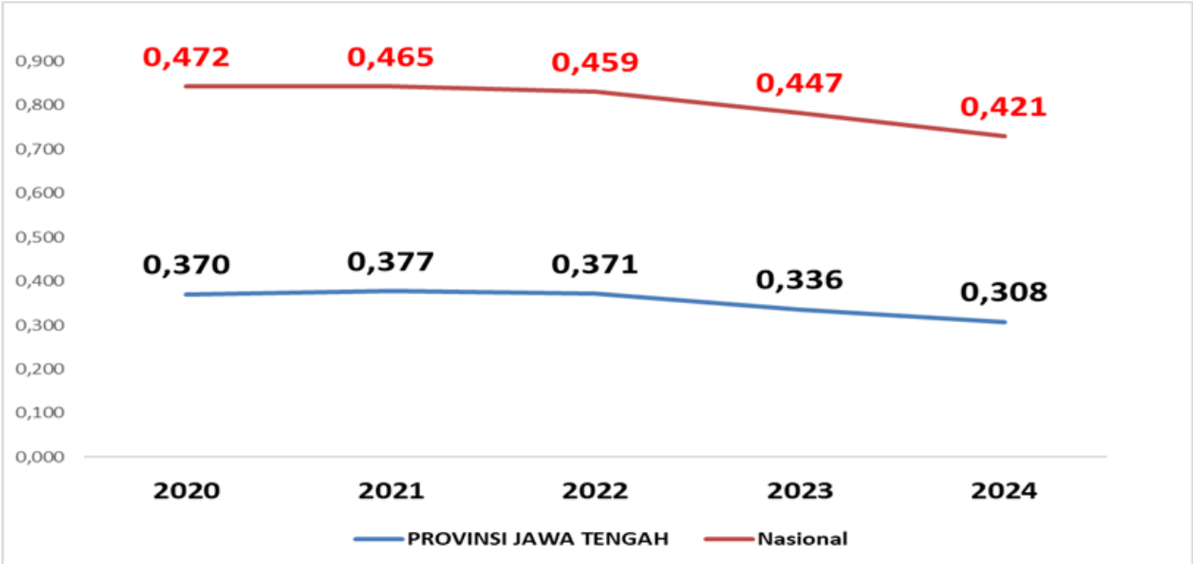

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.49.
Perkembangan IKG Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Pada dimensi kesehatan reproduksi terdapat dua indikator pembentuk yaitu proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). MTF membaik dari 0,041 pada tahun 2020 menjadi 0,018 pada tahun 2024, MHPK20 membaik dari 0,254 di tahun 2020 menjadi 0,249 di tahun 2024.

Dimensi pemberdayaan dibentuk dua indikator yaitu persentase keterwakilan di legislatif dan persentase pendidikan SMA ke atas. Keterwakilan legislatif perempuan mengalami perkembangan pasang surut pada rentang yang masih di kategori rendah yaitu dibawah 30 persen. Tercatat persentase keterwakilan perempuan di legislatif tahun 2024 sebesar 17,65 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (22 persen). Hasil pemilu legislatif tahun 2024 ternyata belum mampu meningkatkan katerwakilan perempuan di legislatif, meskipun upaya sosialisasi dan peningkatan literasi pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen terus dilakukan dewasa ini. Sedangkan indikator persentase penduduk dengan minimal SMA ke atas, perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Tercatat tahun 2024, laki-laki sebesar 35,72 persen sedangkan perempuan 29,61 persen. Namun dari sisi perkembangannya tercatat kontribusi perempuan mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen yaitu dari 26,97 persen di tahun 2020 meningkat menjadi 29,61 persen di tahun 2024. Peningkatan ini melebihi laki-laki yang hanya meningkat sebesar 1,97 persen dari 32,85 persen pada tahun 2020 menjadi 35,72 persen di tahun 2024. Peningkatan pada kontribusi perempuan tersebut menyiratkan akan harapan bahwa perempuan pelan tapi pasti akan mulai mengejar ketertinggalannya dengan laki-laki di sektor pendidikan.

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama kurun waktu 2020-2024 TPAK perempuan dan laki-laki semakin meningkat. TPAK perempuan pada tahun 2020 sebesar 57,54 persen menjadi 61,82 persen pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 1,38 persen. Sedangkan TPAK laki-laki pada tahun 2020 sebesar 81,68 persen menjadi 85,66 persen pada tahun 2024 atau meningkat

sebesar 2,84 persen. TPAK perempuan baik nilai maupun peningkatannya masih tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan perempuan di sektor ketenagakerjaan masih sulit untuk bersaing dengan laki-laki.

Tabel 2.74.
Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender 2020-2024

Komponen IKG		2020	2021	2022	2023	2024
Dimensi Kesehatan Reproduksi						
Proporsi perempuan yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitasi kesehatan (MTF)		0,041	0,042	0,042	0,027	0,018
Proporsi 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia <20 tahun (MHPK20)		0,254	0,267	0,264	0,260	0,249
Dimensi Pemberdayaan						
Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	laki-laki	32,85	32,26	34,14	34,82	35,72
	perempuan	26,97	26,82	28,79	29,20	29,61
Persentase anggota legislatif	laki-laki	81,2	81,67	80	78	82,35
	perempuan	18,8	18,33	20	22	17,65
Dimensi Ekonomi						
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	laki-laki	81,68	81,94	83,74	84,52	85,66
	perempuan	57,54	57,58	58,31	58,92	61,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2.4.5. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Peran partisipasi aktif perempuan dalam bidang ekonomi dan politik, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan di Jawa Tengah yang diukur dengan Indeks Pemberdayan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang masih cukup baik dibanding capaian tahun 2020, meskipun capaian tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023.

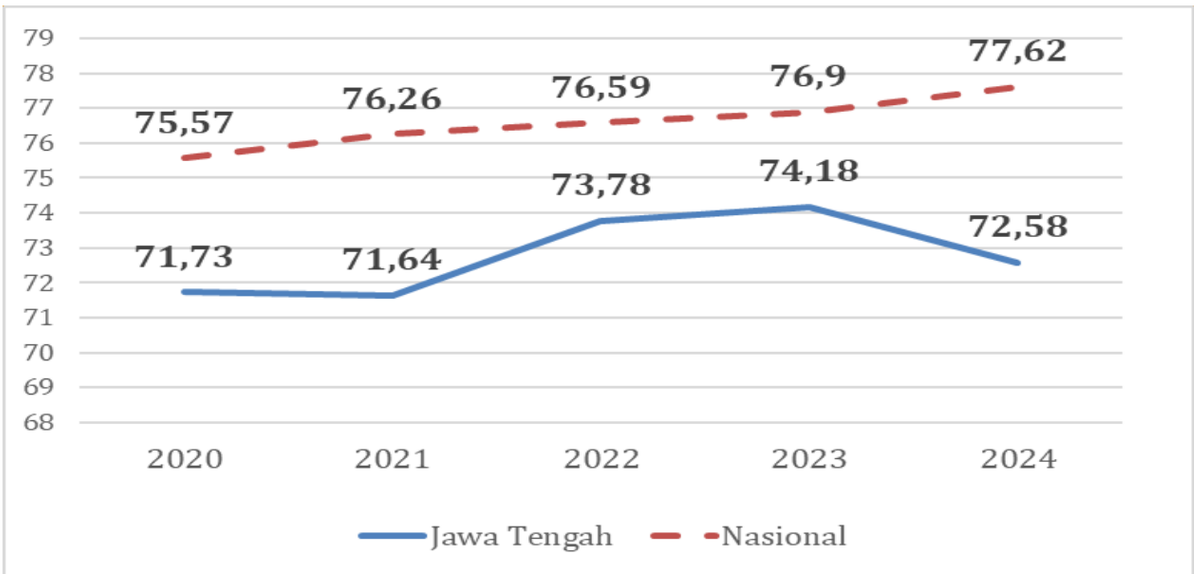

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar.2.50.
Perkembangan IDG Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Faktor yang menyebabkan menurunnya angka IDG Jawa Tengah di tahun 2024 adalah menurunnya keterwakilan perempuan di parlemen yang

turun cukup besar dibanding tahun 2023 (20,17) yaitu menjadi 17,65% di tahun 2024 dan perempuan sebagai tenaga profesional yang juga menurun dari 51% di tahun 2023 menjadi 49,75%. Kondisi ini tentu memprihatinkan ditengah makin gencarnya upaya pengarusutamaan gender diberbagai sektor pembangunan, juga masih kuatnya faktor budaya patriarkhi, motivasi perempuan yang masih rendah, keterbatasan ekonomi dan amasih adanya diskriminasi diberbagai sektor menjadikan kelompok perempuan masih pada posisi belum menguntungkan.

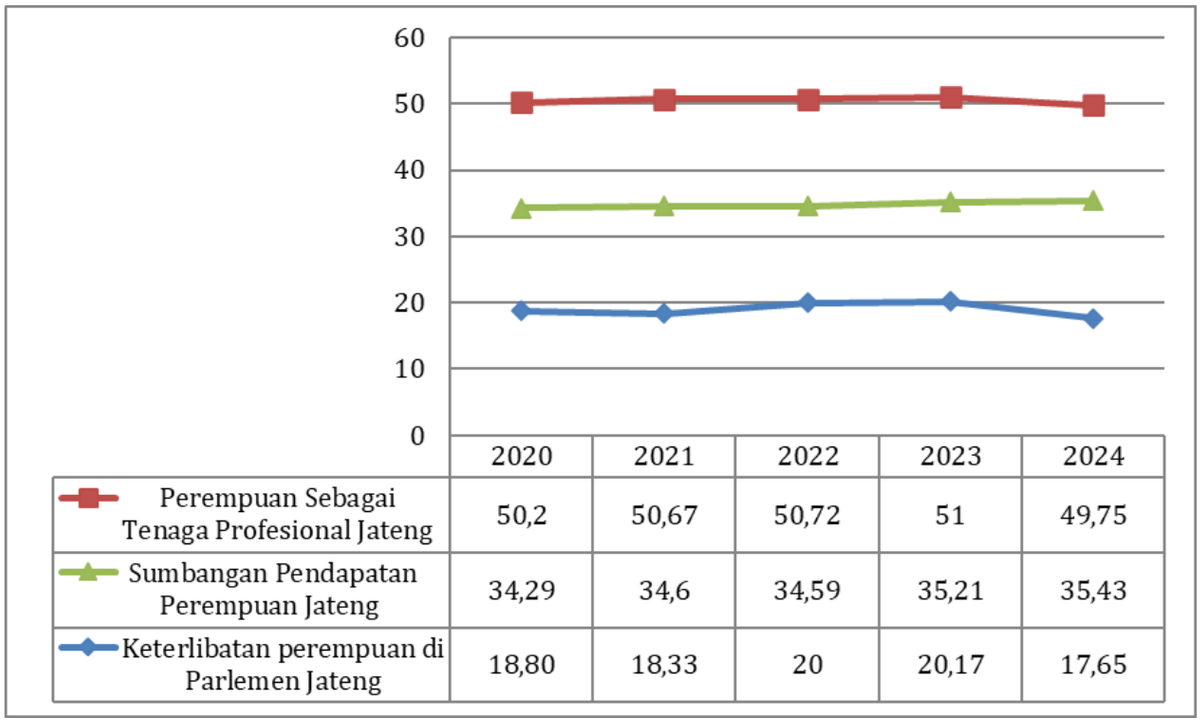

	2020	2021	2022	2023	2024
Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Jateng	50,2	50,67	50,72	51	49,75
Sumbangan Pendapatan Perempuan Jateng	34,29	34,6	34,59	35,21	35,43
Keterlibatan perempuan di Parlemen Jateng	18,80	18,33	20	20,17	17,65

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar.2.51.
Perkembangan Komponen IDG Jawa Tengah Tahun 2020-2024

2.4.6. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, salah satunya sebagai solusi atas permasalahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Oleh sebab itu, kebudayaan perlu dijadikan landasan untuk menentukan arah dan pencapaian pembangunan. Atas latar belakang tersebut, pada tahun 2018 disusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan sekaligus sebagai acuan lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK memotret pembangunan kebudayaan melalui 7 dimensi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.77

IPK Jawa Tengah cenderung lebih baik dibandingkan nasional. Meskipun meningkat, namun kinerjanya mengalami penurunan. Penurunan kinerja yang cukup signifikan terdapat pada dimensi ekonomi budaya. Menurunnya kinerja dimensi ekonomi budaya mengindikasikan bahwa minat masyarakat rendah untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena “pasar budaya lokal” di Jawa Tengah belum memberikan *reward* yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

Tabel 2.75.
Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2023

Dimensi IPK	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ekonomi Budaya	37,67	44,45	37,17	25,96	44,00	45,11
Pendidikan	69,71	71,46	72,64	71,21	73,56	73,50
Ketahanan Sosial Budaya	79,57	80,30	80,97	72,37	74,02	75,61
Warisan Budaya	55,16	51,95	45,58	50,12	52,31	53,13
Ekspresi Budaya	44,70	45,45	43,69	34,79	41,59	46,35
Budaya Literasi	51,64	56,67	59,90	50,00	53,36	56,63
Gender	60,05	58,95	58,57	58,28	58,88	59,61
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah	**60,05**	**60,94**	**59,12**	**55,24**	**59,43**	**60,89**
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional	**53,74**	**55,91**	**54,65**	**51,90**	**55,13**	**57,13**

Sumber: Kemenbud, 2024.

2.4.7. Pendidikan

Keberhasilan pencapaian Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan penduduk usia 7-18 tahun, dan sekaligus merupakan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Capaian SPM Pendidikan Jawa Tengah pada tahun 2024 berdasarkan Rapor Pendidikan-Kemendikdasmen masih kurang, yaitu 77,26 kategori Tuntas Pratama. Partisipasi pendidikan menengah dan khusus di Jawa Tengah masih rendah. Untuk usia 16-18 tahun hanya berkisar 71 persen, sedangkan usia 4-18 tahun penyandang disabilitas lebih rendah pada kisaran 56 persen.

Tabel 2.76.
Capaian Partisipasi Pendidikan Menengah di Jawa Tengah (Persen)

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	
	16 – 18 Tahun	4 – 18 Tahun Penyandang disabilitas
2021	70,79	n/a
2022	70.81	23,21
2023	70,87	56,70
2024	71,60	56,70

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikdasmen, 2025.

Memperkuat hal tersebut, data Pusdatin Kemendikdasmen mencatat masih terdapat penduduk usia sekolah di Jawa Tengah yang Belum Pernah Bersekolah (BPB), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Drop Out (DO), yang kemudian dikategorikan sebagai kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS), sebesar 329.748 jiwa yang didominasi kategori LTM pada jenjang SMP sebanyak 32 persen .

Tabel 2.77.
Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah per April 2025

NO	ATS BPB	JUMLAH ANAK
1	USIA < 7 TAHUN	0
2	USIA 7 – 12 TAHUN	20.236
3	USIA 13 – 15 TAHUN	20.737
4	USIA > 15 TAHUN	56.781
	JUMLAH	97.754

NO	ATS LTM	JUMLAH ANAK
1	LULUS SD LTM	36.021
2	LULUS SMP LTM	105.361
	JUMLAH	141.382

NO	ATS DO	JUMLAH ANAK
1	DO DARI PAUD	3
2	DO DARI SD	15.890
3	DO DARI SMP	38.855
4	DO DARI SMA/SMK	35.864
	JUMLAH	90.612

NO	JENIS ATS	JUMLAH ANAK
1	ATS BPB	97.754
2	ATS DO	90.612
3	ATS LTM	141.382
	JUMLAH TOTAL	329.748

Sumber: Pusdatin Kemendikdasmen (2025).

Tingkat penyelesaian pendidikan selama 2 tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan menurun sebesar 58,35 di tahun 2023 dari 58,75 di tahun 2022, dan konsisten di bawah angka Nasional sebesar 66,79 (Sumber: BPS, 2024). Kondisi ini memperlihatkan perlunya pencegahan dan penanganan secara serius terhadap ATS di Jawa Tengah, mengingat penanganan ATS juga merupakan bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk semua.

Jumlah ATS yang masih cukup banyak di Jawa Tengah ditengarai karena belum meratanya layanan pendidikan menengah atau disebut dengan wilayah blankspot layanan pendidikan menengah. Hasil identifikasi menunjukkan masih terdapat 22 kecamatan di Jawa Tengah tersebar di Kabupaten Temanggung, Kebumen, Banjarnegara, Grobogan, Klaten, Wonogiri, Pati, Sragen, Boyolali, Karanganyar dan Rembang. Selain itu, sebagian masyarakat masih belum menganggap pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang salah satunya sebagai upaya meningkatkan derajat dan kesejahteraan masyarakat,kondisi ini ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah.

Selain akses pemerataan layanan pendidikan, mutu pendidikan juga masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri. Relevansi pendidikan, kualitas guru, kondisi sarana prasarana pendidikan serta kemampuan literasi dan numerasi siswa dapat menggambarkan kondisi mutu pendidikan di Jawa Tengah.

Relevansi pendidikan ditunjukkan dengan kualitas lulusan pendidikan terutama pada kesesuaian lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. Data memperlihatkan bahwa serapan tamatan SMK belum optimal, ditandai dengan penurunan jumlah lulusan SMK yang bekerja, sebaliknya jumlah lulusan SMK yang berwirausaha justru mengalami peningkatan. Namun demikian, dari hasil penilaian Rapor Pendidikan Kemendikdasmen Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik untuk tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah mencapai 89,87 persen. Kondisi ini menggambarkan adanya

kecenderungan serapan lulusan SMK lebih banyak ke arah berwirausaha daripada bekerja di dunia usaha maupun industri.

Tabel 2.78.
Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024

Uraian	Skor Rapor Pendidikan			
	2021	2022	2023	2024
✓ Penyerapan lulusan SMK	38,51	92,53	89,32	89,87
✓ Lulusan yang melanjutkan studi	11,58	13,74	14,87	8,93
✓ Lulusan yang bekerja	38,51	60,71	53,52	58,72
✓ Lulusan yang berwirausaha	27,72	18,07	20,93	22,21
✓ Keselarasan bidang kerja	28,90	64,69	44,63	66,09
✓ Masa tunggu bekerja/wirausaha	8,92	3,25	3,88	3,66

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikdasmen, 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan peningkatan keterserapan lulusan SMK pada DUDI salah satunya melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK yang sesuai kebutuhan DUDI serta mengoptimalkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk SMK melalui program *Center of Excellent* (CoE).

Mutu pendidikan juga dapat dilihat melalui kualitas guru yang tersertifikasi. Kemedikdasmen melalui rilis Neraca Pendidikan mencatat pendidik tersertifikasi pada jenjang SMK dan pendidikan khusus masih di bawah 50 persen, meski secara keseluruhan cakupan pendidik tersertifikat jenjang pendidikan menengah mengalami peningkatan.

Tabel 2.79.
Persentase Pendidik yang Tersertifikasi Pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)

Tahun	SMA	SMK	SLB
2019	66,70	43,60	52,20
2020	65,10	44,20	46,10
2021	57,10	44,20	40,30
2022	56,10	45,40	40,00
2023	59,10	48,40	45,00

Sumber: Neraca Pendidikan Kemendikdasmen, 2024

Mutu pendidikan lainnya tergambarkan melalui kondisi sapras pendidikan di Jawa Tengah. Jawa Tengah masih memiliki ruang kelas kondisi rusak berat, sedang maupun ringan. Pada tahun 2023, ruang kelas dengan kategori rusak berat mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 3,74 persen dan 1,26 persen. Peningkatan tersebut sebagai akibat dari meningkatnya kejadian bencana alam (angin topan, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan gelombang pasang) pada tahun yang sama di Jawa Tengah. Terhadap kondisi tersebut, maka pemerintah berupaya melakukan peningkatan sarpras pendidikan melalui rehabilitasi sarpras pendidikan baik dengan optimalisasi APBN (DAK Fisik Sarpras Pendidikan) maupun APBD.

Tabel 2.80.
Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)

Tahun	SMA			SMK		
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat
2019	28,55	70,17	1,28	30,26	69,06	0,69
2020	58,41	41,59	-	55,72	44,28	-
2021	57,24	42,76	-	53,10	46,90	-
2022	73,87	23,66	2,47	71,92	27,35	0,73
2023	68,47	27,79	3,74	74,47	24,28	1,26

Sumber: BPS, 2024

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta mampu menganalisa dan memahami konsep, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai literasi dan numerasi secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2024, begitupun dengan persentase kabupaten/kota dan satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembelajaran secara perlahan di Jawa Tengah.

Tabel 2.81.
Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2021-2024

Capaian*	Jenjang	Skor Literasi	Skor Numerasi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum		Persentase Satpendik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum		Nilai Karakter
				Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	
2021	SMA**	67,18	52,84	8,57	0,00	32,80	6,11	56,51
	SMK	63,64	51,10					54,53
	SDLB	61,63	52,55					55,89
	SMPLB	63,68	57,20					56,58
	SMALB	59,72	49,94					57,25
2022	SMA**	68,79	56,56	45,71	0,00	48,52	19,81	57,03
	SMK	64,14	53,71					55,21
	SDLB	60,61	52,58					58,31
	SMPLB	60,21	56,99					58,21
	SMALB	56,24	52,26					56,21
2023	SMA**	73,82	61,46	77,14	34,29	64,89	48,02	57,35
	SMK	70,37	59,07					55,71
	SDLB	67,87	64,28					61,82
	SMPLB	64,91	65,38					58,60
	SMALB	61,30	56,74					56,02
2024	SMA**	77,37	64,88	85,71	20,00	68,50	62,69	57,03
	SMK	73,01	61,57					55,45
	SDLB	71,58	71,27					62,75
	SMPLB	72,83	70,68					60,15

Capaian*	Jenjang	Skor Literasi	Skor Numerasi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum		Persentase Satpendik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum		Nilai Karakter
				Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	
	SMALB	72,42	68,36					59,88

Sumber: Kemendikdasmen, 2025

*) tahun capaian merupakan t-1 dari tahun rilis Rapor Pendidikan

**) merupakan nilai rata-rata dari SMA Umum dan SMA Keagamaan

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa. Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa yang mengukur kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai -nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas, nalar kritis kebhinekaan global, serta kemandirian. Penerimaan terhadap siswa dari kelompok rentan seperti kurang mampu secara ekonomi dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan nilai karakter siswa.

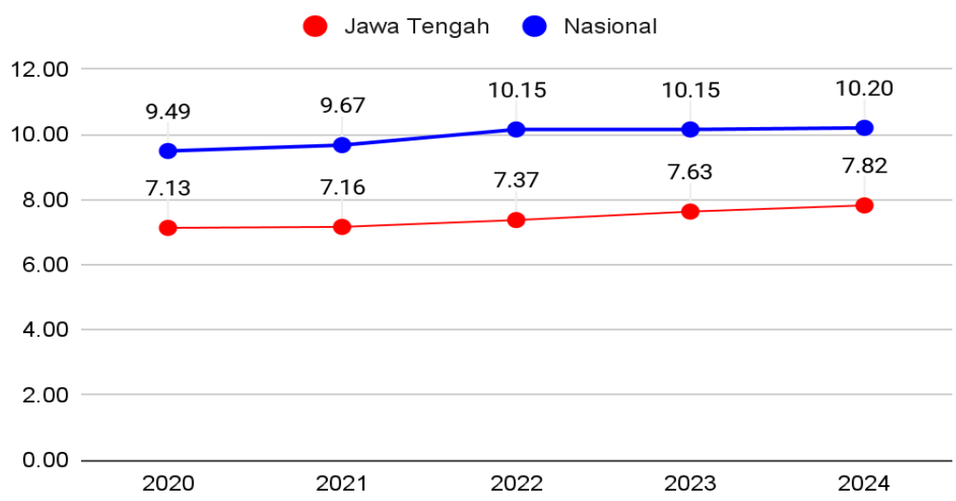

Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.52.
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024

Tantangan lain terkait pendidikan di Jawa Tengah adalah dominasi pendidikan tertinggi yang ditamatkan berada pada jenjang SD/MI (24,39 persen), sementara untuk pendidikan tinggi hanya di angka 7,82 persen. Capaian tersebut jauh di bawah angka Nasional yang dominasi berada pada jenjang SM/MA (30,85 persen) dan untuk jenjang pendidikan tinggi sebesar 10,20%.

2.4.8. Kesehatan

a. Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita

1) Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama

masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 2021-2024 dari 199 menjadi 74,73 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini hampir mencapai target RPJMN 2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, masih diperlukan upaya dalam percepatan penurunan AKI untuk mencapai target SGDs yaitu sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kondisi Kematian ibu dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami trend penurunan, hal ini dilakukan dengan upaya Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Kabupaten/ Kota dengan jumlah kasus kematian ibu tertinggi adalah Brebes sebanyak 54 kasus. Kabupaten/ Kota dengan kasus kematian ibu terendah adalah Kota Tegal dengan 1 kasus, diikuti Kota Magelang dan Kota Salatiga dengan 2 kasus. Sebesar 71,66 persen kematian maternal di Provinsi Jawa Tengah terjadi pada waktu nifas.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.53.
Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2020-2024

Angka Kematian Bayi (AKB) periode tahun 2020 hingga 2024 mengalami *trend* yang fluktuatif yaitu sebesar 4.189 kasus pada tahun 2020 menjadi sebesar 4.326 kasus pada tahun 2024. Secara absolut jumlah kasus kematian bayi masih tinggi. Faktor penyebab kematian bayi antara lain gangguan pernafasan dan jantung, kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan

yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Kasus kematian bayi di Jawa Tengah Tertinggi di Kabupaten Grobogan sebanyak 241 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 12 kasus.

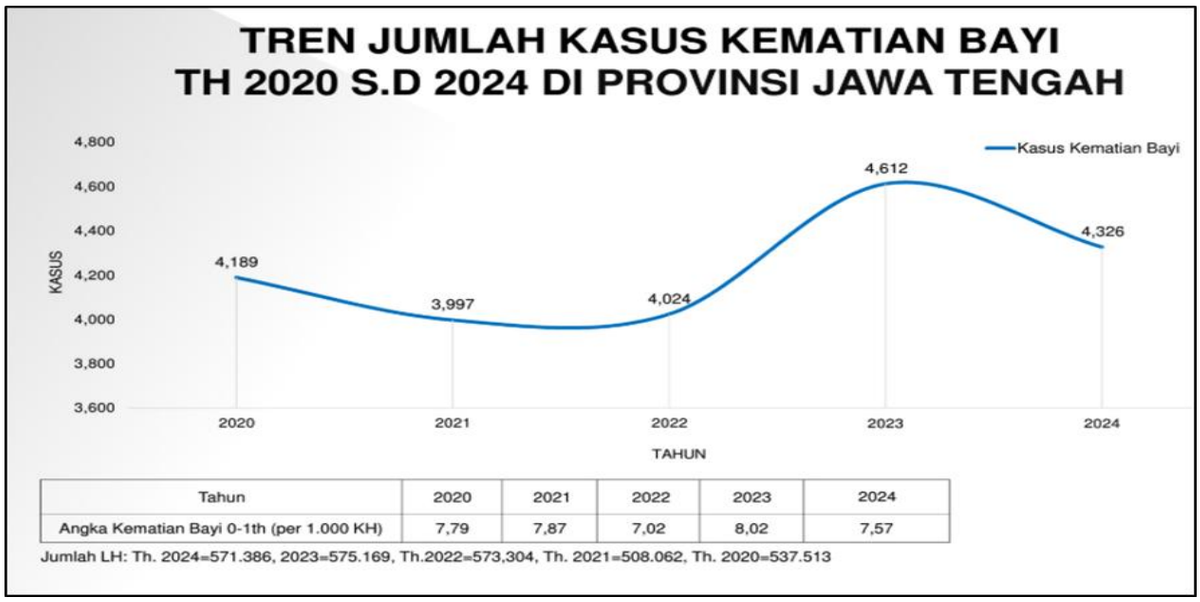

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.54.

Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2020-2024

Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah pada 2020 sampai dengan tahun 2024 sangat fluktuatif. Menunjukkan tren membaik dari 8.99 per 1.000 KH pada 2020 menjadi 8.57 per 1.000 KH pada 2024.Kasus Kematian Balita Tertinggi di Kabupaten Grobogan sebanyak 279 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 12 kasus. Beberapa penyebab kematian balita antara lain pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita. Masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita.

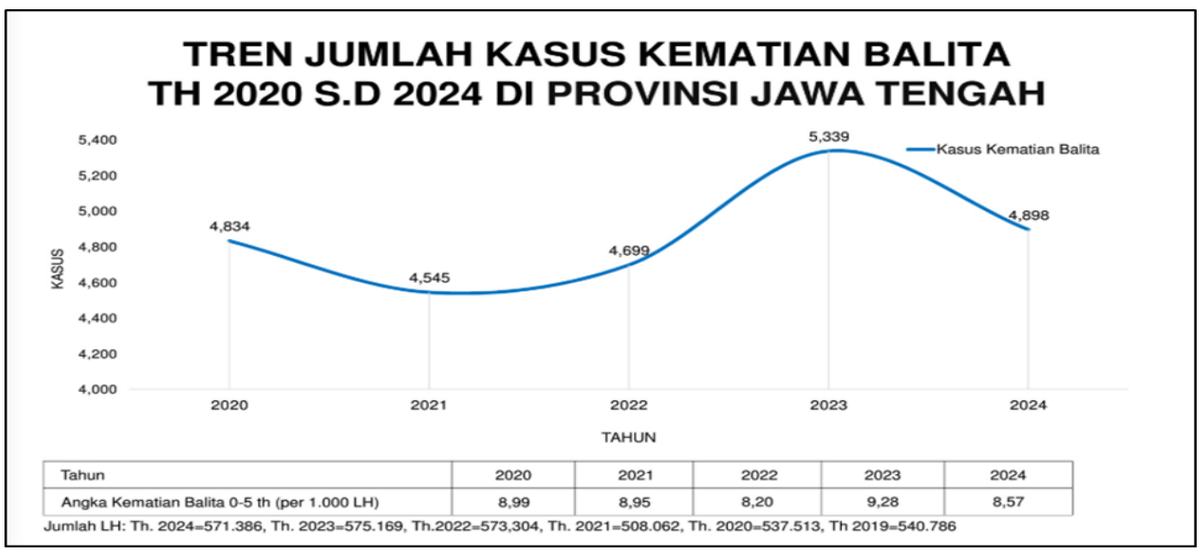

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.55.

Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2020-2024

2) Kasus gizi buruk

Kasus gizi buruk di Jawa Tengah mengindikasikan peningkatan pula dari 1.421 pada tahun 2020 menjadi 8.639 pada tahun 2024. Hal ini terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi gizi buruk yaitu: ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Kemiskinan salah satu determinan sosial-ekonomi, merupakan akar dari ketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan, dan tidak sehat serta ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan. Malnutrisi masih saja melatar belakangi penyakit dan kematian anak. Kurang kalori protein sesungguhnya berpeluang menyerap siapa saja, terutama bayi dan anak yang tengah tumbuh-kembang.

Gizi buruk cenderung menyerang setelah mereka berusia 12 bulan. Penilaian status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjamin setiap anggota masyarakat mendapatkan makanan yang cukup jumlah dan mutunya. Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari. Kecukupan zat gizi berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak. Kasus gizi buruk bukanlah jenis penyakit yang datang tiba-tiba begitu saja. Tetapi karena proses yang menahun terus bertumpuk dan menjadi kronik saat mencapai puncaknya. Masalah defisiensi gizi khususnya menjadi perhatian karena berbagai penelitian menunjukkan adanya efek jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak manusia.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.56.
Tren Kasus Balita Gizi Buruk (BB/TB) Tahun 2020 -2024

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu intake zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (stunting). Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (*underweight* dan *wasted*). Selain permasalahan kekurangan gizi, kelebihan gizi juga menimbulkan masalah karena menyebabkan anak menjadi obesitas. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa tren

permasalahan gizi di Jawa Tengah menunjukkan angka yang semakin membaik. Prevalensi balita *underweight* tahun 2021 sebesar 14 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi 17,6 persen namun pada tahun 2023 turun menjadi 14.4 persen, Balita *wasting* tahun 2021 sebesar 6,7 persen meningkat menjadi 7,1 persen pada 2023. Prevalensi balita *stunted* turun dari 20,9 persen pada 2021 menjadi 20,7 persen pada 2023. Berdasarkan standar WHO, suatu wilayah dikatakan baik jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi kronis apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan memiliki permasalahan gizi kronis dan akut apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Berdasarkan standar tersebut, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan permasalahan gizi kronis dan akut.

Percepatan penurunan stunting pada Balita merupakan program prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, dengan target prevalensi stunting turun hingga 14 persen. Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam mendukung upaya Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini dibuktikan dengan angka prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan terus menerus dari tahun 2021 sebesar 20,9 persen menjadi 17,1 persen di tahun 2024. Upaya untuk terus menurunkan prevalensi stunting di Jawa Tengah tahun 2026 ditargetkan turun menjadi 17 persen.

Tabel 2.82.

Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Stunting	Sumber
2020	-	Tidak dilakukan pengukuran karena pandemi
2021	20,9%	Survey Status Gizi Indonesia
2022	20,8%	Survey Status Gizi Indonesia
2023	20,7 %	Survey Kesehatan Indonesia
2024	17,1 %	Survey Status Gizi Indonesia

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024

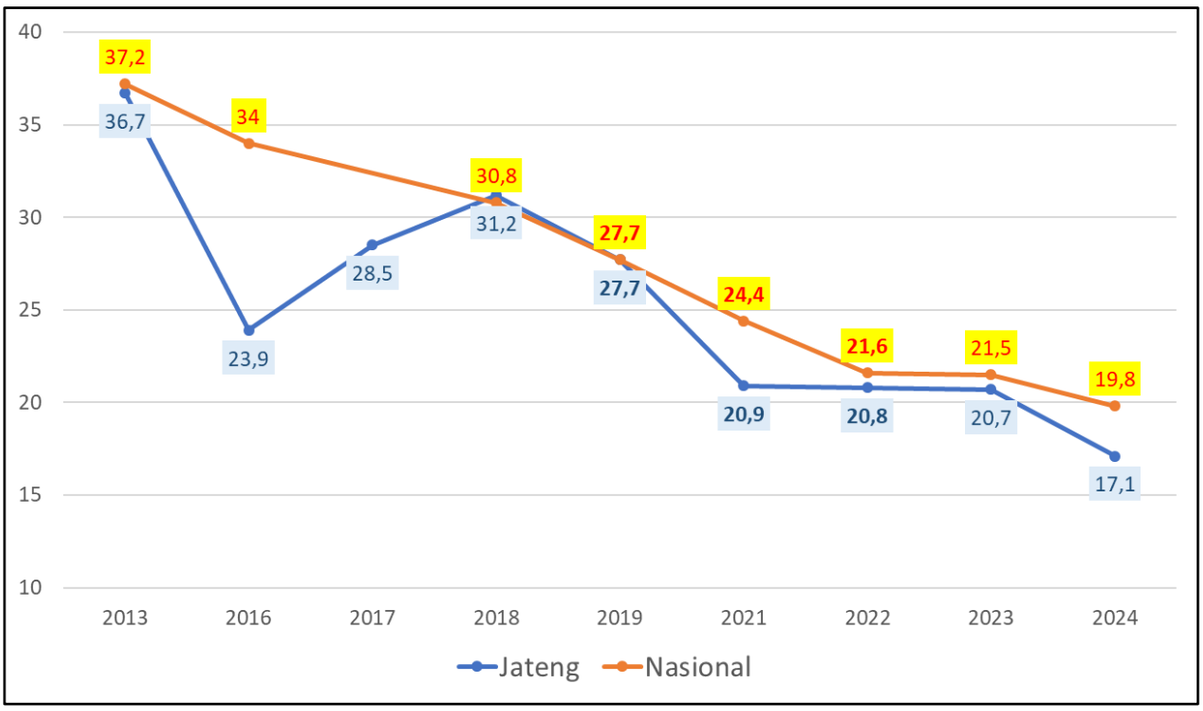

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024

Gambar 2.57.
Angka Prevalensi Stunting Berdasarkan SSGI Tahun 2024

Stunting disebabkan oleh berbagai faktor mulai kehamilan, usia kehamilan, status gizi ibu, berat badan lahir rendah, panjang lahir pendek. Risiko ini semakin tinggi bila terjadi infeksi berulang setelah lahir terutama diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Di tingkat keluarga, faktor sosial ekonomi dan pendidikan orang tua turut berperan penting. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah, pendapatan keluarga yang tidak mencukupi, dan kondisi sanitasi yang buruk berhubungan secara positif dengan kejadian stunting.

3) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Perubahan pola penyakit sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

a) Kondisi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Provinsi Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD (Incidence Rate/IR DBD) di Jawa Tengah mengalami kenaikan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 yaitu menjadi 48,07 per 100.000 penduduk setelah tahun sebelumnya di angka 17,73 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kesakitan DBD (CFR DBD) mengalami

penurunan yaitu dari 2,2 persen pada tahun 2023 menjadi 1,5 persen pada tahun 2024.

Angka Kesakitan Malaria (API) Pada Tahun 2024 tidak ditemukan Kasus *Indigenous* Malaria sehingga capaiannya dengan Tahun 2023 sebesar 0,02. Jumlah Kasus Malaria di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 723 kasus, dengan capaian tertinggi di Kota Salatiga dan Capaian Terendah di Kota Tegal.

Sementara itu, capaian penemuan kasus TB (TC) mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 118 persen menjadi 90 persen pada tahun 2024, dengan jumlah penemuan 87.706 kasus TB di Jawa Tengah. keberhasilan pengobatan TB (SR TB) mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 87 persen menjadi sebesar 86 persen di tahun 2024. Penemuan kasus TB semakin membaik seiring dengan dilakukannya deteksi dini oleh petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat serta peran Balai Kesehatan Masyarakat milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pada aspek non kesehatan, rumah yang tidak sehat, status gizi masyarakat dan perilaku tidak sehat menjadi pemicu dan pemberat kasus TB.

Pada penyakit HIV/AIDS perlu masih perlu diwaspadai secara serius, berdasarkan data Tahun 2024 mengalami peningkatan penemuan, tercatat kasus HIV AIDS dari 5.722 kasus di tahun 2023 menjadi 6.509 kasus di tahun 2024. Kasus HIV/AIDS perlu menjadi perhatian bersama dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Meskipun kinerja pelayanan HIV/AIDS semakin baik, hal ini dipengaruhi karena semakin efektifnya *pemanfaatan Voluntary Counseling Test* (VCT) di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Tabel 2.83.
Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	API Malaria (%)	TC (%)	SR TB (%)	Kasus ODHIV
2020	16,30	1,9	0,009	51	84,5	4.298
2021	12,80	2,71	0,024	53	83,5	3.543
2022	33,69	2,08	0.028	79	84,5	4.429
2023	17,73	2,2	0,02	118	87	5.722
2024	44,9	1,45	0,02	90	86	6.509

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

b) Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang

aktivitas fisik, dan merokok serta alkohol. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivitas penduduk karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, *diabetes mellitus*, dan kanker. Berdasarkan data 2024 menunjukkan bahwa jumlah penderita hipertensi mengalami kenaikan sebesar 5.632.593 kasus dibandingkan kasus Tahun 2023 sebesar 5.032.288 kasus. Begitu juga untuk penyakit kanker mengalami kenaikan dari Tahun 2023 sebesar 16.570 menjadi 21.019 di Tahun 2024. Namun untuk Hipertensi mengalami tren penurunan dari 670.252 kasus pada tahun 2023 menjadi 667.145 kasus di tahun 2024.

Tabel 2.84.
Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020–2024

Tahun	Jenis PTM		
	Diabetes Milletus	Hipertensi	Kanker
2020	582.559	2.543.732	12.702
2021	467.365	3.329.052	12.886
2022	613.524	4.695.927	17.292
2023	670.252	5.032.288	16.570
2024	667.145	5.632.593	21.019

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

b. Kepesertaan dan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) berkaitan dengan sebuah sistem yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan tersebut. UHC merupakan cakupan kepesertaan program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 98 persen dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN. Jumlah kabupaten/kota yang belum mencapai UHC minimal 98 persen sebanyak 6 kabupaten meliputi (Kabupaten Boyolali, Rembang, Tegal, Temanggung, Wonosobo).

Tabel 2.85.
Cakupan Kepesertaan Aktif UHC Tahun 2024

No.	Kota/Kabupaten	Penduduk Nasional	Jumlah Peserta	Pencapaian UHC	Peserta Aktif	Tingkat Keaktifan
1	KAB. BANJARNEGARA	1.068.347	1.061.352	99,35%	758.714	71,02%
2	KAB. BANYUMAS	1.864.665	1.834.437	98,38%	1.410.580	75,65%
3	KAB. BATANG	849.686	839.153	98,76%	636.113	74,86%
4	KAB. BLORA	925.434	908.618	98,18%	644.921	69,69%
5	KAB. BOYOLALI	1.110.346	1.072.288	96,57%	835.734	75,27%
6	KAB. BREBES	2.059.458	2.024.610	98,31%	1.521.768	73,89%
7	KAB. CILACAP	2.037.899	2.019.052	99,08%	1.328.243	65,18%
8	KAB. DEMAK	1.250.863	1.243.573	99,42%	988.652	79,04%
9	KAB. GROBOGAN	1.517.987	1.518.312	100,02%	984.248	64,84%
10	KAB. JEPARA	1.275.501	1.252.428	98,19%	801.007	62,80%
11	KAB. KARANGANYAR	952.132	943.422	99,09%	729.406	76,61%
12	KAB. KEBUMEN	1.441.425	1.428.889	99,13%	1.073.058	74,44%
13	KAB. KENDAL	1.093.046	1.082.110	99,00%	814.454	74,51%
14	KAB. KLATEN	1.300.142	1.285.231	98,85%	1.045.196	80,39%
15	KAB. KUDUS	874.796	866.760	99,08%	700.610	80,09%
16	KAB. MAGELANG	1.337.411	1.314.323	98,27%	931.589	69,66%
17	KAB. PATI	1.379.022	1.359.771	98,60%	968.484	70,23%
18	KAB. PEKALONGAN	1.026.546	1.031.595	100,49%	773.020	75,30%
19	KAB. PEMALANG	1.588.826	1.584.093	99,70%	1.177.807	74,13%
20	KAB. PURBALINGGA	1.053.565	1.052.030	99,85%	815.725	77,43%
21	KAB. PURWOREJO	809.121	795.710	98,34%	601.649	74,36%
22	KAB. REMBANG	662.787	647.702	97,72%	537.093	81,04%
23	KAB. SEMARANG	1.085.196	1.064.742	98,12%	852.563	78,56%
24	KAB. SRAGEN	1.021.435	1.011.679	99,04%	687.265	67,28%
25	KAB. SUKOHARJO	913.950	899.602	98,43%	702.800	76,90%
26	KAB. TEGAL	1.727.497	1.680.536	97,28%	1.100.893	63,73%
27	KAB. TEMANGGUNG	820.736	793.821	96,72%	592.494	72,19%
28	KAB. WONOGIRI	1.063.902	1.070.069	100,58%	750.737	70,56%
29	KAB. WONOSOBO	942.199	919.049	97,54%	758.714	71,02%
30	KOTA MAGELANG	128.591	129.410	100,64%	115.015	89,44%
31	KOTA PEKALONGAN	318.182	312.875	98,33%	238.896	75,08%
32	KOTA SALATIGA	198.372	197.768	99,70%	176.533	88,99%
33	KOTA SEMARANG	1.699.585	1.713.830	100,84%	1.398.037	82,26%
34	KOTA SURAKARTA	588.419	579.180	98,43%	507.540	86,25%
35	KOTA TEGAL	293.818	293.200	99,79%	234.638	79,86%
	JAWA TENGAH :	38.280.887	37.831.220	98,83%	28.194.196	73,42%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2.4.9. Kesejahteraan Sosial

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kondisi kesejahteraan sosial di Jawa Tengah selain masih dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan juga masih tingginya penduduk yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS). Berdasarkan perkembangan data PPKS lima tahun terakhir, PPKS di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang sedikit menurun bersamaan dengan semakin meningkatnya jumlah penanganan di dua tahun terakhir yaitu di tahun 2023 dan 2024. Selama tiga tahun berturut turut penanganan PPKS hanya sebesar 0,47 persen dari total populasi yang secara jumlah mengalami pasang surut. Sementara itu di tahun 2023 jumlah penanganan PPKS meningkat di angka 325.010 (8,03 persen) dikarenakan adanya tambahan komponen intervensi yaitu BLT DBHCHT dan BLT DID. Sementara itu di tahun 2024 komponen BLT DID sudah tidak ada lagi sehingga cakupan penanganan PPKS menurun menjadi sebesar 2,46 persen. Beberapa komponen penanganan PPKS selain BLT antara lain Program Kartu Jateng Sejahtera (KJS), pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dalam panti milik pemerintah subsidi permakanan panti swasta, bantuan KUBE dan penanganan korban bencana alam/sosial. Kondisi ini tentu masih jauh dari cukup untuk menangani PPKS di Jawa Tengah jika hanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi semata. Dibutuhkan peran

semua pihak baik pemerintah kabupaten/kota, swasta maupun lembaga sosial lainnya dalam penanganan PPKS sesuai peran dan fungsinya masing-masing agar cakupan penanganan PPKS dapat meningkat.

Tabel 2.86.
Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Populasi PPKS (Orang)	Jumlah Penanganan (Orang)	Persentase
1	2020	4.056.054	19.214	0,47
2	2021	4.654.151	19.214	0,47
3	2022	4.579.790	19.214	0,47
4	2023	4.112.263	325.010	8,03
5	2024	4.007.316	112.474	2,46

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2023.

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sementara itu, peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diharapkan dapat menjadi faktor dominan dalam penyelenggaraan sosial termasuk membantu para PPKS untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya belum dapat diharapkan sepenuhnya. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan pada PSKS dalam menjalankan perannya yaitu terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM PSKS, termasuk tingkat kesejahteraan SDM PSKS yang masih rendah sehingga berpengaruh pada komitmen dalam penyelenggaraan sosial maupun pengkaderisasian SDM PSKS. Data perkembangan jumlah PSKS menunjukkan bahwa jumlah PSKS makin menurun sejak tahun 2020 sebesar 32.165 PSKS menjadi 24.669 PSKS pada tahun 2024.

Tabel 2.87.
Kondisi PSKS Tahun 2020-2024

No	Jenis	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Karang Taruna (KT)	8.562	8.562	8.562	4.712	4.712
2	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	866	866	866	866	867
3	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	12.540	11.440	11.440	11.377	11.377
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	576	576	576	576	576
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	38	38	37	38	38
6	Dunia Usaha	63	63	56	58	58
7	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	1.123	1.123	1.019	1.345	1.344
8	Family Care Unit (FCU)	2	2	1	11	11
9	Sakti Peksos	63	63	69	Mulai 2023 sdh tidak ada sakti peksos berubah menjadi	-

No	Jenis	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
					pendamping resos yang merupakan gabungan pekos anak, pendamping disabilitas, pendamping LU dan konselor Napsa / peksos adiksi	
10	Pekerja Sosial Profesional (PSP)/Fungsional	117	117	123	136	126
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	38	38	38	228	38
12	Penyuluh Sosial Fungsional	25	25	46	36	36
13	Penyuluh Sosial Masyarakat	77	77	77	2.023	126
14	PPNS	3	3	3	1	1
15	Pelopor Perdamaian	230	230	245	230	225
16	SDM PKH	5.495	5.495	5026	5097	4.992
17	SLRT	21	21	21	31	35
18	Puskesos	306	385	405	116	116
	Total	**32.165**	**31.145**	**30.632**	**26.870**	**24.669**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025.

c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan SPM Sosial mendasarkan pada capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa layanan terhadap rehabilitasi sosial dalam panti untuk anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta dan layanan penanganan saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana telah mencapai 100 persen. Namun demikian, capaian 100 persen belum menunjukkan *coverage* seluruh kebutuhan penanganan di Jawa Tengah dan masih sebatas sasaran yang ditangani saja. Kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya kapasitas sarpras, pendanaan dan SDM panti. Berikut tabel capaian pelaksanaan SPM Sosial Tahun 2023.

Tabel 2.88.

Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Penerima layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	4.275 Orang	4.275 Orang	100	21.258.122.000	20.930.788.722	98,46
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di dalam panti	2.898 Orang	2.898 Orang	100	16.603.623.000	16.467.216.840	99,18
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia Terlantar di dalam panti	1.955 Orang	1.955 Orang	100	15.735.623.000	15.596.432.000	99,12
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan & pengemis di Dalam panti	1.110 Orang	1.110 Orang	100	6.299.674.000	6.166.769.000	97,89
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	10.450 Orang	10.450 Orang	100	2.989.918.000	2.976.232.900	99,54
	Jumlah	20.688 Orang	20.688 Orang	100	62.886.960.000	62.137.439.462	99,54

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

d. Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Urusan sosial mempunyai peranan besar dalam memberikan pelayanan umum khususnya terkait dengan layanan pemenuhan kesejahteraan sosial. Beberapa layanan yang tersedia dan menjadi kewenangan provinsi antara lain layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS terlantar di dalam panti, dan layanan SLRT/Puskessos.

(1) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Panti

Layanan PPKS dalam Panti menghadapi beberapa tantangan antara lain kondisi sarpras panti, kapasitas dan kuantitas SDM panti serta pemenuhan layanan panti yang terbatas. Kondisi sarpras panti mengalami perkembangan yang terus memburuk secara fisik jika dilihat dari kondisi bangunan. Tercatat bangunan rusak berat tahun 2024 sebanyak 55 unit meningkat dibanding tahun 2023 yang sebanyak 50 unit. Demikian juga dengan rusak ringan yang makin bertambah dari 133 di tahun 2023 menjadi 146 di tahun 2024. Kondisi bangunan ini tentu menjadi tantangan ke depan di tengah upaya penanganan PPKS yang makin berkualitas guna melahirkan purna bina para penghuni panti.

Tabel 2.89.

Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Tahun	Panti/ Rumpel	Jumlah Unit Bangunan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
1	2020	54	789	570	105	70	44
2	2021	54	789	548	110	73	58
3	2022	54	790	548	111	73	58
4	2023	54	n/a	597	133	-	50
5	2024	56	803	590	146	12	55

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Dari sisi SDM Panti, beberapa kebutuhan tenaga layanan yang ada saat ini masih jauh dari kebutuhan untuk memberikan layanan di 56 panti/rumah pelayanan sosial. Beberapa pos SDM yang dibutuhkan antara lain pekerja sosial terampil dari kebutuhan 57 orang baru tersedia 27 orang, pekerja sosial ahli dari kebutuhan 426 orang baru tersedia 107, penyuluh sosial ahli dari 104 kebutuhan baru tersedia 36 orang, perawat dari 68 orang hanya tersedia 4 orang.

Tabel 2.90.

Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

PEKSOS TERAMPIL		PEKSOS AHLI		PENYSOS AHLI		PERAWAT		DOKTER	
Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan
27	57	107	426	36	104	4	68	1	1

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kondisi terbatasnya panti milik provinsi baik menyangkut kapasitas maupun SDM sehingga dalam penanganan PPKS kurang optimal, maka penting untuk mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan PPKS. Sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan rumah singgah yang berfungsi untuk melakukan penanganan PPKS yang sifatnya sementara dan melakukan *assessment* terhadap PPKS hasil penjaringan. Sampai dengan tahun 2023 tercatat baru 27 kabupaten/kota yang telah memiliki rumah singgah baik dibiayai APBD masing-masing maupun bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Tersisa delapan kabupaten/kota yang belum memiliki rumah singgah yaitu Cilacap, Banjarnegara, Pemalang, Wonosobo, Sukoharjo. Kab. Semarang, Kudus, dan Kota Magelang.

(2) Layanan Puskessos-SLRT

Puskessos-SLRT sebagai lembaga dan sistem layanan untuk membantu dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (berupa mengidentifikasi kebutuhan, menangani aduan dan sebagai rujukan masyarakat miskin/rentan miskin) masih dihadapkan pada tantangan pada konsistensi/ keaktifan layanan dikarenakan terbatasnya kapasitas SDM pengelola dan kurangnya kemitraan dengan pemangku kepentingan termasuk dunia usaha. Selain itu juga masih terbatasnya

Puskessos-SLRT yang belum merata terbentuk di semua desa/kelurahan. Kondisi sampai dengan tahun 2024, tercatat total Puskessos–SLRT tingkat desa/kelurahan telah terbentuk sebanyak 2.393, meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 1.166 puskesos-SLRT.

Tabel 2.91.

Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan 2023-2024

Sumber Dana	Pembentukan Puskessos-SLRT Desa/Kelurahan TA 2024	Pembentukan Puskessos-SLRT Desa/Kelurahan TA 2024
APBN	64	64
APBD Prov	122	122
APBD Kab/Kota	500	1.348
APBD Desa	480	859
Total	1.166	2.393

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025

e. Pemberian Bantuan Sosial dan Ekonomi

Upaya penanganan kemiskinan melalui bantuan kepada masyarakat non produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah dilaksanakan tiap tahunnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan termasuk penurunan angka kemiskinan ekstrim. Tahun 2024 telah tersalurkan bantuan KJS senilai Rp 370.000 per orang per bulan yang mencakup total sasaran sebanyak 12.764 penerima manfaat. Sementara itu untuk bantuan pengembangan produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2024 telah tersalurkan bantuan stimulus modal sebesar Rp20.000.000 per KUBE (20 orang anggota) sebanyak 1000 KUBE. Tantangan dari pelaksanaan KUBE adalah keberlanjutan usaha dan replikasi ke kelompok lainnya yang perlu untuk terus ditingkatkan sehingga melalui KUBE diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memandirikan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

2.4.10. Tenaga kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Agustus 2024 sebesar 4,78 persen turun sebesar 0,35 persen poin dari kondisi TPT pada Agustus 2023 yang sebesar 5,13 persen. Di tingkat nasional TPT Agustus 2024 lebih besar dari Jawa Tengah yaitu sebesar 4,91 persen turun sebesar 0,41 persen poin dibandingkan dengan TPT Nasional bulan Agustus 2023.

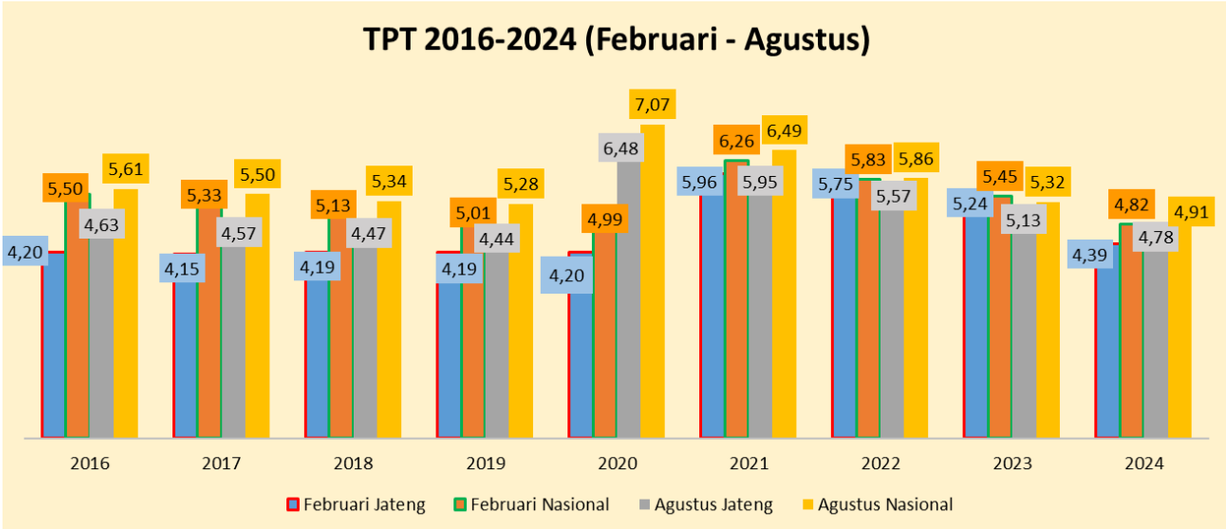

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.58.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2024 (Februari-Agustus) (%)

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 menunjukkan perbaikan. Terdapat 22 Kabupaten/Kota dengan capaian TPT di bawah capaian provinsi dan terdapat 12 Kabupaten/Kota dengan capaian TPT di atas Jawa Tengah atau lebih rendah. Dari 35 Kab/kota di Jawa Tengah terdapat 9 Kab/Kota yang mengalami kenaikan TPT di tahun 2024 yaitu Kab Pemalang, Kota Surakarta, Kab Blora, Kab Sukoharjo, Kab Pekalongan, Kab Rembang, Kab Wonogiri, dan Kab Temanggung.

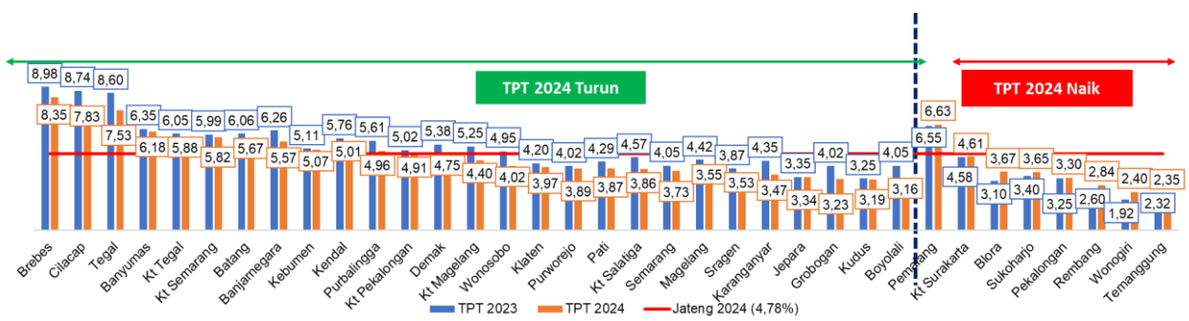

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.59.
Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Salah satu imbas dari persoalan kependudukan dan dihadapi hampir di semua wilayah adalah pengangguran. Bahkan di negara maju pun pengangguran masih menjadi masalah serius. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut rendah. Tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai menambah beban persoalan yang ada. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah tahun 2024 menurut BPS, diperlihatkan pada gambar di bawah ini.

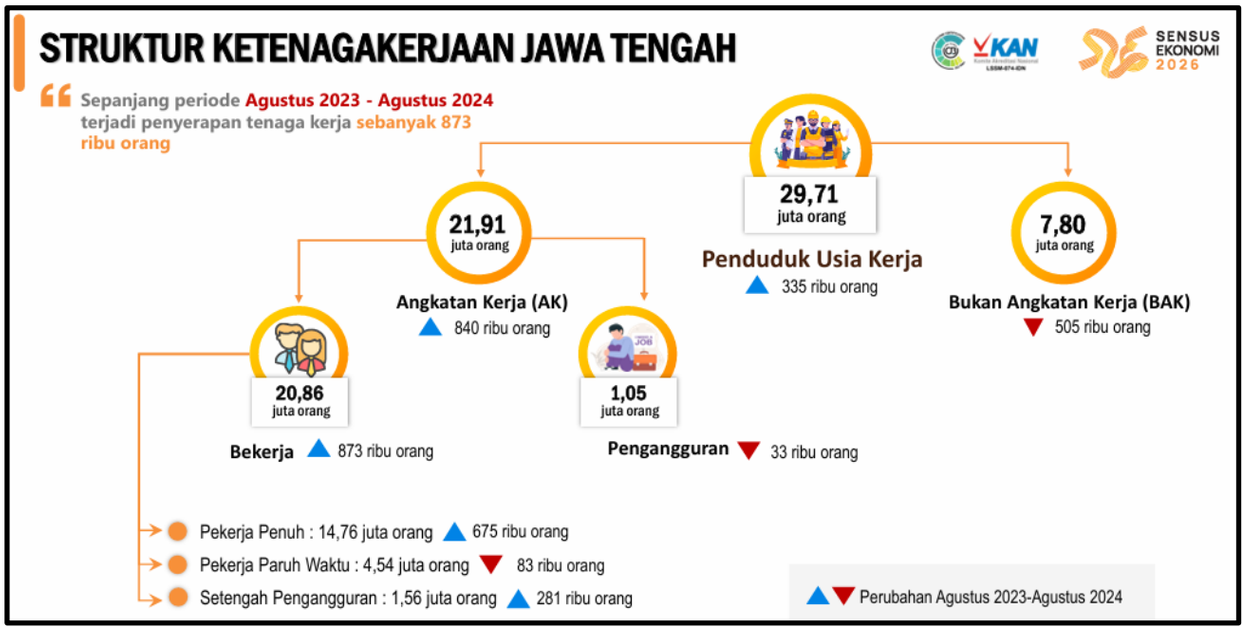

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.60.
Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2024

Dari 37,54 juta jiwa penduduk Jawa tengah, 29,71 juta jiwa merupakan penduduk usia kerja dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 21,91 juta orang. Dimana sebanyak 20,86 juta orang bekerja dan 1,05 juta orang pengangguran. Meskipun jumlah bekerja lebih banyak dibandingkan pengangguran, namun secara kualitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah sebesar 41,51 persen merupakan lulusan SD ke bawah, dan 20,28 persen merupakan lulusan SMP. Hal ini menandakan bahwa kualitas tenaga kerja Jawa Tengah masih rendah/*low skill*.

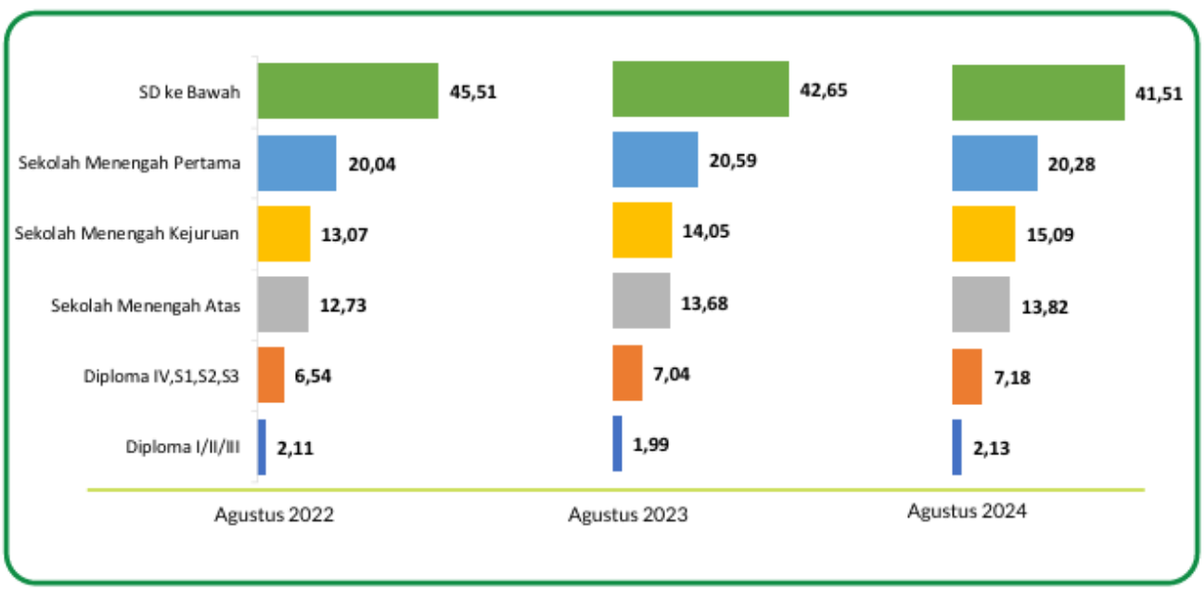

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.61.
Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022-2024

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2024 TPT tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 9,52 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 9,89. Meskipun mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya, kondisi ini tetap menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat filosofi adanya SMK agar para lulusan kejuruan sudah siap kerja atau bahkan sudah di rekrut oleh dunia usaha atau industri sebelum lulus. Namun dalam kondisi riil nya masih ada kesenjangan antara keterampilan lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Jika dilihat secara keseluruhan, TPT untuk semua lulusan mengalami penurunan baik itu lulusan SD, SMP, SMA, SMK, Diploma maupun Universitas.

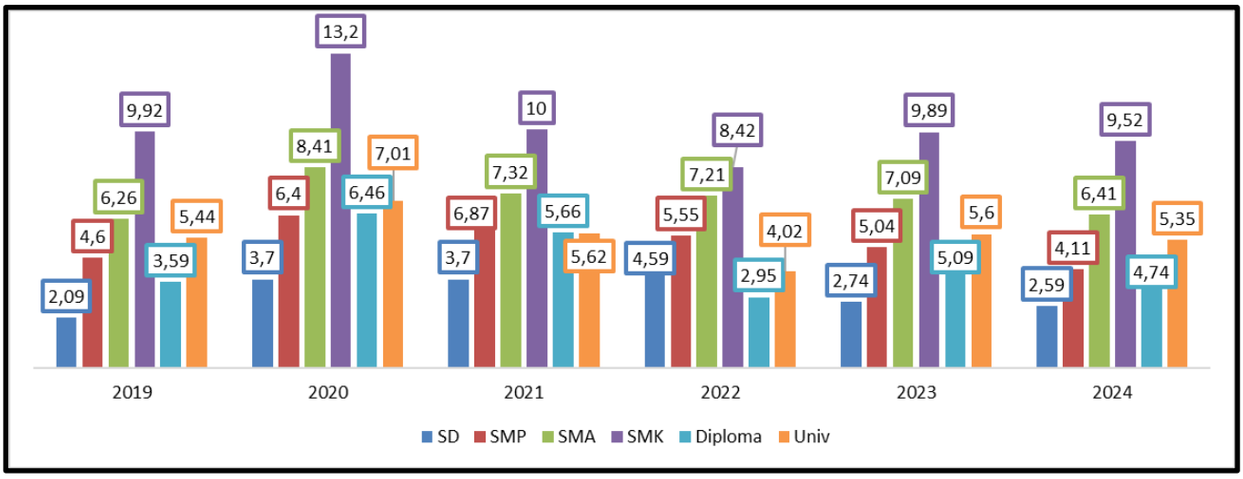

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.62.
TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%)

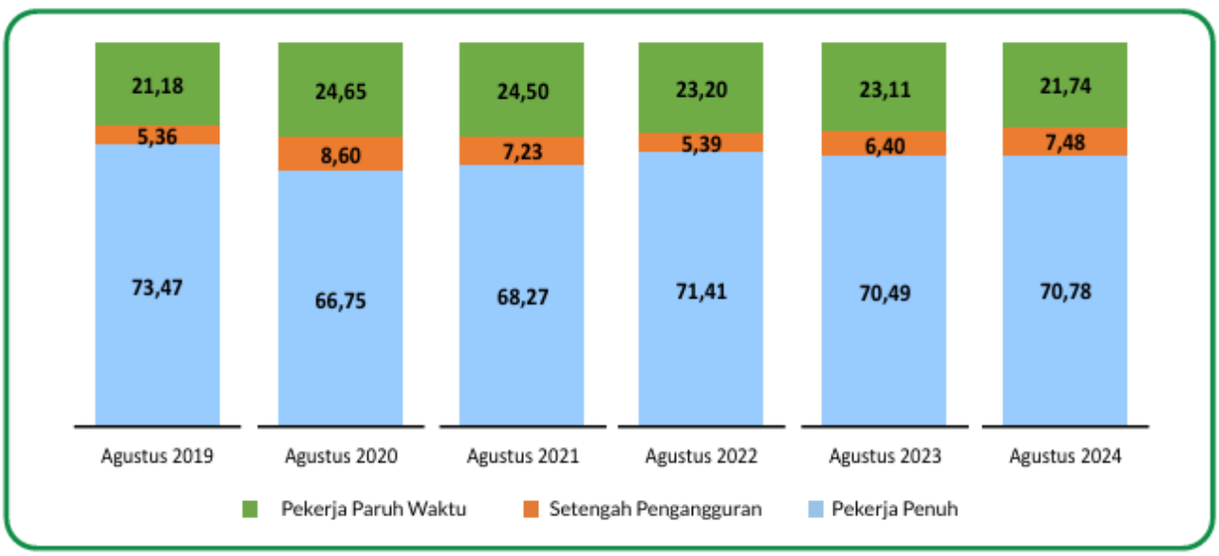

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.63.
Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 (%)

Pada tahun 2024 sebanyak 70,78 persen penduduk bekerja Jawa Tengah merupakan pekerja penuh waktu, sementara sebanyak 29,22 persen penduduk bekerja tidak penuh waktu (Jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) dimana

terbagi menjadi 21,74 persen merupakan pekerja paruh waktu (Bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak mencari pekerjaan lain) dan 7,48 persen merupakan setengah pengangguran (Bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan sedang mencari pekerjaan lain). Dibandingkan dengan tahun 2023, pekerja setengah pengangguran mengalami kenaikan dari 6,40 persen menjadi 7,48 persen atau naik sebesar 281 ribu orang. Sementara pekerja paruh waktu mengalami penurunan dari 23,11 persen menjadi 21,74 persen. Mengalami penurunan 1,37 persen poin atau turun 83 ribu orang.

Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 55,46 juta rupiah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 55,16 juta rupiah. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kualitas sumber daya manusia, kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang sangat pesat, dukungan upah dan insentif pekerja, dan lain sebagainya.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat penting karena menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Jika produktivitas suatu sektor tinggi akan diikuti oleh pendapatan pekerja yang semakin tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi berdampak pada perekonomian suatu daerah karena nilai tambahnya semakin tinggi.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 421,13 juta rupiah, kemudian disusul oleh Provinsi Banten yang sebesar 91,71 juta rupiah, dan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 82,86 juta rupiah. Sementara Provinsi Jawa Tengah menempati posisi terendah setelah Provinsi DIY yang sebesar 57,08 juta rupiah.

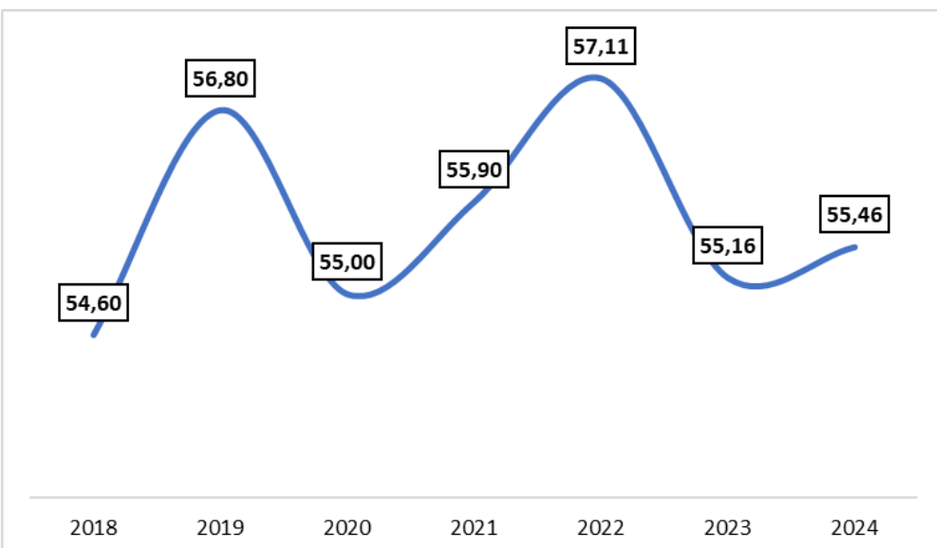

Sumber: *BPS Jawa Tengah, 2025*

Gambar 2.64.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018-2024(Juta Rupiah)

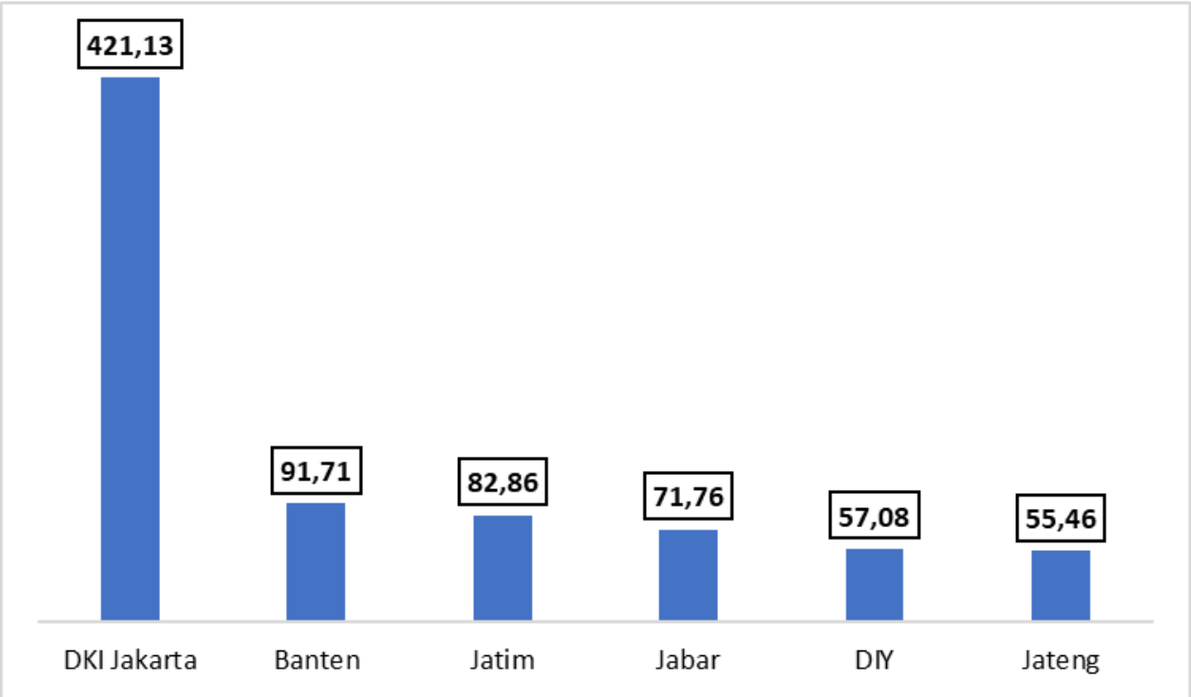

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.65.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah)

Rasio kesempatan kerja pada tahun 2024 sebesar 70,21 persen naik 2,17 persen poin dibanding dengan tahun 2023 yang sebesar 68,04 persen. Rasio kesempatan kerja yang naik ini menandakan bahwa peluang penduduk usia kerja untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti kondisi perekonomian yang semakin tumbuh hingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, investasi yang meningkat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Adanya peningkatan kesempatan kerja merupakan suatu indikator yang positif bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan karena menunjukkan semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan dibanding dengan sebelumnya.

Tabel 2.92.
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1.	2019	17.440.000	26.610.000	69,22
2.	2020	17.540.000	27.010.000	64,93
3.	2021	17.835.770	27.253.914	65,45
4.	2022	18.390.459	27.490.000	66,90
5.	2023	19.990.000	29.380.000	68,04
6.	2024	20.860.000	29.710.000	70,21

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.

Tabel 2.93.

Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Penduduk Usia Kerja (orang)	Angkatan Kerja*)	TPAK (%)
1.	2019	26.610.000	18.421.193	68,85
2.	2020	27.010.000	18.751.277	69,43
3.	2021	27.250.000	18.963.993	69,58
4.	2022	27.490.000	19.474.934	70,84
5.	2023	29.380.000	21.070.000	71,72
6.	2024	29.710.000	21.910.000	73,74

Sumber: BPS 2024 diolah dari Sakernas.
*Keterangan : *) data per Agustus tahun bersangkutan.*

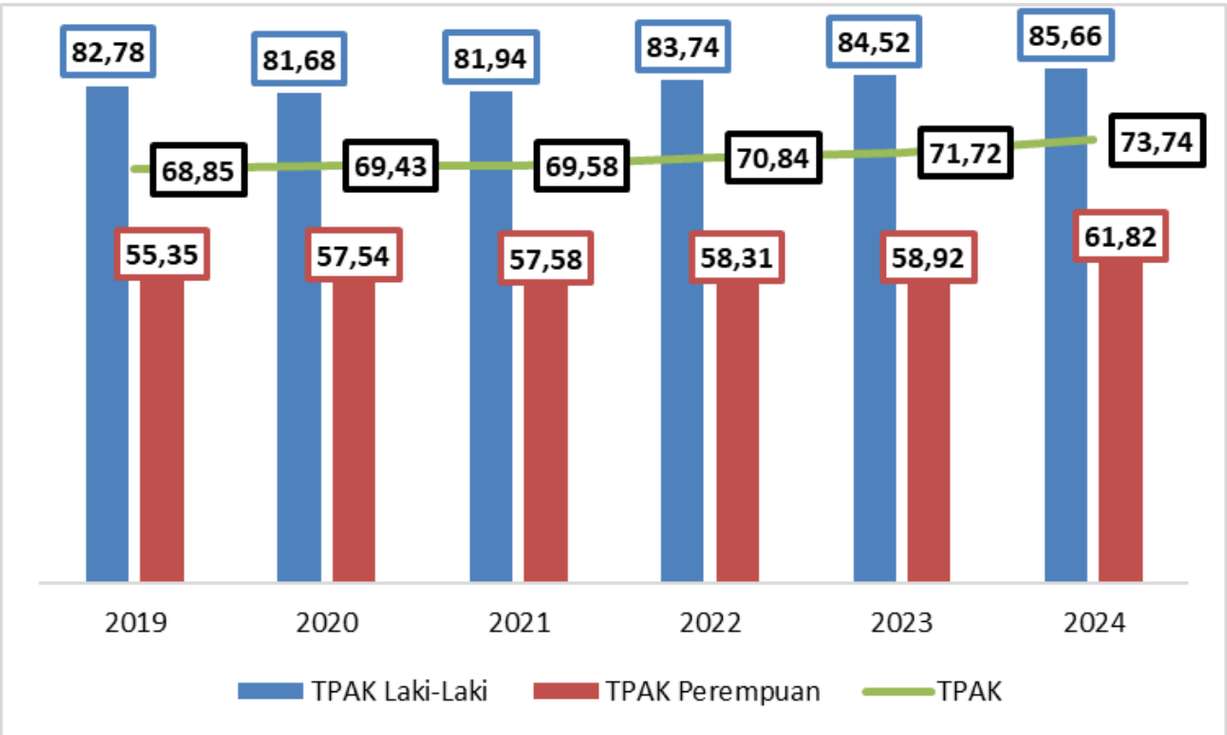

Sumber: BPS 2024 diolah dari Sakernas.
*Keterangan : *) data per Agustus tahun bersangkutan*

Gambar 2.66.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024 (%)

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki lebih tinggi dibanding dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Pada tahun 2024 TPAK Laki-laki sebesar 85,66 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yang sebesar 84,52 persen. TPAK Perempuan juga mengalami kenaikan dari 58,92 persen di tahun 2023 menjadi 61,82 persen di tahun 2024. Jika dilihat dari tahun 2019-2024, TPAK Laki-Laki selalu lebih tinggi dibanding dengan TPAK Perempuan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang dianggap sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, sementara budaya yang berkembang di masyarakat, perempuan dianggap memiliki kewajiban mengurus rumah tangga

dan anak. Namun persepsi ini semakin lama terlihat semakin menunjukkan perubahan, hal ini dilihat dari tren dari TPAK Perempuan dari tahun 2019-2024 yang selalu mengalami kenaikan, ini menandakan bahwa semakin banyak perempuan yang masuk dalam dunia kerja, dan ini bisa menjadi indikator yang positif karena semakin terlihat adanya kesetaraan gender. TPAK Perempuan yang meningkat disebabkan berbagai faktor seperti peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, perubahan normal sosial atau budaya yang berkembang di masyarakat, peningkatan kesempatan kerja terutama bagi perempuan, dan lain sebagainya.

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019-2024 cenderung meningkat. Namun di tahun 2020 kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 sebesar 70,27 persen menjadi 37,07 persen di tahun 2020. Kondisi ini merupakan salah satu dampak terjadinya pandemi Covid-19 dimana perekonomian terpuruk akibat pandemi. Namun di tahun 2021 mulai kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah, hingga pada tahun 2024 persentase pencari kerja yang ditempatkan naik menjadi 71,30 persen. Untuk itu ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

Tabel 2.94.
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%)

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2019	300.098	210.889	70,27
2020	220.763	81.835	37,07
2021	269.810	136.611	50,63
2022	322.041	227.088	70,52
2023	332.644	236.491	71,09
2024	315.458	224.930	71,30

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel 2.95.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek
1	2019	69.866	1.781.754
2	2020	76.196	1.908.465
3	2021	83.511	2.003.518
4	2022	89.016	3.196.431
5	2023	103.666	2.318.493
6	2024	104.911	3.315.253

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2018-2024. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2022, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya. Sementara itu pada tahun 2024 jumlah tenaga kerja non formal yang terdaftar program Jamsostek mengalami penurunan dari sebelumnya 1.441.492 orang di tahun 2023 menjadi 845.619 orang.

Tabel 2.96.
Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek
1	2019	1.378.435
2	2020	892.866
3	2021	310.785
4	2022	1.192.763
5	2023	1.441.492
6	2024	845.619

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2019-2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 124 kasus yang 100 persen terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya jumlah kasus menurun dan kasus tersebut meningkat pada tahun 2022 dan 2023 namun juga kasus tersebut dapat diselesaikan 100 persen sejalan dengan meningkatnya pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Di tahun 2024, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 82 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan.

Tabel 2.97.
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2019	124	100% terselesaikan
2	2020	96	100% terselesaikan
3	2021	35	100% terselesaikan
4	2022	66	100% terselesaikan
5	2023	124	100% terselesaikan
6	2024	82	100% terselesaikan

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Not in Employment, Education or Training (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan (sekolah), dan tidak dalam pelatihan. Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.097.209 orang. Namun pada tahun 2022 jumlah NEET mengalami peningkatan menjadi 1.101.412 orang. Namun NEET menurun kembali di tahun 2024 menjadi 1.009.075 orang atau 17,94 persen. Meskipun demikian, hal ini menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat banyak orang yang mempunyai ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga.

Tabel 2.98.

Jumlah *Not in Employment, Education or Training (NEET)* di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Jumlah *NEET* (orang)	Penduduk Usia Kerja Muda	Persentase
1	2019	1.205.564	5.524.810 orang	21,82
2	2020	1.298.297	5.407.899 orang	24,00
3	2021	1.097.209	5.388.228 orang	20,36
4	2022	1.101.412	5.388.513 orang	20,44
5	2023	1.185.589	5.648.751 orang	20,98
6	2024	1.009.075	5.627.036 orang	17,94

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2019-2024 mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel 2.99.

Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019 - 2024

No	Tahun	Jumlah *Peraturan Perusahaan (PP)*	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1	2019	3.967	579
2	2020	4.230	614
3	2021	4.540	661
4	2022	4.641	661
5	2023	4.6481	662
6	2024	NA	NA

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2.4.11. Perlindungan Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak merupakan satu dari kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian serius khususnya perlindungan dari kekerasan maupun perlakuan tidak adil lainnya. Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi senyap alias tidak terlapor sedangkan yang terlapor masih relatif rendah. Adanya budaya malu dan takut melapor masih menjadi kendala dalam mengungkap keseluruhan kasus kekerasan di masyarakat, sehingga perlu upaya masif untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkatkan keberanian masyarakat melapor baik saat mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kasus kekerasan. Namun disisi lain juga perlu dilakukan langkah langkah preventif (pencegahan) maupun kuratif (penanganan) dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait dengan pencegahan kekerasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya dengan membuat program-program yang sekiranya mampu berdampak pada penurunan kasus kekerasan antara lain program "Ayo Rukun" di sekolah, "Ngopi Penak" (Ngobrol Topik Perempuan dan Anak), "Jogo Konco", "Serat Kartini" (Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini), sedangkan untuk penanganan telah terbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Ke depan tentu program maupun layanan yang ada tersebut perlu untuk terus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi bagi tercapainya kondisi perempuan dan anak yang terlindungi.

Sementara itu, berdasarkan data perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang membaik, tercatat rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari sebesar 8,49 di tahun 2020 menjadi 7,99 di tahun 2024, namun angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yang sebesar 7,44. Kenaikan rasio kasus kekerasan di tahun 2024 nampaknya membawa dampak yang signifikan pada angka rasio korban kekerasan perempuan dan anak, dimana tahun 2024 tercatat 8,42, naik dibanding tahun 2023 yang sebesar 8,02, meskipun angka tahun 2024 tersebut masih lebih baik dibanding tahun 2020 yang sebesar 8,99. Namun setidaknya ini menjadi *signal warning* bagi upaya pencegahan tindak kekerasan yang ternyata masih belum ada tanda-tanda keberhasilannya dalam penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun disisi lain meningkatnya data kekerasan juga dapat dimaknai atau menandakan bahwa masyarakat mulai mengalami peningkatan dalam memberanikan diri untuk melapor. Sementara itu, khusus rasio korban kekerasan terhadap perempuan mengalami perbaikan di tahun 2024 yaitu di angka 4,38 menurun dibanding tahun 2023 yang sebesar 4,64 maupun tahun 2020 yang sebesar 5,75. Sedangkan rasio korban kekerasan terhadap anak perlu perhatian di tahun 2024 yaitu sebesar 11,15 yang naik dari tahun 2023 (9,86), meskipun masih dibawah angka tahun 2020 yang sebesar 12,15.

Tabel 2.100.

Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Rasio Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk)
2020	8,49	8,99	5,75	12,15
2021	8,35	8,97	5,11	11,02
2022	7,47	8,10	4,38	10,33
2023	7,44	8,02	4,64	9,86
2024	7,99	8,42	4,38	11,15

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/AplikasiSimfoni-PPA 2024.

Sementara itu, upaya pemenuhan hak anak secara umum telah mencapai tahap yang cukup menggembirakan jika dilihat dari capaian program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), meskipun berbagai persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak masih menjadi tantangan untuk dipecahkan. Jawa Tengah secara berturut turut sejak tahun 2021 memperoleh penghargaan kategori tertinggi KLA sebagai pelopor Provinsi Layak Anak. Tentu dengan raihan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan sebanding dengan makin meningkatnya upaya pemenuhan hak anak dan semakin membaiknya berbagai persoalan yang melingkupi anak seperti kekerasan terhadap anak, putus sekolah, stunting dan lain sebagainya. Pada tataran kabupaten/kota sampai dengan tahun 2023 secara bervariasi sesuai tingkatkan penghargaan tercatat sudah 100 persen kabupaten/kota memperoleh penghargaan KLA (kategori pratama, madya, nindya dan utama). Tercatat di tahun 2023 ada peningkatan jumlah Kab/Kota yang memperoleh penghargaan kategori Utama yaitu yang sebelumnya hanya Kota Surakarta menjadi bertambah Kota Semarang dan Kabupaten Sragen. Demikian juga dengan jumlah kab/kota yang memperoleh penghargaan madya dan nindya yang mengalami peningkatan. Rincian capaian KLA Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.101.

Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2023

Pratama	Madya	Nindya	Utama
Kab. Purworejo, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kabupaten Banyumas	Kab. Grobogan, Kab. Wonosobo, Kab. Temanggung, Kab. Pekalongan, Kab. Kebumen, Kota Salatiga, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Batang, Kab. Demak, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Pati, Kab. Blora	Kabupaten Magelang, Kab. Rembang, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kab. Tegal, Kota Magelang, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Pemalang	Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Sragen

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Dari sisi jenis kekerasan yang dialami, kekerasan fisik masih dominan yang dialami oleh perempuan yaitu 443 kasus di tahun 2024, menurun dibanding tahun 2023, kemudian disusul kekerasan psikis yang sebesar 334 kasus dan kekerasan seksual 171 kasus. Sementara itu pada anak dan ini sangat memprihatinkan, jenis kekerasan paling banyak yang dialami oleh anak adalah kekerasan seksual sebesar 793 kasus bahkan angkanya naik dibanding tahun 2023 yang sebesar 755 kasus. Kemudian disusul psikis sebesar 378 di tahun 2024 yang juga naik dibanding tahun 2023 (303 kasus) dan fisik sebesar 266 kasus di tahun 2024, naik dibanding tahun 2023 (217 kasus).

Tabel 2.102.

Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jenis kekerasan yang dialami korban perempuan dewasa:					
Fisik	484	539	495	481	508
psikis	297	372	405	373	383
seksual	126	145	186	212	195
penelantaran	119	135	117	117	84
trafficking	5	10	2	8	7
eksploitasi	0	7	9	8	1
lainnya	26	47	60	49	39
Total	**1.057**	**1.255**	**1.274**	**1.248**	**1.178**
Jenis kekerasan yang dialami korban anak:					
Fisik	205	204	193	217	263
psikis	296	327	361	303	363
seksual	789	807	748	755	723
penelantaran	58	66	84	107	95
trafficking	8	16	7	4	1
eksploitasi	15	9	30	18	14
lainnya	56	72	72	133	80
Total	**1.427**	**1.501**	**1.495**	**1.537**	**1.539**

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/AplikasiSimfoni-PPA 2023.

Isu lain terkait anak adalah mengenai perkawinan anak, data tahun 2024 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Jawa Tengah sebanyak 7.903 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Grobogan (574 kasus) dan terendah di Kota Salatiga (15 kasus). Data tersebut menurun dibanding tahun 2023 yang sebesar 10.531 kasus.

Tabel 2.103.
Data Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kabupaten Cilacap	94	438	532
2	Kabupaten Banyumas	100	299	399
3	Kabupaten Purbalingga	62	264	326
4	Kabupaten Banjarnegara	42	370	412
5	Kabupaten Kebumen	31	149	180
6	Kabupaten Purworejo	27	131	158
7	Kabupaten Wonosobo	35	297	332
8	Kabupaten Magelang	40	228	268
9	Kabupaten Boyolali	22	93	115
10	Kabupaten Klaten	33	91	124
11	Kabupaten Sukoharjo	32	43	75
12	Kabupaten Wonogiri	15	76	91
13	Kabupaten Karanganyar	40	102	142
14	Kabupaten Sragen	41	157	198
15	Kabupaten Grobogan	66	508	574
16	Kabupaten Blora	32	274	306
17	Kabupaten Rembang	21	177	198
18	Kabupaten Pati	72	323	395
19	Kabupaten Kudus	43	148	191
20	Kabupaten Jepara	61	335	396
21	Kabupaten Demak	42	230	272
22	Kabupaten Semarang	56	156	212
23	Kabupaten Temanggung	31	252	283
24	Kabupaten Kendal	17	81	98
25	Kabupaten Batang	22	173	195
26	Kabupaten Pekalongan	14	135	149
27	Kabupaten Pemalang	74	469	543
28	Kabupaten Tegal	16	117	133
29	Kabupaten Brebes	29	269	298
30	Kota Magelang	6	15	21
31	Kota Surakarta	20	59	79
32	Kota Salatiga	2	13	15
33	Kota Semarang	35	107	142
34	Kota Pekalongan	2	22	24
35	Kota Tegal	6	21	27
Total		**1.281**	**6.622**	**7.903**

Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2024.

Perkawinan anak dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, khususnya pada anak perempuan. Selain melahirkan, norma yang masih banyak berlaku di masyarakat memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada istri untuk mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Di sisi lain, norma sosial mengenai peran laki-laki dalam keluarga dapat menyebabkan suami yang masih berusia muda rentan mengalami tekanan mental jika tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Tekanan ini dapat memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan perceraian. Data perkawinan anak menunjukkan bahwa tahun 2024 sebesar 7.903 kasus telah mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (10.531 kasus), namun angka ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan data tahun 2019 yang hanya 5.239 kasus. Perlu upaya lebih keras dimasa depan untuk bagaimana melakukan pencegahan kekerasan perkawinan usia dini khususnya memberikan pemahaman dan penyadaran bagi orang tua maupun anak muda mengenai arti penting kehidupan masa depan, kesiapan secara matang untuk menikah, pergaulan positif dan nilai-nilai tradisional yang masih melekat yang memicu/mendorong meningkatnya perkawinan usia dini.

Tabel 2.104.

Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	1.671	11.301	12.972
2021	1.909	11.686	13.595
2022	1.850	9.516	11.366
2023	1.659	8.872	10.531
2024	1.281	6.622	7.903

Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2024.

2.4.12. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pembangunan kependudukan ke depan dihadapkan pada tantangan mengimplementasikan sinergitas pembangunan kependudukan lima pilar yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan termasuk administrasi kependudukan. Implementasi ini kian sulit terwujud manakala capaian kab/kota yang seharusnya telah menyusun *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan (GDPK) masih belum 100 persen di Jawa Tengah dan pengintegrasian dengan dokumen perencanaan masih belum optimal. Rekapitulasi data Kab/Kota di Jawa Tengah yang telah menyusun GDPK sampai dengan tahun 2024 baru tercatat 26 Kab/kota yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sragen.

Sementara itu, upaya menggalakkan kembali program keluarga berencana perlu untuk terus dilakukan mengingat angka CPR sejak tahun 2019 mengalami tren menurun dari 73,48 menjadi 65,70 di tahun 2023. Namun disisi lain angka TFR justru mengalami penurunan menjadi 2,04 di tahun 2023 dari 2,23 di tahun 2019. Demikian halnya dengan *unmetneed* juga mengalami tren penurunan dari 13,03 pada tahun 2019 menjadi 8,6 di tahun 2023. Untuk TFR yang makin menurun perlu untuk diwaspadai jangan sampai hal itu terus berlanjut mengingat TFR yang ideal sangat diperlukan untuk menghasilkan kondisi pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Tribina memiliki peranan penting dalam pembangunan keluarga. Melalui tribina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR dan Bina Keluarga Lansia/BKL) diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang tua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita, remaja dan mempersiapkan kelak di masa lansia agar tetap memiliki produktivitas. Data perkembangan BKB, BKR dan BKL menunjukkan bahwa BKB dari sisi jumlah kelembagaan mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 9.837 dari 8.984 di tahun 2023, demikian juga dengan keaktifannya yang secara jumlah juga mengalami peningkatan yaitu dari 8.816 menjadi 9.218 atau 93,70 persen, persentase keaktifan BKB tersebut masih lebih rendah dibanding tahun 2020 yang sebesar 95,14 persen. BKR secara kelembagaan menurun dari 5.909 di tahun 2023 menjadi 5.429 di tahun 2024, namun dari sisi keaktifan mengalami peningkatan yaitu dari 94,77 persen di tahun 2023 menjadi sebesar 96,26 persen ditahun 2024, namun keaktifan ini masih lebih rendah dibanding tahun 2020 yang sebesar 99,56 persen. Sementara itu BKL tahun 2024 baik jumlah dan keaktifan mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, namun persentase keaktifan mengalami tren yang terus menurun sejak tahun 2020 yaitu dari 99,14 persen menjadi 95,51 persen. Gambaran perkembangan Tribina ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah kelembagaan dan keaktifan secara terus menerus akan semakin mengancam pada cakupan layanan pemberian wawasan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pembinaan keluarga yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Tentu dampak rantainya adalah terhambatnya terwujudnya keluarga berkualitas dan berkarakter .

Tabel 2.105.
Perkembangan Tribina 2020-2024

Tahun	BKB			BKR			BKL Jateng		
	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%
2020	11.071	10.533	95,14	5.947	5.921	99,56	7.763	7.696	99,14
2021	10.473	10.338	98,71	5.860	5.794	98,87	7.804	7.724	98,97
2022	9.184	9.049	98,53	5.490	5.311	96,74	7.180	7.010	97,63
2023	8.984	8.816	98,13	5.909	5.600	94,77	6.647	6.382	96,01
2024	9.837	9.218	93,70	5.429	5.226	96,26	6.969	6.656	95,51

Sumber: BKKBN dan DP3AP2KB Prov.Jateng, 2023.

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena data penduduk wajib KTP yang sangat dinamis, setiap harinya terdapat penambahan

penduduk wajib KTP. Peningkatan layanan kependudukan melalui perekaman, penerbitan KTP dan mendekatkan layanan terus didorong dalam rangka mewujudkan target semua penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk.

Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akta kelahiran Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2019 meningkat dari 87,42 persen menjadi 96,09 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,16 persen. Tingkat kepemilikan akta kelahiran kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 99,01 persen. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan karena pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, sms *gateway*, dan layanan *online*.

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2021, sebanyak 24 antara lain: Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.4.13. Kepemudaan dan olahraga

Pembangunan kepemudaan bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Pemuda dan segala pergulatannya akan selalu berhadapan dengan tantangan yang terjadi di masa mereka bertumbuh. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai kekuatan utama berupa daya pikir revolusioner, kreatif, agresif, inovatif, dan produktif sehingga mampu memunculkan ide-ide konstruktif dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa, merupakan kekuatan moral, *control social*, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil Susenas 2023, jumlah pemuda di Jawa Tengah sebanyak 7,73 juta jiwa atau sebanyak 21,95 persen dari total penduduk di Jawa Tengah. Tingginya persentase pemuda dapat memberikan gambaran tingginya potensi sumber daya manusia penggerak pembangunan.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu alat ukur penting untuk menilai perkembangan dan kualitas hidup pemuda dalam berbagai aspek pembangunan. IPP memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sejumlah aspek, seperti pendidikan formal dan informal, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi sosial dan inklusivitas beserta

kesetaraan mempengaruhi kondisi pemuda. Dalam upaya mendukung perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, IPP telah melalui proses peninjauan ulang. Proses peninjauan ulang yang dilakukan berimplikasi pada perubahan nilai IPP yang diperoleh, baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Terdapat 5 (lima) domain IPP yaitu Pendidikan; Kesehatan dan Kesejahteraan; Lapangan dan Kesempatan Kerja; Partisipasi dan Kepemimpinan; Gender dan Diskriminasi sebagaimana telah dilakukan peninjauan ulang sehingga terdapat perubahan domain menjadi Pendidikan dan Pelatihan; Kesehatan; Ketenagakerjaan Layak; Partisipasi dan Kepemimpinan; Inklusifitas dan Kesetaraan Gender sehingga realisasi IPP pun juga mengalami penyesuaian paska peninjauan ulang.

Tabel 2.106.
Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 –2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemuda di Jawa Tengah (Juta Jiwa)	7,75	7,77	7,97	7,73	n/a
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda	14,83	13,23	11,87	11,87	n/a
Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/ pegawai	54,18	58,21	60,78	60,12	n/a
Persentase pemuda yang berusaha sendiri	11,83	12,05	12,44	13,30	n/a
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	49,52	50,70	53,80	55,50	58,33*
- Domain Pendidikan	60,36	58,29	62,59	65,43	70*
- Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	51,61	55,37	59,26	61,02	60*
- Ketenagakerjaan Layak	59,67	63,73	69,35	64,97	55*
- Partisipasi dan Kepemimpinan	7,58	47,26	49,73	26,07	50*
- Inklusivitas dan Gender	68,83	68,81	61,51	64,63	56,67*

Sumber: 1. BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun, 2025.
2. KEMENPORA Tahun 2025.
3. Naskah Indeks Pembangunan Pemuda Jawa Tengah Tahun 2024 oleh DISPORAPAR.

Olahraga merupakan jati diri bangsa dan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Peran olahraga diantaranya bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Perkembangan prestasi olahraga di Jawa Tengah salah satunya dapat diukur dari peringkat pada kejuaraan tingkat nasional melalui Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) bagi atlet penyandang disabilitas. Gelaran kejuaraan tingkat nasional tersebut terakhir dilaksanakan pada Tahun 2024 di Provinsi ACEH-SUMUT dan di Jawa Tengah

untuk penyelenggaraan PEPARNAS. Perkembangan prestasi atlet Jawa Tengah pada perhelatan PON mengalami fluktuatif dari Tahun 2012-2024 yaitu menduduki peringkat 4 pada Tahun 2012, meningkat ke peringkat 2 pada Tahun 2016, tetapi mengalami penurunan cukup signifikan pada Tahun 2021 pada peringkat 6 dan pada Tahun 2024 masih berada pada peringkat 5 dalam PON XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumut dengan meraih 71 medali emas 74 perak dan 115 perunggu. Sedangkan prestasi olahraga Jawa Tengah pada kejuaraan PEPARNAS XVII menduduki peringkat 1 pada PEPARNAS Tahun 2024 dengan perolehan 161 emas, 212 perak, dan 124 perunggu. Perkembangan prestasi olahraga Provinsi Jawa Tengah pada kejuaraan tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.107.
Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional

Kejuaraan	Peringkat dan jumlah medali		
	Tahun 2016	**Tahun 2021**	**Tahun 2024**
Pekan Olahraga Nasional (PON)	**4**	**6**	**5**
- emas	32	27	71
- perak	56	47	74
- perunggu	85	64	115
Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS)	**2**	**3**	**1**
- emas	17	89	161
- perak	5	60	212
- perunggu	8	76	124

Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pada UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, disebutkan bahwa tujuan olahraga bersifat majemuk yang mencakup kesehatan fisik dan psikis, karakter etos dan moral, ekonomi, sosial, budaya, dan martabat bangsa. Tujuan tersebut perlu diukur untuk memastikan sudah sampai di mana upaya kita mewujudkan tujuan tersebut. Sport Development Index (SDI) merupakan instrumen untuk mengukur sekaligus instrumen kebijakan untuk mendinamisasi dan mengoptimalisasi pembangunan olahraga. SDI terdiri dari dimensi SDM, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa.

Capaian SDI Jawa Tengah pada Tahun 2024 dari 9 dimensi IPO, terdapat 6 dimensi yang indeksnya berada di atas indeks rata-rata nasional (SDM OR, ruang terbuka OR, PARTISIPASI, perkembangan personal, ekonomi, performa), 1 dimensi yang indeksnya sama dengan indeks nasional, yakni kesehatan dan dimensi IPO yang mendapatkan “rapor merah”, yakni literasi fisik dan kebugaran sebagai berikut:

Tabel 2.108.
Capaian Indeks Pembangunan Olahraga Jawa Tengah Tahun 2024

Dimensi IPO	Indeks 2024	Keterangan/Posisional
SDM Olahraga	0,122	Di atas rata-rata nasional
Ruang Terbuka Olahraga	0,402	Di atas rata-rata nasional
Literasi Fisik	0,513	Di bawah rata-rata nasional
Partisipasi	0,330	Di atas rata-rata nasional
Kebugaran	0,148	Di bawah rata-rata nasional
Perkembangan Personal	0,670	Jauh di atas rata-rata nasional
Kesehatan	0,424	Sama dengan rata-rata nasional
Ekonomi	0,574	Di atas rata-rata nasional
Performa*)	0,420	Jauh di atas rata-rata nasional

*)Diperoleh dari data IPO Nasional 2024

Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

2.4.14. Perpustakaan

Pada awalnya konsep literasi dimaknai hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun konsep ini semakin berkembang dengan cakupan yang lebih luas. Konsep literasi yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini salah satunya adalah literasi informasi yaitu sebuah keterampilan untuk mengenali kebutuhan informasi dalam setiap permasalahan atau persoalan yang dihadapi, mampu menemukan informasi yang dibutuhkan, mampu mengevaluasi sumber informasi dan mampu memanfaatkan informasi secara etis dan mampu mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam sebuah informasi (Anjali & Istiqomah, 2021).

Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang peradaban manusia tidak dapat lepas dari perpustakaan. Oleh karenanya, perpustakaan memegang peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di daerah terdapat 36 Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan data pengunjung dan jumlah koleksi Perpustakaan Umum Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.109.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024 (Orang)

NO	Tahun	Pengunjung
1	2019	5.871.814
2	2020	3.160.335
3	2021	3.131.755

NO	Tahun	Pengunjung
4	2022	4.891.435
5	2023	6.588.139
6	2024	9.109.185

Sumber: Data 35 kabupaten/kota dan Provinsi.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pengunjung perpustakaan daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah tiap tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan jumlah pengunjung yang tertinggi terjadi di tahun 2023. Hal ini salah satunya didorong oleh kebijakan penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pasca pandemi Covid-19 yang membuat layanan kunjungan perpustakaan umum daerah kembali dibuka untuk masyarakat umum. Pengunjung yang datang ke perpustakaan umum kembali memanfaatkan koleksi bahan Pustaka yang ada disana. Jumlah koleksi bahan Pustaka berdasarkan jenisnya mengalami peningkatan di tahun 2023.

Tabel 2.110.
Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Koleksi	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks
1	Koleksi Perpustakaan Provinsi dan Keliling	1.053.825	1.906.840	1.061.697	1.920.846	1.111.585	1.914.474	1.190.688	2.092.799	1.342.661	2.293.506	1.427.265	2.376.196
2	Koleksi *e-book*	50.085	235.236	75.998	452.112	68.802	516.436	79.949	527.485	96.322	633.197	135.516	571.667
3	Koleksi Khusus untuk pemustaka berkebutuhan khusus	8.462	16.096	9.165	17.618	10.756	19.665	4.480	6.525	6.337	8.926	8.461	19.290
	TOTAL	**1.112.372**	**2.158.172**	**1.146.860**	**2.390.576**	**1.184.867**	**2.437.435**	**1.275.117**	**2.626.809**	**1.445.320**	**2.935.629**	**1.571.242**	**2.967.153**

Sumber: Data 35 kabupaten/kota dan Provinsi.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah koleksi perpustakaan daerah diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan literasi Masyarakat di Jawa Tengah. Pengunjung perpustakaan tumbuh 27,67 persen dari tahun 2023 ke 2024. Sedangkan koleksi bahan pustaka tumbuh bervariasi berdasarkan jenis koleksinya. Judul koleksi berkebutuhan khusus mengalami pertumbuhan terbesar diantara jenis koleksi lainnya yaitu 13,66%. meskipun demikian pertumbuhan jenis koleksi secara keseluruhan masih rendah karena pertumbuhannya masih dibawah 100 persen. Hal ini menunjukkan beberapa variabel pembangunan literasi masyarakat yang ada belum optimal dalam meningkatkan literasi masyarakat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Peningkatan literasi masyarakat merupakan hasil kerja bersama, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder yang

terlibat dalam ekosistem literasi. Aktifitas seperti pengembangan konten literasi berbasis kearifan lokal seperti pelatihan kepenulisan berbasis budaya lokal, bedah buku, lomba konten video literasi dan penulisan resensi buku, serta lokakarya literasi digital dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan literasi masyarakat, hingga triwulan ketiga 2025 sebanyak 1.135 orang telah mengikuti kegiatan tersebut diatas. Selain itu peningkatan kapasitas SDM literasi seperti bimtek pustakawan, pegiat literasi dan guru juga tak kalah penting untuk membentuk budaya gemar membaca, hingga triwulan ketiga 2025 sebanyak 300 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut.

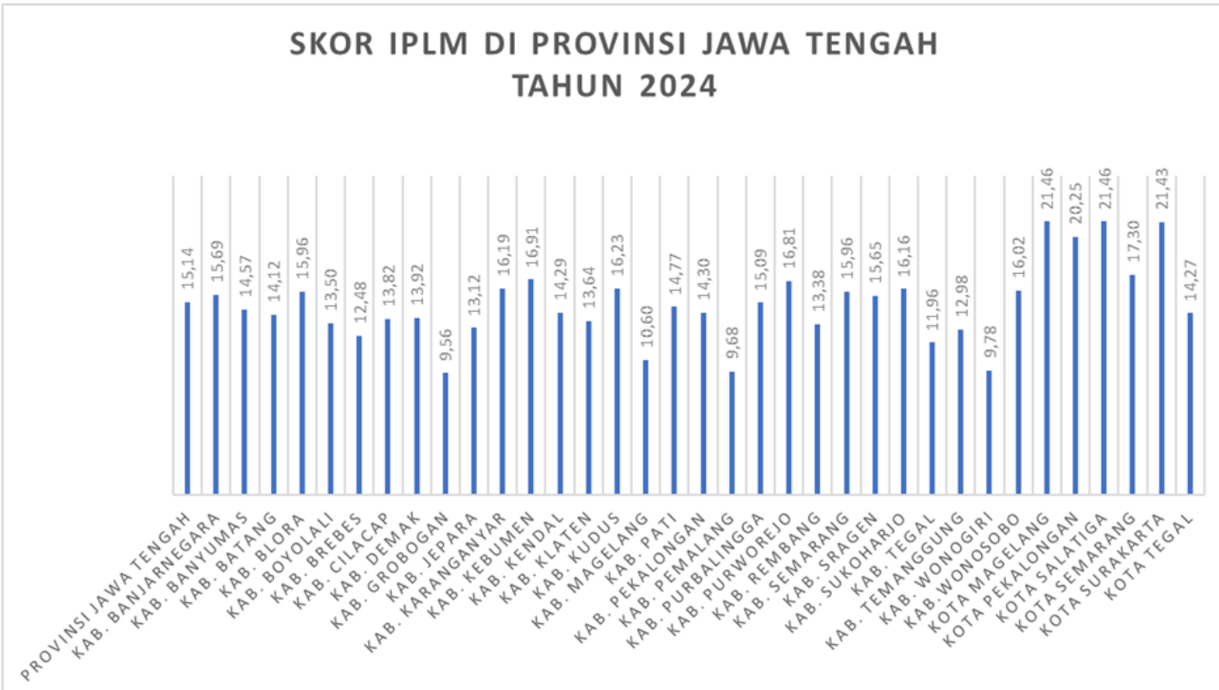

Sumber: Perpusnas, 2024 (diolah).

Gambar 2.67.
Nilai IPLM Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

2.4.15. Transmigrasi

Upaya sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui kerjasama dengan daerah transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi lahan transmigrasi yang ideal yaitu 2C (*clean and clear*) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha, dan Layak lingkungan) bagi calon transmigran. Upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah kerjasama dengan 22 provinsi lokasi transmigrasi di luar Jawa yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Utara, Aceh, dan Bangka Belitung. Kerjasama tersebut direalisasikan dengan penyusunan *MoU* antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 22 Provinsi tersebut.

Selama tahun 2019-2024, persentase penempatan transmigran Jawa Tengah cenderung berfluktuatif. Capaian tahun 2019 cukup tinggi yaitu sebesar 10,23 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2020 karena pandemi Covid-19 sehingga tidak terdapat penempatan. Kemudian di tahun 2021 hingga

2024 capaian penempatan berfluktuatif karena sangat tergantung dengan kuota pemerintah pusat, yang mana kuota dari pusat selalu menurun di setiap tahunnya.

Tabel 2.111.
Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Animo (KK)	Kuota Pusat (KK)	Jumlah Penempatan (KK)	Persentase
1	2019	2.160	257	221	10,23
2	2020	1.263	0	0	0
3	2021	1.263	10	10	0,79
4	2022	1007	10	10	0,79
5	2023	403	20	20	4,96
6	2024	360	16	16	4,44

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan transmigran sebagai bekal di daerah tujuan telah dilaksanakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai kondisi tempat tujuan, budaya dan tradisi masyarakat setempat kepada calon transmigran yang dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatrans Penca) Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 pelatihan dasar umum calon transmigran dialihkan ke Balai Latihan Pertanian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Klampok, Banjarnegara. Di tahun 2021, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Banjarnegara tidak lagi melatih calon transmigran. Namun demikian para calon transmigran dari Provinsi Jawa Tengah tetap mengikuti pelatihan di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPLM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.5. Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan

Kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan di Provinsi Jawa Tengah ditunjukan dari gambaran daya dukung dan daya tampung lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan perubahan iklim. Gambaran lainnya yang dapat menunjukan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, kualitas lahan, rehabilitasi pesisir, pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan, kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB, pengelolaan sumberdaya energi dan mineral, dan penanggulangan bencana. gambaran kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan diuraikan sebagai berikut.

2.5.1.Daya Dukung dan Daya Tampung

Keberadaan sumberdaya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus memperhatikan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan

keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Indeks Jasa Penyedia Air, Jasa Penyedia Pangan, Jasa Pengaturan Air, Jasa Pengaturan Iklim, Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Perlindungan Bencana masih dalam rentang sedang, status D3T air terlampaui, dan D3T pangan belum terlampaui.

Pada Keputusan Menteri LHK No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional ditetapkan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Jawa Tengah telah terlampaui yang mana ketersediaan air sebesar 31.032.527.608,75 m3/tahun dan kebutuhan atau pemanfaatan air sebesar 32.719.164.930,76 m3/tahun. Jika dilihat dari distribusi wilayah dengan status D3T air sudah terlampaui mencapai 47,55 persen dan yang belum terlampaui sebesar 52,45 persen dari total wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian dari hasil perhitungan secara nasional maka kondisi ketersediaan di Jawa Tengah mengalami defisit sebesar 1.686.637.322,01 m3/tahun. Berdasarkan pemetaan D3T air Jawa Tengah, maka terdapat 20 Kabupaten/Kota dengan status agregat daya dukung dan daya tampung air terlampaui. Berikut distribusi daya dukung dan daya tampung air setiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

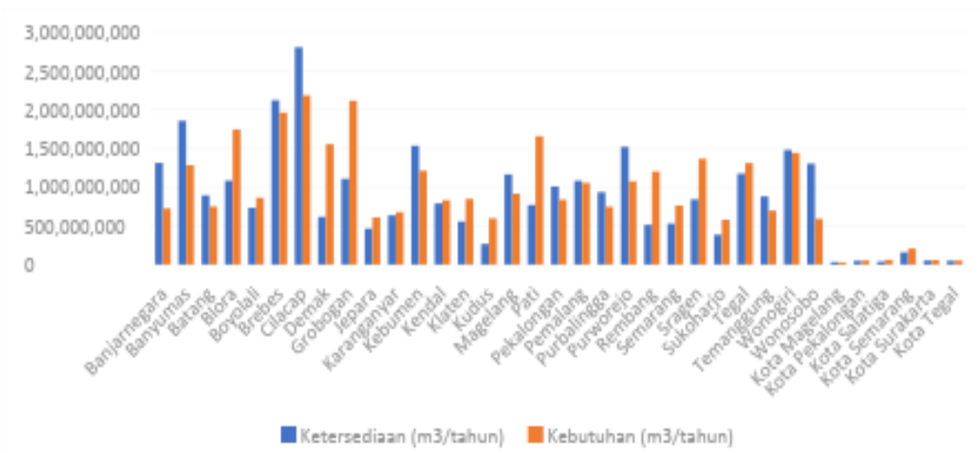

Gambar 2.68.
Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah

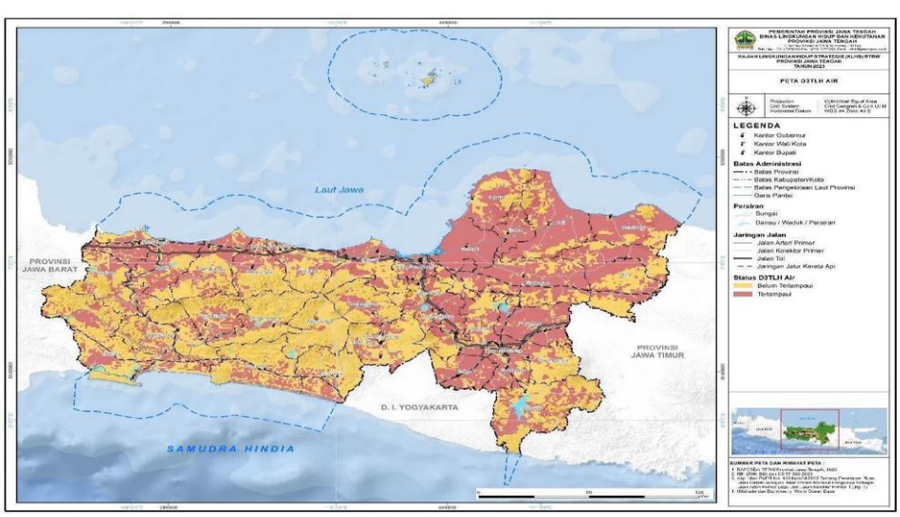

Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.69.
Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan grafik diatas wilayah Kota di Jawa Tengah cenderung melampaui ambang batas penduduk yang dapat didukung, hal ini disebabkan kondisi wilayah terkait jasa lingkungan hidup penyedia air tidak terlalu baik, tetapi disisi lain wilayah tersebut memiliki jumlah populasi yang banyak. Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan ketersediaan dan kebutuhan air. Hal ini disebabkan perubahan penutupan lahan di Jawa Tengah diikuti dengan peningkatan jumlah populasi.

Selanjutnya Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki total ketersediaan 5.508.531,0 ton beras dan kebutuhan mencapai 2.792.243,71 ton beras sehingga kondisinya masih surplus sebesar 2.716.287,29 ton beras. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya maka masih terdapat sekitar 11,38 persen yang daya dukung pangannya sudah terlampaui dan 88,62 persen wilayah yang belum terlampaui daya dukung pangannya. Kondisi daya dukung pangan di setiap kabupaten/kota berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut terutama penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Jika dilihat di masing-masing kabupaten/kota maka seluruh kota daya dukung pangannya terlampaui. Berikut ditampilkan status daya dukung dan daya tampung pangan untuk setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.

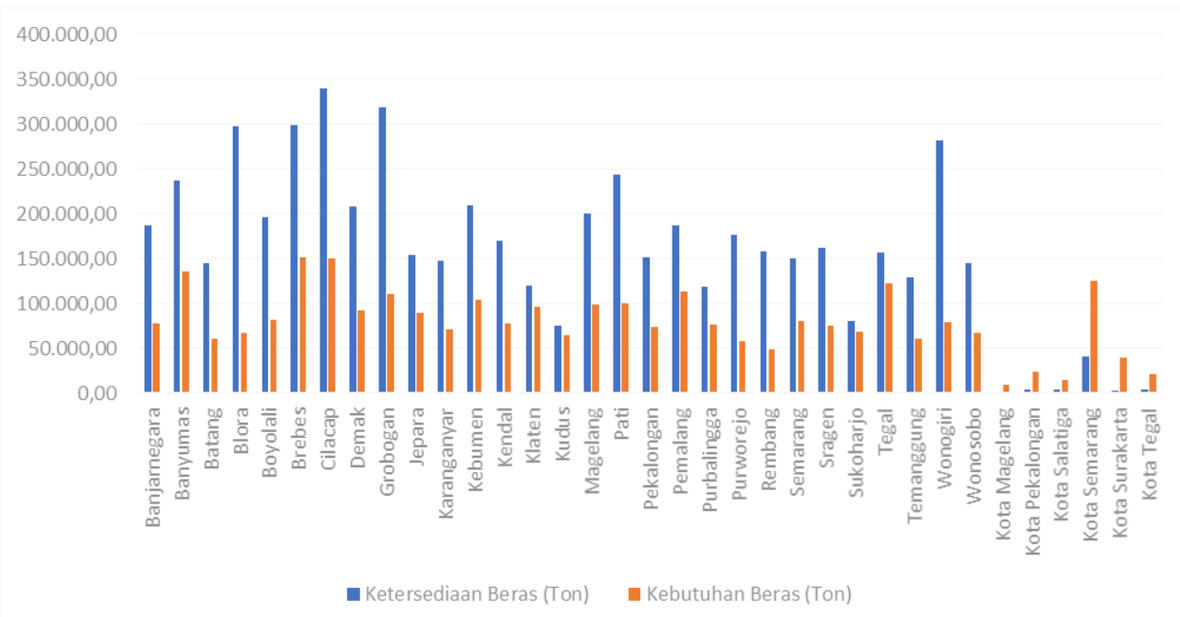

Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.70.
Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah

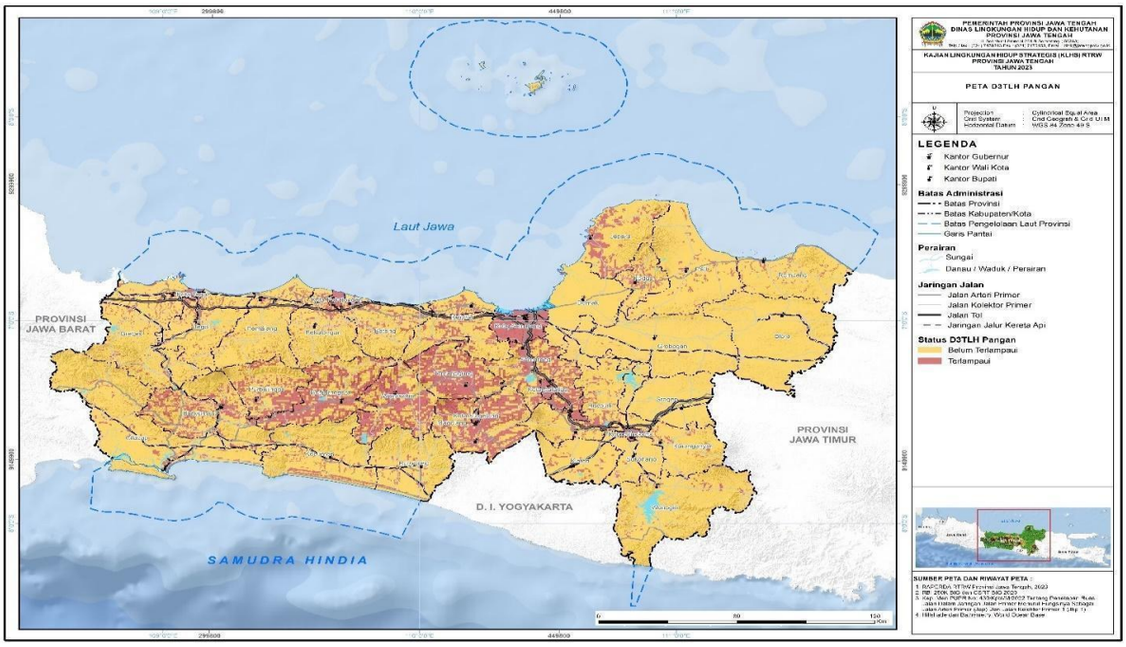

Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.71.
Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah

2.5.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 sebesar 1,84 poin dan pada tahun 2024 IKLH Provinsi Jawa Tengah mencapai 69,46 dengan rincian:

- IKA: 52,03
- IKU: 87,73
- IKL: 48,37
- IKAL: 78,67

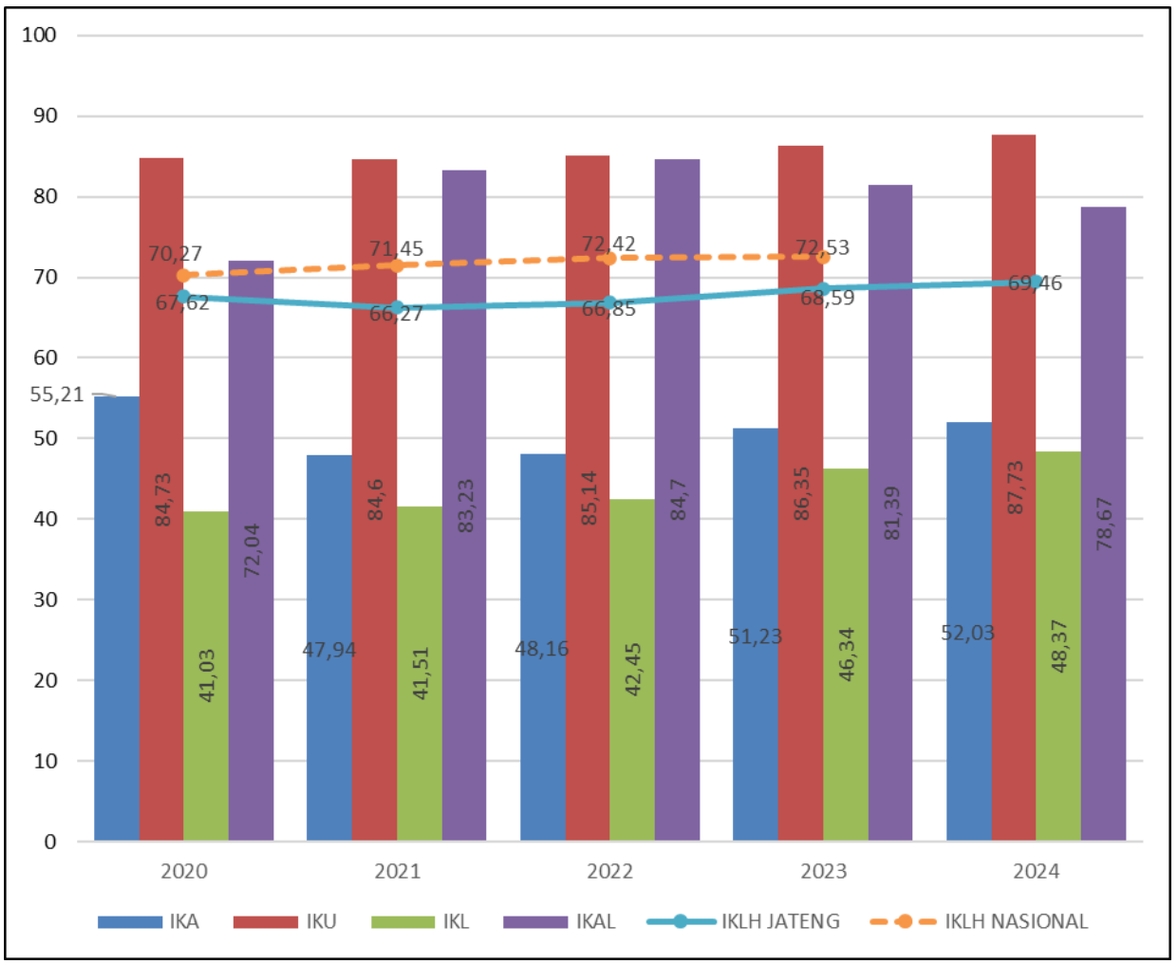

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Gambar 2.72.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

2.5.3. Perubahan Iklim

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti adanya bencana hidrometeorologi, perubahan musim dan kenaikan muka air laut. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah (dalam skala kecamatan) menunjukan hasil bahwa mayoritas kecamatan di Provinsi Jawa Tengah berada di kelas kerentanan sedang yaitu sebanyak 442 kecamatan atau 77 persen. Kecamatan dengan kerentanan kelas sangat rendah sebanyak 68 kecamatan atau 12%, sedangkan kecamatan dengan kelas kerentanan tinggi sebanyak 24 kecamatan atau 4 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah saat ini cukup rentan terhadap perubahan iklim yang dikategorikan dari banyaknya kecamatan yang berada di kerentanan kelas sedang. Apabila dilihat dari kondisi geografis maka ancaman wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan peningkatan banjir dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadi peningkatan banjir, dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor rentan terhadap bencana longsor.

Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman terjangan gelombang laut terhadap aktivitas nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir.

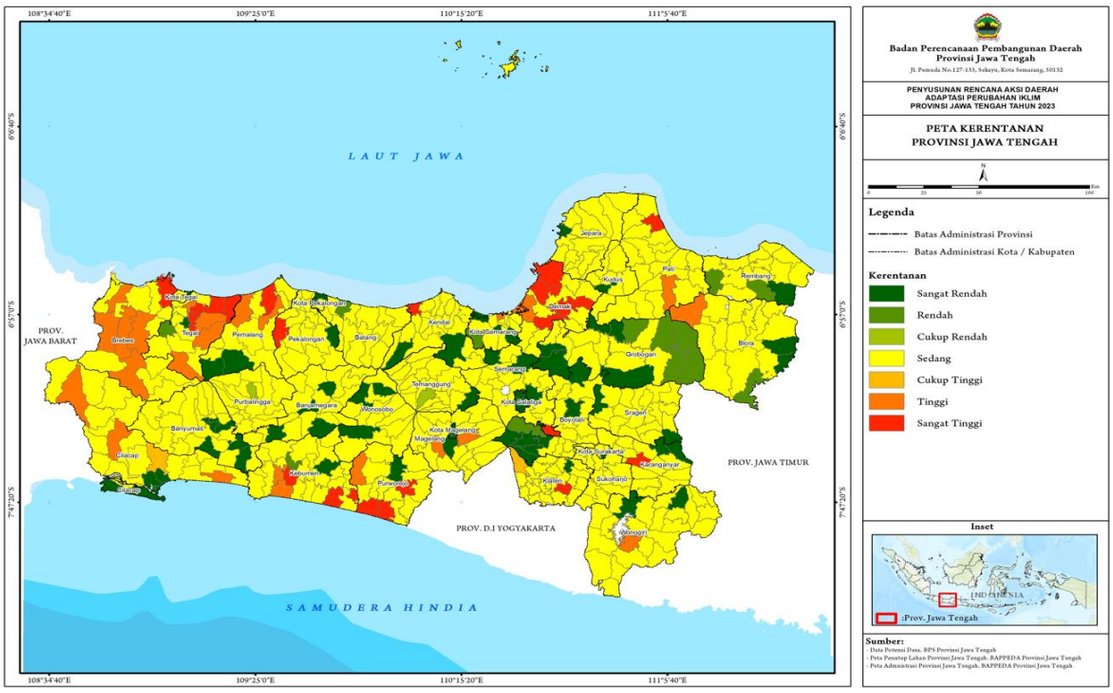

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.73.

Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Terjadinya perubahan iklim berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 118.738,93 GgCO2eq. Pada tahun 2023, sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi GRK di Jawa Tengah dengan total emisi sebesar 95.577,87 GgCO2e (80,49 persen), dan disusul sektor pertanian sebesar 20.890,54 GgCO2e (17,59 persen). Peningkatan emisi dari sektor energi salah satunya disebabkan oleh beroperasionalnya PLTU Batang pada tahun 2022.

Peningkatan emisi GRK pada periode 2010-2023 tersebut didominasi oleh peningkatan emisi pada sektor energi. Selama periode tersebut, sektor energi meningkat 219,71 persen dari 29.895,59 GgCO2e pada tahun 2010 menjadi 95.577,87 GgCO2e pada tahun 2023. Emisi GRK sektor energi ini didominasi oleh pembakaran bahan bakar di pembangkit listrik dan transportasi yang terus meningkat.

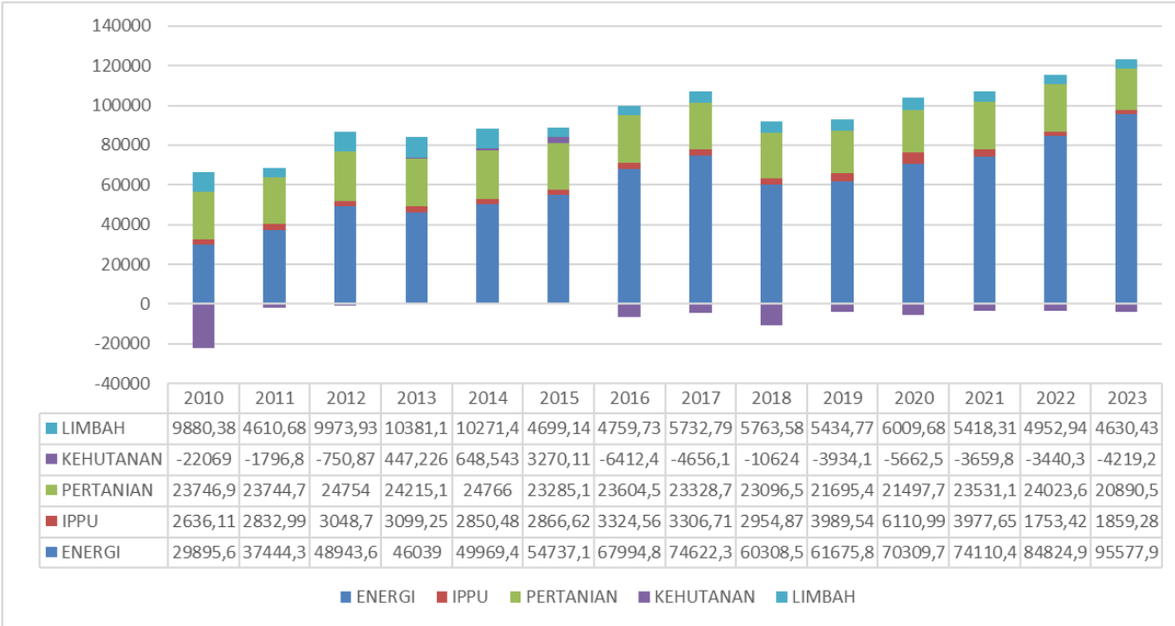

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LIMBAH	9880,38	4610,68	9973,93	10381,1	10271,4	4699,14	4759,73	5732,79	5763,58	5434,77	6009,68	5418,31	4952,94	4630,43
KEHUTANAN	-22069	-1796,8	-750,87	447,226	648,543	3270,11	-6412,4	-4656,1	-10624	-3934,1	-5662,5	-3659,8	-3440,3	-4219,2
PERTANIAN	23746,9	23744,7	24754	24215,1	24766	23285,1	23604,5	23328,7	23096,5	21695,4	21497,7	23531,1	24023,6	20890,5
IPPU	2636,11	2832,99	3048,7	3099,25	2850,48	2866,62	3324,56	3306,71	2954,87	3989,54	6110,99	3977,65	1753,42	1859,28
ENERGI	29895,6	37444,3	48943,6	46039	49969,4	54737,1	67994,8	74622,3	60308,5	61675,8	70309,7	74110,4	84824,9	95577,9

Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.74.

Tren Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2023

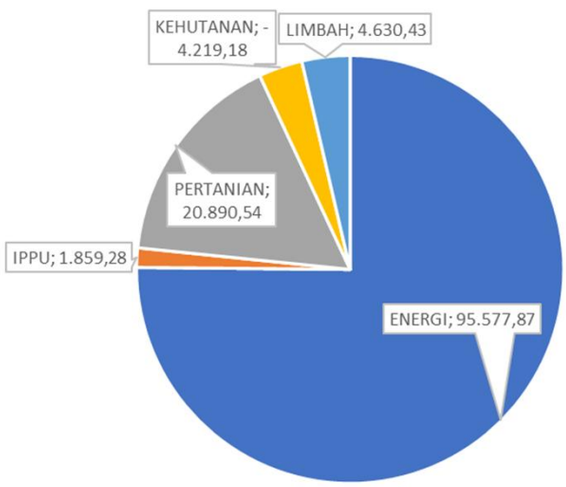

Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar.2.75.

Kontribusi Sektor Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (%)

Secara akumulasi, total capaian penurunan emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga tahun 2024 mencapai 14,13 juta ton CO_2e (*cut off* 26 Juni 2025, status data final dan disetujui). Angka ini merupakan kinerja penurunan emisi GRK yang dilaporkan oleh provinsi, kabupaten/kota dan pihak non pemerintah di Jawa Tengah. Capaian penurunan tersebut berasal dari 4.481 kegiatan. Dari sisi intensitas emisi, saat ini intensitas emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,74 ton CO_2e/miliar.

Beberapa sektor berperan dalam penurunan emisi GRK di Jawa Tengah selama periode 2021-2024 di antaranya air limbah, *blue carbon*, energi, kehutanan dan lahan gambut, persampahan, pertanian, dan transportasi. Penurunan emisi paling tinggi berasal dari sektor kehutanan dan lahan gambut

sebesar 7.345.492,75 ton CO_2e atau 53,77 persen, sektor pertanian sebesar 3.576.340,10 ton CO_2e atau 26,18 persen, dan sektor transportasi sebesar 1.223.837,84 ton CO_2e atau 8,96 persen. Sedangkan kontribusi paling rendah adalah *blue carbon* sebesar 51.179,073 ton CO_2e atau 0,37 persen.

2.5.4. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Kondisi kualitas lingkungan hidup juga digambarkan dari tingkat pencemaran, baik pencemaran air, udara, maupun akibat sampah. Kualitas air di Jawa Tengah dominan berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai IP 3,35. Dari 25 sungai di Jawa Tengah yang dilakukan pemantauan sebanyak 20 sungai berada dalam kondisi cemar ringan dan 5 sungai berada pada status cemar sedang. Sementara itu tingkat pencemaran air laut dalam kondisi baik dengan nilai indeks kualitas air laut tahun 2024 sebesar 78,67. Demikian juga tingkat pencemaran udara di Jawa Tengah dinilai masih dalam kategori rendah, yang ditunjukkan dengan indeks kualitas udara tahun 2024 sebesar 87,73.

Tabel 2.112.
Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Nama Sungai	2020		2021		2022		2023		2024	
		Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu
1	Baki	5,2	Cemar Sedang	4.72	Cemar Ringan	4,09	Cemar Ringan	4,00	Cemar ringan	3,55	Cemar ringan
2	Premulung	3,5	Cemar Ringan	4.57	Cemar Ringan	3,41	Cemar Ringan	4,96	Cemar ringan	3,83	Cemar ringan
3	Mungkung	2,85	Cemar Ringan	3.55	Cemar Ringan	3,39	Cemar Ringan	3,43	Cemar ringan	5,74	Cemar sedang
4	Grompol	5,33	Cemar Sedang	3.84	Cemar Ringan	3,33	Cemar Ringan	4,14	Cemar ringan	4,51	Cemar ringan
5	Samin	5,18	Cemar Sedang	4.35	Cemar Ringan	3,69	Cemar Ringan	3,35	Cemar ringan	5,8	Cemar sedang
6	Jlantah	3,02	Cemar Ringan	3.16	Cemar Ringan	4,32	Cemar Ringan	3,98	Cemar ringan	5,35	Cemar sedang
7	Palur	6,12	Cemar Sedang	5.08	Cemar Sedang	4,92	Cemar Ringan	5,15	Cemar sedang	5,54	Cemar sedang
8	Pepe	3,42	Cemar Ringan	3.12	Cemar Ringan	3,69	Cemar Ringan	3,5	Cemar ringan	4,17	Cemar ringan
9	Babon	6,62	Cemar Sedang	4.03	Cemar Ringan	5,04	Cemar Sedan g	3,96	Cemar ringan	5,03	Cemar sedang
10	Bogowonto	4,02	Cemar Ringan	3.22	Cemar Ringan	2,91	Cemar Ringan	1,95	Cemar ringan	1,78	Cemar ringan
11	Garang	3,4	Cemar Ringan	2.88	Cemar Ringan	3,40	Cemar Ringan	3,27	Cemar ringan	2,89	Cemar ringan
12	Gung	2,9	Cemar Ringan	3.78	Cemar Ringan	3,33	Cemar Ringan	3,48	Cemar ringan	3,77	Cemar ringan
13	Kupang	3,86	Cemar Ringan	3.30	Cemar Ringan	3,53	Cemar Ringan	3,37	Cemar ringan	4,22	Cemar ringan

No	Nama Sungai	2020		2021		2022		2023		2024	
		Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu
14	Luk Ulo	0,91	Kondisi baik	3.30	Cemar Ringan	2,74	Cemar Ringan	2,85	Cemar ringan	2,39	Cemar ringan
15	Lusi	3,75	Cemar Ringan	2.95	Cemar Ringan	1,56	Cemar Ringan	2,45	Cemar ringan	2,64	Cemar ringan
16	Pemali	0,77	Kondisi baik	3.89	Cemar Ringan	3,90	Cemar Ringan	3,72	Cemar ringan	3,68	Cemar ringan
17	Sambong	3,41	Cemar Ringan	3.04	Cemar Ringan	2,73	Cemar Ringan	2,84	Cemar ringan	3,06	Cemar ringan
18	Serang	2,29	Cemar Ringan	2.32	Cemar Ringan	2,14	Cemar Ringan	3,15	Cemar ringan	2,49	Cemar ringan
19	Serayu	2,24	Cemar Ringan	2.89	Cemar Ringan	2,78	Cemar Ringan	3,92	Cemar ringan	3,07	Cemar ringan
20	Tuntang	3,59	Cemar Ringan	3.09	Cemar Ringan	2,84	Cemar Ringan	3,86	Cemar ringan	2,51	Cemar ringan
21	Wulan	4	Cemar Ringan	4.89	Cemar Ringan	3,94	Cemar Ringan	2,15	Cemar ringan	2,58	Cemar ringan
22	Bengawan Solo	2,68	Cemar Ringan	1.98	Cemar Ringan	2,46	Cemar Ringan	2,27	Cemar ringan	2,15	Cemar ringan
23	Progo	2,03	Cemar Ringan	1.94	Cemar Ringan	1,95	Cemar Ringan	1,40	Cemar ringan	1,58	Cemar ringan
24	Citanduy	1,97	Cemar Ringan	2.14	Cemar Ringan	2,62	Cemar Ringan	1,94	Cemar ringan	1,64	Cemar ringan
25	Cisanggarung	1,94	Cemar Ringan	2.75	Cemar Ringan	0,61	Baik	1,78	Cemar ringan	1,15	Cemar ringan
26	Danau Rawapening	2	Cemar Ringan	2,27	Cemar Ringan	3,02	Cemar Ringan	1,88	Cemar ringan	1,94	Cemar ringan
Nilai IP Jawa Tengah		3,4	Cemar Ringan	3.39	Cemar Ringan	3,17	Cemar Ringan	3,18	Cemar ringan	3,35	Cemar ringan

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Kondisi persampahan di Jawa Tengah digambarkan dengan data timbulan sampah di Jawa Tengah, pada tahun 2024 telah mencapai 6.339.820,22 ton/tahun. Pengelolaan sampah di Jawa Tengah baik pengurangan maupun penanganan pada tahun 2024 baru mencapai 2.606.065,76 ton/tahun (41,11 persen), dengan rincian pengurangan sampah sebesar 1.270.292,09 (20,04 persen) dan penanganan sampah sebesar 1.335.773,67 (21,07 persen). Penurunan capaian pengelolaan sampah secara drastis pada tahun 2024 dikarenakan adanya pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada 18 TPA di Jawa Tengah sehingga capaian penanganan di 18 TPA tersebut tidak dihitung sebagai sampah terkelola. Sementara itu capaian indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah pada tahun 2022 adalah sebesar 16,51% mendasarkan pada SEB Bappenas-Kemendagri.

Tabel 2.113.

Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Timbunan Sampah (Ton/tahun)	6.055.617,05	6.152.654,76	6.363.806	6.338.109,37	6.339.820,22
2	Jumlah Sampah Yang Dapat Dikurangi (ton/tahun)	1.175.675,24	1.128.400,92	1.317.993	1.321.899.86	1.270.292,09
	Persentase Sampah Dikurangi	19,41	18,34	20,71	20,86	20,04
3	Jumlah sampah Yang Tertangani (ton/tahun)	2.626.441,58	2.408.372,35	2.590.830	2.590.431,31	1.335.773,67
	Persentase Sampah Tertangani	43,37	39,14	40,71	40,87	21,07
4	Total Sampah Terkelola (ton/tahun)	3.802.116,82	3.536.773	3.908.823	3.912.331,17	2.606.065,76
	Persentase Sampah Terkelola (%)	62,79	57,48	61,42	61,73	41,11
5	Sampah Tidak Terkelola (ton/tahun)	2.253.500,23	2.615.881,49	2.454.983,00	2.425.778,20	3.733.754,46
	Persentase Sampah Tidak Terkelola (%)	37,21	42,52	38,58	38,27	58,89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan. Pengawasan lingkungan yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) identik dengan kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114.

Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	Izin	69	83	89	236	236
2	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha dan/ atau kegiatan	57	38	63	65	39
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Usaha dan/ atau kegiatan	49	19	47	50	21
4	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Orang	-	6	7	7	6

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.5.5. Rehabilitasi Lahan Kritis dan Ekosistem Pesisir

Merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, seluas 375.733 ha (11,45 persen dari luas daratan Provinsi Jawa Tengah). Adanya lahan kritis berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan antara lain: meningkatnya potensi/ kejadian erosi, menurun/ hilangnya kesuburan tanah, penurunan kualitas air akibat sedimentasi/ polutan di badan air, meningkatnya resiko/ kejadian banjir dan atau longsor, gangguan ekosistem akibat rusak/ hilangnya habitat flora/ fauna, turunnya fungsi penyerapan karbon akibat kurangnya vegetasi, potensi terjadinya penggurunan (*desertification*) serta kerugian ekonomi dan ekologi lainnya.

Luas kawasan hutan di Jawa Tengah seluas 766.390 ha dan hutan rakyat seluas 682.425,61 ha, sehingga total luas hutan di Jawa Tengah 1.448.815,61 ha. Lahan kritis di Jawa Tengah seluas 86 persen berada di lahan milik masyarakat, sedangkan 14 persen di kawasan hutan (hutan negara). Penanganan lahan kritis di Jawa Tengah dilakukan melalui beberapa pendekatan, (1) Intervensi fisik (rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman/ vegetatif dan sipil teknis/ bangunan konservasi tanah & air, (2) Intervensi kebijakan (pengelolaan DAS terpadu, Perda/Pergub/Perbup Pengelolaan DAS), (3) Intervensi kelembagaan. Rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan vegetatif dilakukan melalui pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan yang dibebani hak/lahan masyarakat, sedangkan pendekatan sipil teknis dengan membangun *gully plug*, dam penahan, dam pengendali, sumur resapan serta bangunan konservasi tanah dan air (KTA) lainnya.

Tabel 2.115.

Penanganan Lahan Kritis (Penanaman/ Vegetatif) di Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Hutan (dalam dan luar kawasan) (ha)	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13
Luas Lahan Kritis (ha)*	375.733	375.733	375.733	375.733	375.733	375.733,00
Luas lahan kritis yang direhabilitasi per tahun (ha)	23.431	32.389	23.477	21.371	19.052	3.043,00
Persentase rehabilitasi lahan kritis per tahun (%)	6,24	8,62	6,24	5,69	5,07	0,81
Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (akumulatif) ha	*23.431*	*55.820*	*79.297*	*100.668*	*119.720*	122.763,00
Persentase rehabilitasi lahan kritis per tahun (%) (akumulatif)	*6,24*	*14,86*	*21,1*	*26,79*	*31,86*	32,67

Sumber:
1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.
2.) Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional.*

Tabel 2.116.

Penanganan Lahan Kritis (Sipil Teknis/ Bangunan KTA) di Jawa Tengah

JENIS BANGUNAN KTA	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dam Penahan (unit)	156	248	62	118	77	113
Dam Pengendali (unit)	0	0	0	0	0	0
Gully Plug (unit)	242	440	262	270	235	345
Sumur Resapan (unit)	450	522	1.500	840	180	504
Instalasi Pemanenan Air Hujan - IPAH (unit)	-	-	-	-	28	23
JUMLAH	848	1.210	1.824	1.228	520	985

Sumber/ Keterangan :
1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.
2.KTA : Konservasi tanah dan air

Penanganan lahan kritis juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan DAS, seperti forum – forum DAS di beberapa wilayah DAS. Selain itu, ada inisiatif pemberian apresiasi kepada desa – desa di Jawa Tengah yang telah melakukan pengelolaan DAS dengan baik pada tingkat wilayah administratif terkecil (Desa) dalam bentuk Gerakan Desa Peduli DAS Lestari.

Tabel 2.117.

Perkembangan Kelembagaan Desa Peduli DAS Lestari di Jawa Tengah

KATEGORI DESA PEDULI DAS LESTARI	2023	2024
Utama	2	3
Madya	5	1
Pratama	1	4
Rintisan	6	3
JUMLAH	14	11

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Selain penanganan lahan kritis di daratan, penanganan kerusakan ekosistem pesisir dilaksanakan melalui rehabilitasi dan konservasi ekosistem mangrove. Rehabilitasi lahan basah mangrove dilakukan melalui penanaman mangrove, sedangkan konservasi mangrove dilakukan dengan penetapan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) lahan basah mangrove yang dikelola secara kolaboratif multistakeholder di Pemalang (KEE Mojo), Rembang (KEE Pasarbangi-Tireman) dan Kebumen (KEE Muara Kali Ijo).

Tabel 2.118.

Rehabilitasi Mangrove Di Jawa Tengah

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KETERANGAN
Luas rehabilitasi mangrove (ha) (A)	58	19,4	174,12	27	55,7	124	DLHK*

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KETERANGAN
Luas Penanaman Mangrove (ha) (B)	19.6	6.4	9	8,89	8,15	6,52	DKP**
Luas rehabilitasi mangrove per tahun (ha) (A+B)	77,6	25,8	183,12	35,89	63,85	130,52	
Akumulatif Luas rehabilitasi mangrove (ha)	77,6	103,4	286,52	322,41	386,26	516,78	

Sumber:
*1. *) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025*
*2. **) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025*

2.5.6. Konservasi dan Perlindungan Hutan

Selain rehabilitasi lahan kritis/pemulihan DAS, dilakukan juga upaya mempertahankan tutupan lahan melalui inisiatif - inisiatif konservasi kawasan yang dikelola secara kolaboratif multisektor dan multipihak misalnya melalui pembentukan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) dan Cagar Biosfer, maupun kawasan konservasi/ perlindungan keanekaragaman hayati yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti Taman Hutan Raya Mangkunegoro I dan Kebun Raya Baturaden.

Cagar Biosfer merupakan kawasan/situs yang ditetapkan oleh UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan atas upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang terpercaya. UNESCO telah menetapkan 2 (dua) Cagar Biosfer di Jawa Tengah yaitu Cagar Biosfer Karimunjawa–Jepara–Muria seluas 1.236.083,97 Ha dan Cagar Biosfer Merapi–Merbabu–Menoreh seluas 254.876,75 Ha.

Tabel 2.119.

Kerusakan Kawasan Hutan di Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas pencurian pohon (ha)*	22,88	17,41	14,6	91	105,09	423,31
Indikasi Luas Karhutla (ha)**	4.782,00	7.516,00	599,00	107,00	9.965,59	3.726,78
Emisi CO_2 Karhutla (Ton CO_2e)**	491.617,00	85.750,00	90.504,00	19.537,00	1.193.013,00	446.144,88

Sumber :
*) *Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.*
**) www.sipongi.menlhk.go.id (KLHK) / waktu akses 13 Januari 2025 pukul 11.16 WIB

Luasan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jawa Tengah bervariasi setiap tahun, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh pola cuaca. Pada tahun 2023 luasan karhutla mencapai 9.965,59 ha atau terluas pada periode 5 tahun terakhir karena kuatnya pengaruh *el-nino* di tahun 2023 dan menurun di 2024. Hal ini diantisipasi dengan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan pembuatan infrastruktur pemadaman karhutla seperti misalnya sekat bakar. Karhutla menimbulkan kerugian ekonomi (hilang/ rusaknya potensi hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan) dan ekologi (kerusakan habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan).

2.5.7. Pemanfaatan hutan dan Kapasitas Pengelolaan Hutan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Sedangkan pengolahan hasil hutan berkelanjutan ditentukan sejauh mana pengguna kawasan hutan (yang bersifat perorangan, kelompok masyarakat maupun badan hukum swasta) memenuhi kewajiban terhadap izin/kerjasama yang telah ditetapkan dan industri pengolahan hasil hutan tertib dalam penatausahaan hasil hutan. Berikut gambaran perkembangan produksi kayu di Jawa Tengah.

Tabel 2.120.
Produksi Kayu di Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Kayu Asal Hutan Rakyat (m^3)	2.632.756,10	2.682.476,19	1.821.315,97	2,149,541.51	2.061.492,71	2040663,35
Produksi Kayu Asal Hutan Negara (m^3)	278.118,06	361.641,11	249.517.67	328,451.67	332.316,00	287228
Total Produksi Kayu (m^3)	2.910.874,16	3.044.117,30	1.821.315,97	2,477,993.17	2.393.808,71	2.327.891,35

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Salah satu instrumen untuk mencapai pengelolaan hutan lestari adalah Kepatuhan industri pengolahan hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan melalui Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Industri pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikasi SVLK akan memiliki keunggulan kompetitif terutama di pasar internasional karena memenuhi kriteria produk ramah lingkungan (*ecolabel*) sehingga akan mendorong implementasi pengelolaan hutan lestari. Berikut gambaran perkembangan pengguna kawasan, industri pengolahan hasil hutan dan di Jawa Tengah.

Tabel 2.121.
Penggunaan Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pengguna kawasan hutan (unit)	193	201	203	207	190	178
Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m^3 berizin (unit)	967	999	1.007	1.026	1061	1085
Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (unit)	736	838	894	905	955	982

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses kelola serta pemanfaatan hutan oleh masyarakat, memberi kesempatan masyarakat

mengelola hutan secara legal dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan yang tinggal di kawasan hutan. Berikut gambaran perkembangan perhutanan sosial di Jawa Tengah tahun 2019-2024.

Tabel 2.122.
Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Akses kelola Perhutanan Sosial (ha)	35.173,63	35.828,84	79.461,49	79.461,49	93.426,09	104.198,00
Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi (kelompok)	79	81	90	90	119	160
Kepala Keluarga yang terlibat dalam pengelolaan Perhutanan Sosial (kk)	17.358	17.508	19.579	19.579	23.327	34.452

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Sampai dengan tahun 2024, di Jawa Tengah telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 160 SK untuk 34.452 KK di Jawa Tengah dengan luas total sebesar 104.198 Ha. Pengelolaan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial maupun skema lainnya dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH). Khusus untuk pengelolaan usaha Perhutanan Sosial dibentuk kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). KTH dan KUPS dalam pengelolaan kawasan hutan dibina / didampingi oleh Penyuluh Kehutanan untuk meningkatkan kapasitas kelola kawasan, kelola usaha dan kelola lingkungan.

Pengelolaan kawasan hutan oleh KTH memberikan dampak ekonomi pada tingkat tapak yang diukur melalui Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE KTH) merupakan instrumen pengukuran nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor kehutanan dalam hal terkait aktivitas ekonomi berbasis lahan hutan. Adanya data NTE KTH menjadi sarana yang strategis untuk menyusun strategi ekonomi yang efektif dalam pengelolaan kehutanan di tingkat tapak, perkembangan NTE KTH di Jawa Tengah dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.123.
Perkembangan Nilai Transaksi Ekonomi KTH di Jawa Tengah

TAHUN	KTH (UNIT)	NTE KTH (Rp)
2022	*200*	29.625.748.907
2023	*563*	90.778.196.837
2024	*604*	136.466.504.150

Sumber/ Keterangan :
1. *www.simluh.bp2sdm.menlhk.go.id (KLHK)/ waktu akses 13 Januari 2025 pukul 14.18 WIB*
2. *Inisiasi penghitungan NTE KTH dimulai tahun 2022*

Peningkatan nilai NTE KTH di Jawa Tengah pada periode 2022-2024 selain meningkatnya volume transaksi, salah satunya juga disebabkan peningkatan

partisipasi pencatatan yang dilakukan KTH di Jawa Tengah. Namun demikian pendalaman terhadap komponen penyusun NTE KTH seperti nilai transaksi, volume produksi, permintaan pasar, dan faktor-faktor ekonomi lainnya, akan dapat menjadi masukan dalam membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas KTH. Selain itu, NTH KTH ini juga merupakan indikasi kinerja pendampingan Penyuluh Kehutanan. Penyuluh Kehutanan juga melakukan pendampingan terhadap Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang mengelola kawasan hutan yang menjadi objek Perhutanan Sosial. Perkembangan Nilai Ekonomi KUPS yang menunjukkan proses pengelolaan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 2.124.
Perkembangan Nilai Ekonomi KUPS di Jawa Tengah

TAHUN	KUPS*	KOMODITAS**	JENIS KOMODITAS**	NILAI EKONOMI (Rp)***
2020	1	1	Ekowisata	4.000.000
2021	1	3	HHK Lainnya	34.325.000
2022	4	3	Kayu Putih	304.200.000
2023	29	14	Jagung	123.267.230.000
2024	44	51	Hasil Hutan Kayu (Sengon), HHBK (Jagung, tebu, empon-empon, padi, kopi, nanas, pisang, petai, ubi kayu, dll), Jasa lingkungan (wisata).	81.195.236.060

Sumber/ Keterangan :
**) https://gokups.menlhk.go.id (KLHK)/ waktu akses tanggal 14 Januari 2025 pukul 08.12 WIB*
**)KUPS (dengan hasil produk) yang melakukan pemutakhiran data*
***)Jenis Komoditas terbanyak*
****) Nilai Ekonomi Tertinggi*

Nilai Ekonomi KUPS menunjukkan perkembangan aktivitas kelola usaha yang dilakukan oleh KUPS. Pada periode 2020 - 2024 nilai ekonomi KUPS selalu meningkat yang sangat terkait dengan naiknya volume transaksi produk Perhutanan Sosial dan meningkatnya kesadaran partisipasi pemutakhiran data oleh KUPS serta dorongan dari pendamping Perhutanan Sosial. Terkait pengelolaan perhutanan sosial, harus dipahami secara komprehensif meliputi pilar kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola lingkungan. Sehingga untuk menilai keberhasilan perhutanan sosial harus mencakup ketiga pilar dimaksud.

2.5.8. Pertambangan

Kondisi pertambangan di Jawa Tengah memegang peranan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, terutama sebagai penyedia bahan baku untuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, sektor ini menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang memerlukan perhatian serius, termasuk ketidakseimbangan antara kebutuhan material konstruksi dan kapasitas produksi dari tambang berizin, serta masih maraknya aktivitas

penambangan tanpa izin (PETI). Gambar berikut adalah Peta Sebaran Potensi Sumber Daya Mineral di Jawa Tengah.

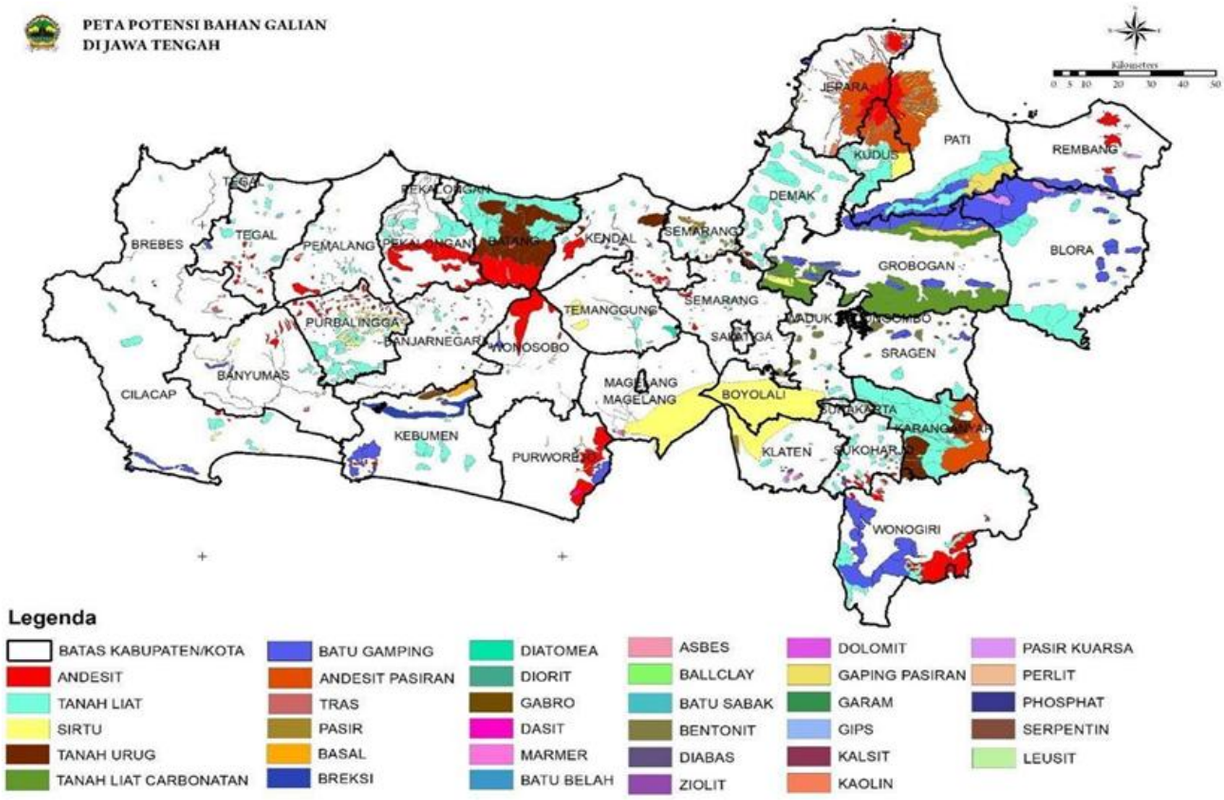

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.76.
Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah

Peta di atas menggambarkan sebaran bahan galian di wilayah provinsi Jawa Tengah, termasuk berbagai jenis mineral seperti andesit, batu gamping, pasir kuarsa, tanah liat, marmer, fosfat, dan lainnya. Peta ini menunjukkan potensi tambang yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, seperti andesit terlihat terkonsentrasi di wilayah pegunungan Kabupaten Pekalongan, Batang hingga Wonosobo. Potensi batu gamping paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Kebumen, Grobogan dan Blora. Wilayah ini terlihat memiliki sebaran yang luas, khususnya di area perbukitan karst. Dengan informasi detail ini, peta dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya mineral yang optimal, mendukung kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan data dari Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI) Jawa Tengah, kebutuhan material untuk mendukung pelaksanaan PSN hingga tahun 2024 diproyeksikan mencapai 110 juta meter kubik. Akan tetapi, kapasitas produksi dari tambang yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) hanya mampu menyediakan sekitar 31 juta meter kubik atau 20% dari kebutuhan tersebut. Kekurangan ini menjadi salah satu pendorong utama bagi aktivitas penambangan ilegal guna memenuhi permintaan pasar. Berikut kondisi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019-2024.

Tabel 2.125.
Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas PETI (ha)	133	128	85,98	278,97	134,83	197,1
Sidak PETI (objek)	114	107	89	160	158	180
Proses Hukum (kasus)	9	8	23	23	1	7
Lokasi di Kab/Kota	28	26	24	24	24	29

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Berdasarkan tabel "Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2024", terlihat bahwa luas aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) mengalami fluktuasi, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021 sebesar 276,97 hektar, dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 197,1 hektar setelah penurunan signifikan di tahun 2023. Upaya pemerintah dalam mengatasi PETI juga terlihat dari peningkatan jumlah sidak dari 114 objek pada tahun 2019 menjadi 180 objek pada tahun 2024, meskipun kasus proses hukum tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah sidak yang dilakukan.

Aktivitas PETI di berbagai wilayah Jawa Tengah tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, tetapi juga menimbulkan kerugian dari sisi penerimaan negara serta membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan aparat penegak hukum secara konsisten mengambil langkah tegas terhadap pelaku aktivitas ilegal melalui Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah yang terdiri dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangani aktivitas pertambangan tanpa izin.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berupaya mengarahkan kebijakan pengelolaan pertambangan untuk mengedepankan prinsip-prinsip *Good Mining Practice* (GMP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertambangan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan untuk menekan aktivitas penambangan tanpa izin yang berpotensi merugikan penerimaan daerah dan mengancam keseimbangan ekologis.

Prinsip GMP dapat diukur melalui persentasi *Good Mining Practice*. Persentase *Good Mining Practice* mengalami peningkatan dari 85,00 persen tahun 2019 menjadi 96,53 persen. Provinsi Jawa Tengah telah meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.126.
Perkembangan *Good Mining Practice* (GMP) di Jawa Tengah
Tahun 2019 - 2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Total Pemegang IUP	360	355	355	309	317	303
Jumlah Pemegang IUP yang melaksanakan GMP	306	302	306	275	306	173
Persentase *Good Mining Practice* (%)	85,00	85,07	86,20	89,00	96,53	63,37

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Penilaian *Good Mining Practice* periode 2024 mengalami penurunan menjadi 63,37 persen karena periode 2024 dan seterusnya menggunakan penilaian baru yang lebih detail mendasari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yaitu terkait 5 aspek kewajiban diantaranya:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3 Pertambangan);
2. Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan);
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang;
4. Upaya konservasi sumberdaya mineral dan Batubara; dan
5. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan baik cair, padat, gas, sampai memenuhi baku mutu lingkungan.

Lima aspek kewajiban kemudian dijabarkan menjadi 15 (lima belas) poin kriteria sebagai berikut:

- Kepala Teknik Tambang;
- Tanda Batas WIUP;
- Statistik kecelakaan tambang;
- Laporan Kegiatan;
- Kelengkapan sarana pendukung;
- Tenaga teknis;
- Pembayaran pajak mineral;
- Teknik pertambangan;
- Pengolahan lanjutan;
- Konservasi bahan tambang;
- Keselamatan operasional pertambangan;
- Keselamatan dan kesehatan kerja;
- Pengelolaan lingkungan hidup;
- Program pemberdayaan masyarakat/CSR;
- Reklamasi dan pascatambang.

Sebagai upaya optimalisasi sektor pertambangan, pemerintah perlu mempercepat penerbitan izin usaha pertambangan yang memenuhi kaidah tata kelola yang baik, meningkatkan kapasitas pengawasan lapangan melalui penggunaan teknologi digital, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, sektor pertambangan di Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Namun, pengelolaan yang berbasis prinsip tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat tetap menjadi prasyarat utama untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

2.5.9. Penataan Ruang

Menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, provinsi Jawa Tengah melakukan revisi Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dilakukan revisi sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan antara matra darat dengan matra laut.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 sebagai dokumen rencana tata ruang matra laut, pada tahun 2022 dilakukan reviu untuk diintegrasikan pada revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2023 dokumen materi teknis yang disusun/direviu telah mendapatkan persetujuan teknis dari Kementerian Kelautan Perikanan, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dalam menyusun Rencana Tata Ruang. Kebutuhan dokumen Rencana Tata Ruang bagi Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, acuan pemanfaatan ruang dalam pembangunan sektoral. Perkembangan status penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127.
Update Status RTRW Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Tengah
Per 3 November 2025

NO	Kabupaten/ Kota	Revisi &PK	Tahapan di Prov		Proses	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sblm UUCK)	BAT KPRD Prov (Pasca UUCK)	Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)		
1	Kabupaten Cilacap	v	v		v	v	Perda No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda 9/2011 tentang RTRW Kab Cilacap 2011-2031 (1 April 2021)
2	Kabupaten Banyumas	v		v	v		Penetapan revisi RTRW Kabupaten Banyumas menggunakan mekanisme melalui permen ATR
3	Kabupaten Purbalingga	v	v		v	v	Perda 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda 5/2011 tentang RTRW Kab Purbalingga 2011-2031(28 Agustus 2020)
4	Kabupaten Banjarnegara	v	v		v	v	Perda No. 6 Tahun 2023 (19 Oktober 2023)

NO	Kabupaten/ Kota	Revisi &PK	Tahapan di Prov		Proses	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sblm UUCK)	BAT KPRD Prov (Pasca UUCK)	Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)		
5	Kabupaten Kebumen	v		v	v	v	Perda No. 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Kebumen (1 Februari 2024)
6	Kabupaten Purworejo	v	v		v	v	Perda No.10 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Purworejo 2021-2041(30Juli2021)
7	Kabupaten Wonosobo	v		v	v	v	Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 - 2043 (10 Juli 2023)
8	Kabupaten Magelang	v		v	v	v	Perda Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Magelang (4 Juli 2024)
9	Kabupaten Boyolali	v	v		v	v	Perda No 8 Th 2019 tentang Perubahan atas Perda 9 Th 2011 tentang RTRW Boyolali 2011–2031.(17 Juli 2019)
10	Kabupaten Klaten	v	v		v	v	Perda Kab. Klaten No. 10 tahun 2021 tentang RTRW Kab.Klaten Tahun 2021-2041 (24 November 2021)
11	Kabupaten Sukoharjo	v	v		v	v	Perda 1 Th 2018 tentang perubahan atas Perda 14 Th 2011 tentang RTRWSukoharjo 2011–2031.(9 Maret 2018)
12	Kabupaten Wonogiri	v	v		v	v	Perda No.2 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Wonogiri 2020-2040
13	Kabupaten Karanganyar	v	v		v	v	Perda 19 Th 2019 tentang perubahan atas Perda 1 Th 2013 tentang RTRW Karanganyar 2013–2032.(27 Agust 2019)
14	Kabupaten Sragen	v	v		v	v	Perda 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Sragen tahun 2011–2031 tanggal 5 Mei 2020

NO	Kabupaten/ Kota	Revisi &PK	Tahapan di Prov		Proses	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sblm UUCK)	BAT KPRD Prov (Pasca UUCK)	Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)		
15	Kabupaten Grobogan	v	v		v	v	Perda Kab. Grobogan No.12 Tahun 2021 ttg RTRW Kab Grobogan Tahun 2021-2041 Ditetapkan 17 Des 2021
16	Kabupaten Blora	v	v		v	v	Perda No. 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Blora 2021-2041 tanggal 1 April 2021
17	Kabupaten Rembang	v	v		v	v	Perda RTRW Kabupaten Rembang No. 2 tahun 2023 per tgl 10 oktober 2023
18	Kabupaten Pati	v	v		v	v	Perda 2/2021 tentang Perubahan Atas Perd a5/2011 tentang RTRW Kab Pati 2010-2030 tgl 1 April 2021
19	Kabupaten Kudus	v		v	v	v	Perda 1/2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 tgl 30 Maret 2022
20	Kabupaten Jepara	v	v		v	v	Perda No. 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (7 September 2023)
21	Kabupaten Demak	v	v		v	v	Perda No.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kab 2020
22	Kabupaten Semarang	v	v		v	v	Perda No. 6 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Semarang
23	Kabupaten Temanggung	v		v	v	v	Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Temanggung 2024-2044
24	Kabupaten Kendal	v	v		v	v	Perda 1 Th 2020 tentang Perubahan atas Perda 20 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Kendal tahun 2011–2031 tanggal 22 Mei 2020
25	Kabupaten Batang	v	v		v	v	Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Batang 2019–2039. (26Des2019)

NO	Kabupaten/ Kota	Revisi &PK	Tahapan di Prov		Proses	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sblm UUCK)	BAT KPRD Prov (Pasca UUCK)	Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)		
26	Kabupaten Pekalongan	v	v		v	v	Perda 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Pekalongan 2020-2040 (5 Agustus 2020)
27	Kabupaten Pemalang	v	v		v	v	Perda 1 Tahun 2018 tentang RTRW Pemalang 2018–2038 (8 Feb 2018)
28	Kabupaten Tegal	v	v		v	v	Perda No. 2 Tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tegal Tahun 2023 - 2043 (21 Juli 2023)
29	Kabupaten Brebes	v	v		v	v	Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Brebes 2019–2039. (23Des2019)
30	Kota Magelang	v	v		v	v	Perda 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011-2031 (17Juli2020)
31	Kota Surakarta	v	v		v	v	Perda No.4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021-2041 tanggal 9 Juli 2021
32	Kota Salatiga	v		v	v	v	Perda Nomor 3 Th 2023 tentang RTRW Kota Salatiga tahun 2023-2043 tgl 12 Juni 2023
33	Kota Semarang	v	v		v	v	Perda No. 5 Th 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Semarang No.14 Th 2011 tentang RTRW Kota Semarang 2011-2031
34	Kota Pekalongan	v	v		v	v	Perda 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No.30 Th 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
35	Kota Tegal	v	v		v	v	Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Kota Tegal No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011–2031 tanggal 24 Feb 2021
	JUMLAH	**35**	**28**	**7**	**35**	**34**	**34**
	%	**100**	**80,00**	**20,00**	**100,00**	**97,14**	**97,14**

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 34 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah pada tabel diatas juga diinformasikan terdapat Rencana Tata Ruang yang masih berproses yaitu Kabupaten Banyumas yang masih dalam proses penyusunan menjadi Peraturan Daerah. Perlu adanya upaya percepatan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melegalkan dokumen Rencana Tata Ruang untuk mempermudah investasi dan juga sebagai acuan pembangunan di daerah.

Tabel 2.128.
Progress Legislasi RDTR Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Per 3 November 2025 terdapat 64 RDTR yang sudah (3)Perda/(61)Perkada

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
1	Kabupaten Banyumas	3	RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto	Perda Kab Banyumas No.6 Tahun 2019 tentang RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto Th. 2019-2039
			RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas	Perbup No. 9 Tahun 2023 tentang RDTR KP Banyumas Tahun 2023-2043
			RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja	Perbup No. 4 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja
2	Kabupaten Batang	3	RDTR Kec Limpung	Perbup No. 13 Tahun 2023 tentang RDTR WP Limpung
			RDTR Kec Tulis	Perda Kab Batang No.6 Tahun 2020 tentang RDTR BWP Tulis Th. 2020 – 2040
			RDTR Gringsing	Perbup No. 12 Tahun 2023 tentang RDTR WP Gringsing
3	Kabupaten Boyolali	6	RDTR Kec Sawit	Perbup 77/2021 tentang RDTR Kec. Sawit Tahun 2021-2041 (12 November 2021)
			RDTR Wilayah Perencanaan Mojosongo	Perbup RDTR Mojosongo No. 68 Tahun 2022 (4 Juli 2022)
			RDTR Kecamatan Banyudono	Perbup RDTR Kecamatan Banyudono No. 106 Tahun 2022 tgl 1 Desember 2022
			RDTR Kecamatan Cepogo	Perbup No. 57 Tahun 2023 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Cepogo Tahun 2023 – 2043 (10 Oktober 2023)
			RDTR WP Kecamatan Ngemplak	Peraturan Bupati Boyolali No. 51 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Ngemplak Tahun 2024-2044
			RDTR WP Kecamatan Boyolali	Peraturan Bupati Boyolali No. 50 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Boyolali Tahun 2024-2044
4	Kabupaten Brebes	4	RDTR Kecamatan Losari	Perbup No. 14 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Losari (26 Mei 2023)
			RDTR Kecamatan Tanjung	Perbup No. 19 Tahun 2023 tentang RDTR Kec. Tanjung

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
			RDTR Kecamatan Bulakamba	Perbup No. 26 Tahun 2023 Tentang RDTR Kecamatan Bulakamba
			RDTR Perkotaan Ketanggungan-Kersana	Peraturan Bupati Brebes No 51 tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana
5	Kabupaten Cilacap	3	RDTR Kaw Perkotaan Cilacap	Perbup Cilacap 75/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021 - 2041 (9 Juni 2021)
			RDTR Kawasan Perkotaan Sidareja	Perbup No. 6 Tahun 2023 tentang RDTR Sidareja (4 April 2023)
			RDTR Kawasan Perkotaan Kroya	Perbup Cilacap No. 29 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kroya
6	Kabupaten Jepara	3	RDTR Kec Jepara	Perbup Jepara No 55 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jepara Tahun 2021 - 2041 (26 Oktober 2021)
			RDTR Mayong	Perbup Jepara Nomor 34 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mayong Tahun 2024-2044
			RDTR Kawasan Perkotaan Kalinyamatan	Perbup Jepara Nomor 7 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kalinyamatan (2 Mei 2024)
7	Kabupaten Kendal	4	RDTR Kecamatan Kaliwungu	Perbup No. 62 tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Kaliwungu
			RDTR Kecamatan Brangsong	Perbup No. 58 tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Brangsong
			RDTR Kecamatan Boja	Perbup No. 46 tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Boja
			RDTR Kecamatan Patebon	Perbup No. 47 tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Patebon
8	Kabupaten Klaten	2	RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan	Perb No. 58 tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan
			RDTR Delanggu	Perbup Klaten No. 38 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Delanggu Tahun 2024-2044 (11 Oktober 2024)
9	Kabupaten Pekalongan	1	RDTR Kec Kedungwuni	Perbup Pekalongan 21/2021 tentang RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni 2021 - 2041 (9 Juni 2021)
10	Kabupaten Purbalingga	2	RDTR Kaw Perkotaan Purbalingga	Perbup Purbalingga 46/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021 - 2041 (10 Juni 2021)
			RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari	Perbup Purbalingga No. 70 Tahun 2023 Tentang RDTR Kawasan perkotaan Bobotsari Tahun 2023-2043 (15 Agustus 2023)

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
11	Kabupaten Purworejo	2	RDTR Perkotaan Purworejo Kutoarjo	Perbup No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2022-2041
			RDTR Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Yogyakarta International Airport	Perbup No. 106 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Tahun 2023-2043 (18 Desember 2023)
12	Kabupaten Sragen	6	RDTR Perkotaan Sragen	Perbup 69 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sragen (22 Desember 2021)
			RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan	Perbup No. 15 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043 (31 Maret 2023)
			RDTR Gemolong	Perbup No. 34 Tahun 2023 tentang RDTR Gemolong (21 Agustus 2023)
			RDTR Miri	Perbup Sragen No. 39 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Miri dan Sekitarnya Tahun 2024-2044
			RDTR KSPN Sangiran dan Sekitarnya	Perbup Kabupaten Sragen No. 46 Tahun 2024 tentang RDTR KSPN Sangiran dan Sekitarnya Tahun 2024-2044 (17 Desember 2024)
			RDTR Sambirejo	Perbup Kabupaten Sragen No. 47 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo Tahun 2024-2044 (17 desember 2024)
13	Kabupaten Sukoharjo	4	RDTR Kec Sukoharjo	Perbup 91/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Sukoharjo Tahun 2020 – 2039
			RDTR Kec Kartasura	Perbup 93/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Kartasura Tahun 2020 – 2039
			RDTR Kec Grogol	Perbup 92/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Grogol Tahun 2020 - 2039
			RDTR Kecamatan Nguter dan Bendosari	Perbup Sukoharjo No. 1 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Tahun 2024-2044 (2 Februari 2024)
14	Kabupaten Wonogiri	3	RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Wonogiri	Peraturan Bupati Wonogiri No. 63 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Wonogiri Tahun 2022-2042
			RDTR Gunungsewu	Peraturan Bupati Wonogiri No. 1 Tahun 2024 (11 Januari 2024)
			RDTR Kecamatan Ngadirojo	Perbup Wonogiri No. 9 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Kecamatan Ngadirojo Tahun 2024-2044
15	Kabupaten Demak	4	RDTR Perkotaan Demak	Perbup Demak No. 11 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Demak (22 Maret 2024)

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
			RDTR Perkotaan Mranggen	Perbup Demak No. 30 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Mranggen (22 Juli 2024)
			RDTR Kawasan Gajah	Perbup Demak No. 17 Tahun 2025 tentang RDTR Kawasan Gajah Tahun 2025- 2045) (17 April 2025)
			RDTR Kawasan Wonosalam	Perbup Demak No. 18 Tahun 2025 tentang RDTR Kawasan Wonosalam Tahun 2025-2045) (17 April 2025)
16	Kabupaten Karanganyar	1	RDTR KP Karanganyar	Perbup Karanganyar 18 Tahun 2024 tentang RDTR KP KARANGANYAR Tahun 2024-2044 (18 Oktober 2024)
17	Kabupaten Semarang	1	RDTR Kecamatan Bergas	Peraturan Bupati Kabupaten Semarang No. 5 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Bergas Tahun 2024-2044
18	Kabupaten Pati	2	RDTR Kecamatan Batangan	Perbup Pati No. 29 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Batangan
			RDTR Kecamatan Pati	Perbup Pati No. 15 Tahun 2025 tentang RDTR Kecamatan Pati Tahun 2025-2045 (5 Mei 2025)
19	Kabupaten Rembang	1	RDTR Perkotaan Lasem	Peraturan Kabupaten Rembang No. 23 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Lasem Tahun 2024-2044
20	Kota Surakarta	1	RDTR Perkotaan Surakarta	Peraturan Walikota Surakarta No. 33 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Surakarta Tahun 2023-2043 (20 Desember 2023)
21	Kota Pekalongan	1	RDTR Kota Pekalongan	Peraturan Walikota Pekalongan No. 21 Tahun 2024 tentang RDTR Kota Pekalongan Tahun 2024-2044 (3 Juli 2024)
22	Kota Salatiga	1	RDTR Kota Salatiga	Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2018 tentang RDTR BWP PK I, II, III, IV Kota Salatiga 2017 - 2030
23	Kota Tegal	1	RDTR Kota Tegal	Perwal No 52/2023 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Tegal 2023-2043 (31 Mei 2023)
24	Kota Semarang	1	RDTR Kecamatan Tugu	Peraturan Walikota Semarang No. 2 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Tugu Tahun 2023-2043 (5 Januari 2024)
25	Kabupaten Kudus	1	RDTR Kawasan Perkotaan Jekulo	Perbup Kudus No. 25 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jekulo Tahun 2024-2044 (19 Desember 2024)
26	Kabupaten Temanggung	1	RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung	Perbup Kab. Temanggung No. 51 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung Tahun 2024-2044 (30 Desember 2024)
27	Kabupaten Grobogan	1	RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi	Perbup Grobogan No. 43 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi (12 Desember 2024)
28	Kabupaten Magelang	1	RDTR Kawasan Perkotaan Mungkid dan Sekitarnya	Perbup Magelang No. 17 Tahun 2025 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mungkid dan

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
				Sekitarnya Tahun 2025- 2045 (27 Maret 2025)
Total	248Kabupaten/Kota	3 Perda/ 61 Perkada RDTR (64 RDTR)		

Sumber : Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, 2024.

Dalam rangka pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20 persen, pemerintah provinsi perlu melakukan upaya pendorongan untuk mewujudkan hal tersebut. Rata-rata luasan RTH publik di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 7,86 persen dari luas perkotaan di Jawa Tengah. Proporsi ini tentunya masih jauh dari angka sebagaimana yang diamanatkan.

Tabel 2.129.

Rata – Rata Luasan RTH Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

No	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023	
		Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%
1	Kota Semarang	2.700,68	6,99	2.700,68	6,99	2.700,68	6,99	2.700,68	6,99
2	Kab. Semarang	756,48	6,73	756,48	6,73	382,87	6,31	382,87	6,31
3	Kota Salatiga	482,16	8,33	482,16	8,33	482,16	8,33	482,16	8,33
4	Kab. Kendal	477,62	5,43	477,62	5,43	393,82	4,48	393,82	4,48
5	Kab. Demak	392,02	5,49	392,02	5,49	311,56	4,37	311,56	4,37
6	Kab. Grobogan	869,91	11,70	869,91	11,70	869,91	11,70	214,70	7,73
7	Kab. Pati	615,39	5,66	615,39	5,66	352,47	3,88	352,47	3,88
8	Kab. Kudus	1.036,77	9,92	1.036,77	9,92	1.036,77	9,92	287,25	2,76
9	Kab. Jepara	449,05	4,72	468,35	4,88	468,35	4,88	468,35	4,88
10	Kab. Blora	547,84	12,34	547,84	12,34	547,84	12,34	325,32	2,68
11	Kab. Rembang	448,48	16,33	448,48	16,33	448,48	16,33	416,94	5,32
12	Kab. Klaten	611,43	6,17	611,43	6,17	547,82	5,58	547,82	5,58
13	Kab. Boyolali	114,44	3,20	195,68	4,96	195,68	4,96	195,68	4,96
14	Kab. Wonogiri	357,85	5,80	357,85	5,80	316,59	7,24	316,59	7,24
15	Kab. Sukoharjo	998,32	6,15	998,32	6,15	177,40	2,59	177,40	2,59
16	Kab. Sragen	208,64	2,78	242	5,57	242	5,57	242,00	5,57
17	Kota Surakarta	583,78	12,35	583,78	12,35	583,78	12,35	583,78	12,35
18	Kab. Karanganyar	252,65	7,40	252,65	7,40	252,65	7,40	252,65	7,40
19	Kab. Purworejo	524,41	7,30	524,41	7,30	524,41	7,30	468,70	7,23
20	Kab. Temanggung	245,45	7,56	245,45	7,56	245,45	7,56	279,82	6,45
21	Kab. Wonosobo	504,13	14,41	504,13	14,41	504,13	14,41	468,04	5,88
22	Kab. Kebumen	1.434,68	11,00	1.434,68	11,00	1.434,68	11,00	540,26	3,63
23	Kab. Magelang	543,62	3,47	1.055,54	9,30	1.055,54	9,30	1.055,54	9,30
24	Kota Magelang	449,15	24,22	449,15	24,22	449,15	24,22	449,15	24,22
25	Kab. Banjarnegara	403,23	10,03	403,23	10,03	403,23	10,03	208,80	4,73
26	Kab. Banyumas	1.178,83	5,79	1.178,83	5,79	1.178,83	5,79	786,95	4,81
27	Kab. Batang	345,47	7,51	345,47	7,51	345,47	7,51	155,43	4,64
28	Kab. Brebes	1.185,43	9,62	1.185,43	9,62	1.185,43	9,62	941,56	4,79
29	Kab. Cilacap	1.677,33	6,48	1.677,33	6,48	1.677,33	6,48	993,02	6,06
30	Kota Pekalongan	294,91	6,35	294,91	6,35	294,91	6,35	294,91	6,35
31	Kota Tegal	592,9	15,12	592,9	15,12	592,9	15,12	592,90	15,12
32	Kab Pekalongan	196,09	3,89	120,17	4,53	120,17	4,53	120,17	4,53
33	Kab. Pemalang	1.267,67	16,72	1.267,67	16,72	1.267,67	16,72	473,62	3,71

No	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023	
		Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%
34	Kab. Purbalingga	164,49	5,89	164,49	5,89	164,49	5,89	164,49	5,89
35	Kab. Tegal	377,46	5,70	377,46	5,70	203,53	6,97	203,53	6,97
36	Jumlah Provinsi Jawa Tengah	23.288,76	7,49	23.858,66	7,91	21.958,15	7,86	16.848,93	5,76

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng.

Selain itu upaya pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan pengawasan terhadap kinerja Penataan Ruang baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui sistem pengawasan teknis (SIWASTEK). Pengawasan penataan ruang merupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengawasan penataan ruang dilaksanakan terhadap kinerja pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pelaksanaan penataan ruang; kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang; serta kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 216 PP No. 21/2021 diamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN melalui sistem SIWASTEK. Selain itu juga sebagai bentuk provinsi melaksanakan tugas pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Provinsi Jawa Tengah juga telah membentuk Tim Pengawas Provinsi sebagai pelaksana kegiatan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2024.

Tujuan dari Pengawasan Kinerja TURBINLAK Penataan Ruang dan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai indikator kemajuan Penataan Ruang suatu daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Hasil Siwastek kabupaten kota pada tahun 2024 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.130.
Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Nilai Akhir Kinerja TURBINLAK	Keterangan
1	Kota Tegal	99.35	Baik
2	Kota Pekalongan	82.64	Baik
3	Jepara	82.54	Baik
4	Sukoharjo	78.31	Sedang
5	Rembang	78.26	Sedang

6	Batang	78.25	Sedang
7	Purbalingga	77.98	Sedang
8	Temanggung	76.52	Sedang
9	kota Semarang	75.63	Sedang
10	Kota Magelang	74.40	Sedang
11	Klaten	74.23	Sedang
12	Pekalongan	74.21	Sedang
13	Grobogan	73.11	Sedang
14	Salatiga	72.00	Sedang
15	Banyumas	70.21	Sedang
16	Wonosobo	68.52	Sedang
17	Kebumen	63.80	Sedang
18	Purworejo	61.87	Sedang
19	Brebes	60.52	Sedang
20	Pati	59.07	Sedang
21	Cilacap	58.49	Sedang
22	Tegal	58.20	Sedang
23	Surakarta	57.73	Sedang
24	Blora	55.41	Sedang

Sumber: Dinas PUSDA25TARU Prov. Jateng.

2.5.10. Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketenagalistrikan merupakan faktor penting sebagai pendukung roda pembangunan perekonomian di satu wilayah. Sistem ketenagalistrikan Jawa Tengah ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi antar Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dengan daya mampu sebesar 44.918,40 MW (PT. PLN (Persero), 2023) menjadikannya sistem Ketenagalistrikan terbesar di Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki daya mampu sebesar 8.013 MW dengan beban puncak mencapai 5.210 MW, sehingga memiliki cadangan daya sebesar 2.03 MW (35%). Lebih rinci mengenai kondisi kelistrikan di Jawa Tengah tergambar pada peta di bawah.

Sumber: PLN , Agustus 2024

Gambar 2.77.
Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY

Berdasarkan peta sistem kelistrikan Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, wilayah ini memiliki infrastruktur ketenagalistrikan yang kuat, termasuk jaringan SUTET sepanjang 2.827 kms, SUTT sepanjang 4.278 kms, Gardu Induk (GI) dengan kapasitas 10.747 MVA, serta GITET dengan kapasitas 6.500 MVA. Kelistrikan Jawa Tengah dan DIY disuplai dari 6 subsistem (SS), antara lain : Subsistem Ungaran 1-2 (459 MW, 33%), Subsistem Pedan 1-2 (161 MW, 20%), Subsistem Pedan 3-4 (210 MW, 19%), Subsistem Tanjung Jati (390 MW, 22%), Subsistem Kesugihan (410 MW, 29%) , dan Subsistem Pemalang (329 MW, 41%). Peta di atas menggambarkan distribusi dan keandalan jaringan kelistrikan yang mendukung kebutuhan listrik di seluruh wilayah Jawa Tengah dan DIY.

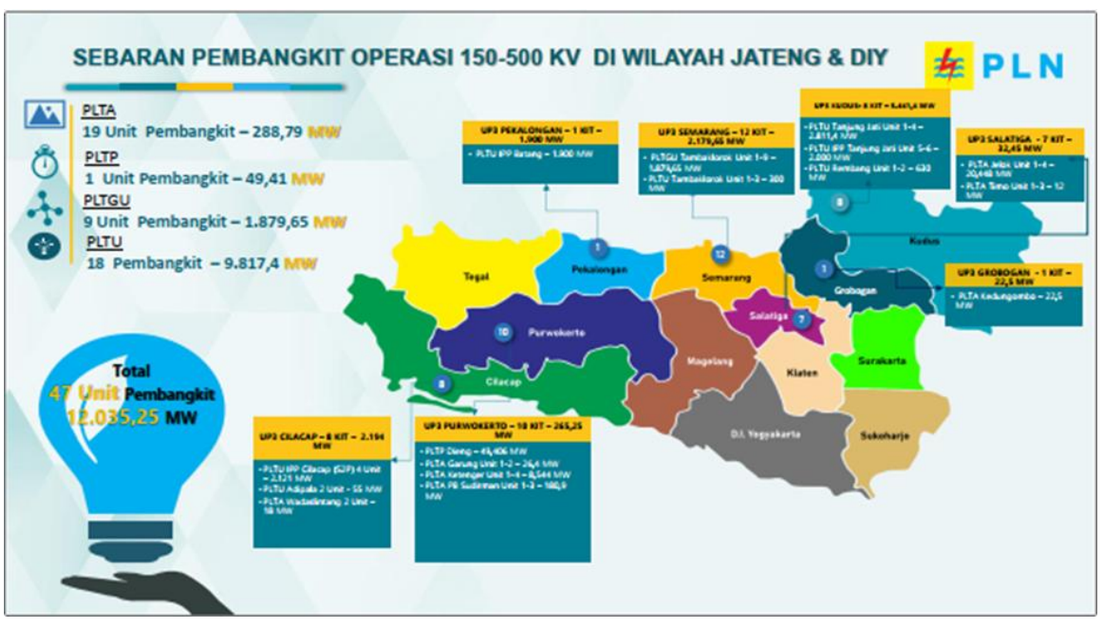

Sumber: PLN , Agustus 2024

Gambar 2.78.
Sebaran Pembangkit Operasi 150-500 KV di Jawa Tengah dan DIY

Sumber: PLN , Agustus 2024.

Gambar 2.79.
Sebaran Pembangkit Operasi 20 KV di Jawa Tengah dan DIY

Dalam hal pembangkit, baik pembangkit operasi 150-500 KV maupun 20 KV, kapasitas total mencapai 12.123,199 MW, dengan dominasi pembangkit berbasis batubara (PLTU) sebesar 80,97 persen dari total kapasitas pembangkit. Dominasi ini menunjukan bahwa energi fosil, terutama batu bara, masih menjadi tulang punggung dalam penyediaan listrik untuk rumah tangga, industri, dan sektor lainnya di Jawa Tengah karena skalanya yang besar dan biaya operasional yang relatif rendah. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik memiliki dampak emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi, termasuk karbon dioksida (CO_2) dan partikel-partikel polutan lainnya. Emisi ini berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Selama kurun waktu 2014 hingga 2024 menunjukkan peningkatan konsumsi energi listrik dari 19.631 GWh pada tahun 2014 menjadi 30.391 GWh pada tahun 2024. Lebih detil terlihat pada gambar di bawah.

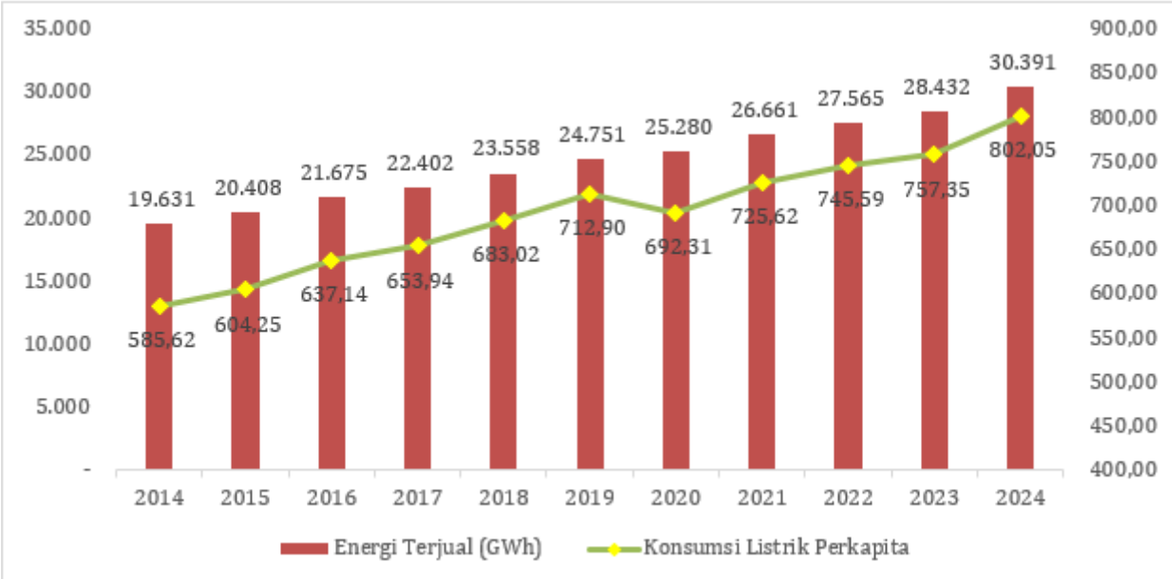

Sumber: Statistik PLN, BPS diolah, 2024

Gambar 2.80.
Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2024 (GWh)

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, energi terjual di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari 19.631 GWh pada tahun 2014 menjadi 30.391 GWh pada tahun 2024, dengan total peningkatan sebesar 54,8 persen. Pertumbuhan tahunan rata-rata tercatat sekitar 4,48 persen per tahun selama periode tersebut. Tren konsumsi listrik per kapita juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 585,62 kWh/kapita pada tahun 2014 menjadi 802,05 kWh/kapita pada tahun 2024, mencerminkan kenaikan sebesar 36,96 persen. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk, yang pada tahun 2024 mencapai lebih dari 37,8 juta jiwa, serta bertambahnya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, peningkatan konsumsi listrik per kapita mencerminkan keberhasilan program elektrifikasi di Jawa Tengah, yang memperluas akses listrik dan meningkatkan keandalan pasokan. Program pendukung seperti *electrifying lifestyle* melalui pengembangan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), *electrifying agriculture*, dan program-program lainnya juga berperan dalam peningkatan konsumsi listrik per kapita.

Peningkatan konsumsi listrik per kapita sering kali dianggap sebagai indikator positif dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan konsumsi listrik per kapita mencerminkan berbagai hal positif, seperti meningkatnya aktivitas ekonomi dengan bertumbuhnya sektor industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, hal ini menunjukkan semakin luasnya akses listrik ke masyarakat, termasuk di daerah terpencil, berkat keberhasilan program elektrifikasi. Perubahan pola hidup juga terlihat, di mana masyarakat kini lebih banyak menggunakan peralatan listrik untuk mendukung kenyamanan, efisiensi, dan produktivitas sehari-hari, seperti pendingin ruangan, pemanas air, dan perangkat digital.

Rasio Elektrifikasi (RE) Jawa Tengah sejak tahun 2020 telah mencapai 99,99 persen dengan Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) di Jawa Tengah telah mencapai 100 persen. Masih terdapat 0,01 persen KK belum

memiliki listrik secara mandiri dan sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan akses listrik mandiri bagi rumah tangga tidak mampu melalui program listrik gratis yang telah diinisiasi sejak Tahun 2014. Jumlah kumulatif pemasangan sambungan listrik gratis hingga Tahun 2024 sejumlah 136.733 unit. Perkembangan rasio elektrifikasi dan akumulasi sambungan listrik gratis selama tahun 2019-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131.
Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Elektrifikasi (%)	99,91	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
2.	Sambungan Listrik Gratis kumulatif (Unit)	27.225	40.173	55.280	78.955	107.892	136.733

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

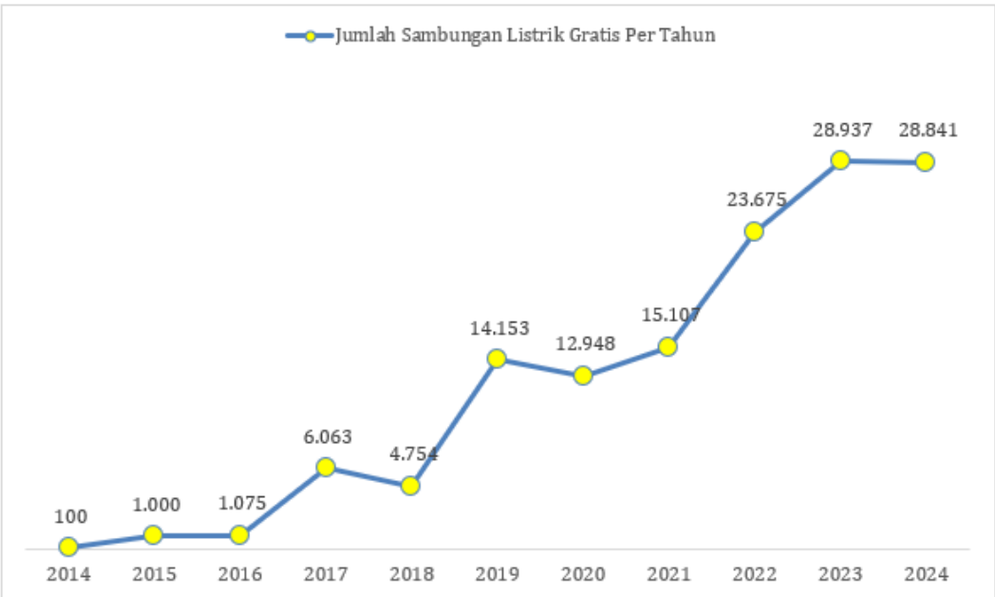

Sumber: PLN, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.81.
Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2024
Tahunan (Unit)

Kecukupan pemenuhan listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang merupakan perbandingan daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan. Idealnya Rasio Ketersediaan Daya Listrik menunjukkan angka 1 atau 100 persen dengan cadangan daya yang sehat berada di kisaran 20 persen hingga 30 persen dari kebutuhan listrik. Cadangan ini diperlukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik, mengantisipasi lonjakan permintaan, serta menghadapi kemungkinan gangguan pada pembangkit atau jaringan listrik.

Tabel 2.132.
Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Daya Listrik Terpasang (MW)	6.365	7.203	7.203	9.200	9.200	9.200
2	Kebutuhan Listrik (MW)	5.480	5.588	5.720	6.306	6.044	6.158
3	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (angka)	1,16	1,29	1,26	1,46	1,52	1,49

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio ketersediaan daya listrik di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan tren yang stabil meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019, daya listrik terpasang sebesar 6.365 MW dengan kebutuhan listrik sebesar 5.480 MW menghasilkan rasio ketersediaan daya sebesar 1,16. Rasio ini terus meningkat hingga 1,29 pada tahun 2020, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 1,26 pada tahun 2021. Peningkatan kembali terlihat pada tahun 2022 dengan rasio 1,46, meskipun stabil di angka 1,52 pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 1,49 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki daya yang cukup memadai sepanjang periode tersebut, dengan rasio yang selalu berada di atas 1, menunjukkan daya terpasang yang lebih besar dibandingkan kebutuhan listrik, sehingga menjamin keandalan pasokan listrik.

Dengan angka rasio ketersediaan daya listrik tersebut memberikan beberapa keuntungan strategis, seperti jaminan pasokan listrik yang sangat aman dan stabil, bahkan saat terjadi gangguan pembangkit atau lonjakan konsumsi. Tingginya rasio ketersediaan daya listrik diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri baru skala besar dan ekspansi industri eksisting agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah siap untuk menerima investasi baru khususnya di Kawasan Industri yang telah tersedia di Jawa Tengah diantaranya Batang Industrial Park (KI Segayung), Grand Batang City (KIT Batang), KI Kendal (KEK Kendal), KI Wijayakusuma, Tanjung Emas *Export Processing Zone* (Lamicitra Nusantara), KI Terboyo, LIK Bugangan Baru Semarang, *Jatengland Industrial Park* Sayung, KI Candi, Taman Industri BSB, dan KI Cilacap. Selain itu, cadangan daya yang besar memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan untuk mendorong elektrifikasi sektor-sektor baru seperti pertanian, transportasi listrik, sehingga mendukung pemerataan energi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi distribusinya dan dorongan transisi energi dari sisi produksi energi listriknya. Dominasi oleh energi fosil pada pembangkit listrik di Jawa Tengah dapat menghambat pertumbuhan energi terbarukan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Jawa Tengah masih memiliki ketergantungan pada energi fosil. Maka diperlukan peta jalan transisi energi. Peta jalan Provinsi Jawa Tengah terkait transisi energi menuju energi baru terbarukan termuat dalam Perda RUED Provinsi Jateng No 12 Tahun 2018. Dalam perda tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah menargetkan persentase

EBT dalam bauran energi sebesar 21,32 persen tahun 2025 dan 28,82 persen di tahun 2050. Kolaborasi multi-pihak, yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/provinsi menjadi kebutuhan bersama dan masing-masing pihak memiliki *resources* dan *capacity* yang bisa dikontribusikan untuk menyiapkan fasilitas energi terbarukan. Dalam hal ini semua pihak memberikan kontribusi sesuai kewenangan. Perkembangan persentase EBT dalam bauran energi selama tahun 2014-2024 sebagai berikut:

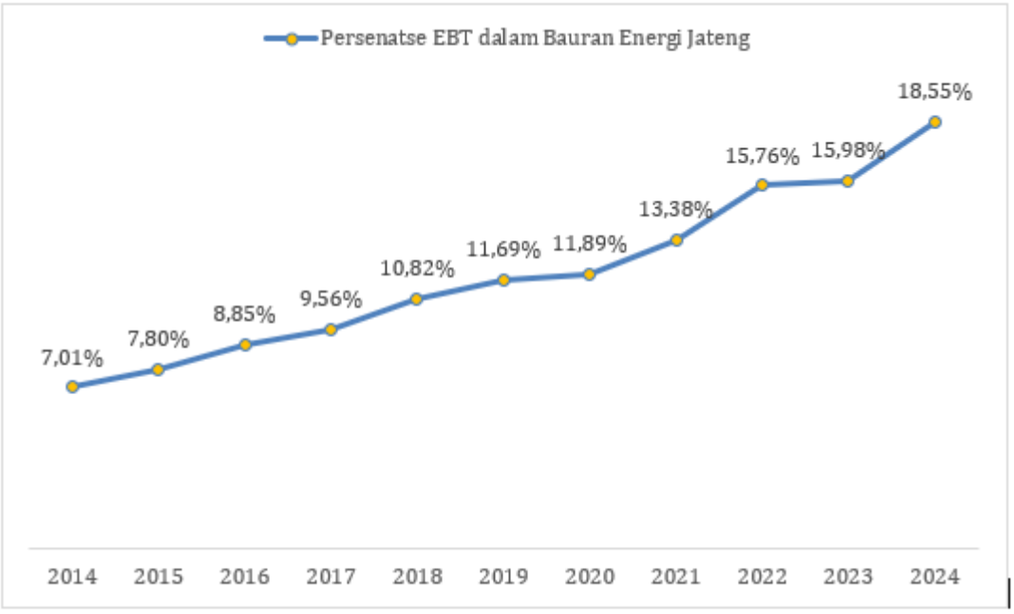

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.82.
Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2024

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, proporsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2014 hingga 2024. Pada tahun 2014, persentase EBT tercatat sebesar 7,01 persen dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 18,55 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan sebagai bagian dari bauran energi, sejalan dengan upaya transisi energi di Indonesia.. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta mendukung target keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon di Jawa Tengah.

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, dukungan dalam penurunan emisi gas rumah kaca, antara lain melalui pelaksanaan penghargaan Desa Mandiri Energi, Hemat Energi dan Air, dan Audit Energi. Penghargaan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pemerintah Desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan diversifikasi energi dan pengembangan teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah. Adapun upaya konservasi energi diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan penghargaan Gerakan Hemat Energi dan Air serta audit energi. Gerakan Hemat Energi dan Air menjadi sebuah tindakan promotif untuk mendorong peran serta pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri dalam menggerakkan perilaku budaya

hemat energi dan air di masa yang akan datang serta mendorong upaya konservasi energi untuk mendukung ketahanan energi. Sedangkan kegiatan Audit Energi dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik gedung, baik instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan konservasi energi.

Masyarakat sebagai motor penggerak peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan diperlukan langkah strategis untuk mengajak peran serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi daerah, salah satunya melalui program penyuluh energi. Program penyuluh energi bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih, memakai, mengembangkan energi baru terbarukan yang tersedia dan berpotensi di sekitarnya, sehingga akan ada perubahan perilaku masyarakat dari penggunaan energi konvensional (energi fosil) sebagai sumber energi utama menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan serta memberikan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan pengelolaan energi di daerah. Adanya program penyuluh energi dapat menjadi katalis terwujudnya desa mandiri energi di Jawa Tengah.

Walaupun penggunaan energi fosil masih mendominasi tetapi penggunaan EBT menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan, mengingat potensi EBT di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain energi surya, air, biogas, *waste to energy* (biomassa), gas rawa, dan panas bumi. Berikut potensi EBT di Jawa Tengah berdasarkan data kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah:

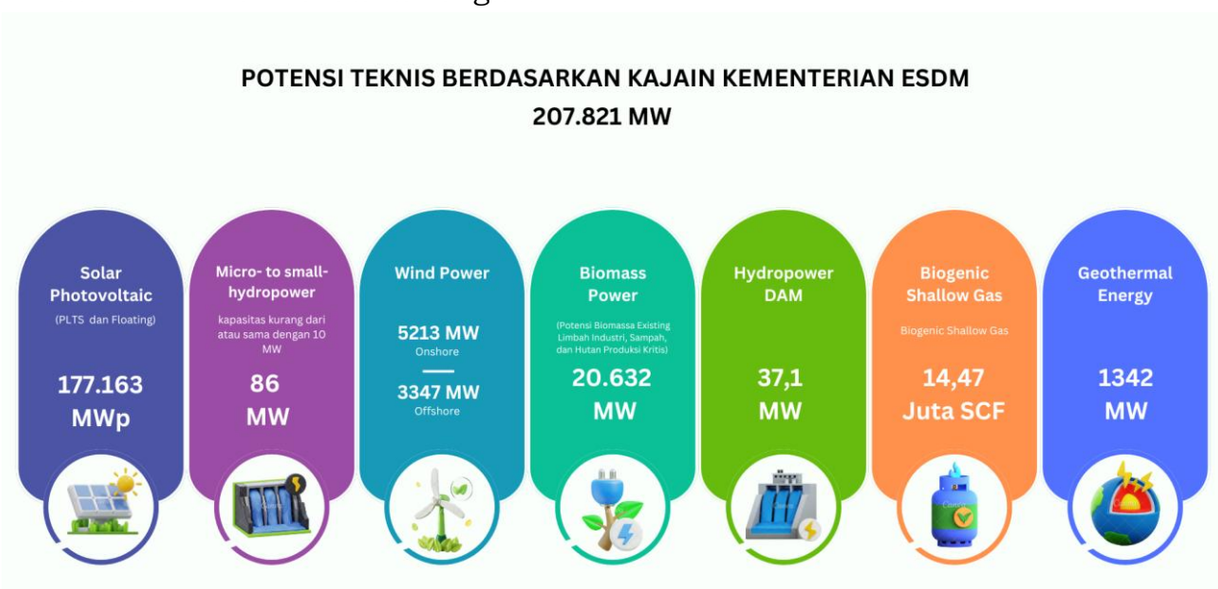

Sumber: Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.83.
Potensi Teknis EBT Jawa Tengah

Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi baru terbarukan, khususnya dari tenaga surya, *Pumped Hydro Energy Storage, Micro-to small-hydropower*, Tenaga angin, Biomassa, Geothermal, dan Gas Rawa dengan total potensi teknis sebesar 207,8 GW. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi teknis tenaga surya di Jawa Tengah mencapai sekitar 177,28 GW (+/- 85%) dengan cakupan lahan yang memungkinkan untuk pemasangan panel surya secara luas. Selain itu, terdapat potensi mikro-hidro dengan kapasitas

teknis sekitar 86 MW yang dapat dimanfaatkan pada aliran-aliran sungai kecil yang tidak berpotensi mengganggu ekosistem sungai. Sumber energi biomassa juga menjanjikan, terutama dari limbah sampah, pertanian seperti sekam padi, kayu yang dapat diolah menjadi energi melalui pembangkit listrik berbasis biomassa. Kemudian potensi teknis tenaga angin *onshore* di Jawa Tengah mencapai 5.213 MW dan 3347 MW pada *offshore*. Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi panas bumi mencapai 1342 MW. Potensi ini tersebar di beberapa wilayah dengan karakteristik geothermal yang mendukung, seperti Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dieng, WKP Gunung Ungaran, WKP Umbul Telomoyo, WKP Baturaden, WKP Guci, dan WKP Gunung Lawu. Saat ini, PLTP Dieng telah beroperasi dengan kapasitas sekitar ± 60 MW dan masih memiliki potensi pengembangan lebih lanjut hingga lebih dari 400 Mwe. Dengan pemanfaatan potensi panas bumi yang optimal, Jawa Tengah dapat menjadi salah satu pusat pembangkit listrik panas bumi terbesar di Indonesia, mendukung keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, Jawa Tengah memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan kontribusi energi terbarukan berbasis pada potensi lokal yang dimiliki.

Infrastruktur gas bumi juga memiliki peran penting dalam ketahanan sektor energi Jawa Tengah. Upaya penyediaan Gas Bumi di Jawa Tengah bervariasi, dari *Compressed Natural Gas* (CNG) *Truck, Liquefied Natural Gas* (LNG), sampai dengan Pipa Gas. Jaringan gas rumah tangga sudah berkembang di Jawa Tengah, utamanya di Kota Semarang dan Kabupaten Blora. Total pemanfaatan jaringan gas rumah tangga di Jawa Tengah saat ini mencapai ±17.500 SR (Sambungan Rumah). Jaringan Pipa Gas transmisi yang baru diresmikan pada November 2023 yaitu Cisem Tahap I (Semarang-Batang) dengan panjang 62 km telah mendukung industri di Pantura Jawa Tengah. Selanjutnya, direncanakan pembangunan jaringan Pipa Transmisi Gas Cisem Tahap II (Batang-Cirebon), dengan total panjang ruas pipa Batang sampai dengan Kandang Haur Timur sekitar 245 km yang akan dibangun mulai tahun 2024 hingga 2025.

Sumber: Keputusan Menteri ESDM nomor lO.K/MG.Ol/MEM.M/2023

Gambar 2.84.

Peta Infrastruktur dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Region III

Meskipun jaringan pipa gas telah dibangun, truk CNG dan terminal LNG tetap diperlukan dalam jangka panjang untuk melayani masyarakat yang berada di daerah terpencil atau di tempat yang belum atau tidak memiliki pipa transmisi dan distribusi. LNG menawarkan fleksibilitas dan jaminan pasokan gas. Jaringan Pipa Gas juga telah mendukung pembangkit listrik. PLTGU Tambak Lorok Blok 3 (779 MW) di Semarang menjadi contoh penggunaan gas bumi yang efisien untuk pembangkitan listrik. Dengan integrasi infrastruktur Pipa Gresem (Gresik-Semarang), Pipa Cisem I (Semarang-Batang), dan Pipa Cisem II (Batang-Cirebon), dapat memberikan layanan gas bumi yang semakin baik dan telah dipersiapkan secara desain untuk menunjang kebutuhan permintaan gas yang besar di Jawa Tengah. Dengan adanya jaringan gas bumi yang juga dapat dikembangkan untuk rumah tangga akan mengurangi ketergantungan pada gas LPG yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari impor karena sumber jaringan gas bumi di jawa tengah berasal dari sumber gas domestik (Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru-WK Blora, Lapangan Cendana Alas Tua-WK Cepu, dan Lapangan Sumber 2-WK Tuban). Kombinasi ini memperkuat fondasi ketahanan energi provinsi dalam menghadapi tantangan energi di masa depan.

Pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan kebutuhan sektor ekonomi. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi air tanah sebesar 8.147.547.333 m^3 yang tersebar di 31 cekungan air tanah (CAT) dengan empat CAT yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu CAT Kendal, CAT Subah, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Bumiayu. Disamping potensinya yang besar, namun tekanan terhadap sumber daya ini kian meningkat, terlihat dari penurunan muka air tanah di sejumlah wilayah, terutama di kawasan industri seperti Semarang, Demak, dan Pekalongan.

Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Indeks Ketersediaan Air Tanah Jawa Tengah cenderung meningkat secara fluktuatif selama kurun waktu 2019 hingga 2024, dari 3,08 menjadi 3,65.

Tabel 2.133.
Indeks Ketersediaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah potensi aman pengambilan air tanah	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750	8.147.597.463
Jumlah pengambilan air tanah	263.724.945	269.109.632	228.463.997	223.483.855	218.134.508	1.339.291.425
Indeks Ketersediaan Air Tanah	3,08	3,05	3,59	3,67	3,76	3,65

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Terdapat perbedaan dalam formulasi perhitungan indeks ketersediaan air tanah. Penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah periode 2024 dan seterusnya menggunakan penilaian baru yang lebih rinci, yaitu terkait dengan faktor

pengambilan air tanah. Pada periode 2019 sampai dengan 2024, penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah untuk faktor pengambilan hanya menggunakan parameter jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin saja. Sedangkan periode 2024 dan seterusnya, faktor pengambilan akan menggunakan parameter jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin dan jumlah pengambilan air tanah dari Rumah Tangga non PDAM. Rumus Indeks Ketersediaan Air Tanah Tahun 2024 dan seterusnya yaitu "Potensi aman (60 persen) dibanding dengan pengambilan air tanah".

Mengacu pada hasil evaluasi zona pemanfaatan dan konservasi tahun 2022 yang dilakukan oleh Dinas ESDM, terdapat 3 CAT yang masuk kategori zona kritis serta 2 CAT yang masuk zona rusak. Tiga CAT yang terdapat Zona Kritis adalah CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali. Sedangkan dua CAT yang terdapat zona rusak adalah CAT Semarang-Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang. Kondisi CAT yang terdapat zona kritis dan rusak disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Kondisi kualitas air tanah yang memiliki nilai daya hantar listrik (DHL) tinggi, >1000 µs/cm, serta nilai zat terlarut (TDS) >1500 ppm;
2. Kondisi muka air tanah mengalami penurunan kedudukan >40% dari kedudukan awal.

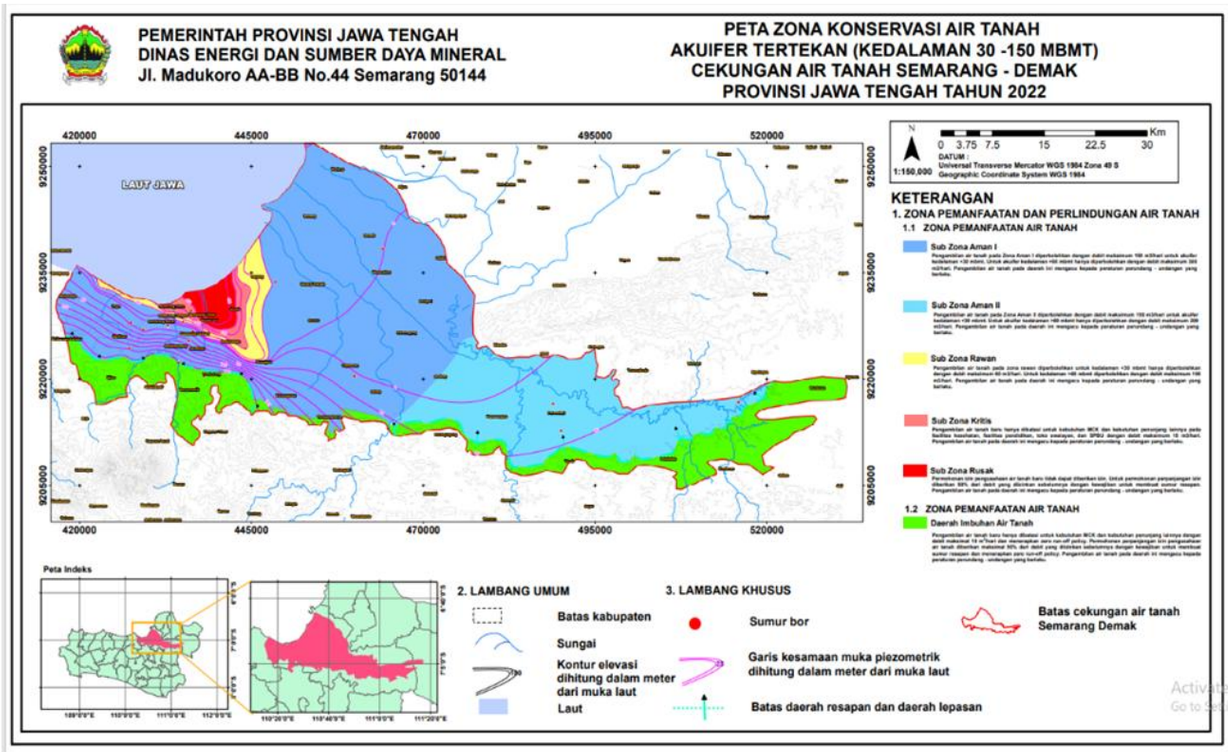

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2022

Gambar 2.85.

Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Semarang-Demak

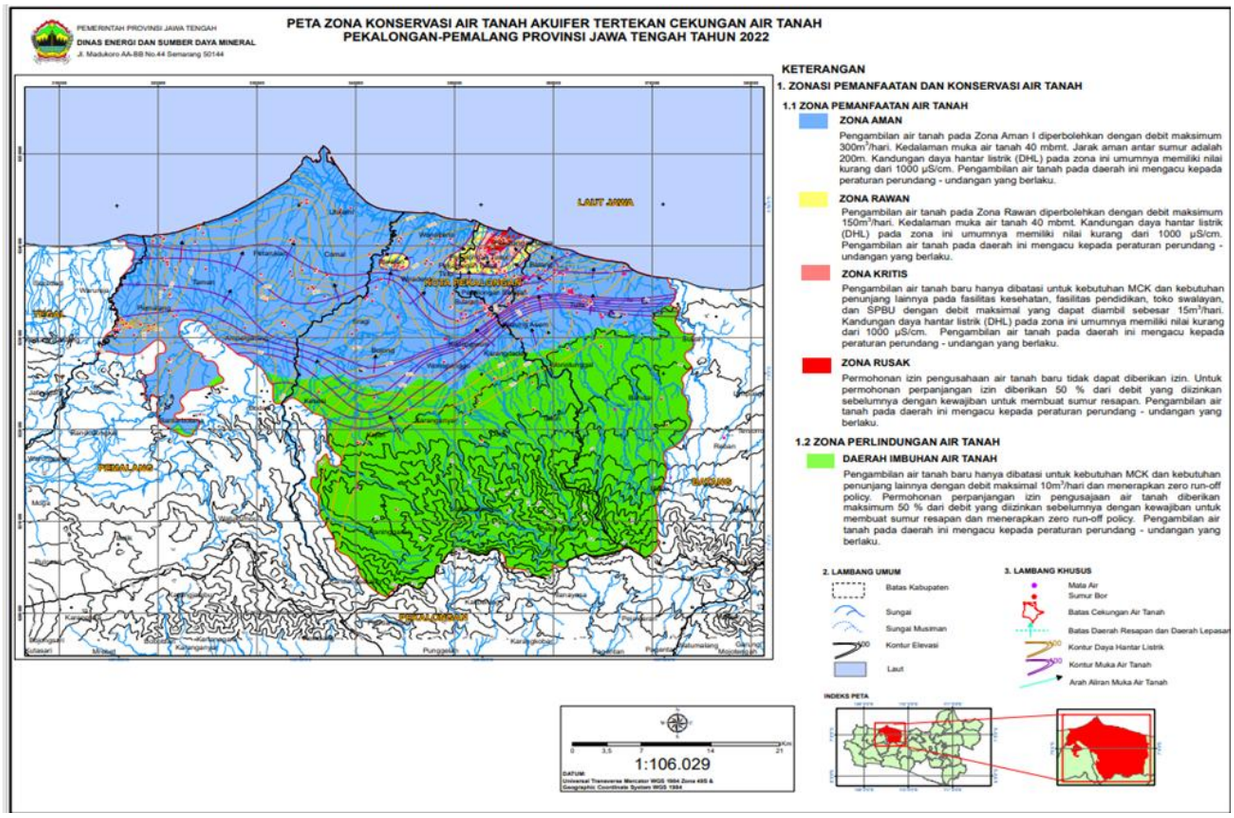

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2022.

Gambar 2.86.
Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Pekalongan-Pemalang

Air tanah menjadi andalan utama bagi kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Di perkotaan, sebagian besar masyarakat yang belum terjangkau layanan PDAM bergantung pada sumur bor seperti di Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Sementara itu, sektor pertanian sering menggunakan air tanah untuk irigasi, terutama saat musim kemarau. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali membawa dampak serius seperti intrusi air laut di kawasan pesisir, kerusakan ekosistem akibat penurunan muka air tanah, hingga amblesan tanah/*land subsidence* di area padat penduduk. Dampak serius tersebut perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingat di sepanjang wilayah Pantai Utara Jawa Tengah, yang meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, dan Rembang telah mengalami amblesan tanah/*land subsidence*, seperti yang terlihat pada gambar dibawah.

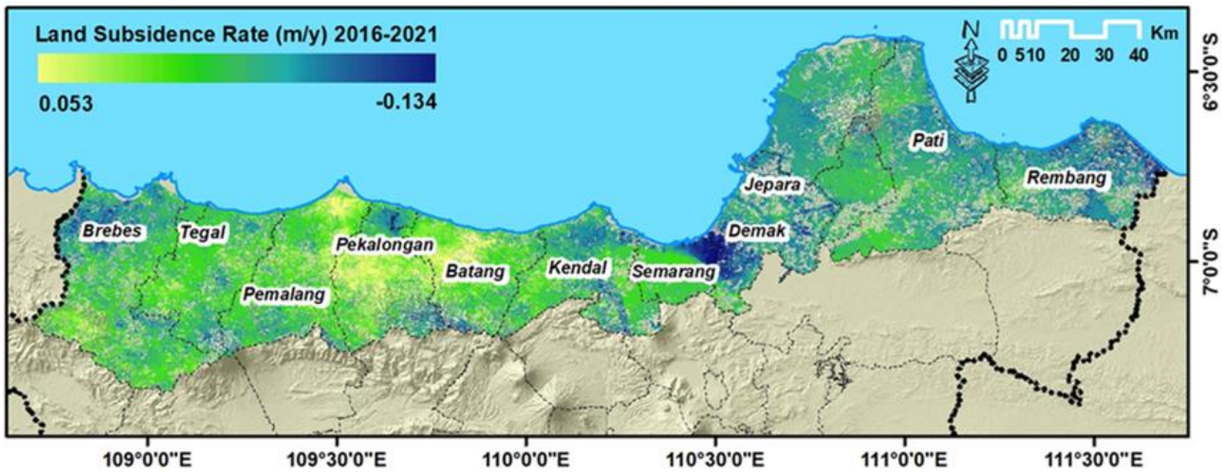

Sumber : (Yananto, et al., 2024)

Gambar 2.87.
Land subsidence rate in the North Coast of Central Java Indonesia based on Sentinel-1 SAR data in 2016–2021

Warna **biru tua** menunjukkan laju penurunan tertinggi, sementara **hijau muda** menunjukkan wilayah dengan laju penurunan yang lebih rendah atau stabil. Peta tersebut menunjukkan variasi spasial dalam laju amblesan tanah di sepanjang Pantai Utara Jawa Tengah. Secara khusus, daerah seperti Semarang, Pekalongan, dan Demak menunjukkan tingkat penurunan tanah yang mengkhawatirkan, dengan kisaran antara **– 13 hingga 5 cm per tahun**. Di bagian barat seperti **Brebes dan Tegal** serta bagian timur seperti **Pati dan Rembang**, laju penurunan cenderung lebih rendah, ditunjukkan oleh warna hijau muda dan sebagian biru muda (sekitar **-5 cm hingga -8 cm/tahun**). Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan aktivitas antropogenik seperti eksploitasi air tanah yang lebih sedikit atau kondisi geologi yang lebih stabil. Penurunan tanah paling parah cenderung terjadi di **wilayah perkotaan padat penduduk dan industri** seperti Semarang, Pekalongan, dan Demak, yang kemungkinan besar terkait dengan: **Eksploitasi air tanah secara berlebihan** sebagai sumber air baku; **Beban infrastruktur** dari urbanisasi yang pesat; **Kondisi geologi dan sedimentasi** di wilayah pesisir, di mana tanah berjenis aluvial lebih rentan mengalami pemadatan alami.

Kota-kota di sepanjang garis pantai utara Jawa, termasuk Jakarta, Pekalongan, Semarang, dan Demak, mengalami tingkat penurunan tanah yang mengkhawatirkan. Tingkat penurunan sedikitnya ~9 kali lebih cepat daripada kenaikan permukaan laut global saat ini, yang menimbulkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perkotaan di daerah-daerah ini. (Susilo, et al., 2023.)

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi berbagai kebijakan, termasuk memperkuat regulasi penggunaan air tanah dan melarang pengambilan berlebihan di zona kritis. Program seperti pembangunan sumur resapan juga telah dilakukan untuk mengisi kembali cadangan air tanah. Kegiatan pendukung konservasi air tanah melalui penghargaan Hemat Energi dan Air di sekolah-sekolah, sebagai upaya membudayakan hemat pemakaian air juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejalan dengan upaya tersebut, penyediaan air baku yang bersumber dari air permukaan menjadi penting untuk terus diupayakan dalam rangka solusi jangka panjang mengatasi *land subsidence.*

Selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2023, Dinas ESDM Provinsi telah membangun sebanyak 503 infrastruktur Air Tanah di tersebar di 35 kabupaten/kota, sehingga meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah. Pelaksanaan pembangunan sumur resapan dangkal sejak Tahun 2019 dilaksanakan secara padat karya melibatkan masyarakat setempat. Data pembangunan infrastruktur konservasi air tanah sebagai berikut:

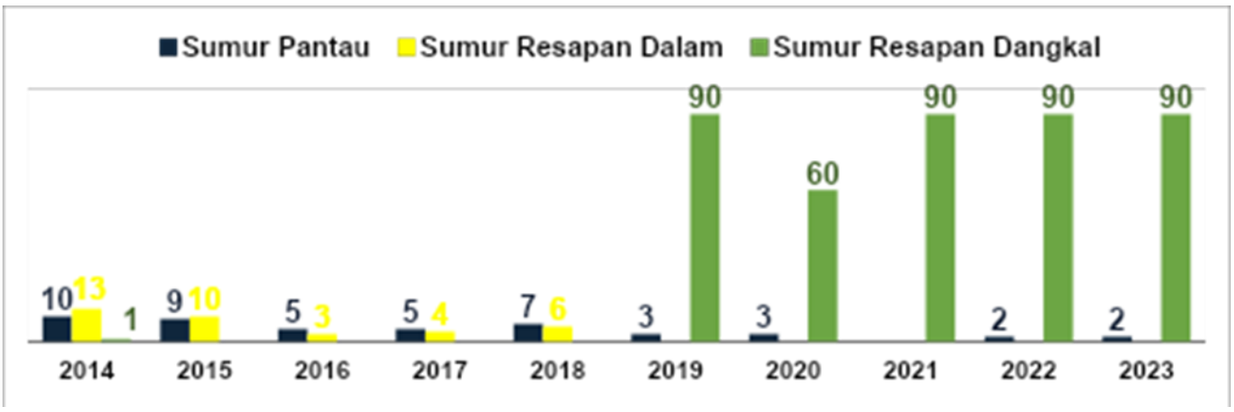

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2024

Gambar 2.88.
Pembangunan Infrastruktur Konservasi Air Tanah

2.5.11. Penanggulangan Bencana

1) Wilayah Rawan Bencana

a) Kawasan Potensi Bahaya Banjir

Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya, dengan kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air (Smith & Ward 1998). Apabila suatu peristiwa terendamnya suatu wilayah oleh air yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis maka banjir tersebut dapat disebut Bencana Banjir. Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, ukuran bahaya (*hazard*) dari banjir adalah ketinggian genangan. Total luas bahaya banjir di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 935.504 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu kelas bahaya dengan kelas rendah seluas 19.340 Ha, kelas sedang seluas 469.909 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi seluas 446.255 Ha. Kawasan berpotensi bahaya banjir dapat dilihat pada peta berikut ini.

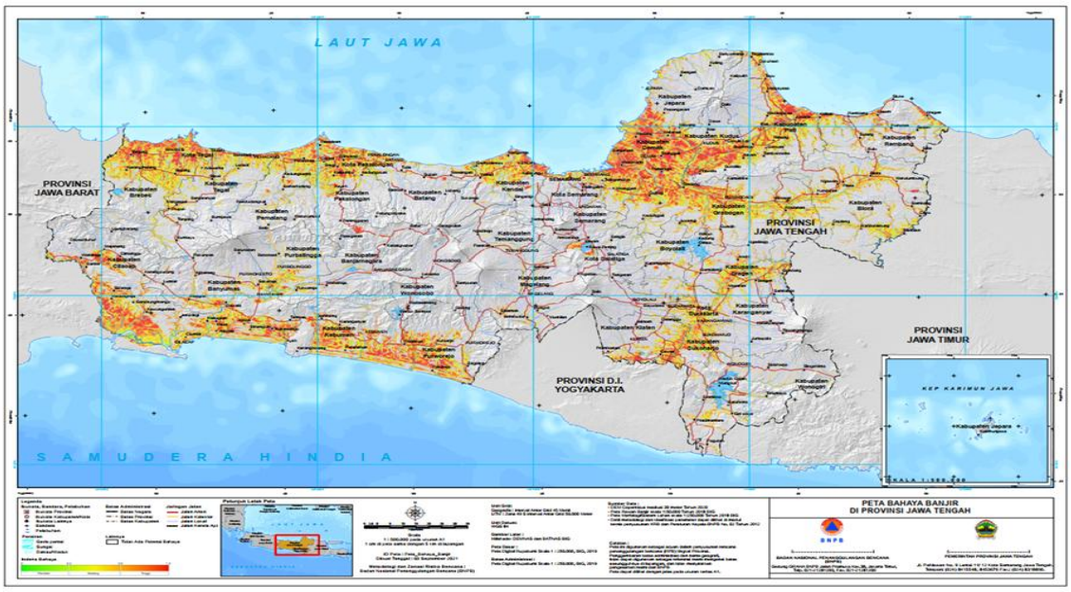

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.89.
Peta Bahaya Banjir Provinsi Jawa Tengah

Dalam peta bahaya banjir dapat kita peroleh potensi bahaya banjir dengan cakupan wilayah terluas dalam satuan Hektar. Dari tingkatan bahaya rendah terdapat Kabupaten Cilacap dengan potensi bahaya banjir mencapai luasan 2.384 Ha, tingkatan bahaya sedang adalah Kabupaten grobogan dengan luasan bahaya banjir mencapai 47.626 Ha. Sedangkan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Demak dengan luas 53.960 Ha. Kabupaten/kota dengan potensi bahaya banjir tinggi meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal. Hanya terdapat 3 Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat bahaya banjir sedang yaitu Kabupaten Purbalingga, Karanganyar dan Kota Surakarta.

b) Kawasan Potensi Bahaya Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Ukuran bahaya banjir bandang mengacu pada Pedoman Pembuatan Peta Rawan Longsor dan Banjir Bandang akibat runtuhnya bendungan alam yang dibuat oleh Kementerian PU (2012) yaitu asumsi ketinggian genangan banjir bandang setinggi 5 meter. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bahaya banjir bandang.

Kawasan berpotensi bahaya banjir bandang dapat dilihat pada peta berikut ini.

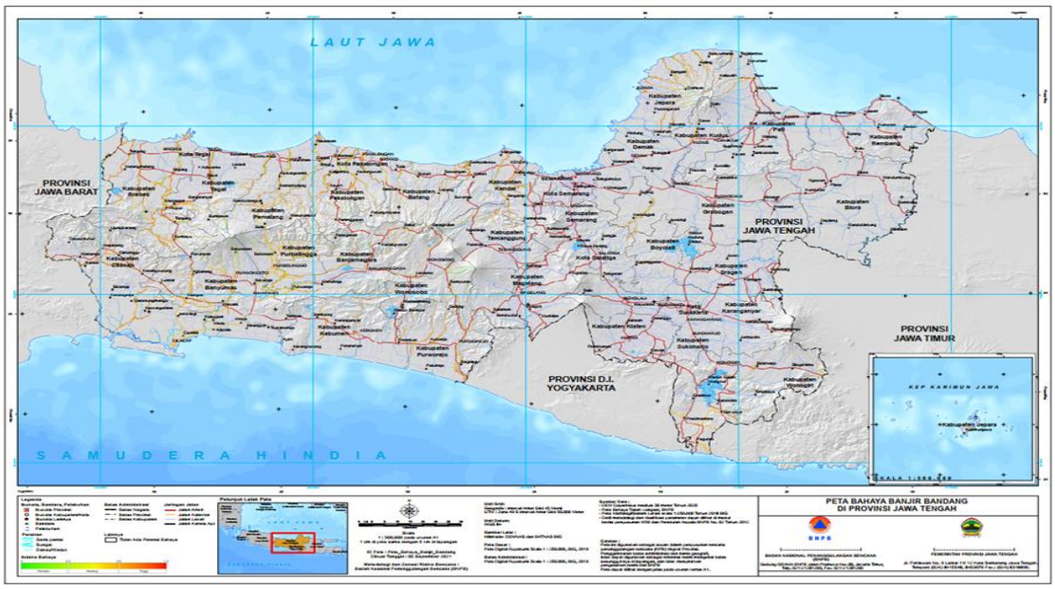

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.90.
Peta Bahaya Banjir Bandang Provinsi Jawa Tengah

Pada peta tersebut dapat kita peroleh informasi potensi luas bahaya banjir bandang berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah seluas 104.332 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.678 Ha, kelas sedang seluas 32.757 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 58.897 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah, sedang dan tinggi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 1.465 Ha, 4.746 Ha dan 9.574 Ha.

c) Kawasan Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini pembahasan cuaca ekstrim lebih dititikberatkan kepada angin kencang. Angin kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB). Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus angin kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya angin kencang.

Potensi bahaya cuaca ekstrim pada peta di bawah menunjukan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya

cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Jawa Tengah terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah seluas 2.832.304 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 997.704 Ha, pada kelas sedang seluas 324.567 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 1.510.033 Ha. Kawasan berpotensi bahaya cuaca ekstrim dapat dilihat pada peta berikut ini.

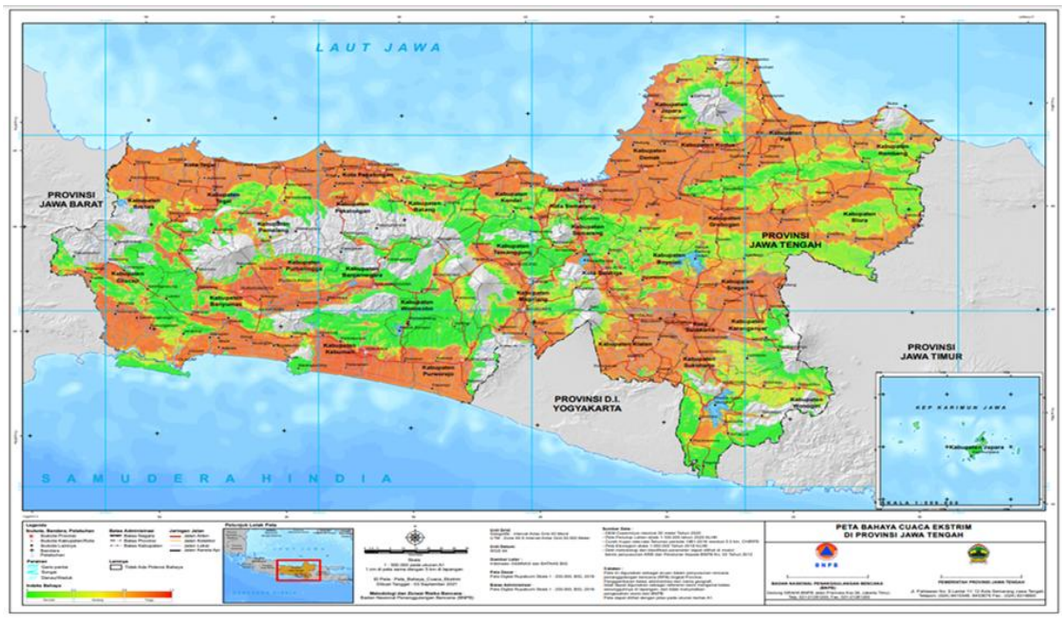

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.91.
Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Jawa Tengah

Pada peta tersebut dapat kita peroleh informasi Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah dengan luas 84.966 Ha adalah Kabupaten Blora. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas sedang dengan luas 37.207 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 104.032 Ha adalah Kabupaten Grobogan.

d) Kawasan Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari

parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Kawasan berpotensi bahaya bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada peta berikut ini.

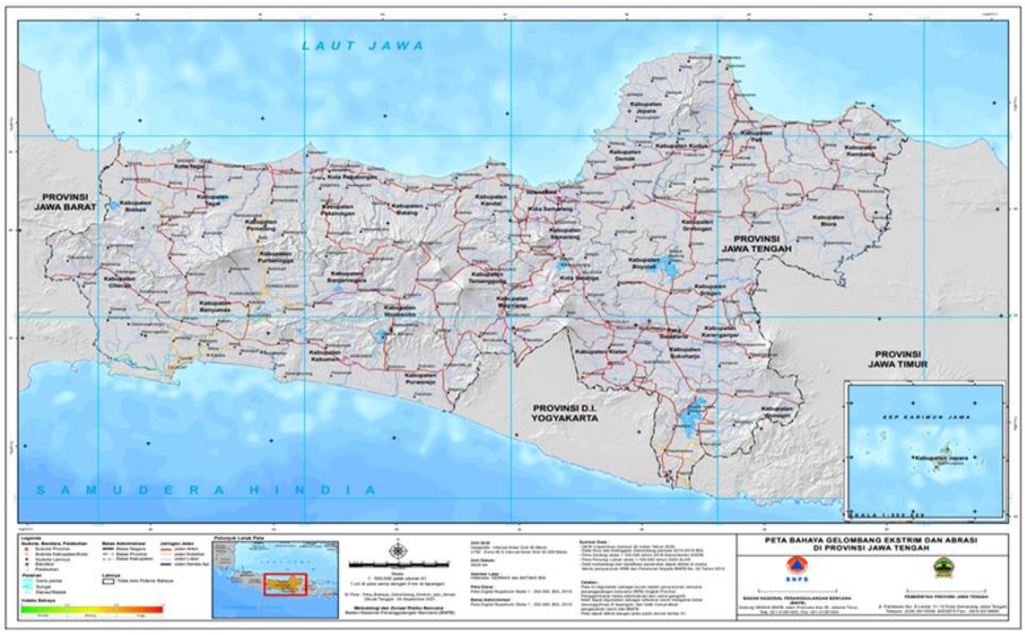

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.92.
Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Jawa Tengah

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari gambar di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah adalah 15.705 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 8.891 Ha, pada kelas sedang seluas 2.282 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 4.532 Ha. Sebaran luas bahaya di Provinsi Jawa Tengah untuk untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, dimana Kabupaten Cilacap memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah, yaitu seluas 1.632 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas sedang adalah Kabupaten Jepara dengan luas 1.684 Ha, Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Cilacap, yaitu 1.027 Ha.

e) Kawasan Potensi Bahaya Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang

lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal. Potensi luas bahaya gempa bumi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terpapar bencana gempa bumi. Potensi bahaya gempa bumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Sedangkan kelas bahaya gempa bumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdampak bahaya gempa bumi. Kawasan berpotensi bahaya gempa bumi dapat dilihat pada peta berikut ini.

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.93.
Peta Bahaya Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah

Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya gempa bumi tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.793.772 Ha, kelas sedang seluas 451.437 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya gempa bumi pada kelas tinggi seluas 31.898 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.103 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas sedang dengan luas 68.662 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas tinggi seluas 17.341 Ha adalah Kabupaten Klaten.

f) Kawasan Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar

misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia. Analisis bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkembang adalah analisis multi-kriteria yang menggabungkan beberapa parameter yang memiliki hubungan sebagai faktor penyebab terjadinya ancaman karhutla. Kawasan berpotensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada peta berikut ini.

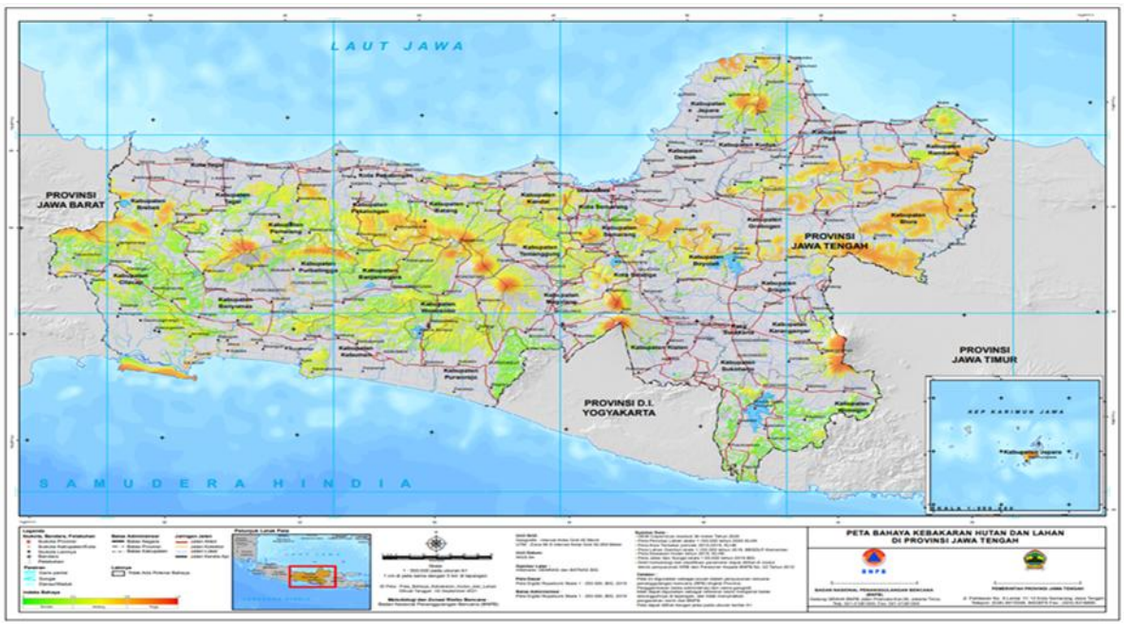

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.94.
Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora, Batang, Boyolali, Karanganyar, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Temanggung, Wonosobo. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 963.331 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 304.437 Ha, kelas sedang seluas 548.759 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi seluas 110.135 Ha.

g) Kawasan Potensi Bahaya Kekeringan,

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan

yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah *Standardized Precipitation Evapotranspiration Index* (SPEI) yang dikembangkan oleh Vicente-Serrano, dkk pada tahun 2010. Penentuan kekeringan dengan SPEI membutuhkan data curah hujan dan suhu udara bulanan dengan periode waktu yang cukup panjang. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode *Thornthwaite*, maka data suhu yang digunakan adalah hanya suhu bulanan rata-rata. Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kekeringan. Kawasan berpotensi bahaya kekeringan dapat dilihat pada peta berikut ini.

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.95.
Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jawa Tengah

Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi kelas sedang seluas 2.336.056 Ha dan kelas tinggi seluas 941.051 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 196.387 Ha adalah Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi seluas 107.775 Ha.

h) Kawasan Potensi Bahaya Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Kawasan berpotensi bahaya tanah longsor dapat dilihat pada peta berikut ini.

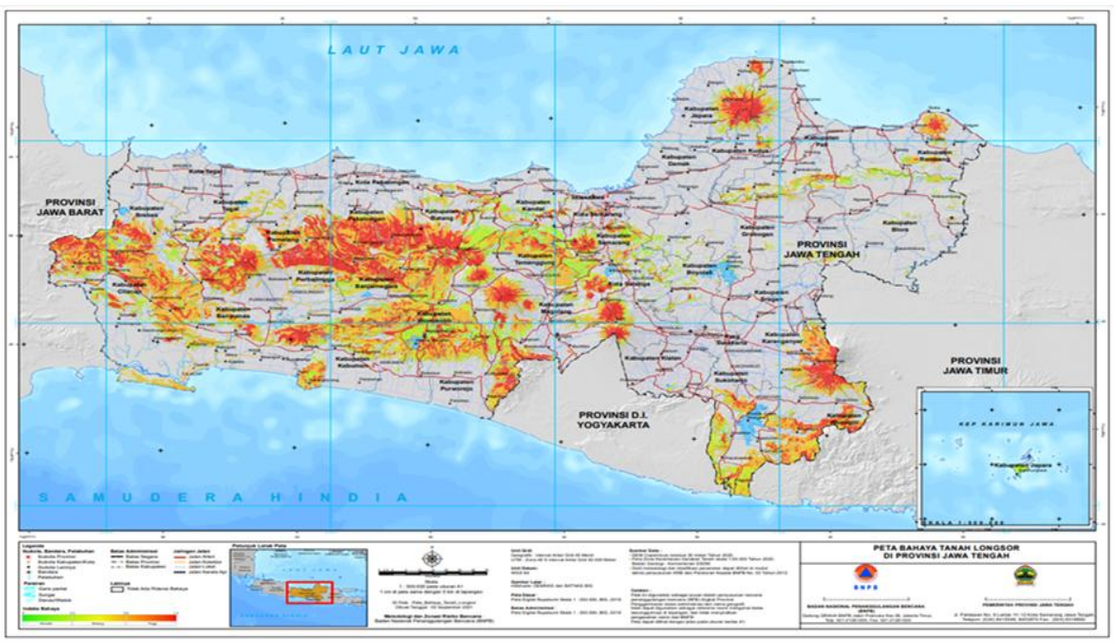

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.96.
Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jawa Tengah

Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 1.020.772 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 78.622 Ha, kelas sedang seluas 207.456 Ha dan kelas tinggi seluas 734.693 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah adalah Kabupaten Semarang dengan luas 5.959 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas sedang adalah Kabupaten Wonosobo dengan luas 24.364 Ha. Pada kelas tinggi, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor adalah Kabupaten Wonogiri dengan luas 62.658 Ha.

i) Kawasan Potensi Bahaya Tsunami

Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ukuran bahaya tsunami yang dikaji adalah pada seberapa besar potensi *inundasi* (genangan) di daratan berdasarkan potensi ketinggian gelombang maksimum yang tiba di garis pantai. Penentuan tingkat bahaya tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi (ketinggian genangan), nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. Kejadian tsunami di Jawa Tengah pada umumnya tidak terjadi secara langsung, namun Jawa Tengah merupakan daerah yang terpengaruh dan terimbas tsunami. Kejadian tsunami di Pantai Selatan Jawa relatif tidak terlalu banyak dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kejadian tsunami pada tanggal 17 Juli 2006 yang terjadi di daerah Pangandaran dan sekitarnya hingga pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kawasan berpotensi bahaya tsunami di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

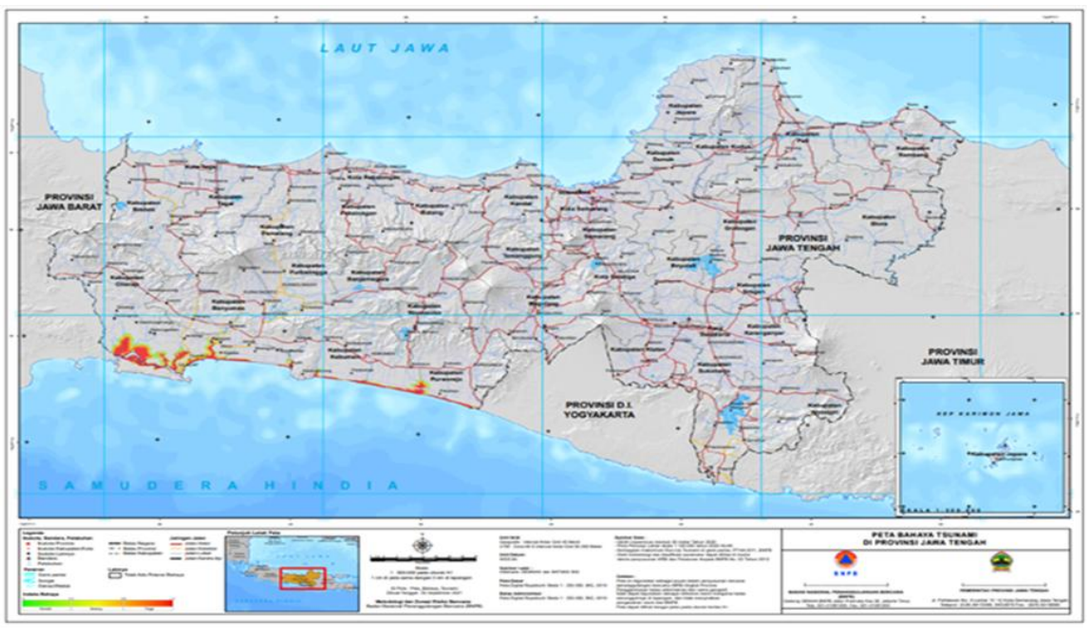

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.97.
Peta Bahaya Tsunami Provinsi Jawa Tengah

Pantai Selatan Jawa merupakan kawasan yang rawan tsunami. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa di daerah tersebut bersinggungan langsung dengan jalur lempeng yang sering terjadi gempa bumi. Berdasarkan letak wilayah Jawa Tengah yang berbatasan dengan laut, terutama di wilayah selatan Jawa Tengah (berbatasan dengan Samudera Indonesia) daerah yang rawan terjadi tsunami, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tsunami pada kelas rendah seluas 3.447 Ha, pada kelas sedang seluas 2.827 Ha, dan pada kelas tinggi dengan luas 19.372 Ha.

j) Kawasan Potensi Bahaya Epidemi

Epidemi adalah suatu keadaan yang menunjukkan kejadian penyakit meningkat dalam waktu singkat dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. Wabah adalah kejadian suatu penyakit menular yang meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi secara harfiah dalam konteks potensi bencana, Epidemi dan Wabah Penyakit (EWP) merupakan potensi ancaman bencana non-alam yang diakibatkan oleh kejadian suatu penyakit menular pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak (risiko) kematian dan gangguan aktivitas masyarakat. Metode yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya EWP adalah metode skoring dan pembobotan terhadap parameter berbasis wilayah administrasi kecamatan. Parameter yang digunakan untuk penyusunan peta bahaya EWP adalah terjadinya kepadatan atau prevalensi dari bahaya EWP (berdasarkan data yang tersedia secara nasional), yaitu: Malaria, Demam Berdarah, Campak, Difteri, dan Hepatitis.

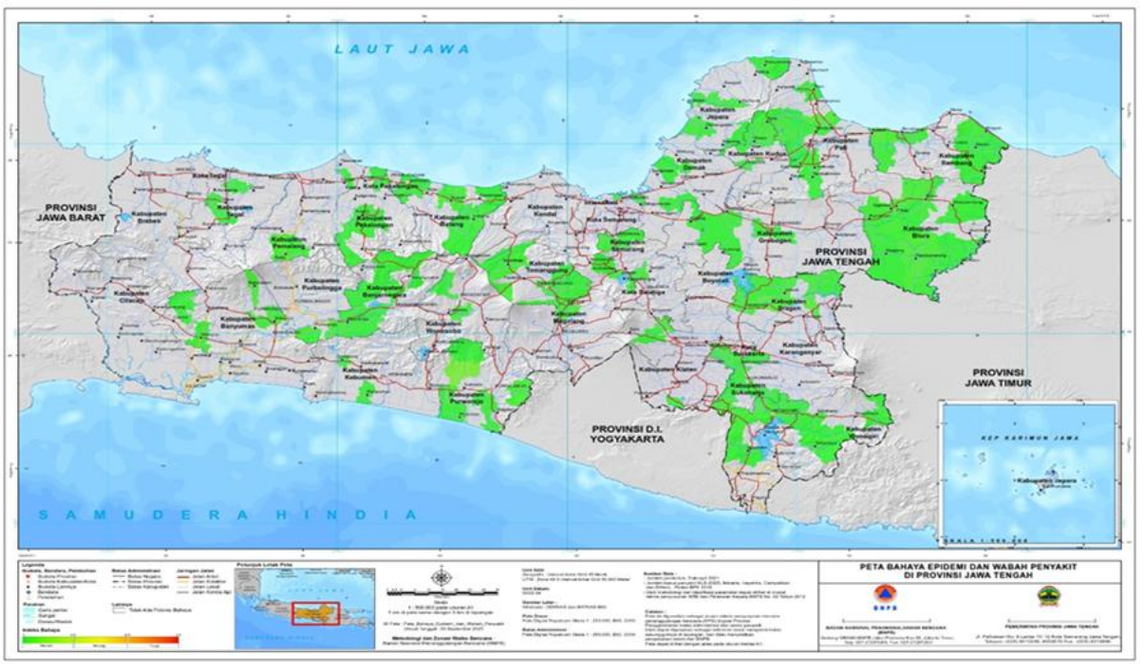

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.98.
Peta Bahaya Epidemi Provinsi Jawa Tengah

Sebaran luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya epidemi dan wabah penyakit pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.386 Ha.

k) Kawasan Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-

parameter sebagai tolok ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri. Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Kawasan berpotensi bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.99.
Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Provinsi Jawa Tengah

Pada peta tersebut kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah adalah Kabupaten Boyolali seluas 3.607 Ha dan Kabupaten Cilacap adalah wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas sedang dengan luas 375 Ha.

l) Kawasan Potensi Bahaya Covid-19

Penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, sehingga merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan dan rekomendasi pencegahan harus diprioritaskan. Apalagi wabah penyakit Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara berdasarkan bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020). Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penilaian risiko meliputi analisis bahaya, paparan/kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi penanggulangan kasus Covid-19.

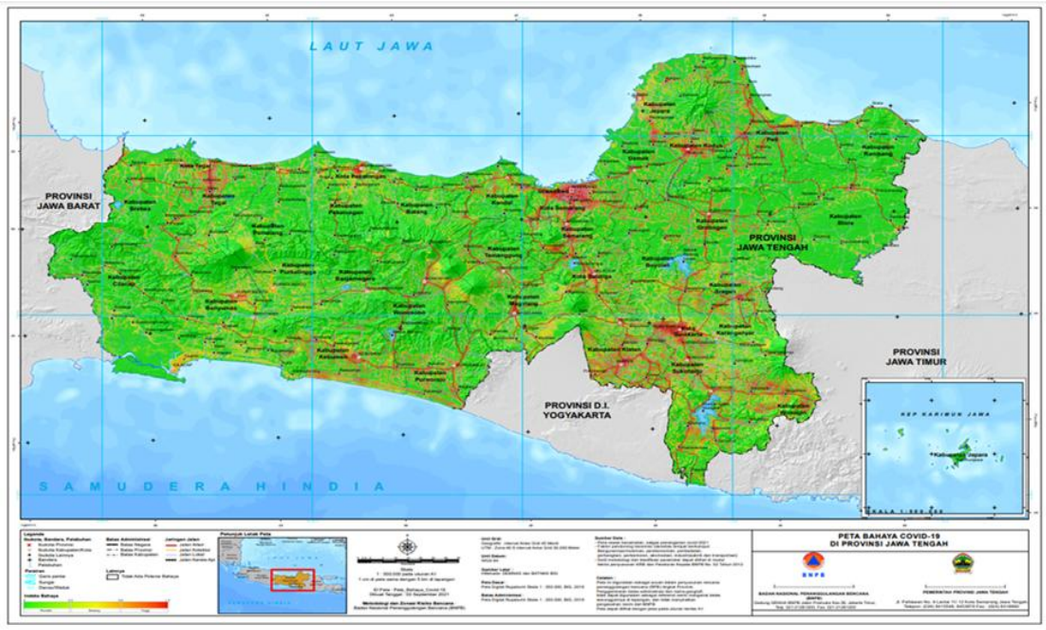

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.100.
Peta Bahaya Covid-19 Provinsi Jawa Tengah

Potensi luas bahaya Covid-19 adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Covid-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 2.346.083 Ha, kelas sedang seluas 605.417 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya Covid-19 pada kelas tinggi seluas 325.608 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas rendah adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 190.358 Ha. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas sedang seluas 50.337 Ha dan pada kelas tinggi seluas 33.967 Ha adalah Kabupaten Wonogiri.

m) Kawasan Potensi Bahaya Likuifaksi

Likuifaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan bangunan/infrastruktur yang lebih besar.

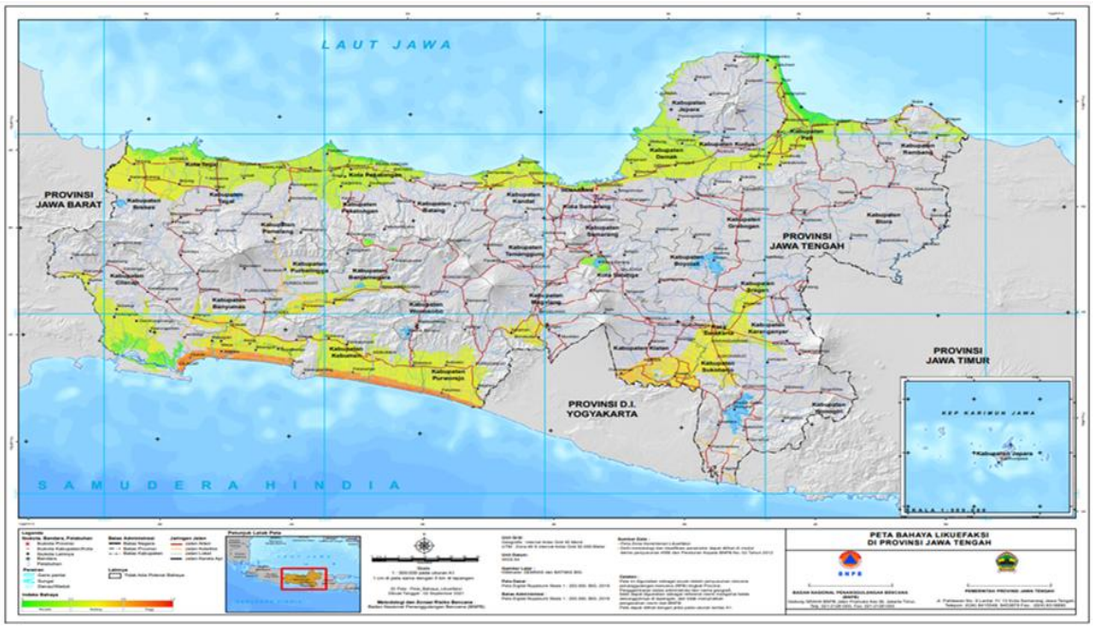

Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/

Gambar 2.101.
Peta Bahaya Likuifaksi Provinsi Jawa Tengah

Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak likuifaksi, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah kabupaten/kota terdampak. Total luas bahaya likuifaksi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 729.062 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya likuifaksi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 49.145 Ha, kelas sedang seluas 641.289 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya likuifaksi pada kelas tinggi adalah seluas 38.627 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuifaksi pada kelas rendah dengan luas 15.054 Ha dan pada kelas tinggi dengan luas 16.881 Ha adalah Kabupaten Cilacap. Sedangkan pada kelas sedang, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuifaksi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 65.705 Ha.

n) Kawasan Potensi Bahaya Gunungapi

Gunung Api dibedakan menjadi bahaya primer (langsung) dan bahaya sekunder (tidak langsung). Bahaya primer merupakan bahaya yang diakibatkan secara langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: aliran lava, awan panas, jatuhan piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar erupsi. Sedangkan, bahaya sekunder merupakan bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: lahar dan longsoran gunungapi.

(1) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah3.816Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

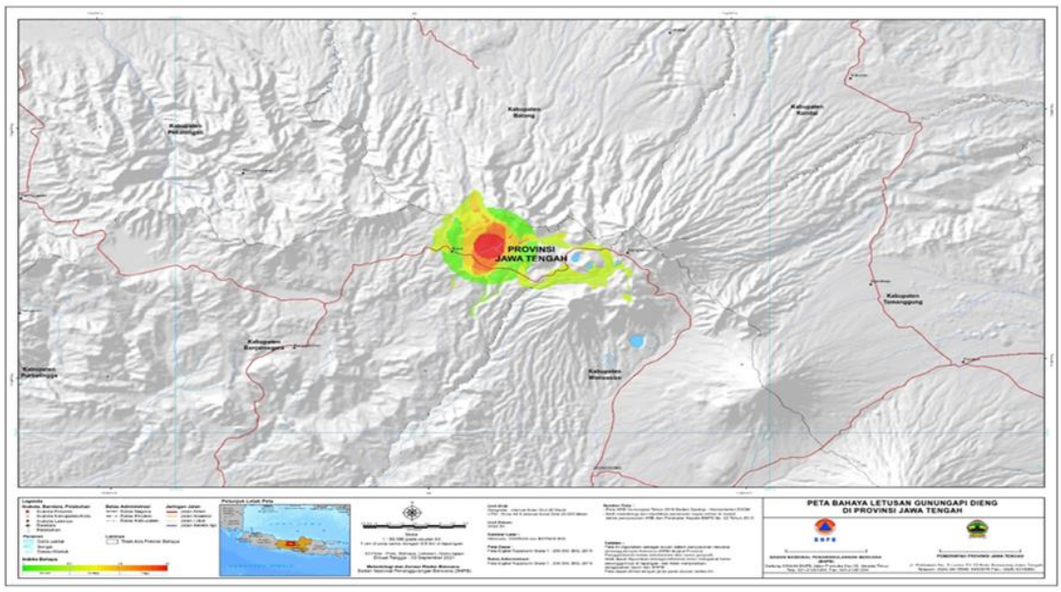

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.102.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Dieng

Luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 1.168 Ha, kelas sedang seluas 2.054 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Dieng pada kelas tinggi seluas 594 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunungapi pada kelas rendah seluas 1.059 Ha, kelas sedang seluas 1.304 Ha dan kelas tinggi seluas 568 Ha adalah Kabupaten Banjarnegara.

(2) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah10.116Hadan berada pada kelas Sedang. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

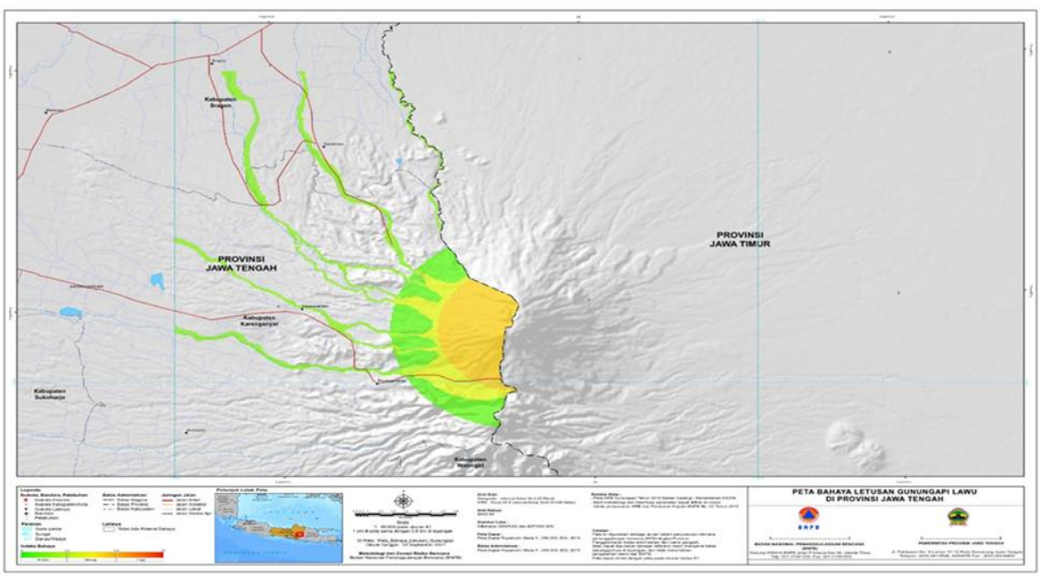

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.103.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Lawu

Luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu tersebut dirinci menjadi 2 (dua) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.546 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelas sedang seluas 4.570 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelas rendah seluas 4.652 Ha, dan kelas sedang seluas 4.570 Ha adalah Kabupaten Karanganyar.

(3) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah Secara keseluruhan adalah 28.239 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

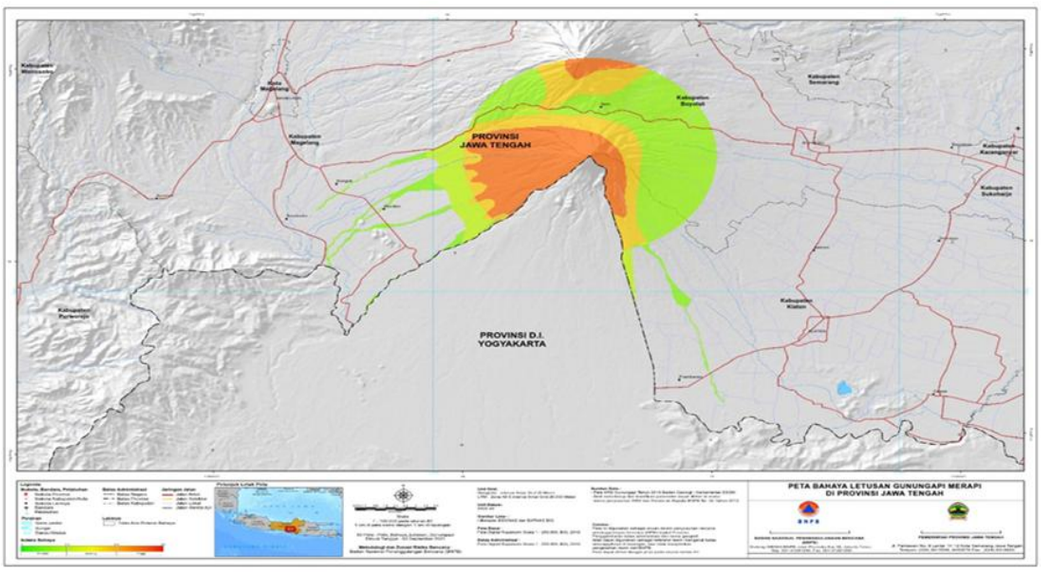

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.104.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merapi

Berdasarkan peta diatas luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.441 Ha, kelas sedang seluas 8.182 Ha, dan kelas tinggi seluas 7.616 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas rendah seluas 7.957 Ha adalah Kabupaten Boyolali. Sedangkan Kabupaten Magelang adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas sedang dengan luas 3.930 Ha dan kelas tinggi seluas 5.275 Ha.

(4) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 19.819Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

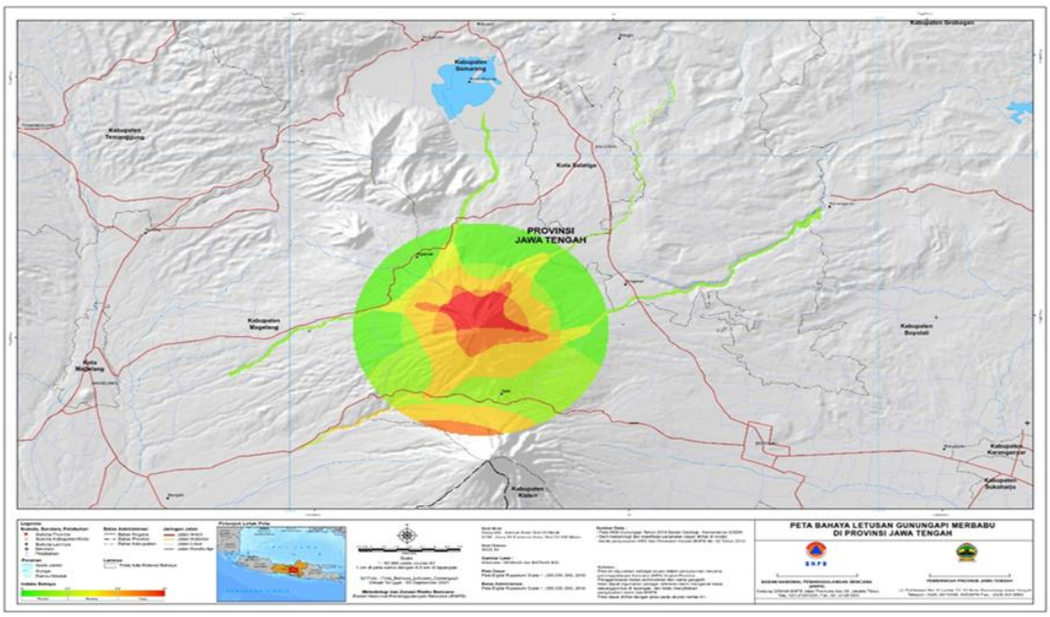

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.105.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merbabu

Luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 11.474Ha, kelas sedang seluas 5.820 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas tinggi seluas 2.526 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas rendah seluas 4.790 Ha, kelas sedang seluas 3.163 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 1.358 Ha adalah Kabupaten Boyolali.

(5) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 22.740 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

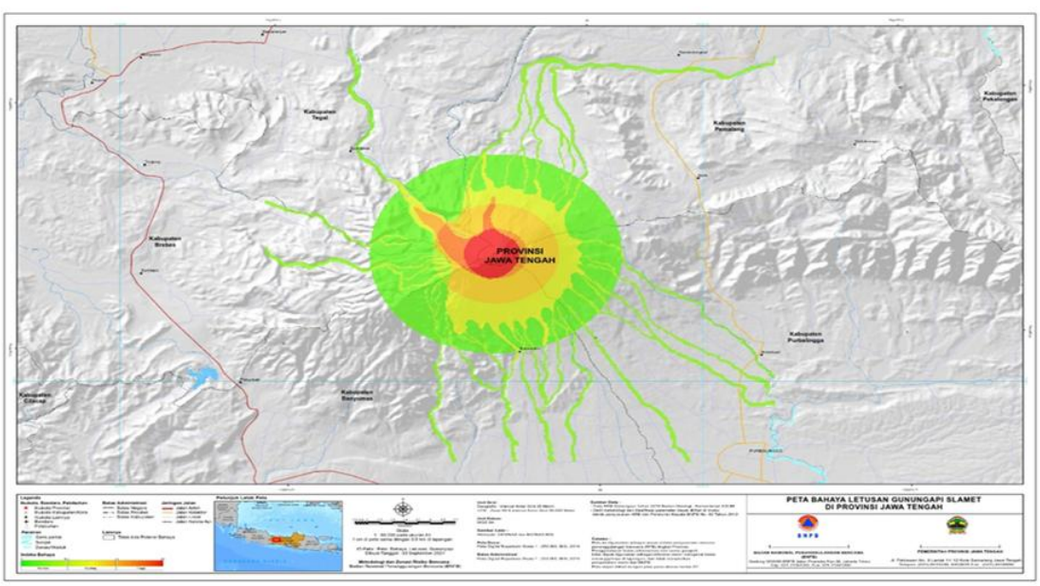

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.106.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Slamet

Berdasarkan peta tersebut luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14.631 Ha, kelas sedang seluas 6.288 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 1.820 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas rendah seluas 3.905 Ha dan kelas sedang seluas 2.533 Ha adalah Kabupaten Banyumas. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 723 Ha adalah Kabupaten Pemalang.

(6) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 25.650 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

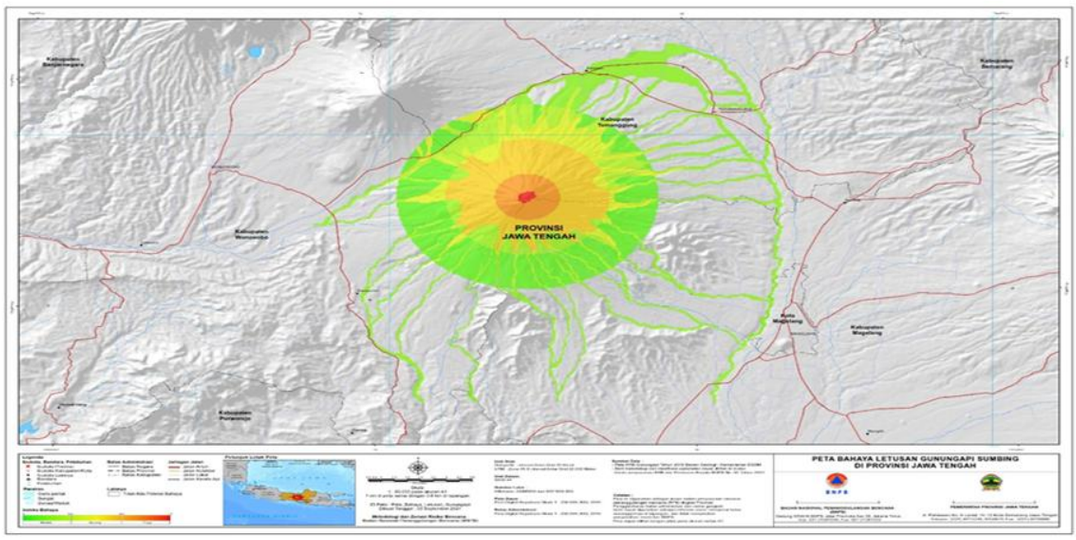

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.107.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sumbing

Luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 16.553 Ha, kelas sedang seluas 7.876 Ha,dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas tinggi seluas 1.221 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas rendah seluas 6.681 Ha, pada kelas sedang seluas 4.443 Ha dan kelas tinggi seluas 563 Ha adalah Kabupaten Temanggung.

(7) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sundorodi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 23.580 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sindoro di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

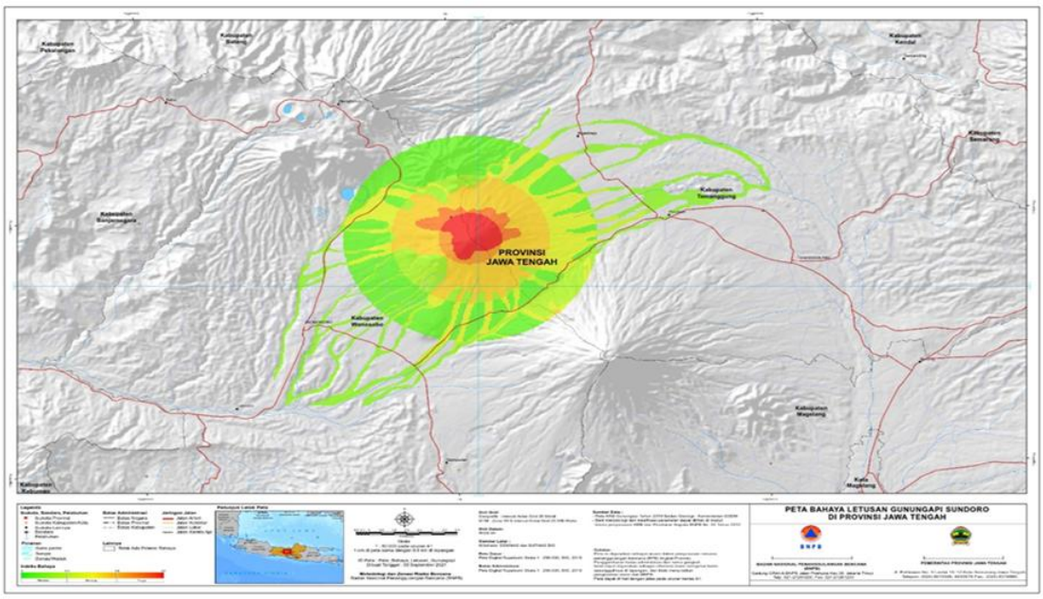

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.108.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sindoro

(8) Luas bahaya Letusan Gunungapi Sindoro tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.468 Ha, kelas sedang seluas 8.372 Ha, dan kelas tinggi seluas 1.739 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sindoro pada kelas rendah dengan luas 8.236 Ha dan kelas tinggi seluas 981 Ha adalah Kabupaten Wonosobo. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sundoro pada kelas sedang adalah Kabupaten Temanggung dengan luas 4.474 Ha.

(9) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan seluas 15.404 Ha dan berada pada kelas tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sindoro di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

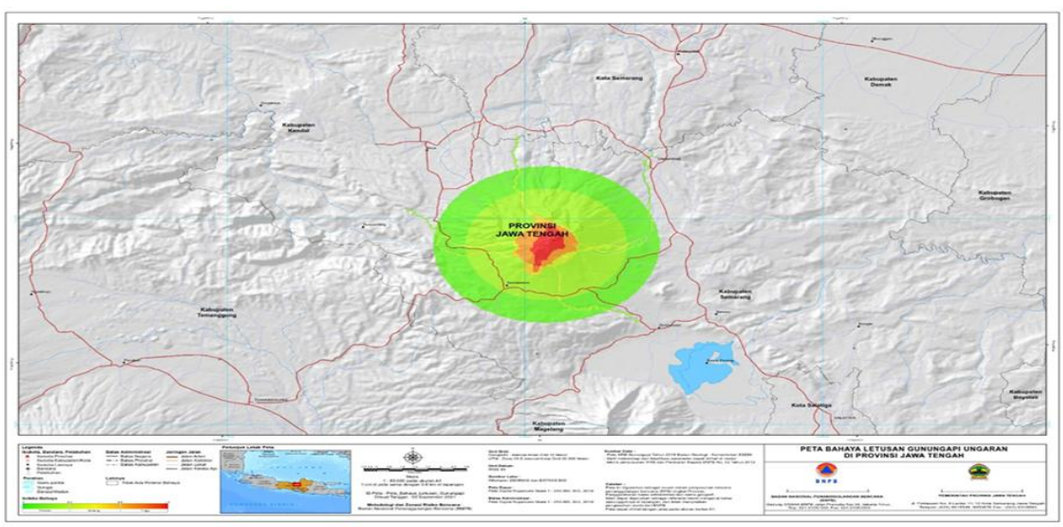

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.109.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Ungaran

Luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.787 Ha, kelas sedang seluas 526 Ha dan kelas tinggi seluas 1.091 Ha. Kabupaten Semarang merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Ungaran pada kelas rendah seluas 9.254 Ha, sedang seluas 312 Ha dan pada kelas tinggi seluas 617 Ha.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 (sepuluh) kawasan rawan bencana. Adapun data rumah korban terdampak bencana di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.134.
Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Jumlah
1	Banjarnegara	11	22	12	131	176
2	Banyumas	16	3	3	77	99
3	Batang	2	13	30	230	275
4	Blora	9	17	24	51	101
5	Boyolali	11	4	39	47	101
6	Brebes	10	35	26	50	121
7	Cilacap	25	19	13	228	285
8	Demak	11	25	0	66	102
9	Grobogan	17	22	9	348	396
10	Jepara	10	0	15	275	300
11	Karanganyar	19	13	37	123	192
12	Kebumen	17	32	4	1.718	1771
13	Kendal	11	1	1	40	53
14	Klaten	26	4	48	280	358
15	Kota Magelang	4	0	0	30	34
16	Kota Pekalongan	2	0	0	0	2
17	Kota Salatiga	12	7	8	80	107
18	Kota Semarang	6	24	9	41	80
19	Kota Surakarta	11	0	0	8	19
20	Kota Tegal	12	1	2	30	45
21	Kudus	7	1	0	34	42
22	Magelang	12	16	4	210	242
23	Pati	5	3	17	111	136
24	Pekalongan	5	7	6	7	25
25	Pemalang	3	0	2	28	33
26	Purbalingga	7	1	0	0	8
27	Purworejo	5	0	0	0	5
28	Rembang	13	2	2	6	23
29	Semarang	15	1	0	64	80
30	Sragen	7	0	5	52	64
31	Sukoharjo	13	1	17	183	214
32	Tegal	5	2	9	47	63
33	Temanggung	6	0	0	42	48
34	Wonogiri	9	24	40	107	180
35	Wonosobo	0	0	0	0	0
	TOTAL	**354**	**300**	**382**	**4.744**	**5780**

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024

Kejadian bencana di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2020-2024 terjadi fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan di tahun 2023 dan 2024, penurunan kejadian bencana dari 2.396 kejadian di 2022 menjadi 354 kejadian di tahun 2024. Selama periode tersebut, kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang meliputi kebakaran, banjir, tanah longsor, dan angin topan. Dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah teridentifikasi sejumlah 1.674 desa/kelurahan (19,6 persen) dari total 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan (25 persen) rawan tanah longsor.

Tabel 2.135.
Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020– 2024

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angin topan	629	439	671	115	125
2	Banjir	459	242	374	131	87
3	Gas beracun	2	0	0	0	0
4	Gempa bumi	2	5	4	12	1
5	Kebakaran	356	229	312	491	80
6	Kekeringan	0	0	0	34	33
7	Letusan gn.Api	12	5	1	8	0
8	Tanah longsor	387	0	1.010	126	28
9	Tsunami	0	0	0	0	0
10	Gelombang pasang	3	6	24	29	0
Jumlah		**2.870**	**1.753**	**2.396**	**946**	**354**

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pada tahun 2024 jumlah korban jiwa yang meninggal dunia maupun hilang dan luka - luka meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan 34 korban meninggal dunia, 3 hilang dan 49 luka ringan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Tabel 2.136.
Jumlah Korban Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban (Orang)			
		Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
2020	2.870	32	3	15	91
2021	1.753	34	5	14	73
2022	2.440	22	2	27	100
2023	946	8	1	20	54
2024	354	34	3	-	49
Jumlah		**130**	**14**	**76**	**367**

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Taksiran kerugian akibat bencana pada tahun 2020-2024 didominasi oleh bencana yang diakibatkan oleh kebakaran baik lahan maupun pemukiman warga, sedangkan taksiran kerugian akibat kebakaran di tahun 2024 sebesar

51,218 miliar rupiah dan kerugian keseluruhan akibat bencana sebesar 78,303 miliar rupiah. Data tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.137.
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Bencana	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)
1	Angin Topan	629	5.469.095	437	4.288.779	671	6.267.966	115	1.585.200	125	9.136.177
2	Banjir	459	32.798.305	242	44.106.000	374	2.367.000	132	412.500	87	14.713.384
3	Tanah Longsor	1.387	16.806.207	740	7.098.159	1.010	7.052.281	126	2.473.680	28	1.694.753
4	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kebakaran	356	18.779.138	229	52.965.785	312	217.955.599	491	690.600	80	51.218.500
6	Gempa Bumi	2	0	5	0	4	0	0	1.115.000	1	1.540.775
7	Letusan Gunung Api	12	0	5	0	1	0	0	0	0	0
8	Ombak Besar	23	0	6	45.000	24	25.000	0	0	0	0
9	Lainnya	2	0	46	131.687,50	44	581.000	0	0	0	0
	Jumlah	**2.870**	**73.582.747**	**1.753**	**108.823.410**	**2.440**	**234.248.846**	**946**	**6.276.980**	**354**	**78.303.589**

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

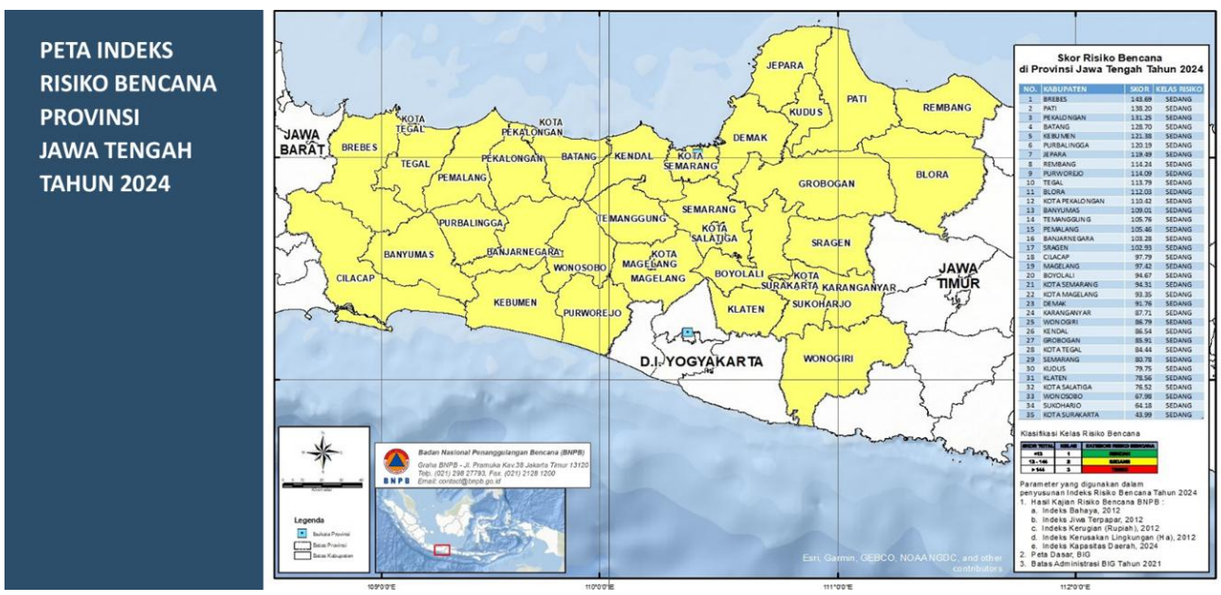

Sumber: BNPB, IRBI 2024

Gambar 2.110.
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah mendasarkan indeks rawan dan risiko bencana yang diterbitkan BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana sedang. Indeks risiko bencana 2024 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai skor 99,61 dengan kategori sedang.

Tabel 2.138.
Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Skor	Kategori
1	2020	132,99	Sedang
2	2021	125,73	Sedang

No.	Tahun	Skor	Kategori
3	2022	115,38	Sedang
4	2023	109,01	Sedang
5	2024	99,61	Sedang

Sumber: BNPB, IRBI 2024.

Pada Tahun 2023, 3 Kabupaten yang memiliki kelas risiko tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Pati dan Pekalongan berhasil menurunkan risiko di wilayahnya menjadi kelas sedang, sehingga di Tahun 2024 seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki risiko bencana dengan kategori sedang. Adapun Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kabupaten Brebes mendapat urutan tertinggi untuk indeks risiko bencana dengan urutan 1 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai skor 143,69.

Tabel 2.139.
Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KELAS RISIKO 2024
1	BREBES	211.20	211.20	211.20	211.20	211.20	189.94	189.94	171.01	155.35	143.69	SEDANG
2	PATI	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	171.10	171.10	165.53	150.21	138.20	SEDANG
3	PEKALONGAN	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	172.56	160.19	168.52	149.83	131.25	SEDANG
4	BATANG	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	161.93	154.49	143.13	128.70	SEDANG
5	KEBUMEN	203.20	165.76	151.08	140.31	131.45	114.67	114.67	102.05	110.78	121.38	SEDANG
6	PURBALINGGA	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	148.12	139.78	130.82	120.19	SEDANG
7	JEPARA	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	148.77	135.11	122.27	129.86	119.49	SEDANG
8	REMBANG	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	151.12	131.73	117.89	126.95	114.24	SEDANG
9	PURWOREJO	215.20	215.20	215.20	215.20	215.20	190.01	163.63	144.57	127.62	114.09	SEDANG
10	TEGAL	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80	181.08	158.93	141.32	126.26	113.79	SEDANG
11	BLORA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	135.33	123.19	113.90	119.58	112.03	SEDANG
12	KOTA PEKALONGAN	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	138.13	138.13	138.13	122.75	110.42	SEDANG
13	BANYUMAS	207.20	207.20	207.20	207.20	207.20	193.71	164.25	140.18	122.82	109.01	SEDANG
14	TEMANGGUNG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	134.51	121.33	110.38	116.84	105.76	SEDANG
15	PEMALANG	206.00	206.00	206.00	185.70	185.70	165.97	146.38	128.55	115.11	105.46	SEDANG
16	BANJARNEGARA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	127.36	127.36	107.61	121.40	103.28	SEDANG
17	SRAGEN	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	133.75	126.18	114.91	102.93	SEDANG
18	CILACAP	215.20	172.90	157.92	138.61	124.20	112.75	112.75	103.72	96.93	97.79	SEDANG
19	MAGELANG	143.20	96.86	90.82	90.82	81.07	71.16	71.16	77.90	86.49	97.42	SEDANG
20	BOYOLALI	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	130.32	130.32	130.32	110.06	94.67	SEDANG
21	KOTA SEMARANG	183.60	124.72	124.72	120.75	113.83	115.52	108.63	103.49	99.41	94.31	SEDANG
22	KOTA MAGELANG	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	102.08	93.35	SEDANG
23	DEMAK	183.60	138.20	127.42	118.21	118.21	105.77	105.21	103.88	97.71	91.76	SEDANG
24	KARANGANYAR	130.40	130.40	130.40	130.40	130.40	108.03	108.03	91.51	102.77	87.71	SEDANG
25	WONOGIRI	145.60	145.60	145.60	145.60	145.60	124.77	124.77	108.91	97.24	86.79	SEDANG
26	KENDAL	167.20	156.80	142.49	124.57	111.20	98.97	100.40	97.90	91.74	86.54	SEDANG
27	GROBOGAN	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	154.66	131.66	111.59	97.03	85.91	SEDANG
28	KOTA TEGAL	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	105.36	94.56	84.44	SEDANG
29	SEMARANG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	118.89	118.89	101.79	89.67	80.78	SEDANG
30	KUDUS	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	130.59	119.71	102.40	90.23	79.75	SEDANG
31	KLATEN	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	99.24	99.24	82.18	94.09	78.56	SEDANG
32	KOTA SALATIGA	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	90.89	83.98	76.52	SEDANG
33	WONOSOBO	135.20	135.20	135.20	122.94	122.94	122.94	102.83	87.55	76.24	67.98	SEDANG
34	SUKOHARJO	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	81.29	71.27	64.18	SEDANG
35	KOTA SURAKARTA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	67.96	67.96	57.17	49.50	43.99	SEDANG

Sumber: BNPB, IRBI 2024.

Untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi struktural dilakukan antara lain melalui pemasangan

sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) berbasis masyarakat dan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi di lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2024, telah terpasang sebanyak 107 unit peralatan EWS dan 522 unit rambu jalur evakuasi.

Tabel 2.140.
Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	EWS			Rambu Jalur Evakuasi
	BPBD	ESDM	Total EWS Terpasang (Akumulatif)	
2020	1	-	76	-
2021	10	-	86	347
2022	3	-	89	377
2023	4	-	93	417
2024	14	-	107	522

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Implementasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang dilakukan oleh Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan adanya Desa/kelurahan tangguh bencana, warga desa akan mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 247 desa, dari total seluruh desa/kelurahan sebanyak 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah.

Tabel 2.141.
Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2020 - 2024

Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terbentuk
2020	3	95 desa
2021	30	125 Desa
2022	7	132 Desa
2023	57	189 Desa
2024	58	247 Desa

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Tabel 2.142.
Data Bantuan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Roboh	Rusak Berat	Nominal
1	2020	7	60	18	1.080.000.000
2	2021	7	206	122	4.310.000.000

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Roboh	Rusak Berat	Nominal
3	2022	4	9	120	1.335.000.000
4	2023	5	22	31	480,000,000
5	2024	12	125	36	2.735.000.000
	Total	**44**	**699**	**361**	**14.435.000.000**

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2.6. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan meliputi berbagai unsur pendukung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan. Secara umum kinerja tata kelola pemerintahan ditangkap melalui pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Implementasi tata kelola pemerintahan daerah diwujudkan dengan pelayanan publik yang baik didukung dengan manajemen organisasi dan sumberdaya aparatur, serta dukungan fungsi-fungsi pendukung pemerintahan lainnya. Gambaran kondisi tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut.

2.6.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan tren positif. Capaian pada tahun 2024 mencapai angka 91,28 meningkat 8,15 dari nilai tahun 2023 yang sebesar 83,13. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan sesuai dengan *roadmap* nasional.

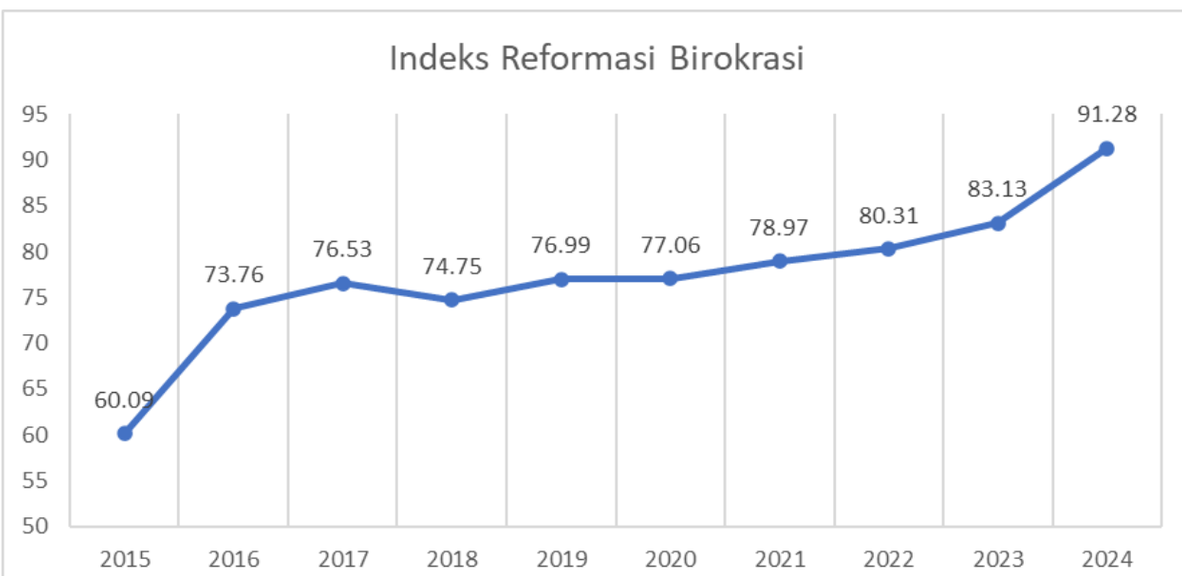

Sumber: Kemenpan RB, 2023

Gambar 2.111.
Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

Konsep reformasi birokrasi sejak tahun 2023 berubah menjadi reformasi birokrasi tematik, yaitu reformasi birokrasi yang lebih berdampak dengan memfokuskan perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas. Konsep baru tersebut mengelompokkan pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi dua jenis yaitu reformasi birokrasi general yang meliputi aktivitas reformasi birokrasi pada

konsep sebelumnya dan reformasi birokrasi tematik yang meliputi aktivitas perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas. Adapun tema-tema yang diprioritaskan terdiri atas 5 tema yaitu;

a. Pengentasan kemiskinan;
b. Digitalisasi pemerintahan (fokus stunting);
c. Peningkatan investasi;
d. Pengendalian inflasi;
e. Penggunaan produk dalam negeri.

Hasil evaluasi Kemenpan-RB pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mencapai nilai 81,07 dari skala 100 untuk reformasi birokrasi general dan 10,21 dari skala 20 untuk reformasi birokrasi tematik. Terdapat beberapa catatan dalam evaluasi reformasi birokrasi yang perlu mendapat perhatian, pada aspek general, meliputi: tingkat keberhasilan pembangunan ZI, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan pembangunan statistik; sedangkan pada aspek tematik, meliputi: capaian dampak pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi pemerintahan fokus stunting, pengendalian inflasi, dan capaian pelaksanaan implementasi SPBE.

Salah satu upaya perwujudan reformasi birokrasi adalah penataan regulasi dengan pelaksanaan reformasi hukum. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada pemerintah daerah. Walaupun capaian IRH sudah masuk dalam kategori AA (Istimewa), kondisi regulasi di Jawa Tengah masih perlu dilakukan penataan khususnya dengan beberapa permasalahan antara lain kondisi hiperegulasi. Kondisi hiperegulasi merujuk pada keadaan di mana terdapat terlalu banyak produk hukum atau regulasi yang tumpang tindih, tidak sinkron, atau bahkan bertentangan satu sama lain. Dari data produk hukum Jawa Tengah yang diakses pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah, jumlah peraturan perundang undangan dari tahun 2014-2025 sebanyak 137 peraturan daerah dan 774 peraturan gubernur

Kondisi regulasi di Jawa Tengah banyak pula yang berpotensi mengalami permasalahan ketidafektifan dalam pelaksanannya sehingga berdampak pada regulasi ditinggal oleh masyarakat, regulasi tidak dapat berjalan dengan baik, daya guna dan hasil guna regulasi masih rendah dan regulasi tidak memberi kepastian hukum. Dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut, telah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah berlaku untuk menilai pelaksanaan suatu produk hukum. Namun demikian, belum diikuti dengan adanya analisis dan evaluasi kebutuhan penyusunan regulasi, sehingga dalam merencanakan penyusunan regulasi masih tidak terarah bahkan regulasi yang dibentuk tidak jarang belum selaras dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

2.6.2. Pelayanan Publik

Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, berkualitas, terjangkau, dan teratur sesuai dengan harapan masyarakat.

Kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat melalui Indeks Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB melalui proses yang disebut Pemantauan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP). PEKPP dilakukan secara tahunan oleh KemenPAN-RB dengan metode sampling unit pelayanan publik (UPP) yang mewakili sektor pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Selain itu PEKPP juga dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sampling yang lebih luas dimaksudkan sebagai sarana pembinaan disamping sarana evaluasi. Indeks ini mengukur kualitas pelayanan publik melalui 6 aspek yaitu 1) aspek kebijakan pelayanan, 2) aspek profesionalisme SDM, 3) aspek sarpras, 4) aspek system informasi pelayanan publik, 5) aspek konsultasi dan pengaduan, dan 6)aspek inovasi.

Capaian kinerja pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Jika dilihat perkembangan nilai awal tahun 2018 yang sebesar 4,22 dan nilai akhir 2024 sebesar 4,53. Pelayanan publik di Jawa Tengah diketahui memiliki kelemahan yang masih perlu diperbaiki di tengah tren kenaikan indeks pelayanan publik. Hasil penilaian ini menunjukkan perlunya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan strategi dalam mengembangkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Tabel 2.143.
Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

IPP	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Tengah	4,22	4,46	4,45	4,48	4,54	4,11	4,53
OPD sample							
RSUD Provinsi	4,72	4,74	n/a	n/a	n/a	4,66	4,62
PTSP Provinsi	4,11	4,3	4,41	4,46	4,56	n/a	n/a
Bapenda/Samsat	3,84	4,33	4,49	4,5	4,51	4,01	4,52
Dinas Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,65	4,46

Sumber : Kemenpan RB, 2024

Gambar 2.112.
Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023

Selain IPP yang mengukur dari segi *supply* atau penyedia layanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan untuk melengkapi informasi dari sisi *demand* atau penerima layanan publik. Indeks ini diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diisi oleh penerima layanan publik. Selama kurun waktu tahun 2018 – 2023 IKM terus mengalami peningkatan secara konsisten. Hal ini menunjukkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan publik yang terekam melalui SKM menunjukkan peningkatan penerimaan yang positif.

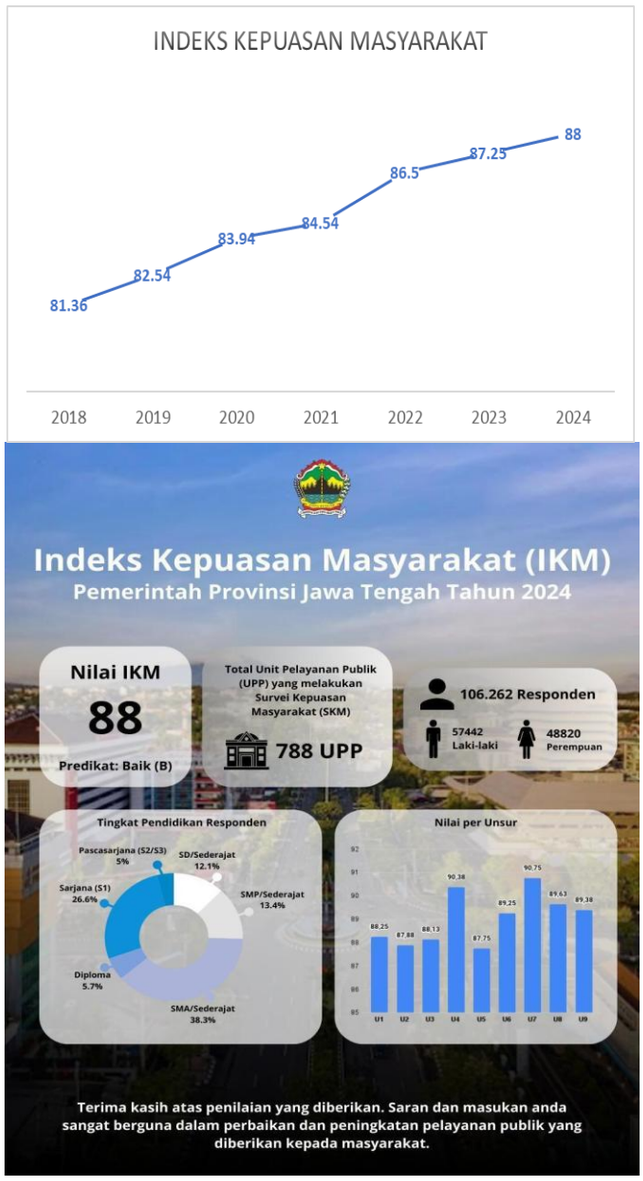

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.113.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

2.6.3. Demokrasi

Keberadaan pemilihan umum atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun hal tersebut merupakan satu bagian yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dapat mengubah arah politik maupun arah kebijakan publik. Tahun 2024 menjadi pelaksanaan pemilu serentak kedua setelah pertama kali diterapkan di tahun 2019, kembali dipilih

DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden, yang menandai keberhasilan Indonesia melaksanakan penyederhanaan pemilu, karena pilkada pada tingkat provinsi , kabupaten/kota, dilaksanakan juga pada tahun yang sama. Upaya ini sejalan dengan semangat penyederhanaan pemilu yang digagas sejak beberapa tahun sebelumnya. Sinkronisasi jadwal pelaksanaan pemilu ini dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan dari sisi waktu, tenaga, dan biaya, serta konsentrasi masyarakat pada pemilu dapat difokuskan pada tahun yang sama.

Aspek lain untuk melihat kualitas demokrasi selain Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah partisipasi politik. Partisipasi Politik paling mudah diukur melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. Hal ini sesuai dengan konsep partai politik karena partisipasi politik merupakan segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam menentukan keputusan atau kebijakan. Secara umum partisipasi politik digolongkan menjadi dua, yaitu; (1) konvensional seperti memilih dalam pemilu atau diskusi-diskusi politik, dan; (2) nonkonvensional seperti demonstrasi dan mogok. Tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa di negaranegara demokrasi, rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki legitimasi tinggi. Pada umumnya, partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang rendah pula.

Provinsi Jawa Tengah terkait partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 memiliki peresentase tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa (selain Provinsi DIY yang tidak melaksanakan Pilkada 2024), dimana Provinsi Jawa Tengah memiliki peresentase 73,04% terkait partisipasi pemilih.

Secara garis besar, Kualitas Demokrasi di Indonesia menggunakan perhitungan yang dilakukan sejak tahun 2019 oleh BPS yaitu Indeks Demokrasi indonesia (IDI). IDI Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 mengalami kenaikan dimana Pada Tahun 2025 nilainya 85.84, naik 4,97 point dari tahun 2024 dengan keseluruhan aspek mengalami kenaikan positif. Hal yang paling krusial adalah pada partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan yang naik signifikan sebesar 41.67 point dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan terus menerus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Jawa Tengah.

2.6.4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan *e-Government* memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan *e-Government*/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Terkait digitalisasi pemerintahan telah dilakukan pembangunan infrastruktur TIK seperti pembangunan jaringan *Fiber Optic*, pengadaan *server* dan *storage*; pengadaan sarana dan prasarana studio visual - ruang Multi Media Center (MMC), pembangunan pusat data, sewa internet dan

sewa aplikasi analisis media serta, sarpras layanan keamanan informasi. Pembangunan infrastruktur diatas antara lain untuk kegiatan operasional komunikasi dan koordinasi pemecahan masalah-masalah pembangunan (*video conference*, iklan layanan dan, layanan aduan) dan penyediaan portal data. Keseriusan pembangunan TIK dan aplikasi pemanfaatannya telah membuahkan hasil lonjakan capaian Indeks SPBE sepanjang 2020-2024.

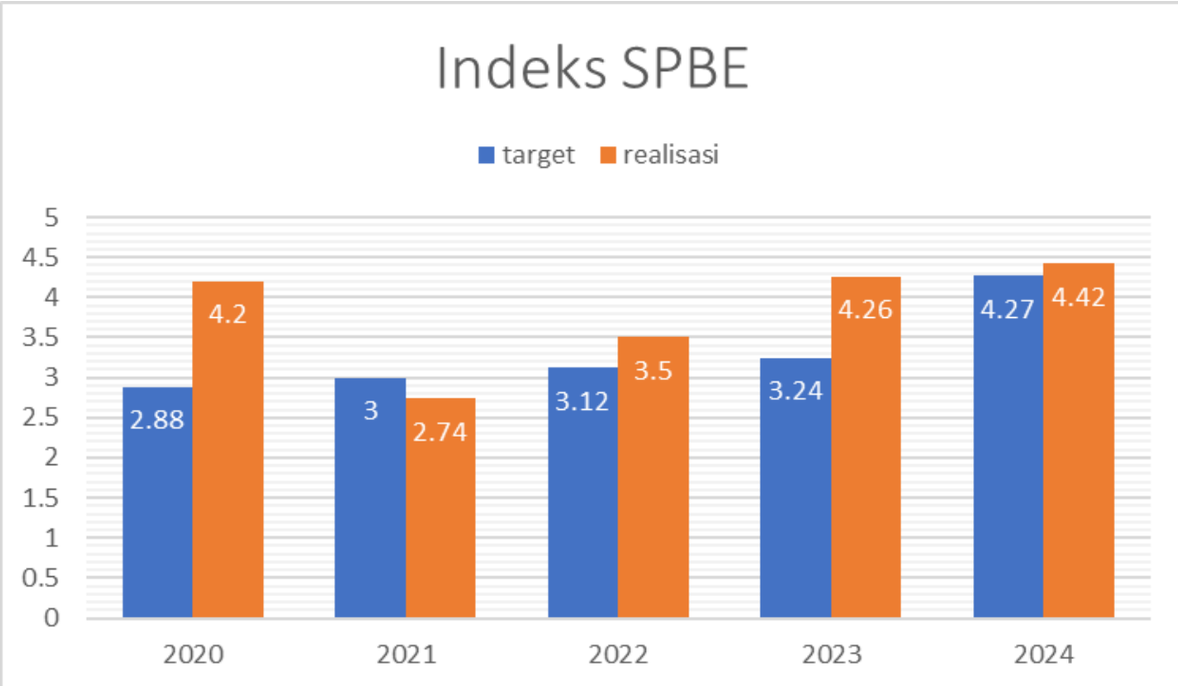

Sumber : Kemenpan RB, 2024.

Gambar 2.114.
Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Provinsi Jawa Tengah menunjukkan prestasi capaian SPBE. Bahkan, indeks SPBE Pemprov Jateng menunjukkan peningkatan, meskipun sempat mengalami capaian diatas target pada Tahun 2020 dan mengalami penurunan Tahun 2021 (akibat bertambahnya indikator penilaian yaitu Sub Domain Manajemen SPBE). Secara berturut indeks SPBE Jateng tahun 2020 sebesar 4,20; 2021 sebesar 2,74, kemudian 2022 sebesar 3,34 dan; 2023 sebesar 4,26. Hasilnya, berdasarkan Kepmen PanRB Nomor 663 tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE tahun 2024 menunjukkan, capaian indeks SPBE untuk Provinsi Jawa Tengah semakin mantap dari capaian predikat memuaskan (4,26) terbaik nasional pada Tahun 2023 menjadi 4,42.

Sumber: Diskominfo, 2024.

Gambar 2.115.
Penghargaan tertinggi Nasional SPBE Summit 2024
dan Peluncuran GovTech Indonesia

Capaian ini telah mendapatkan penghargaan tertinggi Nasional SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. akan optimis bisa mencapai target tahun baseline 2025 dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 sebesar 4,50 dan target akhir SPBE 2045 sebesar 5,00. Rincian Sub Domain yang telah diatas 4,00 (memuaskan) capaiannya yaitu: untuk domain kebijakan mencapai 4,90, domain tata Kelola mencapai 4,20, domain manajemen mencapai 3,45, dan domain layanan mencapai 4,75 semakin menguatkan optimisme tersebut.

Capaian SPBE yang telah melampaui target tersebut tidak lepas dari seriusnya pemerintah daerah melakukan perbaikan SPBE melalui berbagai kegiatan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian sbb.

1) Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika telah dilaksanakan 2 program dan 4 kegiatan. Keempat Kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan targetnya. Kedua program meliputi: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik didukung alokasi anggaran 26,367 miliar rupiah dengan realisasi fisik 100 persen dan keuangan 98,43 persen dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika didukung anggaran 13,502 miliar rupiah dengan realisasi fisik 100 persen dan keuangan 99,39 persen.

Adapun pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik didukung kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan keluaran 170 konten informasi publik yang disebarluaskan, beberapa diantaranya yaitu konten informasi untuk hoaks, konten tema stunting, hingga konten mengenai Pilkada Bersih. Permasalahan yang dihadapi yaitu semakin banyak beredarnya informasi dengan sentimen negatif di masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring di media online, cetak, tv, sosial, dan radio serta penyusunan laporan analisis dan rekomendasi publikasi, serta melaksanakan Dialog Opini Publik dengan tema Monitoring dan Analisis Media ke 35 Kab/Kota di Jawa Tengah. Capaiannya sbb:

Tabel 2.144.
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

No	Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**						
1	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	**Angka**	n/a	n/a	81	87,54	90,14
2	Nilai keterbukaan informasi publik	**Angka**	n/a	n/a	99,95	94,74	31
II	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**						
1	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	**%**	n/a	n/a	75	82	72
2	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	**%**	n/a	n/a	-	80	15

Sumber : Diskominfo, 2024.

Capaian diatas menunjukkan bahwa prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini mewujudkan birokrasi yang adaptif yang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengimplementasikan transformasi digital yang terdapat pada infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Salah satu inovasi yang terus dikembangkan untuk mendukung layanan publik berbasis SPBE tersebut adalah Layanan Data Center Jawa tengah yang meliputi layanan *colocation, hosting, Virtual Private Server (VPS), dan Disaster Recovery Center (DRC).*

Layanan *colocation* adalah layanan penyediaan ruang server yang dapat digunakan oleh OPD Pemprov Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk menaruh perangkat server. Layanan ini telah dinikmati oleh satu Kementerian, 15 OPD, dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kapasitas layanan telah berkembang dari tahun ke tahun (data 2020 – 2024). Layanan *hosting* adalah penyediaan tempat penyimpanan data atau file sehingga suatu situs dapat diakses melalui internet. Layanan *Virtual Private Server* adalah layanan server virtual yang bisa dimanfaatkan oleh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota selayaknya server fisik.

Selain layanan Data Center, pembangunan TIK juga diwujudkan dalam penyediaan internet gratis di area publik, instansi pendidikan, dan desa (meliputi desa *blankspot*, desa wisata, dan desa dengan status kemiskinan ekstrem). Sampai dengan tahun 2025, tidak kurang dari 30 area publik, 37 satuan pendidikan, dan 685 desa telah terfasilitasi internet Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan komunikasi dan informatika tahun 2024 yaitu:

1. Provinsi dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi tingkat nasional pada SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Peringkat pertama Kategori Provinsi/Kabupaten/Kota Kontribusi Konten Teragregasi tingkat nasional Anugerah Media Center (AMC) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

2) Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung anggaran Rp1.257.329.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,65%. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan keluaran terkumpulnya 50 data Statistik Sektoral dan Geospasial melalui Portal Data Jawa Tengah. Permasalahan yang dihadapi masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM baik sektoral (*Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist*) maupun spasial (surveyor pemetaan) dalam rangka mendukung *Big Data* Jawa Tengah. Khusus untuk spasial, upaya yang dilakukan yaitu melakukan pengajuan permohonan bantuan SDM (*Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist*) dari lintas bidang, melakukan rekrutmen dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM yang telah tersedia.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah akhir TA 2023 terkait perlunya Peningkatan SDM penyelenggaraan otorisasi urusan statistik di daerah dalam rangka mewujudkan *Big Data* Jawa Tengah (melalui rekrutmen *Data Analyst*, *Data Engineer*, *Data Scientist*, dan bimbingan teknis), termasuk di dalamnya menyediakan sarana prasarana penunjang data sektoral dan spasial. Adapun capaiannya sbb:

Tabel 2.145.
Program/ Indikator Kinerja Tingkat Capaian Kinerja 2020-2024

No	Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Kinerja				
I			2020	2021	2022	2023	2024
	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral						
1	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah		n/a	n/a	-	-	24

Sumber : Diskominfo, 2024.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan serta pemanfaatan infrastruktur teknologi saat ini berkembang begitu pesat. Pengembangan infrastruktur teknologi tersebut tentunya harus didasari dengan basis data yang akurat, relevan, *up-to-date*, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemanfaatan teknologi tersebut dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengelolaan data yang terpadu melalui penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah. Hal

tersebut merupakan suatu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengelolaan *Big Data* yang bervariasi dan *realtime* tersebut, maka kedepannya kualitas layanan publik pada masyarakat akan lebih optimal dan maksimal.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan statistik tahun 2024 antara lain:

1. Provinsi dengan kategori Bhumandala Rajata (keberhasilan Informasi Geospasial Rupa Bumi) dan kategori Bhumandala Ariti (keberhasilan Informasi Geospasial Simpul Jaringan) pada Bhumandala Award 2024 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG);
2. Provinsi dengan kategori Provinsi Informatif pada penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2024 oleh Komisi Informasi Pusat RI.

3) Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi didukung anggaran 2,1 miliar rupiah dengan realisasi fisik 100 persen dan keuangan 99,66 persen. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program ini adalah tidak tepatnya pengalokasian anggaran oleh untuk penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkup OPD Provinsi Jawa Tengah sebagai tugas pokok fungsi utama pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan lebih memprioritaskan anggaran pada kegiatan publikasi dan liputan (live streaming) yang bukan merupakan tugas pokok fungsi Persandian dan Keamanan Informasi.

Oleh karena itu dilakukan upaya untuk memastikan sistem manajemen keamanan informasi dengan melakukan Asessment tingkat kematangan Indeks Keamanan Informasi yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Manfaat pelaksanaan program ini yaitu ketersediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah yang terjamin dengan penggunaan persandian dalam penetapan kebijakan tata kelola dan operasi kepatuhan penerapan sistem manajemen keamanan informasi sebagai pendukung SPBE. Capaian tersebut menunjukkan sebagai berikut.

Tabel 2.146.
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

No	Program/ Indikator Kinerja	Satuan					
I	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**						
		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Sumber : Diskominfo, 2024.

Program/kegiatan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Jawa Tengah telah membentuk ekosistem Jawa Tengah *Smart Province*, dengan inisiatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, transparansi, dan layanan publik di wilayah Jawa Tengah dengan dukungan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Program ini merupakan bagian dari visi mewujudkan provinsi yang lebih cerdas, terintegrasi,

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dimana aspek penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting.

Penerapan dan Kepatuhan melaksanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi melalui Kesadaran Keamanan Informasi menjadi landasan utama dan seiring dengan Pemanfaatan teknologi tersebut tentunya harus dilengkapi dengan sistem keamanan informasi yang baik. Dengan adanya serangan siber berjenis *ransomware* yang terjadi pada pertengahan tahun ini, tentunya mempengaruhi ekosistem *Smart Province* tersebut. Pemerintah Jawa Tengah terus berusaha meningkatkan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi dalam penanganan insiden dan memonitoring serangan siber, yang meliputi *Application Security, Cloud Security, Cryptography, Infrastructure Security, Incident Response, dan Vulnerability Management*.

Adapun trend Serangan Siber di Jawa Tengah terdata mempunyai target utama serangan. Target tersebut adalah: 1. Pemerintah daerah (situs web dan aplikasi layanan publik); 2. Institusi pendidikan (data akademik dan administrasi) dan; 3. UMKM dan bisnis lokal (*ransomware* dan *phishing*). Adapun Motivasi Serangan adalah :1. Mencuri data pribadi dan informasi sensitif; 2. Mengganggu operasi layanan publik; 3. Mencari keuntungan finansial melalui *ransomware*.

Beberapa contoh kasus serangan sibernya adalah: 1. Deface Situs Pemerintah. Banyak situs pemerintah daerah di Jawa Tengah pernah menjadi korban deface oleh peretas. Hal ini menunjukkan celah keamanan di sistem manajemen situs; 2, Phishing pada ASN: Beberapa ASN (Aparatur Sipil Negara) menerima email phishing yang mengarah pada pencurian informasi login dan; 3. Serangan pada Data Pendidikan: Institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi menghadapi serangan malware yang mencoba mencuri data siswa dan penelitian dan; 4. Ransomware pada UMKM: Beberapa UMKM di Jawa Tengah melaporkan kehilangan data akibat serangan ransomware. Persentase jenis serangan yang dominan di Jawa Tengah: 1. *Phishing* (40%); 2. *Malware* (30%); 3. *DDoS* (20%) dan; 4. *Defacement* (10%). Terjadinya serangan siber merupakan implikasi dari tidak diterapkannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

2.6.5. Penelitian dan Pengembangan

Sesuai dengan Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka dalam rangka optimalisasi urusan penelitian dan pengembangan serta terciptanya integrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Provinsi Jawa Tengah maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dalam rangka memperkuat infrastruktur riset dan inovasi di daerah, melalui amanat pasal 67 Perpres No. 78 Tahun 2021, BRIDA menyusun rencana induk dan peta jalan kemajuan IPTEK daerah, yang berfungsi sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD sekaligus menjabarkan RPJMD untuk pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah.

Salah satu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi penelitian dan pengembangan adalah dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi penelitian yang dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan kebijakan

dan perencanaan pembangunan daerah. Selama kurun waktu tahun 2019-2023 dokumen dan rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.147.

Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dokumen Penelitian	9	4	2	23	18	4
2.	Rekomendasi/Implementasi Penelitian	9	4	2	n/a	n/a	n/a

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selama kurun waktu 2017 – 2021 dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi hasil penelitian fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan litbang daerah sejak 2017, kegiatan penelitian dalam bentuk Riset Unggulan Daerah (RUD) dan penelitian mandiri sudah tidak difasilitasi lagi. Pada tahun 2021 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya volume kegiatan penelitian karena pemerintah memfokuskan pada kegiatan dalam upaya penanggulangan dampak pandemi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM Peneliti melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui Jaringan Penelitian dan Inovasi, kerjasama dengan pemerintah pusat (Ristek dan LIPI), serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan.

Guna mendukung fungsi kelitbangan maka dibentuk beberapa lembaga pendukung kelitbangan di Jawa Tengah antara lain berbentuk *technopark, agro technopark, marine science technopark,* digitalisasi *technopark* dan taman teknologi pertanian. Bentuk kelembagaan *technopark* di Jawa Tengah di Kabupaten/Kota dikelola oleh PD teknis dan mendapatkan pendanaan dari anggaran daerah. *Technopark* dengan bidang fokus dibidang pertanian dan pangan terdapat di Ganesha Sragen dikelola oleh UPT Dinas Tenaga Kerja, *technopark* Lebaksiu yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tegal, *Agrotechnopak* Klaten yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, *Technopark* Pangan Kabupaten Grobogan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan *technopark* perikanan di Kota Pekalongan dikelola oleh UPT Dinas kelautan Perikanan, serta *technopark* dengan bidang fokus otomotif di Kota Surakarta (Solo *Technopark*).

Kelembagaan lain yang memiliki peran untuk menghilirkan inovasi agar dapat menjadi produk yang bisa dijual dan mampu menghasilkan *start up* inovasi adalah Inkubator Bisnis dan Teknologi yang melakukan kegiatan proses pra inkubasi dan inkubasi. Pada proses Pra inkubasi dilakukan dengan meningkatkan sumberdaya manusia untuk mengubah pola pikir dan membentuk calon *start up* menjadi *start up*. Sedangkan proses inkubasi dilakukan dengan melakukan pendampingan, mentoring, pelayanan, fasilitasi, promosi untuk meningkatkan kapasitas produk. Di Jawa Tengah setidaknya terdapat 22 inkubator yang berfungsi aktif dalam memberikan layanan inkubasi.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki Inkubator Wirausaha Inovasi Jawa Tengah (Inwinov Jateng) yang berada di bawah naungan

Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Alokasi sumber pendanaan berasal dari APBD dan APBN (melalui Kementerian Ristekdikti, BRIN dan Kemenkop UKM). Selama lima tahun terakhir, Inwinov Jateng telah melakukan pembinaan terhadap tenant yang dikelola masyarakat melalui fasilitasi program penguatan inkubator/tenant yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.148.

Jumlah *Tenant* Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant Tahun 2019-2023

No	Tahun	Total Tenant	Program	Sumber Pendanaan
1	2019	6 Tenant	Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Kemenristekdikti
2	2020	1 Tenant	Startup Inovasi Indonesia (SSI)	BRIN
3	2021	40 Tenant	Fasilitasi Lembaga Inkubator	Kemenkop UKM
4	2022	17 tenant	Inwinov Jateng	APBD
5	2023	17 tenant	Inwinov Jateng	APBD
6	2024	15 tenant	Inwinov Jateng	APBD

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Tengah yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (SIDa) Provinsi Jawa Tengah adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Pengembangan SIDa di Jawa Tengah ada 4 pilar tematik yaitu 1) Provinsi Inovatif; 2) Kabupaten Kota Inovatif; 3) Desa Inovatif; dan 4) UMKM Inovatif. Semenjak digulirkan tahun 2013, telah difasilitasi pengembangan system inovasi di 35 Kabupaten/Kota, pengembangan inovasi di 90 desa, serta pada 43 UMKM di Jawa Tengah.

Kegiatan lainnya adalah memfasilitasi inovasi masyarakat melalui Krenova atau Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk lomba krenova dan penjaringan inovasi. Kegiatan krenova dilakukan dengan 2 jalur dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki inovasi untuk bisa terlibat dalam kegiatan lomba krenova dan seleksi inovasi dengan jalur penjaringan inovasi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah menghasilkan karya inovasi sehingga mampu untuk mengatasi kebutuhan teknologi di sekitarnya atau dapat direplikasi di daerah lain, sehingga memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Jawa Tengah.

Partisipasi masyarakat Jawa Tengah mengikuti kegiatan KRENOVA Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai tahun 2022 terjadi fluktuasi, pada tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan sedangkan tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dikarenakan ada 2 kabupaten yang tidak mengikuti lomba krenova dan pembatasan jumlah peserta dari masing-masing Kabupaten/Kota maksimal 5 inovasi. Tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan disebabkan karena dilakukannya 2 mekanisme proses krenova melalui lomba krenova dan penjaringan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki inovasi, perlu diberikan kesempatan dan wadah agar inovasi tersebut tersalurkan.

Tabel 2.149.

Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Tahun	Jumlah Inovasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi	Keterangan
1	2018	201	35 Kabupaten/Kota	• Mulai tahun 2019 Lomba Krenova dibatasi maksimal 5 inovasi per kabupaten/kota; • Lomba krenova belum semua Kabupaten/Kota mengirimkan; • Penjaringan Inovasi Masyarakat baru dimulai tahun 2021.
2	2019	169	35 Kabupaten/Kota	
3	2020	167	34 Kabupaten/Kota	
4	2021	230	35 Kabupaten/Kota	
5	2022	276	34 Kabupaten/Kota	
6	2023	309	35 Kabupaten/Kota	
7	2024	n/a	n/a	n/a

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi daerah serta untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perhitungan Indeks Inovasi Daerah didasarkan pada 16 indikator satuan pemda dan 20 indikator satuan inovasi. Predikat penilaian IID terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut: 0 (tidak dapat dinilai); 0,01-29,99 (Kurang Inovatif); 30,00-59,99 (Inovatif) dan 60,00-100,00 (Sangat Inovatif).

Tabel 2.150.

Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID)	Predikat	Keterangan
1	2019	22.560	Sangat Inovatif	Perubahan Penilaian IID mulai tahun 2021 dengan menggunakan skala perhitungan 0 - 100
2	2020	36.357	Sangat Inovatif	
3	2021	62.57	Sangat Inovatif	
4	2022	71.32	Sangat Inovatif	
5	2023	65.40	Sangat Inovatif	
6	2024	n/a	n/a	n/a

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023

2.6.6. Kebudayaan

Dengan segala karakteristik penduduknya, keanekaragaman budaya di Jawa Tengah merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, rancangan kebijakan yang berfokus kepada pengembangan dan pelestarian budaya, sekaligus sebagai *booster* untuk mendorong laju pembangunan perlu dilakukan. Isu-isu sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan

pembangunan mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017). Adapun 10 objek pemajuan kebudayaan (OPK) atau yang juga disebut Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Hingga tahun terakhir, WBTB Jawa Tengah yang telah ditetapkan UNESCO antara lain: Keris Indonesia (2008), Pertunjukan Wayang (2008), Batik Indonesia (2009), Gamelan Jawa Tengah (2021), Jamu Jawa Tengah (2023), dan Kebaya (2024).

Tabel. 2.151

Data Objeak Pemajuan Kebudayaan (OPK) Jawa Tengah

	DOMAIN					Jenis OPK										
	Tradisi dan ekspresi lisan	Seni pertunjukan	Adat istiadat masyarakat, ritus	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta	Kemahiran kerajinan tradisional	TRAD.LISAN	MANUSKRIP	ADAT ISTIADAT	PERMAINAN RAKYAT	OR TRADISIONAL	PENGETAHUAN TRAD	TEKNOLOGI TRAD	SENI	BAHASA	RITUS	JUMLAH
UNESCO		2		1	4						2	3	2			7
WBTB	5	60	47	3	43	5		48	1		29	16	58		1	158
OPK						100	60	378	20	16	204	91	293	12	22	1196
Jumlah																1361

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Selain itu, keberhasilan pemajuan kebudayaan didukung pula oleh SDM kebudayaan. Dari 10 jenis OPK, salah satu yang memiliki banyak cabang yaitu seni/kesenian. Pada tahun 2024, Jawa Tengah memiliki 16.730 kelompok seni dan 322.471 pelaku seni yang tersebar di 104 jenis kesenian.

Tabel 2.152.

Lembaga/SDM Kesenian Berdasarkan Wilayah Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2024

Wilayah Karesidenan	Kelompok Seni (Sanggar/Kelompok)	Pelaku Seni (Orang)
Karesidenan Semarang	6.722	116.196
Karesidenan Pati	2.461	32.435
Karesidenan Surakarta	1.108	28.132
Karesidenan Kedu	3.853	99.827
Karesidenan Banyumas	558	4.051
Karesidenan Pekalongan	2.028	41.830
Total	**16.730**	**322.471**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Selain 10 jenis OPK, terdapat juga warisan budaya benda seperti cagar budaya, yang tidak menjadi bagian dari WBTB/OPK. Data CB yang tercatat di 35 Kabupaten/Kota mencapai 228 CB dan 18 CB telah berperingkat level provinsi

Tabel 2.153.
Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Jawa Tengah Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Cagar Budaya		Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)			
	CB Tercatat	CB Peringkat Prov	ODCB Teregistrasi	ODCB Ditetapkan	ODCB Dimanfaatkan	ODCB Dikembangkan
Kabupaten Banjarnegara	1	0	4	1	-	-
Kabupaten Banyumas	12	2	3	14	1	-
Kabupaten Batang	5	1	11	5	-	-
Kabupaten Blora	6	0	7	6	-	-
Kabupaten Boyolali	8	0	6	8	1	-
Kabupaten Brebes	0	0	12	0	-	-
Kabupaten Cilacap	10	0	2	10	-	-
Kabupaten Demak	6	0	7	6	-	-
Kabupaten Grobogan	0	0	5	0	-	-
Kabupaten Jepara	13	0	7	13	-	1
Kabupaten Karanganyar	4	0	4	5	1	-
Kabupaten Kebumen	4	0	12	4	-	-
Kabupaten Kendal	0	0	8	0	-	-
Kabupaten Klaten	9	0	11	9	-	-
Kabupaten Kudus	5	1	10	5	1	-
Kabupaten Magelang	12	0	5	12	1	2
Kota Magelang	7	1	3	7	-	1
Kabupaten Pati	9	1	10	10	-	-
Kabupaten Pekalongan	1	0	6	1	1	-
Kota Pekalongan	13	4	14	13	2	-
Kabupaten Pemalang	5	0	12	6	1	-
Kabupaten Purbalingga	11	1	5	11	-	-
Kabupaten Purworejo	7	1	12	7	2	1
Kabupaten Rembang	4	0	12	4	-	-
Kota Salatiga	6	0	10	6	1	-
Kabupaten Semarang	6	0	10	6	-	-
Kota Semarang	15	0	11	15	2	-
Kabupaten Sragen	5	0	5	7	1	-
Kabupaten Sukoharjo	4	2	3	6	-	-
Kota Surakarta	18	1	7	20	2	1
Kabupaten Tegal	5	0	5	5	-	-
Kota Tegal	6	0	13	6	2	-
Kabupaten Temanggung	5	1	11	8	2	3
Kabupaten Wonogiri	0	0	5	0	-	-
Kabupaten Wonosobo	6	2	3	6	-	-
Jumlah	228	18	271	242	21	9

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.6.7. Kearsipan

Peran kearsipan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah Jawa tengah melalui dukungan pada tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif dan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan,

keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan, serta belum optimalnya digitalisasi arsip.

Tabel 2.154.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2023

NO	Tahun	Nilai	Kategori
1	2019	79,33	Sangat Baik
2	2020	92,08	Sangat Memuaskan
3	2021	91,314	Sangat Memuaskan
4	2022	93,45	Sangat Memuaskan
5	2023	93,99	Sangat Memuaskan
6	2024	n/a	n/a

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023.

Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat masih perlu dioptimalkan. Berikut data jumlah kunjungan pengguna arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.155.

Jumlah Pengunjung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Jenis Layanan	Tahun (orang)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penelitian atau Mencari Arsip	757	780	209	346	496	1.182	n/a
2	Kunjungan atau Wisata Arsip	1.890	2.036	15.001	112	3.206	2.465	n/a
3	Magang atau PKL	219	151	103	67	97	260	n/a
4	Konsultasi Kearsipan atau Perpustakaan	669	485	206	127	288	494	n/a
5	Umum atau lain-lain	3535	594	33	81	338	242	n/a
6	Layanan SIKS, Website				11.289	41.718	91	n/a
	Jumlah	7.070	4.046	15.552	12.022	46.413	4.734	n/a

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023.

2.6.8. Akuntabilitas Kinerja

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut pada tahun 2018-

2023 mendapatkan predikat A. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun 2016-2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB.

Komponen SAKIP terdiri atas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Semua komponen mengalami kenaikan sehingga nilai SAKIP total juga mengalami kenaikan secara signifikan dari 81,13 di tahun 2022 menjadi 81,92 di tahun 2023 atau naik sebesar 0,79 poin. Hal ini menunjukkan ada perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Meski begitu masih terdapat beberapa catatan dari masing-masing komponen yang perlu ditindaklanjuti antara lain, menyempurnakan penjenjangan kinerja, review identifikasi *crosscutting* pada pohon kinerja, memastikan penetapan target kinerja OPD yang lebih baik, memastikan penerapan kinerja mempertimbangkan kinerja tahun terakhir yang telah tertuang pada perencanaan jangka menengah, mendorong komitmen seluruh pimpinan OPD untuk memanfaatkan e-kinerja, memastikan kembali perumusan kinerja individu melalui SKP, membangun budaya dialog kinerja, dan melakukan inovasi.

Tabel 2.156.
Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,77	26,64	26,66	25,53	25,71	n/a
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,50	20,23	20,23	23,63	23,78	n/a
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,99	12,08	12,27	12,84	12,93	n/a
4.	Evaluasi Internal	10	8,26	7,02	7,21	19,13	19,5	n/a
5.	Capaian Kinerja	20	14,04	14,28	14,35	n/a	n/a	n/a
	Hasil Nilai SAKIP	**100**	**81,56**	**80,25**	**80,72**	**81,13**	**81,92**	n/a
	Predikat		**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	n/a

Sumber: Kemenpan RB, Maret, 2023.

2.6.9. Manajemen ASN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem merit ini meliputi 8 aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; serta Sistem Informasi.

Penerapan Sistem Merit di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan dari tahun 2019 hingga 2024. Peningkatan ini tercermin dari Indeks Sistem Merit yang terus naik dari 0,70 dengan nilai 280 pada tahun 2019 menjadi 0,83 dengan nilai 340,5 pada tahun 2023 yang menempatkan Provinsi Jawa Tengah dalam kategori "Sangat Baik". Dengan kategori sangat baik, sesuai dengan penilaian mandiri untuk tahun 2024 sebesar 0,86 dengan nilai 355,5.

Meskipun secara keseluruhan menunjukkan tren positif, namun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian untuk perbaikan. Aspek

Promosi dan Mutasi menunjukkan skor yang stagnan, mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa proses tersebut benar-benar didasarkan pada kualifikasi dan kinerja. Selain itu, aspek Perlindungan dan Pelayanan justru mengalami penurunan 2 skor yang semula di tahun 2023 sebesar 14 menjadi 12 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan hak-hak perlindungan ASN belum berjalan dengan baik.

Tabel 2.157.
Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

NO	Aspek	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Perencanaan Kebutuhan	10	37,5	40	40	40	45
2	Pengadaan	30	38	40	40	40	42
3	Pengembangan Karier	72,5	55	75	76	75	82,5
4	Promosi dan Mutasi	30	20	35	35	35	35
5	Manajemen Kinerja	50	67,5	70	70	75	75
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	30	35	37,5	37,5	37,5	40
7	Perlindungan dan Pelayanan	10	16	14	16	14	12
8	Sistem Informasi	20	20	24	24	24	24
Skor Nilai		**280**	**289**	**335,5**	**337,5**	**340,5**	**355,5**
Indeks Sistem Merit		**0,70**	**0,70**	**0,81**	**0,82**	**0,83**	**0,86**

Sumber: KASN, 2023

Tabel 2.158.
Jumlah ASN Berdasarkan Usia Tahun 2024

Usia	PNS	PPPK	Jumlah	Prosentase
18-40	6.374	10.292	16.666	34,93%
41-55	18.591	5.504	24.095	50,50%
>55	6599	352	6.951	14,57
Total	**31.564**	**16.148**	**47.712**	**100,00%**

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun (diolah), 2024.

Meskipun begitu, Kesenjangan generasi ASN di Jawa Tengah saat ini menjadi catatan penting. Jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah saat ini berjumlah 47.712. di rentang usia 18-40 tahun berjumlah 16.666 (34,93 persen) menunjukkan potensi besar untuk inovasi dan adopsi teknologi, mengingat generasi muda cenderung lebih adaptif terhadap perubahan. Di rentang usia 41-55 tahun berjumlah 24.095 (50,50 persen) memiliki pengalaman dan mengalami banyak perubahan era dan mayoritas telah berada di jabatan administrasi. Di usia lebih dari 55 tahun berjumlah 6.951 (14,57 persen) menjadi jumlah yang paling kecil diantara kategori yang lain dan pada rentang usia ini menjelang usia pensiun.

Sehingga perlu perubahan pola kerja yang mendorong kolaborasi antar generasi, mendorong pemanfaatan teknologi serta dilengkapi dengan perencanaan kepegawaian yang berdasarkan pemetaan kebutuhan pegawai untuk mengetahui posisi esensial serta pelaksanaan manajemen talenta untuk menyiapkan kader suksesi yang lebih siap, produktif dan berkinerja untuk mengisi jabatan PNS dan mendukung kinerja organisasi.

Tabel 2.159.
Jumlah Fasilitasi Tugas Belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN						JUMLAH
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	S1/DIV/PROFESI	13	0	0	10	2	4	29
2	S2	15	22	16	28	20	23	124
3	PPDS	5	5	2	7	10	6	35
4	S3	3	1	3	9	2	2	20
5	SUB SPESIALIS	2	2	1	4	3	4	16
	JUMLAH	38	30	22	58	37	16	224

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Salah satu upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi ASN yaitu melalui jalur pendidikan lanjutan dalam bentuk Tugas Belajar. Kurun waktu tahun 2019-2029 Provinsi Jawa Tengah sudah memfasilitasi tugas belajar sebanyak 2024 orang. 29 orang untuk jenjang S1/DIV/Profesi, 124 orang untuk jenjang S2, 35 orang untuk PPDS, 20 orang untuk jenjang S3, dan 16 orang untuk Sub Spesialis. Pemberian fasilitasi tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

Selain melalui jalur pendidikan lanjutan, peningkatan kompetensi ASN juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2018-2022 kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terus meningkat secara kuantitas. Hal ini menunjukkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat mencakup kalangan ASN secara luas yang tidak terbatas pada ASN Provinsi Jawa Tengah tetapi juga seluruh ASN di Jawa Tengah. Selain pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BPSDMD, pengembangan kompetensi ASN juga dilakukan melalui sertifikasi. Pada tahun 2022 dari jumlah 50.115 peserta terdapat 46.012 sertifikat terkirim atau sebesar 91,8% peserta tersertifikasi. Hal ini menunjukkan potensi kompetensi SDM ASN yang cukup mumpuni tetapi juga menjadi pekerjaan rumah untuk menuntaskan 9,2 persen potensi yang tidak tersertifikasi. Hal itu bisa jadi disebabkan karena peserta tidak lulus sertifikasi atau tidak melaporkan kepada BPSDMD selaku *leading sector* pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.160.
Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019-2024

Tahun	Target Peserta (orang)	Realisasi Peserta (orang)
2019	10.110	9.820
2020	2.789	2.763
2021	6.935	6.956
2022	18.932	19.838
2023	31.268	40.910
2024	6.360	136.989

Sumber : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Meski telah menglami peningkatan kuantitas pendidikan dan pelatihan yang signifikan, pendidikan dan pelatihan ASN di Jawa Tengah belum terstruktur untuk perbaikan kompetensi dan kinerja ASN. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya Road Map pengembangan kompetensi berbasis analisi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN yang menjadi acuan untuk

pengembangan kompetensi dan karir ASN. Kondisi tersebut menyebabkan *gap* kompetensi dan kinerja ASN belum terpetakan dengan baik, pengembangan kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan kinerja, serta penilaian kinerja ASN belum akurat dalam suatu sistem yang terintegrasi.

2.6.10. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah salah satunya direpresentasikan melalui capaian kepemilikan KTP-el. Pada Tahun 2020-2024, kepemilikan KTP-el di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data target indikator kinerja dalam RPD, pada tahun 2025 ditetapkan target kepemilikan KTP-el Provinsi Jawa Tengah adalah 99 persen. Meskipun capaian pada tahun 2023 sudah melampaui target tersebut, namun banyak faktor yang dapat mempengaruhi capaian kepemilikan KTP-el melalui perekaman KTP-el, salah satunya adalah dinamika perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada peningkatan dan penurunan jumlah penduduk. Dengan adanya dinamika tersebut, maka Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan perekaman KTP-el perlu meningkatkan kinerja seiring dengan perubahan jumlah penduduk. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja kepemilikan KTP-el diantaranya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan, sosialisasi perekaman KTP-el, fasilitasi blangko perekaman KTP-el, percepatan penerbitan KTP-el, dan upaya lainnya. Untuk mengetahui kinerja kepemilikan KTP, maka berikut merupakan grafik persentase penduduk yang terfasilitasi pengurusan dokumen KTP-el mengacu pada data jumlah penduduk dengan usia wajib KTP.

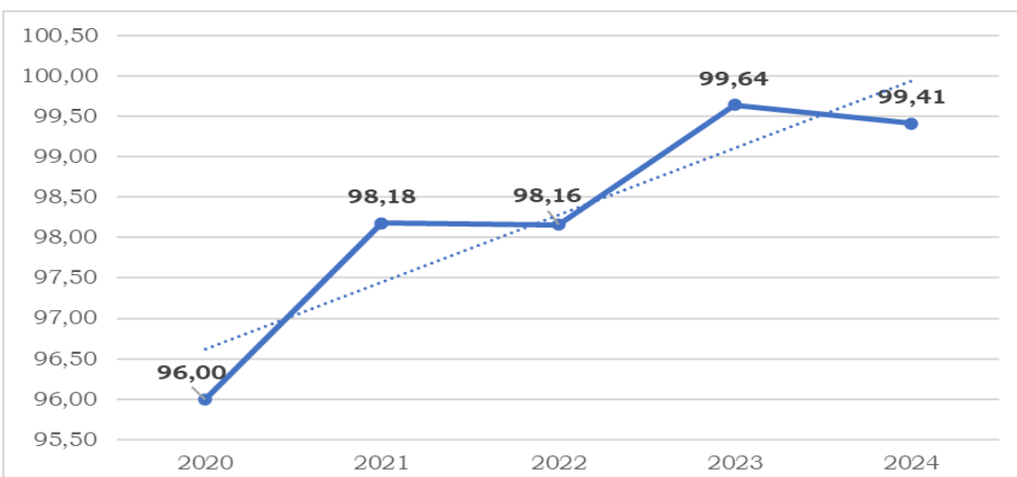

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.116.
Presentase Penduduk yang Terfasilitasi Pengurusan Dokumen KTP-el (%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

a. Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran

Aspek pendukung dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lainnya adalah terkait kepemilikan akta kelahiran. Pentingnya kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum yang sah anak sebagai warga negara. Selain itu, akta kelahiran menjadi instrumen kependudukan yang sah bagi seorang anak untuk

mendapatkan perlindungan atas hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas tempat tinggal yang layak, dan hak atas perlindungan sosial. Upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Jawa Tengah terus diupayakan di 35 Kabupaten/Kota. Sampai dengan Tahun 2024, persentase kepemilikan akta kelahiran adalah 99,11 persen. Angka tersebut sudah mencapai target kepemilikan akta kelahiran pada RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, yaitu 99 persen di Tahun 2025 dan 100 persen di Tahun 2026 sehingga upaya keras untuk dapat mewujudkan target tersebut pada Tahun 2026. Berikut merupakan grafik capaian kinerja pada kepemilikan akta kelahiran di Jawa Tengah Tahun 2020-2024.

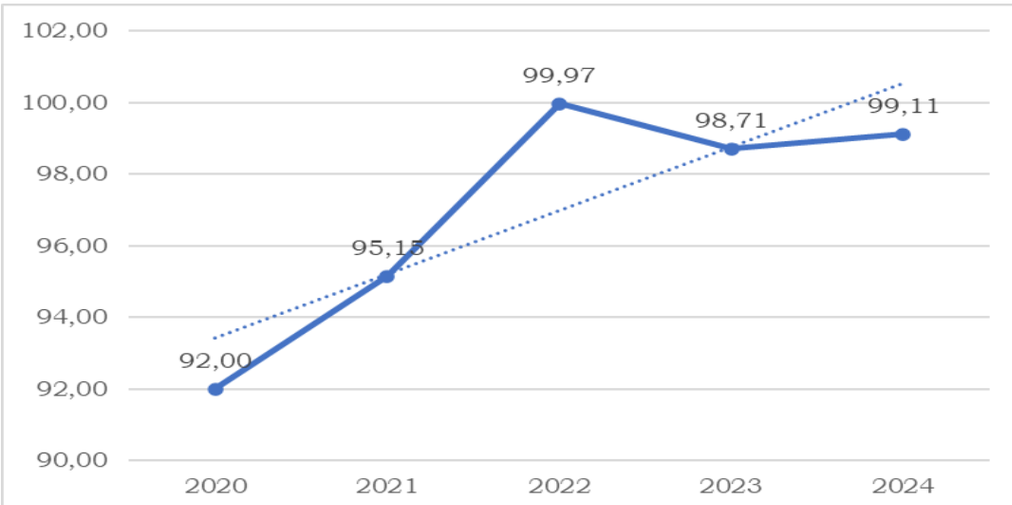

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.117.
Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (%)

Berdasarkan grafik pada gambar di atas, terjadi penurunan capaian pada rentang Tahun 2022-2023 meski begitu tren dari Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan meski tidak signifikan. Tren peningkatan tersebut disebabkan oleh pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, *sms gateway*, dan layanan *online.* Penyebarluasan informasi mengenai pentingnya kepemilikan data kependudukan yang diantaranya meliputi KTP, akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) juga menjadi salah satu faktor dalam upaya peningkatan data kependudukan masyarakat di Jawa Tengah. Penyebarluasan informasi tersebut disampaikan dalam beberapa media baik *online* maupun *offline.*

b. Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik terhadap anak, pemenuhan hak kewarganegaraan anak, peningkatan pendataan anak, dan dasar intervensi perlindungan sosial terhadap anal. Pelaksanaan penerbitan kartu identitas anak diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Sementara itu, kinerja pelayanan terhadap penerbitan KIA di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2024

adalah 69,39 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada aspek pelayanan penerbitan KIA, Provinsi Jawa Tengah perlu upaya yang cukup keras agar seluruh anak (usia 0-17) terpenuhi atas hak kepemilikan KIA.

c. Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meluasnya penggunaan informasi digital, telah diterbitkan salah satu inovasi dalam rangka mengintegrasikan data kependudukan secara digital. IKD merupakan program dari pemerintah Pusat dalam rangka memberikan layanan kependudukan secara praktis dengan basis data terpusat yang dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah langkah strategis, diantaranya adalah: (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung keamanan data, privasi, dan inklusivitas, (2) Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri proaktif dalam mengembangkan dan memelihara infrastruktur yang mendukung implementasi IKD, (3) Edukasi dan kesadaran masyarakat merupakan komponen penting dalam menerapkan IKD yang inklusif, dan (4) Berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, Kemendagri terus pro aktif dalam menjaga keamanan data dan privasi pengguna. Dengan adanya IKD diharapkan akses terhadap dokumen kependudukan dalam berbagai aspek kepentingan dapat terlaksana secara efisien dengan sistem yang terintegrasi. Meski begitu masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam implementasi IKD, diantaranya adalah keterbatasan informasi masyarakat, keterbatasan akses internet dan perangkat digital, dan pengoperasian sistem. Pada Tahun 2024, capaian perekaman data kependudukan yang terintegrasi dalam IKD di provinsi Jawa Tengah baru mencapai 6,98 persen, tentunya perlu upaya keras dalam rangka meningkatkan penggunaan IKD untuk integrasi data kependudukan digital. Berikut merupakan capaian IKD di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

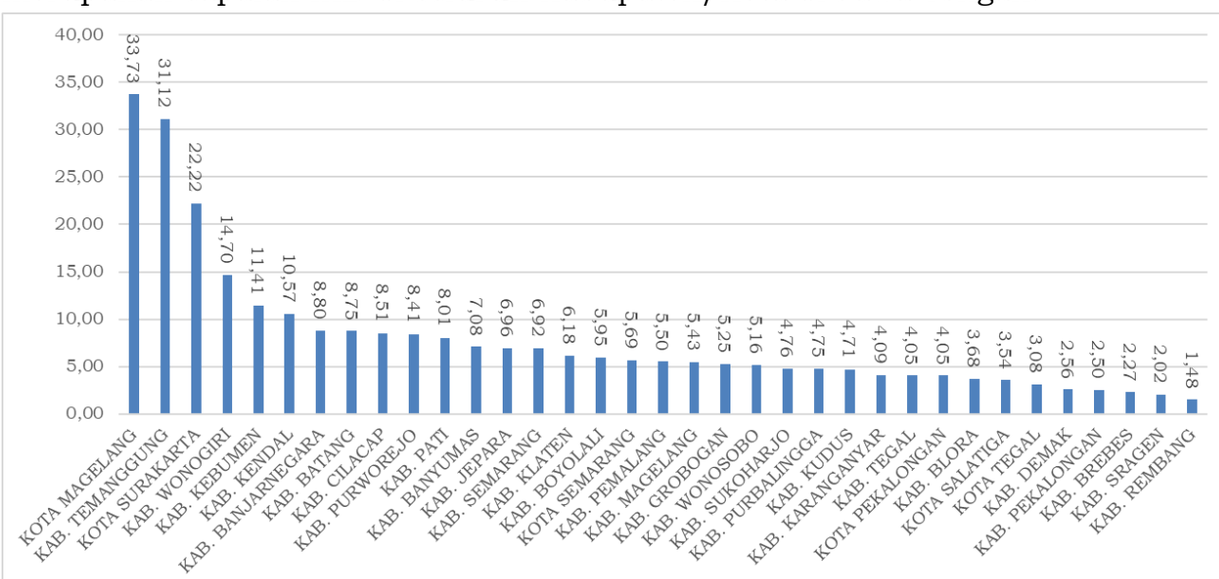

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.118.
Presentase Jumlah Data Kependudukan yang Terintegrasi dalam Sistem IKD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

d. Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS). Sampai dengan tahun 2024, terdapat 574 PKS yang ada di seluruh Jawa Tengah. Beberapa pihak yang bekerjasama antara lain, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.6.11. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga perlu difokuskan pada pembangunan di wilayah perdesaan. Pembangunan desa dilakukan untuk dapat meningkatkan kemandirian desa. Desa Mandiri merupakan desa yang memiliki kapasitas dalam mengelola aset dan sumber daya lokal yang sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sampai dengan tahun 2024, capaian tingkat kemandirian desa di Jawa Tengah diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengklasifikasikan tingkat kemandirian desa menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Tahun 2020-2024, capaian kemandirian desa di Jawa tengah terus mengalami peningkatan yang diukur melalui peningkatan rata-rata nilai IDM Jawa Tengah dan peningkatan persentase jumlah desa mandiri. Sampai dengan tahun 2024, terdapat total 1,530 Desa Mandiri (19,59 persen), 3.816 Desa Maju (48,86 persen), 2.456 Desa Berkembang (31,45 persen), dan 8 Desa Tertinggal (0,10 persen). Berdasarkan capaian tersebut kenaikan jumlah Desa Mandiri cukup signifikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya pada 2023, yaitu 825 Desa Mandiri (10,56 persen). Beberapa aspek menjadi faktor yang mendorong meningkatnya capaian kemandirian desa di Jawa Tengah, diantaranya adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, peningkatan perekonomian lokal melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan peran lembaga keuangan, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, peningkatan penyediaan kebutuhan layanan dasar di desa, dan beberapa faktor lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan desa. Meski begitu, capaian tersebut belum bisa dikatakan optimal mengingat masih adanya Desa Tertinggal di Jawa tengah pada tahun 2024, yaitu 8 (delapan) Desa Tertinggal yang tersebar di Kabupaten Demak dan Kabupaten Tegal. Beberapa kendala yang dihadapi pada desa-desa tertinggal di

Jawa Tengah adalah permasalahan pada kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur pendukung aksesibilitas yang belum optimal.

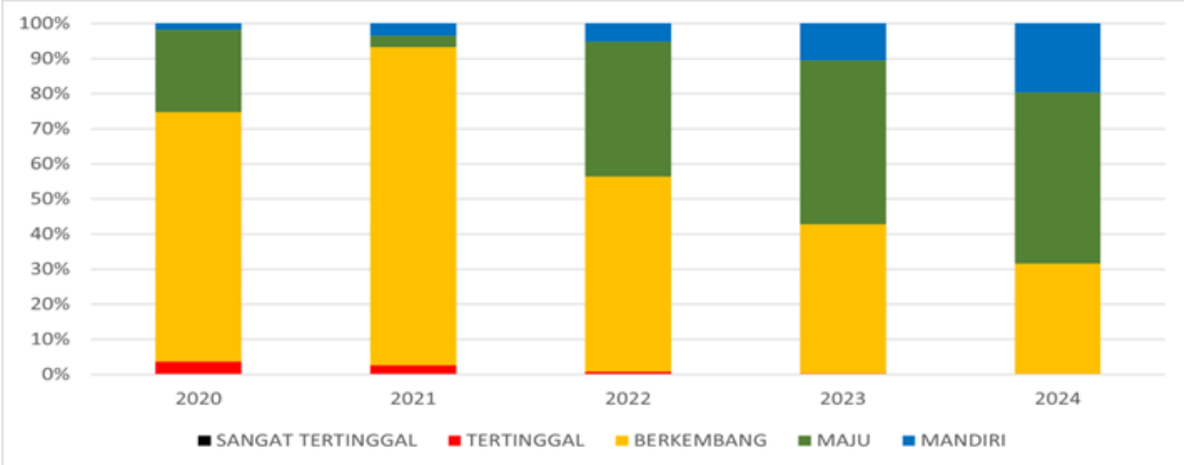

Sumber: Kemendes PDTT, 2024.

Gambar 2.119.
Klasifikasi Tingkat Kemandirian Desa
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Persen)

Perekonomian desa merupakan salah satu Upaya yang dilakukan untuk mendorong kemandirian desa. Ekonomi desa melibatkan berbagai pihak, baik Masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah, pihak ketiga (swasta), maupun lembaga ekonomi yang dibentuk oleh desa. Lembaga ekonomi desa yang berperan penting dalam Upaya peningkatan pendapatan desa melalui optimalisasi potensi local desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, sampai dengan Tahun 2024, masih terdapat beberapa desa belum memiliki BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa. Berikut merupakan data terkait desa di Jawa Tengah.

Tabel 2.161.
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten	Desa	Jumlah Desa Sudah Membentuk BUM Desa		Jumlah Desa Belum Membentuk BUM Desa	
			Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
1	Banjarnegara	266	262	98,50%	4	1,50%
2	Banyumas	301	300	99,67%	1	0,33%
3	Batang	239	228	95,40%	11	4,60%
4	Blora	271	270	99,63%	1	0,37%
5	Boyolali	261	222	85,06%	39	14,94%
6	Brebes	292	292	100,00%	0	0,00%
7	Cilacap	269	269	100,00%	0	0,00%
8	Demak	243	214	88,07%	29	11,93%
9	Grobogan	273	273	100,00%	0	0,00%
10	Jepara	184	184	100,00%	0	0,00%
11	Karanganyar	162	160	98,77%	2	1,23%
12	Kebumen	449	449	100,00%	0	0,00%
13	Kendal	266	260	97,74%	6	2,26%
14	Klaten	391	391	100,00%	0	0,00%

No	Kabupaten	Desa	Jumlah Desa Sudah Membentuk BUM Desa		Jumlah Desa Belum Membentuk BUM Desa	
			Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
15	Kudus	123	112	91,06%	11	8,94%
16	Magelang	367	356	97,00%	11	3,00%
17	Pati	401	401	100,00%	0	0,00%
18	Pekalongan	272	253	93,01%	19	6,99%
19	Pemalang	212	211	99,53%	1	0,47%
20	Purbalingga	224	224	100,00%	0	0,00%
21	Purworejo	469	468	99,79%	1	0,21%
22	Rembang	287	263	91,64%	24	8,36%
23	Semarang	208	202	97,12%	6	2,88%
24	Sragen	196	196	100,00%	0	0,00%
25	Sukoharjo	150	147	98,00%	3	2,00%
26	Tegal	281	268	95,37%	13	4,63%
27	Temanggung	266	258	96,99%	8	3,01%
28	Wonogiri	251	251	100,00%	0	0,00%
29	Wonosobo	236	211	89,41%	25	10,59%
	JUMLAH	**7810**	**7595**	**97,25%**	**215**	**2,75%**

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat 2,75 persen atau 215 Desa di Jawa Tengah yang belum membentuk BUMDes. Desa-desa tersebut perlu didorong agar dapat membentuk BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian desa. Semenetara itu, apabila dilihat dari klasifikasi perkembangannya, BUMDes dapat dikategorikan dalam kelas perintis, pemula, berkembang, dan maju. Klasifikasi BUMDes saat ini mengacu pada Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Berikut merupakan grafik klasifikasi perkembangan BUMDes Jawa Tengah Tahun 2023 dan Tahun 2024.

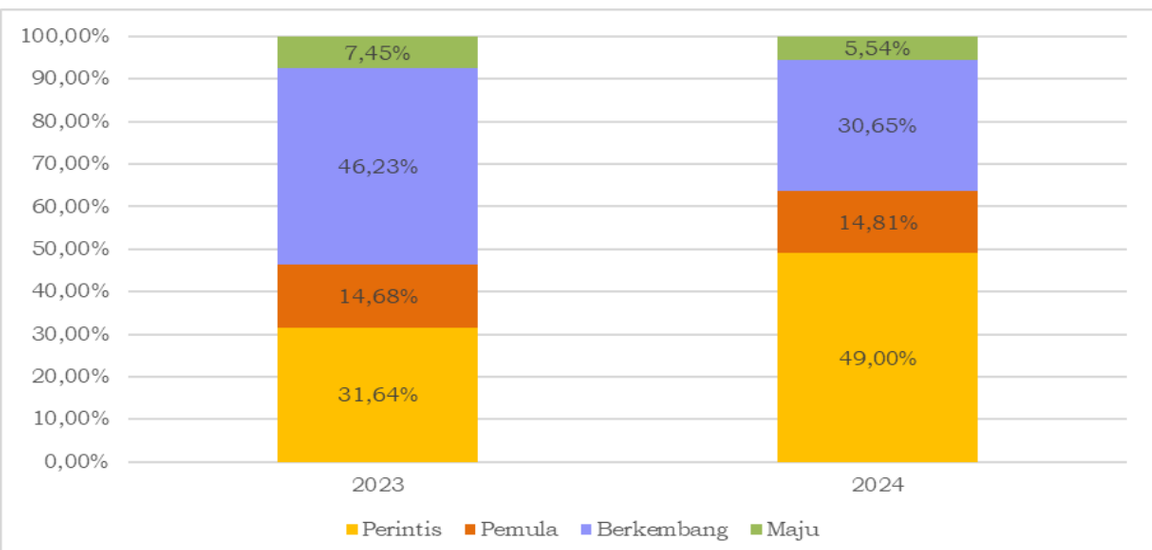

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.120.
Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan grafik tersebut, sebagian besar BUMDes di Jawa Tengah masih ada di klasifikasi perintis dan berkembang. Sementara itu, BUMDes dengan klasifikasi maju masih sedikit, hanya 5,54 persen. Perlu komitmen dan upaya bersama yang kuat dari berbagai pihak, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar kedepannya BUMDes di Jawa Tengah dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya, terutama dalam mendukung perekonomian desa. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala perkembangan BUMDes di Jawa Tengah diantaranya adalah keterbatasan akses permodalan, kapasitas SDM yang kurang memadai, manajemen/pengelolaan yang belum optimal, minimnya kerjasama, kurangnya sarana prasarana pendukung, belum optimalnya inovasi dalam diverisikasi produk, dan belum adanya dukungan kebijakan/regulasi yang mendukung.

Selain BUMDES, lembaga perekonomian desa yang juga berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa adalah Pasar Desa. Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terdapat 1.218 unit pasar yang tersebar di 29 Kabupaten. Kondisi saat ini belum seluruh desa di Jawa Tengah memiliki pasar desa, berikut merupakan presentase keberadaan pasar desa di Jawa Tengah.

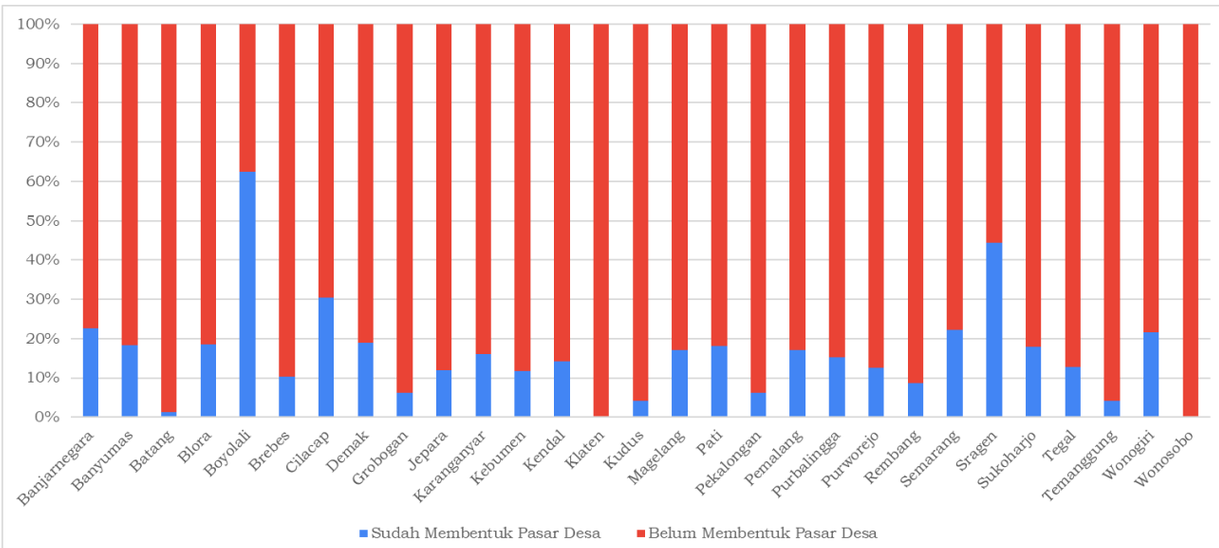

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.121.
Presentase Desa yang Memiliki Pasar Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan perdesaan, yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayananan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk 149 kawasan perdesaan. 149 kawasan perdesaan tersebut dikembangkan melalui potensi tematik masing-masing kawasan yang berbeda-

beda. Tema pengembangannya diantaranya adalah pertanian, wisata, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri kecil.

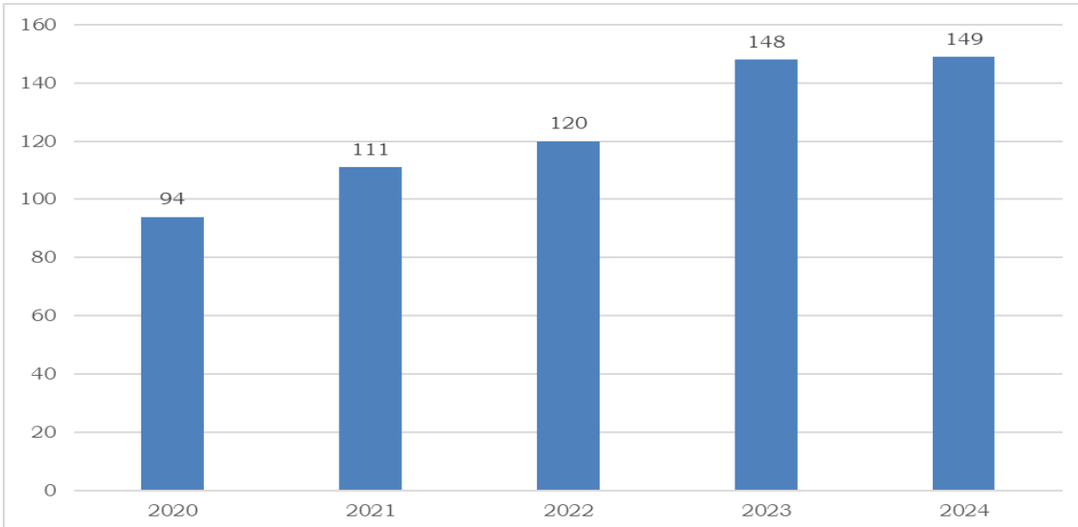

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2024

Gambar 2.122.
Jumlah Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) Di Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sebanyak 149 kawasan perdesaan tersebut tersebar di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk kawasan perdesaan yang menjadi priotitas provinsi agar selanjutnya dapat menjadi fokus lokasi intervensi pengembangan desa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya prioritas tersebut, maka dapat meningkatkan kualitas kawasan perdesaan melalui intervensi yang diberikan dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan berdampak pada pengurangan kemiskinan di perdesaan. Berikut merupakan sebaran jumlah kawasan perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

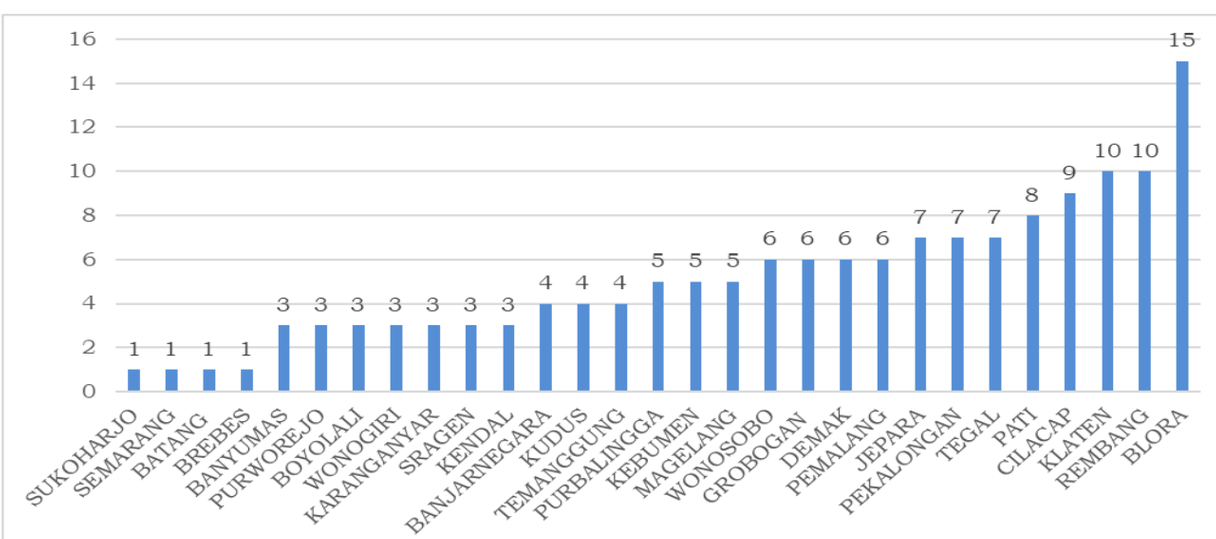

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.123.
Sebaran Jumlah Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, secara spasial persebaran Kawasan perdesaan di Jawa Tengah dapat dipetakan dalam gambar berikut.

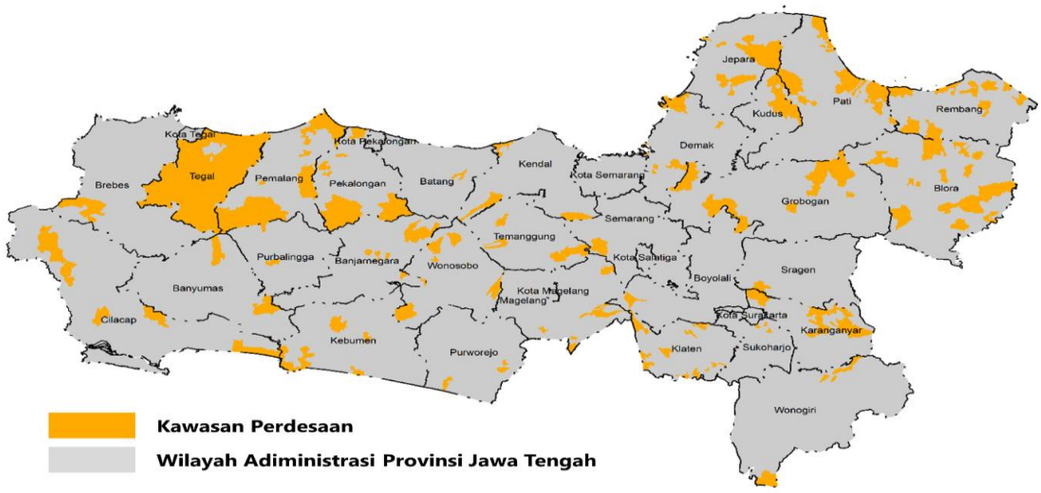

Sumber: *Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Gambar 2.124.
Sebaran Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan gambar peta persebaran Kawasan perdesaan di atas, Jawa Tengah memiliki potensi 149 Kawasan Perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah desa. Beberapa di antaranya bahkan berada di perbatasan wilayah kabupaten dan wilayah Provinsi. Hal tersebut dapat diarahkan untuk menstimulasi Kerjasama pembangunan antar wilayah perbatasan.

Apabila dilihat dari capaian kinerjanya, walaupun dari sisi kuantitas jumlah Kawasan perdesaan di Jawa Tengah terus meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

2.6.12. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 program dan 8 indikator kinerja. Pada Tahun 2024 realisasi capaian kinerja perencanaan persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) pada lingkup bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan sosial budaya, infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada masing – masing bidang mencapai target 100 persen dan untuk Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan pada Tahun 2024 juga sebesar 100 persen. Sehingga indikator urusan Perencanaan sebanyak 8 indikator dengan keseluruhan indikator berstatus telah tercapai.

Selain kinerja program Sejak Tahun 2024 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Provinsi telah dicanangkan oleh Kementerian Bappenas yang hasil penilaian untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,89 yang penilaiannya mendasarkan pada komponen sinergi, kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja, adapun sub komponennya berupa keselarasan;

kesesuaian; target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

2.6.13. Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai menggunakan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif , efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD setiap tahun dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi dasar pengukuran yang dilakukan untuk pertama kali pada tahun 2021 untuk Tahun Anggaran 2018-2020. Namun demikian, Kemendagri baru merilis hasil pengukurannya melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023. IPKD diukur melalui enam dimensi, yaitu:

a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
b. Kualitas anggaran belanja dalam APBD;
c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
d. Penyerapan anggaran;
e. Kondisi keuangan daerah;
f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Gambaran kemampuan keuangan daerah juga dapat dilihat menggunakan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang menunjukkan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Pengelompokan kategori kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Formulasi perhitungan kapasitas fiskal daerah selama beberapa tahun terakhir mengalami beberapa kali penyesuaian yang mengakibatkan perubahan pada pengelompokan kategori tiap daerah berdasarkan nilai rasionya, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.162.
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
IPKD	Indeks Total	-	-	-	79,293	*
	Kategori	-	-	-	B	*
Kapasitas Fiskal Daerah	Rasio KFD	2,0943	2,046	1,947	1,821	1,708
	Kategori KFD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber : Kepmendagri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
**Hasil pengukuran IPKD Tahun 2024 belum rilis*

Hasil Pengukuran IPKD Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2023 menunjukkan perlunya upaya perbaikan. Nilai maksimal didapatkan pada dimensi kualitas anggaran belanja dalam APBD yang disebabkan pengalokasian belanja mandatori sudah sesuai regulasi dan dimensi opini pemeriksaan BPK atas pemeriksaan LKPD dimana sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD Tahun 2023. Sedangkan dimensi yang membutuhkan perbaikan adalah Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran khususnya terkait kesesuaian nomenklatur program dan pagu program dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga APBD; Transparansi pengelolaan keuangan daerah; Penyerapan anggaran dan Kondisi keuangan daerah.

Kapasitas fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 masuk dalam kategori sangat tinggi. Pada periode tersebut formulasi perhitungan dibandingkan dengan nilai rata-rata kapasitas fiskal seluruh provinsi yang ada, artinya pertumbuhan kemampuan keuangan Provinsi Jawa Tengah lebih baik dari sebagian besar provinsi lain dan hanya Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur yang berada diatas Jawa Tengah. Sedangkan pada periode tahun 2022 sampai dengan 2024 formulasi perhitungan kapasitas fiskal dibandingkan dengan belanja pegawai pada masing-masing provinsi. Pendapatan Provinsi Jawa Tengah terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi peningkatan pendapatan tersebut juga disertai dengan peningkatan belanja pegawai karena penambahan formasi PPPK tenaga teknis pada sektor pendidikan dan kesehatan sehingga nilai rasio kapasitas fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah menurun.

2.6.14. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada tercapainya terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*). Kinerja bidang pengawasan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2019-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.163.
Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2024

No.	Kinerja Pengawasan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Maturitas SPIP	2,85	n/a	3,115	3,267	3,464	3,471
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang disebabkan

perubahan metodologi penilaian. Sedangkan tahun 2020, tidak dilakukan quality assurance oleh BPKP serta terdapat perubahan pedoman aplikasi SPIP online, sehingga berakibat tidak ada penilaian maturitas SPIP tahun 2020 yang telah berjalan dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Sedangkan nilai maturitas SPIP pada tahun 2021 sebesar 3,115 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,043. Hal ini disebabkan karena belum menerapkan manajemen resiko sebagai indikator unit kerja. Namun pada Tahun 2023 nilai maturitas SPIP kembali mengalami peninkatan dari 2022 sebesar 3,267 menjadi 3,464. Trend kenaikan berlanjut pada tahun 2024 yang meningkat 0,007 menjadi 3,471. Namun apabila dilihat trend lima tahun, kinerja pengawasan cenderung meningkat yang artinya kebijakan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik.

Sesuai dengan hasil reviu atas *quality assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan 2023 Kapabilitas APIP sudah mencapai Level 3 penuh. Ini artinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi *quality assurance, consulting partner* dan *anti corruption activities*.

Kinerja pengawasan juga mendukung pencapaian reformasi birokrasi melalui upaya manghapus seluruh praktik-praktik korupsi seperti penyuapan, pemerasan gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang melalui penguatan integritas. Capaian nilai Indeks Integritas Nasional (IIN) yang diambil dari Survey Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2021–2023 menunjukkan tren penurunan dari 80,97 pada tahun 2021 menjadi 77,91 pada tahun 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 79,47, sekaligus menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan nilai SPI tertinggi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan capaian nasional pada periode yang sama, yakni dari 72,4 pada tahun 2021 menjadi 71,53 pada tahun 2024, kinerja Jawa Tengah masih berada di atas rata-rata nasional. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap mengindikasikan bahwa upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur serta organisasi pemerintah perlu terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pengawasan, manajemen risiko, dan pembudayaan etika birokrasi yang berintegritas

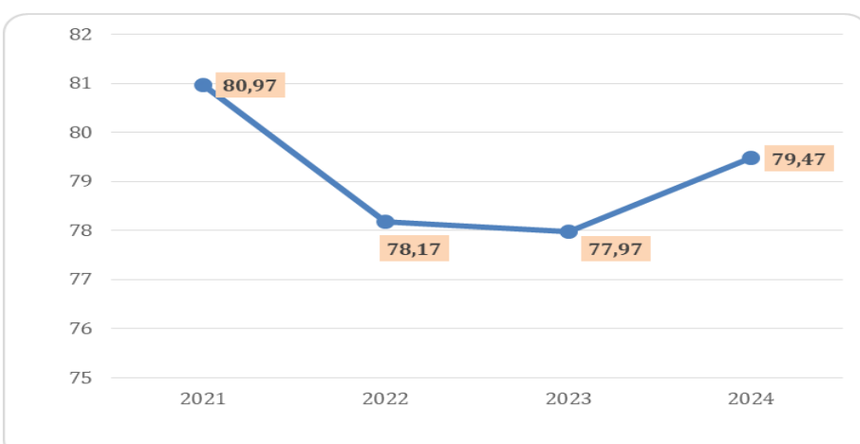

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024.

Gambar 2.125.
Indeks Integritas Nasional Jawa Tengah dibandingkan Nasional Tahun 2021-2024

2.6.15. Pertanahan

Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanahan merupakan pendukung kegiatan pembangunan fisik dalam hal mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran yaitu ijin penetapan lokasi (penlok) yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan mendapat ganti untung yang layak dari pemerintah. Pada Tahun 2024 terdapat penyelenggaraan 7 (tujuh) penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebanyak 3.490 bidang tanah seluas 924,48 Ha yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.164.

Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2024

NO	PENETAPAN LOKASI	JUMLAH BIDANG	LUAS TANAH	NO / TANGGAL TERBIT SK	KETERANGAN
1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora	± 908 bidang	± 392,37 Ha	590/2 31 Januari 2024 (BENDUNGAN KARANGNONGKO DI KAB. BLORA)	Habis Pada Tanggal 31 Januari 2027
2	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran-Pedan *Sirkuit* 2 Section 2 (Ampel-Pedan) di Provinsi Jawa Tengah	± 189 bidang	± 5,6177 Ha	590/22 Tahun 2024 5 September 2024 (SUTET 500kV Ungaran-Pedan *Sirkuit* 2 Section 2 (Ampel-Pedan) di Provinsi Jawa Tengah)	Habis Pada Tanggal 5 September 2025
3	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bodri di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung	± 1.083 bidang	± 277 Ha	590/24 Tahun 2024 19 September 2024 (BENDUNGAN BODRI DI KABUPATEN KENDAL DAN KABUPATEN TEMANGGUNG)	Habis Pada Tanggal 19 September 2027
4	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak	± 153 bidang	± 6,86 Ha	590/32 Tahun 2024 5 November 2024 (SISA TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)	Habis Pada Tanggal 5 November 2025

NO	PENETAPAN LOKASI	JUMLAH BIDANG	LUAS TANAH	NO / TANGGAL TERBIT SK	KETERANGAN
5	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Lanjutan di Kabupaten Purbalingga	± 136 bidang	± 56.294 m^2	590/33 Tahun 2024 12 November 2024 (JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI SLINGA LANJUTAN DI KABUPATEN PURBALINGGA)	Habis Pada Tanggal 12 November 2025
6	Pengadaan Tanah Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Pedan-Solo Baru di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo	± 101 bidang	± 19.195 m2	590/34.1 Tahun 2024 21 November 2024 (SUTT 150Kv PEDAN-SOLO BARU DI KAB. KLATEN DAN KAB. SUKOHARJO)	Habis Pada Tanggal 21 November 2027
7	Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Kedunglanggar di Kabupaten Batang	± 1.062 bidang	± 230,62 Ha	590/47 Tahun 2024 20 Desember 2024 (BENDUNGAN KEDUNGLANGGAR DI KAB. BATANG)	Habis Pada Tanggal 20 Desember 2027
	JUMLAH	**3.490 Bidang**	**924,48 Ha**		

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024.

Tabel 2.165.

Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemantauan Penetapan Lokasi	-	400	526	2.217	898	224	6.917
2	Penetapan Lokasi	7.414	2.237	5928	2.811	12.433	1.616	3.940

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.166.

Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI					TOTAL (S.D AKHIR TAHUN 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Penetapan Lokasi	5.928 Bidang (493,4437 Ha)	2.811 Bidang	+ 12.433 Bidang (1.223,60 Ha)	1.616 Bidang (411,68 Ha)	3.940 Bidang (924,48 Ha)	28.965 Bidang (1.247,995 Ha)

NO	URAIAN	REALISASI					TOTAL (S.D AKHIR TAHUN 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024	
			(± 858,891 6 Ha)				
2.	Reforma Agraria						
	a). Sertifikasi LP2B	200 Bidang	350 Bidang	150 Bidang	650 Bidang		1.450 Bidang
	b). Sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD)	15 Bidang	0	63 Bidang	37 Bidang		130 Bidang
	c). Inventarisasi Tanah HP dan HGU	20 Bidang	10 Bidang	30 Bidang	27 Bidang		107 Bidang
	d). Pelatihan untuk Akses Reforma Agraria	100 Orang	260 Orang	350 Orang	350 Orang	400 Orang	1.567 Orang

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pelaksanaan sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B juga bertujuan untuk mempertahankan lahan pangan di Provinsi Jawa Tengah yang sampai dengansaat ini sudah banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan industry/non-pertanian. Kegiatan ini sekaligus sebagai stimulasi kepada Pemerintah Kab/Kotadengan harapan agar ke depannya Pemerintah Kab/Kota dapat mereplikasi kegiatanserupa sebagai bentuk dukungan pelaksanaan.

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat provinsi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah menginventarisasi potensi penataan aset dan mengkoordinasi serta melakukan fasilitasi penataan akses bagi penerima program Reforma Agraria. Penataan akses yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan subyek program reforma agraria antara lain seperti pelatihan kepada kelompok tani dikawasan LP2B dan pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik. Capaian pelaksanaan program Reforma Agraria yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Disperakim berkedudukan sebagai sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Tengah berperan dalam optimalisasi penyelenggaraan Reforma Agraria di Jawa Tengah, melalui kolaborasi dan optimalisasi Tim GTRA. Penyelenggaraan Reforma Agraria berupa Penataan Akses telah dilaksanakan melalui 8 kegiatan pada lokasi miskin ekstrim dengan jumlah intervensi 400 KK yaitu:

1. Penataan Akses melalui pemberdayaan masyarakat secara reguler dilaksanakan di 6 (enam) lokasi yaitu :
   a). Pelatihan pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi produk organik di Desa Sudungdewo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
   b). Pelatihan pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi produk organik di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
   c). Pelatihan pembuatan pupuk organik di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
   d). Pelatihan penanggulangan hama pada tanaman padi di Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar;
   e). Pelatihan pengolahan sampah organik menjadi produk rumah tangga di Desa Glempang Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;
   f). Pelatihan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik menjadi Bioaktivator di Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.
2. Penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat secara kontinyu di 2 (dua) desa rintisan Reforma Agraria (pilot project) yaitu:
   a). Pelatihan pemanfaatan limbah sabut kelapa di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga;
   b). Pelatihan pemanfaatan limbah organik menjadi bahan bioremediasi di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Adapun rincian pelatihan yang Pelatihan Yang Telah Dilakukan dalam Rangka Mendukung Akses Reforma Agraria pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.167.
Pelatihan Yang Telah Dilakukan dalam Rangka Mendukung Akses Reforma Agraria

No	Kabupaten/ Kota	Desa	KK yang Terintervensi	Bentuk Pelatihan/ Sosialisasi/Workshop	Instansi yang terlibat	Keterangan
1	Kabupaten Wonosobo	Desa Sudungdwo	50 KK	Pelatihan "Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Menjadi Produk Organik"	Disperakim Prov. Jateng; Disperkimhub Kab. Wonosobo & Praktisi	Penerima Sertifikasi LP2B 2023
2	Kabupaten Banyumas	Desa Pliken	50 KK	Pelatihan "Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Menjadi Produk Organik"	Disperakim Prov. Jateng; Disperkim Kab Banyumas & Praktisi	Penerima Sertifikasi LP2B 2018
3	Kabupaten Blora	Desa Bakah	50 KK	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Disperakim Prov. Jateng; Bagian Pemerintahan SETDA Kab Blora & Praktisi	Penerima Sertifikasi LP2B 2018
4	Kabupaten Karanganyar	Desa Karangsari	50 KK	Pelatihan Penanggulanagan Hama Pada Tanman Padi	Disperkim Prov.Jateng; DPUTR Kab. Karanganyar (Bidang Pertanahan) & Praktisi	Penerima Sertifikasi LP2B 2018
5	Kabupaten Cilacap	Desa Glempang	50 KK	Pelatihan Pemanfaatan Sampah Sebagai Produk Sehari-hari.	Disperakim Prov. Jateng, DPUTR Kab. Cilacap (Bidang Pertanahan) dan Praktisi	Penerima Sertifikasi LP2B 2023

No	Kabupaten/ Kota	Desa	KK yang Terintervensi	Bentuk Pelatihan/ Sosialisasi/Workshop	Instansi yang terlibat	Keterangan
6	Kabupaten Wonosobo	Desa Slukatan	50 KK	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik menjadi Bioaktivator	Disperakim Prov. Jateng; Disperkimhub Kab. Wonosobo & Praktisi	-
7	Kabupaten Purbalingga	Desa Panusupan	50 KK	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa	Disperakim Prov Jateng; Disperkim Kab Purbalingga; DinkopUMKM Prov Jateng; DinkopUMKM Kab Purbalingga & Praktisi	Penerima Sertifikasi Redistribusi Tanah 2022
8	Kabupaten Pemalang	Desa Tambakrejo	50 KK	Pelatihan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga Menjadi Produk Organik	Disperakim Prov Jateng; Dishanpan Prov Jateng; Disperkim Kab Pemalang & Praktisi	Penerima Sertifikasi PTSL 2021

Sumber: Disperakim Prov. Jawa Tengah, 2024.

2.7. Kondusivitas Daerah

Salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari apakah daerah tersebut kondusif, sehingga peran pemerintah untuk dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat menjadi mutlak. Mewujudkan kemanan perlu juga menciptakan kondisi yang teratur, tertib sesuai norma yang berlaku dan juga yang ada di masyarakat. Dengan perwujudan tersebut, maka potensi konflik akan secara simultan dapat ditekan dan stabilitas daerah terjaga.

Upaya yang telah dilakukan yaitu terkait dengan terselesaikannya seluruh pelanggaran Produk hukum daerah yang terinventarisasi melalui cara persuasif dan represif. Namun apabila terindikasi adanya sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana, maka dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Hingga saat ini tercatat 147 Perda yang masih aktif, dengan Perda yang memiliki sanksi hukum (sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana) sebanyak 65 Perda. Beberapa Perda tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya.

Berbeda dengan penegakan hukum yang ada, secara intensitas atas patroli yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup Provinsi Jawa Tengah tiap tahun masih cukup rendah, sehingga kurang dapat menciptakan kondisi yang tentram disebagian daerah. Rasio jumlah linmas terhadap jumlah penduduk Jawa Tengah semakin menurun karena rendahnya minat masyarakat menjadi anggota linmas, banyak anggota linmas yang meninggal dunia, dan adanya perpindahan anggota linmas keluar provinsi. Selain itu jumlah Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya masih cukup rendah. Hingga tahun 2024 masih sebanyak 17.138 Linmas yang sudah ditingkatkan kapasitasnya atau sebesar 6,79 persen dari jumlah linmas tahun 2024.

Tabel 2.168.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Linmas	Peningkatan Kapasitas Linmas
1	2019	230.782	34.490.835	66,91	5.420
2	2020	239.430	36.516.035	66,57	560
3	2021	240.958	36.516.035	65,98	840
4	2022	241.349	37.032.410	65,17	2.488
5	2023	227.415	37.540.962	60,58	6.830
6	2024	255.835	37.892.283	67,52	1000

Sumber : Sat. Polisi Pamong Praja Prov. Jateng dan BPS Jateng, 2024

Mendasarkan atas upaya yang telah dilakukan, masih ada beberapa hal yang perlu adanya peningkatan kinerja dan langkah kongkrit dalam cipta kondisi. Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2023, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir konflik masih memerlukan upaya yang cukup keras, karena di tahun 2018 dapat diminimalisir hingga hanya terjadi 16 kasus saja.

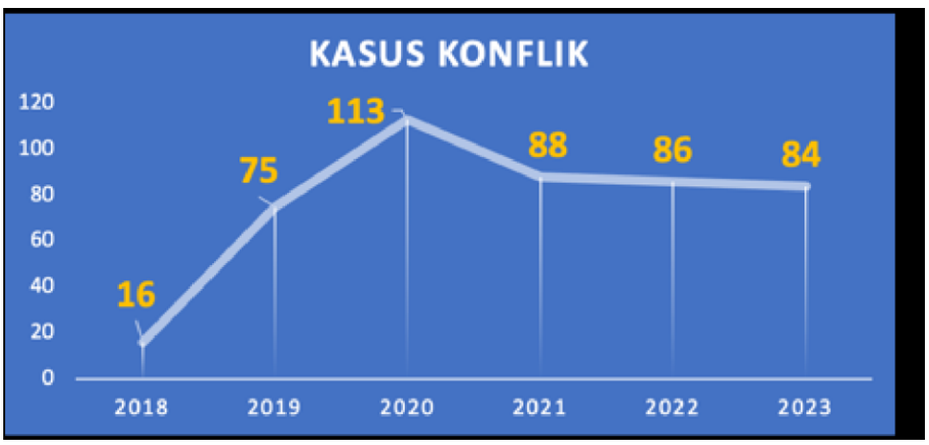

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah,2024.

Gambar 2.126.
Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

Potensi radikalisme di Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan nilai 6,8% atau masih diatas rata-rata nasional. Potensi radikalisme lebih tinggi pada perempuan, generasi muda, dan mereka yang aktif diinternet. Masih menjadi satu kesatuan riset yang dilakukan oleh BNPT, Indeks kebhinekaan masyarkat di Jawa Tengah adalah 89,6% dengan dimensi sikap masih tergolong rendah jika dibanding dengan dimensi pemahaman, hal ini dikarenakan kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses internet dan sosial media, termasuk pada kalangan rural. Melihat pentingnya akses internet dalam meningkatkan internalisasi kebhinekaan, perlu juga disiapkan tentang literasi digital yang ada di masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut karena pada mereka yang aktif diinternet memiliki potensi radikalisme yang lebih tinggi.

Hal lain yang dapat merepresentasikan kondisi umum dalam menjaga kondusivitas wilayah adalah dengan melihat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Berdasarkan rilis oleh Kementerian Agama, IKUB Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dimana skors tahun 2022 sebesar 74,28, sedangkan di tahun 2023 sebesar 76,02.

Selain itu pada penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dengan pengukuran terbaru memperoleh nilai 84,79. Hal yang perlu upaya keras terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja, kinerja lembaga legislatif, Aspek kesetaraan pada penilaian IDI Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sedang, dimana pada aspek tersebut memperlihatkan kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, serta anti monopoli sumber daya ekonomi dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian karena keterbatasan sumber daya.

Informan yang ada tidak dapat mencakup keseluruhan luas wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu adanya alternatif lain untuk memiliki informan di beberapa titik yang terindikasi rawan terjadinya pelanggaran yang menganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu alternatif yang ada adalah melakukan mobilisasi linmas yang ada di daerah. Persoalan yang perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan alternatif tersebut adalah menurunnya rasio linmas yang ada.

2.8. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Realisasi RPD Sampai Dengan Tahun 2024

Kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Wajib sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPD di tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024 - 2026 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.169.
Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPKD Tahun 2024
Terhadap Target Akhir RPD Tahun 2024 - 2026

Indika tor	Jumlah Indika-tor	Sangat Tinggi: 91≤100%		Tinggi : 76 ≤ 90%		Sedang : 66 ≤ 75 %		Rendah : 51 ≤ 65 %		Sangat Rendah : ≤ 50 %		NA	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
I K U	14	13	92,85	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,14
I K D	126	118	93,65	5	3,96	0	0	0	0	1	0,79	8	6,34

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024 (hasil analisis).

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, Sampai dengan tahun 2024, dari 14 (empat belas) IKU Daerah dari 14 indikator tersebut yang berskala sangat tinggi sebanyak 13 indikator dan 1 indikator berskala NA dikarenakan data belum rilis.

Sedangkan capaian indikator kinerja daerah ditunjukan dengan indikator yang berjumlah 126 indikator yang terbagi dalam 3 aspek yaitu Aspek

Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Tingkat ketercapaian pada 3 Aspek diatas sebanyak 126 indikator dengan skala capaian Sangat Tinggi sebanyak 121 indikator, Tinggi sebanyak 2 indikator, dan Sangat Rendah 1 indikator dan 2 indikator berstatus n.a dikarenakan data belum rilis. 1 Indikator yang berskala sangat rendah yaitu : Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan dikarenakan Turunnya jumlah pemotongan (di dalam RPH dan luar RPH) dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2023, dari sebagian besar ternak besar seperti komoditas sapi, kerbau, kambing dan domba.

2.9. Permasalahan Pembangunan

2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan merupakan hasil analisis gambaran umum daerah Jawa Tengah yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah selama lima tahun. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan yang sifatnya lintas sektor atau *crosscutting*, makro, dan menjadi kewenangan tingkat daerah. Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah yang masih relevan dalam lima tahun ke depan dan akan diselesaikan pada Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut.

Aspek Geografi

Dari hasil gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografi yang telah disajikan pada bab sebelumnya, diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

Kebutuhan akan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas penduduk sejalan dengan jumlah penduduk yang juga semakin meningkat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah semakin menurun.

Di sisi lain, beberapa tekanan lingkungan di Jawa Tengah antara lain seperti perubahan tata guna lahan yang menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, peningkatan produksi limbah domestik padat (sampah) dan cair dengan masih terbatasnya kapasitas pengelolaannya, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan antara lain masih rendahnya pengawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup. Dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Jawa Tengah, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi.

Permasalahan lain terkait kualitas lingkungan hidup adalah penurunan vegetasi tutupan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis. Kondisi tersebut yang menyebabkan penurunan daya dukung DAS, ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan terganggunya habitat, peningkatan alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan, pemanfaatan hutan

yang belum optimal (kayu, non kayu, jasa lingkungan), ancaman kerusakan kawasan hutan (kebakaran hutan dan lahan, pencurian sumber daya hutan dan perambahan kawasan hutan), dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia kehutanan. Wilayah pesisir dan laut di Jawa Tengah juga saat ini mengalami degradasi yang ditunjukkan antara lain kerusakan ekosistem mangrove, terjadinya abrasi, dan rob terutama pada wilayah pesisir dan laut pantai utara Jawa Tengah.

Permasalahan sumber daya air tidak hanya terkait ketersediaan air, namun lebih luas permasalahannya adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Selain permasalahan sumber daya air permukaan sebagaimana digambarkan sebelumnya, di Jawa Tengah juga terjadi peningkatan pemanfaatan air tanah yang berpotensi mempercepat terjadinya amblesan tanah atau *land subsidence*. Amblesan tanah merupakan salah satu ancaman bencana yang terjadi dalam waktu yang relatif lama (*silent killer*) namun berdampak cukup luas yang umumnya terjadi di wilayah-wilayah perkotaan, industri, dan pemukiman padat seperti yang telah terjadi di Wilayah Pantura Jawa Tengah. Penurunan kualitas lahan juga terjadi di Jawa Tengah sebagai akibat belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

2. Belum optimalnya ketahanan pangan

Permasalahan dari aspek geografi lainnya adalah terkait dengan ketahanan pangan. Hasil identifikasi permasalahan ketahanan pangan antara lain yaitu belum optimalnya penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi; pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman; diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal; sistem rantai pasok pangan; jaminan keamanan dan mutu pangan; riset, inovasi, dan teknologi pangan; pengendalian harga bahan pangan; serta peran serta masyarakat untuk penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; dan pencegahan pemborosan pangan *(food waste)*. Selain itu, terdapat kecenderungan penurunan daya dukung pangan yang akan mempengaruhi kecukupan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masa yang akan datang.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

Selain lingkungan hidup, kondisi geografi juga mempengaruhi kondisi kebencanaan. Gambaran kebencanaan ditunjukkan dari indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dari tahun ke tahun IRB Jawa Tengah terus membaik menjadi sebesar 99,61 pada tahun 2024. Kondisi geografi Jawa Tengah dengan kemiringan yang bervariasi, kondisi sesar dan patahan, kondisi kegunungapian, serta alur-alur sungai memberikan tantangan dalam penanggulangan bencana khususnya bencana yang terjadi sewaktu-waktu atau bencana yang memiliki waktu evakuasi singkat, seperti gempa, tsunami, gerakan tanah dan banjir bandang. Jumlah dan kepadatan penduduk menyebabkan wilayah konservasi (termasuk wilayah rawan bencana) digunakan sebagai wilayah budidaya sehingga potensi keterpaparan penduduk terhadap ancaman bencana semakin tinggi. Tata kelola kebencanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana juga masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Perencanaan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini

(*early warning system*/EWS), literasi masyarakat tentang kebencanaan, serta kapasitas lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah masih perlu ditingkatkan.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah meliputi sebagai berikut.

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat dari kemiskinan. Cukup tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2024 sebesar 9,58 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 8,57 persen.

Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin. Karakteristik rumah tangga miskin di Jawa Tengah sebagian besar jumlah anggota rumah tangganya rata-rata 4-5 orang, usia kepala rumah tangga rata-rata 53,90 tahun, berpendidikan sampai dengan SD atau tidak tamat SD dan penghasilan utama bersumber dari sektor pertanian.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan pemenuhan infrastruktur dasar seperti penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum dan sanitasi aman.

Di sisi lain, permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Program bantuan sosial masih dihadapkan pada permasalahan cakupan dan kualitas pendataan yang antara lain disebabkan oleh kepemilikan identitas kependudukan, keterbatasan petugas pendataan dibandingkan sasaran, serta tata kelola data yang belum terintegrasi antar sektor.

Sementara itu, rendahnya konsumsi listrik per kapita di Jawa Tengah juga masih menjadi salah satu permasalahan. Konsumsi listrik per kapita Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 baru mencapai 802,05 kWh/kapita yang lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Tingkat konsumsi listrik ini erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat

2. Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat

Membangun Jawa Tengah berbudaya dengan membentuk karakter dan menjaga kearifan lokal Jawa Tengah sebagai warisan leluhur yang adiluhung

memiliki tantangan tersendiri. Dalam upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, diperlukan komitmen bersama seluruh *stakeholder* untuk memahamkan budaya tidak hanya sebagai seni namun juga secara menyeluruh diartikan sebagai entitas nilai, laku maupun karya yang dapat ditransmisikan sebagai pedoman dalam berkehidupan, Pergeseran karakter dan budaya akibat pengaruh budaya dari luar juga memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan masyarakat salah satunya adalah potensi terjadinya intoleransi, radikalisme dan ekstremisme yang mengarah pada aksi terorisme. Permasalahan tersebut terjadi juga tidak terlepas dari peran keluarga dan perempuan yang memegang peranan penting sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan identitas budaya Jawa sejak usia dini.

Aspek Daya Saing

Permasalahan berdasarkan aspek daya saing di Jawa Tengah meliputi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat perannya sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah selain memastikan tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi, juga memperhatikan kualitas layanan dasar sehingga tercapai manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Namun demikian kualitas hidup sumber daya manusia Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan mengingat penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat belum merata dan inklusif, terutama kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 73,88 yang masih di bawah angka IPM nasional yang sebesar 75,02. Meskipun demikian, jika dilihat dari indikator Indeks Modal Manusia (IMM) Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 0,55 lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,54.

Kualitas pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah yang capaiannya masih di bawah nasional. Rata-rata lama bersekolah di Jawa Tengah yang masih rendah diperkuat dengan masih dijumpainya anak tidak sekolah (ATS) yang mencapai 500.000 jiwa, tertinggi ketiga secara nasional. Sementara harapan lama sekolah yang masih di bawah nasional disebabkan masih belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah, ditandai dengan masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya kesenjangan layanan pendidikan, dan kurangnya mutu pendidikan.

Permasalahan kesehatan mengalami perubahan pola ke arah semakin kompleks sebagai akibat adanya pengaruh perubahan lingkungan dan perilaku. Usia harapan hidup penduduk Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum diimbangi dengan peningkatan usia harapan sehat. Transisi demografi, perubahan gaya hidup dan serta mobilitas antar wilayah memicu transisi epidemiologi yang mengarah pada peningkatan kasus tidak menular pada usia produktif (termasuk tren meningkatnya masalah kesehatan jiwa), serta masih adanya beban penyakit menular terabaikan dan

penyakit menular baru serta *zoonosis*. Masih rendahnya literasi kesehatan yang berdampak pada pemahaman terkait pentingnya kegiatan promotif dan preventif. Pada aspek gizi, beban ganda masalah kelebihan dan kekurangan gizi (*underweight, wasting, stunting, overweight*), pengetahuan dan perilaku pemenuhan kebutuhan gizi, serta ketahanan pangan pada level keluarga masih menjadi faktor determinan yang mempengaruhi status gizi masyarakat.Dari sudut pandang akses dan kualitas masih kurang optimalnya mutu pelayanan kesehatan primer dan lanjutan belum efisiennya pengelolaan fiskal dan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif serta distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata. Selain itu, pembangunan kesehatan juga dipengaruhi minimnya inovasi dan teknologi kesehatan.

2. Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal

Perekonomian Jawa Tengah masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Perekonomian Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan sektor-sektor unggulan (pertanian dalam arti luas termasuk pangan, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata), hilirisasi yang mendukung kebijakan pusat dan berbasis potensi lokal, kemudahan investasi, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa, serta wilayah yang kondusif. Tantangan ke depan adalah mewujudkan perekonomian daerah dengan produktivitas tinggi dengan tetap menerapkan ekonomi hijau. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat dan antarwilayah.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan

Permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan di Jawa Tengah sebagai berikut:

1) Sektor pertanian (dalam arti luas)

Pertanian adalah salah satu sektor unggulan Jawa Tengah yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan diantaranya **belum optimalnya** produksi dan produktivitas sektor pertanian, modernisasi pertanian, integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian, pengelolaan pertanian secara mandiri dan keterjangkauan biaya produksi pertanian, pengembangan pertanian berbasis korporasi, implementasi hilirisasi di sektor pertanian serta kapasitas dan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian. Selain itu permasalahan lain adalah masih tingginya alih fungsi lahan dan rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian. Semua permasalahan tersebut perlu diselesaikan sebagai upaya menjadikan Jawa Tengah salah satu penumpu pangan nasional yang berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata pada kesejahteraan petani.

2) Sektor industri pengolahan

Sektor lain yang menjadi sektor unggulan Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja sektor industri pengolahan antara lain:

a) Belum optimalnya produktivitas industri, terutama industri kecil dan menengah:
   - industri pengolahan berbahan baku lokal (terutama industri subsektor makanan dan minuman)
   - integrasi rantai pasok antarindustri;
   - digitalisasi industri pengolahan;
   - ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri pengolahan;
   - infrastruktur pendukung industri pengolahan;
   - keterjangkauan teknologi ramah lingkungan, iklim usaha yang kondusif dan iklim kemitraan, serta;
   - penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru).

b) Rendahnya nilai tambah produk industri:
   - kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu menghasilkan produk nilai tambah tinggi.

c) Rendahnya kapasitas pelaku industri:
   - kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan;
   - rendahnya kepedulian akan prinsip keberlanjutan dalam industri).

3) Sektor perdagangan

Sektor perdagangan juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian daerah Jawa Tengah. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor perdagangan ini, antara lain **belum optimalnya** ekspor unggulan daerah, pengurangan ketergantungan impor, standarisasi produk-produk unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan, iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, serta sistem distribusi produk perdagangan.

4) Sektor koperasi dan UMKM

Sektor lain yang menjadi unggulan perekonomian Jawa Tengah adalah usaha kecil dan menengah, serta koperasi. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap PDRB Jawa Tengah. Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah, antara lain **belum optimalnya** kualitas produk unggulan UMKM, akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM, kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM, wirausaha baru, pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, serta kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

5) Sektor pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan Jawa Tengah dalam menyokong perekonomian daerah. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyediaan

lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Namun, kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah dan pada PDRB belum optimal. Kondisi belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah maupun PDRB disebabkan beberapa permasalahan, antara lain, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara masih belum optimal, rata-rata lama menginap wisatawan relatif rendah dan masih rendahnya pengeluaran wisatawan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain **belum optimalnya** promosi pariwisata, kondisi destinasi wisata termasuk kondisi sarana prasarana destinasi wisata, diversifikasi daya tarik pariwisata, infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, integrasi antardestinasi wisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata serta belum beroperasional secara penuh bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagai Bandara Internasional yang menjadi Pintu masuk Wisatawan Mancanegara.

6) Sektor ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu menjadi kekuatan baru untuk peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah. Namun demikian saat ini perkembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah belum memperlihatkan hasil yang optimal terutama dalam Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian daerah. Beberapa faktor penyebabnya hal ini antara lain **belum optimalnya** kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa, pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif, sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif, infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, sistem regulasi ekonomi kreatif, apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kabupaten/kota kreatif, desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan, serta standarisasi produk dan praktek usaha ekonomi kreatif.

b. Rendahnya daya saing tenaga kerja dan pengangguran

Pembangunan ketenagakerjaan yang berdaya saing mencakup kualitas tenaga kerja yang unggul, tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi, kesempatan kerja yang terbuka luas, hingga adanya perlindungan tenaga kerja. Beberapa faktor penyebab rendahnya daya saing tenaga kerja antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan, belum optimalnya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, yang disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, sistem perlindungan tenaga kerja, industri masih bersifat padat karya (belum padat modal/teknologi tinggi), iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta informasi pasar kerja. Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja yang menyebabkan rendahnya serapan tenaga kerja Jawa Tengah di lapangan kerja yang tersedia. Rendahnya serapan tenaga kerja inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah masih cukup tinggi meskipun lebih baik jika dibandingkan dengan nasional.

c. Belum optimalnya riset dan inovasi

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Namun demikian, kondisi saat ini riset dan inovasi belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa penyebabnya antara lain **belum optimalnya** peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor, tata kelola kelembagaan riset dan inovasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi di semua sektor, kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah, inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

d. Ketimpangan ekonomi antarwilayah

Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Jawa Tengah masih terjadi. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh faktor geografis dan demografis, belum meratanya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, belum meratanya penyediaan prasarana dan sarana pendukung ekonomi, belum optimalnya konektivitas antarwilayah, dan belum optimalnya tingkat kemandirian desa. Permasalahan lainnya antara lain adalah tingkat produktivitas ekonomi antarwilayah perkotaan dan perdesaan yang masih belum merata yang disebabkan beberapa faktor antara lain terkait potensi daerah sebagai sektor unggulan daerah yang belum dioptimalkan, serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perdesaan khususnya, keterbatasan ketersediaan sarpras pendukung ekonomi, minimnya riset dan inovasi pengembangan produk, keterbatasan akses terhadap permodalan, serta belum optimalnya peran lembaga ekonomi Desa menjadi faktor-faktor yang menghambat perkembangan desa dalam upaya pemerataan pembangunan perekonomian perdesaan dan perkotaan.

3. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah

Ketersediaan prasarana sarana menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan prasarana sarana adalah masih belum meratanya jaringan jalan di Jawa Tengah, belum optimalnya kualitas jalan utamanya jalan provinsi yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak. Selain itu masih terdapat titik rawan longsor di ruas-ruas jalan provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana.

Kualitas pelayanan transportasi juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan transportasi (utamanya pada ruas jalan strategis pendukung jaringan distribusi logistik), peningkatan kualitas layanan angkutan umum (jangkauan wilayah dan kapasitas layanan), dan peningkatan pelayanan di simpul transportasi (utamanya kualitas kondisi fisik, pemenuhan utilitas dan persebaran terminal) serta integrasi antarmoda dalam rangka meningkatkan

minat Masyarakat menggunakan angkutan umum. Hal lain yang masih perlu dikembangkan terkait peningkatan kelembagaan pengelolaan transportasi yang berbasis kewilayahan dan penataan sistem logistik yang lebih efisien.

Permasalahan lainnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air yang disebabkan masih kurangnya sarana tampungan air baku. Air baku selain dimanfaatkan untuk penyediaan air minum dan pertanian juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata). Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat juga masih perlu didorong untuk ditingkatkan seperti pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

4. Terdapat simpul-simpul kerawanan yang mempengaruhi stabilitas

Kondusivitas wilayah menjadi salah satu tantangan yang harus dijaga dalam mendukung perwujudan daya saing daerah. Menjaga kondusivitas wilayah memiliki tantangan yang rumit karena berbagai persoalan baik ekonomi, sosial maupun budaya dapat dan/atau memiliki masalahnya sendiri-sendiri dan dapat juga menjadi simpul permasalahan yang kompleks. Sejauh ini kerawanan terjadi pada beberapa gatra mencakup:

a. Gatra Sumber Kekayaan Alam, berkaitan dengan ketahanan pangan baik kedelai, gula, dan daging sapi terhadap kebutuhan, kemudian kebutuhan air untuk rumah tangga yang terpenuhi dari sumber air bersih, luas kawasan hutan terhadap daratan, potensi lokal kopi terhadap potensi nasional.
b. Gatra Ideologi, berkaitan dengan toleransi antarmasyarakat perlu diperhatikan untuk meminimalisasi terjadinya konflik, terkait dengan keadilan dimana pemerintah perlu hadir untuk memenuhi hak dengan warga negara berkaitan dengan jumlah panti asuhan, dan jumlah panti jompo masih tergolong rawan dan kurang tangguh, kemudian pada persentase alokasi dana APBD untuk bantuan sosial masih dinilai kurang, termasuk kapasitas fiskal daerah dinilai rawan.
c. Gatra Ekonomi, berkaitan dengan kemakmuran dengan melihat pengeluaran sandang terhadap pengeluaran total perkapita dan pertumbuhan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan masih dinilai rawan pada indikator tersebut.
d. Gatra Sosial Budaya, berkaitan dengan variabel eksklusi sosial ditemukan bahwa wanita masih dikategorikan rawan ekonomi, variabel pendidikan berkaitan dengan tingkat kelulusan SLTA di Jawa Tengah termasuk rawan, termasuk akreditas baik SD, SLTP maupun SLTA masih dinilai rawan. Kejadian konflik baik konflik fisik masal dan konflik antar aparat pemerintah dengan masyarakat tergolong tinggi.

Khusus pada stabilitas politik, permasalahan yang kompleks terjadi pada agenda-agenda khusus berkaitan dengan pelaksanaan pesta demorkasi di daerah, namun beberapa permasalahan dapat juga menjadi simpul kerawanan akibat terabaikannya permasalahan tersebut. Persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah berkaitan dengan pemenuhan HAM, seperti pemenuhan hak-hak pekerja, kemudian berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan pers yang

bebas dalam menjalankan tugas maupun fungsinya. Kesetaraan masyarakat dalam partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik, khususnya melalui lembaga perwakilan. Terakhir berkaitan dengan kapasitas kelembagaan untuk memperhatikan proses penyusunan kebijakan dan pendidikan politik, khususnya bagi kader partai politik.

Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan berdasarkan aspek pelayanan umum di Jawa Tengah adalah **belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas**. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Reformasi Birokrasi, SPBE, Pengawasan dan Pengendalian serta manajemen ASN berbasis Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan. Selain itu, perbaikan integritas ASN dan organisasi masih sangat perlu ditingkatkan mengingat hasil Survey Penilaian Integritas dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan bebas korupsi.

Permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi mencakup kelembagaan yang kurang efisien dan tidak adaptif disebabkan lemahnya peran evaluasi kelembagaan, proses bisnis organisasi yang tidak efektif, perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menunjukkan keterpaduan dan keselarasan antar level pemerintahan serta antar dokumen perencanaan. Selain itu, pendekatan berbasis kinerja, manajemen risiko, dan riset kebijakan belum terintegrasi secara optimal dalam proses perencanaan, penjenjangan kinerja organisasi belum berjalan secara fungsional, dan indikator kinerja yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART sehingga efektivitas pemantauan dan evaluasi program belum berjalan optimal. Selain itu, kualitas kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya pemanfaatan hasil riset dan data yang valid dalam proses perumusan kebijakan, serta adanya regulasi yang saling tumpang tindih dan kurang sinkron antar sektor maupun level pemerintahan. Di samping itu, peran pemerintah sebagai kolaborator belum dioptimalkan dalam membangun ekosistem kerja sama multipihak, baik dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dunia usaha, maupun akademisi, untuk memperkuat sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan

Terkait kemampuan keuangan daerah, kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih sangat terbatas. Terlebih dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menyebabkan ruang fiskal Pemerintah Provinsi semakin sempit khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Di sisi lain pembiayaan alternatif daerah belum berkembang secara optimal sehingga kapasitas fiskal akan stagnan atau tumbuh lambat yang berdampak pada tingginya ketergantungan pemerintah provinsi terhadap transfer pemerintah pusat.

Hal lain yang masih perlu didorong adalah mewujudkan demokrasi substansial semakin baik ke depan. Demokrasi yang berkembang saat ini masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Yang perlu didorong ke depan antara lain bagaimana memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat, mengarusutamakan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa, bernegara, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; serta memperkuat integritas partai politik.

2.9.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk Tahun 2026 sebagai berikut.

A. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

   Permasalahan pembangunan pendidikan meliputi:

   a. Akses dan keterjangkauan layanan pendidikan belum merata, dilihat dari adanya wilayah blankspot layanan pendidikan menengah, di 22 kecamatan, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 300 ribu jiwa dan partisipasi pendidikan menengah masih 70 persen.
   b. Mutu pendidikan masih kurang, mengingat pendidik yang bersertifikasi di jenjang pendidikan menengah dan khusus masih di bawah 60 persen, sarpras kondisi baik di bawah 75 persen, skor literasi, numerasi dan nilai karakter masih di bawah 75 serta belum seluruh kab/kota mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi.
   c. Relevansi pendidikan masih kurang, ditandai dengan tingkat penyerapan SMK masih di bawah 90 persen.

2. Kesehatan

   Permasalahan urusan kesehatan berkaitan dengan masih perlunya mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan permasalahan antara lain:

   a. Masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular serta Kesehatan jiwa;
   b. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan Balita;
   c. Masih rendahnya aksesibilitasi pelayanan Kesehatan lansia;
   d. Masih ditemukannya permasalahan gizi kurang dan gizi lebih;
   e. Masih belum semua kesehatan primer memprioritaskan pelayanan promotive dan preventif;
   f. Keterbatasan sarana dan prasarana di rumah sakit.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih perlu ditangani kedepan terutama terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah serta pelayanan dasar bagi masyarakat meliputi:

a. Masih adanya Jalan Provinsi di Jawa Tengah yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak ringan maupun berat. Selain itu terdapat titik rawan kerusakan akibat bencana longsor/tanah gerak pada ruas-ruas Jalan Provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana;
b. Masih rendahnya akses air minum jaringan perpipaan dan sanitasi yang dikelola secara aman yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
c. Pendataan teknis belum dilakukan menyeluruh terhadap semua bangunan gedung milik daerah dan belum semua bangunan gedung milik daerah dalam kondisi baik.
d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang meliputi permasalahan:
   1) pemanfaatan sumber daya air antara lain kurangnya ketersediaan air, kurangnya sarana prasarana tampungan air baku, dan banyak sarana prasarana irigasi yang rusak;
   2) pengendalian daya rusak air terutama ditunjukkan dengan adanya kerusakan sarpras sungai dan pengendali banjir;
e. Belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang, implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terutama terkait dengan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, yang meliputi:

a. Masih tingginya angka kebutuhan rumah layak huni;
b. Keterbatasan ketersediaan lahan yang aman dari bencana dan sesuai dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/ Kota untuk penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi program pemerintah
c. Belum Optimalnya Penanganan perumahan pasca bencana dan relokasi korban program Pemerintah;
d. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh;
e. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada urusan ini terkait dengan masih belum optimalnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum terutama terkait dengan permasalahan:

a. Peraturan daerah yang ada tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
b. Minimnya pemberdayaan satlinmas yang ada di daerah;
c. Masih belum semua kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan kebencanaan;

d. Masih banyak wilayah rawan bencana yang belum ditingkatkan kapasitasnya baik melalui pembentukan desa tangguh bencana (destana) maupun difasilitasi pemasangan Early Warning System (EWS) maupun rambu jalur evakuasi;
e. Masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
f. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pada fase pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

6. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani, yang hingga saat ini penanganannya belum optimal, ditunjukkan dari masih cukup tingginya PPKS. Permasalahan ini didukung dengan permasalahan antara lain:

a. Rendahnya penanganan PPKS;
b. Masih adanya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang belum mendapatkan bantuan modal dan pendampingan;
c. Masih adanya panti yang kondisinya rusak.

B. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Jawa Tengah berkaitan dengan masih cukup tingginya pengangguran, dan belum optimalnya daya saing tenaga kerja, dengan beberapa permasalahan lainnya meliputi:

a. Masih tingginya penduduk usia kerja yang tidak dalam kondisi bekerja, belajar atau mengikuti pelatihan (*Not in Employment, Education or Training*). Tingginya NEET menjadi hal yang perlu diwaspadai karena berpotensi untuk menaikkan angka pengangguran. NEET yang tinggi menandakan bahwa banyak penduduk usia produktif yang tidak bekerja;
b. Masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah merupakan yang terendah;
c. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja terutama untuk sektor non formal, hal ini ditandai dengan cakupan kepesertaan bagi pekerja non formal mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2024;
d. Hubungan industrial yang masih belum harmonis antara pemberi kerja dengan pekerja, hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus hubungan industrial yang terjadi, meskipun telah terselesaikan 100 persen.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkaitan dengan belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga yang ditunjukkan dari permasalahan:

a. Masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan;
b. Masih tingginya perkawinan usia anak;
c. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pada aspek ketersediaan, masih terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih mengalami fluktuasi harga. Selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antar kelompok pangan. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan ketahanan pangan sebagai berikut:

a. Ketersediaan Pangan
   Secara umum komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, dan kedelai telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun masih terdapat beberapa komoditas pangan yang perlu didorong.
b. Keterjangkauan
   Kondisi keterjangkauan pangan dicerminkan berdasarkan peta kerawanan pangan, secara umum masih terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan pangan.
c. Pemanfaatan
   Berdasarkan tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat, masih diperlukan dorongan pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.

4. Pertanahan

Permasalahan utama urusan pertanahan adalah belum optimalnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan, yang diindikasikan dari beberapa permasalahan antara lain:

a. Masih terdapat konflik atau sengketa permasalahan pertanahan di Jawa Tengah;
b. Masih terdapatnya keterbatasan data yuridis dan data fisik dalam penyelesaian sengketa tanah garapan;
c. *Database* Objek Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai objek sertifikasi hak atas tanah yang merupakan salah satu *tools* dalam menentukan sasaran program sertifikasi bersifat dinamis;
d. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan asset dan akses reforma agraria;
e. Masih tingginya intensitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Tengah melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum .
f. Belum adanya standar persebaran nilai tanah sebagai dasar perencanaan pengadaan tanah sebagai akibat belum optimalnya pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT).
g. Belum terdapatnya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir mekanisme penyelesaian permasalahan pertanahan di lapangan.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup adalah degradasi kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh permasalahan antara lain:

a. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, disebabkan oleh:
   1) Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya;
   2) Ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan dan aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (*brown economy*);
   3) Beberapa tekanan lingkungan hidup antara lain perubahan tata guna lahan, peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan (air, lahan, udara), dan masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup; dan
   4) Meningkatnya Degradasi lahan dan keanekaragaman hayati
b. Meningkatnya risiko bencana alam dan perubahan iklim
c. Meningkatnya emisi GRK akibat aktivitas ekonomi dan penduduk belum diimbangi dengan capaian penurunan emisi GRK
d. Meningkatnya tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya adalah:

a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditunjukkan dengan belum optimalnya fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi kabupaten/kota;
b. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah maupun instansi swasta;
c. Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara digital.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pokok urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah

a. Belum optimalnya upaya peningkatan kemandirian desa ditunjukkan dengan presentase desa mandiri yang masih rendah dan masih adanya desa tertinggal di Jawa Tengah;
b. Pengembangan dan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya belum optimal;
c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
d. Kerjasama kawasan perdesaan skala provinsi masih rendah.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tantangan utama dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah bagaimana meningkatkan keluarga yang berkualitas karena hingga saat ini kondisinya belum optimal. Permasalahan yang mempengaruhi kualitas keluarga antara lain meliputi:

a. Belum optimalnya pengendalian penduduk;
b. Masih rendahnya kepesertaan KB.

9. Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan perhubungan adalah masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi untuk

meningkatkan kepuasan masyarakat. Permasalahan tersebut dipengaruhi beberapa hal antara lain:

a. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, yang ditandai dengan belum optimalnya kinerja terminal (menurunnya jumlah kunjungan kendaraan) yang disebabkan adanya kerusakan fisik terminal, belum lengkapnya fasilitas terminal dan tidak adanya daya tarik terminal, belum meratanya persebaran / pemenuhan kebutuhan terminal serta belum optimalnya dukungan terminal sebagai simpul perekonomian; Masih kurangnya pemenuhan koridor pelayanan dan halte Trans Jateng; Masih belum selesainya rencana reaktivasi rel kereta api oleh Pemerintah Pusat; Belum juga selesainya pelimpahan aset pelabuhan pengumpan regional dari Pusat.
b. Masih diperlukannya peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, yang ditandai dengan : Tingginya jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas, jumlah korban meninggal dunia serta tingkat fatalitas yang disebabkan masih rendahnya pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan adanya Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang belum tertangani; Banyaknya LPJU yang mati sehingga banyak aduan dari masyarakat (tingkat respon yang kurang akibat minimnya cadangan suku cadang dan keterbatasan jumlah kendaraan pemeliharaan LPJU berupa *skylift/crane*); Belum optimalnya penanganan perlintasan dengan rel kereta api dan pemenuhan fasilitas penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota.
c. Masih diperlukannya peningkatan kualitas layanan angkutan umum yang ditandai dengan : Belum optimalnya integrasi antara Trans Jateng dengan angkutan perkotaan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota serta integrasi antar moda yang secara bertahap harus dipenuhi.
d. Belum optimalnya simpul transportasi strategis kewenangan pusat yang berpotensi menghambat kelancaran aksesibilitas dan konektivitas diantaranya penurunan status internasional menjadi domestik pada Bandara A. Yani Kota Semarang dan Adi Soemarmo Boyolali dan rendahnya daya saing Pelabuhan Tanjung Emas serta adanya pendangkalan pada kolam Pelabuhan Kendal yang menyebabkan Kapal Motor Bodri yang melayani penyeberangan Kendal - Kumai tidak bisa sandar.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pokok untuk urusan komunikasi dan informatika yang perlu perhatian penanganan ke depan adalah belum optimalnya digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, yang meliputi permasalahan antara lain:

a. Belum optimalnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
b. Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan (lonjakan permintaan terkait layanan data center belum tercukupi; Layanan internet tersedia tetapi belum termanfaatkan secara optimal).

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tantangan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah berkaitan dengan upaya meningkatnya perekonomian daerah. Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap PDRB, yang didukung dengan permasalahan antara lain:

a. Belum optimalnya omset koperasi dan UMKM;
b. Belum optimalnya tingkat kesehatan koperasi.

12. Penanaman Modal

Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah perlunya mendorong peningkatan realisasi dan persebaran penanaman modal di Jawa Tengah. Permasalahan yang masih berpengaruh terhadap permasalahan utama tersebut antara lain:

a. Belum ada upaya yang cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap iklim investasi global, sehingga jumlah investor yang berinvestasi di Jawa Tengah masih sangat dipengaruhi oleh kondisi global;
b. Kurangnya konsistensi dalam kebijakan pemerintah pusat yang menyebabkan daerah kesulitan untuk merealisasikan kebijakan tersebut karena selalu dihadapkan pada perubahan yang memerlukan kajian dan implementasi ulang;
c. Belum berhasil meningkatkan keunggulan komparatif dan infrastruktur investasi di Jawa Tengah secara signifikan, sehingga investor lebih tertarik berinvestasi ke daerah lain;
d. Terbatasnya dukungan sumber daya baik ketersediaan lahan usaha yang sesuai tata ruang maupun dampak negatif investasi pada lingkungan;
e. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olahraga berkaitan dengan belum optimalnya pembangunan pemuda, kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga antara lain meliputi:

a. Daya saing pemuda masih rendah;
b. Prestasi olahraga belum memadai;
c. Tingkat partisipasi olahraga masih rendah.

14. Statistik

Permasalahan utama urusan statistik adalah belum optimalnya pengelolaan data baik data sektoral maupun geospasial dan perwujudan Satu Data Pemerintahan (pemanfaatan data statistik sektoral dalam portal data belum optimal).

15. Persandian

Permasalahan yang masih dijumpai pada urusan persandian di Jawa Tengah adalah belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintahan (kurangnya kesadaran keamanan informasi pada penerapan SMKI di OPD).

16. Kebudayaan

Permasalahan pembangunan kebudayaan masih kurang, dikarenakan upaya pemajuan kebudayaan yang meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan belum optimal, antara lain:

a. Ketersediaan dan kualitas SDM Kebudayaan masih rendah;
b. Inventarisasi, validitas dan integrasi data kebudayaan masih lemah;
c. Identifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)/Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) belum optimal;
d. Kurangnya kerjasama lintas sektor dalam upaya pelestarian hingga pemanfaatan Cagar Budaya (CB);

e. Pengetahuan dan pemahaman stakeholder tentang kebudayaan masih kurang;
f. Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam bidang kebudayaan masih kurang.

17. Perpustakaan

Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat yang ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

18. Kearsipan

Permasalahan utama urusan kearsipan adalah masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di Jawa Tengah yang ditandai dengan belum optimalnya digitalisasi dalam peningkatan pengolahan, dan pelayanan kearsipan.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah adalah belum optimalnya produksi perikanan secara berkelanjutan, kesejahteraan pelaku usaha perikanan, dan tingginya kerusakan ekosistem perikanan. Lebih lanjut permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya produksi perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap, budidaya, dan garam. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan sarana prasarana penangkapan yang belum memadai dan kondisi pelabuhan perikanan yang perlu pengembangan baik dari sisi fasilitas maupun tata kelolanya, sedangkan dari sisi perikanan budidaya, selain dikarenakan kondisi sarana dan prasarana, juga disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas induk. Sementara pada produksi garam, juga masih terdapat luasan tambak garam yang belum menerapkan teknologi, sehingga proses produksi garam masih tergantung cuaca. Selain itu, pada ketiganya, baik perikanan tangkap, budidaya, dan garam, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM untuk mendukung produksi perikanan.

b. Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berkaitan erat dengan produk perikanan yang mudah busuk (*perishable*) sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai standar dari hulu ke hilir, sementara saat ini usaha yang ada masih didominasi usaha skala kecil dan belum sepenuhnya sesuai standar, ditambah jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Hal yang lain adalah rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah sehingga membutuhkan dorongan lebih kuat untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein hewani. Secara simultan dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM para pelaku usaha perikanan, serta secara khusus pada perikanan tangkap, risiko terjadinya kecelakaan kerja masih cukup tinggi sehingga membutuhkan perlindungan.

c. Tingginya kerusakan ekosistem perikanan
   Kerusakan ekosistem perikanan khususnya di wilayah pesisir disebabkan abrasi dan akresi yang cukup tinggi yang imbasnya dapat menyebabkan terjadinya banjir rob. Di sisi lain, masih dibutuhkan edukasi terhadap semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan khususnya lingkungan perairan. Sedangkan pada perikanan budidaya diperlukan upaya untuk mempertahankan ikan jenis endemik lokal yang mulai menurun populasinya.

2. Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata di Jawa Tengah masih menjumpai permasalahan pokok terkait seberapa besar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh:

a. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara belum optimal;
b. Masih rendahnya pengeluaran wisatawan;
c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Kondisi pertanian ditopang oleh sektor pertanian dan peternakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh produksi serta tingkat kesejahteraan petani dan peternak. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan sektor pertanian dan peternakan sebagai berikut:

a. Produksi sektor pertanian
   Secara umum produksi pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan mencapai target. Namun produksi kedelai masih perlu didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
b. Kesejahteraan petani dan peternak
   Berdasarkan tingkat kesejahteraan pelaku usaha, masih diperlukan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

4. Kehutanan

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan kehutanan adalah masih rendahnya luasan tutupan lahan di Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh:

a. Adanya penurunan vegetasi tutupan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis menyebabkan penurunan daya dukung DAS, rusaknya habitat keanekaragaman hayati
b. Adanya degradasi ekosistem pesisir
c. Adanya peningkatan alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan;
d. Masih belum optimalnya pemanfaatan hutan (kayu, non kayu, dan jasa lingkungan)
e. Masih terjadinya ancaman terhadap perlindungan kawasan hutan (kebakaran hutan, pencurian, dan perambahan

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral mencakup aspek ketahanan energi, pengelolaan air tanah, serta pemanfaatan sumber daya mineral yang ramah lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi sektor ini meliputi:

a. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang masih rendah dalam bauran energi primer;
b. Konsumsi listrik per kapita yang masih berada pada tingkat rendah;
c. Produktivitas pertambangan yang belum optimal dan pengelolaan tambang yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan;
d. Peningkatan aktivitas eksploitasi air tanah yang terus terjadi.

6. Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan di Jawa Tengah sebagai salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah masih ditemukan permasalahan utama yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya ekspor dan impor Jawa Tengah, belum optimalnya nilai tambah produksi perdagangan, dan fluktuatifnya harga kelompok kebutuhan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

7. Perindustrian

Permasalahan utama di urusan perindustrian yang juga menjadi salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhinya antara lain belum optimalnya produksi industri terutama industri kecil menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri terutama industri kecil dan menengah.

8. Transmigrasi

Permasalahan yang dijumpai pada urusan transmigrasi adalah terbatasnya kuota transmigrasi yang tidak sebanding dengan minat transmigrasi masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah terkait dengan transmigrasi.

D. Unsur Pendukung Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan utama unsur sekretariat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia kebijakan pembangunan daerah adalah belum optimalnya kualitas kebijakan daerah yang dihasilkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melakukan proses analisis kebijakan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan unsur sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan untuk anggota DPRD. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya kapasitas aparatur dalam pelayanan, serta belum optimalnya sarana prasarana pelayanan bagi anggota DPRD.

E. Unsur Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

Permasalahan utama yang masih dijumpai pada unsur perencanaan adalah belum optimalnya keselarasan, kesesuaian dan keterhubungan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada capaian pembangunan daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh :

a. belum optimalnya pemanfaatan kapasitas sumber daya;
b. belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dalam menterjemahkan arah kebijakan pembangunan daerah;
c. dinamika kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi kebijakan perencanaan pemerintah daerah.

2. Keuangan

Permasalahan utama unsur keuangan adalah belum optimalnya pendapatan daerah dan tata kelola keuangan daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa permasalahan antara lain;

a. Belum optimalnya penanganan piutang pajak kendaraan bermotor;
b. Belum optimalnya layanan pembayaran pajak dan retribusi secara digital;
c. Masih rendahnya kontribusi pemanfaatan aset daerah terhadap penerimaan PAD;
d. Masih terbatasnya skema pendanaan di luar APBD;
e. Belum sesuainya dokumen perencanaan dengan penganggaran khususnya terkait pagu program dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga APBD;
f. Keterlambatan waktu pengungkapan dokumen keuangan daerah;
g. Belum optimalnya penyerapan anggaran.

3. Kepegawaian

Permasalahan utama yang masih dijumpai dalam unsur kepegawaian adalah belum optimalnya meritokrasi dalam manajemen ASN. Hal ini dipengaruhi beberapa permasalahan, antara lain:

a. belum optimalnya integrasi data kepegawaian lintas perangkat daerah yang komprehensif;
b. Belum optimalnya pemetaan kebutuhan jabatan yang berbasis kompetensi dan kinerja
c. Belum optimalnya penerapan manajemen talenta ASN dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pembangunan daerah;
d. Belum optimalnya layanan kepegawaian yang terintegrasi, adil dan responsif.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama dalam unsur pendidikan dan pelatihan adalah belum optimalnya kompetensi ASN Jawa Tengah ditandai dengan belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN dan belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten.

5. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama dari unsur penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk inovasi daerah yang belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya kompetensi SDM riset dan inovasi, masih terbatasnya sarana prasarana riset dan inovasi serta masih terbatasnya jejaring riset dan inovasi.

F. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Permasalahan utama dari penyelenggaraan unsur pengawasan pemerintahan antara lain:

a. belum optimalnya pengawasan, pendampingan dan asistensi bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. belum optimalnya pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan pengawasan internal;
c. masih tingginya risiko korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah

G. Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan utama dari unsur pemerintahan umum di Jawa Tengah antara lain :

1. Potensi radikalisme yang mengarah pada ekstrimisme dan teorisme masih tergolong tinggi di beberapa daerah;
2. Internalisasi kebhinekaan yang belum optimal;
3. Terjadinya degradasi rasa toleran dimasyarakat;
4. Masih perlunya pendidikan politik bagi Masyarakat, terkhusus pada pemilih pemula;
5. Partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan masih perlu untuk didorong.

2.9.3 Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka **isu strategis daerah Jawa Tengah** yang akan diselesaikan pada Tahun 2026 dan tahun selanjutnya sebagai berikut.

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Di samping itu, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah salah satunya juga disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan desa dan perdesaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin, pengembangan ekonomi desa, kualitas lingkungan dan pelayanan dasar, serta penguatan peran supra desa.

2. Penurunan tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. 3) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program dan kegiatan utama harus di desain secara sinergi dan terintegrasi dengan satu *database* yang akurat, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Prinsip utama dan strategi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga sangat dipengaruhi kualitas perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya.

3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah dalam provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Jawa Tengah.

4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa (logistik daerah), serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Penyelenggaraan Jalan Provinsi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan menjaga kondisi jalan agar aman dan nyaman Penyediaan prasarana transportasi dan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan (utamanya anak, pelajar, perempuan dan lansia) dan kelompok berkebutuhan khusus (aksesibilitas disabilitas di simpul dan jaringan transportasi) perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Pembangunan prasarana dan sarana tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, kerugian akibat bencana, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, penggunaan kendaraan pribadi juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan diantara melalui peralihan menggunakan angkutan umum. Selain itu penyediaan prasarana dan sarana bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu akses terhadap infrastruktur dasar yang memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi aman, energi listrik, dan transportasi.

5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan. Isu ini menjadi strategi yang menitikberatkan pada: 1) penanganan dan pengelolaan terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kerusakan pesisir, DAS kritis, kawasan lindung/karst, pertambangan, 2) penanggulangan bencana terkait meningkat-nya jumlah kejadian banjir, tanah longsor dan kekeringan akibat perubahan iklim, serta 3) isu sampah/limbah yang terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah.

Keberlangsungan proses pembangunan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk peningkatan kualitas fungsi lingkungan sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya bencana alam.

6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan

dengan mendorong akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting.

Pembangunan kualitas keluarga sebagai komunitas terkecil dalam masyarakat juga masih menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Perubahan tren gaya hidup dan arus informasi yang semakin luas berpotensi mempengaruhi pola hubungan dan struktur keluarga. Perilaku salah seperti kekerasan, perundungan, dan eksploitasi kelompok perempuan dan anak, ketidaksetaraan gender, serta pergeseran norma dan nilai dalam lingkungan keluarga masih menjadi isu yang dapat mengancam karakter dan jatidiri masyarakat.

Untuk itu budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, budaya yang kuat diharapkan akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik prima. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan daerah sebagai pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah, sehingga dituntut semakin adaptif dan kolaboratif dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip integritas. Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan kapabilitas dan integritas sumber daya aparatur, adanya langkah transformatif dalam mewujudkan penerapan *collaborative governance.* Di samping itu, penerapan demokrasi yang lebih substantif perlu terus dikembangkan agar kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik menjadi semakin responsif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dinamika perekonomian global, nasional, dan regional menjadi dasar penentu arah kebijakan ekonomi daerah. Selain itu kebijakan ekonomi nasional di daerah juga mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Jawa Tengah.

3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Perekonomian global berubah dengan cepat dan penuh dinamika ketidakpastian yang tinggi. Pada awal tahun 2024, tingginya ketegangan politik dunia berlanjut-dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah sedikit mereda, ketegangan dunia kembali meningkat tinggi dipicu serangan Israel ke Palestina. Di penghujung tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan *America First* dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan. Hal tersebut ke depan diperkirakan dapat menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dengan resiko fragmentasi perdagangan dan investasi yang semakin meningkat.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 melambat, dari 3,3 persen pada tahun 2023 menjadi 3,2 persen pada tahun 2024 dan diperkirakan tetap 3,3 persen pada tahun 2025 dan tahun 2026.

Tabel 3.1.

Kinerja dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global (%)

	2022	2023	2024	2025	2026
Dunia	3,5	3,3	3,2	3,3	3,3
Negara Maju	2,6	1,7	1,7	1,9	1,8
Amerika Serikat	1,9	2,9	2,8	2,4	2,3
Kawasan Eropa	3,4	0,4	0,8	1,1	1,3
Jepang	1,0	1,9	-0,1	1,2	0,5
Negara Berkembang	4,1	4,4	4,1	4,0	3,9
Tiongkok	3,0	5,2	4,8	4,4	3,8
India	6,8	7,7	6,6	6,6	6,7
ASEAN-5	5,5	4,0	4,8	4,7	4,6
Amerika Latin	4,2	2,2	2,1	2,4	2,6

Sumber: WEO-IMF, Bank Indonesia, 2025.

Divergensi pola pertumbuhan ekonomi berlanjut dengan fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia yang meningkat. Ekonomi AS diperkirakan tetap kuat pada tahun 2024 dan 2025 disertai dengan resiko membengkaknya defisit fiskal dan utang Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Kawasan Eropa akan cenderung melambat dengan masih lemahnya permintaan domestik dan kemungkinan dampak pengenaan tarif dagang yang tinggi oleh Pemerintah AS. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara *Emerging Market Economies* (EMEs) masih cukup baik, didukung oleh permintaan domestik di tengah kendala ekspor karena perlambatan ekonomi dan fragmentasi perdagangan

global. Inflasi dunia menurun dari 6,7 persen pada tahun 2023 ke 5,7 persen pada tahun 2024, namun diperkirakan masih tetap tinggi pada Tahun 2025 dan 2026, masing-masing sebesar 4,2 persen dan 3,5 persen, dengan kemungkinan terjadinya perang dagang antara AS dengan sejumlah mitra dagang utamanya, serta terganggunya mata rantai pasok perdagangan dunia.

Bank Indonesia dalam dokumen Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024 menyebutkan bahwa perekonomian dunia diperkirakan masih akan diwarnai dengan dinamika yang tinggi dan penuh tantangan. Setidaknya terdapat 5 (lima) kecenderungan yang perlu diamati yaitu

1. Tingginya risiko geopolitik dan berlanjutnya fragmentasi pola perdagangan dunia. Pemilihan Umum di lebih dari 50 negara dunia pada tahun 2024 berimplikasi pada preferensi politik dan kebijakan ekonomi pemerintahannya.
2. Terjadinya pergeseran spasial pola pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi AS dapat kembali meningkat meskipun dengan risiko pemanasan ekonomi karena tingginya suku bunga dan beban utang Pemerintah. Sementara ekonomi Tiongkok dan Kawasan Eropa berisiko akan melambat. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara EMEs yang mempunyai dukungan permintaan domestik diperkirakan masih akan cukup baik. Selain karena memburuknya fragmentasi perdagangan dan berlanjutnya ketegangan geopolitik global, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga tidak dapat dilepaskan dari permasalahan populasi yang menua (*aging population*) dan kuatnya tekanan untuk segera beralih ke ekonomi hijau (*green economy*) di negara maju.
3. Tingginya suku bunga dan risiko utang Pemerintah. Penanganan pandemi Covid-19 selama ini telah memberikan beban fiskal dan kenaikan utang Pemerintah yang besar di banyak negara. Dinamika terkini menunjukkan hasil Pemilihan Umum di AS dan di banyak negara lain, dengan kecenderungan lebih mengutamakan kepentingan domestiknya dengan preferensi politik yang populis, akan makin meningkatkan defisit fiskal dan utang Pemerintah ke depan. Kecenderungan ini mendorong makin ketatnya persaingan antarnegara dalam pembiayaan defisit fiskal dan utang Pemerintah di pasar keuangan global, dan karenanya akan berdampak pada makin tingginya suku bunga dunia.
4. Berlanjutnya ketidakpastian dan perubahan pola investasi keuangan dunia. Berbaliknya preferensi investor global pada investasi portofolionya ke AS karena tingginya *yield US Treasury* akan makin mempersulit negara EMEs dalam menarik aliran masuk investasi portofolio dan karenanya dalam mempertahankan stabilitas ekonominya. Kemampuan untuk menarik investasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga tidak akan mudah. Tingginya premi risiko global akan mendorong para investor untuk makin selektif dalam strategi investasinya.
5. Cepatnya digitalisasi antarnegara dan peningkatan risiko operasional, khususnya yang terkait dengan keamanan siber. Cepatnya kemajuan teknologi digital telah dan akan makin mempercepat inovasi, preferensi, dan efisiensi berbagai transaksi ekonomi dan keuangan secara digital. Digitalisasi juga telah dan akan makin cepat meluas secara global karena kemajuan teknologi dan inovasi digital yang terus berkembang cepat. Berbagai kerja sama internasional dan antarnegara, khususnya antar bank sentral, juga mempercepat transaksi

sistem pembayaran digital antarnegara. Karenanya, transaksi jasa baik jasa keuangan, jasa perkantoran, dan jasa perantaraan lain yang berbasis digital, baik secara nasional maupun ekspor ke negara lain, akan meningkat pesat. Prospek positif digitalisasi ini membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara yang mampu mengakselerasi program digitalisasi ekonomi dan keuangannya.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Kinerja ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan ketahanan yang kuat dalam mengatasi dampak rambatan global. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 5,03 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang sebesar 5,05 persen (c-to-c). Permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan Indonesia sejalan investasi yang tetap membaik, terutama di sektor bangunan seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsumsi Lembaga *Non Profit* yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 12,48 persen. Diikuti oleh impor yang tumbuh 7,95 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 6,61 persen. Konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi tertinggi, tumbuh sebesar 4,94 persen.

Sedangkan menurut lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB menunjukkan tren pertumbuhan positif yaitu industri pengolahan tumbuh 4,43 persen, pertanian tumbuh 0,67 persen, perdagangan 4,86 persen, konstruksi 7,02 persen, dan pertambangan 4,90 persen. Sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,69 persen, kemudian diikuti sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi kedua setelah yaitu sebesar 8,56 persen karena adanya *event* berskala nasional dan internasional baik event pertemuan (MICE), musik dan olahraga.

Inflasi selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,57% (yoy) lebih baik dari capaian Tahun 2023 sebesar 2,61 persen. Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Sementara itu, kelompok *volatile food* (VF) mencatat inflasi rendah 0,12% (yoy), didukung oleh terjaganya pasokan pangan, sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta pengaruh efek dasar harga pangan.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dari 5,32 persen pada tahun 2023. Sementara, angka kemiskinan nasional pada September 2024 sebesar 8,57 persen, turun dibandingkan Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,388 pada Maret 2023 menjadi 0,381 pada September 2024. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Kinerja ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga ditengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92 persen (c-to-c), namun lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,03 persen (c-to-c).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; c-to-c), Banten (4,79%; c-to-c) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%; c-to-c) dan DKI Jakarta sebesar (4,90%; c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 3,05 persen (c-to-c), ekspor tumbuh 4,25 persen (c-to-c), investasi tumbuh 1,88 persen (c-to-c), ditopang oleh proses pengerjaan Proyek Strategis Nasional dan proyek swasta di Jawa Tengah yang masih berlangsung.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kenaikan sektor industri pengolahan serta konstruksi. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 1,15 persen (c-to-c) sejalan dengan peningkatan impor bahan baku industri. Impor bahan baku meningkat sebesar 4,22 persen (yoy), terutama bersumber dari impor bahan baku alas kaki akibat kenaikan demand di AS dan Eropa menjelang musim dingin. Sementara itu, peningkatan kinerja di sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 0,83 persen (c-to-c) sejalan dengan kenaikan penjualan semen yang tumbuh sebesar 9,73 persen.

Inflasi Jawa Tengah selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,67 persen (yoy) lebih baik dari capaian Tahun 2023 sebesar 2,89 persen. Andil inflasi Tahun 2024 adalah (1) Emas sebesar 0,25 persen; (2) Beras sebesar 0,18 persen; (3) Minyak Goreng sebesar 0,17 persen; (4) Kopi Bubuk sebesar 0,11 persen; dan (5) Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,11 persen. Berdasarkan sebaran wilayah, capaian inflasi tertinggi terdapat di Kota Tegal sebesar 2,19 persen (yoy) dan terendah di Kota Surakarta sebesar 1,50 persen (yoy).

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat PDRB per Kapita naik dari 45,17 juta rupiah Tahun 2023 menjadi sebesar 47,97 juta rupiah Tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,78 persen pada Agustus 2024 setelah sebelumnya sebesar 5,13 persen pada Agustus 2023. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77 persen pada Maret 2023, turun menjadi 9,58 persen pada September 2024. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,369 (Maret 2023) turun menjadi 0,364 (September 2024).

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00-6,00 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 – 3,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2026, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 8,70-8,53 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,71 – 4,27 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 52,00-55,70 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,351-0,361 di tahun 2026.

Tabel 3.2.

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 - 6,00
2	PDRB per kapita	Juta Rp	52,00 - 55,70
3	Inflasi	%	1,5 – 3,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71 – 4,27
5	Angka Kemiskinan	%	8,70-8,53
6	Rasio Gini	Angka	0,351 - 0,361

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, tahun 2026 merupakan tahap "Penguatan Landasan Pembangunan Daerah". Sebagai penjabaran tahun pertama RPJMD 2025-2029, tahun 2026 difokuskan pada tema pembangunan "**Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional**" dengan strategi antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
11. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;

12. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan sasaran pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya, salah satunya dukungan keuangan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dalam aspek pengelolaan keuangan daerah diperlukan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2022-2024 cenderung meningkat. Tahun 2025 mengalami penurunan pendapatan daerah dengan diberlakukannya Undang-undang HKPD, yaitu dengan penurunan pajak daerah sebesar 18,23 persen yang disebabkan oleh menurunnya dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 33,08 persen dan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 22,50 persen. Penurunan tersebut sebagai konsekuensi adanya opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah karena sesuai Undang-undang HKPD opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah kabupaten/kota.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pajak Daerah merupakan penopang utama sektor pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun anggaran 2024 mencapai 5,474 triliun rupiah, mengalami penurunan sebesar 35,347 miliar rupiah (0,64 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar 5,509 triliun rupiah. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2024 sebesar 3,068 triliun rupiah meningkat 104,39 miliar rupiah (3,52 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2023 yang sebesar 2,963 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 2,693 triliun rupiah juga mengalami peningkatan 26,283 miliar rupiah (0,99 persen) dibanding penerimaan tahun 2023 sebesar 2,667 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada tahun 2024 sebesar 18,993 miliar rupiah meningkat sebesar 1,938 miliar rupiah (11,37 persen) dibanding penerimaan tahun 2023 sebesar 17,054 miliar rupiah. Penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2024 meningkat sebesar 135,899 miliar rupiah (4,82 persen) dari realisasi tahun 2023 sebesar 2,818 triliun rupiah menjadi 2,954 triliun rupiah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2024 sebesar 2,318 triliun rupiah mengalami peningkatan sebesar 2,179 triliun rupiah (1.563 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2023 sebesar 139,377 miliar rupiah. Hal ini sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada PP Nomor 35 Tahun 2023 khususnya pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) menjadi pendapatan dari sektor objek Retribusi Jasa Umum, maka jasa pelayanan kesehatan yang semula tercatat sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah dari BLUD menjadi pendapatan dari sektor Retribusi Daerah.

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh positif pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 687,813 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 49,330 miliar rupiah atau 7,73 persen dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar 638,482 miliar rupiah.

Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2024 sebesar 434,060 miliar rupiah, mengalami penurunan sebesar 1,823 triliun rupiah (80,78 persen) dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 2,258 triliun rupiah.

2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar 422,510 miliar rupiah (5,10 persen) dari 8,278 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 8,701 triliun rupiah pada tahun 2024.

3. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2022-2024 terutama bersumber pada pendapatan hibah dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 26,343 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 35,208 miliar rupiah (66,35 persen) dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 78,296 miliar rupiah.

Tabel 3.3.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH	**24.167.935.634.127**	**25.369.733.556.675**	**26.378.719.626.419**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**16.264.618.853.852**	**17.012.509.421.006**	**17.650.936.913.504**
Pajak Daerah	13.484.851.151.740	13.976.642.716.351	14.210.241.533.541
Retribusi Daerah	115.158.014.199	139.377.038.536	2.318.821.514.818
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	546.717.104.899	638.482.406.528	687.813.166.201
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.117.892.583.014	2.258.007.259.591	434.060.698.944
PENDAPATAN TRANSFER	**7.810.882.578.787**	**8.278.928.086.424**	**8.701.438.866.795**
Dana Bagi Hasil Pajak	909.711.090.450	923.168.698.355	889.020.058.000
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	18.989.623.430	9.942.824.636	7.212.510.000
Dana Alokasi Umum	3.435.718.090.405	3.558.428.755.500	3.819.010.791.028
Dana Alokasi Khusus (fisik)	371.734.785.185	425.034.850.842	473.940.472.839
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	3.013.376.489.317	3.275.155.012.091	3.474.257.466.928

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Dana Insentif Daerah	61.352.500.000	87.197.945.000	37.997.568.000
Dana Penyesuaian	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**92.434.201.488**	**78.296.049.245**	**26.343.846.120**
Pendapatan Hibah	92.161.740.403	77.972.123.308	25.600.169.638
Lain lain pendapatan	272.461.085	323.925.937	743.676.482

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024 (audited).

Selama kurun waktu tahun 2022-2024, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2024 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 66,91 persen, pendapatan transfer sebesar 32,99 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,10 persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2024 mencapai 53,87 persen.

Tabel 3.4.

Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024 (%)

Uraian	2022	2023	2024	Rata–Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN DAERAH	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**67,30%**	**67,06%**	**66,91%**	**67,09%**
Pajak Daerah	55,80%	55,09%	53,87%	54,84%
Retribusi Daerah	0,48%	0,55%	8,79%	4,64%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,26%	2,52%	2,61%	2,44%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,76%	8,90%	1,65%	5,20%
PENDAPATAN TRANSFER	**32,32%**	**32,63%**	**32,99%**	**32,64%**
Dana Bagi Hasil Pajak	3,76%	3,64%	3,37%	3,59%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,08%	0,04%	0,03%	0,05%
Dana Alokasi Umum	14,22%	14,03%	14,48%	14,26%
Dana Alokasi Khusus (fisik)	1,54%	1,68%	1,80%	1,67%
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	12,47%	12,91%	13,17%	12,87%
Dana Insentif Daerah	0,25%	0,34%	0,14%	0,14%
Dana Penyesuaian	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,38%**	**0,31%**	**0,10%**	**0,26%**
Pendapatan Hibah	0,38%	0.31%	0,10%	0,24%
Lain-Lain Pendapatan	0,00%	0.00%	0,00%	0,00%

Sumber: LKPD APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024 (audited).

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah sebesar 24,574 triliun rupiah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,619 triliun rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 8,792 triliun rupiah, dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 163,185 miliar rupiah. Pajak Daerah masih menjadi kontribusi terbesar penyumbang PAD ditargetkan sebesar 12,459 triliun rupiah, sedangkan Retribusi Daerah sebesar 2,092 triliun rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik sebesar 2,402 miliar menjadi sebesar 690,155 miliar rupiah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi sebesar 377,228 miliar rupiah.

Tabel 3.5.

Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025
1.	**PAD**	**15.619.284.656.000**
1.1.	Pajak Daerah	12.459.303.870.000
1.2.	Retribusi Daerah	2.092.596.928.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	690.155.713.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	377.228.145.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**8.792.464.010.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.792.464.010.000
2.2	Transfer antar daerah	-
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**163.185.839.000**
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**24.574.934.505.000**

Sumber: Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025.

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan sebesar 23,741 triliun rupiah. Proyeksi tersebut mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,0-6,0 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2022-2024, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 16,318 triliun rupiah meningkat sebesar 699,61 milyar rupiah atau 4,28 persen dari tahun sebelumnya, pendapatan transfer sebesar 7,397 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 25,600 miliar rupiah. Pendapatan transfer tahun 2026 diproyeksikan menurun 1,395 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang sebesar 8,792 triliun rupiah.

Perhitungan pendapatan transfer dianggarkan pada komponen Dana Bagi Hasil non cukai hasil tembakau, Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Dinas Pendidikan. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kebijakan bahwa pendapatan transfer akan dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Tabel 3.6.

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

NO	URAIAN	TAHUN 2026
	PENDAPATAN DAERAH	
1.	**PAD**	**16.318.898.370.000**
1.1.	Pajak Daerah	12.899.838.185.000
1.2.	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000

NO	URAIAN	TAHUN 2026
	PENDAPATAN DAERAH	
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	701.832.870.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	312.027.692.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**7.397.415.721.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000
2.2	Transfer antar daerah	**0**
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**25.600.170.000**
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**23.741.914.261.000**

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Upaya peningkatan kinerja untuk mencapai target pendapatan di tahun 2026 yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Beberapa upaya yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan sarana dan prasarana dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Teknologi Informasi dan digitalisasi/elektronifikasi pendukung pelayanan pembayaran Pendapatan Daerah;
b. Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes, BPR BKK, dan Badan Usaha lainnya (Samsat Budiman);
c. Optimalisasi peran Kabupaten/Kota, desa, pemerintah pusat, dan dunia usaha lainnya (*Samsat Corporate*, Mitra Putra Bangsa);
d. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak (Gerakan Disiplin Pajak, CHIPS, L*ets Activate New Sakpole and Signal* (LANS), *influencer* Jawa Tengah) dan pelaksanaan *door to door*;
e. Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak;
f. Menyelenggarakan Auto Show serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan *Gaikindo Indonesia International Auto Show* (GIIAS) 2026;
g. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI (optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan);
h. Pemutakhiran data objek retribusi, review tarif retribusi serta perbaikan tata kelola retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI);
i. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
j. Optimalisasi penerimaan Pajak Alat Berat;
k. Sosialisasi dan/atau penyuluhan terkait regulasi Pajak dan Retribusi;
l. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
m. Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah;
n. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun anggaran 2024 terserap secara optimal dengan realisasi serapan sebesar 95,17 persen. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 577,013 miliar rupiah berada pada Kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar 130,694 miliar rupiah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar 435,442 miliar rupiah, sedangkan sisanya berada pada Kas di Bendahara Penerimaan SKPD dan Kas di Bendahara Sekolah. Kas pada RKUD digunakan sebagai manajemen kas untuk pembayaran Belanja Gaji bulan Januari Tahun 2025 dimana Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer belum sepenuhnya terealisasi. Sehubungan dengan SILPA sesuai rencana manajemen kas Januari, maka penyerapan APBD Tahun 2024 sudah cukup optimal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Secara umum realisasi belanja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Pegawai meningkat seiring penambahan pegawai ASN baik pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) maupun pada dinas teknis melalui PPPK dan dibayarnya tambahan penghasilan PPPK yang telah memenuhi syarat, peningkatan belanja barang dan jasa dari realisasi belanja BOS, peningkatan belanja Hibah serta realisasi BTT yang meningkat untuk dana kebencanaan serta penyelenggaraan kegiatan Peparnas. Realisasi belanja yang belum optimal dapat berasal dari efisiensi negosiasi kontrak seperti Pembangunan Gedung BLK Cilacap dan beberapa pekerjaan yang tidak selesai dan/atau putus kontrak.

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH	**23.950.240.497.405**	**25.800.341.207.782**	**27.187.126.497.803**
BELANJA OPERASI	**13.456.887.671.949**	**14.887.780.012.763**	**16.083.865.301.964**
Belanja Pegawai	5.902.903.886.767	6.362.326.855.074	7.023.084.524.845
Belanja Barang dan Jasa	5.377.369.153.895	5.791.112.760.975	6.234.228.358.506
Belanja Subsidi	4.958.884.836	5.350.753.069	1.399.999.100
Belanja Hibah	2.092.761.564.803	2.610.303.175.760	2.780.143.423.054
Belanja Bantuan Sosial	78.894.181.648	118.686.467.885	45.008.996.459
BELANJA MODAL	**1.713.641.630.081**	**1.794.862.778.298**	**1.733.084.096.994**
BELANJA TAK TERDUGA	**16.545.479.100**	**740.000.000**	**10.225.800.500**
BELANJA TRANSFER	**8.763.165.716.275**	**9.116.958.416.721**	**9.359.951.298.345**
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota	6.085.808.822.482	6.264.046.226.668	6.334.544.870.221
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	804.934.393.793	653.134.590.053	1.045.686.246.124
Bantuan Keuangan kepada Desa	1.872.422.500.000	2.199.777.600.000	1.979.720.182.000

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024 (audited).

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, anggaran Belanja Daerah turun sebesar 2,035 triliun rupiah menjadi sebesar 25,151 triliun rupiah, yang meliputi Belanja Operasi sebesar 16,051 triliun rupiah, Belanja Modal sebesar 1,998 triliun rupiah, Belanja Tidak Terduga sebesar 25 miliar rupiah, dan Belanja Transfer yaitu berupa Belanja Bagi Hasil sebesar 4,494 triliun rupiah dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 2,582 triliun rupiah. Belanja Operasi merupakan komponen belanja terbesar dengan rincian Belanja Pegawai sebesar 7,436 triliun rupiah, Belanja Barang dan Jasa sebesar 6,477 triliun rupiah, Belanja Subsidi sebesar 12,413 miliar rupiah, Belanja Hibah sebesar 2,093 triliun rupiah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 32,6 miliar rupiah.

Tabel 3.8.

Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		**16.051.924.007.000**
1	Belanja Pegawai	7.436.406.324.000
2	Belanja Barang dan Jasa	6.477.455.733.000
3	Belanja Subsidi	12.413.000.000
4	Belanja Hibah	2.093.048.950.000
5	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000
BELANJA MODAL		**1.998.205.719.000**
BELANJA TAK TERDUGA		**25.000.000.000**
BELANJA TRANSFER		**7.076.818.456.000**
1	Belanja Bagi Hasil	4.494.697.452.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.582.121.004.000
JUMLAH BELANJA		**25.151.948.182.000**

Sumber: Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025.

Komposisi belanja daerah tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan menurun 4,12 persen dari tahun 2025 menjadi sebesar 24,156 triliun rupiah yang diarahkan pada tema **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"** dengan fokus utama pada:

1. Prioritas daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diarahkan untuk Penguatan Landasan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 meliputi:
   a. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
   b. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan; dan
   c. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
2. Dukungan prioritas nasional tahun 2026 meliputi:
   a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
   b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan;
h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

3. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; serta *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan kebutuhan;
4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);
5. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
6. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
7. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2026 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2026 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan dengan asumsi untuk penambahan belanja pegawai PPPK dan CPNS, termasuk penyesuaian tambahan penghasilan pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;

c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;

d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Peruntukan belanja modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:

      1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

      2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

      3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

      4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2026 terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Tabel 3.9.

Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		**15.630.119.890.500**
1	Belanja Pegawai	7.550.906.690.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.576.205.500
3	Belanja Subsidi	7.647.280.000
4	Belanja Hibah	2.070.582.715.000
5	Belanja Bantuan Sosial	10.407.000.000
BELANJA MODAL		**1.679.982.022.500**
BELANJA TAK TERDUGA		**20.000.000.000**
BELANJA TRANSFER		**6.826.312.348.000**
1	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	4.400.368.228.000
2	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota & Pem Desa	2.425.944.120.000
JUMLAH BELANJA		**24.156.414.261.000**

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2022-2024 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 di prioritaskan pada penggunaan SILPA tahun 2023 serta pencairan Dana Cadangan untuk Pilkada, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk Penyertaan Modal sebagai bentuk penyehatan BUMD.

Tabel 3.10.
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
PEMBIAYAAN	**1.018.773.865.813**	**1.330.794.071.071**	**1.385.420.547.664**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1.909.773.865.813**	**1.330.794.071.071**	**1.406.120.547.664**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.435.692.146.361	1.236.470.622.932	900.186.419.964
Pencairan Dana Cadangan	-	94.130.600.000	505.869.400.000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	474.081.719.452	192.848.139	64.727.700
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**891.000.000.000**	-	**20.700.000.000**
Pembentukan dana cadangan	400.000.000.000	-	-
Penyertaan modal	491.000.000.000	-	20.700.000.000

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah 2022-2024 (audited).

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 3.11.
Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**577.013.677.000**
	SiLPA	577.013.677.000
	Pencairan Dana Cadangan	-
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**
	Penyertaan Modal	-
3	**Pembiayaan Netto Daerah**	**577.013.677.000**

Sumber: Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2026 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.12.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	PEMBIAYAAN	
1	**Penerimaan Pembiayaan**	484.500.000.000
	SiLPA	484.500.000.000
	Pencairan Dana Cadangan	0

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	PEMBIAYAAN	
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	70.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-
	Penyertaan Modal	70.000.000.000
3	**Pembiayaan Netto Daerah**	**414.500.000.000**

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Dari uraian tersebut diatas maka kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		**16.318.898.370.000**
1	Pajak Daerah	12.899.838.185.000
2	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	701.832.870.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	312.027.692.000
PENDAPATAN TRANSFER		**7.397.415.721.000**
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**25.600.170.000**
JUMLAH PENDAPATAN		**23.741.914.261.000**
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		**15.630.119.890.500**
1	Belanja Pegawai	7.550.906.690.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.576.205.500
3	Belanja Subsidi	7.647.280.000
4	Belanja Hibah	2.070.582.715.000
5	Belanja Bantuan Sosial	10.407.000.000
BELANJA MODAL		**1.679.982.022.500**
BELANJA TAK TERDUGA		**20.000.000.000**
BELANJA TRANSFER		**6.826.312.348.000**
1	Belanja Bagi Hasil	4.400.368.228.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.425.944.120.000
JUMLAH BELANJA		**24.156.414.261.000**
SURPLUS/DEFISIT		**(414.500.000.000)**
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**484.500.000.000**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	484.500.000.000
2	Pencairan dana cadangan	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**70.000.000.000**
1	Pembentukan dana cadangan	-
2	Penyertaan modal	70.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		**414.500.000.000**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

3.2.4. Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 3.14.
Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	OPD	PAGU OPD (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
DEKONSENTRASI				
ATRIBUTIF				
1	BAPPEDA	224.308.000	189.950.500	100
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	140.235.000	140.198.390	100
3	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	201.868.000	200.608.490	100
4	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	1.273.638.000	1.234.335.307	100
DELEGATIF				
1	BAPPEDA	1.170.444.000	1.155.447.127	100
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	435.287.000	409.270.500	100
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	108.000.000	107.989.950	100
4	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4.450.600.000	4.197.374.554	100
5	DINAS KESEHATAN	13.331.297.000	12.060.255.363	100
6	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	45.590.253.000	41.997.193.604	99,94
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	611.657.000	611.103.800	100
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	180.581.000	170.817.878	100
9	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	21.726.773.000	21.426.862.101	100
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.596.884.000	1.505.609.234	100
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	9.135.965.000	9.061.613.297	100
TUGAS PEMBANTUAN				
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.837.965.000	3.359.188.924	100
2	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2.070.000.000	1.987.123.973	100
3	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	84.778.880.000	83.542.225.550	100
4	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	367.867.504.000	276.471.396.607	79,09

NO	OPD	PAGU OPD (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	21.174.757.000	19.785.774.800	100
6	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	18.779.803.000	18.746.527.515	100
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.645.006.000	3.590.372.707	100
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH	1.405.171.000	1.056.567.060	100

Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Tabel 3.15.
Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	NAMA SKPD	PAGU DIPA	BLOKIR
DEKONSENTRASI		**19.090.589.000**	**11.943.625.000**
ATRIBUTIF		**3.740.069.000**	**3.708.069.000**
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	452.663.000	452.663.000
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	470.000.000	470.000.000
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	218.617.000	218.617.000
4	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	193.541.000	193.541.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	392.845.000	392.845.000
6	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	2.012.403.000	1.980.403.000
DELEGATIF		**15.350.520.000**	**8.235.556.000**
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.105.856.000	1.105.856.000
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	11.984.000	11.984.000
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	85.000.000	85.000.000
4	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5.278.746.000	-
5	DINAS KESEHATAN	-	-
6	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	-	-
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	411.657.000	411.657.000
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH	-	-
9	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1.714.355.000	430.870.000

10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.203.775.000	4.203.775.000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.539.147.000	1.986.414.000
TUGAS PEMBANTUAN		**186.237.661.000**	**45.581.603.000**
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.680.512.000	1.680.512.000
2	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	58.989.297.000	400.000.000
4	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	99.057.234.000	38.644.948.000
5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.331.475.000	70.868.000
6	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	20.527.718.000	3.235.838.000
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.138.562.000	38.574.000
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH	1.512.863.000	1.512.863.000

Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017.

Adapun realisasi kegiatan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II tertinggi pada Bidang Kesejahteraan Sosial sebesar 5,087 miliar rupiah dan terendah pada Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan sebesar 11,996 juta rupiah. Perusahaan dengan alokasi anggaran terbanyak adalah PT Telkom Indonesia sebesar 5,262 miliar rupiah. Sedangkan perusahaan dengan alokasi program terbanyak adalah PT Bhimasena Power Indonesia sebanyak 137 program.

Tabel 3.16.

Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	PT Telkom Indonesia	82	5.262.755.296
2	Bank Jateng	21	3.731.300.000
3	PT Semen Gresik Tbk	77	2.618.091.812
4	PT Bhimasena Power Indonesia	137	784.350.000
5	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	17	453.279.000

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
6	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan	27	441.130.000
7	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	24	440.000.000
8	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	23	304.940.113
9	PT Tirta Investama -Pabrik Klaten	3	288.120.000
10	PT Pertamina Patra Niaga	11	271.567.985
11	PT BPR Surya Yudhakencana	14	267.575.000
12	PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	12	223.820.000
13	PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda)	43	213.025.000
14	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	19	195.627.650
15	PT BPR BKK Kendal (Perseroda)	42	180.719.900
16	PT Pos Indonesia (Persero) Regional VI Semarang	4	163.924.000
17	PT Dua Kelinci	86	134.860.000
18	PT Dan Liris	18	114.984.506
19	BPR BKK Karangmalang	3	111.100.000
20	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	7	93.000.000
21	PT Nojorono Tobacco International	6	92.191.140
22	PT BPR BKK Ungaran	20	82.396.500
23	PT Kayu Lapis Indonesia	20	74.559.043
24	PT PLN Indonesia Power Semarang PGU	1	13.600.000
25	Grand Dian Hotel Slawi	5	9.310.000
26	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	3	5.405.000
27	PT Kenlee Indonesia	4	2.750.000
28	PT BPR BKK Kota Semarang	2	2.665.000
29	PT Sri Rejeki Isman Tbk	1	2.270.000
30	PT Siba Surya	1	2.000.000
31	PT BPR BKK Grogol (Perseroda)	1	1.000.000
TOTAL		**734**	**16.582.316.945**

Sumber: Sistem Pelaporan Online CSR Provinsi Jawa Tengah, Per 11 Juli 2025.

Tabel 3.17.

Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja
Triwulan II Tahun 2025

No	Bidang Pokja	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Bidang Kesejahteraan Sosial	163	5.087.517.744
2	Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup	40	2.782.094.000
3	Bidang Infrastruktur	96	2.381.460.650
4	Bidang Pendidikan	106	1.954.086.661
5	Bidang Keagamaan	85	1.690.764.273
6	Bidang Usaha Ekonomi Rakyat	49	1.121.519.552
7	Bidang Pendampingan Umum	34	500.691.000
8	Bidang Kedaruratan	36	480.557.820
9	Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Pariwisata	80	337.950.625
10	Bidang Kesehatan	40	233.678.300
11	Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	5	11.996.320
TOTAL		**734**	**16.582.316.945**

Sumber: Sistem Pelaporan Online CSR Provinsi Jawa Tengah, per 11 Juli 2025.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 dituangkan dalam RKPD Tahun 2026 sebagai implementasi tahun pertama dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Dalam RPJMD Tahun 2025-2029, pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan untuk **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"**.

Jawa Tengah sebagai lumbung pangan berarti menetapkan dan memperkuat peran daerah sebagai pusat produksi dan penyedia utama pangan, baik dalam skala regional maupun nasional. Dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional, dibutuhkan dorongan untuk peningkatan hasil pertanian melalui penggunaan teknologi, bibit unggul, irigasi, dan alat mesin pertanian (alsintan), potensi lahan, iklim, dan sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian. Selain itu, peningkatan sarana seperti pembangunan jalan tani, gudang, irigasi, dan pasar agar hasil pertanian dapat tersimpan dan terdistribusikan. Program-program pendukung lainnya seperti pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan akan ditingkatkan agar petani mampu menjadi pelaku utama dalam sistem. Posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional mengandung harapan bahwa daerah tidak hanya mencukupi kebutuhan pangannya sendiri, namun juga mampu menyuplai daerah lain bahkan berkontribusi pada cadangan pangan nasional.

Keberhasilan pencapaian tujuan daerah selama tahun 2025-2029 ditunjukkan dengan capaian indikator dengan **sasaran pembangunan**, meliputi:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter;

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026 **berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029**, dengan target yang telah memperhatikan capaian tahun 2024 tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
Tujuan: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan					
	Tingkat Kemiskinan	%	9,58	9,66 - 9,00	8,70 - 8,53
	PDRB Per Kapita	Juta Rp	47,97	49,3 - 51,1	52,0 - 55,7
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	91,28	91,50	92,00

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah					
	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,47	80,97	80,97
	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	85,84	85,81 – 89,07	86,46 - 89,50
	Otonomi Fiskal Daerah	%	66,91	63,56	65,72
Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan					
	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	4,80 - 5,60	5,00 - 6,00
	Tingkat Inflasi	%	1,67	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,46	75,68	75,73
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter					
	Indeks Modal Manusia	Angka	0,59	0,62	0,62
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026, DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2026. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan pada saat Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yg inklusif dan berkualitas;
2. Penguatan struktur ekonomi dengan mendorong produk unggulan daerah;
3. Pembangunan Infrastruktur berbasis daerah;
4. Menjaga ekosistem lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan berbasis lokal;
6. Memperkuat fasilitas dan pelayanan Kesehatan;

7. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta Kematian Ibu melahirkan dan kematian bayi.

Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan pada saat Musrenbang terdiri atas:

1. Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Stunting
   Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting menjadi fokus utama yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi. Program ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
2. Reformasi Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Mutu
   Reformasi sistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja melalui peningkatan kompetensi guru, modernisasi kurikulum, dan perbaikan infrastruktur sekolah.
   Untuk transformasi layanan kesehatan yang mengutamakan kualitas pelayanan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan tenaga medis, program preventif dan promotif.
3. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi
   Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi ditempuh melalui Pengembangan sistem pangan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, Integrasi sistem pangan dan energi yang saling mendukung, Pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya, serta Pengembangan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan.
4. Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Digitalisasi UMKM
   Transformasi yang dilakukan melalui Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah ada, Transformasi digital dalam operasional dan pemasaran UMKM, Perluasan jangkauan pasar melalui platform digital, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi yang inklusif.
5. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia,
   Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia ditempuh melalui Pelatihan Vokasi, Pendidikan Karakter, dan Peningkatan kemampuan bersaing di tingkat nasional untuk mendukung daya saing global.

Tabel 4.2
Telaah Terhadap Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Pokok – Pokok Pikiran	Telaah
1.	Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting menjadi fokus utama yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi. Program ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.	Upaya pengentasan kemiskinan dan stunting menjadi prioritas daerah pada Tahun 2026. Melalui Prioritas Daerah 3, Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter diharapkan dapat terwujud sinergi antara pemerintah

No	Pokok – Pokok Pikiran	Telaah
	Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.	daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
2.	Reformasi Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Mutu Reformasi sistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja melalui: peningkatan kompetensi guru, modernisasi kurikulum, dan perbaikan infrastruktur sekolah. Untuk transformasi layanan kesehatan yang mengutamakan kualitas pelayanan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui: peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan tenaga medis, program preventif dan promotif.	Prioritas Daerah 3 yaitu Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter merupakan upaya untuk mewujudkan reformasi sistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja.
3.	Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi ditempuh melalui: Pengembangan sistem pangan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, Integrasi sistem pangan dan energi yang saling mendukung, Pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya, serta Pengembangan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan.	Melalui Prioritas Daerah 2 Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan diharapkan dapat terwujud penguatan ketahanan pangan dan energi.
4.	Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Digitalisasi UMKM Transformasi yang dilakukan melalui: Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah ada, Transformasi digital dalam operasional dan pemasaran UMKM, Perluasan jangkauan pasar melalui platform digital, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi yang inklusif.	Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Digitalisasi UMKM berupaya diwujudkan melalui Prioritas Daerah 2 yaitu Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
5.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia ditempuh melalui: Pelatihan Vokasi, Pendidikan Karakter, dan Peningkatan kemampuan bersaing di tingkat nasional untuk mendukung daya saing global.	Upaya peningkatan daya saing SDM melalui Pelatihan Vokasi, Pendidikan Karakter, dan Peningkatan kemampuan bersaing di tingkat nasional untuk mendukung daya saing global diwujudkan melalui Prioritas Daerah 3 yaitu Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada **tema Pembangunan Daerah Tahun 2026** yaitu **Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan**

Nasional. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. mendorong implementasi hilirisasi sektor pertanian (terutama komoditas perkebunan unggulan dan pangan strategis);
3. peningkatan industri pengolahan berbahan baku lokal (terutama industri subsektor makanan dan minuman);
4. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
5. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
6. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
7. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
8. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
9. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
10. pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste*);
11. penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
12. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
13. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
14. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
15. penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
16. penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
17. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
18. reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
19. penguatan kerja sama DUDI bidang agritech, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
20. peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
21. mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
22. mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;

23. peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
24. mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, tahun 2026 sebagai tahap pertama RPJMD Tahun 2025-2029 **"Penguatan Landasan Pembangunan Daerah"** diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:
    a. pelayanan publik yang merata dan inklusif;
    b. peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital;
    c. penguatan landasan kebijakan perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
    d. penguatan landasan kebijakan data terintegrasi berbasis teknologi informasi;
    e. penguatan landasan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, hilirisasi hasil riset, serta kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
    f. penguatan manajemen ASN melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
    g. penguatan pengembangan kompetensi melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
    h. penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan;
    i. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi didukung dengan peningkatan kapabiltas APIP;
    j. pelaksanaan analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, penguatan dokumentasi hukum, serta dasar peningkatan kualitas penyusunan produk hukum;
    k. pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
    l. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
    m. penguatan kelembagaan agar lebih efektif;
    n. penguatan sinergi pelaksanaan reforma agraria;
    o. penguatan koordinasi dan pengawasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta mendorong inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digitalisasi sebagai data yang valid dan termutakhir dalam pembangunan daerah;

p. pelaksanaan pemetaan daerah rawan secara sinergis, serta penguatan penegakan produk hukum daerah, pembinaan PPNS dan perlindungan masyarakat;
q. pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
r. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
s. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
t. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
u. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
v. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
w. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan, dengan fokus pada:

a. penguatan pondasi sektor industri pengolahan dengan pemetaan potensi maupun kelembagaan, dan peningkatan kapasitas dasar pelaku industri;
b. penguatan pondasi sektor perdagangan;
c. penguatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
d. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
e. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan berbasis riset dan inovasi;
f. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
g. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
h. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
i. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste);*
j. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna mendukung peningkatan produksi pangan;
k. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
l. penguatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*;
m. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
n. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;
o. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya pada jalur logistik sentra kawasan pertanian) dan kewilayahan;

p. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa;
q. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
r. penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
s. penguatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM, serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa;
t. penguatan landasan tata kelola pemerintahan desa;
u. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
v. pemetaan dan pemutakhiran status sumber daya alam strategis-kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
w. penguatan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;
x. penguatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut;
y. identifikasi potensi pendanaan hijau-wilayah strategis/aktivitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup;
z. penguatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
aa. penguatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung produktivitas pertanian);
bb. peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim;
cc. harmonisasi kebijakan dan tata kelola lintas sektor penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
dd. penguatan upaya reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
ee. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;
ff. penguatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik yang dikelola secara aman;
gg. penguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
hh. penguatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
ii. penguatan perwujudan ruang Jawa Tengah dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang melalui SPPR;
jj. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
kk. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
ll. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
mm. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
nn. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
oo. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;

pp. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter, dengan fokus pada:

   a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerjasama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
   b. pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), evaluasi dan pelaksanaan SMK *Boarding* dan Semi *Boarding* serta pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa);
   c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi prasarana sarana pendidikan;
   d. penguatan pendidikan karakter dan inklusi dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan *bullying*;
   e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perizinan penyelenggaraan pendidikan;
   f. pemetaan kebutuhan prasarana dan sarana di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan;
   g. pengembangan program pemerataan SDM kesehatan;
   h. pengembangan keterampilan kader kesehatan;
   i. peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
   j. pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
   k. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
   l. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;
   m. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
   n. penyediaan data dan informasi Objek Pemajuan Kebudayaan, cagar budaya yang akurat, serta SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya;
   o. peningkatan pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
   p. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
   q. pemetaan kerja sama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
   r. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan, mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan prasarana sarana olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
   s. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar *stakeholder*; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan, peningkatan prasarana sarana perpustakaan;
   t. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip;
   u. peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;

v. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
w. peningkatan pembangunan berbasis gender;
x. penguatan perlindungan sosial adaptif yang mencakup peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, mendorong penyandang disabilitas bekerja disektor formal dan peningkatan kualitas bantuan sosial.
y. peningkatan ketahanan keluarga;
z. pemetaan kompetensi tenaga kerja pada sektor unggulan yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan penguatan kapasitas lembaga pelatihan dan kualitas instruktur.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama Tahun 2026 yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,70 - 8,53 persen;
2. PDRB Per Kapita sebesar 52,0 - 55,7 juta rupiah;
3. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 92,00;
4. Indeks Integritas Nasional sebesar 80,97;
5. Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 86,46 - 89,50;
6. Otonomi Fiskal Daerah sebesar 65,72 persen;
7. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 - 6,00 persen;
8. Inflasi sebesar 1,50 - 3,50 persen;
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73;
10. Indeks Modal Manusia sebesar 0,62; dan
11. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71 - 4,27 persen.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rangka menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Prioritas Nasional 1
   Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2
   Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3
   Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4
   Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Prioritas Nasional 5
   Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6
   Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7
   Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8
   Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Target indikator sasaran pembangunan Nasional Tahun 2026 dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,40 persen;
2. GNI Perkapita sebesar 5.870 US$;
3. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 37,14 persen;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76,67;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 persen;
6. Rasio Gini sebesar 0,377 – 0,380;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,44 – 4,96 persen;
8. Kemiskinan Ekstrem sebesar 0,0 – 0,5 persen; dan
9. Indeks Modal Manusia sebesar 0,57.

4.2.4 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional Tahun 2026

RKPD Tahun 2026 disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026, sekaligus juga dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional. Keterkaitan Permasalahan pembangunan daerah dengan Prioritas daerah pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Daerah Tahun 2026

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1.	Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
2.	Belum optimalnya ketahanan pangan	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
3.	Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
4.	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Penurunan tingkat kemiskinan	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
5.	Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
6.	Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
7.	Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
8.	Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
9.	Terdapat simpul-simpul kerawanan yang mempengaruhi stabilitas	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	PD1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah
10.	belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas	PD1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah.

Tabel 4.4
Keselarasan Kebijakan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

No	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1.	Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
2.	Meningkatkan kemandirian desa	PD1.Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah.
3.	Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
4.	Meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.

No	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
5.	Pengurangan risiko bencana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
6.	Peningkatan pertumbuhan penanaman modal dengan menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
7.	Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan dengan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan selaras dengan perencanaan tata ruang yang responsif	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
8.	Meningkatkan akses layanan pendidikan berkualitas	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
9.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
10.	Meningkatkan kebugaran masyarakat dan daya saing olahraga	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
11.	Meningkatkan budaya literasi	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
12.	Meningkatkan daya saing pemuda	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
13.	Meningkatkan pembangunan berbasis gender	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
14.	Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
15.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
16.	Memperkuat jati diri dan meningkatkan pemajuan kebudayaan	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
17.	Meningkatkan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
18.	Meningkatkan birokrasi yang berintegritas dan kolaboratif	PD1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah.

No	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
19.	Meningkatkan kondusivitas wilayah dan demokrasi substansial	PD1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah.

Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dengan Nasional ditunjukkan dengan **keselarasan tema pembangunan, dan prioritas** yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Dukungan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2026

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
1	**PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**	**PD.1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**		**313.683.429.000**	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.432.690.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.472.866.000	Biro Hukum
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.608.336.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	61.299.273.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	36.626.664.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	207.243.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	**PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,**	**PD.1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**		**548.807.623.000**	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
	ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	48.621.302.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	23.013.309.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.770.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.793.451.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	997.688.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	13.614.995.000	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.975.924.000	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.592.206.000	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	965.614.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	158.986.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	245.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.783.800.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.381.911.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.248.576.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12.612.050.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.663.227.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.000.072.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	159.281.528.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	178.234.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.637.563.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.850.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	52.959.252.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.676.375.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	191.362.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	115.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	923.631.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.077.356.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.135.551.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.131.994.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi**	**PD 2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan**		**528.283.241.000**	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.470.116.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	349.789.477.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.146.224.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	270.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	430.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	136.438.696.000	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	716.983.000	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.600.000.000	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	938.680.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	195.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	577.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	855.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.278.390.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.525.625.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	8.652.050.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	850.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.050.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	**PN 4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**	**PD.1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**		**6.403.239.484.000**	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.688.943.996.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.028.289.802.000	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	330.000.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	400.000.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	300.000.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	547.251.577.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.928.215.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	75.000.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.160.222.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	121.635.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.572.217.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.510.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	950.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.748.312.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.698.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	770.432.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	328.408.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	373.720.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	296.720.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	70.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	60.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	160.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	389.667.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	177.353.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.965.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100.444.700.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.469.708.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	3.379.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**	**PD 2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan**		**58.615.900.000**	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	667.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.514.954.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	790.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	350.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	210.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	33.550.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	999.054.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	6.791.546.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.761.146.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	502.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	**PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan**	**PD 1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**		**2.650.065.258.000**	
		PD 2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12.845.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PD 3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.266.323.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.663.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	370.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.286.000.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200.000.000	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	74.090.123.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	110.594.572.000	Dinas Sosial

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.397.580.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENATAAN DESA	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	155.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.033.540.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.870.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.425.944.120.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	**PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan**	**PD 1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**		**13.072.095.107.000**	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.141.844.309.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.345.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	42.741.829.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	740.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.410.458.000	Biro Organisasi

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.919.557.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.250.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.383.134.000	Biro Hukum
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.640.000.000	Biro Perekonomian
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.781.081.000	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.755.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	336.517.695.000	Sekretariat DPRD
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.850.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.235.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.431.868.228.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.815.905.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	31.008.687.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.871.840.000	Badan Kepegawaian Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26.892.349.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.732.269.000	Badan Penghubung
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.568.089.000	Inspektorat
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.924.677.000	Inspektorat
8	**PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk**	**PD 1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**		**447.497.630.000**	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
	mencapai masyarakat yang adil dan makmur				
		PD 2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.975.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PD 3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	360.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	22.675.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.750.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.205.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.900.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	102.581.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	597.827.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20.065.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	410.388.757.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.373.400.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			TOTAL	**24.022.287.672.000**	

4.3. Program Prioritas Gubernur Dan Wakil Gubernur

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur diwujudkan melalui kebijakan 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis. Seluruh program tersebut berjumlah 136 yang kemudian secara teknokratis menjadi **"136 Program Daerah"**. Program-program tersebut kemudian dijabarkan secara lebih implementatif dalam bentuk strategi, kegiatan, dan aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta didukung oleh banyak pihak atau *stakeholder* termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pada Tahun 2026, 136 Program Daerah tersebut dilakukan baik dapat bersifat pentahapan maupun realisasi perwujudan program. Program – program tersebut terdiri atas:

4.3.1 Program Prioritas

Program Prioritas merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program prioritas sebagai berikut:

1. Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa;
2. Pesantren Obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren;
3. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
4. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go international*, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
5. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional;
6. Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai;
7. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di kawasan industri;
8. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;
9. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin;
10. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
11. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal Qur'an, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi.

Penjabaran atas Program Prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penjabaran Program Prioritas

No	Nama Program Prioritas	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
1.	Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa	Biro Organisasi	Program Penataan Organisasi
		Badan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Administrasi Pemerinatahan Desa
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	Pesantren Obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyuluhan Pertanian
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program pengelolaan persampahan
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
3.	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Biro Perekonomian	Program Perekonomian Dan Pembangunan
4.	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go international*, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kerjasama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa

No	Nama Program Prioritas	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor
		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
5.	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman; Program Pengembangan Perumahan;
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
6.	Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
7.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di kawasan industri	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Hubungan Industrial
8.	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Buday
9.	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10.	Taruna karya mandiri melalui program kartu	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

No	Nama Program Prioritas	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
	zilenial untuk membuka lapangan kerja		
11.	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat
		Badan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah

4.3.2 Program Intervensi

Program Intervensi merupakan program yang melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah (memungkinkan kolaborasi bersama pemerintah pusat) yang memiliki ruang lingkup dan dampak multidimensional sehingga mampu menjadi penopang keberhasilan pembangunan daerah. Program Intervensi meliputi:

1. Integrasi aplikasi pelayanan ke dalam "Jateng Ngopeni";
2. *Smart response* diwujudkan dengan *Call Center* 24 jam "Jateng Nglakoni";
3. Kantor Gubernur Rumah Rakyat;
4. Digitalisasi manajemen arsip;
5. Penetapan Zona Integritas/Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD;
6. Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa;
7. Riset potensi daerah secara berkala berbasis potensi wilayah;
8. Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, dan *sport center*);
9. Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru;
10. Pengembangan destinasi wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah;
11. Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening;
12. Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa;
13. Pengembangan kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap kesejahteraan budayawan lokal;
14. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);

15. Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil;
16. Menyediakan paket pendidikan gratis (seragam, buku pembelajaran, akses internet);
17. Peningkatan bantuan keuangan desa;
18. Jambanisasi 100%;
19. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
20. Program asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
21. Mendorong pembangunan sistem desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi suplai air bersih dan mengatasi dampak eksploitasi air tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang);
22. Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru.

Penjabaran atas Program Intervensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Penjabaran Program Intervensi

No	Nama Program Intervensi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
1.	Integrasi aplikasi pelayanan ke dalam "Jateng Ngopeni"	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2.	*Smart response* diwujudkan dengan *Call Center* 24 jam "Jateng Nglakoni"	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Program Penunjang Pemerintah Daerah
3.	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	Biro Umum	Program Penunjang Pemerintah Daerah
4.	Digitalisasi manajemen arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pengelolaan Arsip; Program Penunjang Pemerintah Daerah
5.	Penetapan Zona Integritas/Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Biro Organisasi	Program Penataan Organisasi
		Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
		Biro Perekonomian	Program Perekonomian dan pembangunan
6.	Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Nama Program Intervensi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
		Biro Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Badan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
7.	Riset potensi daerah secara berkala berbasis potensi wilayah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kerjasama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa.
8.	Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, dan *sport center*)	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan UMKM
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
9.	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata
10.	Pengembangan destinasi wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
11.	Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata; Program Peningkatan Daya Tarik Wisata

No	Nama Program Intervensi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
12.	Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa	Dinas Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran
13.	Pengembangan kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap kesejahteraan budayawan lokal	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan; Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Program Pengelolaan Permuseuman; Program Pembinaan Sejarah; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
14.	Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelatihan dan Produktivitas; Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Pelatihan dan Produktivitas
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
15.	Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	Dinas Kesehatan	Rogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
16.	Menyediakan paket pendidikan gratis (seragam, buku pembelajaran, akses internet)	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
17.	Peningkatan Bantuan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Administrasi Pemerintahan Desa
18.	Jambanisasi 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
19.	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Nama Program Intervensi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
20.	Program asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap
21.	Mendorong pembangunan sistem desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi suplai air bersih dan mengatasi dampak eksploitasi air tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
22.	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4.3.3 Program Aksi

Program Aksi merupakan program strategis untuk menopang keberhasilan program prioritas yang dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, meliputi:

1. Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai pusat pelayanan publik berbasis wilayah;
2. Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK;
3. Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan;
4. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak;
5. Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan penyetaraan ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta;
6. Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;
7. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
8. Pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata;
9. Pemenuhan dan peningkatan akses internet di desa (102 desa *blankspot*);
10. Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM;
11. Mendorong pembangunan rumah apung kawasan pesisir;
12. Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter;
13. Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte);

14. Memastikan integrasi jaringan untuk menjamin konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi;
15. Optimalisasi pelabuhan dan bandara perintis di Jawa Tengah sebagai generator aktivitas perekonomian global;
16. Mendorong pembangunan Giant Sea Wall (tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah);
17. Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional;
18. Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan mendorong revitalisasi jalur kereta api;
19. Menyiapkan sistem irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak, Pati);
20. Penegakan regulasi daerah terkait air tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali;
21. Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan;
22. Mendorong pengembangan kawasan industri berorientasi lingkungan (industri hijau);
23. Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya;
24. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
25. Penghapusan hutang petani, nelayan, UMKM;
26. Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp1.000 untuk buruh, lansia, veteran, dan pelajar;
27. Melakukan tata kelola pertanian modern berbasis integrated farming dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian;
28. Pendirian Koperasi Buruh;
29. Promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora;
30. Mengusulkan lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO;
31. Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
32. Penguatan dan promosi moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri;
33. Mendorong penguatan forum kerukunan antarumat beragama dan forum pembauran kebangsaan;
34. Spesialis keliling (Spelling), cek kesehatan gratis (CKG), puskesmas pembantu, dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
35. Mendorong penyediaan 1 dokter 1 bidan setiap puskesmas pembantu;
36. Pelayanan tanpa antri lansia dan klinik geriatri, ibu hamil, dan disabilitas, pensiunan di rumah sakit;
37. Event olahraga memancing terbesar Asia;
38. Petani milenial gajian;
39. Mendukung dan menjadikan kegiatan tarkam (pertandingan antar kampung) masuk ke dalam kalender olahraga provinsi;
40. BOSDa Madrasah Aliyah;
41. Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerja sama dengan pihak sekolah swasta;

42. Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra kerja;
43. Transformasi tata kelola tambang galian C;
44. Pengembangan investasi berbasis pada modal infrastruktur padat karya;
45. Penguatan tata kelola CSR untuk pembangunan daerah;
46. Pengembangan peternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa;
47. Pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk PAD yang optimal;
48. Restrukturisasi proses bisnis dan tata kelola BUMD;
49. Peningkatan status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional;
50. Pengembangan *Sister Province*;
51. Membentuk satuan tugas pengamanan data digital "*Cyber Security* Jawa Tengah' dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK;
52. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;
53. Mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen) dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa;
54. Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah;
55. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;
56. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan;
57. Menyusun peraturan daerah dan rencana aksi daerah tentang ekonomi hijau;
58. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;
59. Program kerja sama Forkopimda;
60. Pengembangan pertanian yang terintegrasi;
61. Pemberdayaan masyarakat hutan sosial.

Penjabaran atas Program Aksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Penjabaran Program Aksi

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
1.	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai pusat pelayanan publik berbasis wilayah	Biro Organisasi	Program Penataan Organisasi
2.	Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3.	Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak,	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Program Perlindungan Perempuan; Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
	perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
4.	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak	Biro Hukum	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
5.	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan penyetaraan ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
6.	Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan UMKM/ Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan/ Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
7.	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
8.	Pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwiata dan Ekonomi Kreatif
9.	Pemenuhan dan peningkatan akses internet di desa (102 desa *blankspot*)	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
10.	Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
11.	Mendorong pembangunan rumah apung kawasan pesisir	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
12.	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan
13.	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
14.	Memastikan integrasi jaringan untuk menjamin konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/ Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
15.	Optimalisasi pelabuhan dan bandara perintis di Jawa Tengah sebagai generator aktivitas perekonomian global	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Untuk Bandara, Tidak Ada Program Khusus Angkutan Udara Sesuai Kewenangan); Program Pengelolaan Pelayaran
16.	Mendorong pembangunan *Giant Sea Wall* (tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
17.	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
18.	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan mendorong revitalisasi jalur kereta api	Dinas Perhubungan	Program Pengelolaan Perkeretaapian
19.	Menyiapkan sistem irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak, Pati)	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
20.	Penegakan regulasi daerah terkait air tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
21.	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
22.	Mendorong pengembangan kawasan industri berorientasi lingkungan (industri hijau)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
23.	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan
24.	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati); Program pengelolaan hutan
25.	Penghapusan hutang petani, nelayan, UMKM	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyuluhan Pertanian
26.	Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp1.000 untuk buruh, lansia, veteran, dan pelajar	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
27.	Melakukan tata kelola pertanian modern berbasis integrated farming dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Sarana Pertanian
28.	Pendirian Koperasi Buruh	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Hubungan Industrial
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi/ Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi/ Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.	Promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan
		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama	Program Fasilitasi Kerja Sama Daerah

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
30.	Mengusulkan lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan
31.	Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Biro Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
32.	Penguatan dan promosi moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama	Program Kerjasama Daerah
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
33.	Mendorong penguatan forum kerukunan antarumat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
34.	Spesialis keliling (Spelling), cek kesehatan gratis (CKG), puskesmas pembantu, dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
35.	Mendorong penyediaan 1 dokter 1 bidan setiap puskesmas pembantu	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
36.	Pelayanan tanpa antri lansia dan klinik geriatri, ibu hamil, dan disabilitas, pensiunan di rumah sakit	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
37.	Event olahraga memancing terbesar Asia	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata
38.	Petani milenial gajian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
39.	Mendukung dan menjadikan kegiatan tarkam (pertandingan antar kampung) masuk ke dalam kalender olahraga provinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
40.	BOSDa Madrasah Aliyah	Biro Kesejahteraan	Program Kesejahteraan Rakyat

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
		Rakyat	
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
41.	Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerja sama dengan pihak sekolah swasta	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pengembangan Kurikulum
42.	Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra kerja	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pengembangan Kurikulum
43.	Transformasi tata kelola tambang galian C	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
44.	Pengembangan investasi berbasis pada modal infrastruktur padat karya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal
45.	Penguatan tata kelola CSR untuk pembangunan daerah	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama	Program Fasilitasi Kerja Sama Daerah
46.	Pengembangan peternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
47.	Pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk PAD yang optimal	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
48.	Restrukturisasi proses bisnis dan tata kelola BUMD	Biro Perekonomian	Program Perekonomian dan pembangunan
49.	Peningkatan status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional	Dinas Perhubungan	Telah terealisasi
50.	Pengembangan *Sister Province*	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor
51.	Membentuk satuan tugas pengamanan data digital	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Kemananan Informasi

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
	"*Cyber Security* Jawa Tengah' dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK		
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
52.	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
53.	Mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen) dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
54.	Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
55.	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
56.	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
57.	Menyusun peraturan daerah dan rencana aksi daerah tentang ekonomi hijau	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
58.	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
59.	Program kerja sama Forkopimda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas
60.	Pengembangan pertanian yang terintegrasi	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyuluhan Pertanian

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
61.	Pemberdayaan masyarakat hutan sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan

4.3.4 Program Taktis

Program taktis merupakan bagian dari perencanaan strategis yang lebih rinci, cepat dan jangka pendek, meliputi:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung pelayanan publik prima;
2. Mendorong terciptanya pengarusutamaan gender berkeadilan;
3. Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah;
4. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
5. Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi;
6. Mendorong Program *Santri Preneur* (Santri Pengusaha);
7. Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;
8. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
9. BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah);
10. Mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM industri untuk penyediaan air bersih;
11. Revitalisasi embung;
12. Pendidikan perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren;
13. Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat;
14. Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau;
15. Menghadirkan infrastruktur yang carbon neutral;
16. Pengembangan urban farming untuk pertanian kawasan perkotaan;
17. Penataan drainase dan pengendalian banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan, dan Kabupaten Demak;
18. Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
19. Subsidi pangan murah;
20. Penguatan dan pembinaan *e-sport* Jawa Tengah;
21. Perlindungan hak buruh melalui fasilitasi peraturan gubernur tentang payung hukum ketenagakerjaan;
22. Penyediaan benih yang berkualitas;
23. Penyediaan alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian;
24. Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3 persen dapat menerima penyandang disabilitas;
25. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya;
26. Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok;
27. *Pap smear* gratis (skrining Ca Serviks);

28. Peningkatan operasional kader posyandu;
29. Peningkatan kualitas hidup lansia;
30. Mendukung Jawa Tengah bebas peredaran narkoba;
31. Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah;
32. Penanganan bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) satuan pendidikan dan satuan tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
33. Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa;
34. Pembangunan kolaboratif mendorong terjalinnya partisipasi berbasis hexahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan Lembaga keuangan);
35. Regulasi pengembangan kawasan industri;
36. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta dunia usaha;
37. Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah;
38. Fasilitas rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta;
39. Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-*market place*) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (*e-commerce*);
40. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program "PERUSAHAAN ASUH";
41. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional;
42. Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan.

Penjabaran atas Program Taktis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Penjabaran Program Taktis

No	Nama Program Taktis	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
1.	Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung pelayanan publik prima	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.	Mendorong terciptanya pengarusutamaan gender berkeadilan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3.	Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

No	Nama Program Taktis	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
	penegakan peraturan daerah		
4.	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Nasional
5.	Program *ECO-PESANTREN* yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Persampahan
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
6.	Mendorong Program *Santri Preneur* (Santri Pengusaha)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
7.	Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
8.	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Dinas Koperasi UMKM	
9.	BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah)	Dinas Permasdesdukcapi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuagan Daerah
10.	Mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM industri untuk penyediaan air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11.	Revitalisasi embung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
12.	Pendidikan perubahan iklim dan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk

No	Nama Program Taktis	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
	penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren		Masyarakat;
		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
13.	Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
		Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan
14.	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3); Program Pengelolaan Hutan
15.	Menghadirkan infrastruktur yang carbon neutral	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
16.	Pengembangan urban farming untuk pertanian kawasan perkotaan	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
17.	Penataan drainase dan pengendalian banjir	belum	

No	Nama Program Taktis	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
	terutama di Kota Semarang, Pekalongan, dan Kabupaten Demak		
18.	Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
19.	Subsidi pangan murah	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
20.	Penguatan dan pembinaan *e-sport* Jawa Tengah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
21.	Perlindungan hak buruh melalui fasilitasi peraturan gubernur tentang payung hukum ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Hubungan Industrial
22.	Penyediaan benih yang berkualitas	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan
23.	Penyediaan alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
24.	Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3 persen dapat menerima penyandang disabilitas	Biro Perekonomian	Program Perekonomian dan pembangunan
25.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan; Program Pembinaan Sejarah; Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Biro Organisasi	Program penataan organisasi
26.	Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Pent
27.	*Pap smear* gratis (skrining Ca Serviks)	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
28.	Peningkatan operasional kader posyandu	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No	Nama Program Taktis	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
29.	Peningkatan kualitas hidup lansia	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
30.	Mendukung Jawa Tengah bebas peredaran narkoba	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
31.	Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah	RSJD dr.Soejarwadi Klaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		RSJD Amino Gondohutomo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		RSJD dr Arif Zainudin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
32.	Penanganan *bullying* yang tuntas menuju Jawa Tengah *Zero Bullying* melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) satuan pendidikan dan satuan tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
33.	Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
34.	Pembangunan kolaboratif mendorong terjalinnya partisipasi berbasis hexahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan Lembaga keuangan)	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Riset Dan Inovasi Daerah
		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal
		Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan	Program Administrasi Pemerintahan Desa

No	Nama Program Taktis	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
		Pencatatan Sipil	
35.	Regulasi pengembangan kawasan industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional "
36.	Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/ Kota serta dunia usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; Program Pengendalian Izin Usaha Industri
37.	Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Riset Dan Inovasi Daerah
38.	Fasilitas rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
39.	Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-*market place*) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (*e-commerce*)	Biro Perekonomian	Program Perekonomian dan pembangunan
40.	Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program "PERUSAHAAN ASUH"	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
41.	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Persampahan
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
42.	Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Dalam pelaksanaan Program Daerah tersebut maka dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari total 136 Program Daerah sebanyak 35 Program Daerah didelegasikan kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk diselaraskan dengan program daerah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai "Program Delegasi" Provinsi ke Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, meliputi:

1. PP. Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa;
2. PP. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
3. PP. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go international*, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
4. PP. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional;
5. PP. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;
6. PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
7. PI. Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*);
8. PI. Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru;
9. PI. Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru;
10. PA. Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK;
11. PA. Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
12. PA. Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta;
13. PA. Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan;
14. PA. Mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap puskesmas pembantu;
15. PA. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak;
16. PA. Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;
17. PA. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
18. PA. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata;
19. PA. Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM;
20. PA. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
21. PA. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;

22. PA. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;
23. PA. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan;
24. PA. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;
25. PT. Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila;
26. PT. BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah);
27. PT. Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat;
28. PT. Cek kesehatan gratis;
29. PT. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
30. PT. Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;
31. PT. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
32. PT. Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau;
33. PA. Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan;
34. PT. Peningkatan operasional kader posyandu;
35. PT. Peningkatan kualitas hidup lansia.

Selanjutnya dalam rangka perwujudan tema dan prioritas daerah tahun 2026 selengkapnya tertuang dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.10
Penjabaran Prioritas Daerah Tahun 2026

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan									
		Tingkat Kemiskinan					8,70-8,53	%		
		PDRB Per Kapita					52,0 - 55,7	Juta Rupiah		
		Indeks Reformasi Birokrasi					92	Angka		
Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah									19.053.901.090.000	
			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah						19.053.901.090.000	
				Indeks Integritas Nasional			80,97	Angka	11.510.802.492.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.964.914.894.000	
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	100	%	631.018.000	BIRO HUKUM
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	100	%	346.500.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	100	%	170.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100	%	217.884.000	BIRO PEREKONOMIAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	100	%	1.630.155.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat				
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	100	%	511.956.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	100	%	380.500.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	100	%	204.272.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	100	%	45.135.928.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100	%	228.284.149.000	BIRO UMUM
						Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100	%	10.535.000.000	BIRO UMUM
						Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100	%	32.173.932.000	BIRO UMUM
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	100	%	306.000.000	Badan Kepegawaian Daerah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	100	%	30.026.842.000	Badan Kepegawaian Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	%	590.064.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	100	%	220.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	100	%	13.574.842.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100	%	385.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100	%	124.812.897.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	100	%	669.432.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	%	260.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	%	14.161.444.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I	100	%	616.060.000	CDK WILAYAH I
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II	100	%	536.831.000	CDK WILAYAH II
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III	100	%	654.926.000	CDK WILAYAH III
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	100	%	599.975.000	CDK WILAYAH IV

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						perangkat daerah CDK IV				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V	100	%	481.788.000	CDK WILAYAH V
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI	100	%	488.200.000	CDK WILAYAH VI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII	100	%	434.000.000	CDK WILAYAH VIII
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX	100	%	340.180.000	CDK WILAYAH IX

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X	100	%	605.070.000	CDK WILAYAH X
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	100	%	1.123.312.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	100	%	1.383.251.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	100	%	1.222.891.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI	100	%	379.500.000	CDK WILAYAH XI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII	100	%	425.000.000	CDK WILAYAH VII
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	%	786.693.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	%	41.923.196.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	95	%	1.874.332.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						perangkat daerah UPPD Purwokerto				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	%	178.316.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	%	30.131.669.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	%	2.372.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan	100	%	14.173.275.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Bangsa dan Politik				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	100	%	152.365.000	Satuan Polisi Pamong Praja
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	100	%	17.590.503.000	Satuan Polisi Pamong Praja
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	95	%	173.322.892.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	95	%	1.236.220.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						perangkat daerah UPPD Wonosobo				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung	95	%	1.371.567.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid	95	%	1.624.624.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang	95	%	1.015.425.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	%	62.544.937.000	Bagian Umum

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Sekretariat DPRD				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati	95	%	1.513.868.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus	95	%	1.438.657.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi	95	%	1.400.360.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara	95	%	1.515.708.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD	100	%	168.519.617.000	Sekretariat DPRD
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. ADHYATMA, MPH	49,19	%	190.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	100	%	100.250.879.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	100	%	628.552.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	55	%	207.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	100	%	15.506.272.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan	100	%	1.626.178.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Kemasan Kelas A (BIKDK)				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	90	%	374.757.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta	95	%	1.467.999.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten	95	%	2.313.640.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen	95	%	1.215.494.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo	95	%	1.521.260.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri	95	%	2.062.516.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II	95	%	1.493.589.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar	95	%	1.474.579.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	95	%	1.493.881.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						perangkat daerah UPPD Boyolali				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III	95	%	1.766.041.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan	95	%	1.363.328.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen	95	%	1.344.862.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen	95	%	1.350.567.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	40,88	%	62.740.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%	53.891.305.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo	95	%	1.581.937.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang	95	%	1.369.277.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang	95	%	1.492.296.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal	95	%	1.554.592.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi	95	%	1.519.843.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang	95	%	1.064.914.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes	95	%	2.086.024.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	95	%	1.664.910.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						perangkat daerah UPPD Blora				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap	95	%	1.974.787.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga	95	%	1.369.057.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara	95	%	1.349.213.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas	100	%	2.204.177.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Kaki Kelas A (BIPTAK)				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati	100	%	2.554.100.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	100	%	3.848.955.000	Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa	100	%	3.162.657.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	%	1.999.958.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Balkesmas Wilayah Magelang				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I	95	%	2.038.741.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten	100	%	1.973.434.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100	%	850.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	86	%	32.143.745.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah INSPEKTORAT	100	%	189.983.000	INSPEKTORAT
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT	100	%	29.426.411.000	INSPEKTORAT
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan	100	%	3.043.561.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	37	%	68.383.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%	74.154.779.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	100	%	2.040.364.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	100	%	1.357.782.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	%	378.365.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja	100	%	71.324.564.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						dan Transmigrasi				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	100	%	1.300.000.000	Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	100	%	1.111.155.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	100	%	1.350.000.000	Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	100	%	851.688.000	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	100	%	1.300.000.000	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran	95	%	2.213.840.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	100	%	1.073.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	95	%	1.228.838.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						daerah UPPD Salatiga				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal	95	%	1.332.485.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak	95	%	1.349.132.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	100	%	610.880.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan	87	%	811.014.000	Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Sertifikasi Pangan				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan	100	%	92.259.167.000	Dinas Pendidikan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan	100	%	5.282.138.236.000	Dinas Pendidikan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi	100	%	93.200.228.000	RSUD Dr. Moewardi
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	33,01	%	56.393.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	100	%	69.950.716.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	100	%	6.249.000.000	Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran	100	%	2.423.100.000	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	100	%	2.246.890.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang	100	%	1.601.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Dinas Wilayah Pendidikan III				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	%	685.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	100	%	1.093.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	100	%	4.030.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	%	69.671.780.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	100	%	1.120.800.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	100	%	1.514.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	100	%	1.321.250.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	100	%	1.409.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	100	%	1.013.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	100	%	1.657.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	100	%	1.318.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	81,5	%	8.394.248.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	495.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	30.494.576.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100	%	453.691.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100	%	49.277.557.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	100	%	1.220.856.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	100	%	491.265.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	100	%	463.378.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	100	%	756.170.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	100	%	457.676.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	100	%	381.904.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	100	%	644.022.000	Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						daerah Pelabuhan Perikanan Juwana				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan	94	%	324.774.000	Dinas Kesehatan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	100	%	1.444.788.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan	90,5	%	84.712.334.000	Dinas Kesehatan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan	100	%	667.879.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Pantai Logending				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	100	%	742.039.000	Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	100	%	5.937.483.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	100	%	4.390.153.000	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	100	%	442.160.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	100	%	596.473.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	100	%	513.636.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	100	%	406.687.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	100	%	507.428.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	%	120.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	87	%	22.775.156.000	Dinas Ketahanan Pangan
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	90	%	400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Penghubung	96	%	54.735.000	Badan Penghubung
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung	100	%	21.457.471.000	Badan Penghubung
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	%	285.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	%	18.360.901.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. REHATTA	52	%	76.028.000.000	RSUD dr. REHATTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA	100	%	46.556.704.000	RSUD dr. REHATTA
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	100	%	557.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	100	%	41.448.297.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	100	%	266.660.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Terpadu Satu Pintu				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	%	19.254.517.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	100	%	357.140.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN	100	%	40.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	%	839.389.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan	100	%	245.683.000	Dinas Perhubungan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan	100	%	67.243.976.000	Dinas Perhubungan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	100	%	157.840.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	100	%	123.612.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	100	%	247.100.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	100	%	164.700.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	100	%	141.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	100	%	171.400.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	100	%	297.000.000	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	%	24.463.628.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	100	%	3.506.000.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	100	%	1.004.321.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang	100	%	619.465.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	100	%	523.562.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	100	%	538.526.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	100	%	506.976.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	100	%	538.173.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	100	%	518.303.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	100	%	433.699.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang	100	%	930.780.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	100	%	562.349.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	100	%	471.644.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	100	%	529.050.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	100	%	548.866.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial	100	%	124.332.974.000	Dinas Sosial
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	91	%	1.074.999.996.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	100	%	58.338.358.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah	100	%	29.980.691.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Sakit Mata Soepardjo Rustam				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	100	%	19.309.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Turusgede	100	%	287.320.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	100	%	493.700.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	100	%	412.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	100	%	482.627.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	100	%	337.600.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	100	%	373.050.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	100	%	444.025.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	100	%	458.458.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata	100	%	694.955.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo	100	%	276.750.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	100	%	503.209.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo	100	%	528.581.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	100	%	308.040.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan	100	%	542.250.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Sosial Bojong Bata				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi	100	%	437.000.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Sosial	100	%	850.000.000	Dinas Sosial
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Dr. Moewardi	82,2	%	1.160.400.000.000	RSUD Dr. Moewardi
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	100	%	335.887.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
						Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	79,5	%	36.250.807.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data	100	%	176.009.000	UPT Pusat Data
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	100	%	1.906.924.000	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	100	%	5.183.485.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	100	%	3.993.060.000	Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	100	%	421.074.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	100	%	133.430.179.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	100	%	952.000.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	100	%	4.182.590.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	100	%	863.000.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman	100	%	900.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian	100	%	1.128.000.000	Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	100	%	12.518.445.000	Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	100	%	1.759.003.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	100	%	317.914.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	100	%	3.468.000.000	Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah	100	%	4.775.000.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	100	%	1.741.911.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	%	1.121.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	%	162.170.725.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	100	%	1.974.164.000	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Jasa Konstruksi	100	%	953.479.000	BALAI JASA KONSTRUKSI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	100	%	1.513.461.000	BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	100	%	1.658.213.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	100	%	2.576.618.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	100	%	1.344.439.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	100	%	1.855.914.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	100	%	1.356.377.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan	100	%	2.265.017.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Jalan Wilayah Cilacap				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	100	%	2.882.801.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal	100	%	990.873.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna	100	%	1.776.259.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo	100	%	715.406.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto	100	%	1.576.684.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	%	550.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	86	%	34.469.477.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	%	18.627.159.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				70.000.000	
						Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	99,07	%	70.000.000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL				60.000.000	
						Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	99,12	%	60.000.000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				75.000.000	
						Persentase Institusi/Lembaga/ Badan Hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan	100	%	75.000.000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				15.345.000.000	
						Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	85	Angka	15.345.000.000	Bidang Komunikasi Publik dan Media
					PROGRAM PENGELOLAAN				42.741.829.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					APLIKASI INFORMATIKA					
						Tingkat Pemenuhan Layanan Digital	25	%	2.540.725.000	Bidang Infrastruktur Teknologi Digital
						Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	65	%	20.173.604.000	UPT Pusat Data
						Tingkat Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi	12	%	20.027.500.000	Bidang Aplikasi Pemerintah Digital
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				740.000.000	
						Indeks Satu Data Indonesia	86	Indeks	740.000.000	Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				1.783.800.000	
						Tingkat Kematangan Keamanan Siber	3,59	Angka	1.783.800.000	Bidang Persandian dan Keamanan Siber
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				597.827.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	44,74	%	261.125.000	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
						Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	79,15	%	177.927.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85,7	Angka	158.775.000	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				20.065.000	
						Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	66,67	%	6.053.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
						Persentase pemulihan arsip akibat bencana	20,34	%	9.012.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
						Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan	11,4	%	5.000.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						melalui alih media				
					PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				1.410.458.000	
						Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	71	%	199.101.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	91,43	%	144.920.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase Perangkat Daerah yang mengimplement asikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	92	%	164.094.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	59,52	%	145.202.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	71,42	%	120.398.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase Perangkat Daerah dengan	70	%	214.847.000	BIRO ORGANISASI

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						nilai SAKIP meningkat				
						Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	93	%	217.896.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas	39,21	%	204.000.000	BIRO ORGANISASI
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				2.919.557.000	
						Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	100	%	1.686.294.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	100	%	675.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	100	%	558.263.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
					PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				411.638.757.000	
						Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	85	%	600.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	85	%	650.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	63	%	410.388.757.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
					PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				2.856.000.000	
						Indeks Reformasi Hukum	92	Angka	866.821.000	BIRO HUKUM
						Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	96	%	516.313.000	BIRO HUKUM
						Capaian Pemberian Bantuan Hukum	100	%	1.321.326.000	BIRO HUKUM

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	86	Angka	151.540.000	BIRO HUKUM
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.640.000.000	
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	80	%	215.000.000	BIRO PEREKONOMIAN
						Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	85	%	600.000.000	BIRO PEREKONOMIAN
						Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	1,95	%	875.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
						Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	2,3	%	750.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
						Persentase nilai kemandirian BLUD	55	%	355.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	85	%	175.870.000	BIRO PEREKONOMIAN
						Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	85	%	206.218.000	BIRO PEREKONOMIAN
						Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	87	%	1.462.912.000	BIRO PEREKONOMIAN
					PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				1.781.081.000	
						Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	92	%	839.176.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	85	%	475.139.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	83	%	466.766.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				1.755.000.000	
						Persentase realisasi bantuan keuangan	86	%	740.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	86,5	%	195.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	100	%	195.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	90	%	625.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
					PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				4.850.000.000	
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	80,31	%	1.100.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	87,29	%	830.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
						Persentase Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Kinerja Daerah	98,74	%	2.920.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				5.235.000.000	
						Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	89,08	%	220.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	99,07	%	380.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80,49	%	1.315.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	76,59	%	1.130.000.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
						Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	85,76	%	450.000.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
						Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	97,84	%	100.000.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
						Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	99,29	%	100.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	87,03	%	385.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	83,84	%	1.155.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.871.840.000	
						Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	85	%	2.695.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi
						Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	92	%	675.000.000	Bidang Mutasi dan Promosi
						Persentase pemetaan kompetensi ASN	100	%	620.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
						Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	10	%	531.840.000	Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
						Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	100	%	790.000.000	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase peningkatan kinerja ASN	85	%	150.000.000	Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
						Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	70	%	410.000.000	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				26.892.349.000	
						Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis	95,5	%	2.100.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	95,5	%	3.200.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
						Persentase tingkat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri	95,5	%	20.000.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri
						Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraa	3,5	Angka	532.104.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						n dan Pasca Pelatihan)				
						Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	100	%	307.896.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
						Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi	50	%	752.349.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
					PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				3.379.000.000	
						Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah	100	%	950.000.000	Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi
						Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target	100	%	800.000.000	Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi
						Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target	100	%	949.000.000	Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
						Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan	100	%	680.000.000	Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				4.732.269.000	
						Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan penghubung	100	%	4.732.269.000	Badan Penghubung
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				4.568.089.000	
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	%	1.278.120.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	100	%	982.440.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	100	%	1.246.920.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus	100	%	864.840.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
						Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	96,23	%	195.769.000	INSPEKTORAT
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.924.677.000	
						Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	100	%	127.180.000	INSPEKTORAT
						Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3	35,71	%	1.572.219.000	INSPEKTORAT
						Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas	42,85	%	110.758.000	INSPEKTORAT

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80	61,9	%	114.520.000	INSPEKTORAT
				Indeks Demokrasi Indonesia			86,46 - 89,50	Angka	651.461.658.000	
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.432.690.000	
						Persentase Pengendalian Tibumtranmas	80,71	%	1.572.690.000	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
						Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	85,71	%	2.250.000.000	Bidang Penegakan Hukum Daerah
						Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas berkategori baik	8,57	%	610.000.000	Bidang Pelindungan Masyarakat
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				360.000.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persantase Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	29	%	360.000.000	Bidang Penanganan Kebakaran
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				336.517.695.000	
						Nilai survei kepuasan layanan persidangan	75	Angka	102.018.607.000	Bagian Persidangan
						Nilai survei kepuasan layanan kehumasan	75	Angka	234.499.088.000	Bagian Hubungan Masyarakat
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.608.336.000	
						Indeks Aktualisasi Pancasila	76,31	Angka	2.608.336.000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA				61.299.273.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					BUDAYA POLITIK					
						Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	88,11	Angka	3.228.955.000	Bidang Politik Dalam Negeri
						Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi	80,47	Angka	58.070.318.000	Bidang Politik Dalam Negeri
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				36.626.664.000	
						Indeks Kinerja Ormas	78,26	Angka	36.626.664.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				2.373.400.000	
						Indeks Toleransi	75,4	Angka	1.203.966.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Indeks ketahanan Ekonomi	2,89	Angka	1.169.434.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				207.243.600.000	
						Indeks Kewaspadaan Nasional	74	Angka	207.243.600.000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
				Otonomi Fiskal Daerah			65,72	%	6.891.636.940.000	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				6.857.812.348.000	
						Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	100	%	1.000.000.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
						Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu	100	%	6.518.200.000	Bidang Anggaran
						Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100	%	3.500.000.000	Bidang Akuntansi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100	%	6.846.312.348.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	100	%	481.800.000	Bidang Anggaran
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.815.905.000	
						Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	50,5	%	593.261.000	Bidang Aset Daerah
						Tingkat Administrasi BMD yang Andal	70,5	%	584.864.000	Bidang Aset Daerah
						Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	100	%	780.000.000	Bidang Aset Daerah
						Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	9	%	541.875.000	Bidang Aset Daerah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	100	%	315.905.000	Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				31.008.687.000	
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen	100	%	291.540.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	100	%	238.700.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	100	%	209.340.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	100	%	340.565.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	100	%	357.837.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	100	%	409.659.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	100	%	325.920.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	100	%	399.033.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	100	%	347.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	100	%	485.745.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	100	%	237.610.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	100	%	205.477.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	100	%	267.115.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	100	%	232.435.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	100	%	325.170.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	100	%	301.091.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	100	%	251.718.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	100	%	343.481.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	100	%	395.160.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	100	%	406.635.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	100	%	215.970.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	100	%	409.412.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	100	%	383.013.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	100	%	327.900.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	100	%	271.915.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	100	%	257.625.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	100	%	251.100.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	100	%	267.850.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	100	%	364.300.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	100	%	296.425.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	100	%	279.650.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	100	%	294.850.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	100	%	369.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	100	%	312.900.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	100	%	157.690.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	100	%	324.300.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	100	%	416.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	100	%	1.370.700.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	100	%	2.714.000.000	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	100	%	718.095.000	Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
						Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	100	%	600.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi
						Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	100	%	11.248.986.000	Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	100	%	32.200.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	100	%	215.750.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	100	%	109.650.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	100	%	85.350.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	100	%	81.400.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	100	%	73.100.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	100	%	63.000.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	100	%	69.400.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	100	%	85.400.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	100	%	176.520.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	100	%	61.750.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	100	%	58.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	100	%	78.156.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	100	%	59.650.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	100	%	44.858.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	100	%	68.700.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	100	%	165.070.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	100	%	89.870.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	100	%	68.420.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	100	%	80.600.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	100	%	69.020.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	100	%	59.330.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	100	%	69.000.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	100	%	28.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	100	%	46.800.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	100	%	75.500.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	100	%	29.550.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	100	%	37.363.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	100	%	56.250.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	100	%	51.140.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	100	%	26.675.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	100	%	69.925.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	100	%	99.878.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	100	%	92.250.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	100	%	54.000.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	100	%	56.711.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	100	%	96.789.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan									1.162.360.827.000	
			Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan						1.162.360.827.000	
				Pertumbuhan Ekonomi			5,00 - 6,00	%	999.071.013.000	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				349.789.477.000	
						Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan	100	%	2.000.000.000	BIDANG BINA MARGA
						Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	100	%	5.880.000.000	BIDANG BINA TEKNIK

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Panjang Jalan yang Dileger	59,69	%	380.000.000	BIDANG BINA TEKNIK
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan	99,81	%	5.241.888.000	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
						Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi	19,67	%	2.782.757.000	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	94,62	%	3.625.753.000	BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	64,59	%	19.188.976.000	BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai	92,03	%	7.795.376.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Pengelolaan Jalan Wilayah Pati				
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	69,81	%	15.892.729.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	91,36	%	5.710.253.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	50,21	%	26.493.201.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	92,25	%	5.384.555.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	65,54	%	26.315.888.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	94,17	%	4.367.320.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	73,4	%	16.035.366.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	95,37	%	6.324.866.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	75,41	%	13.066.759.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	94,9	%	6.608.209.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	59,5	%	24.856.265.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	94,11	%	3.934.170.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	59,12	%	15.245.050.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
						Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	1189,63	Km	132.660.096.000	BIDANG BINA MARGA
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				5.975.000.000	
						Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	6,3	%	2.825.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam	90	%	350.000.000	Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi
						Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana	100	%	300.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
						Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana	100	%	2.500.000.000	Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				13.614.995.000	
						Rata-rata Ketersediaan Pangan	1,21	Angka	70.860.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
						Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)	0,47	Angka	5.025.529.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
						Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	62,5	%	6.654.106.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87,3	kg/kapita/tahun	1.864.500.000	Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				4.975.924.000	
						Persentase Daerah Rawan Pangan	14,6	%	4.975.924.000	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				2.592.206.000	
						Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar	40	%	1.657.085.000	Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
						Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	90,1	%	935.121.000	Bidang Keamanan Pangan
					PROGRAM PENATAAN DESA				-	
						Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	100	%	-	Bidang Penataan dan Regulasi Desa
					PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				155.000.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	57,05	%	155.000.000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				1.033.540.000	
						Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa	100	%	385.000.000	Bidang Penataan dan Regulasi Desa
						Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa	100	%	648.540.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				3.870.000.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan nya	100	%	3.000.000.000	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
						Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa	100	%	705.000.000	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
						Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	45,96	%	165.000.000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa
					PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				136.438.696.000	
						Rasio Trayek Angkutan Jalan	46,74	Angka	783.757.000	Bidang Angkutan Jalan
						Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	69,85	%	696.815.000	Bidang Angkutan Jalan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	70,14	%	5.457.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
						Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	52,95	%	101.800.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	22,04	%	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	3,99	%	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	45,11	%	80.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	8,04	%	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	43,53	%	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	28,16	%	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
						Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	4,42	%	118.885.631.000	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
						Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	6,94	%	5.564.416.000	Bidang Lalu Lintas Jalan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						pada jalan provinsi				
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	3	%	580.800.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	3	%	474.210.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	3	%	645.080.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Perhubungan Wilayah III Kelas A				
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	3	%	470.344.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	3	%	559.310.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan	3	%	506.037.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A				
						Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	98,03	%	192.113.000	Bidang Lalu Lintas Jalan
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	57,12	%	181.700.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	86,2	%	94.520.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	81,84	%	358.208.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	92,83	%	166.530.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	87,09	%	166.570.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	88,66	%	198.855.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				716.983.000	
						Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	0,472	Angka	716.983.000	Bidang Pelayaran

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				1.600.000.000	
						Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	28	%	1.600.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				938.680.000	
						Persentase Koperasi Berkualitas	27,1	%	938.680.000	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				195.000.000	
						Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	91	%	195.000.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				577.000.000	
						Persentase Koperasi Produktif	53,3	%	577.000.000	Bidang Bina Usaha Koperasi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				3.278.390.000	
						Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	30	%	3.278.390.000	Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				667.200.000	
						Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan	10	%	667.200.000	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				1.514.954.000	
						Persentase kepeminatan yang terealisasi	62	%	1.514.954.000	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				790.000.000	
						Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	91,5	%	480.000.000	Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase standar pelayanan yang ditetapkan	100	%	310.000.000	Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				350.000.000	
						Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	25	%	350.000.000	Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				210.000.000	
						Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	10	%	210.000.000	Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				765.378.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	50,17	%	491.310.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
						Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	25	%	274.068.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				9.248.576.000	
						Produksi Perikanan Tangkap	354029	Ton	4.585.278.000	Bidang Perikanan Tangkap
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	100	%	119.301.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	100	%	633.497.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	100	%	88.778.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	100	%	92.096.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	100	%	127.772.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	100	%	91.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	100	%	577.223.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	91	%	1.116.347.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	100	%	1.381.613.000	Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	100	%	230.988.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	100	%	204.283.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				12.612.050.000	
						Produksi Perikanan Budidaya	600000	Ton	5.812.544.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
						Persentase penanganan	100	%	268.890.000	Balai Kesehatan Ikan dan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						kasus hama penyakit ikan				Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
						Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	5	%	6.530.616.000	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.663.227.000	
						Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	70	%	952.991.000	Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	50	%	56.960.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
						Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	50	%	103.390.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di WIlayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	61	%	244.953.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
						Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	17	%	64.710.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	17	%	58.212.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
						Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	72	%	182.011.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1.000.072.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Angka Konsumsi Ikan	17,71	kg/kapita/tahun	637.000.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4	%	363.072.000	Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				6.525.625.000	
						Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	2	%	6.525.625.000	Bidang Destinasi Pariwisata
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				8.652.050.000	
						Jumlah Kunjungan Wisatawan	75348282	Orang	8.652.050.000	Bidang Pemasaran Pariwisata
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				850.000.000	
						Jumlah Kabupaten/Kota yang DItetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	1	Kabupaten/Kota	850.000.000	Bidang Ekonomi Kreatif

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				1.050.000.000	
						Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi	20	%	600.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
						Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi	4,3	%	450.000.000	Bidang Ekonomi Kreatif
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				159.281.528.000	
						Jumlah Populasi ternak	6135083	(ST)/ (AU)	29.692.000.000	Bidang Peternakan
						Persentase peredaran obat Hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	81	%	860.000.000	Bidang Veteriner
						Persentase produksi dan distribusi semen beku	1	%	4.436.071.000	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	1	%	6.878.612.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia penghasil susu	1	%	960.818.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
						Persentase peningkatan produksi ternak non ruminansia penghasil telur	1	%	2.213.100.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
						Produksi Padi	9380811	Ton	22.101.200.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Produksi Jagung	3301024	Ton	3.208.005.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Produksi Kedelai	52790	Ton	8.700.000.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Produksi Bawang Merah	617015	Ton	1.786.616.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Produksi Cabai	456621	Ton	4.244.735.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Produksi Kopi	26875	Ton	5.550.000.000	Bidang Perkebunan
						Produksi Tebu	3674236	Ton	45.860.427.000	Bidang Perkebunan
						Produksi Kelapa	166955	Ton	4.630.000.000	Bidang Perkebunan
						Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi	3	%	377.562.000	Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
						Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan	100	%	228.993.000	Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	100	%	3.828.717.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	100	%	4.657.200.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
						Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman pangan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	100	%	2.947.988.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
						Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan	100	%	1.156.787.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
						Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman hortikultura di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	100	%	1.066.012.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman perkebunan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	100	%	950.000.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
						Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat	392201	Ton	1.612.475.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Persentase layanan sertifikasi benih tanaman perkebunan	100	%	486.719.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
						Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura	100	%	847.491.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				178.234.000.000	
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana sarana pertanian	1	%	175.834.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana peternakan	5	%	2.400.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				4.637.563.000	
						Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	1	%	1.230.000.000	Bidang Veteriner
						Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV	30	%	910.000.000	Bidang Veteriner
						Persentase Layanan Veteriner	100	%	2.497.563.000	Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				5.850.000.000	
						Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	20	%	1.500.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
						Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan	10	%	3.750.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan	5	%	210.360.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
						Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan	5	%	44.820.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
						Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura	10	%	300.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
						Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura	5	%	44.820.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				52.959.252.000	
						Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi	0,2	%	30.032.978.000	Bidang Kelembagaan
						Persentase SDM pertanian yang dilatih	100	%	4.972.000.000	Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
						Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan peternak	1,25	%	17.954.274.000	Bidang Kelembagaan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				165.000.000	
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	21,96	%	165.000.000	Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				300.000.000	
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 1	0,3	%	25.000.000	CDK WILAYAH I
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 2	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH II
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 3	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH III
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 4	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH IV

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 5	0,3	%	15.000.000	CDK WILAYAH V
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 6	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH VI
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 8	0,2	%	20.000.000	CDK WILAYAH VIII
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 9	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH IX
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 10	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH X
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 11	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH XI
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 7	0,3	%	15.000.000	CDK WILAYAH VII
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	2,5	%	120.000.000	Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
					PROGRAM PENGELOLAAN				1.077.356.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					MINERAL DAN BATUBARA					
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	72,9	%	418.787.000	Bidang Mineral dan Batubara
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	72,9	%	85.288.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	72,9	%	43.366.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	72,9	%	40.018.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	72,9	%	39.878.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	72,9	%	54.450.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	72,9	%	56.484.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	72,9	%	58.019.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
						Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	100	%	95.000.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	72,9	%	76.135.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	72,9	%	74.163.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	72,9	%	35.768.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
					PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				2.135.551.000	
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	972,99	SBM	500.631.000	Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	179,64	SBM	285.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	26,08	SBM	47.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	144,05	SBM	261.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	57,95	SBM	131.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun	45,11	SBM	120.760.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						di Wilayah Slamet Utara				
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	98,93	SBM	140.760.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	165,42	SBM	182.760.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak	127,91	SBM	232.280.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	28,97	SBM	91.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	98,93	SBM	140.760.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
					PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				2.131.994.000	
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	43,02	%	600.000.000	Bidang Ketenagalistrikan
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	43,11	%	232.626.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria	43,13	%	89.682.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara	43,11	%	147.578.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan	43,13	%	147.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara	43,07	%	147.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	43,1	%	141.280.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	43,11	%	158.376.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	42,31	%	184.307.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	43,03	%	148.168.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	43,07	%	135.977.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				70.000.000	
						Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	9	%	70.000.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				200.000.000	
						Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	3	%	200.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				2.150.000.000	
						Ekspor Barang dan Jasa	11,12	% PDRB	2.150.000.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				999.054.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	10	%	173.342.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	2	%	400.712.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
						Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	1,05	%	425.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				6.791.546.000	
						Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	10	%	6.791.546.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
					PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				9.876.146.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	0	%	140.000.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	6,98	%	110.000.000	Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
						Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	0	%	2.428.000.000	Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri
						Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	10	%	1.830.000.000	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
						Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	0	%	5.368.146.000	Bidang Pemberdayaan Industri
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				502.000.000	
						Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan	0	%	502.000.000	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						dilakukan pengawasan				Pengendalian Industri
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				60.000.000	
						Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	10	%	60.000.000	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
				Tingkat Inflasi			1,50 - 3,50	%	33.550.000.000	
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				33.550.000.000	
						Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau	0,52	%	33.550.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			75,73	Angka	129.739.814.000	
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				48.621.302.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	61,66	%	100.000.000	BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
						Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	70,44	%	915.000.000	BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
						Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	52,38	%	13.750.000.000	BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	65,71	Angka	4.872.963.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	35,08	%	747.931.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
						Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	53	%	1.229.106.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	100	%	979.975.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	68,4	Angka	7.570.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	56,98	%	900.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
						Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	50,14	%	530.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	100	%	1.480.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	73,45	Angka	6.762.463.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	76,5	%	466.527.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	100	%	1.213.575.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	67,36	Angka	3.908.392.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	67,35	%	491.608.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	100	%	978.762.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi	2688058,55	m3	250.000.000	BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air	100	%	1.475.000.000	BIDANG BINA TEKNIK
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				23.013.309.000	
						Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	100	%	14.954.847.000	BIDANG CIPTA KARYA
						Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum	31,02	%	7.808.462.000	BIDANG CIPTA KARYA

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Jaringan Perpipaan				
						Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	42,6	%	250.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
					PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				11.770.900.000	
						Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun	100	%	11.770.900.000	BIDANG CIPTA KARYA
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2.793.451.000	
						Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan	100	%	2.793.451.000	BIDANG CIPTA KARYA

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						pembinaan dan pemberdayaan				
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				13.470.116.000	
						Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	11,17	%	13.470.116.000	BIDANG CIPTA KARYA
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				2.146.224.000	
						Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	100	%	146.224.000	BIDANG CIPTA KARYA
						Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi	51,45	%	2.000.000.000	BALAI JASA KONSTRUKSI
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				997.688.000	
						Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	65	%	-	BIDANG PENATAAN RUANG
						Persentase Rekomendasi	100	%	147.389.000	BIDANG PENATAAN RUANG

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Pemanfaatan Ruang				
						Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program	58,86	%	152.611.000	BIDANG PENATAAN RUANG
						Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	63	%	107.143.000	BIDANG PENATAAN RUANG
						Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	41	%	192.857.000	BIDANG PENATAAN RUANG
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Jratun Seluna	100	%	20.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo	100	%	21.238.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Bogowonto	100	%	36.425.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
						Persentase Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	39,87	%	300.000.000	BIDANG PENATAAN RUANG

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal	100	%	20.025.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				12.845.000.000	
						Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	16,9	%	7.405.000.000	Bidang Perumahan
						Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	0,47	%	5.440.000.000	Bidang Perumahan
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.266.323.000	
						Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	14,9	%	2.011.523.000	Bidang Kawasan Permukiman
						Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	%	1.254.800.000	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				2.663.000.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan	7,69	%	2.663.000.000	Bidang Kawasan Permukiman
					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				370.000.000	
						Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	6,84	%	370.000.000	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
					PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				270.000.000	
						Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi	100	%	270.000.000	Bidang Pertanahan
					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				500.000.000	
						Persentase Penyelesaian	100	%	500.000.000	Bidang Pertanahan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Permasalahan Pertanahan				
					PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				430.000.000	
						Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	100	%	430.000.000	Bidang Pertanahan
					PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP				200.000.000	
						Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan	100	%	200.000.000	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				965.614.000	
						Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	4,76	%	150.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
										Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
						Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	3,26	%	215.614.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
						Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup	100	%	600.000.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				158.986.000	
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	0,4	%	64.386.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
						Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden	3	%	94.600.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				25.000.000	
						Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	80	%	25.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				400.000.000	
						Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan	100	%	200.000.000	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
						Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	50	%	200.000.000	Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
										Perlindungan Hutan
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				200.000.000	
						Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	100	%	200.000.000	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				30.000.000	
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	%	30.000.000	Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				245.000.000	
						Persentase Timbulan sampah yang terkelola	63	%	245.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				616.533.000	
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	0,16	%	184.824.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	0,19	%	230.977.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	0,07	%	200.732.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				2.511.375.000	
						Persentase lahan kritis tertangani	0,78	%	60.000.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	100	%	50.000.000	Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I	0,01	%	200.000.000	CDK WILAYAH I
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 2	0,02	%	357.500.000	CDK WILAYAH II
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 3	0,01	%	173.500.000	CDK WILAYAH III
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 4	0,02	%	337.484.000	CDK WILAYAH IV
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 5	0,08	%	377.396.000	CDK WILAYAH V
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 6	0,01	%	269.720.000	CDK WILAYAH VI
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 8	0,01	%	201.000.000	CDK WILAYAH VIII
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 9	0,01	%	58.000.000	CDK WILAYAH IX
						Persentase lahan kritis	0,01	%	63.800.000	CDK WILAYAH X

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						tertangani CDK 10				
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 11	0,01	%	85.600.000	CDK WILAYAH XI
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 7	0,01	%	149.000.000	CDK WILAYAH VII
						Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	100	%	73.375.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 2	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH II
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 3	100	%	15.000.000	CDK WILAYAH III
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 4	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH IV

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 5	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH V
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 6	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH VI
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 9	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH IX
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 10	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH X
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 11	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH XI

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 7	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH VII
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				191.362.000	
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	5	%	30.000.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	100	%	50.000.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
						Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan	73	Angka	90.000.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 1	5	%	-	CDK WILAYAH I

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden	100	%	21.362.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
					PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				115.000.000	
						Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	10	%	115.000.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
					PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				923.631.000	
						Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah	27,58	%	358.631.000	Bidang Geologi dan Air Tanah
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	2,98	%	31.785.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	3,3	%	17.001.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	1,58	%	41.127.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
						Persentase pengambilan air	1,98	%	14.408.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						tanah Wilayah Serayu Selatan				
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	3,95	%	39.991.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	2,27	%	15.127.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	2,6	%	19.031.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
						Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	100	%	300.000.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	6,99	%	52.574.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	2,65	%	18.746.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	1,49	%	15.210.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter									3.940.152.344.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
			Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter						3.940.152.344.000	
				Indeks Modal Manusia			0,62	Angka	3.926.360.180.000	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				3.028.289.802.000	
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	76,67	%	1.822.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	65,71	%	12.258.152.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	65,21	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	83,1	%	43.336.908.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
						APK SMA	30,32	%	37.750.000.000	Bidang Pembinaan SMA
						Angka Putus Sekolah SMA	0,011	Angka	15.200.000.000	Bidang Pembinaan SMA
						Persentase Prestasi Lomba SMA Tingkat Nasional	35,89	%	3.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA
						Nilai Kualitas Pembelajaran SMA	64,45	Angka	728.206.810.000	Bidang Pembinaan SMA
						APK SMK	53,75	%	13.865.731.000	Bidang Pembinaan SMK
						Angka Putus Sekolah SMK	0,026	Angka	27.097.200.000	Bidang Pembinaan SMK
						Persentase Prestasi Lomba SMK Tingkat Nasional	57	%	3.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	73,3	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	83,8	%	62.180.786.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	77,9	%	12.000.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	70,89	%	4.793.848.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	74,41	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Nilai Kualitas Pembelajaran SMK	60,86	Angka	1.394.715.710.000	Bidang Pembinaan SMK
						Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja	67,77	Angka	57.100.000.000	Bidang Pembinaan SMK

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	70,5	%	44.339.967.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	76,39	%	8.000.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	50,5	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	70,56	%	36.484.049.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	73,33	%	5.466.900.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	60,1	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	79	%	39.167.242.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	73,33	%	1.822.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	89,9	%	430.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di	68,2	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI				
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	83,05	%	46.333.314.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	68,49	%	3.644.600.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						APK SLB	91,74	%	7.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus
						Angka Putus Sekolah SLB	0,043	Angka	2.530.000.000	Bidang Pembinaan Diksus
						Persentase Prestasi Lomba SLB Tingkat Nasional	54,05	%	1.250.000.000	Bidang Pembinaan Diksus
						Nilai Kualitas Pembelajaran SLB	65,61	Angka	85.631.830.000	Bidang Pembinaan Diksus
						Persentase Guru SMA Bersertifikat Kompetensi	76,84	%	1.036.188.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
						Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	62,13	%	318.661.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Guru SLB Bersertifikat Kompetensi	57,72	%	223.666.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
						Persentase Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian	1,74	%	2.357.673.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
						Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan	25	%	1.600.000.000	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	70,34	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	86,2	%	29.285.248.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas	68,28	%	150.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Wilayah Pendidikan VIII				
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	81,8	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	76,3	%	32.553.230.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	79,3	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	88,15	%	67.446.722.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	69,17	%	7.289.200.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	67,59	%	4.445.278.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	79,13	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	77,52	%	74.210.994.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas	71,15	%	12.644.600.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Wilayah Pendidikan X				
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	65,78	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	79,25	%	42.629.503.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	43,33	%	1.822.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	83,72	%	2.465.962.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	80,41	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	80,15	%	47.110.630.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	70	%	1.822.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				330.000.000	
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Wilayah Pendidikan V				
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	75	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	75	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	75	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	55	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Wilayah Pendidikan XII				
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				400.000.000	
						Indeks Distribusi Guru SMA dan SMK	0,43	Angka	400.000.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
					PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				300.000.000	
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	94	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	74,2	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	70,36	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	2,57	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	75,2	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	75,2	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	35	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	35	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	12,4	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	17,4	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	68,7	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	70,8	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	25	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	60	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	25	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	60	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	25	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	60	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	100	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	100	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	50	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	50	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	100	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	85	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				547.251.577.000	
						Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	100	%	70.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%	20.900.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
						Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%	315.394.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
						Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	28,57	%	15.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
						Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang yang melaksanakan skrining Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular	71,42	%	100.048.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						(PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%				
						Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	54,28	%	200.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Persentase Kabupaten Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	28,57	%	49.952.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
						Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat	100	%	30.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Wilayah Magelang				
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit mencapai Case Fatality Rate Direct Obstetric (eklampsi dan perdarahan) < 1%	68,57	%	100.000.000	Bidang Kesehatan Lanjutan
						Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	95	%	100.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	91	%	50.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Insidensi Human Immunodeficiency Virus (HIV)	8	%	63.570.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria	35	Kabupaten/Kota	73.520.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Neglected Tropical Diseases (Pengendalian Kasus Filariasis dan Kusta)	20	Kabupaten/Kota	51.150.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Angka kematian Dengue	0,5	%	37.130.000	Bidang Penanggulangan Penyakit

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Insidensi Hepatitis B	1,1	%	30.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang sesuai standar	100	%	1.380.474.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar	41,27	%	3.369.000.000	Bidang Kesehatan Lanjutan
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	28,57	%	20.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
						Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan	57,14	%	135.830.000	Bidang Kesehatan Lanjutan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						terakreditasi paripurna				
						Presentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	28,57	%	15.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
						Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	85	%	45.083.482.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	54	%	537.994.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
						Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan skrining Kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas	57,14	%	60.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						dengan cakupan minimal 50%				
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	28,57	%	45.868.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
						Persentase mutu layanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sesuai standar	72	%	3.500.000.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
						Persentase Kabupatan/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	100	%	27.680.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	63,05	%	225.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan
						Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten sesuai standar	60	%	1.513.856.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	71,42	%	20.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
						Persentase penurunan kasus kematian ibu	2	%	384.950.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Angka Kematian Bayi (AKB)	7,5	1.000/KH	105.050.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan	28,57	%	14.570.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Masyarakat Wilayah Ambarawa				
						Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	28,57	%	65.076.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	28,57	%	55.510.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
						Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa dengan Posyandu yang melakukan	28,57	%	15.360.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran				
						Persentase mutu layanan Balkesmas Wilayah Ambarawa sesuai standar	100	%	1.768.813.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
						Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	100	%	27.300.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
						Persentase lanjut usia yang mandiri	77	%	32.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Prevalensi wasting balita	6,7	%	427.726.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Persentase Hipertensi dalam pengendalian	35	%	344.755.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase Diabetes Melitus terkendali (DM Terkendali)	35	%	35.315.000	Bidang Penanggulangan Penyakit

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	14,4	%	22.688.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	25,71	%	351.635.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok	100	%	150.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana	50	%	330.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	74,28	%	372.662.615.000	Bidang Kesehatan Lanjutan
						Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	25	%	34.195.000	Bidang Penanggulangan Penyakit

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	60	%	1.500.000.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam
						Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/alat penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	60	%	9.300.215.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam
						Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar	100	%	6.000.000.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam
						Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata	100	%	2.648.584.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Seopardjo Rustam				
						Persentase kabupaten/kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	20	%	25.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
						Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	28,57	%	60.210.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
						Persentase kabupaten/kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	28,57	%	46.790.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan kejadian luar biasa/wabah serta penanganan bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	100	%	23.674.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
						Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati sesuai standar	100	%	1.495.142.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati dengan posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	28,57	%	20.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
						Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	8,57	%	170.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas pelayanan kesehatan Primer dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar	51,19	%	30.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer terakreditasi paripurna	85,71	%	60.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan	50	%	559.990.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu	37,14	%	21.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi diBalai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan	25	%	102.166.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
						Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	40	%	311.300.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.928.215.000	
						Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang teregestrasi dan berkualitas	99	%	700.000.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
						Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	2,85	%	578.215.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	30	%	650.000.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				75.000.000	
						Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	91	%	75.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.160.222.000	
						Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. ADHYATMA, MPH	5,24	%	55.500.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo	10	%	55.500.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
						Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat	34,28	%	449.222.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Persentase kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dari Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	100	%	600.000.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				10.286.000.000	
						Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	8,88	%	10.286.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial
					PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				200.000.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	%	200.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				74.090.123.000	
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	100	%	4.623.520.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	100	%	5.725.910.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
						Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti	100	%	5.852.906.000	Bidang Rehabilitasi Sosial
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti	100	%	3.157.773.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Pelayanan Sosial Kasih Mesra				
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	100	%	3.963.440.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	100	%	2.240.215.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	100	%	2.593.013.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan	100	%	2.336.180.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Sosial Adi Yuswo				
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	100	%	2.465.760.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	100	%	3.165.280.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	100	%	3.441.200.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	100	%	4.350.654.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	100	%	3.795.580.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	100	%	4.577.556.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	100	%	1.585.750.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	100	%	3.797.341.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	100	%	4.563.239.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	100	%	2.676.195.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	100	%	3.817.310.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosia di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	100	%	3.312.095.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	100	%	2.049.206.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				110.594.572.000	
						Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak	100	%	350.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial
						Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial	100	%	84.044.572.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	0,27	%	26.200.000.000	Bidang Penanganan Fakir Miskin

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA				4.397.580.000	
						Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial	100	%	4.397.580.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				200.000.000	
						Persentase Taman makam pahlawan terkelola	100	%	200.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial
					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				2.698.800.000	
						Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi	12	%	121.730.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
						Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	80	%	2.577.070.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				770.432.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	85	%	634.392.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
						Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100	%	136.040.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				328.408.000	
						Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	20	%	312.808.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
						Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	24	%	15.600.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				373.720.000	
						Indeks Pemenuhan Hak Anak	61,5	Angka	373.720.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				296.720.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79	Angka	160.680.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
						Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	100	%	136.040.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				160.000.000	
						Persentase kabupaten/kota yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	75	%	160.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				389.667.000	
						Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	69,48	%	389.667.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				177.353.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	34	%	177.353.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				11.965.000.000	
						Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	8,6	%	9.345.000.000	Bidang Pelayanan Kepemudaan
						Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	80,6	%	720.000.000	Bidang Pelayanan Kepemudaan
						Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan	20,85	%	1.900.000.000	Bidang Pengembangan Kepemudaan
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				100.444.700.000	
						Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	10	%	58.930.000.000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	79	%	15.900.000.000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
						Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	79	%	14.050.000.000	Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
						Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	0,34	%	11.564.700.000	Bidang Pembudayaan Olahraga
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				22.675.000.000	
						Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional	26,1	%	4.225.000.000	Bidang Pelindungan Kebudayaan
						Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna	27,11	%	17.300.000.000	Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase kesenian/tradisi budaya yang dilestarikan	72	%	1.150.000.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				1.750.000.000	
						Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	1,12	%	1.750.000.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				150.000.000	
						Persentase literasi kesejarahan dan tradisi	53,55	%	150.000.000	Bidang Pelindungan Kebudayaan
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				1.205.000.000	
						Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional	13,6	%	625.000.000	Bidang Pelindungan Kebudayaan
						Persentase Cagar Budaya berdayaguna	16,12	%	580.000.000	Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
					PROGRAM PENGELOLAAN				1.900.000.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PERMUSEUMAN					
						Indeks Kepuasan Masyarakat	90,1	%	1.900.000.000	Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.469.708.000	
						Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	45,27	%	680.912.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85,2	Angka	788.796.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan
					PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				102.581.000	
						Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	9,43	%	102.581.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan
				Tingkat Pengangguran Terbuka			4,71 - 4,27	%	13.792.164.000	
					PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				121.635.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	85,71	%	121.635.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				7.572.217.000	
						Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	9,28	%	331.323.000	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
						Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	14,29	%	93.677.000	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	83,68	%	1.550.000.000	Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai	23,38	%	2.263.303.000	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata				
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	10	%	2.065.542.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
						Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	73	%	893.372.000	Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
						Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	68	%	375.000.000	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1.510.000.000	
						Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	44,05	%	1.007.325.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Persentase penyerapan tenaga kerja	68,5	%	450.915.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						baru di sektor informal				
						Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	21,75	%	14.290.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	67,71	%	37.470.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				950.000.000	
						Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	51,03	%	141.605.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
						Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	49,8	%	295.084.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	43,26	%	297.039.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,75	%	216.272.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
					PROGRAM PENGAWASAN				1.748.312.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					KETENAGAKERJAAN					
						Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan	80,8	%	1.300.000.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
						Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	27,06	%	448.312.000	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
					PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				855.000.000	
						Persentase SDM UMKM yang berkualitas	91	%	151.578.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
						Persentase Wirausaha yang berkualitas	85	%	178.422.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
						Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	17,15	%	525.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				885.000.000	
						Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	86	%	885.000.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)
					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				150.000.000	
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	1,2	%	60.000.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
						Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	2,06	%	90.000.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									24.156.414.261.000	

Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 telah ditetapkan Program Strategis Nasional (ProSN) yang terdiri atas:

Tabel 4.11
Penjabaran Program Strategis Nasional (ProSN)

No	Program Strategis Nasional	No	Proyek/Kegiatan
1	Pengentasan Kemiskinan	1.	Penanggulangan Kemiskinan
		2.	Penghapusan Kemiskinan Ekestrem
		3.	Sekolah Rakyat
		4.	Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1.	Swasembada Pangan (Irigasi untuk mendukung Swasembada Pangan)
		2.	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3.	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (sawah/lumbung pangan/*food estate*)
3.	Kesehatan untuk semua	1.	Stunting
		2.	Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3.	Jaminan Kesehatan Nasional
		4.	Penuntasan TBC
		5.	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1.	Pembangunan dan dan Revitalisasi PAUD
		2	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3.	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitilisasi Pembelajaran
		4.	Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1.	Pengendalian Inflasi
		2.	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3.	Optimalisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah
		4.	Industrialisasi dan hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)
		5.	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Sumber: Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Pada tahun 2026, pelaksanaan ProSN tersebut akan didukung oleh Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk sub–sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.4 Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka percepatan pencapaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2026. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sejalan dengan tujuan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan. Salah satu program inovasi adalah **Program Spesialis Keliling (Layanan Spesialis Keliling) "SPELING"**.

Program "SPELING" bertujuan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan spesialis kepada masyarakat. Program ini dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Rumah Sakit – Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah. Program ini menyediakan dokter spesialis dari berbagai bidang (penyakit dalam, paru, kandungan, anak, jiwa) yang mendatangi desa-desa dan wilayah sulit dijangkau di Jawa Tengah. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 Program Speling telah melayani sebanyak 37 ribu warga Jawa Tengah.

Sumber: Humas Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 4.1
Kegiatan Dokter Spesialis Keliling

Manfaat "SPELING" antara lain:

1. Mempermudah akses
   Speling memudahkan masyarakat, terutama di daerah terpencil untuk memudahkan dalam mendapatkan layanan kesehatan spesialis tanpa perlu melakukan perjalanan jauh ke kota.
2. Menyediakan berbagai layanan
   Speling dalam pelaksanaannya menyediakan beragam kebutuhan kesehatan, mulai dari penyakit dalam, paru, kandungan, anak hingga kesehatan jiwa.
3. Merangkul partisipasi Rumah Sakit
   Pelaksanaan Speling melibatkan beragam dokter spesialis dari berbagai rumah sakit untuk bekerja sama dalam program ini.

Informasi mengenai jadwal Speling dapat diperoleh melalui:

1. Pengumuman melalui media sosial Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengumanan melalui web/situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Melalui kegiatan Speling diharapkan identifikasi dan diagnosa terhadap penyakit yang terjadi masyarakat dapat dengan mudah dilakukan sehingga upaya pengobatan dapat segera dilakukan.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota merupakan pedoman bagi kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026. Arah kebijakan pembangunan ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 dengan memperhatikan karakteristik masing-masing kabupaten/kota. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga memperhatikan capaian indikator makro yang mendukung capaian indikator makro provinsi.

5.1. Kondisi Kabupaten/Kota

Kondisi kabupaten/kota digambarkan dalam empat indikator makro yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang akan mendukung capaian indikator pada tingkat provinsi. Persandingan antar indikator makro di setiap kabupaten/kota dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas dalam melakukan dalam perencanaan pembangunan**.** Gambaran secara umum untuk keempat indikator makro di setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

5.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM diukur berdasarkan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikator ini menunjukan pengembangan terutama dalam pembangunan sumber daya manusia yang merupakan hakikat pembangunan. Capaian IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
1.	Kabupaten Cilacap	72,04	72,55
2.	Kabupaten Banyumas	73,96	74,52
3.	Kabupaten Purbalingga	70,51	70,97
4.	Kabupaten Banjarnegara	69,16	69,62
5.	Kabupaten Kebumen	71,88	72,48
6.	Kabupaten Purworejo	74,35	75,16
7.	Kabupaten Wonosobo	70,18	70,63
8.	Kabupaten Magelang	71,56	72,10
9.	Kabupaten Boyolali	75,41	75,96
10.	Kabupaten Klaten	77,59	78,16

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
11.	Kabupaten Sukoharjo	78,65	79,30
12.	Kabupaten Wonogiri	71,97	72,54
13.	Kabupaten Karanganyar	77,31	78,11
14.	Kabupaten Sragen	75,10	75,53
15.	Kabupaten Grobogan	71,49	72,02
16.	Kabupaten Blora	70,63	71,42
17.	Kabupaten Rembang	71,89	72,53
18.	Kabupaten Pati	73,59	74,10
19.	Kabupaten Kudus	76,71	77,21
20.	Kabupaten Jepara	73,85	74,32
21.	Kabupaten Demak	74,07	74,57
22.	Kabupaten Semarang	75,13	75,67
23.	Kabupaten Temanggung	71,33	71,86
24.	Kabupaten Kendal	73,86	74,34
25.	Kabupaten Batang	70,20	70,73
26.	Kabupaten Pekalongan	71,45	71,95
27.	Kabupaten Pemalang	68,08	68,65
28.	Kabupaten Tegal	71,12	71,70
29.	Kabupaten Brebes	69,71	70,18
30.	Kota Magelang	81,17	82,15
31.	Kota Surakarta	83,54	84,41
32.	Kota Salatiga	84,99	85,72
33.	Kota Semarang	84,43	85,24
34.	Kota Pekalongan	76,71	77,21
35.	Kota Tegal	77,06	77,50
Jawa Tengah		73,39	73,88
Nasional		74,39	75,02

Sumber : BPS, 2024

5.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan perkembangan perekonomian suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan persentase dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan suatu wilayah. Capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023 dan Tahun 2024 disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5. 2
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
1.	Kabupaten Cilacap	5.34	2.65
2.	Kabupaten Banyumas	5.40	5.29
3.	Kabupaten Purbalingga	4.51	4.55
4.	Kabupaten Banjarnegara	4.98	5.11
5.	Kabupaten Kebumen	5.66	5.30
6.	Kabupaten Purworejo	5.07	4.79
7.	Kabupaten Wonosobo	4.30	4.57
8.	Kabupaten Magelang	5.04	5.06
9.	Kabupaten Boyolali	5.63	4.64
10.	Kabupaten Klaten	5.70	5.11
11.	Kabupaten Sukoharjo	5.06	4.97
12.	Kabupaten Wonogiri	4.98	4.93
13.	Kabupaten Karanganyar	5.53	5.54
14.	Kabupaten Sragen	5.23	5.39
15.	Kabupaten Grobogan	4.98	5.41
16.	Kabupaten Blora	3.10	3.06
17.	Kabupaten Rembang	5.20	5.08
18.	Kabupaten Pati	5.02	5.13
19.	Kabupaten Kudus	2.19	2.78
20.	Kabupaten Jepara	5.17	4.22
21.	Kabupaten Demak	5.01	5.06
22.	Kabupaten Semarang	4.74	4.73
23.	Kabupaten Temanggung	5.00	5.04
24.	Kabupaten Kendal	5.56	5.42
25.	Kabupaten Batang	5.53	6.03
26.	Kabupaten Pekalongan	5.14	5.02
27.	Kabupaten Pemalang	4.14	5.11
28.	Kabupaten Tegal	4.93	5.07
29.	Kabupaten Brebes	3.74	5.02
30.	Kota Magelang	5.45	5.56

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
31.	Kota Surakarta	5.57	5.61
32.	Kota Salatiga	5.34	5.37
33.	Kota Semarang	5.79	5.62
34.	Kota Pekalongan	5.44	5.34
35.	Kota Tegal	5.01	5.22
Jawa Tengah		**4.98**	**4.95**
Nasional		5,05	5.03

Sumber: BPS. 2024

5.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dapat diketahui melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka pada umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada dan mampu menyerapnya. Capaian TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023 dan 2024 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 5. 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
1.	Kabupaten Cilacap	8,74	7,83
2.	Kabupaten Banyumas	6,35	6,18
3.	Kabupaten Purbalingga	5,61	4,96
4.	Kabupaten Banjarnegara	6,26	5,57
5.	Kabupaten Kebumen	5,11	5,07
6.	Kabupaten Purworejo	4,02	3,89
7.	Kabupaten Wonosobo	4,95	4,02
8.	Kabupaten Magelang	4,42	3,55
9.	Kabupaten Boyolali	4,05	3,16
10.	Kabupaten Klaten	4,2	3,97
11.	Kabupaten Sukoharjo	3,4	3,65
12.	Kabupaten Wonogiri	1,92	2,4
13.	Kabupaten Karanganyar	4,35	3,47
14.	Kabupaten Sragen	3,87	3,53
15.	Kabupaten Grobogan	4,02	3,23
16.	Kabupaten Blora	3,1	3,67
17.	Kabupaten Rembang	2,6	2,84

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
18.	Kabupaten Pati	4,29	3,87
19.	Kabupaten Kudus	3,25	3,19
20.	Kabupaten Jepara	3,35	3,34
21.	Kabupaten Demak	5,38	4,75
22.	Kabupaten Semarang	4,05	3,73
23.	Kabupaten Temanggung	2,32	2,35
24.	Kabupaten Kendal	5,76	5,01
25.	Kabupaten Batang	6,06	5,67
26.	Kabupaten Pekalongan	3,25	3,3
27.	Kabupaten Pemalang	6,55	6,63
28.	Kabupaten Tegal	8,6	7,53
29.	Kabupaten Brebes	8,98	8,35
30.	Kota Magelang	5,25	4,4
31.	Kota Surakarta	4,58	4,61
32.	Kota Salatiga	4,57	3,86
33.	Kota Semarang	5,99	5,82
34.	Kota Pekalongan	5,02	4,91
35.	Kota Tegal	6,05	5,88
Jawa Tengah		5,13	4,78
Nasional		5,32	4,91

Sumber : BPS, 2024

5.1.4. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan minimum dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang diperoleh dari hasil survey (sampel). Sedangkan persentase angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Capaian persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023 dan 2024 dapat diketahui melalui tabel berikut ini.

Tabel 5. 4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2024

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
1.	Kabupaten Cilacap	10,99	10,68
2.	Kabupaten Banyumas	12,53	11,95

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
3.	Kabupaten Purbalingga	14,99	14,18
4.	Kabupaten Banjarnegara	14,9	14,71
5.	Kabupaten Kebumen	16,34	15,71
6.	Kabupaten Purworejo	11,33	10,87
7.	Kabupaten Wonosobo	15,58	15,28
8.	Kabupaten Magelang	10,96	10,83
9.	Kabupaten Boyolali	9,81	9,63
10.	Kabupaten Klaten	12,28	12,04
11.	Kabupaten Sukoharjo	7,58	7,47
12.	Kabupaten Wonogiri	10,94	10,71
13.	Kabupaten Karanganyar	9,79	9,59
14.	Kabupaten Sragen	12,87	12,41
15.	Kabupaten Grobogan	11,72	11,43
16.	Kabupaten Blora	11,49	11,42
17.	Kabupaten Rembang	14,17	14,02
18.	Kabupaten Pati	9,31	9,17
19.	Kabupaten Kudus	7,24	7,23
20.	Kabupaten Jepara	6,61	6,09
21.	Kabupaten Demak	12,01	11,89
22.	Kabupaten Semarang	7,17	6,96
23.	Kabupaten Temanggung	9,26	8,67
24.	Kabupaten Kendal	9,39	9,35
25.	Kabupaten Batang	8,92	8,73
26.	Kabupaten Pekalongan	9,67	8,95
27.	Kabupaten Pemalang	15,03	14,92
28.	Kabupaten Tegal	7,3	6,81
29.	Kabupaten Brebes	15,78	15,6
30.	Kota Magelang	6,11	5,94
31.	Kota Surakarta	8,44	8,31
32.	Kota Salatiga	4,66	4,57
33.	Kota Semarang	4,23	4,03
34.	Kota Pekalongan	6,81	6,71

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
35.	Kota Tegal	7,68	7,64
Jawa Tengah		10,77	10,47
Nasional		9,36	8,57

Sumber : BPS, 2024

5.1.5 Persandingan Capaian Indikator Makro

Persandingan capaian indikator makro dapat digunakan untuk menentukan kabupaten/kota yang dapat diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dan menurunkan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah.

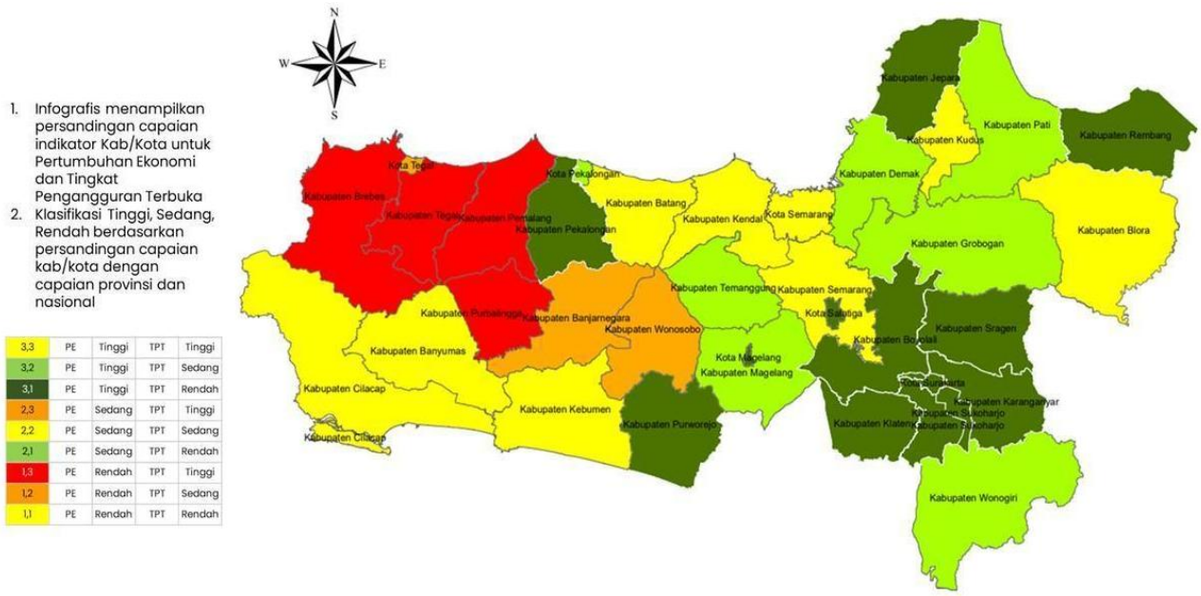

Sumber: Bappeda (diolah), 2025.

Gambar 5. 1
Infografis tentang Sebaran Kondisi Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang disandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah

Gambar 5.1 menjelaskan mengenai perbandingan capaian Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di setiap kabupaten/kota yang berada di Jawa Tengah. Kabupaten/kota yang memiliki notasi warna merah merupakan kabupaten/kota yang memiliki nilai capaian indikator PE dan TPT di bawah capaian provinsi dan nasional. Kabupaten dengan capaian ini antara lain adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga. Penyebab lebih rendahnya capaian indikator PE dan TPT di suatu wilayah apabila dibandingkan dengan provinsi dan nasional antara lain dapat dipicu karena peluang kerja yang lebih terbatas, struktur ekonomi berbeda dengan provinsi/nasional, dan rendahnya partisipasi angkatan kerja. Kabupaten/kota yang memiliki notasi warna hijau tua merupakan kabupaten/kota yang memiliki nilai capaian indikator PE dan TPT di atas capaian provinsi dan nasional. Kabupaten/kota dengan capaian ini antara lain adalah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta. Kabupaten/kota yang memiliki

capaian PE dan TPT lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi dan nasional, beberapa faktor yang mungkin terjadi di suatu wilayah antara lain adalah terdapatnya pasar kerja yang kompetitif, suatu daerah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan memiliki industri padat modal atau memiliki sektor formal yang lebih dominan.

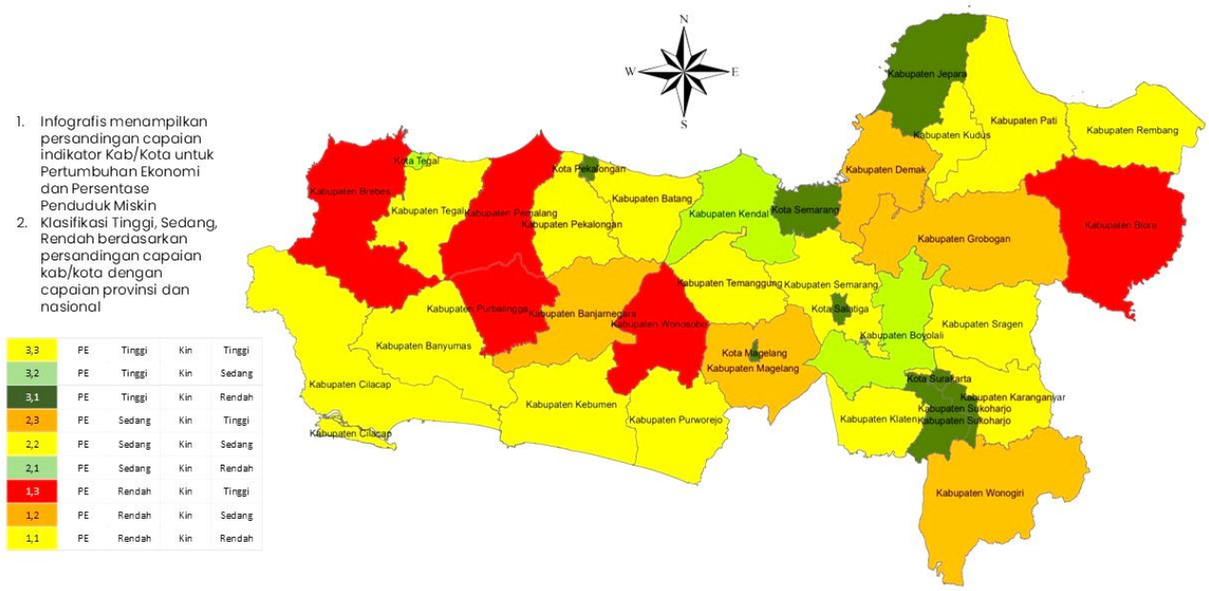

Sumber: Bappeda (diolah), 2025.

Gambar 5. 2
Infografis tentang Sebaran Kondisi Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah

Gambar 5.2 menjelaskan mengenai perbandingan capaian Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan Persentase Penduduk Miskin di setiap kabupaten/kota yang berada di Jawa Tengah. Kabupaten/kota yang memiliki notasi warna merah merupakan kabupaten/kota yang memiliki nilai capaian indikator PE dan Persentase Penduduk Miskin di bawah capaian provinsi dan nasional. Kabupaten dengan capaian ini antara lain adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Blora. Wilayah yang dengan capaian ini dapat disebabkan antara lain karena mengalami keterbatasan dalam peluang ekonomi dan lapangan kerja. Selain itu, wilayah tersebut bergantung pada sektor ekonomi dengan produktivitas rendah dan memiliki keterbatasan dalam infrastruktur maupun akses terhadap pasar sehingga menyebabkan suatu wilayah menjadi kurang menarik bagi investasi sehingga tidak memiliki dorongan ekonomi yang signifikan. Dalam kondisi sebaliknya, terdapat wilayah yang bernotasi hijau tua yaitu wilayah yang memiliki capaian Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi dan nasional. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam capaian ini antara lain adalah Kabupaten Jepara, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Surakarta, dan Kota Semarang. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi capaian wilayah ini antara lain dapat dikarenakan investasi yang kuat dan sektor ekonomi yang berkembang pesat sehingga menciptakan lapangan kerja. Selain itu, infrastruktur dan layanan publik yang mendukung menjadikan wilayah ini memiliki pemerataan pembangunan yang lebih baik dibandingkan daerah lain.

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam) kota. Kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditujukan untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi serta rencana program dan kegiatan pembangunan pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan menyelaraskan kebijakan perencanaan pembangunan pada tingkat pusat dan daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044, bahwa tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan pedesaan;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah;
3. Peningkatan pelestarian kawasan lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim;
4. Pemanfaatan kawasan budi daya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Pengembangan KSP (Kawasan Strategis Provinsi); dan
7. Peningkatan kawasan pertahanan dan keamanan.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas secara spasial tergambar dalam Gambar 5.3.

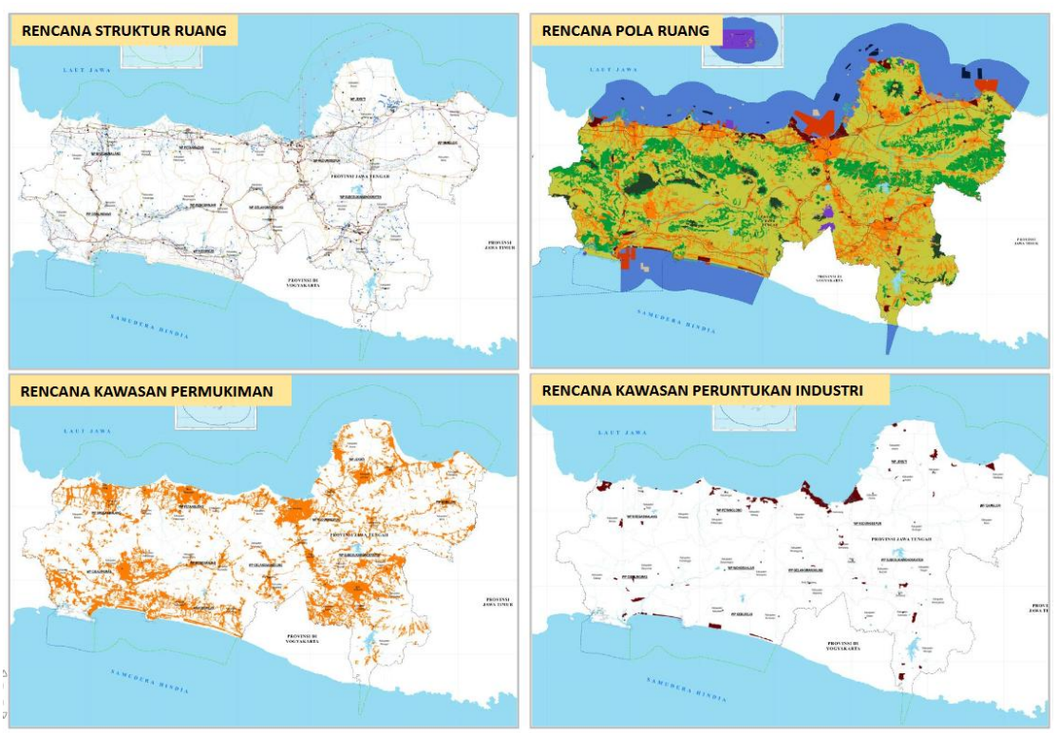

Sumber: RTRW Jawa Tengah.

Gambar 5. 3
Infografis Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, maka konsep pengembangan wilayah terkonsep sebagaimana gambar di bawah ini.

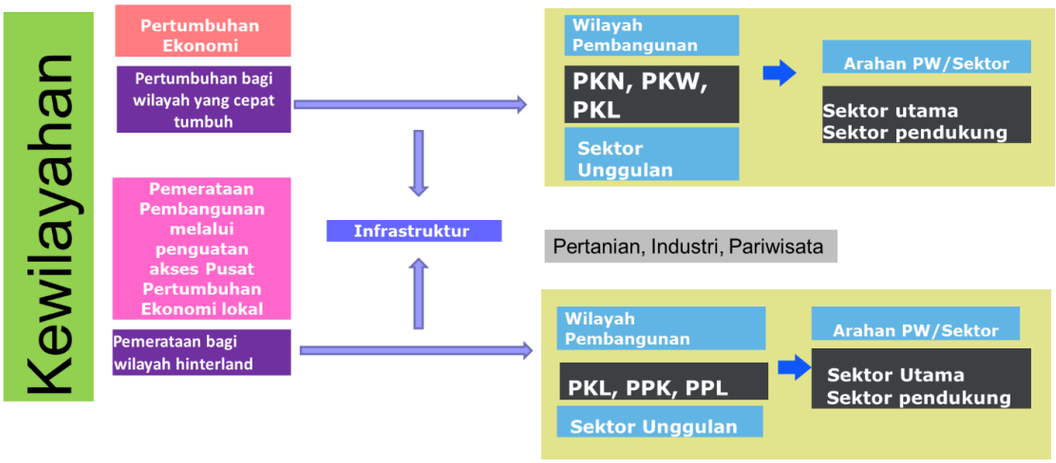

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5. 4
Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

5.3. Kebijakan Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi sepuluh (10) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044, berikut 10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. WP Kedungsepur yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kota Salatiga;
2. WP Jekuti yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati;
3. WP Banglor yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
4. WP Gelangmanggung yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang;
5. WP Wonobanjar yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
6. WP Keburejo yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
7. WP Cibalingmas yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas;
8. WP Subosukawonosraten yang terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kota Surakarta;

9. WP Bregasmalang yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal;
10. WP Petanglong yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan.

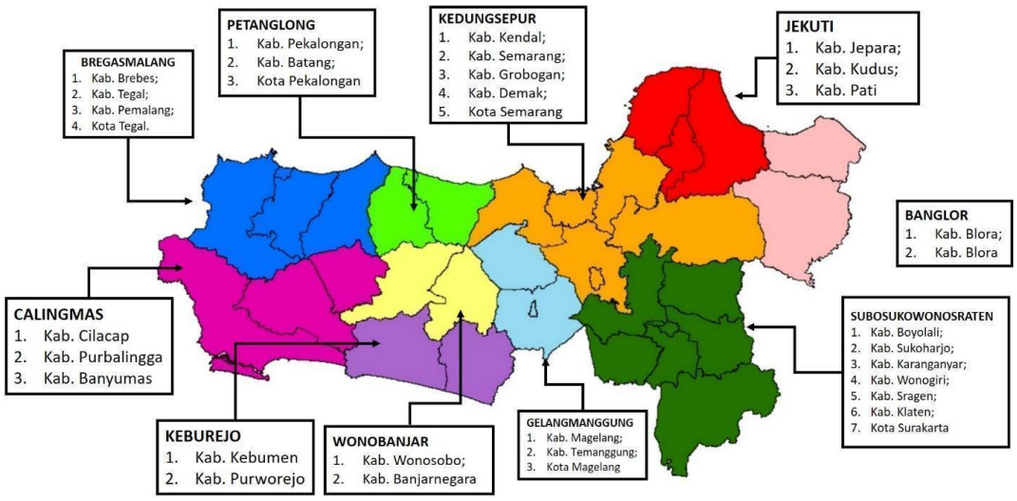

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 5. 5
Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

5.3.1. Arahan Per Wilayah Pengembangan

Pengembangan 10 (sepuluh) WP bertujuan untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk, serta menciptakan pemerataan pembangunan berciri kuat terciptanya produk unggulan. Arah pembangunan dan intervensi kebijakan, tertuang lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5. 5
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
1.	WP. Cibalingmas ● Kab. Cilacap ● Kab. Purbalingga ● Kab. Banyumas	1. Pusat Kegiatan Nasional Cilacap 2. Pusat Kegiatan Wilayah Purwokerto 3. Pusat Kegiatan Lokal Majenang 4. Pusat Kegiatan Lokal Ajibarang 5. Pusat Kegiatan Lokal Wangon 6. Pusat Kegiatan Lokal Kroya 7. Pusat Kegiatan Lokal Sumpiuh 8. Pusat Kegiatan Lokal Banyumas 9. Pusat Kegiatan Lokal Sokaraja 10. Pusat Kegiatan Lokal Purbalingga 11. Pusat Kegiatan Lokal Bobotsari	1. menterpadukan pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Cilacap - Purwokerto – Purbalingga; 2. menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas; 3. pengembangan potensi wisata unggulan Kabupaten, dengan mengintegrasikan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan dan Kawasan Pariwisata Baturraden; 4. mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Majenang; 5. pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 6. mengendalikan alih fungsi sawah; 7. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan Pelabuhan darat *(dryport)* secara	1. Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Purwokerto - Purbalingga yang terkoneksi dengan Trans Banyumas dan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata (pengembangan program integrasi edutrip dengan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata) serta perindustrian; 2. Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Purbalingga; 3. Fasilitasi optimalisasi Bandara JB. Soedirman Purbalingga dan Tunggulwulung Cilacap sebagai generator aktivitas perekonomian nasional; 4. Pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api (palang pintu, LPJU, rambu dan marka) di Kabupaten Cilacap; 5. Pengadaan dan pemasangan LPJU dan perlengkapan jalan lainnya pada

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			terpadu sebagai pintu ekspor dan impor; 8. pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya; 9. peningkatan akses menuju Bandar Udara Jenderal Soedirman; dan 10. peningkatan pengelolaan KSN Pacangsanak.	ruas aksesibilitas kawasan sentra produksi pertanian (Cilacap); 6. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); 7. Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Samudera Cilacap (Tanjung Intan) sebagai pintu masuk ekspor dan impor; 8. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 9. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 10. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti (Karet, Kapulaga, Lada, Kelapa, Cengkeh, Pala, Kakao, Cabai, Padi); 11. Mendorong Konservasi dan pemanfaatan ekowisata Gunung Slamet; 12. Pelatihan dan Pengembangan UMKM dan SDM; 13. Pelaksanaan Kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten yang berbatasan (pendidikan,

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
				kesehatan, ekonomi) dengan lokus pengembangan Perkotaan Majenang; 14. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut, Perkebunan dan Pertanian; 15. Peningkatan Produktivitas dan Pengolahan Ikan Budidaya (Udang Vaname, Kerapu); 16. Pembangunan *Cold Storage;* 17. Pengembangan Industri Pertambangan dan energi; 18. Pembangunan IPLT Regional Purbalingga-Banjarnegara; 19. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Cilacap, Purwokerto, dan Banyumas.
2.	WP. Wonobanjar 1. Kab. Wonosobo 2. Kab. Banjarnegara	1. Pusat Kegiatan Wilayah Wonosobo 2. Pusat Kegiatan Lokal Kertek 3. Pusat Kegiatan Lokal Banjarnegara 4. Pusat Kegiatan Lokal Klampok	1. pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Kertek - Wonosobo - Banjarnegara – Klampok sebagai pusat ekonomi; 2. peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu; 3. pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana	1. Fasilitasi pendorongan rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif lintas Wonosobo - Banjarnegara; 2. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di ruas Batur – Dieng; 3. Peningkatan Kualitas Akses Menuju Kawasan Dieng; 4. Pengembangan Wisata Alam ,Budaya dan Geopark Dieng;

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			alam meliputi erupsi gunung api dan gerakan tanah; 4. meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 5. pengembangan industri hasil pertanian, kehutanan dan pengembangan potensi energi terbarukan dalam rangka mendorong pengembangan bagian selatan Wilayah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara; 6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; 7. peningkatan akses dan kualitas Destinasi Wisata KSPN Dieng dan Geopark Dieng.	5. Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Dieng; 6. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 7. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 8. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti(Teh, Aren, Kakao, Kelapa, Kopi, Lada, Vanili, Tembakau, Padi, Cabai, Iakan Budidaya); 9. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian; 10. Pemulihan Daya Dukung DAS Serayu; 11. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara.
3.	WP. Keburejo 1. Kab. Kebumen 2. Kab. Purworejo	1. Pusat Kegiatan Wilayah Kebumen 2. Pusat Kegiatan Lokal Gombong Karanganyar 3. Pusat Kegiatan Lokal Prembun	1. menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;	1. Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Purworejo - Borobudur yang terkoneksi dengan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata;

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
		4. Pusat Kegiatan Lokal Kutoarjo 5. Pusat Kegiatan Lokal Purworejo	2. pengembangan koridor wisata Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang; 3. pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai; 4. meningkatkan keterwujudan Perkotaan Kebumen sebagai PKW; 5. meningkatkan akses wisata pantai – Geopark Kebumen; 6. mengembangkan Kawasan Industri Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otorita Borobudur; 7. pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah; 8. pengembangan industri manufaktur dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 9. mengembangkan Pelabuhan Perikanan; dan 10. mengendalikan alih fungsi lahan sawah	2. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo (Tahap VI) yang terintegrasi dengan Stasiun Kutoarjo; 3. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) salah satunya pada ruas Bener-Salaman (Ds. Kaliboto lanjutan penanganan lokasi Kalijambe); 4. Fasilitasi rencana perpanjangan layanan kereta api komuter KA Prameks (perpanjangan sampai Kebumen); 5. Pengembangan serta Promosi Destinasi Wisata Alam; 6. Pengembangan UMKM dan SDM pendukung industri pariwisata; 7. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 8. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 9. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti (Tembakau, Cengkeh, Jenitri, Kakao, Kelapa, Kemiri, Lada, Pala, Vanili);

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
				10. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian; 11. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Kebumen dan Purworejo.
4.	WP. Gelangmanggung 1. Kab. Magelang 2. Kab. Temanggung 3. Kota Magelang	1. Pusat Kegiatan Wilayah Magelang 2. Pusat Kegiatan Lokal Parakan 3. Pusat Kegiatan Lokal Temanggung 4. Pusat Kegiatan Lokal Secang 5. Pusat Kegiatan Lokal Mertoyudan 6. Pusat Kegiatan Lokal Borobudur	7. mengembangkan koridor Kawasan Perkotaan Muntilan – Kawasan Perkotaan Mungkid – Kota Magelang – Kawasan Perkotaan Secang – Kawasan Perkotaan Temanggung; 8. pengembangan wilayah berbasis wisata yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan sekitarnya serta risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi; 9. melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai Destinasi Pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi Merbabu – Telomoyo dan Gunung Sindoro – Sumbing; 10. menyelaraskan pembangunan perbatasan Kabupaten Magelang dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo;	1. Pembangunan TPST Regional Magelang dalam rangka mendukung KSPN Borobudur; 2. Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Purworejo - Borobudur yang terkoneksi dengan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata; 3. Inisiasi proses rencana pengembangan koridor baru Trans Jateng Koridor Temanggung - Borobudur dengan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota di WP Gelangmanggung; 4. Fasilitasi pendorongan rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif lintas Semarang - Borobudur - Yogyakarta; 5. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK);

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			11. meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 12. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan 13. mengendalikan alih fungsi lahan sawah	6. Pengembangan Wisata berbasis *Global & Cultural Heritage* kawasan Borobudur; 7. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 8. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti (Tembakau, Kopi, Aren, Vanili, Cabai); 9. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian; 10. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 11. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang.
5.	WP. Sukosukawonosraten 1. Kab. Boyolali 2. Kab. Sukoharjo 3. Kab. Karanganyar 4. Kab. Wonogiri 5. Kab. Sragen 6. Kab. Klaten	1. Pusat Kegiatan Nasional Surakarta 2. Pusat Kegiatan Wilayah Klaten 3. Pusat Kegiatan Wilayah Boyolali 4. Pusat Kegiatan Lokal Ampel	1. menyelaraskan pengembangan Kota Surakarta dan kabupaten di sekitarnya; dan 2. Mendorong koordinasi dan kerja sama antardaerah dalam hal: a. pengembangan sektor ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;	1. Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Surakarta - Sangiran via Sumberlawang dan Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri yang terkoneksi dengan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata; 2. Evaluasi dan rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
	7. Kota Surakarta	5. Pusat Kegiatan Lokal Banyudono 6. Pusat Kegiatan Lokal Karanggede 7. Pusat Kegiatan Lokal Simo 8. Pusat Kegiatan Lokal Colomadu 9. Pusat Kegiatan Lokal Gemolong 10. Pusat Kegiatan Lokal Sragen 11. Pusat Kegiatan Lokal Karanganyar 12. Pusat Kegiatan Lokal Katosura 13. Pusat Kegiatan Lokal Delanggu 14. Pusat Kegiatan Lokal Prambanan 15. Pusat Kegiatan Lokal Grogol 16. Pusat Kegiatan Lokal Sukoharjo 17. Pusat Kegiatan Lokal Wonogiri	b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota; c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah; d. penyediaan ruang terbuka hijau Kota Surakarta dengan Kabupaten lain yang berbatasan; e. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan f. penanganan bencana. 3. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri; 4. menterpadukan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Timur; 5. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan 6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah	perlintasan kereta api di Kabupaten Sukoharjo; 3. Pengadaan dan pemasangan LPJU dan perlengkapan jalan lainnya pada ruas aksesibilitas kawasan sentra produksi pertanian (Sragen); 4. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); 5. Mendorong optimalisasi Bandara A. Soemarmo Kabupaten Boyolali; 6. Penanganan Jalan Provinsi di Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Klaten, dan Kota Surakarta; 7. Perluasan SPAM Regional Wosusokas.

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
		18. Pusat Kegiatan Lokal Pracimantoro		
6.	WP. Banglor 1. Kab. Rembang 2. Kab. Blora	1. Pusat Kegiatan Wilayah Cepu 2. Pusat Kegiatan Lokal Blora 3. Pusat Kegiatan Lokal Rembang Randublantung 4. Pusat Kegiatan Lokal Lasem	1. meningkatkan aksesibilitas pusat ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora; 2. mendorong Kawasan Perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai Pusat Bisnis Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Skala Internasional; 3. mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Rembang menjadi PKW; 4. mendorong keterpaduan pengembangan industri di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora; 5. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Rembang; 6. mengembangkan potensi wisata keunikan bentang alam dan pantai; 7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; 8. meningkatkan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian tanaman; dan	1. Pengembangan wisata tematik berbasis Cultural Heritage Tourism; 2. Fasilitasi optimalisasi Bandara Ngloram sebagai generator aktivitas perekonomian nasional; 3. Fasilitasi pendorongan rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif lintas Semarang - Kudus - Rembang - Bojonegoro; 4. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (Pelabuhan Sluke); 5. Pengembanagan Kawasan Perkotaan Cepu sebagai Bisnis Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; 6. Pengembangan Kawasan Lasem sebagai Destinasi Wisata berbasis Global; 7. Pengembangan Pelabuhan Perikanan; 8. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 9. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			9. menterpadukan pembangunan Wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.	bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 10. Kerjasama antar daerah perbatasan dan Provinsi Jawa Timur; 11. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti (Padi, Jagung, Udang Vaname, Ikan Budidaya, Tebu, Tembakau, Kapok, Kelapa,Siwalan); 12. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian; 13. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Pembangunan *Cold Storage*; 14. Peningkatan Produktivitas dan Pengolahan Ikan Budidaya; 15. Pengembangan Industri Pertambangan dan energi; 16. Inisiasi Pembangunan SPAM Regional Randugunting; 17. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.
7.	WP. Jekuti 1. Kab. Kudus 2. Kab. Pati 3. Kab. Jepara	1. Pusat Kegiatan Wilayah Kudus 2. Pusat Kegiatan Lokal Pati	1. menterpadukan pembangunan Kawasan Perkotaan Kudus – Jepara – Pati - Juwana;	1. Konservasi Gunung Muria dan pemanfaatan ekowisata Gunung Muria;

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
		3. Pusat Kegiatan Lokal Juwana 4. Pusat Kegiatan Lokal Tayu 5. Pusat Kegiatan Lokal Bangsri 6. Pusat Kegiatan Lokal Jepara 7. Pusat Kegiatan Lokal Kalinyamatan	2. meningkatkan pengelolaan industri kerajinan di Kabupaten Jepara; 3. meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tembakau di Kabupaten Kudus; 4. meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tapioka di Kabupaten Pati; 5. mengembangkan potensi wisata keunikan geologi dan pantai; 6. mengembangkan Cagar Biosfer Karimunjawa; 7. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; 8. pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 9. meningkatkan kerja sama penanganan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan; dan 10. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.	2. Pengembangan dan Konservasi Wisata berbasis Tematik *Marine Tourism*; 3. Mengembangkan pengelolaan Cagar Biosfer Karimunjawa; 4. Lanjutan inisiasi proses pengembangan koridor baru Trans Jateng di WP Jekuti dengan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten (menunggu kesiapan daerah dan kebijakan lanjut serta hasil pra kajian kelayakan di 2025); 5. Fasilitasi optimalisasi Bandara Dewadaru sebagai generator aktivitas perekonomian nasional; 6. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); 7. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (Pelabuhan Juana); 8. Fasilitasi pendorongan rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif lintas Semarang - Kudus - Rembang - Bojonegoro; 9. Pelatihan dan Pengembangan UMKM dan SDM industri kerajinan serta pendukung industri pariwisata

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
				10. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 11. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 12. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti dan Perikanan Budidaya (Tebu, Kopi, Kelapa, Kapok, Padi, Bandeng , Rumput Laut); 13. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan, Pertanian, Horti, Perikanan serta Kerajinan Kayu; 14. Pengembangan Pelabuhan umum dan Pelabuhan Perikanan serta Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Pembangunan *Cold Storage*; 15. Peningkatan Produktivitas dan Pengolahan Ikan Budidaya; 16. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara.
8.	WP. Kedungsepur 1. Kab. Kendal	1. Pusat Kegiatan Nasional Semarang	meningkatkan peran Kota Semarang sebagai	1. Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) penghubung Kota Semarang -

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
	2. Kab. Demak 3. Kab. Semarang 4. Kab. Grobogan 5. Kota Semarang 6. Kota Salatiga	2. Pusat Kegiatan Lokal Kendal 3. Pusat Kegiatan Lokal Weleri 4. Pusat Kegiatan Lokal Kaliwungu 5. Pusat Kegiatan Lokal Boja 6. Pusat Kegiatan Lokal Sukorejo 7. Pusat Kegiatan Lokal Ungaran 8. Pusat Kegiatan Lokal Ambarawa 9. Pusat Kegiatan Lokal Demak 10. Pusat Kegiatan Lokal Mranggen 11. Pusat Kegiatan Lokal Gedong 12. Pusat Kegiatan Lokal Gubug 13. Pusat Kegiatan Lokal Purwodadi	1. ibukota Provinsi dan pusat ekonomi dalam mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya; 2. menterpadukan pengembangan Industri di WP Kedungsepur; 3. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor; 4. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; 5. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal: a. pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan; b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota; c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah; d. pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan	Kabupaten Semarang; Kota Semarang - Weleri Kabupaten Kendal dan Kota Semarang - Kabupaten Grobogan yang terkoneksi Trans Semarang dan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan perindustrian dan pariwisata; 2. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan di pesisir utara (Tanjung Emas dan Pelabuhan Kendal) dalam mendukung Kawasan Industri; 3. Fasilitasi pemantapan status Bandara A. Yani Kota Semarang sebagai bandara internasional; 4. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); 5. Pengadaan dan pemasangan LPJU dan perlengkapan jalan lainnya pada ruas aksesibilitas kawasan sentra produksi pertanian (Grobogan); 6. Fasilitasi pendorongan rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif lintas Semarang - Kudus - Rembang - Bojonegoro; 7. Fasilitasi rencana perpanjangan layanan kereta api komuter KA Kedungsepur (perpanjangan sampai Weleri);

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			e. penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob. 6. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri; 7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; 8. pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob; 9. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan 10. peningkatan pengelolaan KSN Kedungsepur.	8. Optimalisasi Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan Kedungsepur; 9. Rehabilitasi DAS Jragung Tuntang; 10. Pengembangan Wisata khususnya Kawasan Kota Lama, Kopeng dan Rawa Pening sebagai Wisata Berbasis *Global* dan *Cultural Heritage;* 11. Pengembangan UMKM dan SDM industri Kreatif; 12. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 13. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 14. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti, dan Perikanan (Tebu, Tembakau, Aren, Kakao, Karet, Kopi, Jagung, Bandeng, Lele); 15. Penanganan Kawasan Terdampak Rob; 16. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian dan Perikanan; 17. Penanganan Jalan Provinsi di Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang,

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
				Kab. Grobogan, Kota Semarang, dan Kota Salatiga; 18. Inisiasi pembangunan SPAM Regional Jragung; 19. Peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana utamanya penyediaan rumah apung/adaptif banjir di pesisir utara Kabupaten Demak.
9.	WP. Petanglong 1. Kab. Batang 2. Kab. Pekalongan 3. Kota Pekalongan	1. Pusat Kegiatan Wilayah Pekalongan 2. Pusat Kegiatan Lokal Batang 3. Pusat Kegiatan Lokal Gringsing 4. Pusat Kegiatan Lokal Limpung 5. Pusat Kegiatan Lokal Wiradesa 6. Pusat Kegiatan Lokal Krajen 7. Pusat Kegiatan Lokal Kedungwuni-Buaran	1. menterpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan Kabupaten di sekitarnya; 2. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal: a. pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan; b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota; c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;	1. Rehabilitasi Mangrove; 2. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); 3. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (Pelabuhan Batang) dalam mendukung KITB; 4. Rehabilitasi Daerah hulu petungkriyono; 5. Pengembangan Ekowisata alam dan Wisata Belanja; 6. Pengembangan Fasiitas Pendukung Kawasan Industri Terpadu Batang; 7. Pengembangan SDM pendukung sektor industri KIT Batang; 8. Pengembangan UMKM dan SDM pendukung industri pariwisata dan industri kreatif;

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			d. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekalongan dengan Kabupaten lain yang berbatasan; e. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan f. penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob. 3. mendorong pengembangan wilayah dan prasarana Kawasan Industri Terpadu Batang dengan daerah sekitarnya; 4. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri; 5. pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob; 6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; pengelolaan limbah industri/ kerajinan batik; mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; dan 7. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetapmempertimbangkan kelestarian alam	9. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 10. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 11. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti, dan Perikanan (Teh, Vanili, Kopi, Karet, Kakao, Cengkeh, Tebu); 12. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan; 13. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan; 14. Inisiasi Pembangunan TPST Reginal Petanglong.

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
10.	WP. Bregasmalang 1. Kab. Brebes 2. Kab. Tegal 3. Kab. Pemalang 4. Kota Tegal	Pusat Kegiatan Wilayah Tegal Pusat Kegiatan Lokal Brebes Pusat Kegiatan Lokal Losari Pusat Kegiatan Lokal Ketanggungan-Kersana Pusat Kegiatan Lokal Slawi-Adiwerna Pusat Kegiatan Lokal Pusat Kegiatan Lokal Lebaksiu-Balapulang Pusat Kegiatan Lokal Bumiayu Pusat Kegiatan Lokal Pemalang Pusat Kegiatan Lokal Comal Pusat Kegiatan Lokal Randudongkel Pusat Kegiatan Lokal Moga Pusat Kegiatan Lokal Belik	1. menterpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Tegal dan kabupaten di sekitarnya; 2. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal: a. pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan; b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota; c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah; d. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Tegal dengan Kabupaten lain yang b. berbatasan; a. pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan b. penanganan bencana dan Kawasan c. terdampak rob.	1. Pembangunan dermaga sungai (plengsengan) lintas penyeberangan sungai antar kabupaten di Sungai Kaligangsa (Perbatasan Kabupaten Brebes dan Kota Tegal); 2. Peningkatan Kerjasama Regional pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3. Pengembangan Eko Wisata pada kawasan wisata Guci dan pantai utara Brebes-Tegal-Pemalang; 4. Rehabilitasi Mangrove; 5. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 6. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 7. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti, dan Perikanan Budidaya (Tebu, Aren, Bawang Merah, Cengkeh, Karet, Kopi, Teh, Padi, Rumput Laut, Bandeng, Cabai); 8. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan, Pertanian, serta Perikanan Budidaya dan Tangkap;

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			3. menterpadukan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Barat; 4. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; 5. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; dan 6. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam.	9. Pengembangan Pelabuhan Perikanan serta Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Pembangunan *Cold Storage*; 10. Pengembangan SPAM Regional Bergas; 11. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal.

Sumber : Bappeda, 2025.

5.4. Target Indikator Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Capaian Provinsi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk melakukan intervensi terhadap pengembangan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mencapai target perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu, diharapkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat mendukung kinerja 4 (empat) capaian makro Provinsi Jawa Tengah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Persentase Penduduk Miskin, dengan target sebagai berikut.

Tabel 5. 6
Target Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota
Tahun 2026

No	Kabupaten/Kota	Indikator			
		IPM	PE	TPT	Kin
1.	Kabupaten Cilacap	73,32	2,80-3,00	7,73-7,43	10,34-10,08
2.	Kabupaten Banyumas	76,00	5,88-6,50	5,94-5,75	10,84-9,5
3.	Kabupaten Purbalingga	71,96	5,30-5,70	4,79-4,50	12,86-11,86
4.	Kabupaten Banjarnegara	70,98	5,25-6,00	5,50-5,00	13,92-13,77
5.	Kabupaten Kebumen	73,80	5,80-6,30	4,60	14,3-13,4
6.	Kabupaten Purworejo	76,00	5,00-5,80	3,10-2,83	9,67-8,67
7.	Kabupaten Wonosobo	71,58	5,20-5,50	3,90-3,50	14,15-13,38
8.	Kabupaten Magelang	73,01	5,20-5,65	3,55-3,20	9,93-9,07
9.	Kabupaten Boyolali	77,00	5,80-6,00	3,08-2,80	9,27-9,09
10.	Kabupaten Klaten	79,47	5,71-6,51	3,70-3,00	11,32-11,21
11.	Kabupaten Sukoharjo	79,75	5,30-6,00	3,60-3,30	7,20-7,15
12.	Kabupaten Wonogiri	73,99	5,36-6,00	2,20-1,98	9,25-9,18
13.	Kabupaten Karanganyar	79,26	6,20	3,35	8,84
14.	Kabupaten Sragen	76,71	5,50-6,00	3,41-3,11	11,50-11,18
15.	Kabupaten Grobogan	73,19	5,40-6,20	3,20-2,90	10,70-10,30
16.	Kabupaten Blora	72,61	3,25-4,05	3,40-2,85	10,89-10,28
17.	Kabupaten Rembang	73,20	5,20-6,00	2,50-2,20	13,39-12,94
18.	Kabupaten Pati	75,62	5,50-6,50	3,74-3,44	8,51-8,40
19.	Kabupaten Kudus	78,31	3,00-3,70	2,87-2,57	6,56-5,47
20.	Kabupaten Jepara	75,33	4,82-5,62	3,15-2,97	5,59-5,34
21.	Kabupaten Demak	75,61	5,10-6,00	4,64-4,34	11,38-10,04
22.	Kabupaten Semarang	76,37	4,90-5,90	3,71-3,41	6,68-6,55
23.	Kabupaten Temanggung	73,30	5,10-5,50	2,20-2,00	7,90-7,85

No	Kabupaten/Kota	Indikator			
		IPM	PE	TPT	Kin
24.	Kabupaten Kendal	76,15	5,70-6,50	4,99-4,69	8,82-8,73
25.	Kabupaten Batang	71,20	6,35-6,50	5,54-5,10	8,30-8,21
26.	Kabupaten Pekalongan	73,00	5,30-6,00	3,05-2,75	8,09-7,98
27.	Kabupaten Pemalang	70,13	5,21-6,00	6,33-6,04	13,90-13,22
28.	Kabupaten Tegal	72,37	5,62-6,42	7,41-7,11	6,62-6,05
29.	Kabupaten Brebes	71,13	5,60-6,40	8,16-7,97	14,41-13,78
30.	Kota Magelang	83,40	5,50-5,70	4,40-4,04	5,28-5,11
31.	Kota Surakarta	85,50	6,06-6,70	4,20-4,00	7,58-7,37
32.	Kota Salatiga	86,43	5,56-6,56	3,84-3,54	4,34-4,30
33.	Kota Semarang	86,25	5,90-6,30	5,40-5,10	3,86-3,74
34.	Kota Pekalongan	78,21	5,70-6,20	4,91-4,40	6,50-6,14
35.	Kota Tegal	78,25	5,53-6,50	5,73-5,43	7,32-6,91
Jawa Tengah		74,55	5,00 -6,00	4,47-4,37	8,70-8,53

Sumber : Bappeda, 2025.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan implementasi tahun pertama kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029. Tahun 2026 merupakan tahap **"Penguatan Landasan Pembangunan Daerah"** difokuskan pada tema pembangunan yaitu **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"**. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut ini diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi meliputi: 1) Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah; 2) Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan; dan 3) Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2026 didukung dengan rencana pendanaan untuk memenuhi kebutuhan belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar 23,741 triliun rupiah, belanja daerah sebesar 24,156 triliun rupiah, dan pembiayaan daerah sebesar 414,5 miliar rupiah. Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026.

Tabel 6.1.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		**16.318.898.370.000**
1	Pajak Daerah	12.899.838.185.000
2	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	701.832.870.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	312.027.692.000
PENDAPATAN TRANSFER		**7.397.415.721.000**
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**25.600.170.000**
JUMLAH PENDAPATAN		**23.741.914.261.000**
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		**15.630.119.890.500**
1	Belanja Pegawai	7.550.906.690.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.576.205.500
3	Belanja Subsidi	7.647.280.000
4	Belanja Hibah	2.070.582.715.000
5	Belanja Bantuan Sosial	10.407.000.000
BELANJA MODAL		**1.679.982.022.500**
BELANJA TAK TERDUGA		**20.000.000.000**
BELANJA TRANSFER		**6.826.312.348.000**
1	Belanja Bagi Hasil	4.400.368.228.000

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.425.944.120.000
JUMLAH BELANJA		**24.156.414.261.000**
SURPLUS/DEFISIT		**(414.500.000.000)**
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**484.500.000.000**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	484.500.000.000
2	Pencairan dana cadangan	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**70.000.000.000**
1	Pembentukan dana cadangan	0
2	Penyertaan modal	70.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		**414.500.000.000**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		**0**

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan kualitas layanan pendidikan meliputi: Seleksi dan fasilitasi lulusan SMA, SMK dan MA miskin yang berprestasi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Luar Negeri dan Beasiswa Perguruan Tinggi Dalam Negeri; Sekolah Unggulan SMA dan/atau SMK berbasis kompetitif serta potensi dan kearifan lokal fokus pada SMK agribisnis; Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) maupun lanjutan untuk SMA, SMK, SLB di Kabupaten Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Klaten, Purbalingga, Batang, Tegal dan Kota Tegal; Pemantauan, pengendalian dan evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS); Beasiswa bagi Siswa Miskin; Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan; Pengelolaan SMK *Boarding* dan SMK *Semi Boarding;* Penyediaan paket pendidikan gratis (Seragam, Perlengkapan Sekolah dan Kuota Internet) bagi siswa miskin; Revitalisasi prasarana dan sarana pendidikan fokus pada SMK agribisnis; Sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik dan siswa SMK fokus pada SMK agribisnis; Digitalisasi pendidikan dan Penguatan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art* dan *Mathematics*) melalui peningkatan keterampilan dan pengembangan media belajar berbasis TIK bagi tenaga pendidik; Pemenuhan Guru Pendamping Khusus (GPK) di Sekolah Inklusi; Penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas

PAUD dan pendidikan non formal terutama PKBM; Peningkatan tata kelola pendidikan dengan penguatan kerjasama multipihak khususnya dalam rangka *link and macth* dengan DUDI agroindustri; Peningkatan pembinaan potensi siswa diarahkan pada pengembangan *softskill,* penguatan karakter dan edukasi 7 kebiasaaan anak Indonesia hebat termasuk didalamnya konsumsi makanan sehat dan bergizi; serta Penguatan layanan pendampingan pencegahan dan penanganan kekerasan, perundungan dan intoleransi termasuk optimalisasi Satgas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada Satuan Pendidikan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Percepatan implementasi kurikulum adaptif berbasis digitalisasi; Internalisasi muatan lokal berbasis potensi dan kearifan lokal; Penyelarasan kurikulum dengan DUDI; Penguatan pengarusutamaan nilai agama, budaya dan karakter serta integrasi tema pembangunan dalam kurikulum.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan, termasuk dalam perijinan pendirian Sekolah Rakyat.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan AMPSR dan penguatan layanan deteksi dini ibu hamil dengan ANC; penguatan pencegahan *stunting* melalui Calon Pengantin (CATIN) dan Pasangan Usia Subur (PUS) layak hamil; pelaksanaan koordinasi dan advokasi pelaksanaan K6; peningkatan pelayanan KB pasca salin; penguatan pelaksanaan KN lengkap yang berkualitas; penguatan edukasi kehamilan remaja; pemberian PMT bagi baduta dan ibu hamil KEK serta anemia disertai evaluasi KAP; pendampingan upaya peningkatan capaian program surveilans dan imunisasi; penguatan posbindu di institusi; deteksi dini kanker payudara, kanker serviks serta 3 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara); pelaksanaan koordinasi dan advokasi KTR; Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) ulang tahun, sekolah dan khusus; peningkatan penemuan *Surveilance* malaria; peningkatan penemuan serta peningkatan kesembuhan TB dan HIV; peningkatan penemuan NTD; peningkatan tata laksana *dengue*; pengendalian obesitas pada usia dewasa yang berdampak pada faktor PTM; penguatan dan evaluasi pelaksanaan STBM; Fasilitasi pelaksanaan program spesialis keliling (Spelling) yang dilaksanakan Balkesmas, RS Provinsi dan RS di Kab/Kota;fasilitasi penguatan Institusi Layanan Primer (ILP); peningkatan sistem informasi kesehatan di fasyankes; pendampingan pelaksanaan satu

sehat; penyusunan kebijakan terkait standarisasi SPA di faskes primer, lanjutan dan labkesmas; pendampingan kualitas akreditasi paripurna; koordinasi dan advokasi standar pelayanan di faskes yang ramah disabilitas; pendampingan pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat; pemeriksaan kualitas air dan udara; peningkatan kepesertaan aktif jaminan kesehatan; pengadaan dan distribusi obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan; Peningkatan standarisasi Labkesmas menjadi Labkesmas Tier III; serta pemenuhan sarana dan prasarana di UPT Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD milik Pemerintah Provinsi.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada penguatan implementasi data berkualitas; peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (SDMK) melalui pelatihan/seminar/*workshop*/magang/lainnya yang mendukung pelayanan berbasis kompetensi; pelaksanaan kerjasama dengan perguruan Tinggi dalam penyelesaian permasalahan kesehatan prioritas; sosialisasi kebijakan perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan SDMK tingkat provinsi; peningkatan mutu pelatihan SDMK; serta peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui sosialisasi dan bimtek.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan melalui evaluasi peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin sesuai standar; penyusunan standar obat-obatan di faskes primer dan lanjutan; pendampingan perizinan berusaha berbasis risiko distribusi pedagang besar farmasi, pedagang obat tradisional, serta pedagang besar kosmetika.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kampanye perubahan perilaku; pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat (ormas, kader, dunia usaha, PT, mitra, dan lainnya), peningkatan koordinasi, bimbingan teknis; implementasi peningkatan aktivitas fisik di UPT; pelaksanaan pemeriksaan spesialis keliling (Spelling) untuk mendukung pelayanan diluar gedung RSUD/RSJD; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh tujuh RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA) meliputi antara lain

jaringan irigasi, pengaman tanggul dan alur sungai, bangunan pengendali banjir, bangunan penampung air, serta bangunan pelindung pantai;

normalisasi/restorasi sungai; operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan provinsi; peningkatan *flood forecasting and warning system (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi dan penyediaan peralatan pendukung. Kegiatan-kegiatan di atas sekaligus untuk mendukung peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim sektor air.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan akses air minum jaringan perpipaan yang dikelola secara aman dan berkelanjutan meliputi pengembangan dan inisiasi pembangunan baru SPAM Regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan dan SPAM desalinasi, serta pembinaan pengelolaan SPAM perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana pengelolaan sampah meliputi fasilitasi pembangunan TPST regional, inisiasi pembangunan baru TPST regional, dan pembangunan prasarana sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan akses sanitasi air limbah domestik yang dikelola secara aman dan berkelanjutan meliputi fasilitasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) regional, serta pembangunan prasarana-sarana dan pembinaan pengelolaan air limbah domestik perkotaan dan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

f. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, dan rehabilitasi jalan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antarwilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana di antaranya di ruas-ruas Wanayasa-Kalibening/ Bts. Kab Pekalongan, Buntu-Kroya–Slarang, Sirampog–Bumiayu, Kajen - Kalibening/ Bts. Kab Banjarnegara, Demak–Godong, Juwana-Todanan/ Bts. Kab Blora. Selain itu tetap dilaksanakan pemeliharaan rutin di semua ruas, kegiatan pendukung berupa penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem

pengembangan jalan; serta pengawasan pelaksanaan peningkatan menuju lebar standar, dan rehabilitasi jalan.

g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka pencapaian 1 KK 1 rumah layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana utamanya penyediaan rumah adaptif banjir di pesisir utara, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi, serta fasilitasi penyediaan rumah susun.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan, pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh, serta penataan permukiman di kawasan pesisir.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi, serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi daerah rawan bencana, pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (destana), penyelenggaraan gladi bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) dan rambu jalur evakuasi di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas (Unit LIDi), penyusunan rencana kontijensi (renkon); peningkatan kapasitas dalam respon cepat penanganan darurat bencana, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan, pemenuhan logistik dan peralatan penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penyusunan dokumen kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna) dan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P), serta pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran serta pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur permadam kebakaran kabupaten/kota;.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS) termasuk kegiatan Bintek peningkatan kapasitas dan bantuan Hibah serta bantuan hibah bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) guna meningkatkan jumlah LKS yang terakreditasi, koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, warga lanjut usia (lansia) terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, peningkatan kualitas data kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran data, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta bansos non tunai Kartu Jateng Ngopeni.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan, pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja daerah, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja baik makro maupun mikro.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan, mesin dan menjahit), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan bidang jasa seperti *commercial cookery, housekeeping, tour guide, waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, pelatihan bidang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), peningkatan produktivitas (perusahaan dan desa), pengukuran produktivitas, uji kompetensi, konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, *job fair*, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pemberdayaan penyandang disabilitas, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, pemberdayaan keluarga PMI dan PMI yang purna, penguatan jejaring desa migran produktif, dan pengesahan

rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pemeriksaan perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI), pemeriksaan perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA), pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha, serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penanganan kerawanan pangan pada lokasi prioritas kemiskinan dan risiko *stunting*, dan implementasi pengelolaan serta pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste).*

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa penetapan lokasi oleh gubernur.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*

Program ini diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), fasilitasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

b. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, peningkatan pemantauan terhadap badan air permukaan dan kualitas udara ambien, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan sinergi peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim.

c. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**
Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui fasilitasi taman kehati, penanganan ruang terbuka hijau/RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

d. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**
Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

e. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan–Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

f. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat dan generasi muda tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

g. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
Program ini diarahkan pada penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

h. **Program Pengelolaan Persampahan**
Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain persiapan pembangunan TPST Regional Magelang dan fasilitasi sarpras pengelolaan sampah kepada kelompok masyarakat.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pendaftaran Penduduk**
Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi

kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blangko KTP-*el* di kabupaten/kota.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerjasama antar desa melalui fasilitasi kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi penyusunan produk hukum daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang desa, melaksanakan evaluasi perkembangan desa serta melaksanakan penilaian melalui penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan, melaksanakan pembinaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten, melaksanakan fasilitasi terhadap penetapan dan penegasan batas desa, pembinaan manajemen pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan desa, pembinaan terhadap pencatatan data dan informasi pemerintah desa, serta pembinaan terhadap penyediaan data profil desa dan kelurahan.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des), penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa, penguatan transformasi Posyandu yang terintegrasi dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pembangunan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi berupa keberlanjutan penyediaan layanan Trans Jateng (7 koridor eksisting), modernisasi dan pengembangan Trans Jateng peremajaan alat *e-ticketing*; persiapan operasional awal "*Central Java Transport Operations Center";* kegiatan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi berupa inisiasi kajian kelayakan Trans Jateng "Eksekutif"; inisiasi proses rencana pengembangan koridor baru di WP Jekuti (lanjutan proses) dan Gelangmangung dengan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota); kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan Terminal Kutoarjo tahap VI dan peningkatan Terminal Sukoharjo, Penggaron, Purbalingga, dan Bumiayu; kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi utamanya berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan LPJU dan perlengkapan jalan lainnya (APILL, RPPJ, *warning light,* dan rambu) diantaranya pada ruas aksesibilitas kawasan sentra produksi pertanian (Cilacap, Grobogan, Klaten dan Sragen, pembangunan halte dan modernisasi/peningkatan ruang tunggu penumpang Trans Jateng yang dilengkapi *Public Transport Information System*/PTIS, kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi berupa rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) prioritas pada ruas dengan tingkat kejadian kecelakaan sangat tinggi salah satunya pada ruas Bener-Salaman (Kalijambe) dan pemasangan ZOSS SMA/SMK termasuk peningkatan pemahaman anak sekolah, serta kegiatan penetapan rencana induk LLAJ provinsi berupa fasilitasi optimalisasi bandara sebagai generator aktivitas perekonomian nasional dan/atau global.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi utamanya berupa pembangunan dermaga sungai (plengsengan) lintas penyeberangan Sungai Kaligangsa (di Kabupaten Brebes); kegiatan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (antisipasi pelimpahan aset) dan fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai sentra ekonomi Jawa; kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api (palang pintu, *Warning Light*, LPJU, rambu dan marka) di Kabupaten Cilacap dan evaluasi dan rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di perlintasan kereta api di Kabupaten Sukoharjo serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif dan rencana perpanjangan layanan kereta api komuter KA Kedungsepur (perpanjangan sampai Weleri) dan KA Prameks (perpanjangan sampai Kebumen).

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antarperangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, layanan *data center,* pengembangan kehumasan, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengelolaan konten, *website,* dan media sosial terkait informasi pembangunan Jawa Tengah, menyaring/*filter* terhadap berita *hoax* dan berita *fake,* serta peningkatan pelayanan informasi publik, pengembangan kapasitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan monev keterbukaan informasi badan publik.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan pendampingan pengelolaan ekosistem terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province,* mengembangkan dan mengelola integrasi layanan SPBE melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), penerbitan dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), koordinasi pengembangan layanan Jawa Tengah Cerdas, serta fasilitasi internet desa di 17 kabupaten dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE), pemenuhan *data center facilities rated*

III, layanan *bandwidth* internet untuk perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, serta pengembangan kapasitas SDM pengelola infrastruktur TIK.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola koperasi melalui peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, implementasi penerapan standar akuntansi keuangan entitas privat bagi koperasi, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola koperasi melalui melalui peningkatan kualitas kelembagaan, baik bagi koperasi maupun kelompok masyarakat dan pra-koperasi, gerakan edu koperasi, perluasan diversifikasi produk koperasi, penguatan kapasitas permodalan serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada penumbuhan jiwa wirausaha, peningkatan kualitas SDM, serta literasi keuangan melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi serta diversifikasi produk melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang penanaman modal yang berkualitas, serta dukungan insentif dan kemudahan penanaman modal dan peningkatan investasi di Jawa Tengah.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi investasi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan terhadap kepeminatan investasi, dan memfasilitasi kemitraan antara Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian, mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan, antara lain melalui program kartu zilenial, program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan, mendorong gaya hidup sehat dan konsumsi pangan bergizi, mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan prasarana sarana olahraga, pemetaan cabang olahraga unggulan, mendorong sport tourism sebagai penggerak ekonomi pangan lokal antara lain melalui peningkatan kualitas dan tata kelola manajemen olahraga, pengembangan sport centre di setiap kecamatan, mendukung kegiatan tarkam dalam kalender olahraga tahunan, penguatan pembinaan e-sport, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga, promosi dan integrasi sport tourism terhadap pangan lokal, sehat, bergizi.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan pada perwujudan *big data* klaster pertanian, pariwisata dan pendidikan, integrasi portal data menuju layanan data terbuka dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Jawa

Tengah, serta pengembangan geospasial dalam rangka mendukung Satu Peta Jawa Tengah, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola peta geospasial.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada optimalisasi kinerja tim *computer security incident response team* (CSIRT), baik di perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pendampingan bagi tim CSIRT Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, peningkatan layanan *pentest* dalam rangka meningkatkan keamanan siber, peningkatan literasi keamanan informasi (*security awareness*), peningkatan capaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) melalui penerapan standar ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi (siber) dan persandian.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada upaya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) melalui perekaman OPK hingga penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB); pemanfaatan OPK dalam event/pameran budaya; peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan melalui sertifikasi SDM kebudayaan; pemberian penghargaan kepada maestro/budayawan lokal; serta sinkronisasi Pokok Pikir Kebudayaan Daerah (PPKD) dalam perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada upaya pelestarian kesenian tradisional melalui inventarisasi hingga revitalisasi/restorasi karya budaya; pembibitan hingga pengembangan talenta seni budaya, yang diawali pendataan talenta seni budaya, pelatihan/workshop talenta seni budaya serta fasilitasi tampilan/*showcase*/pameran/pergelaran/pementasan karya talenta seni budaya, termasuk kesenian tradisional lainnya.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada pembinaan sejarah lokal provinsi melalui penyediaan data/informasi sejarah dan pemanfaatan hasil penulisan/literasi sejarah.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada upaya pelestarian cagar budaya berbasis lintas sektor melalui penetapan cagar budaya; pemanfaatan cagar budaya dengan pelaksanaan event budaya/pariwisata di kawasan cagar budaya; serta peningkatan kapasitas tenaga pelestari cagar budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas museum melalui peningkatan pengelolaan permuseuman dan revitalisasi sarana prasarana kebudayaan.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui koordinasi antar *stakeholder*; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan; peningkatan sarpras perpustakaan.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui penyadaran masyarakat dalam pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno; alih media naskah kuno.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi, Perangkat Daerah, LKD Kabupaten/Kota; pelestarian arsip sebagai memori kolektif bangsa dan peningkatan kualitas layanan kearsipan melalui penguatan pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip antara lain melalui peningkatan penyadaran pemusnahan arsip masa retensi habis bagi perangkat daerah; pemetaan kerjasama dengan *stakeholder* yang aktif dalam penanggulangan bencana guna proses penyelamatan dan pemulihan arsip; penyelamatan arsip melalui alih media arsip.

6.2.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir melalui pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan; penanaman bibit mangrove; penenggelaman terumbu karang buatan; penanaman lamun; pemberdayaan masyarakat pesisir melalui fasilitasi prasarana dan sarana usaha sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional di Jawa Tengah.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; fasilitasi alat penangkapan ikan dengan sasaran masyarakat miskin; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha

perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dukungan penyaluran BBM bersubsidi; gerai perizinan kapal perikanan; serta kerjasama dengan sekolah kejuruan perikanan untuk regenerasi nelayan.

c. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; revitalisasi prasarana dan sarana loka budidaya; pengembangan kawasan budidaya; fasilitasi prasarana budidaya ikan yang fokus pada sasaran penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan *ekstrem*); inisiasi produksi perikanan mandiri bagi pelaku usaha perikanan; dan penanganan hama penyakit ikan.

d. **Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

e. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Jawa Tengah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) yang fokus pada sasaran penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate* of *analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; serta penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan daya tarik wisata unggulan; penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta pengembangan desa wisata.

b. **Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar

negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

c. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

d. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini oleh Dinas Pertanian dan Peternakan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas melalui fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, intervensi benih, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga, asuransi petani, pembentukan *food estate*, revitalisasi kebun benih, pengembangan *urban farming,* dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian; serta pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aset balai dan program padat karya. Program ini juga diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan mutu genetik, pengembangan kawasan sumber bibit (SDGH), review masterplan kawasan peternakan, penguatan korporasi, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), fasilitasi *good farming practices* (GFP), pengendalian pemotongan hewan betina produktif dan revitalisasi balai budidaya dan pembibitan ternak.

b. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, optimasi lahan, fasilitasi pupuk dan dukungan penyaluran pupuk bersubsidi-Program ini juga diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan dan P3KE melalui program Banter Melaju, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, serta fasilitasi inovasi peternakan.

c. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV), pengawasan jumlah ternak yang diberikan rekomendasi keluar masuk Jawa Tengah, serta perbaikan pola konsumsi dan gizi keluarga rawan *stunting*.

d. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. **Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan yang diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani termasuk petani milenial, pelatihan/pendampingan petani tembakau, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh. Program ini juga diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

4. Kehutanan

Rencana program prioritas urusan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pengelolaan Hutan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan hutan produksi; penataan/registrasi hutan rakyat, rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan negara yang terdiri dari penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL), pembangunan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pembinaan dan/atau pengawasan rehabilitasi hutan dan lahan; pelaksanaan perlindungan hutan; pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu; perencanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun, pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; perbenihan tanaman hutan.

b. **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) provinsi; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) untuk kewenangan provinsi melalui pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES; pengelolaan kawasan bernilai

ekosistem penting melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan provinsi.

c. **Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan, penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan usaha perhutanan sosial.

d. **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS, serta gerakan rehabilitasi/pemulihan kapasitas daya dukung DAS.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan konservasi air tanah melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi nilai perolehan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah; sinergi dengan *stakeholder* lainnya dalam Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah, dan monitoring terjadinya *Land Subsidence*/amblesan tanah; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah dengan mendorong pembangunan infrastruktur geologi dan konservasi air tanah; penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi; serta melakukan evaluasi terhadap zona konservasi air tanah pada CAT yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya program ini juga ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi warisan geologi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2026 akan dilaksanakan pendampingan dalam penetapan *Geoheritage*, Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko akibat bencana geologi (*geological hazard*).

b. **Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**

Program ini diarahkan pada peningkatan transformasi tata kelola kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan *good mining practice* melalui sosialisasi regulasi terkait petunjuk teknis pengelolaan pertambangan di Jawa Tengah dengan muatan lokal kebijakan Jawa Tengah; pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *updating* sistem SILUP (Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan); pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*; penertiban kegiatan PETI

(Pertambangan Tanpa Izin) dengan pelaksanaan Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah; Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; peningkatan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penetapan harga patokan mineral serta pengendalian; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan konservasi energi dan transisi energi daerah dengan meningkatkan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi berbasis potensi lokal melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan biogas, Pompa Air Tenaga Surya (PATS), dan PLTS Atap; meningkatkan akses energi terutama EBT bagi masyarakat antara lain pada kelompok tani, dan pondok pesantren, monitoring tingkat pemanfaatan energi di Jawa Tengah melalui kegiatan evaluasi bauran energi Jawa Tengah, penyusunan dokumen pemetaan kondisi energi di Jawa Tengah dan pemodelan untuk persiapan evaluasi regulasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED); pengembangan desa mandiri energi melalui penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatkan keandalan pasokan listrik dan meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita. Perwujudan ketahanan energi tersebut melalui pemerataan dan keterjangkauan akses energi listrik untuk masyarakat miskin yang belum berlistrik; evaluasi regulasi dan/atau kebijakan ketenagalistrikan daerah; ~~serta~~. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; koordinasi K2 bersama *stakeholder* terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat~~.~~

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, pemetaan dan pengembangan potensi desa ekspor melalui pelatihan, perluasan jejaring promosi dan kerja sama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui asilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan fasilitasi sarana prasarana perdagangan bagi pelaku usaha perdagangan d Jawa Tengah.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM), serta fasilitasi standarisasi industri seperti SNI, HKI, Halal, GMP, TKDN, green industry dan teknologi industri.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan non agro.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, Izin Usaha Kawasan Industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, jemput bola pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.

6.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan dan penguatan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja berbasis kebutuhan kompetensi; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyempurnaan SOTK dan sistem kerja; pemutakhiran standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan implementasi pelayanan publik berbasis teknologi dan kewilayahan; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik berdampak; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama daerah; fasilitasi kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan swasta untuk mendukung alternatif pembiayaan pembangunan; pemetaan potensi kerja sama daerah; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

c. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan kualitas sumber daya pendidikan keagamaan; fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat terkait pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non-pelayanan dasar.

d. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui

kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah non litigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

e. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

f. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan permasalahan pengadaan barang dan jasa.

g. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi dan substansi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

6.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan keselarasan perencanaan daerah dengan nasional; perencanaan daerah berbasis data, hasil evaluasi dan risiko; serta keterhubungan kinerja perangkat daerah dengan kinerja pembangunan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kesesuaian, keselarasan, dan keterhubungan perencanaan lingkup perekonomian dan Sumber Daya Alam; kesesuaian, keselarasan, dan keterhubungan perencanaan lingkup pemerintahan dan Pembangunan Manusia; serta kesesuaian,

keselarasan, dan keterhubungan perencanaan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD, pengamanan aset, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**. Program ini diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen ASN dengan meningkatkan kualitas manajemen ASN melalui upaya pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan formasi, pemetaan dan peningkatan kompetensi ASN, pengisian jabatan ASN sesuai dengan manajemen talenta, peningkatan akurasi data dan kelengkapan dokumen ASN, peningkatan kedisiplinan dan kesejahteraan ASN serta peningkatan kinerja ASN dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial yang komprehensif bagi ASN didukung dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan

inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

6. Penghubung

Rencana program prioritas unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

6.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan, penguatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah, penguatan kapabilitas pengelolaan risiko korupsi dan penerapan strategi pencegahan korupsi, dan penguatan implementasi zona integritas.

6.2.7 Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan dan penguatan peran politik bagi masyarakat, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, penguatan proses demokrasi menuju demokrasi substansial, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat baik individu maupun kelompok, utamanya mendorong Jawa tengah bebas peredaran Narkoba, serta untuk memperkuat toleransi masyarakat Jawa Tengah.

e. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat, serta peningkatan hubungan kerja antarinstansi Pemerintahan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Rekapitulasi rencana kerja program prioritas pada masing-masing urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2.
Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		10.964.914.894.000
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.964.914.894.000
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		3.029.319.802.000
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.028.289.802.000
1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	330.000.000
1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	400.000.000
1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	300.000.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		550.415.014.000
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	547.251.577.000
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.928.215.000
1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	75.000.000
1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.160.222.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		452.602.467.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	48.621.302.000
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	23.013.309.000
1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.770.900.000
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.793.451.000
1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.470.116.000
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	349.789.477.000
1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.146.224.000
1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	997.688.000
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		19.144.323.000
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12.845.000.000
1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.266.323.000
1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.663.000.000
1.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	370.000.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		10.767.690.000
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.432.690.000
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.975.000.000
1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	360.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		199.768.275.000
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.286.000.000
1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200.000.000
1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	74.090.123.000
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	110.594.572.000
1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.397.580.000
1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		11.902.164.000
2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	121.635.000
2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.572.217.000
2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.510.000.000
2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	950.000.000
2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.748.312.000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		4.468.080.000
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.698.800.000
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	770.432.000
2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	328.408.000
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	373.720.000
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	296.720.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		21.183.125.000
2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	13.614.995.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.975.924.000
2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.592.206.000
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		1.200.000.000
2.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	270.000.000
2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	500.000.000
2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	430.000.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		2.224.600.000
2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000
2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	965.614.000
2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	158.986.000
2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.000.000
2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	400.000.000
2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000
2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000
2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	245.000.000
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		205.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	70.000.000
2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	60.000.000
2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	75.000.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		5.058.540.000
2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	155.000.000
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.033.540.000
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.870.000.000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		727.020.000
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	160.000.000
2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	389.667.000
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	177.353.000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		138.755.679.000
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	136.438.696.000
2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	716.983.000
2.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.600.000.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		58.086.829.000
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.345.000.000
2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	42.741.829.000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		5.844.070.000
2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	938.680.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	195.000.000
2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	577.000.000
2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	855.000.000
2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.278.390.000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		3.532.154.000
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	667.200.000
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.514.954.000
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	790.000.000
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	350.000.000
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	210.000.000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		112.409.700.000
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.965.000.000
2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100.444.700.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		740.000.000
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	740.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		1.783.800.000
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.783.800.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		27.680.000.000
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	22.675.000.000
2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.750.000.000
2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.205.000.000
2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.900.000.000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		1.572.289.000
2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.469.708.000
2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	102.581.000
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		617.892.000
2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	597.827.000
2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20.065.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		25.905.836.000
3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.381.911.000
3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.248.576.000
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12.612.050.000
3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.663.227.000
3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.000.072.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		17.077.675.000
3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.525.625.000
3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	8.652.050.000
3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	850.000.000
3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.050.000.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		400.962.343.000
3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	159.281.528.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	178.234.000.000
3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.637.563.000
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.850.000.000
3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	52.959.252.000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		3.282.737.000
3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.676.375.000
3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	191.362.000
3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	300.000.000
3.28.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	115.000.000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		6.268.532.000
3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	923.631.000
3.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.077.356.000
3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.135.551.000
3.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.131.994.000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		43.760.600.000
3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	70.000.000
3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	200.000.000
3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	33.550.000.000
3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.150.000.000
3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	999.054.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	6.791.546.000
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		11.323.146.000
3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.761.146.000
3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	502.000.000
3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.000.000
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		150.000.000
3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		427.000.853.000
4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.410.458.000
4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.919.557.000
4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	411.638.757.000
4.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.856.000.000
4.01.06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.640.000.000
4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.781.081.000
4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.755.000.000
4.02	SEKRETARIAT DPRD		336.517.695.000
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	336.517.695.000
5.01	PERENCANAAN		10.085.000.000
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.850.000.000
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.235.000.000
5.02	KEUANGAN		6.891.636.940.000
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.857.812.348.000
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.815.905.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	31.008.687.000
5.03	KEPEGAWAIAN		5.871.840.000
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.871.840.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		26.892.349.000
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26.892.349.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		3.379.000.000
5.05.03		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	3.379.000.000
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG		4.732.269.000
5.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.732.269.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		6.492.766.000
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.568.089.000
6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.924.677.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		310.151.273.000
8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.608.336.000
8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	61.299.273.000
8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	36.626.664.000
8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.373.400.000
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	207.243.600.000
		TOTAL	**24.156.414.261.000**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja	Perangkat Daerah Koordinator
			2024 (R)	2025 (T)	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Kemiskinan	%	9,58	9,66-9,00	8,70-8,53	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	91,28	91,50	92,00	Sekretariat Daerah
3	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,47	80,97	80,97	Sekretariat Daerah
4	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	85,84	85,81 – 89,07	86,46 - 89,50	Sekretariat Daerah
5	Otonomi Fiskal Daerah	%	66,91	63,56	65,72	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	4,80 - 5,60	5,00 - 6,00	Sekretariat Daerah
7	Indeks Modal Manusia	Angka	0,59	0,62	0,62	Sekretariat Daerah
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27	Sekretariat Daerah

7.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Indikator kinerja daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
A	**Aspek Geografi dan Demografi**				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup[1)4)]	Angka	69,46	75,68	75,73
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK[1)]	%	n/a	0,32	5,32
3	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah[1)3)]	Angka	n/a	0,482	0,487
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman [1)3)]	%	9,72	12,5	17,83
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah [1)3)]	%	n/a	22,00	23,00
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah[1)]	% RT	n/a	25,00	29,00
7	Konsumsi Listrik per Kapita[1)3)]	kWh/ Kapita	802,05	826,11	883,94
8	Intensitas Energi Primer[1)3)]	SBM/Rp miliar	n/a	212,71	203,21
9	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) [1)3)]	%	8,63	8,23	7,83
10	Indeks Ketahanan Pangan [1)3)]	Angka	85,34	85,47	85,60
11	Kapasitas Air Baku[1)]	m^3/detik	5,20	5,20	5,82
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan [1)3)]	%	n/a	39,46	42,60
13	Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampungan Air Kewenangan Provinsi[1)]	%	64,31	64,31	58,97
14	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi [1)3)]	Angka	67,50	68,45	70,14
15	Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi [1)3)]	%	52,37	52,38	52,38
16	Indeks Risiko Bencana [1)3)]	Angka	99,61	96,18	94,75
17	Persentase Penurunan Emisi GRK[1)]				
	- Kumulatif	%	n/a	5,65	6,57
	- Tahunan	%	n/a	12,35	15,84
B	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**				
1	Tingkat Kemiskinan[1)]	%	9,58	9,66 - 9,00	8,70 - 8,53
2	PDRB per Kapita[1)]	Juta Rp	47,97	49,3 - 51,1	52,0 - 55,7
3	Pertumbuhan Ekonomi[1)]	%	4,95	4,80 - 5,60	5,00 - 6,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka[1)]	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27
5	Rasio Gini[1)]	Angka	0,364	0,362 - 0,367	0,351 - 0,361
6	Indeks Modal Manusia[1)]	Angka	0,59	0,62	0,62
7	Usia Harapan Hidup (UHH) [1)3)]	Tahun	74,93	75,24	75,46
8	Angka Kematian Ibu [1)3)4)]	per 100.000 KH	74,70	79,31	78,27
9	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita [1)3)4)]	%	17,10	17,00	17,00
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) [1)]	%	90,00	95,00	95,00
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) [1)]	%	86,00	90,00	91,00

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional [1)3)]	%	98,83	99,03	99,23
13	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca[1)]	%	85,71	85,71 - 88,57	87,86 - 90,71
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi[1)]	%	20,00	28,57 - 34,29	34,29 - 39,29
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca[1)]	%	68,50	71,28 - 73,78	72,49 - 74,99
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi[1)]	%	62,69	64,75 - 67,25	65,65 - 68,15
17	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun[1)]	Tahun	8,47	8,58 - 8,60	8,69 - 8,71
18	Harapan Lama Sekolah [1)3)]	Tahun	12,86	12,97 - 13,00	13,03 - 13,06
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi[1)]	%	7,82	8,18	8,43
20	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi [1)3)]	%	61,60	66,89	67,71
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi [1)3)]	%	38,59	47,56	51,03
22	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal [1)3)]	%	14,24	20,00	21,75
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) [1)3)]	Angka	60,89 (2023)	62,31	62,86
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga [1)3)]	Angka	74,80	76,10	77,06
25	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) [1)3)4)]	Angka	0,308	0,306	0,304
26	Indeks Kesejahteraan Sosial [2)]	Angka	57,23	57,23	58,81
C	**Aspek Daya Saing Daerah**				
1	Tingkat Inflasi[1)]	%	1,67	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia[1)]	Angka	n/a	57,59	61,40
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan[1)]	%	33,84	33,88 - 34,06	34,65 - 34,83
4	Kontribusi PDRB Provinsi[1)]	%	8,20	8,20	8,20
5	Rasio PDRB Industri Pengolahan[1)]	%	33,84	33,88 - 34,06	34,65-34,83
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum [1)3)]	%	3,56	3,50	3,60
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara [1)3)]	Ribu Orang	99,58	66,81	70,79
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional [1)3)]	%	n/a	12,61	13,08
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi [1)3)]	%	n/a	6,01	6,23
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi [1)3)]	%	n/a	6,01	6,23
11	Rasio Kewirausahaan Daerah [1)3)]	%	n/a	3,21	3,53
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB [1)3)]	%	n/a	2,00	2,16

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
13	*Return on Aset* (RoA) BUMD[1)]	%	n/a	1,44	1,62
14	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal [1)3)]	%	40,36	42,00	44,05
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan [1)3)]	%	61,82	62,49	63,15
16	Kapabilitas Inovasi [1)3)]	Angka	4,64	4,65	4,66
17	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal [2)]	Produk	413.797	557.897	557.267
18	Aset Perbankan Syariah/PDRB [2)]	%	2,85	2,97	3,14
19	Indeks Zakat Nasional (Provinsi) [2)]	Angka	0,59	0,62	0,65
20	Indeks Ekonomi Hijau [1)]	Angka	n/a	43,10	45,57
21	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer [1)3)]	%	18,55	21,32	21,60
22	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi [1)]	Angka	n/a	6,00	6,12
23	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi [1)3)]	Angka	n/a	6,70	6,60
24	Pembentukan Modal Tetap Bruto [1)3)]	% PDRB	30,53	30,55	30,63
25	Ekspor Barang dan Jasa [1)3)]	% PDRB	10,74	10,97	11,12
26	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional[1)]	%	n/a	2,41	2,45
27	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan [1)3)]	%	71,76	72,99	74,54
28	Persentase Desa Mandiri [1)3)]	%	19,59	25,86	27,27
29	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap [1)3)]	%	91,46	93,08	93,12
30	Indeks Pelayanan Transportasi [1)3)]	Angka	6,614	6,660	6,788
31	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang [1)3)]	%	62,29	56,90	63,65
32	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB[1)]	%	1,23	1,38	1,38
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB[1)]	%	40,89	23,66	24,11
34	Aset Dana Pensiun/PDRB[1)]	%	0,39	0,39	0,39
35	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi[1)]	Nilai	3.287.253	3.700.540	3.846.660
36	Total Kredit/PDRB[1)]	%	25,58	23,20	25,14
37	Inklusi Keuangan[1)]	%	75,02	92,06	92,74
D	**Aspek Pelayanan Umum**				
1	Indeks Reformasi Birokrasi [2)]	Angka	91,28	91,50	92,00
2	Indeks Integritas Nasional [1)]	Angka	79,47	80,97	80,97
3	Indeks Demokrasi Indonesia [1)]	Angka	85,84	85,81 – 89,07	86,46 - 89,50
4	Otonomi Fiskal Daerah [2)]	%	66,91	63,56	65,72
5	Kapasitas Institusi [1)]	Angka	4,71	4,72	4,73
6	Indeks Reformasi Hukum [1)3)]	Angka	91,40	91,50	92,00
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik [1)]	Angka	4,42	4,50	4,55
8	Indeks Pelayanan Publik [1)]	Angka	n/a	4,55	4,56
9	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM [1)3)]	Angka	99,80	85,00	86,00
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya[1)]	%	n/a	79,50	79,50

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
11	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah [1)]	Kategori	n/a	n/a	Sedang
12	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah [1)]	Kategori	n/a	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) [1)]	Angka	78,98	79,28 - 79,30	79,65 - 79,69
14	Manajemen Risiko Indeks [2)]	Angka	3,378	3,379	3,380
E	**Indikator Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**				
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar				
I	**Pendidikan**				
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun [3)4)]	%	71,60	72,24	72,88
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas [3)4)]	%	56,70	65,36	74,02
3	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assesment Nasional Untuk Literasi Dan Numerasi [3)6)]	%	61,09	62,95	64,95
4	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK [3)6)]	%	89,88	90,38	90,88
II	**Kesehatan**				
1	Angka Kematian Balita (AKABA) [2)3)]	per 1.000 KH	8,57	8,75	8,66
2	Persentase Penurunan Kasus *Stunting* [2)3)]	%	0,22	0,15	0,15
3	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) [2)3)]	%	n/a	50,00	52,00
4	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) [2)3)]	%	22,80	28,50	34,30
5	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [2)3)]	%	n/a	22,86	28,57
6	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian KLB, Bencana dan Kesehatan Lingkungan [2)3)]	%	n/a	71,00	77,00
7	*Net Death Rate* (NDR) RSUD Dr. Moewardi [3)6)]	permil	46,17	56	55,80
8	*Net Death Rate* (NDR) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo [3)6)]	permil	30,14	30,135	30,13
9	*Net Death Rate* (NDR) RSUD dr. Adhyatma, MPH [3)6)]	permil	33,34	33,20	33,10
10	*Net Death Rate* (NDR) RSUD dr. Rehatta [3)6)]	permil	11,00	10,90	10,80
11	*Net Death Rate* (NDR) RSJD Dr. Amino Gondohutomo [3)6)]	permil	4,07	4,06	4,02
12	*Net Death Rate* (NDR) RSJD dr. Arif Zainudin [3)6)]	permil	3,09	3,05	2,98
13	*Net Death Rate* (NDR) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi [3)6)]	permil	13,19	13,10	13,05
14	*Net Death Rate* (NDR) Rumah Sakit Mata Soepardjo Roestam [3)6)]	permil	33,34	33,20	33,10
15	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana [4)5)]	%	100	100	100

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
16	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi 4)5)	%	100	100	100
III	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
	Persentase Panjang Jaian Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	91,46	72,82	93,61
1	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap 3)6)	%	61,56	63,17	63,71
2	Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor 3)6)	%	47,09	48,18	48,75
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman 3)6)	%	40,86	42,93	41,20*)
4	Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar 3)6)	%	49,42	61,65	72,82
5	Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air 3)6)	%	66,53	67,41	67,76
6	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir 4)	%	22,96	23,81	24,65
7	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 4)	%	100	100	100
IV	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
1	Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan 3)6)	%	63,60	60,58	62,66
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 4)	%	100	100	100
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 4)	%	100	100	100
4	Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani 4)	%	35,87	49,49	14,90
V	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**				
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2)3)	Angka	84,07	85	84,50
2	Skor kinerja penegakan produk hukum daerah 3)6)	Angka	6,09	6,20	6,15
3	Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 3)6)	Angka	13,20	12,60	13,20
4	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah 4)	%	80,00	86,67	85,71
5	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 4)	%	100	100	100
6	Indeks Ketahanan Daerah 2)3)	Angka	0,75	0,76	0,77
7	Persentase penanganan pra bencana4)	%	n/a	100	100
8	Persentase penanganan tanggap darurat bencana 4)	%	n/a	100	100
VI	**Sosial**				

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Populasi PPKS 3)6)	%	10,67	10,13	10,01
2	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Sesuai SPM Bidang Sosial 3)5)	%	100	100	100
3	Persentase Populasi PPKS Fakir Miskin 3)6)	%	9,96	9,60	9,48
4	Persentase PSKS yang Meningkat Kompetensinya Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3)6)	%	n/a	n/a	8,88
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti 4)5)	%	100	100	100
6	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti 4)5)	%	100	100	100
7	Persentase Lansia Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti 4)5)	%	100	100	100
8	Persentase Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti 4)5)	%	100	100	100
9	Persentase korban bencana daerah provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat 4)5)	%	100	100	100
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
I	**Tenaga Kerja**				
1	Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR/*Employment to Population Ratio*) 2)3)	%	70,21	69,06	69,54
2	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja 3)6)	%	73,76	74,07	74,39
3	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten 3)4)	%	9,03	9,54	10,00
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 3)4)	Juta Rp	55,47	56,00	56,40
5	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja 3)4)	%	62,85	68,57	85,71
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 4)	%	19,07	19,25	19,43
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 4)	%	73,76	73,80	73,85
8	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan 4)	%	9,96	10,00	10,51
II	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2)3)4)	Angka	93,44	93,45	93,47
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA) 2)3)	Angka	n/a	65,00	65,35
3	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi 3)4)	%	10,37	11,00	12,00
4	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif 4)	%	100	100	100

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
5	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif [4)]	%	100	100	100
III	**Pangan**				
1	Persentase cadangan pangan [4)]	%	65,43	30,00	31,00
2	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah [3)4)]	Angka	93,60	94,20	94,50
3	Persentase Daerah Rawan Pangan [3)4)]	%	n/a	15,60	14.60
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan [3)4)]	%	n/a	90,00	90,10
IV	**Pertanahan**				
1	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum [3)6)]	%	100	100	100
2	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi [3)6)]	%	100	100	55,50
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan [4)]	%	100	100	100
4	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu [4)]	%	100	100	100
V	**Lingkungan Hidup**				
1	Indeks Kualitas Air (IKA) [2)3)]	Angka	52,03	68,71	68,82
2	Indeks Kualitas Udara (IKU) [2)3)]	Angka	87,73	84,91	84,93
3	Indeks SO2 dan NO2 [2)3)]	Angka	0,32	0,3238	0,3234
4	Indeks Pencemaran Air [2)3)]	Angka	3,35	3,35	3,34
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi [4)]	%	53,85	50,00	50,00
VI	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
1	Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah [3)6)]	Angka	60,85	85,00	85,50
2	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah [3)6)]	%	60,85	86,30	86,53
VII	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
1	Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Jawa Tengah [3)6)]	%	n/a	5,93	11,69
VIII	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
1	*Total Fertility Rate* (TFR) [2)3)4)]	Angka	2,03	2,10	2,10
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) [2)3)4)]	Angka	63,90	64,25	64,50
3	Persentase *Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR [2)3)4)]	%	69,46	69,50	69,75
4	*Unmetneed* KB [2)3)4)]	%	7,79	9,50	9,25
5	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR) [2)3)4)]	Per 1000 WUS 15-19 Tahun	17,30	17,00	16,00
IX	**Perhubungan**				
1	Rasio Konektivitas Provinsi [3)6)]	Angka	0,264	0,274	0,302
2	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi [3)6)]	%	99,9830	99,9836	99,9838

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi 3)4)	%	5.78	6.36	6.94
4	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah 3)4)	%	97,981	98,01	98,03
X	**Komunikasi dan Informatika**				
1	Indeks Pemerintahan Digital 2)3)	Angka	n/a	2,00	2,10
XI	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB 3)6)	%	14,90	12,99	13,52
XII	**Penanaman Modal**				
1	Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal 3)4)	%	14,83	10,09	10,13
XIII	**Kepemudaan dan Olahraga**				
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 2)3)	Angka	0,385	0,387	0,389
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 3)4)	Angka	56,43 (2023)	59,00	60,25
XIV	**Statistik**				
1	Indeks Pembangunan Statistik 2)	Angka	2,61	2,61	2,81
XV	**Persandian**				
1	Indeks Keamanan Sandi dan Siber 2)	Angka	n/a	3,58	3,59
XVI	**Kebudayaan**				
1	Angka Melek Budaya 3)	%	52,61	53,82	55,32
XVII	**Perpustakaan**				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 3)4)	Angka	15,14	15,45	42
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) 3)4)	Angka	73,91	75,10	68,50
XVIII	**Kearsipan**				
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah 3)4)	Angka	96,07	96,17	96,27
2	Persentase Arsip Bersejarah yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) 3)6)	%	30,00	40,00	50,00
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (LKD Provinsi) 3)6)	Angka	97,09	97,19	97,29
	Urusan Pilihan				
I	**Kelautan dan Perikanan**				
1	Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan 3)6)	%	1,00	1,00	2,00
2	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi 3)6)	%	0,75	0,79	0,84
3	Produksi Perikanan 3)4)	Ton	968.353,80	952.717,50	954.029
4	Produksi Garam 3)4)	Ton	629.952,95	539.293,69	541.775,75
II	**Pariwisata**				
1	Pengeluaran Wisatawan 3)6)	Rp	7.510.765	7.642.320	8.243.954
2	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif 3)6)	Juta Rp	66.344.465	84.344.465	102.344.465
	Indikator Hasil Rakortek				
1	Rasio PDRB Akomodasi makan minum	%	3,56	3,50	3,60
2	Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	146.257.575	n/a	152.820.000
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	99,58	66,81	70,79

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
4	Tenaga Kerja Pariwisata	orang	n/a	n/a	43.795
III	**Pertanian**				
1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Pertanian 3)6)	%	1,17	1,04	1,05
2	Produksi Tanaman Pangan 3)4)	Ton	12.248.637	12.628.175	12.734.625
3	Produksi Tanaman Hortikultura 3)4)	Ton	1.057.770	873.990	1.073.636***
4	Produksi Tanaman Perkebunan 3)6)	Ton	3.860.443	3.850.670	3.868.006
5	Produksi Ternak 3)4)	Ton	1.908.389	1.922.605	1.936.930
IV	**Kehutanan**				
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL) 2)3)	Angka	48,37	59,46	59,47
2	Luas Tutupan Lahan 2)3)	Ha	1.022.457	1.022.457	1.022.457
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kehutanan 2)3)	%	0,43	0,43	0,43
4	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi 3)4)	%	1,04	0,21	0,78
V	**Energi dan Sumber Daya Mineral**				
1	Indeks Pengelolaan Air Tanah 3)6)	Angka	516	351	360
2	Indeks Ketersediaan Air Tanah 3)6)	Angka	3,65	3,66	3,67
3	Kontribusi PDRB Sektor Pertambangan 3)6)	%	2,19	2,00	2,01
4	Persentase Penerapan *Good Mining Practice* (GMP) 3)6)	%	63,37	63,40	63,50
5	Rasio Ketersediaan Daya Listrik 3)6)	Angka	1,494	1,00	1,00
6	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda 4)	%	100	100	100
7	Rasio Elektrifikasi 2)	%	99,99	99,99	~100
VI	**Perdagangan**				
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan 3)6)	%	4,16	4,20	4,30
2	PDRB Sektor Perdagangan 3)6)	Milyar Rupiah	230.872,97	261.315,00	272.562,00
3	Ekspor barang dan jasa	%	10,74	10,97	11,12
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen 4)	%	100	100	100
VII	**Perindustrian**				
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian 3)6)	%	3,52	3,80	4
2	PDRB Sektor Perindustrian 3)6)	Milyar Rupiah	615.195,96	649.000,00	664.756.150.8
4	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja industri tekstil dan alas kaki 3)6)	%	n/a	0,32	0,32
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 4)	%	100	100	100
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
I	**Sekretariat Daerah**				
1	Indeks Kualitas Kebijakan 3)6)	Angka	66,32	66,35	66,40
II	**Sekretariat DPRD**				
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 3)6)	Angka	90,00	91,00	92,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
I	**Perencanaan**				

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2)3)	Angka	93,89	93,91	94,19
2	Skor Aspek Sinergi dalam IPPN 3)6)	Angka	27,53	27,55	27,75
3	Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN 3)6)	Angka	56,36	56,36	56,44
4	Skor Aspek Keterhubunngan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja 3)6)	Angka	10,00	10,00	10,00
II	**Keuangan**				
1	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3)4)	%	11,64	1,64	5,41
2	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3)6)	%	97,75	97,80	97,85
3	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) 2)3)	Angka	3,24	3,08	3,12
III	**Kepegawaian**				
1	Indeks Sistem Merit 2)3)	Angka	0,86	0,865	0,87
2	Indeks NSPK Manajemen ASN 3)4)	Angka	92,00	92,50	93,00
IV	**Pendidikan dan Pelatihan**				
1	Indeks Kompetensi ASN 3)6)	Angka	3,07	3,08	3,10
V	**Penelitian dan Pengembangan**				
1	Indeks Inovasi Daerah 2)3)	Angka	72,85	73,00	73,50
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti 3)6)	%	100	100	100
VI	**Pengelolaan Penghubung**				
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung 3)6)	Angka	86,00	85,00	86,00
	Unsur Pengawasan				
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi 3)4)	Angka	3,471	3,50	3,52
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 3)4)	Angka	3,02	3,20	3,40
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2)3)	Angka	3,096	3,146	3,196
	Unsur Pemerintahan Umum				
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD 3)6)	Angka	3,01	3,01	3,02
2	Indeks Harmonisasi Indonesia 2)3)	Angka	n/a	6,40	6,50
3	Indeks Ketahanan Politik 3)6)	Angka	3,11	3,11	3,12

Keterangan:
1) IUP RPJPD/Indikator Sasaran Visi RPJPD
2) Indikator Mandatori Lainnya (Indikator mandatori Blue Print Gubernur/Wakil Gubernur, hasil evaluasi Raperda Kemendagri, dan/atau mandatori Pusat lainnya)
3) Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Perangkat Daerah
4) Indikator Kinerja Kunci (IKK)
5) Indikator SPM
6) Indikator Mandiri/Lokal Daerah
**) Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman Tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan target capaian tahun 2025 dikarenakan adanya penyesuaian mendasarkan Surat Direktur Air Minum DJCK Kementerian PU Nomor CK 0501-Ca/131 Tanggal 12 Juni 2025 Perihal Penyampaian Angka Baseline Target Indikator RPJMN Air Minum untuk Provinsi Jawa Tengah: bahwa Jawa Tengah ditargetkan hanya 36,5% pada tahun 2025 bedasarkan perhitungan capaian tahun-tahun sebelumnya oleh Dit. Air Minum DJCK Kementerian PU. Oleh karena itu, dalam rangka sinkronisasi data pusat dan daerah, pendataan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mulai Tahun 2026 perlu mempertimbangkan perhitungan capaian yang dilakukan Dit. Air Minum DJCK Kementerian PU.*
*

7.3. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Indikator kinerja program adalah sebagai berikut.

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	Dinas Pendidikan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	Dinas Pendidikan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran	%	100	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Dinas Wilayah Pendidikan IV	Wilayah Pendidikan IV			
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kesehatan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan	%	94	Dinas Kesehatan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	%	90,5	Dinas Kesehatan - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		daerah di Dinas Kesehatan	perangkat daerah Dinas Kesehatan			
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelatihan Kesehatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD Dr.Moewardi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi	%	100	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD Dr.MOEWARDI	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Dr. Moewardi	%	82,2	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	91	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
		Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit di	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD	%	49,27	RSUD dr. ADHYATMA,

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		RSUD dr. ADHYATMA, MPH	dr. ADHYATMA, MPH			MPH - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
		Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. REHATTA	%	52	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD dr. REHATTA	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA	%	100	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	37	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	33,01	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	40,88	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Jasa Konstruksi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Jasa Konstruksi	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI JASA KONSTRUKSI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SEMARANG
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Pemali Comal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Jratun Seluna	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Bengawan Solo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum,kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Sosial	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	Dinas Sosial - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Sosial	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	Dinas Sosial - Sekretariat
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	87	Dinas Ketahanan Pangan - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		daerah di Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan			
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	%	90	Dinas Ketahanan Pangan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	%	87	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK IV	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IV	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK V	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VIII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK IX	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK X	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Kebun Raya Baturraden	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK XI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	Dinas Perhubungan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	Dinas Perhubungan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	79,5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di UPT Pusat Data	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data	%	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - UPT Pusat Data
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaa n Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	86	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	%	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Perikanan Pantai Asemdoyong	Perikanan Pantai Asemdoyong			Asemdoyong Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Juwana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	86	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Taman Budaya Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah	%	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	%	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelatihan Pertanian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Pembibitan Ternak Jawa Tengah	Ternak Jawa Tengah			Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Wilayah Slamet Utara				
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Industri Logam Dan Kayu (BILK)	Logam Dan Kayu (BILK)			Kayu (BILK) Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Hukum	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Perekonomian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, dan kepegawaian Perangkat Daerah di Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO UMUM
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO UMUM
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO UMUM
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan keuangan perangkat daerah di Sekretariat DPRD	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	Sekretariat DPRD - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah di Sekretariat DPRD	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	Sekretariat DPRD - Bagian Umum
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	90	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Semarang I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Semarang II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Semarang III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Ungaran	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Salatiga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kendal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Demak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		keuangan perangkat daerah di UPPD Purwodadi	perangkat daerah UPPD Purwodadi			Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Klaten	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Sragen	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Sukoharjo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Wonogiri	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Karanganyar	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Boyolali	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Blora	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		daerah di UPPD Rembang	perangkat daerah UPPD Rembang			Pendapatan Daerah Rembang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kudus	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Jepara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Pekalongan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kajen	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Batang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Pemalang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Tegal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Slawi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Brebes	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purwokerto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Cilacap	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purbalingga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Banjarnegara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Mungkid	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kebumen	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purworejo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Temanggung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Wonosobo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan dan Aset Daerah			
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	%	81,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	Badan Kepegawaian Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	Badan Kepegawaian Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Unit Penilaian Kompetensi ASN	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN	%	100	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat	%	96	Badan Penghubung - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		daerah di Badan Penghubung	daerah Badan Penghubung			
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Penghubung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung	%	100	Badan Penghubung - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di INSPEKTORAT	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah INSPEKTORAT	%	100	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di INSPEKTORAT	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT	%	100	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Sekretariat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
		Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah tingkat SMA	APK SMA	%	30,32	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan tingkat SMA	Angka Putus Sekolah SMA	Angka	0,011	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA
		Meningkatnya karakter siswa tingkat SMA	Persentase Prestasi Lomba SMA Tingkat Nasional	%	35,89	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tingkat SMA	Nilai Kualitas Pembelajaran SMA	Angka	64,45	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA
		Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah tingkat SMK	APK SMK	%	53,75	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan tingkat SMK	Angka Putus Sekolah SMK	Angka	0,026	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya karakter siswa tingkat SMK	Persentase Prestasi Lomba SMK Tingkat Nasional	%	57	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tingkat SMK	Nilai Kualitas Pembelajaran SMK	Angka	60,86	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
		Meningkatnya relevansi pendidikan menengah kejuruan	Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja	Angka	67,77	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
		Meningkatnya pemerataan pendidikan khusus	APK SLB	%	91,74	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan khusus	Angka Putus Sekolah SLB	Angka	0,043	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus
		Meningkatnya karakter siswa pendidikan khusus	Persentase Prestasi Lomba SLB Tingkat Nasional	%	54,05	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan khusus	Nilai Kualitas Pembelajaran SLB	Angka	65,61	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus
		Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SMA Bersertifikat Kompetensi	%	76,84	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	%	62,13	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SLB Bersertifikat Kompetensi	%	57,72	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya kompetensi guru berlisensi	Persentase Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian	%	1,74	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya digitalisasi pendidikan	Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan	%	25	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi	%	76,67	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Wilayah Pendidikan I	Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I			WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	65,71	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	65,21	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	83,1	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	73,3	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	83,8	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	77,9	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	70,89	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	74,41	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	70,5	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi	%	76,39	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Wilayah Pendidikan III	Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III			WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	50,5	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	70,56	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	73,33	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	60,1	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	79	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	73,33	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	89,9	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68,2	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	83,05	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi	%	68,49	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Wilayah Pendidikan VI	Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI			WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	70,34	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	86,2	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	68,28	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	81,8	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	76,3	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	79,3	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	88,15	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	69,17	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya kualitas sarpras Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	67,59	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	79,13	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	77,52	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya keterjangkauan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	71,15	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	65,78	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	79,25	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	43,33	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	83,72	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	80,41	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	80,15	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	70	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	75	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	75	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	75	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	55	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
		Meningkatnya distribusi pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SMA dan SMK	Angka	0,43	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	94	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	74,2	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	70,36	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	2,57	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	75,2	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	75,2	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	35	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	35	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	12,4	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	17,4	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68,7	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	70,8	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	25	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	60	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	25	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	60	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	25	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	60	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	50	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	50	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	85	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	54,28	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000/KH	7,5	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	77	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Prevalensi wasting balita	%	6,7	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas pelayanan kesehatan Primer dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar	%	51,19	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer terakreditasi paripurna	%	85,71	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu	%	37,14	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	%	40	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%	95	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	%	91	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Insidensi Human Immunodeficiency Virus (HIV)	%	8	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria	Kabupaten/Kota	35	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Neglected Tropical Diseases (Pengendalian Kasus Filariasis dan Kusta)	Kabupaten/Kota	20	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Angka kematian Dengue	%	0,5	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Insidensi Hepatitis B	%	1,1	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	35	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan	Persentase Diabetes Melitus terkendali (DM Terkendali)	%	35	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		surveilans kesehatan				
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	%	14,4	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	%	25,71	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok	%	100	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana	%	50	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	25	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	8,57	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan	%	50	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit mencapai Case Fatality Rate Direct Obstetric (eklampsi dan perdarahan) < 1%	%	68,57	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar	%	41,27	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan terakreditasi paripurna	%	57,14	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	%	74,28	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	85	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	63,05	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Masyarakat Wilayah Ambarawa	(PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%			
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase mutu layanan Balkesmas Wilayah Ambarawa sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang yang melaksanakan skrining Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak	%	71,42	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Balkesmas Magelang	Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%			
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase Kabupaten Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Presentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan skrining Kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan	%	57,14	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			cakupan minimal 50%			
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase Kabupatan/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten sesuai standar	%	60	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	71,42	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	20	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan kejadian luar biasa/wabah serta penanganan bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati dengan posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya mutu layanan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	Persentase Kabupaten/Kota dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	%	54	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
		Meningkatnya mutu layanan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	Persentase mutu layanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sesuai standar	%	72	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
		Meningkatnya mutu layanan kalibrasi di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi diBalai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan	%	25	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
		Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
		Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	60	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/alat penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	60	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar	%	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
		Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	2,85	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan pelatihan sesuai Program Prioritas Nasional di Bapelkes Provinsi	Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang teregestrasi dan berkualitas	%	99	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	30	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
		Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	91	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
		Meningkatnya kabupaten/kota yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat	%	34,28	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masayarakat di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	5,24	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	10	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dari Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Tercapainya Penyusunan Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDA terhadap kebutuhan Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA TEKNIK
		Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	58,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
		Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	%	68,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
		Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi	m3	2688058,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
		Meningkatnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	%	52,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Angka	65,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	35,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Terjaganya kondisi sungai kewenangan Provinsi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						PEMALI COMAL
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Angka	69,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	56,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Terjaganya kondisi sungai kewenangan Provinsi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	50,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Angka	69,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	%	67,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Angka	75,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAA

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto				N SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	%	76,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
		Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
		Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
		Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	31,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
		Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	42,6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
		Terselenggaranya Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS) yang terbangun	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kapasitas akses air limbah domestik	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
		Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
		Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA MARGA
		Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	Km	1189,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA MARGA
		Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA TEKNIK
		Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan yang Dileger	%	59,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA TEKNIK
		Terpenuhinya ketersediaan peralatan alat berat pendukung kegiatan perangkat daerah yang disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan	%	99,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
		Terpenuhinya jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi dalam satu tahun terhadap jumlah kumulatif sertifikat hasil uji tahun rencana	Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi	%	19,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	94,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SEMARANG
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	64,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SEMARANG
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	92,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	70,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	91,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	50,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	92,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	65,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	94,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						WILAYAH MAGELANG
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	73,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	94,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	59,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	95,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	75,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	95,7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	59,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
		Terselenggaranya Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi	%	49,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI JASA KONSTRUKSI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
		Meningkatnya Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Pelaksanaan Sinkronisasi Program	Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program	%	58,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	%	42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	%	39,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Jratun Seluna	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
		Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	16,9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
		Tersedianya Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	%	0,47	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
		Tertangannya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	14,9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
		Terlaksananya Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan	%	7,69	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
		Terlaksananya Pembinaan kepada Orang/ Badan Hukum dalam rangka Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	%	6,84	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
		Meningkatnya pengendalian Tibumtranmas di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	Persentase Pengendalian Tibumtranmas	%	80,71	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		Meningkatnya penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	%	85,71	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Penegakan Hukum Daerah
		Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas berkategori baik	%	8,57	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Pelindungan Masyarakat
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
		Meningkatnya kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	%	6,8	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Meningkatnya kapasitas sistem informasi dan data kebencanaaan	Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam	%	90	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pengendalian Operasi dan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Pengelolaan Data Informasi
		Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam pemulihan pasca bencana	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana	%	100	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota dalam penanganan bencana	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana	%	100	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
		Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	Persantase Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	%	29	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Penanganan Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
		Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas bagi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	%	8,88	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
		Terfasilitasinya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti	%	100	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosia di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra			
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
		Terfasilitasinya penerbitan rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak	%	100	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		Terselenggarannya jaminan sosial bagi PPKS yang layak dan tepat sasaran	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial	%	100	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya kemampuan PPKS Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhannya	Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	%	0,27	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
		Terselenggaranya perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai standar SPM bidang sosial	Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
		Taman makam pahlawan terkelola dengan baik	Persentase Taman makam pahlawan terkelola	%	100	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
		Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	85,71	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
		Meningkatnya pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	9,28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya lembaga pelatihan yang terakreditasi	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	14,29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	%	83,68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	%	73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	23,38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
		Meningkatnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	44,05	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya tenaga kerja baru di sektor informal	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%	68,5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	21,75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	67,71	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
		Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	51,03	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya LKS Bipartit yang terbentuk	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	43,26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96,75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
		Menurunnya pelanggaran norma ketenagakerjaan	Persentase kejadian pelanggaran	%	80,8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			norma ketenagakerjaan			Pengawasan Ketenagakerja an
		Meningkatnya perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	27,06	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK						
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi	%	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
		Meningkatnya Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	%	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
		Meningkatnya jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	%	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
		Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan secara komprehensif	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
		Meningkatnya komitmen Kabupaten/Kota dalam pembangunan ketahanan keluarga	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
		Meningkatnya kualitas lembaga Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak di Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	%	24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
		Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Angka	61,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
		Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya pelayanan korban kekerasan anak secara komprehensif	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
		Tercapaianya rata-rata angka ketersediaan pangan	Rata-rata Ketersediaan Pangan	Angka	1,21	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
		Terjaganya cadangan pangan pemerintah daerah sesuai regulasi	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)	Angka	0,47	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
		Terwujudnya Harga Efektif komoditas pangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	62,5	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
		Menurunnya Angka Konsumsi Beras di Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita /tahun	87,3	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
		Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	14,6	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
		Meningkatnya pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90,1	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan
		Terjaminnya pangan segar asal tumbuhan melalui sertifikasi dan registrasi	Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar	%	40	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					
		Terfasilitasinya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
		Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
		Terfasilitasinya Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
		Meningkatnya integrasi dokumen perencanaan lingkungan hidup ke dalam dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4,76	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Menurunnya emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	%	3,26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan hidup	Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	0,4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Terkelolanya keanekaragaman hayati di Kebun Raya Baturraden	Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden	%	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
		Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	%	80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
		Meningkatnya pembinaan terhadap persetujuan lingkungan	Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	57	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
		Meningkatnya penyelesaian aduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	%	63	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
		Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	99,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
		Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	99,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
		Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan data kependudukan di Jawa Tengah	Persentase Institusi/Lembaga / Badan Hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
		Meningkatnya Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi	%	57,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)			dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
		Meningkatnya fasilitasi evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Penataan dan Regulasi Desa
		Meningkatnya fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Bina Pemerintahan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
		Meningkatnya BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	45,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa
		Meningkatnya fasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya di Jawa Tengah	Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatanny a	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Lembaga Kemasyarakat an dan Partisipasi Masyarakat
		Meningkatnya fasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Lembaga Kemasyarakat an dan Partisipasi Masyarakat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
		Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mengintregasikan GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan	Persentase kabupaten/kota yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	%	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
		Meningkatnya kesertaan KB	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	69,48	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
		Meningkatnya kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutan	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	%	6,94	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan
		Meningkatnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	%	98,03	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan
		Meningkatnya jaringan trayek angkutan jalan	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Angka	46,74	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
		Meningkatnya penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru yang menggunakan angkutan umum	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	69,85	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
		Meningkatnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	%	70,14	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
		Meningkatnya total implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	%	52,95	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	22,04	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	57,12	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3,99	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	86,2	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	45,11	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	81,84	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	8,04	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	%	92,83	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			Perhubungan Wilayah IV Kelas A			
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	43,53	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	87,09	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	28,16	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	88,66	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		Meningkatnya Jumlah Penduduk Terlayani (Trans Jateng)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	%	4,42	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Angka	0,472	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
		Meningkatnya perlintasan sebidang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar	Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	%	28	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
		Meningkatnya Kualitas Informasi Publik	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	Angka	85	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
		Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Tingkat Pemenuhan Layanan Digital	%	25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Infrastruktur Teknologi Digital
		Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Pemerintahan Digital	Tingkat Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	%	12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital
		Meningkatnya Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	%	65	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - UPT Pusat Data
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
		Meningkatnya koperasi berkualitas tingkat provinsi	Persentase Koperasi Berkualitas	%	27,1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
		Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	%	91	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaa n Kelas A
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
		Meningkatnya jumlah koperasi provinsi produktif	Persentase Koperasi Produktif	%	53,3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Bina Usaha Koperasi
	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
		Meningkatnya Pelaku Usaha yang dibantu buruh tetap	Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	%	17,15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM
		Meningkatnya kualitas SDM UMKM	Persentase SDM UMKM yang berkualitas	%	91	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaa n Kelas A
		Meningkatnya kualitas SDM Wirausaha	Persentase Wirausaha yang berkualitas	%	85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaa n Kelas A
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
		Meningkatnya jumlah UMKM Non Pertanian yang mengalami Peningkatan Usaha	Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	%	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
		Meningkatnya kualitas bahan promosi penanaman modal yang dipublikasikan	Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan	%	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
		Meningkatnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang berkualitas	Persentase kepeminatan yang terealisasi	%	62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
		Meningkatnya penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	91,5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
		Meningkatnya kualitas standar layanan dan penyelesaian pengaduan	Persentase standar pelayanan yang ditetapkan	%	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
		Meningkatnya pengawasan penanaman modal	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
		Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	%	8,6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan
		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	%	80,6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan
		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan	%	20,85	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
		Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	%	10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%	79	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		Meningkatnya Tingkat Kebugaran Masyarakat	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	%	0,34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya prestasi olahraga pelajar tingkat nasional/ internasional	Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%	79	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
		Meningkatnya kematangan SDI tingkat provinsi	Indeks Satu Data Indonesia	Indeks	86	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Angka	3,59	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
		Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional	%	26,1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
		Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan & pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna	%	27,11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
		Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek	Persentase kesenian/tradisi budaya yang dilestarikan	%	72	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif -

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Pemajuan Kebudayaan di Taman Budaya Jawa Tengah				Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
		Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga Kesenian	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	1,12	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
		Meningkatnya pelindungan dan pengembangan tradisi dan kesejarahan	Persentase literasi kesejarahan dan tradisi	%	53,55	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
		Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional	%	13,6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
		Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berdayaguna	%	16,12	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
		Meningkatnya Tata Kelola Layanan Museum	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar	Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional	%	45,27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Nasional Perpustakaan	Perpustakaan (SNP)			
		Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
		Meningkatnya koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	%	9,43	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi, Perangkat Daerah dan LKD Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	44,74	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
		Meningkatnya Kelestarian Arsip Statis sebagai Memori Kolektif Bangsa	Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	%	79,15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	%	66,67	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pemulihan arsip akibat bencana	%	20,34	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan arsip	%	11,4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			yang diselamatkan melalui alih media			Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
		Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat dan Lahan Kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang Difasilitasi Teknologi	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	%	50,17	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Meningkatnya Dokumen IKRL (Informasi Kesesuaian Ruang Laut) yang Diterbitkan	Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	%	25	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	0,07	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	0,16	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	0,19	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	354029	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Tegalsari Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Asemdoyong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			Perikanan Pantai Asemdoyong			Pantai Asemdoyong Kelas B
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan PPP Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Morodemak Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	91	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Karimunjawa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Lohgending Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Penanganan Hama, Penyakit Ikan dan lingkungan	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
		Meningkatnya Produksi Ikan Konsumsi	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	%	5	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	600000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	%	70	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	17	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	72	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di	Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di WIlayah Kerja	%	61	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur			Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	17	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
		Meningkatnya dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita /tahun	17,71	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
		Meningkatnya daya tarik pada destinasi pariwisata pada setiap wilayah pengembangan (WP)	Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	75348282	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pemasaran Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
		Meningkatnya Kabupaten/Kota yang Ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Jumlah Kabupaten/Kota yang DItetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Kabupaten/Kota	1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Ekonomi Kreatif
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
		Meningkatnya SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi	%	3,3	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
		Meningkatnya SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi	%	4,3	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi	Ton	9380811	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Jagung	Ton	3301024	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Kedelai	Ton	52790	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Bawang Merah	Ton	617015	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Cabai	Ton	456621	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat	Ton	392201	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kopi	Ton	26875	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tebu	Ton	3674236	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kelapa	Ton	166955	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
		Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	6135083	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Peternakan
		Meningkatnya peredaran obat hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase peredaran obat Hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	%	81	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner
		Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman perkebunan	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman pangan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman hortikultura di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman perkebunan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			Benih Pertanian Wilayah Surakarta			Surakarta Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Meningkatnya Produksi dan Distribusi Semen Beku	Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	%	1	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya produksi ternak ruminansia penghasil susu	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia penghasil susu	%	1	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya produksi ternak non ruminansia penghasil telur	Persentase peningkatan produksi ternak non ruminansia penghasil telur	%	1	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya Pengembangan Mekanisasi dan modernisasi Pertanian	Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi	%	3	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Meningkatnya Pengembangan Mekanisasi dan modernisasi Pertanian	Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
		Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana sarana pertanian	%	1	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana
		Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana peternakan	%	5	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
		Menurunnya jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	%	1	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner
		Meningkatnya Unit Usaha Yang Bersertifikat NKV	Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV	%	30	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Layanan Veteriner	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	%	20	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan	%	10	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan	%	5	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan	%	5	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura	%	10	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura	%	5	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Menguatnya kelembagaan petani	Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi	%	0,2	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
		Menguatnya Kelembagaan Peternak	Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan peternak	%	1,25	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
		Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Pertanian	Persentase SDM pertanian yang dilatih	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
		Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	21,96	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
		Meningkatnya penanganan lahan kritis	Persentase lahan kritis tertangani	%	0,11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Meningkatnya perlindungan hutan	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK I	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK II	Persentase lahan kritis tertangani CDK 2	%	0,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK II	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 2	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK III	Persentase lahan kritis tertangani CDK 3	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK III	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 3	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK IV	Persentase lahan kritis tertangani CDK 4	%	0,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK IV	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 4	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK V	Persentase lahan kritis tertangani CDK 5	%	0,08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK V	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 5	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VI	Persentase lahan kritis tertangani CDK 6	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK VI	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 6	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VIII	Persentase lahan kritis tertangani CDK 8	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK IX	Persentase lahan kritis tertangani CDK 9	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK IX	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 9	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK X	Persentase lahan kritis tertangani CDK 10	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK X	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			(gukamhut) yang ditangani CDK 10			CDK WILAYAH X
		Meningkatnya bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK XI	Persentase lahan kritis tertangani CDK 11	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK XI	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 11	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VII	Persentase lahan kritis tertangani CDK 7	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK VII	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 7	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
		Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Terkelolanya Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan	Angka	73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Terselenggaranya konservasi sumberdaya alam hayati dan eksosistemnya	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2,5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK I	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 1	%	0,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK II	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 2	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK III	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 3	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK IV	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 4	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK V	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 5	%	0,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VI	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 6	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VIII	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 8	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK IX	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 9	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK X	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 10	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK XI	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 11	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VII	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 7	%	0,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
		Terkelolanya Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
		Menurunnya pengambilan air tanah di Jawa Tengah	Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah	%	27,58	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Solo	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	2,98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Kendeng Muria	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3,3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Utara	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1,58	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1,98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Menurunnya pengambilan air	Persentase pengambilan air	%	3,95	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral -

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		tanah di Wilayah Slamet Utara	tanah Wilayah Slamet Utara			Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2,27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Slamet Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2,6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Terpenuhinya pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Semarang - Demak	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	6,99	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Merapi	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2,65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Tengah	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1,49	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral -

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan			Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Slamet Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Terpenuhinya pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang - Demak	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	972,99	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	179,64	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	26,08	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	144,05	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	57,95	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	45,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	98,93	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	165,42	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang - Demak	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak	SBM	127,91	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	28,97	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	98,93	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	43,02	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Ketenagalistrik an
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	%	43,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Kendeng Muria	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria	%	43,13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Serayu Utara	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara	%	43,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Serayu Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan	%	43,13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Slamet Utara	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara	%	43,07	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	%	43,1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	%	43,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	%	42,31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	%	43,03	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	%	43,07	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
		Meningkatnya jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA Jawa Tengah	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	%	9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	%	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
		Terjaganya stabilisasi harga dan stok barang di pasar	Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau	%	0,52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
		Meningkatnya Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB ADHB	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	11,12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
		Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	%	1,05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		Meningkatnya layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
		Meningkatnya nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
		Meningkatnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha indutri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	%	6,23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pemberdayaan Industri
		Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi indutri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	2,41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri
		Meningkatnya pelayanan sektor industri	Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	%	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
		Meningkatnya pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
		Meningkatnya peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	86	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
		Meningkatnya Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan	Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
		Meningkatnya industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
		Meningkatnya penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	%	2,06	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya pelatihan transmigrasi terhadap penempatan transmigrasi	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	1,2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya	%	71	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			dalam kategori tinggi			
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	91,43	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	%	92	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	%	59,52	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	71,42	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat	%	71,43	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	93	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas	%	39,21	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah				DAERAH DAN KERJA SAMA
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%	85	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Non dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%	85	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan Fasilitas Keagamaan dalam kondisi baik	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	63	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Hukum	Angka	92	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	%	96	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
		Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
		Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka	86	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro	Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	85	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	%	85	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral	Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	%	85	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%	87	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	%	1,95	Sekretariat Daerah - BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	%	2,3	Sekretariat Daerah - BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Meningkatnya capaian kinerja BLUD	Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	Sekretariat Daerah - BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	92	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	85	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Meningkatnya Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	%	83	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan Kewilayahan	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	86	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	%	86,5	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Pembangunan Daerah	Daerah yang di usulkan			
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	%	90	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DPRD						
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
		Meningkatnya Fasilitasi Layanan Kehumasan	Nilai survei kepuasan layanan kehumasan	Angka	75	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat
		Meningkatnya Fasilitasi Layanan Persidangan	Nilai survei kepuasan layanan persidangan	Angka	75	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan
PERENCANAAN						
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan Nasional	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	80,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
		Meningkatnya Perencanaan daerah yang berbasis data, hasil evaluasi dan risiko	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	%	87,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
		Meningkatnya Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah dengan Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Kinerja Daerah	%	98,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	89,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	99,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	80,49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	76,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	85,76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	97,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	99,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	87,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	83,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
KEUANGAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
		Tersusunnya dokumen belanja transfer APBD Provinsi tepat waktu	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Tersusunnya dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran
		Tersusunnya dokumen APBD Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran
		Tersusunnya LKPD tepat waktu	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi
		Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaa n dan Kas Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
		Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
		Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	%	50,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
		Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Administrasi BMD yang Andal	%	70,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
		Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
		Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	%	9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Perencanaan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			Pendapatan Daerah			dan Pengembangan Pendapatan
		Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
		Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
		Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengendalian dan Evaluasi
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Daerah Semarang III
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Daerah Purwodadi
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Daerah Wonogiri
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Daerah Rembang
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
		Tercapainya Pendapatan Pajak	Persentase Capaian	%	100	Badan Pengelola

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah UPPD Pemalang	Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang			Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Pendapatan Daerah Cilacap
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
		Tercapainya Pendapatan Pajak	Persentase Capaian	%	100	Badan Pengelola

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah UPPD Kebumen	Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen			Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
		Terlaksananya pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
KEPEGAWAIAN						
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	%	85	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi
		Terpenuhinya Jabatan ASN sesuai dengan Manajemen Talenta	Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	%	92	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi
		Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	10	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
		Meningkatnya kinerja ASN	Persentase peningkatan kinerja ASN	%	85	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
		Terpenuhinya kebutuhan ASN sesuai formasi	Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	%	100	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
		Meningkatnya akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	%	70	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
		Terpetakannya kompetensi ASN	Persentase pemetaan kompetensi ASN	%	100	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
		Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi teknis	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	95,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
		Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	95,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase tingkat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri	%	95,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri
		Terjaganya kualitas mutu pelaksanaan pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Angka	3,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
		Terjaganya kualitas perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
		Terpenuhinya persentase ASN yang lulus Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi	%	50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah	%	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan riset dan inovasi sesuai target	Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi sesuai target	Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kapasitas SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi sesuai kebutuhan	Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan	%	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi
PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
		Tercapainya pelaksanaan pelayanan penghubung	Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan penghubung	%	100	Badan Penghubung - Sekretariat
INSPEKTORAT DAERAH						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
		Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	96,23	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan khusus	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus	%	100	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
		Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang akuntabilitas keuangan daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	100	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	%	100	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya kapabilitas pengelolaan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3	%	35,71	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya penguatan integritas di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas	%	42,85	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya penguatan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80	%	61,9	INSPEKTORAT - Sekretariat
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
		Meningkatnya pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila	Angka	76,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
		Terjaminnya hak-hak sipil dan hak-hak politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	Angka	88,11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri
		Meningkatnya kinerja dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Angka	80,47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
		Meningkatnya peran strategis ormas dan kemandirian ormas dalam mendukung pembangunan	Indeks Kinerja Ormas	Angka	78,26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						dan Organisasi Kemasyarakatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
		Meningkatnya moderasi beragama di masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	75,4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perekonomian	Indeks ketahanan Ekonomi	Angka	2,89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
		Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka penanganan konflik sosial serta menjaga kondusifitas wilayah	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Sumber: Bappeda, 2025.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 yang memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029. RKPD Tahun 2026 ini juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025 – 2045, RPJMN Tahun 2025 - 2029 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045. Serangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2026 disusun secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result,* berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

RKPD Tahun 2026 akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026. Kebijakan dalam RKPD Tahun 2026 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026 untuk mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Tahun 2026 juga menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk di dalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Tengah. Sinergi dari berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut diharapkan akan mendukung tercapainya cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH